

ISSN 2722-9475 (Cetak)  
ISSN 2722-9467 (Online)

**Vol.2 No.12**  
**Mei 2022**

# **Jurnal** **Inovasi** **Penelitian**



**Sekolah Tinggi Pariwisata**  
**Mataram**

# SUSUNAN REDAKSI JURNAL INOVASI PENELITIAN

## **Editor In Chef/Pelaksana**

Lalu Masyhudi, M.Si

## **Section Editor**

Husnul Harifandi, ST

## **Reviewer**

Prof. Adrian Vickers, The University of Sydney  
Prof. Badaruddin Mohamed, M.Sc.,Ph.D., University Sains Malaysia  
Paul Green, Ph.D., School of Social and Political Sciences  
Prof. Dr. I Nyoman Darma Putra, M.Lit., Universitas Udayana  
FX Anjar Tri Laksono, S.T., M.Sc, Universitas Jenderal Soedirman, Scopus  
Id: 57221225628  
Siti Aisyah, M.Si, Politeknik Negeri Media Kreatif PSDKU Medan  
Dr. Sunarno, S.Si, M.Si, Diponegoro University  
Wardiyanta, Universitas Ahmad Dahlan  
Baiti Hidayati, S.T., M.T, POLITEKNIK SEKAYU, Scopus Id: 57217136885  
Rahmad Bala, M.Pd, STKIP Biak, Scopus Id: 57214800254  
Donald Qomaidiasyah Tungkagi, S.Pd., M.A, IAIN Sultan Amai Gorontalo  
Yusvita Nena Arinta, M. Si, IAIN SALATIGA Scopus Id: 57219157407

## **Copy Editor**

Edith Prasetiadi, M.Pd

## **Layout Editor**

Firman Septio Utomo, M.Pd

## **Proofreader**

Lalu Sahiburrahman

# PANDUAN PENULISAN NASKAH JURNAL PENGABDIAN

JUDUL NASKAH PUBLIKASI MAKSIMUM 12 KATA DLM BHS.IND

Oleh

First Author, Second Author & Third Author

<sup>1,2</sup>Institution/affiliation author 1,2; address, tel/fax of institution/affiliation

<sup>3</sup>Institution/affiliation author 3; address, tel/fax of institution/affiliation

Email: <sup>1</sup>xxxx@xxxx.xxx, <sup>2</sup>xxx@xxxx.xxx, <sup>3</sup>xxx@xxxx.xxx

## Abstrak

Abstrak Maksimal 200 kata berbahasa Indonesia/English dengan Times New Roman 12 point. Abstrak harus jelas, deskriptif dan harus memberikan gambaran singkat masalah yang diteliti. Abstrak meliputi alasan pemilihan topik atau pentingnya topik penelitian, metode penelitian dan ringkasan hasil. Abstrak harus diakhiri dengan komentar tentang pentingnya hasil atau kesimpulan singkat.

**Kata Kunci: 3-5 kata kunci, istilah A, istilah B & kompleksitas**

## PENDAHULUAN

Pendahuluan menguraikan latar belakang permasalahan yang diselesaikan, isu-isu yang terkait dengan masalah yang diselesaikan, ulasan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain yang relevan dengan penelitian

## LANDASAN TEORI

Pengacuan pustaka dilakukan dengan menuliskan [nomor urut pada daftar pustaka] mis. [1], [1,2], [1,2,3]. Sitasi kepustakaan harus ada dalam Daftar Pustaka dan Daftar Pustaka harus ada sitasinya dalam naskah. Pustaka yang disitasi pertama kali pada naskah [1], harus ada pada daftar pustaka no satu, yang disitasi ke dua, muncul pada daftar pustaka no 2, begitu seterusnya. Daftar pustaka urut kemunculan sitasi, bukan urut nama belakang. Daftar pustaka hanya memuat pustaka yang benar benar disitasi pada naskah.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian meliputi analisa, arsitektur, metode yang dipakai untuk menyelesaikan masalah, implementasi

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan terhadap hasil penelitian dan pengujian yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian teoritik, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Hasil percobaan sebaiknya ditampilkan dalam berupa grafik atau pun tabel.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Kesimpulan harus mengindikasikan secara jelas hasil-hasil yang diperoleh, kelebihan dan kekurangannya, serta kemungkinan pengembangan selanjutnya. Kesimpulan dapat berupa paragraf, namun sebaiknya berbentuk point-point dengan menggunakan numbering atau bullet.

### Saran

Saran-saran untuk penelitian lebih lanjut untuk menutupi kekurangan penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- **Buku** dengan urutan penulisan: Penulis, tahun, *judul buku* (harus ditulis miring) volume (jika ada), edisi (jika ada), nama penerbit dan kota penerbit .
- [1] Castleman, K. R., 2004, *Digital Image Processing*, Vol. 1, Ed.2, Prentice Hall, New Jersey.
- **Pustaka dalam bentuk artikel dalam majalah ilmiah:**  
Urutan penulisan: Penulis, tahun, judul artikel, *Nama Majalah* (harus ditulis miring sebagai singkatan resminya), nomor, volume dan halaman.
- [3] Yusoff, M, Rahman, S.,A., Mutalib, S., and Mohammed, A. , 2006, Diagnosing Application Development for Skin Disease Using Backpropagation Neural Network Technique, *Journal of Information Technology*, vol 18, hal 152-159.
- **Pustaka dalam bentuk Skripsi/Tesis/Disertasi** dengan urutan penulisan: Penulis, tahun, judul skripsi, *Skripsi/Tesis/Disertasi* (harus ditulis miring), nama fakultas/ program pasca sarjana, universitas, dan kota.
- [4] Prasetya, E., 2006, Case Based Reasoning untuk mengidentifikasi kerusakan bangunan, *Tesis*, Program Pasca Sarjana Ilmu Komputer, Univ. Gajah Mada, Yogyakarta.
- **Pustaka dalam bentuk Laporan Penelitian:**  
Urutan penulisan: Peneliti, tahun, judul laporan penelitian, *Nama Laporan Penelitian* (harus ditulis miring), nama proyek penelitian, nama institusi, dan kota.
- [5] Ivan, A.H., 2005, Desain target optimal, *Laporan Penelitian Hibah Bersaing*, Proyek Multitahun, Dikti, Jakarta.

**Daftar Pustaka hanya memuat semua pustaka yang diacu pada naskah tulisan, bukan sekedar pustaka yang terdaftar.**

ISSN 2722-9475 (Cetak)  
ISSN 2722-9467 (Online)

Vol.2 No.12  
Mei 2022

### Indexed



### REFERENCE MANAGEMENT TOOLS



Print ISSN: 2722-9475



Online ISSN: 2722-9467





ISSN 2722-9475 (Cetak)  
ISSN 2722-9467 (Online)

Jurnal Inovasi Penelitian  
Vol.2 No.12 Mei 2022

DAFTAR ISI

1	<b>HUBUNGAN ANTARA KETERTARIKAN MAHASISWA DENGAN LAGU TERHADAP KEMAMPUAN BERBICARA BAHASA INGGRIS</b> Oleh: Megawati, Dini Fitriani, Neng Nurwiatin, Ivon Mukaddamah	3805-3812
2	<b>RELASI ASAS LEGALITAS HUKUM PIDANA DAN PEMIKIRAN HUKUM ALAM</b> Oleh: Vincentius Patria Setyawan, Hyronimus Rhiti	3813-3822
3	<b>ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PENGGAJIAN KARYAWAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL PADA PENGINAPAN MINIMAX HOMESTAY PADANGSIDIMPUAN</b> Oleh: Putri Rahmaini Suheri, Juliana Nasution, M.E	3823-3830
4	<b>PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI UPT. PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG MEDAN</b> Oleh: Aufia Zahra Fadillah, Juliana Nasution	3831-3836
5	<b>ANALISIS IMPLEMENTASI PEMASARAN PRODUK ASURANSI SYARIAH DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN</b> (KPM Prestasi Agency PT. Prudential Life Assurance Kota Medan) Oleh: Aisha Alvia, Fauzi Arif Lubis	3837-3840
6	<b>PENGARUH KEPEMIMPINAN, BUDAYA ORGANISASI DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. THE UNIVENUS SERANG</b> Oleh: Nazhar Amin Firmansyah, Vera Maria	3841-3848
7	<b>KAJIAN PENGARUH PROFESIONALISME, KOMITMEN ORGANISASI DAN KOMUNIKASI ORGANISASI TERHADAP KINERJA GURU MELALUI KEPUASAN KERJA PADA SMK NEGERI KALIBARU BANYUWANGI</b> Oleh: Yani Dahliani, Agustin Hari, Khusnul Laily Fitria	3849-3858
8	<b>ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGGAJIAN DAN PENGUPAHAN PEGAWAI SEBAGAI UPAYA Mendukung PENGENDALIAN INTERN PADA UPT. PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG MEDAN</b> Oleh: Filza, Juliana Nasution	3859-3864
9	<b>DE-READINESS PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN PANGANDARAN</b> Oleh: Santi Nurmalasari, Khaerul Umam, Herabudin	3865-3878
10	<b>FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP IMPOR BARANG KONSUMSI DI INDONESIA</b> Oleh Juni Mashita	3879-3886
11	<b>ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP CASHBACK DI SHOPEE</b> Oleh Febia Nisaul Chamsa	3887-3898
12	<b>FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KELUHAN <i>HEAT STRAIN</i> PADA PEKERJA PABRIK TAHU DI KECAMATAN JELUTUNG</b> Oleh: Diandri Saputra, Subakir, Abul Ainin Hapis	3899-3904
13	<b>PERANCANGAN SISTEM PEMESANAN PERCETAKAN PADA TOKO BORNEO</b> Oleh Halimatussa'diah	3905-3912

14	<b>PENAMBAHAN SERBUK AMPAS KOPI SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN NILAI KALOR BRIKET LIMBAH KERTAS</b> Oleh Dianta Mustofa Kamal	3913-3920
15	<b>Diseminasi Media Promosi Kampung Wisata Baluwarti Guna Meningkatkan <i>Brand Identity</i> Destinasi Pariwisata Budaya Kota Surakarta</b> Oleh: Nanang Wijayanto, Tomi Agfianto, Deria Adi Wijaya	3921-3926
16	<b>FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KELUHAN GANGGUAN PERNAFASAN PADA PEKERJA BATU BATA DI DESA TALANG BELIDO KECAMATAN SUNGAI DELAM KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2021</b> Oleh: Muhammad Ainurrazaq, Abul Ainin Hapis, Hamdani	3927-3932
17	<b>FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KELUHAN NYERI PUNGGUNG BAWAH PADA PEKERJA BATU BATA DI DESA TALANG BELIDO TAHUN 2021</b> Oleh: Tito Nurfaejri, Subakir, Abul Ainin Hapis	3933-3938
18	<b>EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN DARING MENGGUNAKAN MEDIA WEB PJJ MATA PELAJARAN TIK SELAMA PANDEMI COVID-19 DI SMAN 1 JAMPANGKULON</b> Oleh: Muhammad Iqbal, Heni Wulandari, Thariq Aziz	3939-3952
19	<b>PENGARUH EDUKASI KESEHATAN TERHADAP PENGETAHUAN TENTANG KEKERASAN SEKSUAL DAN KDRT</b> Oleh: Hardilah Ayu Ramadani, Farcha Fahriza, Fitria Simatupang, Retno Dwiyan Putri, Putra Apriadi Siregar	3953-3956
20	<b>KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM PENERAPAN SIMKAH (SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH) DI KUA KECAMATAN CIPARAY KABUPATEN BANDUNG</b> Oleh Neng Yanti	3957-3970
21	<b>PENGUKURAN KINERJA PEGAWAI DENGAN METODE <i>ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS</i> DALAM PEMBERIAN TUNJANGAN PEGAWAI DI DESA CIHERANG KECAMATAN PACET KABUPATEN CIANJUR</b> Oleh: Eryna Syahadatina A.B, Cecep Wahyu Hoerudin, Husen Saeful Anwar	3971-3984
22	<b>POLA OPERASI KEAMANAN LAUT DIPERAIRAN KEPULAUAN INDONESIA</b> Oleh: Mirza, Hikmat Zakky Almubaroq	3985-3994
23	<b>SPORT HYPNOSIS: EGO STATE DALAM MEREDUKSI ANXIETY ATLET TAE KWON DO</b> (Studi Kasus pada Atlet PPOPD Tae Kwon Do Kota Salatiga) Oleh: Guntur Ratih Prestifa Herdinata, Mona Saparwati, Noer Indah Aprianti	3995-4004
24	<b>ANALISIS EFEKTIVITAS APLIKASI CASH MANAGEMENT SYSTEM (CMS) KCPSY BANK SUMUT SYARIAH MULTATULI</b> (Studi Bank Sumut Syariah Multatuli ) Oleh Rahmawati Zein	4005-4018
25	<b>FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KENAIKAN BERAT BADAN IBU HAMIL KEKURANGAN ENERGI KRONIS DI PUSKESMAS RALLA KABUPATEN BARRU</b> Oleh: Rismawati, Wirawati Amin, Marhaeni, Indriani	4019-4024
26	<b>PENGARUH KESADARAN, PENGETAHUAN, PELAYANAN FISKUS DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA SURAKARTA</b> Oleh: Sukma Trihana, Ismunawan	4025-4036
27	<b>STRATEGI PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH TERHADAP PENJUALAN SARUNG TENUN KHAS BUTON</b> Oleh Hastuti	4037-4046

28	<b>PENGARUH BUDAYA ORGANISASI, PENGEMBANGAN KARIR, DAN EFIKASI DIRI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. PLN (PERSERO) UNIT PELAYANAN JASA LOMBOK TENGAH</b> Oleh: Mustaan, Nizar Hamdi	4047-4060
29	<b>FAKTOR RISIKO MUSKULOSKELETAL DISORDERS (MSDS) PADA PEKERJA PENYORTIR SAMPAH DI UPTD PENGELOLAAN SAMPAH TALANG GULO</b> Oleh: Rahmat Faisal, Rara Marisdayana, Eti Kurniawati	4061-4066
30	<b>DIGITAL GOVERNMENT DALAM PELAYANAN KEPENDUDUKAN MELALUI APLIKASI SAKEDAP DI KABUPATEN BANDUNG</b> Oleh: Nadiya Asyri Nur Fadillah, Rahayu Kusumadewi, Nanang Suparman	4067-4082
31	<b>PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP EFEKTIVITAS REALISASI ANGGARAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANGERANG SELATAN</b> Oleh Fitri Safitri	4083-4094
32	<b>PERAN PENDIDIKAN KEDOKTERAN DALAM PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI KESEHATAN, STUDI LITERATUR</b> Oleh Reza Yuridian Purwoko	4095-4100
33	<b>ULAMA DAN DAYAH DALAM NOMEKKLATUR MASYRAKAT ACEH</b> Oleh Mursyidin Ar-Rahmany	4101-4122
34	<b>FEASIBILITY STUDY OF TOUR GUIDE MANAGEMENT BUSINESS</b> Oleh: Ahmad Kurniawan, Debby Rusmiati, Dewi Turgarini, Caria Ningsih	4123-4128
35	<b>EFEKTIVITAS HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN TAHUN 2017-2019 DI KOTA BANDUNG</b> Oleh: Muhamad Rafi Firdaus, Husen Saeful Anwar, Ibnu Malik	4129-4138
36	<b>DIGITALISASI EKONOMI SYARIAH DI KALANGAN KAUM MILENIAL UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH</b> Oleh: Ratu Surya Atmajaya, Misbakhul Munir Mubarak	4139-4144
37	<b>STRATEGI DINAS KESEHATAN DALAM MENEKAN LAJU PENDERITA STUNTING DI KABUPATEN BUTON SELATAN</b> Oleh: Nur Azizah, Nastia, Anwar Sadat	4145-4152
38	<b>BERPENGARUHKAH DESENTRALISASI FISKAL DAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN?</b> Oleh: Elva Dona, Gentha Gautama , Irwan Muslim	4153-4164
39	<b>GAYA KEPEMIMPINAN INSTRUKSIONAL KEPALA SEKOLAH PADA ERA PANDEMI COVID 19</b> Oleh: Innova Riana Yanti Sinambela, Sri Ganda Cibro, M. Joharis Lubis	4165-4170
40	<b>PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN VAN HIELE BERBASIS LURING PADA MATERI SEGIEMPAT DI KELAS VII SMP NEGERI 2 YENDIDORI</b> Oleh: Suzana A.M.Weyai, Elizabet Kafiar, Markus Talu Hurit	4171-4178
41	<b>PERANCANGAN POROS PADA MESIN PENGURAI LIMBAHKELAPA MUDA</b> Oleh: Juni Mashita, Elbi iseno	4179-4186
42	<b>ASIMILASI BAGI NARAPIDANA DALAM RANGKA PELAKSANAAN INTEGRASI UNTUK PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19 PADA BALAI PEMASYARAKATAN KLAS I PADANG</b> Oleh Hendrizal Fira	4187-4202

<b>43</b>	<b>ANALISIS PENGGUNAAN APLIKASI SIPBOS DALAM PENGELOLAAN DANA BOS DI KECAMATAN BINTAN TIMUR</b> <b>Oleh Nurfitri Zulaika, Ulfa Oktavani Nasution Ika Rani Kusuma Dewi</b> <b>Muhammad Isa Alamsyahbana Ranti Utami</b>	<b>4203-4210</b>
<b>44</b>	<b>RESPON PERTUMBUHAN TANAMAN KANGKUNG DARAT (<i>Ipomoea reptans</i> Poir) TERHADAP PEMBERIAN PUPUK ORGANIK DI LAHAN SAWAAH DESA KELONDONM</b> <b>Oleh Agus Burhan</b>	<b>4211-4218</b>



**HUBUNGAN ANTARA KETERTARIKAN MAHASISWA DENGAN LAGU  
TERHADAP KEMAMPUAN BERBICARA BAHASA INGGRIS**

Oleh

Megawati<sup>1)</sup>, Dini Fitriani<sup>2)</sup>, Neng Nurwiatin<sup>3)</sup>, Ivon Mukaddamah<sup>4)</sup>  
1,2,3,4STKIP Kusumanegara

Email: <sup>1</sup>[Megawati86@stkipkusumanegara.ac.id](mailto:Megawati86@stkipkusumanegara.ac.id), <sup>2</sup>[Dinifitriani@stkipkusumanegara.ac.id](mailto:Dinifitriani@stkipkusumanegara.ac.id),  
<sup>3</sup>[Nengnurwiatin30@gmail.com](mailto:Nengnurwiatin30@gmail.com), <sup>4</sup>[Ivon@stkipkusumanegara.ac.id](mailto:Ivon@stkipkusumanegara.ac.id)

**Abstract**

The prevalence of gout in the population in America based on the National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2007-2010 is equal to 3.9% (8.3 million). Gout is estimated to occur in 840 people out of every 100,000 people in Indonesia. Batam City has elderly people with gout as much as 4133 and most of them are in Puskesmas Batu Aji as many as 615 cases. The accumulation of uric acid levels one of which is caused by physical activity. The condition of physical activity in the elderly in Indonesia was obtained by 42% of the elderly with mild physical activity, 37% of the elderly with moderate physical activity, and 21% had severe physical activity. This study aimsto determine the relationship between physical activity and levels of uric acid (gout) in the elderly. This type of research is an observational study with cross sectional design. The population in this study were all elderly who suffer from gout in the working area of the Puskesmas Batu Aji in Batam. The sampling technique used in this study was purposive sampling of 61 elderly. The results of this study found that most of the elderly experienced high uric acid levels in heavy physical activity as many as 25 elderly (41.0%). From the chi square statistical test results obtained that the value of p value = 0.005 (<0.05) then Ha is accepted, this shows that there is a significant relationship between Physical Activity and Gout Levels in the Elderly in the Working Area of Puskesmas Batu Aji in Batam City 2020. It is hoped that the elderly can reduce strenuous physical activity in order to prevent the buildup of uric acid levels in the elderly

**Keywords: Physical Activities; Uric Acid (Gout) Level, Uric Acid (Gout)**

**PENDAHULUAN**

Menua (menjadi tua) adalah suatu proses menghilangnya secara perlahan- lahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri/mengganti dan mempertahankan fungsi normalnya sehingga tidak dapat bertahan terhadap infeksi dan mamperbaiki kerusakan yang diderita (Contantinides, 1994, dalam Aspiani, 2014).

Perkembangan penduduk lansia di dunia terdapat 703 juta orang berusia 65 tahun atau lebih didunia pada tahun 2019 (*World Population Ageing*, 2019). Di Indonesia jumlah penduduk lansia mengalami peningkatan dari 18 juta jiwa (7,56%) pada tahun 2010, menjadi 25,9

juta jiwa (9,7%) pada tahun 2019 (KEMENKES, 2019). Lansia di kota Batam pada tahun 2020 adalah sebanyak 41.127 jiwa yang terdiri dari laki-laki 20.504 jiwa dan perempuan 20.623 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2015).

Peningkatan jumlah penduduk usia lanjut akan memunculkan berbagai penyakit kronis pada lansia, salah satu diantaranya adalah gout. Prevalensi gout pada populasi penduduk di Amerika berdasarkan National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2007- 2010 yaitu sebesar 3,9% (8,3 juta) dengan rincian pada laki-laki 5,9% (6,1 juta), dan perempuan 2,0% (2,2 juta) (Novianti, dkk,

2019).

Prevalensi penyakit gout di Indonesia terjadi pada usia di bawah 34 tahun sebesar 32% dan di atas 34 tahun sebesar 68% (Tinah, 2010, dalam Jaliana, dkk, 2017). Data Dinas Kesehatan tahun 2014 penyakit gout sebanyak 4.260 jumlah kasus. Paling banyak terjadi di Kota Tanjungpinang yaitu terdapat

1.106 jumlah kasus yang mengalami gout (Dinkes Provinsi Kepri, 2014).

Kota Batam memiliki lansia dengan gout sebanyak 4133 lansia yang terdiri dari lansia laki-laki 1475 orang dan lansia wanita 2663 orang (Dinkes Kota Batam, 2018).

Penyakit asam urat atau gout adalah penyakit metabolic yang ditandai dengan penumpukan asam urat yang mengakibatkan nyeri pada tulang dan sendi, sangat sering ditemukan pada kaki bagian atas, pergelangan dan kaki bagian tengah (Moreau, David, 2005, dalam Aspiani, 2014).

Peningkatan kadar asam urat dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor risiko yaitu diet tinggi purin, penurunan filtrasi glomerulus, pemberian obat diuretik, produksi berlebihan yang diakibatkan adanya defek primer pada jalur penghematan purin, minuman beralkohol, olahraga atau aktivitas fisik, dan obat-obatan yang dapat menghambat ekskresi asam urat oleh ginjal. (Aspiani, 2014).

Aktivitas fisik adalah pergerakan tubuh akibat aktivitas otot-otot skelet yang mengakibatkan pengeluaran energi (Ekasari, 2018). Aktivitas yang dilakukan oleh manusia berkaitan dengan kadar asam urat yang terdapat dalam darah. Aktivitas fisik seperti olahraga atau gerakan fisik akan menurunkan ekskresi asam urat dan meningkatkan produksi asam laktat dalam tubuh. (Aspiani, 2014).

Kondisi aktivitas fisik pada lansia di Indonesia didapat 42% lansia dengan aktivitas fisik ringan, 37% lansia dengan aktivitas fisik sedang, dan 21% memiliki aktivitas fisik berat. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian

besar lansia hanya beraktifitas ringan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan dampak dari kurangnya aktivitas fisik merupakan salah satu pemicu untuk timbulnya penyakit berbahaya seperti asam urat, hipertensi, diabetes militus, dan penyakit jantung (Bustan, 2007, dalam Purnama, 2019)

Usaha pencegahan juga bermanfaat bagi penderita asam urat agar penyakit tidak menjadi lebih parah, tentunya harus disertai pemakaian obat yang ditentukan oleh dokter. Agar terhindar dari komplikasi fatal asam urat dapat dilakukan pencegahan, antara lain mengurangi asupan tinggi purin, menghindari kegemukan (obesitas) dengan menjaga berat badan normal atau tidak berlebihan, mengurangi aktivitas fisik yang berlebihan karena akan meningkatkan kadar asam urat dalam darah diakibatkan oleh ketidakmampuan ginjal mengeluarkan asam urat berlebih dari dalam tubuh dan mengkonsumsi banyak air putih untuk membantu pengeluaran asam urat (Fauzi, 2018).

Oleh karena hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti “Hubungan Antara Aktivitas Fisik Dengan Kadar Asam Uurat (*Gout*) Pada Lansia Di Wilayah Kerja Puskesmas Batu Aji Kota Batam Tahun 2020”.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian observasional dengan rancangan *crosssectional*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh lansia yang menderita penyakit gout di wilayah kerja Puskesmas Batu Aji Kota Batam, sebanyak 615 lansia. Sampel terdiri dari lansia yang menderita gout sebanyak 61 lansia. Pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan kriteria *puposive sampling*. Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan *non probability sampling* dengan cara pemilihan sampel diantara populasi sesuai dengan kriteria inklusi.

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kadar asam urat pada lansia. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah aktifitas fisik pada lansia.

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, lembar kuisioner baku aktivitas fisik PAL (*Physical Activity Level*) dan data rekam medis lansia yang menderita asam urat.

## HASIL PENELITIAN

### A. Data Umum

**Tabel 1.** Karakteristik Lansia Berdasarkan Jenis Kelamin di Puskesmas Batu Aji Kota Batam Tahun 2020

Jenis kelamin	f (n)	(%)
Laki –laki	20	32.8
Perempuan	41	67.2
<b>Jumlah</b>	<b>61</b>	<b>100</b>

Berdasarkan tabel 1, didapatkan hasil sebagian besar berjenis kelamin perempuan (67,2%) sebanyak 41 lansia.

**Tabel 2.** Karakteristik Lansia Berdasarkan Pendidikan di Puskesmas Batu Aji Kota Batam Tahun 2020.

Pendidikan	f (n)	(%)
Pendidikan Dasar (SD/SMP)	20	32,8
Pendidikan Menengah (SMA/SMK)	35	57.4
Pendidikan Tinggi (D3/S1)	6	9.8
<b>Jumlah</b>	<b>61</b>	<b>100</b>

Berdasarkan tabel 2, didapatkan hasil Sebagian besar lansia berpendidikan menengah (SMA/SMK) (57.4%) sebanyak 35 Lansia.

**Tabel 3.** Karakteristik Lansia Berdasarkan Pekerjaan di Puskesmas Batu Aji Kota Batam Tahun 2020

Pekerjaan	f (n)	(%)
Tidak Bekerja	39	63.9
Bekerja	22	36.1
<b>Jumlah</b>	<b>61</b>	<b>100</b>

Berdasarkan tabel 4.3, didapatkan hasil sebagian besar Lansia tidak bekerja (63.9%) berjumlah 39 Lansia.

### B. Data Khusus

**Tabel 4.** Distribusi Frekuensi Aktivitas Fisik Lansia di Puskesmas Batu Aji Kota Batam Tahun 2020

Aktivitas Fisik Lansia	f (n)	(%)
Ringan	21	34.4
Sedang	11	18.0
Berat	29	47.5
<b>Jumlah</b>	<b>61</b>	<b>100</b>

hasil sebagian besar lansia memiliki aktivitas fisik berat (47.5%) sebanyak 29 Lansia.

**Tabel 5.** Distribusi Frekuensi Kadar Asam Urat Lansia di Puskesmas Batu Aji Kota Batam Tahun 2020

Kadar Asam Urat Lansia	F (n)	(%)
Kadar Asam Urat Normal	19	31.1
Kadar Asam Urat Tinggi	42	68.9
<b>Jumlah</b>	<b>61</b>	<b>100</b>

**Tabel 6.** Distribusi Frekuensi Hubungan Antara Aktivitas Fisik Dengan Kadar Asam Urat (Gout) Pada Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Batu Aji Kota Batam Tahun 2020

Aktivitas Fisik	Kadar Asam Urat (Gout)				Total		P Value
	Kadar Asam Urat Normal		Kadar Asam Urat Tinggi				
	N	%	N	%	N	%	
Ringan	12	19.7	9	14.8	21	34.4	0,005
Sedang	3	4.9	8	13.1	11	18.0	
Berat	4	6.6	25	41.0	29	47.5	
Total	19	31.1	42	68.9	61	100	

Berdasarkan tabel 6, didapatkan hasil sebagian besar lansia mengalami kadar asam urat tinggi pada aktivitas fisik berat sebanyak 25 lansia (41.0%).

Berdasarkan hasil analisa Chi- Square diketahui bahwa nilai p value sebesar  $0,005 < 0,05$  (yang diperlihatkan dalam kolom Asymp.Sig) pada output komputer, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima artinya terdapat hubungan antara aktivitas fisik dengan kadar asam urat (gout) pada lansia.

#### 1. Aktivitas Fisik

Hasil penelitian di Wilayah Kerja Puskesmas Batu Aji, sebagian besar lansia memiliki aktivitas fisik berat 47,5% sebanyak 29 lansia.

Hasil penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauzi (2018) yang berjudul Hubungan Aktivitas Fisik dengan Kadar Asam Urat di Padukuhan Bedog Trihanggo Gamping Sleman Yogtakarta data di dapatkan mayoritas responden memiliki aktivitas fisik berat yaitu sebanyak 32 reponden (50.8%).

Hasil penelitian ini hampir sama dengan penelitian Fauzan (2016) yang berjudul Hubungan Indeks Massa Tubuh (IMT), Asupan Purin Dan Aktivitas fisik Dengan Kejadian Gout Pada Lansia Di Wilayah Kerja Puskesmas Tanjungsari Pacitan memiliki aktivitas fisik ringan 65 responden (85,5%).

Hasil penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan Dayana dan Bahrudin (2015) dalam Hubungan Antara

Intensitas Aktivitas Fisik Dan Kadar Asam Urat Serum Pada Populasi.

Sindrom Metabolik, lansia memiliki aktivitas fisik berat sebanyak 11 responden memiliki aktivitas fisik berat (34,4%).

Saat dilakukan penelitian jenis aktivitas fisik yang banyak dilakukan lansia yaitu aktivitas fisik berat yang dilakukan selama bekerja baik di dalam rumah ataupun diluar rumah, tidur, dan waktu senggang seperti aktivitas santai (nonton Tv dan mengobrol), serta melakukan aktivitas dengan duduk.

Aktivitas fisik terdiri dari aktivitas selama bekerja, tidur, dan pada waktu senggang. Latihan fisik yang terencana, terstruktur, dan dilakukan secara berulang kali termasuk aktivitas fisik. Aktivitas fisik sedang yang dilakukan secara terus menerus dapat mencegah resiko terjadinya penyakit tidak menular seperti penyakit pembuluh darah, diabetes, kanker dan lainnya (Kristanti et al., 2002, dalam Ekasari, 2018).

#### 2. Kadar Asam Urat (Gout)

Hasil penelitian di Wilayah Kerja Puskesmas Batu Aji, sebagian besar lansia mengalami kadar asam urat tinggi 68,9% sebanyak 42 lansia.

Hasil penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauzi (2018) yang berjudul Hubungan Aktivitas Fisik dengan Kadar Asam Urat di Padukuhan Bedog Trihanggo Gamping Sleman Yogtakarta. Sebagian besar lansia mengalami asam urat yaitu sebanyak 37 lansia (58.8%).

Hasil penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan Dayana dan Bahrudin (2015) dalam Hubungan Antara Intensitas Aktivitas Fisik Dan Kadar Asam Urat Serum Pada Populasi Sindrom Metabolik, lansia yang mengalami asam urat sebanyak 9 lansia (81.8%).

Sebagian besar lansia saat dilakukannya penelitian mengalami kadar asam urat tinggi dikarenakan beberapa faktor pencetus yaitu pola makan sehari-hari yang mengandung tinggi purin, aktivitas fisik, dan

sejumlah obat-obatan yang dapat menghambat ekresi asam urat oleh ginjal

Aspiani (2014) mengemukakan beberapa factor pencetus terjadinya endapan kristal asam urat yaitu diet tinggi purin, penurunan filtrasi glomerulus, pemberian obat diuretic, produksi yang berlebihan dapat disebabkan oleh adanya defek primer pada jalur penghematan purin (defisiensi hipoxantin fosforibosil transferase), minuman beralkohol, aktivitas fisik, dan sejumlah obat-obatan yang dapat menghambat ekresi asam urat oleh ginjal sehingga dapat menyebabkan serangan gout.

### 3. Hubungan Antara Aktivitas Fisik Dengan Kadar Asam Urat (Gout) Pada Lansia Di Wilayah Kerja Puskesmas Batu Aji Kota Batam Tahun 2020

Hasil Penelitian yang dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Batu Aji Kota Batam, sebagian besar lansia memiliki kadar asam urat tinggi pada aktivitas fisik berat sebanyak 25 lansia (41.0%).

Hasil penelitian ini sesuai dengan uji statistik Chi-Square diperoleh nilai P-value sebesar  $0,005 < 0,05$ . Hal ini berarti terdapat hubungan yang signifikan antara aktifitas fisik dengan kadar asam urat (gout) pada lansia di wilayah kerja Puskesmas Batu Aji Kota Batam 2020.

Hasil penelitian ini hampir sama dengan penelitian Fauzi (2018), Hubungan Aktivitas Fisik Dengan Kadar Asam Urat Di Padukuhon Bedog Trihanggo Gamping Sleman Yogyakarta, menunjukkan hasil yaitu  $p = 0,000$  dengan nilai koefisien korelasi ( $r$ ) sebesar 0,458 yang artinya keerratan hubungan dalam kategori sedang.

Hasil penelitian ini hampir sama dengan Dayana dan Bahrudin (2015) dalam Hubungan Antara Intensitas Aktivitas Fisik Dan Kadar Asam Urat Serum Pada Populasi Sindrom Metabolik, berdasarkan uji chi-square antara kategori intensitas aktivitas fisik dan kadar asam urat serum diperoleh hasil bermakna dengan nilai  $p = 0,023$  dan rasio prevalensi 2,56. Dari hasil tersebut

terdapat hubungan antara intensitas aktivitas fisik dan kadar asam urat serum.

Aktivitas fisik dapat mempengaruhi kadar asam urat dikarenakan aktivitas fisik akan menyebabkan peningkatan asam laktat. Asam laktat tersebut akan menurunkan pengeluaran asam urat. Apabila asam urat tidak dapat dikeluarkan oleh ginjal maka akan terjadi penumpukan asam urat (Yenrina, dkk, 2014).

Penumpukan asam urat akan mengakibatkan nyeri sendi, sangat sering ditemukan pada kaki bagian atas, pergelangan dan kaki bagian tengah (Moreau, David, 2005, dalam Aspiani, 2014). Kesimpulan peneliti dalam penelitian aktivitas fisik dengan kadar asam urat (gout) di wilayah Kerja Puskesmas Batu Aji Kota Batam 2020, sebagian besar lansia memiliki aktivitas fisik berat mengalami kadar asam urat tinggi yang disebabkan oleh aktivitas yang dilakukan selama bekerja baik di dalam rumah ataupun diluar rumah, tidur, dan waktu senggang seperti aktivitas santai (nonton Tv dan mengobrol), serta melakukan aktivitas dengan duduk, maka dari itu aktivitas fisik berat dapat meningkatkan kadar asam urat pada lansia dan lansia dengan aktivitas fisik ringan sebagian besar tidak mengalami asam urat.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Aktivitas fisik lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Batu Aji Kota Batam Tahun 2020 sebagian besar memiliki aktivitas fisik berat 47.5% berjumlah 29 lansia.

2. Kadar asam urat (gout) pada lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Batu Aji Kota Batam Tahun 2020, sebagian besar mengalami kadar asam urat tinggi 68.9% sebanyak 42 lansia.

Distribusi Frekuensi Antara Aktivitas Fisik dengan Kadar Asam Urat (Gout) pada lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Batu Aji Kota Batam Tahun 2020,  $< 0,05$

### Saran

#### 1. Bagi Peneliti

Peneliti dapat memberikan manfaat tidak hanya saat melakukan penelitian namun juga dapat mengaplikasikan hasil penelitian yang dilakukan.

#### 2. Bagi Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan terutama perawat untuk dapat lebih baik lagi melakukan asuhan keperawatan dalam upaya mencegah dampak aktivitas fisik pada lansia seperti terjadinya kadar asam urat tinggi yang dapat terjadi pada lansia.

#### 3. Bagi Institusi Pendidikan

Agar dapat meningkatkan mutu pendidikan kesehatan yang berkompetensi dalam aplikasi yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta diharapkan pihak institusi pendidikan dapat menunjang kebutuhan peneliti dalam penyediaan sumber-sumber yang optimal terkait dengan aktivitas fisik dan kadar asam urat pada lansia.

#### 4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan informasi dan acuan serta dapat bermanfaat agar dapat meningkatkan data pengembangan penelitian khususnya dalam masalah asam urat pada lansia yang tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas fisik saja, namun juga dengan variabel-variabel lain yang mempengaruhi kadar asam urat.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arpiana. (2017). *Hubungan Menopause Dengan Kadar Asam Urat Dalam Darah*. Skripsi. Program Studi Diploma 4 Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Medika, Jombang.
- [2] Aspinai, R.Y. (2014). *Buku Ajar Asuhan Keperawatan Gerontik Aplikasi Nada Nic, Dan Noc*. Jilid 1. Penerbit Buku Kesehatan. Jakarta.
- [3] Badan Pusat Statistik Jakarta. (2015). *Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau 2010-2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- [4] Dinas Kesehatan Provinsi Kepri. (2014). *Profil Dinas Kesehatan Provinsi Kepri 2014*. Kepri: Dinas Kesehatan Provinsi Kepri
- [5] Dinas Kesehatan Kota Batam. (2018). *Profil Dinas Kesehatan Kota Batam 2018*. Batam : Dinas Kesehatan Kota Batam
- [6] Dinas Kesehatan Kota Batam. (2019). *Profil Dinas Kesehatan Kota Batam 2019*. Batam : Dinas Kesehatan Kota Batam.
- [7] Dayana, B., & Bahrudin, U. (2015). Hubungan Antara Intensitas Aktivita Fisik Dan Kadar Asam Urat Serum Pada Populasi Sindrom Metabolik. *Media Medika Muda* 4 (4), 509
- [8] Donsu, J.D. (2017). *Metodologi Penelitian Keperawatan*. Edisi 1. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- [9] Ekasari. M.F. (2018). *Meningkatkan Kualitas Hidup Lansia Konsep Dan Berbagai Intervensi*. Wineka Media. Malang.
- [10] Festi. P. (2014). *Buku Ajar Lansia "Lanjut Usia, Perspektif Dan Masalah*. UMSurabaya Publising. Surabaya
- [11] Fauzan. A. (2016). *Hubungan Indeks Massa Tubuh (IMT), Asupan Purin Dan Olahraga Dengan Kejadian Gout Arthritis Pada Lansia Di wilayah Kerja Puskesmas Tanjungsari Pacitan*. Skripsi. Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- [12] Fauzi, M. (2018). *Hubungan Aktivitas Fisik Dengan Kadar Asam Urat Di Padukuhan Bedog Trihanggo Gamping Sleman Yogyakarta*. Skripsi. Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyiyah Yogyakarta, Yogyakarta.
- [13] Kementerian Kesehatan RI. (2019). *Indonesia Masuki Periode Aging Population*. Jakarta: Kemenkes RI

- [14] Kristanto, V.H. (2018). Metodologi Penelitian
- [15] Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah. Edisi 1. CV Budi Utama. Yogyakarta.
- [16] Muhint, A., & Siyoto, S. (2016). Pendidikan Keperawatan Gerontik. CV Andi Offset. Yogyakarta
- [17] Novianti, A., Ulfi, E., Hartati, L.S. (2019). Hubungan Jenis Kelamin, Status Gizi, Konsumsi Susu Dan Olahannya dengan Kadar Asam Urat Pada Lansia. Jurnal Gizi Indonesia, 7 (2), 134.
- [18] Nurarif, A.H. (2015). Aplikasi Nanda Nic- Noc Asuhan Keperawatan Berdasarkan Diagnosa Medis. Jilid 2. Mediaction. Jakarta
- [19] Nursalam. (2016). Konsep Dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan. Edisi 2. Salemba Medika. Yogyakarta
- [20] Nursilmi. (2013). Hubungan Pola Konsumsi, Status Gizi, Dan Aktivitas Fisik Dengan Kadar Asam Urat Lansia Wanita Peserta Posbindu Sinarsari. Skripsi. Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat.
- [21] Purnama, H., & Suahda, T. (2019). Tingkat Aktivitas Fisik Pada Lansia Di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Jurnal Keperawatan Komprehensif, 5 (2), 103.
- [22] Sinaga, T.R., & Hulu, V.T. (2019). Analisis Data Statistik Parametrik Aplikasi SPSS dan Statcal. Yayasan Kita Menulis. Jakarta.
- [23] United Nations Department of Economic and Social Affairs Population Division. World Population Ageing. ST/ESA/SERA/430.2019

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN



---

**RELASI ASAS LEGALITAS HUKUM PIDANA DAN PEMIKIRAN HUKUM ALAM**

Oleh:

Vincentius Patria Setyawan<sup>1)</sup>, Hyronimus Rhiti<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email : <sup>1</sup>[vincentpatria@gmail.com](mailto:vincentpatria@gmail.com), <sup>2</sup>[hyronimusrhiti01@gmail.com](mailto:hyronimusrhiti01@gmail.com)

**Abstract**

This research is motivated by legal problems/issues related to the position of natural law related to the application of the principle of legality. The emergence of the principle of legality which later developed into a fundamental principle and is firmly held in the enforcement of criminal law is in line with the development of the flow of positivism. The principle of legality has a close relationship with positivism, if positivism emphasizes that outside the written legislation there is no law, then the principle of legality also determines that outside the rules of criminal law there is no criminal law. The close relationship between the principles of legality and positivism has given birth to a legal certainty in providing protection to criminals so that they are not treated arbitrarily by the rulers (kings) and judges. However, a problem arises that cannot be answered with positivism and the principle of legality which puts forward the written form of law as the only legal basis for convicting someone, namely when the development of crime is faster than the development of the law. Based on these conditions, it would be necessary to re-examine natural law, which actually contains general principles for the application of a more basic law, not only emphasizing the written aspect of the law. This research is a normative legal research that examines the legal principle, namely the principle of legality against natural law. This study of the principle of legality uses a conceptual approach by studying the doctrines/theories regarding the principle of legality to find out the study of natural law on the principle of legality, in order to provide a critique of the limitations of the principle of legality in accommodating the development of criminal acts. The results of this research are prescriptive, namely answering the problem by providing a proper solution (*das sollen*) to the formulation of the ideal legality principle to accommodate the development of criminal acts.

**Keywords: Legality Principle, Criminal Law, Natural Law**

**PENDAHULUAN**

Setiap orang yang mempelajari hukum pidana, sejak awal pasti mempelajari salah satu asas yang fundamensial yakni asas legalitas (principle of legality atau *legaliteit beginsel*). Asas legalitas dirumuskan dalam beberapa kalimat diantaranya adalah<sup>1</sup> *nullum delictum nulla poena sine praevea lege poenali* (tiada delik, tiada pidana, tanpa undang-undang pidana terlebih dahulu), *nullum delictum nulla poena sine praevea lege* (tiada delik, tiada

pidana, tanpa undang-undang terlebih dahulu) atau *nulla crimen nulla poena sine praevea lege* (tiada kejahatan, tiada pidana, tanpa undang-undang terlebih dahulu).

Moeljatno mendefinisikan asas legalitas sebagai: tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.<sup>2</sup> Sedangkan Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan asas legalitas sebagai: tiada seorang pun dapat dipidana karena melakukan

---

<sup>1</sup> Lobby Loqman, 2004, Perkembangan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia, Makalah, halaman 5.

<sup>2</sup> Moeljatno, 2000, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, halaman 23.

suatu perbuatan jika tak ada aturan undang-undang yang mengatur sebelum perbuatan dilakukan.<sup>3</sup> Berdasarkan beberapa definisi asas legalitas tersebut, secara garis besar asas legalitas menghendaki adanya aturan perundang-undangan yang mengatur suatu perbuatan terlebih dahulu sebelum menjatuhkan pidana bagi orang yang melanggar.

Asas legalitas yang berlaku di Indonesia merupakan konsekuensi yang terjadi oleh karena Indonesia secara garis besar condong ke dalam sistem hukum Eropa Kontinental, sistem hukum yang dianut oleh negara Belanda yang sekian lamanya menjajah Indonesia. Belanda mengatur asas legalitas di dalam Pasal 1 ayat (1) Wetboek van Strafrecht yang menentukan: “*Geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan voorafgegane wettelijk strafbepaling*” (tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas ketentuan-ketentuan pidana yang terlebih dahulu ada dalam undang-undang).<sup>4</sup> Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Wetboek van Strafrecht dapat terlihat beberapa karakteristik hukum pidana di dalam negara yang menganut civil law, salah satunya negara Belanda. Karakteristik tersebut diantaranya adalah hukum pidana adalah harus merupakan hukum undang-undang, dan pembatasan kekuasaan hakim.<sup>5</sup>

Selain negara Belanda, negara Perancis selaku negara yang pernah menjajah Belanda juga mengatur asas legalitas di dalam undang-undang hukum pidananya yakni di dalam Code Penal. Pasal 4 *Code Penal* Perancis menentukan: “*Nulle contravention, nul delit, nul crime ne peuvent etre punis de peines qui n’etaient pas prononcees par la loi avant qu’ils fussent commis*” (tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada, tiada delik, tiada kejahatan

jika tidak ada ancaman pidana yang dinyatakan dalam undang-undang terlebih dahulu). Pasal 4 Code Penal Perancis tersebut menunjukkan bahwa di dalam hukum pidana terdapat 4 (empat) unsur penting yakni: kualifikasi perbuatan pidana, undang-undang hukum pidana yang harus diberlakukan, sumber hukum pidana, dan sistem hukum pidana.<sup>6</sup>

Ide dasar munculnya asas legalitas berawal dari Habeas Corpus Act yang dirumuskan di Inggris pada tahun 1679. Habeas Corpus Act merupakan aturan hukum tentang “*for the better securing the liberty of the subject, and for prevention of imprisonment beyond the seas*”. Pada hakikatnya, Habeas Corpus Act mengatur tentang perlindungan terhadap kebebasan warga negara Inggris serta perlindungan terhadap peradilan pidana yang semena-mena. Habeas Corpus Act secara tegas membatasi kewenangan raja dan hakim dalam peradilan pidana dan mengaturnya dalam bentuk undang-undang.<sup>7</sup>

Sebelum Habeas Corpus Act, sebenarnya gagasan mengenai asas legalitas sudah diatur di dalam Magna Charta (1215) dan rancangan undang-undang Bill of Rights (1628), yang dalam perkembangannya diatur sebagai undang-undang dalam Habeas Corpus Act. Peningkatan dari rancangan undang-undang Bill of Rights menjadi Habeas Corpus Act menunjukkan bahwa terdapat urgensi pengaturan jaminan dan perlindungan hak-hak warga negara dan pembatasan kekuasaan penguasa.<sup>8</sup>

Melihat perjalanan pembentukan asas legalitas yang cikal-bakalnya sudah terdapat di dalam Magna Charta (1215) dan baru berhasil menjadi undang-undang dalam Habeas Corpus Act (1679) yang memberikan pengaturan lebih tegas memerlukan waktu yang sangat panjang. Setidaknya memerlukan waktu lebih dari 4

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, halaman 215.

<sup>4</sup> Deni Setyo Bagus Yuherawan, 2014, Dekonstruksi Asas Legalitas: Hukum Pidana; Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana, Setara Press, Malang, halaman 2.

<sup>5</sup> Romli Atmasasmita, 2000, Perbandingan Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, halaman 27-31.

<sup>6</sup> Deni Setyo Bagus Yuherawan, *Op.cit.*, halaman 2.

<sup>7</sup> dikutip dari Deni Setyo Bagus Yuherawan, *Op.cit.*, halaman 26.

<sup>8</sup> *Ibid.*,

abad untuk merumuskan gagasan tentang urgensi jaminan dan perlindungan hak-hak warga negara dalam peradilan pidana dengan memberikan pembatasan terhadap kewenangan raja dan hakim. Perkembangan ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan yang terjadi di Perancis. Pada abad XVII Perancis masih menerapkan “*arbitrium judicis*”, yakni suatu peradilan yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk mengkualifikasikan perbuatan mana yang merupakan suatu perbuatan pidana.<sup>9</sup>

Peradilan “*arbitrium judicis*” di Perancis yang dilaksanakan secara sewenang-wenang telah membangkitkan para pemikir hukum di Perancis untuk menggagas urgensi jaminan perlindungan hak-hak warga negara dari kesewenang-wenangan penguasa. Perlindungan terhadap hak-hak warga negara diwujudkan dengan membentuk aturan yang mengatur mengenai pembatasan kekuasaan raja dan hakim dalam pelaksanaan peradilan pidana. Menurut sejarahnya, Magna Charta dan Habeas Corpus Act-lah yang menjadi inspirasi bagi pemikir hukum di Perancis untuk mewujudkan peradilan yang adil bagi warga negaranya.

Melihat dari perspektif sejarah dari lahir dan terbentuknya asas legalitas, terlihat dengan jelas bahwa asas legalitas sangatlah identic dan sangatlah dekat dengan negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law System*). Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa negara-negara penganut Eropa Kontinental secara mutatis mutandis menganut aliran legisme yang merupakan suatu implikasi dari Positivisme Hukum yang lahir dan mewarnai pemikiran filsafat hukum, teori hukum, dan juga praktik hukum.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti memiliki ketertarikan untuk mencoba menarik

benang merah antara asas legalitas, aliran Positivisme Hukum, dan aliran Hukum Alam. Pemilihan aliran Hukum alam sebagai suatu kritik terhadap asas legalitas tentunya sangatlah logis, dikarenakan asas menurut perspektif historis, kehadiran Asas Legalitas diwarnai oleh aliran Positivisme Hukum. Maka ketika kita berbicara mengenai korelasi antara kritik terhadap Positivisme Hukum melalui aliran Hukum Alam, sangatlah relevan dan otomatis mencakup di dalamnya adalah asas legalitas.

Peneliti menuangkannya dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Pemikiran Hukum Alam terhadap Asas Legalitas”.

## METODE

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang menyajikan suatu masalah yang akan dibahas dengan menggunakan teori hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual yakni berkaitan dengan asas hukum.<sup>11</sup> Teknik analisis bahan hukum yang dipergunakan di dalam artikel ini adalah studi kepustakaan.

## PEMBAHASAN

Seperti telah disinggung di depan, bahwa terdapat dua istilah yang digunakan untuk hukum alam, yakni hukum alam dan hukum kodrat. Keduanya dalam bahasa Latin dinamakan *jus naturalis*, *ius naturale* atau *lex naturalis*. Ada sarjana yang menyamakan keduanya (baik dari segi terminologi maupun substansinya). Satjipto Rahardjo misalnya menyamakan hukum alam dan hukum kodrat.<sup>12</sup>

<sup>9</sup> *Ibid.*, halaman 26.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2013, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 133- 166.

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, Op.cit., hlm. 260.

Dalam tulisan ini digunakan istilah hukum alam dengan substansi “yang sama” dengan hukum kodrat, meskipun sebetulnya keduanya berbeda dari segi substansi.

Ada pula sarjana yang berpendapat bahwa hukum kodrat justeru lebih luas daripada hukum alam. Ini dapat dilihat dalam pendapat Otto von Gierke, yang menyatakan bahwa *hukum alam ditetapkan dalam teori hukum kodrat tentang negara*.<sup>13</sup> Otto von Gierke mungkin bermaksud mengatakan, bahwa “hukum alam adalah produk hukum kodrat yang dibahas dalam teori tentang negara.” Mungkin juga bahwa negara terbentuk lebih karena “kodrat masyarakat” daripada kehendak alam (yang dapat diketahui melalui kodrat kemanusiaan sebagai makhluk berakal).

Peneliti berpendapat, bahwa hukum alam (*law of nature*) sebetulnya berbicara mengenai hubungan kausal deterministik mutlak: jika A maka pasti B. Sebaliknya, hukum kodrat (*natural law*) membicarakan relasi yang bersifat kausal imputatif: jika A maka bukan pasti B, melainkan seharusnya B.<sup>14</sup> Ini lebih sesuai dengan karakter hukum sebagai *Sollen* (seharusnya), bukan pasti “*Sein*.” Dalam penelitian ini yang dimaksud hukum alam adalah “apa yang dibicarakan juga dalam hukum kodrat. Demikian juga sebaliknya.

Asas legalitas meskipun merupakan bagian dari paradigma positivisme di sini ditempatkan pula dalam konteks kausal imputatif itu, yaitu sebagai bagian dari pembicaraan hukum alam atau hukum kodrat. Hukum alam (tidak dalam pengertian alam fisik atau hukum-hukum fisika) tidak mengatur hal yang bersifat kausal deterministik sebagaimana

dikehendaki positivisme, melainkan kausal imputatif. Dengan demikian, dari segi terminologi itu, asas legalitas diasumsikan tidak berdiri secara kaku menurut positivisme logis, melainkan dipengaruhi oleh unsur-unsur dalam hukum alam atau hukum kodrat.

### 1. Paradigma dasar dalam Hukum Alam

Uraian-uraian di bawah ini diawali dengan penjelasan dari perspektif aliran Stoa mengenai asas legalitas dan kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang asas legalitas itu dari sudut pandang hukum alam.

#### a. Ajaran Stoa

Seperti dikatakan di depan, bahwa hukum alam atau hukum kodrat merupakan aliran tertua dalam filsafat hukum. Eksistensi hukum ini dapat dilacak sampai ke zaman Yunani Kuno, khususnya pada pemikiran Aristoteles.<sup>15</sup> Secara historis diakronik, hukum alam lahir tidak dengan sendirinya, melainkan berakar pada suatu mazhab yang mendahuluinya, yakni mazhab Stoa di Yunani Kuno. Mazhab ini merupakan dasar atau “penyebab” lahirnya hukum alam atau hukum kodrat itu.

Mazhab Stoa ini didirikan oleh Zeno dari Siprus (340-262 sebelum Masehi).<sup>16</sup> Ajarannya cukup sistematis menyangkut logika, fisika (alam) dan etika. *Pertama*, dengan logika (versi waktu itu) Stoa ingin mendapat “semacam kepastian” mengenai ukuran-ukuran kebenaran dan sumber pengetahuan hasil tangkapan indera.<sup>17</sup> *Kedua* alam bersifat deterministik atau pasti namun masih “bertentangan” dengan kebebasan atau kehendak bebas manusia (yang dalam banyak hal menimbulkan ketidakpastian). *Ketiga*, etika Stoa berbicara mengenai praktek hidup yang baik tanpa

<sup>13</sup> Otto Friedrich von Gierke, 1934, *Natural Law and The Theory of Society*, Cambridge University Press, pada Kata Pengantar Penerjemah, hlm. xxxiv. Von Gierke sendiri menggunakan istilah “Law of Nature yang tampaknya menurut dia “lebih luas” daripada “Natural Law” (hlm.35).

<sup>14</sup> Bdk. B. Arief Sidharta, 2017, *Ilmu Hukum Indonesia. Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis yang*

*responsive terhadap perubahan masyarakat*, UNPAR Press, UNPAR, Bandung, hlm. 71 – 74.

<sup>15</sup> Andre Ata Ujan, 2009, *Filsafat Hukum. Membangun Hukum, Membela Keadilan*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 50.

<sup>16</sup> J. Rehmke, 1959, *Geschichte der Philosophie* (Sejarah Filsafat), VMA-Verlag, Wiesbaden, hlm. 64.

<sup>17</sup> Lihat Bertrand Russell, 2007, *Op.cit.*, hlm. 352.

kompromi dan hidup yang baik adalah hidup menurut “kesadaran dunia (*Weltvernunft*) atau menurut aturan alam (hukum alam).<sup>18</sup> Orang yang bajik atau baik adalah orang yang telah memperoleh kebahagiaan melalui pengetahuan, seperti penah diajarkan juga sebelumnya oleh Socrates. Aristoteles pun mengajarkan etika keutamaan (*arete*) ini.<sup>19</sup>

Jika stoikisme (ajaran Stoa) tersebut dikaitkan dengan asas legalitas, maka dapat dikatakan, bahwa *pertama*, mengikuti aturan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya mesti berlandaskan pada pengetahuan dan kebenaran (logika). Ini bukan karena positivisme mengharuskan demikian, melainkan rasionalitas (positivisme belum lahir pada zaman Stoa). Orang tahu akan pentingnya aturan hukum dan itu adalah kebenaran, sehingga legalitas bukan sesuatu yang kontradiksi dengan pemikiran stoikisme. *Kedua*, nampaknya asas legalitas itu tidak bertentangan dengan hukum alam sebagai sebuah bentuk kesadaran (*Weltvernunft*). Tidak mungkin orang dihukum secara sembarangan tanpa sebab yang jelas, melainkan sesuai disposisi rasional hukum yang bersumber dari kehendak alam. Di sini kehendak bebas manusia diarahkan kepada kesesuaian dengan kehendak alam, bukan menentangnya. Sebaliknya jika menentang, maka hal ini bukan saja melawan legalitas hukum, melainkan melawan kehendak alam itu sendiri. *Ketiga*, dasar etis asas legalitas dalam paham Stoa adalah kebaikan. Asas legalitas bukan sekedar sarana mekanis deterministik saja (jika melakukan kesalahan, maka dihukum seturut aturan yang sudah ada sebelumnya, yang menyatakan sesuatu perbuatan itu salah), melainkan sebuah pesan etis, bahwa orang sebaiknya selalu melakukan kebaikan agar

justeru hukum dengan sendirinya mempunyai faktisitas.

#### b. Orientasi nilai

Pada awal kemunculannya bahkan hingga kini hukum alam berorientasi pada aksiologi, yakni tentang nilai-nilai sebagai sesuatu yang ideal dan esensial (*Wesenheiten*). Nilai-nilai dianggap sebagai sesuatu yang objektif ada, serta dapat dialami dan dipahami manusia. Hal ini karena –sesuai pendapat Frondizi– nilai dapat diketahui secara empirik dan menghantar orang kepada keputusan (keputusan nilai).<sup>20</sup>

Hal itu juga diyakini sebagai berasal dari “alam atau kodrat” seperti dapat dilihat pada pandangan Stoa. Sekedar kembali ke pandangan Stoa ini (yang kemudian diikuti oleh aliran hukum alam), bahwa *pertama*, kodrat atau alam itu berlaku bagi semua manusia. Tidak ada seorang manusia pun yang luput dari validitas nilai universal ini. *Kedua*, terkait hukum, memang Stoa tidak membahasnya secara khusus, namun dari pandangan aliran ini mengenai “orang” (person/persona/*prosōpon*) dapat dikatakan, bahwa gagasan mengenai “orang” ini dapat diterima dalam hukum sampai sekarang ini.

Menurut ajaran Stoa, konsep persona ini tidak hanya bersifat etis, psikologis dan sosial, melainkan juga sebuah konsep dengan sifat hukum. Persona ini adalah subjek hukum penyandang hak dan kewajiban. Paham subjek hukum ini masih berlaku sampai sekarang. Demikian juga dikatakan, bahwa persona merupakan entitas moral dan hukum. Dalam konsep ini pula terkait dengan kepemilikan atau hak milik pribadi dan hak-hak hukum lain serta tanggung jawab yang dimiliki oleh *persona*.<sup>21</sup>

Memang persona tersebut tidak terkait langsung dengan asas legalitas, namun itu tetap

<sup>18</sup> J. Rehmke, *op.cit.*, hlm. 68-69.

<sup>19</sup> Dalam etika keutamaan menurut Aristoteles, orang memiliki keutamaan karena orang itu memang mempunyai keunggulan perilaku atau kualitas pribadi yang memang senantiasa berbuat baik (tidak bisa tidak) dan *bukan* karena atau sesuai kewajiban atau supaya mendapat pujian dan penghargaan dari orang lain. Aristotle, 1978, *Nichomachean Ethics*

(Translated with Introduction and Notes by Martin Ostwald), Bobbs-Merrill Educational Publishing, Indianapolis, hlm. 8, 16-20.

<sup>20</sup> Risieri Frondizi, 2001, *Pengantar Filsafat Nilai*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 7-9, 114-115,

<sup>21</sup> A. A. Long, 2006, *From Epicurus to Epictetus*, Clarendon Press, Oxford, hlm. 335-338.

dapat diterangkan baik dari sudut pandang stoikisme maupun hukum alam. Keberlakuan asas legalitas justeru sebetulnya mau melindungi status atau posisi orang sebagai subjek hukum. Orang tidak dapat diperlakukan sewenang-wenang terutama oleh negara/pemerintah tanpa aturan hukum yang menentukannya. Demikian juga terkait dengan pidana misalnya, bahwa prinsip legalitas ini melarang menyatakan orang sebagai melakukan tindak pidana, kecuali perbuatan yang dilakukannya memang ditetapkan sebagai perbuatan pidana sebelumnya oleh hukum pidana. Dengan demikian status dan posisi persona itu memang dilindungi dari kesewenang-wenangan penguasa atau pejabat sebagaimana dikehendaki oleh ajaran Stoa.

Selanjutnya hukum alam kemudian meneruskan ajaran Stoa tersebut dengan mengembangkannya melalui paradigma atau dimensi nilai. Nilai yang berada di wilayah etis di satu pihak menjadi "identitas" khas hukum alam, namun di lain pihak juga bersifat abstrak dan tidak luput pula dari kritikan terutama terhadap hukum alam sendiri. Salah satu kritikan ialah bahwa justeru hukum alam itu bukan suatu posisi etik mengenai hukum, melainkan terkait dengan soal penilaian benar dan salah yang tidak begitu diperlukan bagi pelaksanaan hukum.<sup>22</sup>

Meskipun ada kritikan semacam itu, *toh* hukum alam sebagai suatu penjelasan filosofis tentang hukum dapat menampilkan pandangannya tentang nilai-nilai tertentu.

Pertama, ketika hukum alam mengartikan hukum. Apa itu hukum (*quid ius?*) Salah satu pendapat yang digunakan di sini adalah menurut Thomas Aquinas (1225-1274), salah satu tokoh terkemuka dalam aliran hukum

alam. Menurut dia, hukum (*lex*) adalah *rule* dan ukuran bagi tindakan atau perilaku (*quaedam regula et mensura actuum*). Itu adalah ukuran yang "pasti." Hukum (*lex*) itu mengikat (dari kata *ligare*), karena mewajibkan orang untuk bertindak atau berperilaku. Namun, menurut Thomas Aquinas, hukum itu juga terkait erat dengan *reason* (akal budi).<sup>23</sup>

Ketika pengertian hukum Thomisme (menurut filsafat Thomas Aquinas) itu dikaitkan dengan asas legalitas, maka dapat dikatakan, bahwa sebetulnya bukan hanya aliran positivisme saja yang menghendaki agar hukum (positif) menjadi patokan, ukuran, norma, atau batasan, melainkan ajaran hukum alam pun menghendaki "asas legalitas" macam itu. Ada patokan (baca: norma) hukum untuk menentukan suatu perbuatan (*quaedam regula et mensura actuum*) dan juga untuk menilai apakah suatu perilaku bertentangan atau tidak dengan norma hukum yang telah ditentukan atau ditetapkan sebelumnya.

Legalitas di situ tidak hanya berarti sekedar sah atau "legal-nya" suatu perbuatan menurut norma hukum, melainkan juga terkait dengan tindakan penguasa atau pemerintah bahkan penegak hukum dalam berhubungan dengan warga masyarakat, dimana tindakan para penguasa dan penegak hukum pun mesti sesuai dengan patokan norma hukum (yang sudah dibuat secara sah). Karena itu menurut Thomas Aquinas norma hukum tidak hanya sekedar ada saja (asal legal saja), melainkan juga harus masuk akal atau sesuai dengan akal budi (*quaedam rationis ordinatio ad bonum commune*). Norma itu pun mesti dibuat dan diumumkan oleh penguasa atau pemerintah agar semua orang tahu adanya norma itu.<sup>24</sup> Selain itu, hal penting lainnya ialah bahwa ketentuan hukum yang mendasari adanya asas

<sup>22</sup> C. Fred Alford, 2010, *Narrative, Nature, and The Natural Law. From Aquinas to International Human Rights*, Palgrave Macmillan, NY, hlm. 1.

<sup>23</sup> St. Thomas Aquinas, 2000, *Treatise on Law* (Translated, with Introduction, Notes, and Glossary, by

Richard J.Regan), Hackett Publication, Cambridge, hlm.1.

<sup>24</sup> St. Thomas Aquinas, 1947, *Summa Theologica*. Translated by Fathers of the English Dominican Province, Benziger Bros, edition, hlm. 1332.

legalitas (khususnya dalam hukum pidana) mesti mengandung nilai keadilan yang kemudian diwujudkan dalam asas legalitas itu.

Keadilan yang dimaksud di sini dalam paham Thomas Aquinas adalah keadilan legal, yakni keadilan yang muncul dari ketentuan hukum. Bahkan jika hukum itu tidak adil, maka tak ada kewajiban orang untuk menaatinya. Orang dapat melakukan *civil disobedience* terhadap hukum itu.<sup>25</sup> Berkaitan dengan asas legalitas dapat dikatakan, bahwa meskipun suatu norma hukum (pidana) sudah ditentukan terlebih dahulu bagi suatu perbuatan tertentu, norma itu tidak dapat ditaati, bila norma itu dinilai sebagai tidak adil atau menimbulkan ketidakadilan.

Thomas dipengaruhi oleh pemikiran Aristoteles mengenai keadilan. Bagi Thomas keadilan itu adalah suatu keutamaan moral bagi hukum di samping berguna dalam relasi dengan orang lain. Keadilan juga berarti memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya.<sup>26</sup> Asas legalitas juga memunculkan keadilan justeru ketika semua orang diperlakukan sama dalam hukum pidana untuk perbuatan pidana yang sudah ditentukan sebelumnya. Maka seseorang tidak dapat dikatakan sebagai melakukan perbuatan pidana, bila perbuatan itu tidak dikatakan secara yuridis normatif sebagai perbuatan pidana. Bagi hukum alam, keadilan ini adalah sebuah nilai absolut dalam hukum, sebab hal itu adalah keutamaan. Sebaliknya adalah ketidakadilan, bila tanpa asas legalitas hak orang untuk bebas dari hukuman atau sanksi tidak diberikan.

Kedua, seperti diyakini oleh penganut aliran hukum alam pada umumnya, bahwa moralitas atau dimensi etis ditekankan dalam pembicaraan mengenai hukum, bahkan hukum pun “adalah semacam moralitas *in abstracto*”

Demikian pula halnya bahwa asas legalitas sebetulnya adalah sebuah “prinsip moral” juga karena selain melindungi hak serta kebebasan individu dan masyarakat dalam berperilaku, juga menghindari penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenang-wenangan hukum dan institusinya.<sup>27</sup> Karena itu, eksistensi asas legalitas diperlukan dalam konteks moralitas hukum. Dengan kata lain, bisa dikatakan, bahwa hukum alam menerima adanya asas legalitas itu.

Adanya asas legalitas ini bukan pembenaran yang bersifat positivistik saja, bahwa penguasa (karena kekuasaannya) dapat sesuka hati atau sesuai pendapat dan selernya menentukan sendiri perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan atau tindak pidana. Harus ada pertimbangan-pertimbangan moral atau etis dalam penentuan suatu perbuatan menjadi perbuatan atau tindak pidana.

Ketiga, nilai kemanusiaan atau kemanusiaan sebagai sebuah nilai. Bagi hukum alam nilai kemanusiaan ini sangat penting dan utama. Nilai kemanusiaan kemudian terwujud secara lebih konkret dalam asas dan norma-norma tentang hak-hak asasi manusia. Ada yang bahkan menyatakan, bahwa munculnya hak-hak asasi manusia karena “jasa” kebangkitan kembali hukum alam setelah perang dunia kedua.<sup>28</sup> Apakah nilai kemanusiaan ini berhubungan juga dengan asas legalitas?

Asas legalitas, seperti sudah disinggung di depan, berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks hukum pidana tampak sangat jelas, yakni perlindungan terhadap hak terdakwa atau tersangka pelaku suatu tindak pidana. Seseorang tidak dapat secara sewenang-wenang dituduh sebagai

<sup>25</sup> Tentang hal itu dapat dibaca misalnya dalam Andre Ata Ujan, 2009, *Filsafat Hukum. Membangun Hukum, Membela Keadilan*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 182-183.

<sup>26</sup> Lihat Simplesius Sandur, 2020, *Etika Kebahagiaan. Fondasi Filosofis Etika Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 122, 125.

<sup>27</sup> Lihat Austin Fagothey, 1953, *Right and Reason. Ethics in Theory and Practice*, Mosby Company, St. Louis, Cf, hlm. 115.

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo, *op.cit.*, hlm. 261-263. Lihat juga F. Ceunfin, 2004, *Hak-hak Asasi Manusia. Pendasaran dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Politik*, Ledalero, Maumere, hlm. 14-17.

melakukan tindak pidana, bila tidak ada norma pidana yang menentukan bahwa itu adalah tindak pidana. Dengan demikian hak asasi orang itu untuk bebas dari tindakan represif atau bebas dari perlakuan tidak adil menjadi terjamin.

Penerapan asas legalitas pun (meskipun itu *toh* hanya sebuah asas) mesti dengan asumsi dasar dan esensial, bahwa asas itu adalah bagian dari perwujudan hak asasi manusia dan bukan sekedar tuntutan positivisme atau demi rumusan normatif belaka. Dengan demikian asas legalitas bukan asas yang kering, melainkan kaya akan nilai-nilai etis, moralitas, keadilan dan kemanusiaan yang *nota bene* itu semua adalah bagian dari paradigma hukum alam.

## 2. Dialektika dengan positivisme

Sebagaimana telah dikemukakan di kerangka teori, bahwa pengaruh positivisme sangat kuat terhadap asas legalitas ini. Demikian pula, bahwa munculnya positivisme adalah reaksi “filosofis” atau mungkin juga sebagai wujud “politik aliran” melawan hukum alam (karena aliran hukum alam dianggap tidak jelas batasan atau patokan yuridisnya bagi perilaku riil dalam masyarakat).

Bagaimana pun juga, kini dialektika antara hukum alam dan positivisme menyangkut asas legalitas itu perlu dilakukan. Tujuannya bukan sekedar untuk saling memahami satu sama lain tentang konsep-konsep dalam kedua aliran itu, melainkan lebih untuk mendapatkan sintesa yuridis mengenai asas legalitas. Ini dilakukan selain karena asas legalitas adalah asas resmi dalam hukum yang tidak dapat ditiadakan, juga karena asas itu bersifat terbuka. Asas legalitas terbuka bagi telaah dari aliran-aliran lain, di antaranya ialah hukum alam.

Uraian pendek di bawah ini tidak menarasikan semua aliran hukum alam dan

positivisme dengan masing-masing tokohnya secara panjang lebar dan mengulangi kembali apa yang sudah ditulis, melainkan menyampaikan hal-hal esensial dari kedua aliran tersebut menyangkut asas legalitas. Pendapat di bawah ini adalah “interpretasi filosofis” dari peneliti.

Pertama, positivisme memandang hukum sebagai disposisi kekuasaan penguasa dalam negara. Unsur-unsur disposisi yang dominan adalah kekuasaan dan legitimasinya. Hukum adalah produk kekuasaan dan berbentuk hukum positif. Hukum positif pun adalah “ekspresi kekuasaan penguasa”. Ini pertama-tama adalah dasar legalitas positivistik (kejelasan, ketegasan, dan faktual), dan kemudian menjadi asas legalitas itu sendiri.<sup>29</sup> Bagi positivisme pembicaraan mengenai moralitas dan keadilan tidak penting, sebab yang penting adalah apa kata hukum positif tentang sesuatu. Moralitas dan keadilan adalah distorsi hukum positif.

Kritikan terhadap asas legalitas yang positivistik seperti itu ialah bahwa sesuatu yang buruk dalam masyarakat bisa jadi bukan larangan menurut hukum positif hanya karena tidak menjadi bagian dari hukum positif. Sebaliknya bisa jadi juga, bahwa apa yang sesungguhnya baik dalam masyarakat kemudian menjadi buruk bahkan kejahatan hanya karena dinyatakan demikian oleh hukum positif. Maka di sini hukum alam memberikan pertimbangan kepada positivisme, bahwa dalam penetapan hukum positif untuk keperluan asas legalitas itu hendaknya moralitas dan keadilan juga perlu diperhatikan. Demikian juga, mengutip pendapat Leo Strauss, bahwa pandangan hidup (*Weltanschauung*/falsafah) dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tidak bisa diabaikan begitu saja dalam pelaksanaan asas legalitas.<sup>30</sup> Dengan kata lain hukum tidak bebas nilai (*context of discovery*).

<sup>29</sup> Lihat Brian H. Bix, “Legal Positivism” dalam Martin P. Golding & William A. Edmundson (ed), 2005, *The Blackwell Guide to the Philosophy of Law*, Blackwell Publishing Ltd., USA, hlm. 29 dst.

<sup>30</sup> Leo Strauss, “On Natural Law” dalam David L. Sills (ed), 1968, *International Encyclopedia of the Social Sciences*, Crowell C & Macmillan, hlm. 80.



Kedua, bagi positivisme nampaknya asas legalitas tidak netral, artinya ia tergantung pada kekuasaan (termasuk kekuasaan politis). Bagi hukum alam, politik kekuasaan atau kekuasaan politik saja tidak cukup bagi dibuatnya norma hukum. Dibutuhkan pandangan tentang kebaikan individual, kebaikan umum (dalam masyarakat), rasionalitas serta filsafat politik sebagai dasar asas legalitas. Dengan demikian asas legalitas seharusnya netral, utamanya netral dari kekuasaan politik.<sup>31</sup> Netralitas juga terkait dengan validitas hukum yang bersifat umum.

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di depan, maka ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang diajukan sebagai berikut: pemikiran hukum alam yang datang sebelum adanya positivisme hukum menekankan pada peran rasio atau akal budi dalam penentuan norma hukum dan asas legalitas. Di samping itu nilai-nilai moralitas, keadilan, kebaikan perlu menjadi bagian baik dalam penetapan norma hukum maupun penerapan asas legalitas.

#### B. DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. A. Long, 2006, *From Epicurus to Epictetus*, Clarendon Press, Oxford.
- [2] Andre Ata Ujan, 2009, *Filsafat Hukum. Membangun Hukum, Membela Keadilan*, Kanisius, Yogyakarta.
- [3] Andre Ata Ujan, 2009, *Filsafat Hukum. Membangun Hukum, Membela Keadilan*, Kanisius, Yogyakarta.
- [4] Austin Fagothey, 1953, *Right and Reason. Ethics in Theory and Practice*, Mosby Company, St. Louis, Cf.
- [5] B. Arief Sidharta, 2017, *Ilmu Hukum Indonesia. Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis yang responsive terhadap perubahan masyarakat*, UNPAR Press, UNPAR, Bandung.
- [6] Brian H. Bix, "Legal Positivism" dalam Martin P. Golding & William A. Edmundson (ed), 2005, *The Blackwell Guide to the Philosophy of Law*, Blackwell Publishing Ltd., USA.
- [7] C. Fred Alford, 2010, *Narrative, Nature, and The Natural Law. From Aquinas to International Human Rights*, Palgrave Macmillan, NY.
- [8] Ceunfin, 2004, *Hak-hak Asasi Manusia. Pendasaran dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Politik*, Ledalero, Maumere.
- [9] Deni Setyo Bagus Yuherawan, 2014, *Dekonstruksi Asas Legalitas: Hukum Pidana; Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- [10] J. Rehmke, 1959, *Geschichte der Philosophie* (Sejarah Filsafat), VMA-Verlag, Wiesbaden.
- [11] Leo Strauss, "On Natural Law" dalam David L. Sills (ed), 1968, *International Encyclopedia of the Social Sciences*, Crowell C & Macmillan.
- [12] Lobby Loqman, 2004, *Perkembangan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia*, Makalah.
- [13] Mark C. Murphy, 2006, *Natural Law in Jurisprudence and Politics*, Cambridge University Press, USA.
- [14] Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- [15] Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group.
- [16] Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

<sup>31</sup> Mark C. Murphy, 2006, *Natural Law in Jurisprudence and Politics*, Cambridge University Press, USA, hlm. 4-5.

- 
- [17] Risieri Frondizi, 2001, *Pengantar Filsafat Nilai*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- [18] Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- [19] Simplesius Sandur, 2020, *Etika Kebahagiaan. Fondasi Filosofis Etika Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta.
- [20] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Grafindo Persada, Jakarta.
- [21] St. Thomas Aquinas, 1947, *Summa Theologica*. Translated by Fathers of the English Dominican Province, Benziger Bros.
- [22] St. Thomas Aquinas, 2000, *Treatise on Law* (Translated, with Introduction, Notes, and Glossary, by Richard J.Regan), Hackett Publication, Cambridge.

ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PENGGAJIAN KARYAWAN DALAM UPAYA  
MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL PADA  
PENGINAPAN MINIMAX HOMESTAY PADANGSIDIMPUAN

Oleh

Putri Rahmaini Suheri<sup>1)</sup>, Juliana Nasution, M.E<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup>Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara; Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate,

Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara

Email: <sup>1</sup>[putriahmainisuhari@gmail.com](mailto:putriahmainisuhari@gmail.com), <sup>2</sup>[julianansution@uisu.ac.id](mailto:julianansution@uisu.ac.id)

**Abstrak**

Gaji merupakan masalah penting bagi perusahaan dan karyawan. Dikatakan penting bagi perusahaan karena gaji merupakan alat yang dapat mendorong karyawan untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan bagi pegawai, gaji merupakan sumber pendapatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Penelitian ini dilakukan pada penginapan Minimax Homestay dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana sistem akuntansi penggajian karyawan pada penginapan Minimax Homestay dan apakah sistem akuntansi penggajian karyawan pada penginapan Minimax Homestay sudah memadai dari segi dan sistem pengendalian internal. Analisis Penelitian yang dilakukan adalah analisis deskriptif komparatif kualitatif, analisis ini dilakukan dengan mendeskripsikan secara umum tentang sistem akuntansi gaji penginapan Minimax Homestay yang kemudian dibandingkan dengan teori yang ada. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa sistem akuntansi gaji pada penginapan Minimax Homestay sistem akuntansi penggajian digabungkan. Meskipun demikian sistem akuntansi Gaji pada penginapan Minimax Homestay sudah berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur pembayaran gaji karena telah dilaksanakan dengan baik oleh bagian terkait dan formulir serta alat yang digunakan sudah memadai. Penelitian ini menjamin penerapan sistem pengendalian internal yang memadai atas sistem penggajian.

**Kata Kunci : Pengendalian Internal, Sistem Akuntansi Gaji dan Upah**

**PENDAHULUAN**

Kota Padangsidimpuan merupakan kota terbesar di wilayah Tapanuli. Kota Padangsidimpuan dikenal dengan sebutan Kota Salak, karena dulu Padangsidimpuan adalah Ibu Kota Kabupaten Tapanuli Selatan yang rata-rata penduduknya bekerja sebagai petani salak dan di kota Padangsidimpuan lah salak-salak tersebut dipasarkan, maka dari itu salak merupakan oleh-oleh khas kota Padangsidimpuan. Posisi kota Padangsidimpuan termasuk kota transit yang mana kota ini menjadi kota tujuan dan persinggahan masyarakat di wilayah bagian Tapanuli. Seiring perkembangan zaman, tempat persinggahan ini semakin ramai. Secara

Ekonomi, peran pariwisata bagi Kota Padangsidimpuan sudah mulai berkembang terutama pada bidang Penginapan. Hal ini membuat tempat penginapan di Padangsidimpuan mulai berkembang pesat. Penginapan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan wisata dan bisnis lainnya. Untuk dapat mencapai tujuan perusahaan diharapkan perusahaan harus meningkatkan keterampilan tenaga kerja (karyawan) atau sumber daya manusia yang dimiliki. Karyawan adalah orang staf yang bekerja di Perusahaan yang menyediakan jasa. Bekerja berdasarkan kontrak kerja baik tertulis maupun tidak tertulis. Partisipasi karyawan dalam melaksanakan tugasnya sangat

mendukung untuk mencapai suatu tujuan perusahaan.

Tujuan umum perusahaan adalah untuk memberikan layanan secara permanen kepada masyarakat serta memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Perusahaan merupakan suatu penggunaan sumber daya manusia yang memperhatikan hak dan kewajiban pekerja sehingga karyawan yang terlibat dapat melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Satu hal yang harus diperhatikan adalah gaji dan upah. Sistem penggajian merupakan suatu hal yang berhubungan dengan manajemen kesejahteraan tenaga kerja, jadi harus mendapat perhatian khusus dari perusahaan untuk mencapai tujuannya. Gaji memiliki arti yang sangat penting bagi karyawan karena gaji adalah cerminan nilai untuk pekerjaan. Sistem penggajian dapat berjalan dengan baik jika memiliki unsur-unsur pengendalian internal. Pengendalian internal ini perlu dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari penipuan dan kesalahan dalam pemberian gaji. Sistem pengendalian internal akan menghasilkan informasi yang dibutuhkan untuk perusahaan adalah untuk meningkatkan akurasi dan keandalan data akuntansi, implementasi kebijakan perusahaan, dan meningkatkan efisiensi. Gaji adalah masalah penting bagi perusahaan dan karyawan karena gaji adalah alat yang dapat memotivasi karyawan untuk terus berkarya, berprestasi, dan bekerja dengan baik.

Selain itu, sistem akuntansi pembayaran gaji harus memberikan detail yang jelas kepada karyawan tentang gaji seperti gaji pokok dan upah, serta berbagai jenis tunjangan perusahaan, di antaranya dikenakan upah kotor atau upah bruto termasuk pada PPh Pasal 21 dan total pendapatan bersih per karyawan sendiri, serta alat yang digunakan untuk membantu dalam pelaporan sistem akuntansi gaji dan upah

Penelitian ini dilakukan di salah satu penginapan yang sedang naik daun di kota Padangsidempuan yaitu Penginapan Minimax

Homestay yang terletak di Jl. Abdul Jalil Lubis, Batunadua Jae, Padangsidempuan. Penginapan Minimax Homestay memiliki 13 karyawan tetap yang terdiri dari 1 karyawan *Quality Control* (Pengawas), 3 karyawan Resepsionis, 2 Karyawan *Roomboy*, 3 karyawan *Security*, dan 4 Karyawan *Cleaning Service*. Penginapan Minimax Homestay dalam menjalankan aktivitasnya menggunakan tenaga kerja dengan pendidikan yang berbeda. Dalam pemberian gaji dan upah karyawan tentu diperlukan suatu sistem untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan agar pembayaran gaji tepat pada waktunya dan sesuai dengan jumlahnya. Pencatatan yang digunakan dalam pelaksanaan gaji karyawan pada Penginapan Minimax Homestay masih menggunakan buku kas umum dan unit organisasi penggajian masih terdapat penggabungan antara fungsi pencatat waktu dengan fungsi kepegawaian. Hal ini menunjukkan pengendalian intern yang belum memadai sehingga akan dengan mudah terjadi penyelewengan, namun walaupun dengan sistem penggajian yang masih tergolong sederhana Penginapan Minimax Homestay tidak pernah mengalami masalah dalam sistem penggajiannya.

Menurut Baridwan (2002 : 4) sistem akuntansi adalah formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengelola data mengenai suatu kesatuan ekonomis dengan bentuk laporan-laporan yang diperlukan manajemen untuk mengawasi usaha dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti pemegang saham, kreditur, dan lembaga pemerintah untuk menilai hasil usahanya.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2009) sistem akuntansi terdiri dari metode dan catatan yang diciptakan untuk mengidentifikasi, menghimpun, mengamati, mengelompokkan, dan melaporkan transaksi suatu usaha dan menyelenggarakan pertanggung jawaban aktiva dan kewajiban yang bersangkutan dengan transaksi tersebut.

Mulyadi (2008) mengatakan sistem akuntansi adalah organisasi dari formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi terdiri dari beberapa elemen yaitu :

Formulir merupakan unsur pokok dalam sistem akuntansi yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi sehingga menjadi bukti tertulis dan digunakan sebagai dasar pencatatan dalam buku akuntansi.

Buku catatan yang digunakan pada sistem akuntansi untuk mencatat transaksi-transaksi yang terjadi seperti buku jurnal, buku besar, dan buku pembantu.

Jurnal merupakan catatan akuntansi yang pertama digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan merangkum data keuangan dan data lainnya.

Buku besar terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk merangkum data keuangan yang sudah dicatat sebelumnya kedalam jurnal. Rekening-rekening dalam buku besar ini disediakan sesuai unsur-unsur informasi yang akan disajikan pada laporan keuangan.

Buku pembantu terdiri dari rekening-rekening yang merincikan data keuangan yang tertera dalam rekening tertentu pada buku besar.

Prosedur merupakan urutan atas kegiatan tulis-menulis atau catat-mencatat dengan melibatkan beberapa bagian untuk menjamin perlakuan serupa terhadap transaksi perusahaan.

Alat-alat yang digunakan disini adalah alat yang digunakan untuk melakukan pencatatan terhadap transaksi perusahaan sehingga dapat menghasilkan sebuah laporan.

Samsul dan Mustafa (2000:65) mengatakan tujuan utama sistem akuntansi adalah : Menyampaikan semua informasi yang diperlukan oleh semua tingkat manajemen,

pemilik, atau pemegang saham secara cepat dan tepat. Menyediakan informasi yang diperlukan pihak luar, perpajakan, bank, atau kreditur dan lembaga lainnya yang berkaitan dengan perusahaan. Menyempurnakan kontrol melalui organisasi, prosedur-prosedur dan catatan-catatan lain untuk mengamankan harta perusahaan. Mengurangi biaya penyelenggaraan administrasi ke tingkat yang lebih rendah dari pada nilai manfaatnya.

Menurut Zaki Baridwan (2002) bahwa faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan suatu sistem adalah : sistem akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip cepat, yaitu sistem akuntansi harus bisa menyediakan informasi yang diperlukan tepat pada waktunya, dapat memenuhi kebutuhan dengan kualitas yang sesuai. Sistem akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip aman yaitu sistem akuntansi ini harus disusun dengan mempertimbangkan sistem pengawasan intern. Sistem akuntansi harus memenuhi prinsip murah yaitu bahwa biaya untuk menyelenggarakan sistem akuntansi itu harus dapat ditentukan sehingga paling tidak antara *cost* dan *benefit* tersebut seimbang.

Adi Koesoemah (2001:1) mendefinisikan bahwa sistem akuntansi penggajian dan pengupahan adalah suatu sistem prosedur dan catatan-catatan yang dipergunakan untuk menetapkan secara tepat dan teliti berapa gaji dan upah yang harus dipotong untuk pajak penghasilan dan sisa gaji yang benar-benar dibayarkan kepada karyawan. Menurut Mulyadi (2008) sistem akuntansi penggajian digunakan untuk menangani transaksi pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer. Sistem akuntansi pengupahan digunakan untuk menangani transaksi atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana.

Menurut Mulyadi (2008) dokumen atau formulir yang diperlukan dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan adalah : Dokumen pendukung perubahan gaji dan upah

ini dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian berupa surat-surat keputusan yang bersangkutan dalam karyawan, seperti surat keputusan pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, perubahan tarif upah, penurunan pangkat, pemberhentian kerja sementara dan lain sebagainya. Tembusan dokumen ini dikirim ke fungsi pembuat daftar gaji dan upah untuk kepentingan pembuatan daftar gaji.

Catatan waktu hadir ini berupa daftar hadir biasa dengan absen di Grup *Whatsapp* Perusahaan yaitu dengan mengirim foto yang sudah berada di lokasi kantor tepat didepan pintu Kantor Resepsionis. Surat pernyataan gaji dibuat oleh bagian *Quality Control*/Pengawas. Tiap karyawan yang akan menerima gaji akan masuk satu persatu kedalam kantor resepsionis. Gaji diberikan langsung oleh pemilik perusahaan dan diberikan secara bergiliran sesuai divisi nya. Gaji diberikan dalam amplop, yang mana dihalaman muka amplop dituliskan masing-masing nama karyawan beserta divisi nya. Bukti kas keluar ditulis langsung di sistem oleh *Quality Control*/Pengawas di Minimax Homestay.

Catatan akuntansi yang digunakan menurut Mulyadi (2008) adalah sebagai berikut : Jurnal umum digunakan untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja ke dalam setiap department dalam perusahaan. Kartu harga pokok produk ini digunakan untuk mencatat upah tenaga kerja langsung yang dikeluarkan. Kartu biaya digunakan untuk mencatat upah tenaga kerja tidak langsung dan biaya tenaga kerja non produksi setiap divisi dalam perusahaan. Kartu penghasilan karyawan digunakan untuk mencatat penghasilan dan berbagai potongan yang diterima oleh karyawan.

Menurut Mulyadi (2008) sistem akuntansi penggajian dan pengupahan akan memberikan beberapa fungsi atau bagian yang terkait seperti:

a. Fungsi kepegawaian bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, menyeleksi calon karyawan, membuat surat keputusan

tarif gaji karyawan, kenaikan pangkat dan golongan gaji, mutasi karyawan, dan pemberhentian karyawan.

- b. Fungsi pencatatan waktu hadir/absen bertanggung jawab menyelenggarakan catatan waktu hadir bagi semua karyawan perusahaan. Sistem pengendalian intern yang baik mensyaratkan fungsi pencatatan waktu hadir karyawan tidak boleh dilaksanakan oleh fungsi operasi atau fungsi pembuatan daftar gaji
- c. Fungsi pembuatan daftar gaji bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji dan upah yang berisi penghasilan yang menjadi hak dan berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan selama jangka waktu pembayaran gaji. Daftar gaji dan upah diserahkan oleh fungsi pembuat daftar gaji kepada fungsi akuntansi guna pembuktian kas keluar yang dipakai sebagai dasar untuk pembayaran gaji karyawan.
- d. Fungsi akuntansi bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungannya dalam pembayaran gaji karyawan.
- e. Fungsi keuangan, uang tunai tersebut dimasukkan ke dalam amplop gaji untuk setiap karyawan, untuk selanjutnya dibagikan kepada karyawan yang berhak.

Sistem akuntansi untuk prosedur pencatatan gaji dan upah yang digunakan oleh Minimax Homestay Padangsidempuan melibatkan bagian *Quality Control*. Dimana bagian *Quality Control* mengecek data persiapan dan pendukung untuk pencatatan gaji selanjutnya bagian *Quality Control* akan melaksanakan input data ke database. Kemudian merekapitulasi penghasilan yang akan diserahkan ke Pimpinan Perusahaan untuk koreksi dan persetujuan apakah ada penyelewengan atau tidak. Setelah semua sudah terkoreksi dan sudah disetujui oleh bagian Pimpinan Perusahaan dan ditandatangani, setelah itu rekapitulasi penghasilan diserahkan kembali ke bagian *Quality Control* dimana untuk proses

selanjutnya adalah pembayaran gaji pada pegawai sesuai tanggal yang ditetapkan setiap bulannya.

Menurut Baridwan (2002:14) untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut diatas terdapat beberapa elemen yang merupakan ciri-ciri pokok dari suatu pengendalian intern yang baik, yaitu: Struktur organisasi yang memisah tanggung jawab fungsional secara tepat. Suatu wewenang dan prosedur pembukuan yang baik, yang berguna untuk melakukan pengawasan akuntansi yang cukup terhadap harta milik, hutang, pendapatan dan biaya. Praktik-praktik yang sehat harus dijalankan didalam melakukan tugas-tugas dan fungsi-fungsi setiap bagian organisasi. Suatu tingkat kecakapan pegawai yang seduai dengan tanggung jawabnya.

Catatan Akuntansi yang digunakan dalam sistem penggajian pada Minimax Homestay Padangsidempuan adalah Buku Kas Umum dimana berfungsi untuk mencatat semua pemasukan dan pengeluaran termasuk pengeluaran untuk pembayaran gaji pegawai.

Dasar dari sistem pengendalian intern adalah pembagian pekerjaan yang baik serta adanya fungsi saling kontrol antara bagian yang ada sehingga pekerjaan itu benar-benar berjalan dengan baik. Pekerjaan dari pencatat waktu serta pembayaran gaji harus dipisahkan dengan bagian pekerjaan dari *Quality Control*. Untuk perusahaan kecil yang tidak menggunakan lonceng waktu, laporan ini harus diikhtisarkan oleh bagian gaji serta harus disetujui oleh atasan yang berwenang. Jika bagian gaji dibayarkan dengan kontan maka untuk tiap karyawan harus dibuat kwitansi pembayaran gaji yang menunjukkan nama, nomor, jumlah yang harus dibayar dengan semua potongan-potongannya dan periode pembayarannya. Kwitansi-kwitansi ini harus dikembalikan kepada *Quality Control* pada hari pembayaran jika amplop pembayaran gaji telah diterima. Untuk mencegah pembayaran gaji dan upah kepada karyawan melebihi jumlah sebenarnya maka semua kenaikan tarif gaji harus disetujui oleh kepala bagian yang bersangkutan, dimana

seorang petugas dari pemeriksaan intern secara teratur harus mengecek tarif gaji, tunjangan-tunjangan, potongan-potongan serta jumlah karyawan untuk meyakinkan bahwa perhitungan gaji dan upah telah berjalan secara wajar dan dapat dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana sistem akuntansi penggajian karyawan pada Penginapan Minimax Homestay Padangsidempuan ?

Apakah Sistem Penggajian Karyawan yang diterapkan pada Penginapan Minimax Homestay Padangsidempuan sudah berjalan efektif dan efisien?

## METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membangun suatu proposisi dan menjelaskan makna dibalik realita sosial yang terjadi. Penelitian ini juga berupaya memandang apa yang terjadi dalam dunia tersebut dan meletakkan temuan-temuan yang diperoleh di dalamnya dimana peneliti berpijak dari realita atau peristiwa yang berlangsung dilapangan dengan latar belakang lingkungan yang alamiah (Bungin, 2007:44).

Subyek penelitian atau informan adalah pihak Pimpinan dan Karyawan sedangkan objek atau masalah yang diteliti adalah tentang bagaimana sistem penggajian pada Penginapan Minimax Homestay dan apakah sistem pengendalian internal terhadap sistem akuntansi penggajian pada Penginapan Minimax Homestay sudah cukup baik atau belum. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, meliputi: Survei pendahuluan, Wawancara mendalam (*in-depth interview*), study dokumen.

Instrumen penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif sehingga instrument penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Moloeng (2005:9) menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau

dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Minimax Homestay adalah salah satu penginapan yang ada di kawasan Batunadua Jae, Padangsidempuan, Sumatera Utara. Penginapan ini diresmikan pada 11 November 2021, tepatnya baru menginjak 4 bulan, yang didirikan oleh Bapak Indra Dolly Hutasuhut, S.Sos yang berasal dari Padangsidempuan. Minimax Homestay mulai beroperasi pada tanggal 11 November 2021. Minimax Homestay mempunyai daya tarik yang mengagumkan dimana Homestay dibangun menghadap perbukitan sehingga dari kamar, tamu dapat menyaksikan persawahan. Itulah yang memikat para tamu untuk berkunjung. Selain itu karena letak Minimax Homestay sangat strategis yaitu tepat diujung kota Padangsidempuan, sehingga orang yang baru datang dari Medan bisa dengan mudah menemukan penginapan. Adapun prosedur-prosedur sistem akuntansi penggajian yang dilakukan oleh Minimax Homestay adalah sebagai berikut :

### a. Bagian *Quality Control*/Pengawas

Bagian ini bertugas untuk membuat kartu daftar hadir karyawan (absensi) dan setiap akhir bulan akan direkap dan merekap lembur-lembur yang dilakukan karyawan selama sebulan. Setelah itu rekap daftar hadir karyawan diserahkan Pimpinan Perusahaan. Berdasarkan rekap daftar hadir (absensi) karyawan dan rekap lembur karyawan yang diberikan oleh bagian *Quality Control*, maka dibuat daftar gaji dan slip gaji karyawan bulan tersebut, setelah itu diserahkan kepada Pimpinan Perusahaan untuk disetujui.

### b. Bagian Pimpinan Perusahaan

Menerima daftar gaji dan menyetujui daftar gaji tersebut, selanjutnya diserahkan ke bagian *front office*/resepionis

### c. Bagian *Front Office*/Resepionis

Setelah mendapat daftar gaji yang disetujui oleh Pimpinan Perusahaan melalui *Quality Control*, maka *Front office* mencatat kas keluar gaji

masing-masing karyawan dan diserahkan kepada Pimpinan agar langsung diserahkan kepada masing-masing karyawan. Daftar gaji tersebut digunakan sebagai bukti pembayaran yang dicatat pada jurnal umum kemudian diarsip.

Sistem pengendalian intern dalam sistem pembayaran gaji dan upah yang dilakukan oleh Minimax Homestay adalah : Fungsi pembuat daftar gaji dan upah terpisah dari *front office*. Fungsi pencatat waktu hadir terpisah dari fungsi pembuat daftar gaji. Setiap perubahan gaji karyawan didasarkan pada keputusan Pimpinan perusahaan. Kartu daftar hadir diotorisasi oleh fungsi kepegawaian. Pengabsenan pada kartu daftar hadir karyawan diawasi oleh Pimpinan Perusahaan. Bukti kas keluar untuk pembayaran gaji dan upah diotorisasi oleh fungsi *Quality Control*. Analisis Terhadap Sistem Akuntansi Pembayaran Gaji pada Minimax Homestay.

Analisis terhadap formulir-formulir yang berhubungan dengan sistem akuntansi penggajian pada Minimax Homestay:

Kartu daftar hadir atau absensi, dokumen ini digunakan oleh bagian kepegawaian untuk mencatat kehadiran karyawan yang berupa kartu daftar hadir. Dokumen pendukung perubahan gaji merupakan surat-surat yang bersangkutan dengan karyawan seperti surat keputusan pengangkatan karyawan baru, pemberhentian dan kenaikan gaji yang diotorisasi oleh *Quality Control*. Dokumen ini sudah memadai karena sudah diotorisasi langsung oleh *Quality Control*.

Laporan penggajian adalah ringkasan gaji bersih yang diterima oleh karyawan berdasarkan daftar penggajian dan distribusinya benar. Penyerahan gaji disertai dengan tanda tangan pada daftar pegawai. Dengan demikian bentuk gaji dan upah yang digunakan sudah memadai karena mencantumkan nama, jasa, tunjangan dan pemotongan, sehingga diperoleh total gaji yang diterima. Analisis catatan akuntansi yang digunakan di Minimax Homestay yaitu catatan



pembukuan yang digunakan Minimax Homestay untuk membayar gaji masih belum memadai karena masih sangat sederhana, yaitu hanya dengan menulis pengeluaran di buku kas umum. Catatan akuntansi yang digunakan harus diperbarui untuk akuntansi yang lebih akurat. Kemudian Analisis alat yang digunakan oleh Minimax Homestay berupa, kalkulator dan komputer yang dapat membantu dalam pembuatan laporan. Dengan demikian, analisis alat yang digunakan sudah memadai. Analisis unit organisasi yang terlibat di Minimax Homestay adalah unit organisasi yang bertanggung jawab atas penggajian dan remunerasi, fungsi yang terlibat hanya *Quality Control* dan *Front Office*. Oleh karena itu, analisis unit organisasi, meskipun sangat sederhana, namun sudah cukup.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan pada bagian pembahasan mengenai analisis sistem pengendalian intern sistem penggajian pada Minimax Homestay, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Sistem penggajian di Minimax Homestay berbeda dengan teori yang ada: menurut teori, sistem penggajian dipisahkan menjadi sistem akuntansi yang bekerja secara mandiri, sedangkan di Minimax Homestay sistem akuntansi penggajian digabungkan. Perbedaan ini muncul dari kenyataan bahwa Minimax Homestay masih tergolong penginapan kecil dan masih sangat baru, namun sistem penggajian di Minimax Homestay berjalan dengan baik sesuai prosedur penggajian karena sudah dilakukan dengan benar departemen terkait. Dan formulir serta alat yang digunakan sudah memadai, namun buku catatan yang digunakan dalam pelaksanaan penggajian masih kurang karena hanya menggunakan buku kas umum dan unit penggajian organisasi, walaupun sangat sederhana namun cukup memadai, walaupun ada penggabungan dari fungsi waktu dan fungsi kepegawaian

## Saran

Berdasarkan temuan di atas, saran berikut dapat dibuat: Untuk sistem penggajian Minimax Homestay khususnya untuk buku catatan unit organisasi dan sistem pengendalian internal perlu dilakukan verifikasi ulang agar dapat mencapai tujuan dari sistem akuntansi.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Baridwan, Zaki. 2002. *Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode*. Yogyakarta: Akademika Akuntansi YKPN
- [2] IAI. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- [3] Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*. Edisi Ketiga. Yogyakarta : Salemba Empat
- [4] Samsul dan Mustafa. 2000. *Sistem Akuntansi (Pendekatan Manajerial)*.
- [5] Soemita Adi Koesoemah. 2001. *Sistem Akuntansi Prosedur dan Metode Suatu Pembahasan*. Bandung: CV. Sinar Bandung
- [6] Bungin, Burhan. 2007. *Analisis Data Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- [7] Moloeng, L. J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

**PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI  
UPT. PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG MEDAN**

Oleh

Aufia Zahra Fadillah<sup>1)</sup>, Juliana Nasution<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup>Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam  
Negeri Sumatera Utara

Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang,  
Sumatera Utara

Email : [1aufiazahraf98@gmail.com](mailto:1aufiazahraf98@gmail.com), [2juliananasution@uinsu.ac.id](mailto:2juliananasution@uinsu.ac.id)

**Abstrak**

Berkembangnya sebuah organisasi tidak terlepas oleh adanya sebuah kinerja, sebuah keharusan bagi setiap pegawai untuk mencapai kinerja yang baik agar tujuan utama dari Instansi dapat tercapai, hal ini tentu tidak lepas dari kualitas dan kapasitas pegawai dalam melakukan sebuah pekerjaan yang sudah menjadi tanggung jawabnya. maka untuk meningkatkan kinerja yang dihasilkan oleh pegawai, dapat dilakukan dengan lebih sering memotivasi pegawai karena kurangnya motivasi yang didapatkan pegawai dari atasan akan menjadikan para karyawan sering bermalas-malasan dalam bekerja karena menganggap atasan kurang perhatian terhadap kinerja dari para karyawan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif eksplanatori karena menjelaskan hubungan kausal antar variabel melalui pengujian hipotesis. Analisis hasil temuan penelitian ini adalah analisis terhadap kesesuaian teori, pendapat, maupun penelitian terdahulu yang telah dikemukakan hasil penelitian sebelumnya serta pola perilaku yang harus dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Hasil penelitian secara parsial merujuk bahwa variabel disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Hasil penelitian tidak secara parsial merujuk bahwa variabel motivasi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama ada pengaruh yang signifikan antara disiplin kerja dan motivasi terhadap kinerja pegawai.

**Kata Kunci : Disiplin Kerja, Motivasi dan Kinerja Pegawai**

**PENDAHULUAN**

Berkembangnya sebuah organisasi tidak terlepas oleh adanya sebuah kinerja, sebuah keharusan bagi setiap pegawai untuk mencapai kinerja yang baik agar tujuan utama dari Instansi dapat tercapai, hal ini tentu tidak lepas dari kualitas dan kapasitas pegawai dalam melakukan sebuah pekerjaan yang sudah menjadi tanggung jawabnya.

Suatu organisasi dituntut memiliki pandangan dan sikap disiplin untuk meningkatkan kinerja pegawai, disiplin merupakan fungsi manajemen sumber daya manusia terpenting dan berkaitan erat dengan pengelolaan sumber daya bagi suatu organisasi. Disiplin kerja pegawai adalah merupakan

modal yang penting yang harus dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil sebab menyangkut pemberian pelayanan publik. Dalam peraturan pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 yang diganti menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang peraturan disiplin pegawai negeri yang telah diatur dengan jelas kewajiban yang harus ditaati dan larangannya tidak boleh dilanggar. Namun ironisnya, kualitas etos kerja dan disiplin kerja pegawai secara umum masih tergolong rendah ini disebabkan banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh para pegawai.

Ada beberapa masalah yang terjadi yaitu kurangnya kesadaran pegawai terhadap disiplin kerja dan tidak adanya motivasi pegawai terhadap kinerja pegawai.

Permasalahan ini dapat disimpulkan berdasarkan kebiasaan yang sudah menjadi tradisi bagi beberapa pegawai dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya, dimana adanya beberapa pegawai yang tidak datang tepat waktu, adanya pegawai yang menunda-nunda pekerjaan, dan sering terjadi kesalahpahaman *miss-communication* antara pegawai satu dengan yang lainnya yang membuat pelaksanaan kerja jadi terhambat.

### Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk menguji dan menganalisis pengaruh disiplin kerja dan motivasi terhadap kinerja pegawai UPT. Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Medan.

## KAJIAN TEORI

### Disiplin Kerja

Menurut Rivai (2019), disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku.

Menurut Hasibuan (2018), kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Disiplin yang mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini mendorong gairah kerja, semangat kerja, dan terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat.

Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa, disiplin kerja adalah salah satu peran penting yang harus diperhatikan dalam suatu perusahaan, karena pada umumnya disiplin kerja mendorong gairah kerja, mengingggung rasa tanggung jawab seseorang dalam melakukan suatu pekerjaanserta meningkatkan kesadaran terhadap peraturan yang berlaku didalam

perusahaan. Dengan demikian perusahaan dapat dengan mudah mewujudkan tujuan perusahaan yang ingin dicapai.

### Motivasi

Motivasi berasal dari kata motif yaitu dorongan yang datang dari dalam untuk berbuat (Walgito, 2002). Motif berasal dari bahasa latin *Movere* yang berarti bergerak atau *to move* (Branca, dalam Romadona, 2007).

Woodworth (dalam Sobur, 2009) mengartikan motivasi sebagai suatu set yang dapat atau mudah menyebabkan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu (berbuat sesuatu) dan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Menurut Bahri (dalam Romadona, 2007) Motivasi adaah gejala psikologik dalam diri seseorang sadar atau tidak sadar dalam melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu.

Dari teori-teori di atas, dapat disimpulkan motivasi merupakan suatu dorongan yang ada dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapai suatu tujuan. Motivasi kerja didefinisikan sebagai kondisi yang berpengaruh membangkitkan, mengarahkan dan memelihara perilaku yang berhubungan dengan lingkungan.

### Disiplin Kerja, Motivasi dan Kinerja Pegawai

Dari beberapa penjealan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja dan motivasi memiliki pengaruh terhadap kinerja. Hal ini dikarenakan motivasi memiliki sifat penggerak keinginan seseorang untuk melakukan tindakan tertentu dalam hal seperti pencapaian hasil kerja, dengan adanya sifat disiplin kerja maka seseorang itu akan merasa diawasi dan merasa takut apabila melanggar suatu peraturan yang akan dikenakan sanksi. Oleh karena itu kedua variabel ini memiliki dampak yang positif dalam terciptanya kinerja yang baik.

Suatu organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh kinerja organisasi dalam mencapai tujuan, hal ini

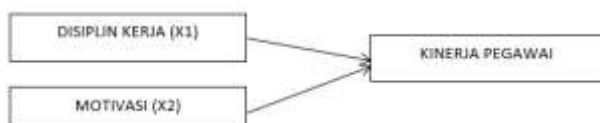
sangat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal organisasi. Kinerja pegawai dalam suatu organisasi tidak terlepas dari dua hal, pertama motivasi yaitu sifat yang membangkitkan semangat, kedua disiplin kerja yaitu sikap taat dan tertib terhadap aturan yang telah ditetapkan dalam melaksanakan tugas.

## METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di kantor UPT. Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Medan yang terletak di Jl. STM No. 17 pada tanggal 17 Januari – 17 Februari 2022. Metode pengambilan sampel adalah sensus atau sensus lengkap. Menurut Nazir (2005), sensus penuh adalah penentuan responden berdasarkan teknik sensus untuk seluruh anggota populasi, atau dapat dikatakan penelitian ini tidak menggunakan sampel, sehingga teknik yang digunakan adalah teknik sampling untuk seluruh pegawai UPT. Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Medan sebagai populasi. Jumlah sampel penelitian adalah 20 orang.

Pengumpulan data melalui wawancara dan pengisian kuesioner. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif eksplanatori karena menjelaskan hubungan kausal antar variabel melalui pengujian hipotesis.

Pengaruh disiplin kerja dan motivasi terhadap kinerja pegawai maka dapat disusun kerangka konseptual dalam penelitian ini, sebagai berikut :



Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### 1. Uji Validitas

Uji Validitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana validitas data yang didapat dari pengisian kuisisioner melalui wawancara. Uji validitas menggunakan *software* SPSS 22 *for windows*. Kriteria uji

validitas adalah jika nilai sig. (2-tailed) tiap variabel menggunakan *pearson correlation* < 0.05, maka variabel tersebut dinyatakan valid dan sebaliknya.

### 2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan uji kehandalan suatu alat ukur apabila pengukuran dilakukan berulang kali pada sampel yang berbeda. Uji realibilitas dilakukan dengan menggunakan metode *Cronbach's Alpha* dengan *Software* SPSS 20 *for windows*. Jika nilai Cronbach's Alpha  $\geq 0.60$  dan Probabilitas Sig. F  $\leq 0.05$ , maka data penelitian dianggap cukup baik dan reliabel untuk digunakan sebagai input dan proses penganalisaan data guna menguji hipotesis penelitian.

### 3. Analisis Data dengan Regresi Berganda

Regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel dependen (karakteristik individu) terhadap variabel dependen (kinerja pegawai).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Validitas

Uji validitas menurut sugiyono (2016:177) bahwa menunjukkan derajat ketetapan antara data factual yang terjadi pada objek data yang di kumpulkan oleh peneliti untuk mencari validitas sebuah item dan mengkorelasikan item tersebut dengan jumlah item. Data dalam penelitian ini dikatakan valid apabila memiliki nilai korelasi >0,444 atau nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel agar lebih jelasnya berikut ini adalah data uji validitas sebagai mana yang dimaksud di atas : Tabel 1 Hasil Uji Validitas

Variabel	No Item	Rhitung	Rtabel	Keterangan
Disiplin Kerja (X1)	X1.1	0,615	0,444	Valid
	X1.2	0,589	0,444	Valid
	X1.3	0,676	0,444	Valid
	X1.4	0,707	0,444	Valid
	X1.5	0,715	0,444	Valid
Motivasi (X2)	X2.1	0,908	0,444	Valid
	X2.2	0,836	0,444	Valid
	X2.3	0,875	0,444	Valid
	X2.4	0,785	0,444	Valid
	X2.5	0,459	0,444	Valid
Kinerja Pegawai (Y)	Y1	0,537	0,444	Valid
	Y2	0,735	0,444	Valid
	Y3	0,454	0,444	Valid
	Y4	0,754	0,444	Valid
	Y5	0,723	0,444	Valid

**Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan metode cronbach alpha. Dari uji terhadap kuisisioner diperoleh nilai seperti dalam tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas dengan Cronbach's Alpha pada ANOVA

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
0,809	15

Hasil uji reliabilitas diatas menunjukkan bahwa variabel karakteristik individu mempunyai koefisien Alpha 0,809 yaitu diatas 0,60 sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur pada variabel dari kuesioner adalah reliabel dan layak digunakan sebagai alat ukur.

**Uji Regresi Berganda**

Hasil perhitungan analisis regresi berganda dengan menggunakan program IBM SPSS 22 yaitu sebagai berikut :

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1,248	1,398		0,894	0,384		
	Disiplin Kerja	0,905	0,063	0,995	17,139	<0,001	0,996	1,004
	Motivasi	0,049	0,036	0,076	1,342	0,197	0,996	1,004

a. Dependen Variabel: Kinerja Pegawai

a. Dependen Variabel : Kinerja Pegawai  
Menurut Imam Ghozali (2011:101) jika nilai Sig. < 0,05 maka artinya variabel independen (X) secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). Menurut V. Wiratna Sujarweni (2014;155), jika nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka artinya variabel independen (X) secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Rumus untuk mencari Rumus untuk mencari tabel :

$$t_{tabel} = (\alpha/2 ; n-k-1) = (0,05/2 ; 20-2-1) = (0,025 ; 17) = 2,110$$

Uji statistik t pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual/parsial dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dari hasil perhitungan dengan menggunakan program IBM SPSS 20, berdasar tabel diatas, dapat dibuat rincian sebagai berikut :

1. Pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai

Nilai  $t_{hitung}$  untuk disiplin kerja sebesar 17,139 karena nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dibandingkan  $t_{tabel}$  ( $17,139 > 2,110$ ) maka hipotesis (H1) diterima, dan nilai sig. untuk disiplin kerja sebesar  $0,001 < 0,05$ . Artinya, disiplin kerja (X1) berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai (Y).

2. Pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai

Nilai  $t_{hitung}$  untuk motivasi sebesar 1,342 karena nilai  $t_{hitung}$  lebih kecil dibandingkan  $t_{tabel}$  ( $1,342 > 2,110$ ) maka hipotesis (H1) tidak diterima, dan nilai sig. untuk motivasi sebesar  $0,197 > 0,05$ . Artinya, motivasi (X2) tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai (Y).

**Uji F**

Pengujian dimaksud untuk mengetahui pengaruh signifikan antara disiplin kerja dan motivasi terhadap kinerja pegawai secara bersama-sama. Menurut Imam Ghozali (2011:101) jika nilai Sig. < 0,05 maka artinya variabel independen (X) secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2014;154), jika nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka artinya variabel independen (X) secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). Rumus mencari  $F_{tabel}$  :

$$F_{tabel} = (k ; n-k) = (2 ; 20-2) = (2 ; 18) = 3,55$$

ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.44,050	2	22,025	149,773	<0,001 <sup>b</sup>
	Residual	2,500	17	0,147		
	Total	46,550	19			

a. Dependen Variabel : Kinerja Pegawai

b. Predictors : (Constant), Motivasi, Disiplin Kerja

Hasil uji ANOVA atau uji F diperoleh  $F_{hitung}$  sebesar 149,773 dan  $F_{tabel}$  sebesar 3,55 ( $149,773 > 3,55$ ) dengan tingkat Sig. 0,001. Oleh karena itu, nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05, Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja (X1) dan motivasi (X2) berpengaruh secara simultan terhadap kinerja pegawai (Y).

## PEMBAHASAN

Analisis hasil temuan penelitian ini adalah analisis terhadap kesesuaian teori, pendapat, maupun penelitian terdahulu yang telah dikemukakan hasil penelitian sebelumnya serta pola perilaku yang harus dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Berikut ini ada tiga (3) bagian utama yang akan dibahas dalam analisis hasil temuan penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

### Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai

Berdasarkan hasil penelitian diatas antara disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada Kantor UPT. Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang diperoleh nilai  $t_{hitung}$  untuk disiplin kerja sebesar 17,139 karena nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dibandingkan  $t_{tabel}$  ( $17,139 > 2,110$ ) maka hipotesis (H1) diterima, dan nilai sig. untuk disiplin kerja sebesar  $0,001 < 0,05$ . Artinya bahwa secara parsial ada pengaruh signifikan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada

UPT. Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Medan.

Binjai.Sutrisno (2009, hal.87) Menyatakan “disiplin karyawan yang baik akan mempercepat tujuan perusahaan, sedangkan disiplin yang merosot akan menjadi penghalang dan meperlambat pencapaian perusahaan.

### Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai

Berdasarkan hasil penelitian diatas antara motivasi terhadap kinerja pegawai pada Kantor UPT. Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang diperoleh nilai  $t_{hitung}$  untuk motivasi sebesar 1,342 karena nilai  $t_{hitung}$  lebih kecil dibandingkan  $t_{tabel}$  ( $1,342 > 2,110$ ) maka hipotesis (H1) tidak diterima, dan nilai sig. untuk motivasi sebesar  $0,197 > 0,05$ . Artinya, motivasi tidak berpengaruh secara parsial terhadap kinerja pegawai UPT. Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Medan.

Menurut Samsudin (2010,hal. 281) mengemukakan bahwa motivasi adalah proses mempengaruhi atau mendorong dari luar terhadap seseorang atau kelompok kerja agar mereka mau melaksanakan sesuatu yang telah ditetapkan.

### Pengaruh Disiplin Kerja dan Motivasi Bersama-sama Terhadap Kinerja Pegawai

Berdasarkan hasil penelitian diatas antara disiplin kerja dan motivasi terhadap kinerja pegawai pada Kantor UPT. Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang diperoleh nilai hasil uji ANOVA atau uji F diperoleh  $F_{hitung}$  sebesar 149,773 dan  $F_{tabel}$  sebesar 3,55 ( $149,773 > 3,55$ ) dengan tingkat Sig. 0,001. Oleh karena itu, nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05, Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja dan motivasi secara bersama-sama berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada UPT. Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Medan.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan pengaruh karakteristik individu yang meliputi disiplin kerja dan motivasi terhadap kinerja pegawai UPT. Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Medan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian secara parsial merujuk bahwa variabel disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai.
2. Hasil penelitian tidak secara parsial merujuk bahwa variabel motivasi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama ada pengaruh yang signifikan antara disiplin kerja dan motivasi terhadap kinerja pegawai dengan  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $149,773 > 3,55$ )

### Saran

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka untuk meningkatkan kinerja yang dihasilkan oleh pegawai, dapat dilakukan dengan lebih sering memotivasi pegawai karena kurangnya motivasi yang didapatkan pegawai dari atasan akan menjadikan para karyawan sering bermalas-malasan dalam bekerja karena menganggap atasan kurang perhatian terhadap kinerja dari para karyawan.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Andi Prayogi, Muhammad, Muhammad Taufik Lesmana, and Lukman Hakim Siregar. *Pengaruh Kompetensi Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai*.
- [2] Disiplin Kerja, Pengaruh, Willy Yusnandar, and Roydi Nefri. "Pengaruh Disiplin Kerja Dan Pelatihan Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Budaya Organisasi Sebagai Variabel Moderasi Pada Rumah Sakit Milik Pemerintah Di

Kota Medan." <http://jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora>

- [3] Eldi, Andi, Indra Malka, Abdul Rahman Mus, and Muchtar Lamo. 2020. 3 CENTER OF ECONOMIC STUDENT JOURNAL *Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi Kerja, Dan Kemampuan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai*.
- [4] Esthi, Raniasari Bimanti, and Yustia Nadia Marwah. 2020. "Kinerja Karyawan: Motivasi Dan Disiplin Kerja Pada Pt Asahi Indonesia." *FORUM EKONOMI* 22(1): 130–37. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUM EKONOMI>.
- [5] NATA LIYAS Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Riau, Jeli, and Reza PRIMADI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Riau. *PENGARUH DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT*.
- [6] Salutondok, Y, and A S Soegoto. 2015. 849 *Jurnal EMBA Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi*.
- [7] Syaripuddin, Jasman. *Disiplin Dan Motivasi*.



ANALISIS IMPLEMENTASI PEMASARAN PRODUK ASURANSI SYARIAH DALAM  
MENINGKATKAN PENJUALAN  
(KPM Prestasi Agency PT. Prudential Life Assurance Kota Medan)

Oleh

Aisha Alvia<sup>1)</sup>, Fauzi Arif Lubis<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup>Asuransi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam , Universitas Islam Negeri  
Sumatera Utara

E-mail : <sup>1</sup>[176aishaalvia@gmail.com](mailto:176aishaalvia@gmail.com), <sup>2</sup>[Fauziariflbs@uinsu.ac.id](mailto:Fauziariflbs@uinsu.ac.id)

**Abstract**

Attracting the right customers and retaining them is very important for business success, therefore the need for a strategy in running a business, this strategy in order to achieve the company's predetermined business goals. In the marketing process is very necessary a strategy, strategy is a marketing process that is very important to run a business. Businesses must retain their clients, in order to remain profitable. The research on which this article is based investigates how marketing strategies carried out in the office (KPM) self-marketing achievements of PT agency. Prudential Life Assurance Medan. And whether the procedures used in this company are in accordance with islamic sharia principles. Qualitative research approach is used by researchers in carrying out this research, in this research researchers combine data by describing and describing a case in this prudential company. Marketing conducted by Prudential is how to market it directly to meet with clients and social media, services carried out in good ethics, polite and clear and open in conveying the products offered.

**Keywords:** Prosedur Procedures, Sharia Insurance, PT. Prudential Life Assurance Medan

**PENDAHULUAN**

Resiko tidak lepas dari kehidupan manusia mulai dari lahir sampai tutup usia, resiko yang terjadi bisa saja seperti kebakaran, kerampokan, kecelakaan dll. Diantara lembaga keuangan yang beroperasi dibidang jaminan adalah asuransi. Jika seseorang memiliki riwayat sakit maka mereka berfikir dan akan menyadari bahwasanya mereka membutuhkan asuransi, tentu saja mereka akan membeli. asuransi banyak memberikan manfaat yang akan didapat oleh masyarakat manfaat paling utama ialah meminimalkan kerugian yang terjadi. Ada beberapa faktor yang berpengaruh pada pemasaran faktornya yaitu kemampuan tenaga pemasar dalam menjualkan produk tersebut. Perusahaan tentunya mempunyai posisi terbaik dalam ingatan konsumen maka dalam persaingan strategi pemasaran ini agen harus memiliki kemampuan untuk melakukan faktor penjualan dan membuat para konsumen

tertarik agar mereka tetap pada produk yang perusahaan tawarkan. KPM prestasi agency telah menjalankan prosedur pemasaran syariah yang berlandaskan dengan syariat islam, penjualan perusahaan prudential ini pada bulan maret-juli tahun 2021 mengalami kenaikan. Untuk lebih jelasnya peneliti menyajikan jumlah data nasabah KPM Prestasi agency sebagai berikut :

**Tabel 1.1**

**Jumlah Nasabah KPM Prestasi Agency PT. Prudential Life Assurance Kota Medan Pada Bulan Maret-Juli Tahun 2021**

no	Bulan	Jumlah
1	Maret	16
2	April	23
3	Mei	27
4	Juni	32
5	Juli	37

Sumber : Dokumentasi PT. Prudential Life Assurance Cabang Kota medan

Tabel diatas membuktikan bahwa jumlah client KPM Prestasi agency tahun 2021 mengalami peningkatan pada bulan Maret-Juli. Kantor pemasaran mandiri prestasi agency adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa asuransi, Perusahaan ini merupakan salah satu kantor pemasaran mandiri yang berdiri sejak tahun 2009. Kantor pemasaran mandiri ini cukup terkenal dikota medan, Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti tertarik melakukan riset tentang Strategi Pemasaran STP (Segmenting, Targeting dan Positioning) Produk Asuransi Syariah pada KPM Prestasi agency.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan riset kualitatif digunakan peneliti dalam melaksanakan riset ini, dalam riset ini peneliti menggabungkan data dengan menggambarkan dan mendeskripsikan suatu kasus pada (KPM) kantor pemasaran mandiri prestasi agency PT. Prudential Life Assurance Medan. riset ini dilakukan yang Berdomisli Jln. Padang golf komplek CBD polonia blok E no 94 – 98 medan .

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **a. Strategi Pemasaran**

Menurut hermawan kertajaya, pemasaran adalah sebuah disiplin bisnis strategi yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran dan perubahan nilai dari suatu inisiator kepada stakeholdersnya. Pemasaran merupakan penetapan harga promosi, pembagian barang atau jasa. proses ini dapat memenuhi keinginan dari client maupun perusahaan. dari penjelasan diatas dapat dirangkum pengertian bahwa pemasaran adalah suatu kegiatan yang dimana terjadi pertukaran antara produk atau jasa dari pihak sipenjual kepada pembeli tujuan ini agar menciptakan nilai bagi pembeli dalam kondisi tetap menguntungkan pihak perusahaan. Atau dalam konsep pemasaran saat ini. suatu hubungan yang saling menguntungkan.

### **b. Segmentasi Pasar (Segmenting)**

Segmentasi pasar merupakan strategi yang dilakukan oleh perusahaan dalam membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang berbeda-beda berdasarkan kebutuhan, karakteristik atau perilaku yang berbeda. Segmen pasar adalah suatu proses yang dimana perusahaan mengelompokkan pasar menjadi beberapa beberapa konsumen yang berbeda. segmenting ini mengelompokkan dari beberapa bagian, karakter, atau sikap yang berbeda. dalam proses ini konsumen dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan pasar produk agar konsumen mempunyai persepsi yang sama dengan strategi pemasaran dalam penetapan kedudukan perusahaan.

### **c. Strategi targeting**

Strategi targeting merupakan kebutuhan yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk menjangkau pelanggan dengan penawaran lebih spesifik. dalam proses ini sebelumnya perusahaan akan menilai dan melihat, serta keinginan konsumen dari berbagai macam bagian pasar mana yang akan dijadikan target pemasaran.

ada 3 faktor yang harus diperhatikan sebelum menentukan target pasar

- a. Ukuran dan pertumbuhan segmen
- b. Kemenarikan struktural segmen
- c. Sasaran dan sumber daya

### **d. Strategi Positioning**

Menurut Philip Kotler, positioning adalah aktifitas mendesain citra dan memposisikan diri di benak konsumen. Sedangkan bagi Yoram Wind, positioning adalah bagaimana mendefinisikan identitas dan kepribadian perusahaan di benak pelanggan. Sebelum melakukan pemasaran hal yang harus kita lakukan ialah strategi positioning yang dimana strategi ini membuat para konsumen mempunyai kesan baik tentang perusahaan kita agar bisa mendapatkan posisi terbaik diingatan para konsumen. Tujuan ini dilakukan agar para konsumen bisa memahami

dan memandang tentang prosedur kerja perusahaan dengan para pesaing lainnya.

## PEMBAHASAN

### 1. Strategi Segmenting

Strategi *Segmenting* merupakan tahap awal dalam perumusan strategi pemasaran. segmen yang digunakan pada perusahaan asuransi ini ialah dengan mengelompokkan target pasar per daerah. tujuan strategi ini ialah agar memudahkan pertemuan dengan client dan mempermudah perusahaan dalam memasarkan produk atau jasa yang akan ditawarkan ke client. strategi segmen yang dilakukan perusahaan ini ialah membagi menjadi beberapa kelompok nasabah, yaitu dilihat dari pekerjaan, seperti pedagang, pegawai negeri sipil, petani, pegawai swasta, dll.

Tak hanya memasarkan produk asuransi secara langsung Perusahaan prudential asuransi juga memasarkan produk melalui sosial media agar menambah target perusahaan yang telah direncanakan. adanya media sosial ini maka produk asuransi meningkat dan masyarakat luas bisa memahami tentang produk asuransi. dengan ini mempercepat pemasaran produk asuransi ke masyarakat luas.

### 2. Strategi targeting

strategi targeting adalah suatu kegiatan mensurvei beragam tempat pasar sasaran yang akan menjadi target pemasaran. kegiatan ini harus dilihat oleh perusahaan apakah tempat yang akan menjadi target pasar memiliki karakter yang menarik antara lain seperti pertumbuhan, profabilitas, skala ekonomi, resiko yang rendah dan lain-lain. strategi ini sangat penting, karena pihak perusahaan lah yang akan menentukan untuk proses pemasaran. dalam menentukan target pemasaran perusahaan asuransi prudential tidak ada batasan, Perusahaan melayani seluruhnya. artinya perusahaan asuransi ini melayani semua kalangan nasabah tanpa terkecuali. agar semua masyarakat bisa dapat bergabung atau mempunyai asuransi sesuai dengan budget dan kesanggupan mereka masing-masing.

sebelum menjadi nasabah asuransi maka pihak perusahaan akan melihat latar belakang calon nasabah apakah mereka layak untuk menjadi nasabah atau tidak. penilaian ini dilihat dari semua kondisi nasabah yaitu pendapatan calon nasabah, kondisi kesehatan calon nasabah dll. tentu saja ini benar-benar dilihat oleh pihak perusahaan kepada calon nasabah, apakah calon nasabah layak atau tidak untuk menjadi bagian dari nasabah

### 3. Strategi Positioning

strategi positioning adalah suatu kegiatan perusahaan dalam menciptakan produk agar mempunyai kesan yang baik dalam ingatan konsumen. Strategi positioning yg diterapkan oleh Asuransi prudential membuat produk berbeda dari yang lain. contohnya produk asuransi jiwa dengan premi 100.000/bulan maka masyarakat berminat dengan produk tersebut karena harga yang sangat terjangkau. serta komunikasi yang efektif kemungkinan besar akan memengaruhi klien untuk tetap menggunakan asuransi tertentu, kepuasan, kepercayaan, pengetahuan broker atau asuransi, loyalitas, harga, komitmen, kualitas hubungan, dinamika hubungan dan terakhir manfaat produk.

Perusahaan KPM prestasi agency menerapkan pemahaman bahwa mendengarkan keluhan nasabah secara mendalam, Serta memiliki pemahaman bahwa kenyamanan dan keamanan hidup paling utama untuk nasabahnya. Sesuai dengan visi KPM prestasi agency together we build a better future yang artinya( bersama-sama kita membangun masa depan yang lebih baik) dan misi with love we create a succesful whole person concept ( dengan kasih kita membentuk kesuksesan manusia seutuhnya baik dalam kehidupan keluarga, spiritual, kesehatan, bisnis, edukasi, financial) sehingga terbentuk karakter integrity, respect, passion, profesional, team work. Dan bagian yang terpenting dari jasa keuangan adalah kepercayaan perusahaan ini sangat mengutamakan kejujuran. kejujuran inilah yang sangat diperhatikan oleh konsumen.

Karena yang sering diperhatikan oleh nasabahnya ialah bukanlah produknya, tetapi seberapa jauh tenaga pemasarnya bisa dipercaya

## PENUTUP

### Kesimpulan

Indonesia merupakan negara yang mayoritasnya pemeluk agama islam. Masyarakat muslim indonesia mencari produk asuransi dengan investasi yang berbasis syariah, prudential syariah merancang keuangan masa depan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam. Dalam penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa KPM prestasi agency PT. prudential life assurance adalah sebagai berikut :

1. segmen yang dilakukan KPM prestasi agency yang diterapkan perusahaan ini ialah dengan mengelompokkan target pasar perdaerah hal ini bertujuan agar memudahkan pertemuan antara agen dengan nasabah serta membagi beberapa kelompok nasabah, dilihat dengan pekerjaan, seperti pedagang, pegawai negeri sipil, petani, pegawai swasta,dll.
2. strategi trageting dalam menentukan target ini pemasar perusahaan asuransi prudential tidak ada batasan, Perusahaan melayani seluruhnya. artinya perusahaan asuransi ini melayani semua kalangan nasabah tanpa terkecuali. agar semua masyarakat bisa dapat bergabung atau mempunyai asuransi sesuai dengan budget dan kesanggupan mereka masing-masing.
3. strategi positionong yang dilakukan perusahaan prudential ini adalah memberikan premi dengan harga terjangkau agar masyarakat tertarik dengan produk yang dijual. perusahaan ini juga mengutamakan kejujuran serta kenyamanan dan keamanan hidup paling utama untuk nasabahnya.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian survei serta kesimpulan dari pembahasan diatas , maka

saran untuk perusahaan ini adalah selain mempromosikan produk secara langsung perusahaan juga bisa menggunakan cara yang berpengaruh yaitu memasang iklan, dan membuat suatu pameran untuk pelanggan. agar pelanggan tertarik dengan produk yang anda tawarkan, Perusahaan bisa menggunakan orang terpercaya untuk mengusulkan produk agar produk yang mereka jual lebih dapat diandalkan untuk semua orang. selain itu, perusahaan bisa memperluas segmen pasar dengan cara bekerja sama dengan perusahaan lain agar meningkatkan peluang bisnis serta menjaga kelemahan persaingan yang akan dihadapi sekarang dan masa mendatang.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] H, Kertajaya. & Muhammad, S. (2006). *Syariah Marketing*. Jakarta: Mizan.
- [2] K, Philip. & Amstrong. (2001). *Prinsip-Prinsip Pemasaran*. Jakarta: Erlangga.
- [3] K, Philip And G. Armstrong. 2004. *Dasar-Dasar Pemasaran*, Edisi Kesembilan. Jakarta:Penerbit Indeks.
- [4] H, Niken Tri. 2010. *Seluk Beluk Promosi Dan Bisnis: Cerdas Beriklan Untuk Usaha Kecil Dan Menengah*. Yogyakarta: A Plus Books
- [5] K, Philip. (1988), *Marketing Mangement: Analysis, Plannirlg Implementation and Conrrol*, Engelwood Cliffs, N. J : Prentice Hall, 6' edition.
- [6] D, Herman. 2004. *Manajemen Asuransi*. PT. Bumi Aksara: Jakarta.

.....

**PENGARUH KEPEMIMPINAN, BUDAYA ORGANISASI DAN MOTIVASI KERJA  
TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. THE UNIVENUS SERANG**

Oleh

Nazhar Amin Firmansyah<sup>1)</sup>, Vera Maria<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup>Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

E-mail : <sup>1</sup>[Firmansyahnazharamin@gmail.com](mailto:Firmansyahnazharamin@gmail.com), <sup>2</sup>[Vera.maria@untirta.ac.id](mailto:Vera.maria@untirta.ac.id)

**Abstract**

This study aims to determine the effect of Leadership ( $X_1$ ), Organizational Culture ( $X_2$ ) and Work Motivation ( $X_3$ ) on Employee Performance ( $Y$ ) at PT. The Univenus Serang. The sampling technique in this study is simple random sampling, the sample in this study amounted to 68 respondents. The method of collecting data is using a questionnaire and the measuring instrument used is the scale Likert. By using software IBM SPSS Statistics 25. The results of the partial study (t test) state that the leadership variable has a  $t_{count} > t_{table}$  that is  $2,991 > 1,998$  and a significance level of  $0,004 < 0,05$  meaning leadership has a positive and significant influence on employee performance, organizational culture variable has a  $t$  value  $t_{count} > t_{table}$  that is  $2,367 > 1,998$  and a significance level of  $0,021 < 0,05$  means that organizational culture has a positive and significant influence on employee performance, and the work motivation variable has a value of  $t_{count} > t_{table}$  that is  $2,525 > 1,998$  and the level of significance of  $0,014 < 0,05$  means that work motivation has a positive and significant influence on employee performance.

**Keywords: Leadership; Organizational Culture; Work Motivation; Employee Performance.**

**PENDAHULUAN**

Keberhasilan perusahaan sangat ditentukan oleh orang-orang yang bekerja didalamnya. Dengan itu suatu perusahaan harus bisa mengendalikan karyawannya dalam menghadapi tantangan atau masalah yang terjadi pada perusahaan. Penelitian ini meneliti tentang menurunnya kinerja karyawan di perusahaan PT. The Univenus Serang. Kinerja perusahaan akan sangat dipengaruhi oleh peran dari kinerja karyawan yang berada di dalam perusahaan karena pada hakekatnya perusahaan dijalankan oleh manusia, sama halnya dalam hal strategi bisnis, dalam persaingan bisnis yang semakin ketat ini, perusahaan dapat berhasil jika memiliki keunggulan yang kompetitif yang berkelanjutan. Karena maju mundurnya suatu perusahaan akan bergantung pada kepemimpinannya dalam mengelola organisasi, karena loyalitas dan disiplin karyawan akan memberikan dukungan terhadap pemimpin yang bertanggung jawab dan berdedikasi tinggi. Untuk menciptakan

suasana kerja yang kondusif dan berkembang kepada karyawan, perlu adanya dukungan budaya organisasi yang baik bagi seluruh karyawan dalam perusahaan. Untuk mendukung pencapaian kinerja karyawan, peranan motivasi sangatlah penting sebagai kekuatan yang ada dalam diri individu yang akan menggerakkan orang-orang untuk melakukan sesuatu dengan lebih bersemangat terutama dalam motivasi kerja yang berperan bagi prestasi kerja karyawan. Kesuksesan dan kinerja perusahaan bisa dilihat dengan meneliti kinerja karyawan dalam suatu perusahaan dan hal yang sangat penting dalam upaya membantu karyawan agar mampu menampilkan kinerja yang optimal untuk mencapai keberhasilan tujuan perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepemimpinan, budaya organisasi dan motivasi kerja berpengaruh masing masing terhadap kinerja karyawan pada PT. The Univenus Serang.

**TINJAUAN LITERATUR**

## Kepemimpinan

Kepemimpinan menurut Rizal *et al* (2021) merupakan suatu proses yang dapat mempengaruhi dan mengarahkan anggotanya dalam suatu kelompok untuk melaksanakan tugasnya.

Indikator variabel kepemimpinan menurut Kartono (2017) mendefinisikan ada enam indikator dalam kepemimpinan, diantaranya yaitu: (1) Mengambil Keputusan. (2) Memotivasi. (3) Komunikasi. (4) Mengendalikan Bawahan. (5) Tanggung Jawab. (6) Mengendalikan Emosional.

## Budaya Organisasi

Menurut Muis *et al* (2018), menyatakan bahwa budaya organisasi adalah kepribadian perusahaan yang tumbuh oleh sistem nilai yang menimbulkan norma yang mengenai perilaku yang tercermin dalam persepsi, sikap dan perilaku orang-orang yang ada dalam organisasi ataupun perusahaan.

Indikator variabel budaya organisasi menurut Arifudin (2020), mempunyai empat indikator diantaranya, yaitu: (1) Inovasi dan pengambilan resiko. (2) Perhatian terhadap detail. (3) Orientasi tim. (4) Keagresifan.

## Motivasi Kerja

Menurut Tampi (2014), mendefinisikan motivasi adalah dorongan atau semangat yang timbul dalam diri seseorang karyawan untuk melakukan sesuatu atau bekerja, karena adanya rangsangan dari luar baik dari atasan serta adanya dasar untuk memenuhi kebutuhan dan rasa puas, serta memenuhi tanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan dan dilakukan dalam organisasi.

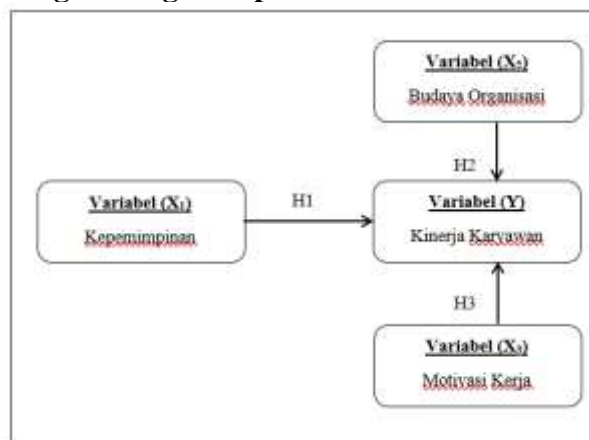
Indikator yang mempengaruhi variabel motivasi kerja menurut Mangkunegara (2017), mendefinisikan ada enam indikator motivasi kerja yaitu: (1) Kerja Keras. (2) Orientasi Masa Depan. (3) Tingkat Cita-Cita yang Tinggi. (4) Orientasi Tugas. (5) Usaha Untuk Maju. (6) Ketekunan Bekerja.

## Kinerja Karyawan

Mangkunegara (2017), mendefinisikan konsep kinerja karyawan berfokus pada hasil kerja karyawan secara kualitas dan kuantitas yang telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.

Indikator – indikator dari variabel kinerja karyawan yang dikemukakan oleh Sedarmayanti (2018), terdapat lima indikator yaitu : (1) Kuantitas Kerja. (2) Ketepatan Waktu. (3) Inisiatif. (4) Kemampuan. (5) Komunikasi.

## Pengembangan Hipotesis



Gambar 1 Pengembangan Model Hipotesis

H1 : Kepemimpinan berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Karyawan.

H2 : Budaya Organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Karyawan.

H3 : Motivasi Kerja berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Karyawan.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian ini mengarah kepada jenis penelitian deskriptif, dengan jenisnya yaitu penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017) penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berdasar filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

### Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini populasinya dari karyawan tetap bagian departemen produksi pada PT. The Univenus Serang yang

berjumlahkan 213 karyawan. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik simple random sampling. Maka sampel yang digunakan diambil dari populasi dengan dihitung menggunakan rumus Slovin dan diketahui bahwa jumlah sampel yang dibutuhkan adalah 68 karyawan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Kualitas Data

#### 1. Uji Validitas

No	Variabel	r hitung	Estimasi	r tabel	Keterangan
1	Kepemimpinan				
	P1	0,594	>	0,2387	Valid
	P2	0,697	>	0,2387	Valid
	P3	0,586	>	0,2387	Valid
	P4	0,656	>	0,2387	Valid
	P5	0,611	>	0,2387	Valid
2	Budaya Organisasi				
	P1	0,722	>	0,2387	Valid
	P2	0,627	>	0,2387	Valid
	P3	0,719	>	0,2387	Valid
	P4	0,768	>	0,2387	Valid
	3	Motivasi Kerja			
P1		0,754	>	0,2387	Valid
P2		0,784	>	0,2387	Valid
P3		0,668	>	0,2387	Valid
P4		0,629	>	0,2387	Valid
P5		0,529	>	0,2387	Valid
4	Kinerja Karyawan				
	P1	0,690	>	0,2387	Valid
	P2	0,658	>	0,2387	Valid
	P3	0,704	>	0,2387	Valid
	P4	0,605	>	0,2387	Valid
	P5	0,757	>	0,2387	Valid

Hasil uji pada tabel menunjukkan bahwa nilai korelasi dari tiap skor butir pertanyaan variabel yang ada dalam penelitian lebih besar dari **0,2387 (r hitung > r tabel)** yang berarti **valid**, artinya semua item pertanyaan/ pernyataan mampu mengukur variabel kepemimpinan, budaya organisasi, motivasi kerja dan kinerja karyawan.

#### 2. Uji Reliabilitas

Variabel Penelitian	rhitung	r kriteria	Keterangan
Kepemimpinan (X1)	0,700	0,60	Reliabel
Lingkungan Kerja Fisik (X2)	0,663	0,60	Reliabel
Motivasi Kerja (X3)	0,765	0,60	Reliabel
Kinerja Karyawan (Y)	0,705	0,60	Reliabel

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai Cronbach Alpha dari seluruh variabel yang diujikan nilainya sudah di atas 0,60, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam

penelitian ini lolos dalam uji reliabilitas dan dinyatakan reliabel.

## PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diatas, peneliti melakukan pengujian yang dapat diuraikan yakni:

### Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan:

Hasil analisis data pada variabel kepemimpinan memperoleh nilai signifikan 0,004 ( $0,004 < 0,05$ ) dan nilai uji hipotesis 2,991 ( $2,991 > 1,998$ ). Artinya bahwa kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, hal ini mengindikasikan bahwa semakin tingginya intensitas kepemimpinan yang diberikan kepada karyawan PT. The Univenus Serang, maka semakin tinggi juga kinerja karyawan pada PT. The Univenus Serang, sehingga hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan diterima.

### Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan:

Hasil analisis data pada variabel budaya organisasi memperoleh nilai signifikan 0,021 ( $0,021 < 0,05$ ) dan nilai uji hipotesis 2,367 ( $2,367 > 1,998$ ). Artinya bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik budaya organisasi pada perusahaan, maka akan semakin tinggi juga kinerja karyawan pada PT. The Univenus Serang, sehingga hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan diterima.

### Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan:

Hasil analisis data pada variabel motivasi kerja memperoleh nilai signifikan 0,014 ( $0,014 < 0,05$ ) dan nilai uji hipotesis 2,525 ( $2,525 > 1,998$ ). Artinya bahwa motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kinerja karyawan, hal ini mengindikasikan semakin tinggi motivasi kerja yang diberikan karyawan PT. The Univenus Serang, maka semakin tinggi juga kinerja karyawan pada PT. The Univenus Serang, sehingga hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan diterima.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Merujuk hasil analisis data yang sudah dilaksanakan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan
2. Budaya Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan
3. Motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan

### Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti setelah melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Upaya untuk meningkatkan kinerja karyawan pihak manajemen pada PT. The Univenus Serang dapat dilakukan dengan meningkatkan kepemimpinan pada perusahaan. Kepemimpinan dapat ditingkatkan dengan cara membangun komunikasi dua arah antara pemimpin dan karyawan dalam setiap kegiatan pekerjaan agar hubungan yang lebih akrab. Pemimpin mampu memberikan motivasi kepada karyawan dengan cara memberikan *reward* dalam bentuk penghargaan ataupun insentif, dan pemimpin harus bisa mengambil keputusan yang baik dan cepat agar dapat meningkatkan kualitas kepemimpinannya sehingga kinerja karyawan lebih meningkat.

2) Upaya untuk meningkatkan kinerja karyawan pihak manajemen pada PT. The Univenus Serang dapat dilakukan dengan memperbaiki budaya organisasi. Budaya organisasi dapat ditingkatkan dengan melakukan sosialisasi yang baik dan

menyampaikan nilai yang di kehendaki dalam bahasa yang dianut oleh kebanyakan karyawan, memberikan perhatian yang lebih detail kepada karyawan dengan memperlihatkan presisi (kecermatan) dan analisis yang baik, menyemangati karyawan dengan bersikap agresif dan kompetitif dalam bekerja, mendorong karyawan agar lebih inovatif dan berani untuk mengambil resiko dalam bekerja. Budaya organisasi yang diterapkan dengan baik akan menciptakan suasana kerja yang kondusif dalam pekerjaannya.

3) Motivasi kerja yang tinggi akan menghasilkan tingkat kinerja yang tinggi pula. Berdasarkan hal tersebut maka pihak manajemen PT. The Univenus Serang dapat melakukan mengupayakan karyawannya agar memiliki motivasi kerja yang tinggi dengan cara memenuhi kebutuhan karyawan dalam bekerja, memberikan kesempatan kerja yang sesuai minat dengan berorientasi pada tugas yang diberikan perusahaan, memberikan jaminan hari tua pada karyawan agar terciptanya orientasi masa depan dan memberikan penghargaan kepada karyawan agar karyawan tekun dalam bekerja.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Afandi, A., & Bahri, S. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Motivasi Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 3(2), 235-246.
- [2] Ainanur, A., & Tirtayasa, S. (2018). Pengaruh Budaya Organisasi, Kompetensi dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 1(1), 1-14.
- [3] Amanda, E. A., Budiwibowo, S., & Amah, N. (2017). Pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan di PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun. *Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 6(1), 1-12.



- [4] Amirullah. (2015). *Kepemimpinan & Kerja Sama Tim*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- [5] Andayani, I., & Tirtayasa, S. (2019). Pengaruh Kepemimpinan, Budaya Organisasi, Dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 2 (1), 45–54.
- [6] Any Isvandiari. (2018). Pengaruh Kepemimpinan Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt Central Capital Futures Cabang Malang. *Urnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia (Jibeka)*, 2018, 6.
- [7] Arifudin, O. (2020). Analisis Budaya Organisasi Dan Komitmen Organisasi Karyawan Bank Swasta Nasional Di Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 73-87.
- [8] Azizah, F. N. (2017). Pengaruh Kepemimpinan Situasional dan Budaya Organisasi Terhadap Motivasi Kerja dan Kinerja Karyawan. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 4(1).
- [9] Darodjat, T. A. (2015). Konsep-konsep dasar manajemen personalia masa kini.
- [10] Fadhil, A., & Mayowan, Y. (2018). Pengaruh Motivasi Kerja Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Ajb Bumiputera. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 54(1), 40-47.
- [11] Fadli, R., & Hasanudin, H. (2021). Pengaruh Kepemimpinan, Budaya Organisasi dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT. Tunas Perkasa Tekindo. *JIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 4(4), 301-308.
- [12] Farhah, A., Ahiri, J., & Ilham, M. (2020). Pengaruh Motivasi Kerja Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Online Program Studi Pendidikan Ekonomi*, 5(1), 1-7.
- [13] Ghozali, Imam. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- [14] Harahap, D. S. & Khair, H. (2019). Pengaruh Kepemimpinan Dan Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja Melalui Motivasi Kerja. *Jurnal Ilmiah Magister Manajemen Umsu*, 2(1), 69-88.
- [15] Hasibuan, Malayu. (2014). “Manajemen Sumber Daya Manusia”. Edisi Revisi, Pt Bumi Aksara. Jakarta.
- [16] Hasibuan, S. M. (2018). Pengaruh Kepemimpinan, Lingkungan Kerja Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 1(1), 71-80.
- [17] Irham Fahmi, *Manajemen Sumber Daya Manusia Teori Dan Aplikasi (Bandung: Alfabeta, 2016)*, Hlm. 176.
- [18] Jufrizen, J., & Rahmadhani, K. N. (2020). Pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai dengan lingkungan kerja sebagai variabel moderasi. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis Dewantara (JMD)*, 3(1), 66-79.
- [19] Kartono, K. (2017). *Pemimpin Dan Kepemimpinan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [20] Mangkunegara, A. A. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.
- [21] Mathis, R. L., & Jackson, J. H. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat.
- [22] Muis, M. R., Jufrizen, J., & Fahmi, M. (2018). Pengaruh budaya organisasi dan komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 1(1), 9-25.
- [23] Muizu, W. O. Z., Kaltum, U., & Sule, E. T. (2019). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan. *Perwira-Jurnal Pendidikan Kewirausahaan Indonesia*, 2(1), 70-78.
- [24] Nurcahyani, N. M., & Adnyani, I. D. (2016). Pengaruh Kompensasi Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan

- Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening (Doctoral Dissertation, Udayana University).
- [25] Ochanantha, A., Al Musadieg, M., & Mukzam, M. D. (2017). Pengaruh Hasil Pelatihan Berbasis Kompetensi Terhadap Kinerja Studi Pada Karyawan Bagian Frontliner Pt. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Area Tangerang Bintaro. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 51(2), 126-134.
- [26] Romli, M., Djaelani, A. K., & Rizal, M. (2021). Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi Dan Komunikasi Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada Usaha Dagang Sumber Rejeki Konang Bangkalan). *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen*, 10(17).
- [27] Roring, F. (2017). Pengaruh Kepemimpinan, Pembagian Kerja Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt Bank Danamon Cabang Manado. *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Inovasi*. Vol. 4. No. 3.
- [28] Saputro, G. B., & Siagian, H. (2017). The Effect Of Leadership Style On Employee Performance Through Moderating Variable Work Motivation In The Head Office Of Ptmarifood.– Jakarta. *Agora*, 5(3).
- [29] Sari Et Al. (2018). Gambaran Gaya Kepemimpinan, Motivasi Kerja Serta Kinerja Karyawan Cipanas Indah Hotel Di Garut. *Journal Of Business Management Education (Jbme)*, 3(2), 54-66.
- [30] Sari, R. N. I., & Hadijah, H. S. (2016). Peningkatan Kinerja Pegawai Melalui Kepuasan Kerja Dan Disiplin Kerja. *Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran (Jpmanper)*, 1(1), 204-214.
- [31] Sedarmayanti, H. (2018). Manajemen Sumber Daya Manusia; Reformasi Birokrasi Dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Reflika Aditama.
- [32] Sedarmayanti. (2017). Perencanaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Untuk Meningkatkan Kompetensi, Kinerja, Dan Produktivitas Kerja. In Perencanaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Untuk Meningkatkan Kompetensi, Kinerja, Dan Produktivitas Kerja.
- [33] Sedarmayanti. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi Dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Bandung: Pt. Refika Aditama.
- [34] Setiana, A. R. (2019). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari
- [35] Setiawan, B. A., & Muhith, A. (2013). Transformational Leadership (Illustration In The Field Of Educational Organization). Jakarta: Rajawali Pers.
- [36] Siagian, T. S., & Khair, H. (2018). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 1(1), 59-70.
- [37] Sudaryo, Y., Aribowo, A., & Sofiati, N. A. (2018). Manajemen Sumber Daya Manusia, Kompensasi Tidak Langsung Dan Lingkungan Kerja Fisik. Yogyakarta: Cv Andi Offset.
- [38] Sugiono, E., & Pratista, R. M. (2019). Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Motivasi Dan Lingkungan Kerja Fisik Terhadap Kinerja Karyawan Pt Rafa Topaz Utama Di Jakarta. *Oikonomia: Jurnal Manajemen*, 14(2).
- [39] Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- [40] Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta
- [41] Susanto, N. (2019). Pengaruh Motivasi Kerja, Kepuasan Kerja, Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Divisi Penjualan Pt Rembaka. *Agora*, 7(1).

- [42] Suwardi., Dan Daryanto. (2018). Pedoman Praktis K3lh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dan Lingkungan Hidup. Yogyakarta: Gava Media.
- [43] Tampi, B. J. (2014). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Bank Negara Indonesia, Tbk (Regional Sales Manado). Acta Diurna Komunikasi, 3(4).
- [44] Tarigan, Y., & Rozzyana, R. (2018). Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. Journal Of Applied Managerial Accounting, 2(1), 26-40
- [45] Veithzal, Rivai. (2015). Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Edisi Ke 7. Depok: Pt. Raja Grafindo.
- [46] Virgiyanti, V., & Suharyono, B. S. (2018). Pengaruh Lingkungan Kerja Fisik Dan Non Fisik Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada Karyawan Divisi Fresh Pt. Trans Retail Indonesia (Carrefour) Plaza Tangerang City). Jurnal Administrasi Bisnis, 61(2), 55-60.
- [47] Wahyuni, A., & Suryalena, S. (2017). Pengaruh Pelatihan Dan Motivasi Kerja Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Pln (Persero) Area Pekanbaru Rayon Kota Timur (Doctoral Dissertation, Riau University)

HALAMAN INI SENGAJA  
DIKOSONGKAN

.....

**KAJIAN PENGARUH PROFESIONALISME, KOMITMEN ORGANISASI DAN KOMUNIKASI ORGANISASI TERHADAP KINERJA GURU MELALUI KEPUASAN KERJA PADA SMK NEGERI KALIBARU BANYUWANGI**

Oleh

Yani Dahliani<sup>1)</sup>, Agustin Hari<sup>2)</sup>, Khusnul Laily Fitria<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3</sup>STIE Mandala Jember

E-mail: [yani@stie-mandala.ac.id](mailto:yani@stie-mandala.ac.id)

**Abstract**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara langsung dan tidak langsung dari variabel profesionalisme, komitmen organisasi dan komunikasi organisasi terhadap kinerja guru melalui kepuasan kerja pada SMK Negeri Kalibaru Banyuwangi. Metode pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan Metode Uji Instrumen Data yaitu uji validitas dan uji reliabilitas, Uji Asumsi Klasik yaitu uji normalitas, uji heterokedastisitas dan uji multikolinieritas, Analisis Uji Jalur (Path Anlysis), Uji Hipotesis yaitu Uji T, Uji Determinasi Dan Uji Sobel, dengan bantuan alat analisis SPSS 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel profesionalisme dan komunikasi organisasi berpengaruh langsung terhadap kinerja guru pada SMK Negeri Kalibaru Banyuwangi, profesionalisme berpengaruh secara langsung terhadap kepuasan kerja pada SMK Negeri Kalibaru Banyuwangi, kinerja berpengaruh langsung terhadap kepuasan kerja pada SMK Negeri Kalibaru Banyuwangi. Untuk hasil uji sobel variabel profesionalisme, komitmen organisasi dan komunikasi organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja guru melalui kepuasan kerja pada SMK Negeri Kalibaru Banyuwangi

**Keywords: Profesionalisme, Komitmen Organisasi, Komunikasi Organisasi, Kinerja Guru Kepuasan Kerja**

**PENDAHULUAN**

Era globalisasi menjadikan dunia tanpa batas, perkembangan ilmu pengetahuan semakin pesat dan informasi dunia dapat diperoleh dengan mudah. Hal ini menuntut setiap organisasi baik swasta maupun pemerintah agar dapat berorientasi pada tujuan jangka panjang dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh M. Sannusy, dkk (2016) dengan judul “Pengaruh Profesionalisme Dan Motivasi Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru Pada SMP Negeri se Kecamatan Kuto Baro” dengan adanya orientasi profesionlisme dapat mempengaruhi pegawai untuk bersikap bertanggung jawab yang akan berdampak pada hasil kinerja yang berkualitas.

Komitmen organisasi juga berpengaruh dalam perkembangan sebuah lembaga

pendidikan dan organisasi, berdasarkan penelitian terdahulu oleh Rita Hayati, dkk (2020) dengan judul “Pengaruh Komitmen Organisasi dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru Pada SMA 1 Sungai Rotan” dengan adanya penanaman komitmen organisasi yang kuat dalam diri pegawai dapat meningkatkan kinerja pegawai menjadi lebih baik dengan begitu tujuan organisasi dapat terlaksana dengan baik.

Didalam dunia kerja komunikasi sangat dibutuhkan oleh setiap orang untuk berinteraksi satu sama lain. Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Nila Lestiawati (2019) dengan judul “Pengaruh Komitmen Organisasi dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja guru di SMA Negeri 2 Kota Singkawang” dengan adanya komunikasi organisasi yang baik dapat memudahkan pegawai dalam beraktivitas memenuhi tuntutan kerjanya.

## METODE PENELITIAN

### A. Gambaran Umum Objek

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMK N) yang terletak di Jl. Jember No. 122, dusun tegal pakis kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur yang berdiri pada tahun 2002 dengan 3 kompetensi keahlian yaitu akuntansi, budidaya ternak ruminansia, budidaya ikan air tawar. Dengan seiring berjalannya waktu SMK Negeri terus berkembang dalam berbagai hal salah satunya menambah bidang keahlian yang bisa menjadi pilihan untuk siswa yang ingin belajar di tempat ini, perkembangan ini dimulai pada tahun 2004 hingga 2021 saat ini sehingga kompetensi keahlian di SMK Negeri Kalibaru menjadi 7 kompetensi keahlian diantaranya :

1. Akuntansi
2. Agribisnis Ternak Ruminansia
3. Agribisnis Perikanan
4. Teknik Kendaraan Ringan
5. Agribisnis Ternak Unggas
6. Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ)
7. Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian (APHP)

### B. Populasi

Menurut Arikunto (2012:108), populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Sesuai dengan pernyataan tersebut maka populasi pada penelitian ini adalah seluruh guru yang ada di SMK Negeri Kalibaru Banyuwangi yaitu sebanyak 90 orang

### C. Sampel

Sampel menurut Arikunto (2012:109) adalah sebagian dari populasi yang diteliti. Berdasarkan teori Surakhmad (1994) menjelaskan bahwa apabila ukuran populasi sebanyak kurang dari 100, maka pengambilan sampel sekurang-kurangnya 50% dari populasi, maka peneliti mengambil jumlah sampel sebanyak 45 responden yang berarti 50% dari jumlah populasi (90). Metode yang digunakan yaitu metode purposive sampling, dengan karakteristik responden pada penelitian ini adalah Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di SMK Negeri Kalibaru Banyuwangi.

### D. Identifikasi Variabel Penelitian

1. Variabel bebas  
Variabel bebas pada penelitian ini adalah variabel profesionalisme, komitmen organisasi dan komunikasi organisasi
2. Variabel Terikat  
Variabel terikat pada penelitian ini adalah variabel kinerja guru
3. Variabel Intervening  
Variabel intervening pada penelitian ini adalah kepuasan kerja

### E. Definisi Operasional Variabel

Menurut Kurniati (2012:01), profesionalisme adalah sebutan yang mengacu pada anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Indikator profesionalisme adalah :

1. Menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu
2. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran
3. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif
4. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri

Komitmen organisasi adalah sikap merefleksikan perasaan suka atau tidak suka dari karyawan terhadap organisasi. Indikator komitmen organisasi yaitu :

1. Kemauan
2. Ksesetiaan
3. Kebanggaan

Komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan baik dalam organisasi didalam kelompok formal maupun kelompok informal organisasi. Indikator komunikasi organisasi yaitu :

1. Bijaksana dan sopan
2. Penerimaan umpan balik
3. Berbagi informasi
4. Memberikan informasi tugas

#### 5. Mengurangi ketidakpastian tugas

Kinerja guru adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan pembimbingan dalam pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Indikator kinerja guru yaitu :

1. Hasil kerja
2. Prakarsa
3. Sikap
4. Kecerdasan emosional

Kepuasan kerja adalah persepsi dan nilai dari karakteristik lingkungan pekerjaan seperti kompensasi, otonomi, rekan kerja dan produktivitas. Indikator kepuasan kerja yaitu:

1. Pekerjaan itu sendiri
2. Upah/gaji
3. Promosi
4. Rekan kerja
5. Pengawasan

#### F. Metode pengumpulan data

1. Observasi
2. Wawancara
3. Kuesioner

#### G. Metode analisis data

1. Uji instrumen data
  - a. Uji validitas
  - b. Uji reliabilitas
2. Uji instrumen data
  - a. Uji normalitas
  - b. Uji heterokedastisitas
  - c. Uji multikolinieritas

### ANALISIS HASIL PENELITIAN

#### 1. Uji Instrumen Data

##### a. Uji Validitas

Berdasarkan hasil uji validitas dapat diketahui hasil pengujian validitas menunjukkan seluruh pernyataan yang digunakan pada kuisioner penelitian ini valid dan dapat digunakan sebagai instrumen data penelitian.

##### b. Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil uji reliabilitas dapat diketahui hasil pengujian reliabilitas menunjukkan nilai *cronbach alpha* > 0.60, maka seluruh pernyataan yang digunakan pada penelitian ini reliabel dan dapat

digunakan sebagai instrumen data penelitian.

#### 2. Uji Asumsi Klasik

##### a. Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan metode kolmogrov-smirnov menunjukkan bahwa nilai residulanya normal dan data terdistribusi secara normal dengan nilai signifikasinya 0.200 yang berarti lebih besar dari 0.05.

##### b. Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan uji heterokedastisitas menggunakan metode *scatterplot* titik-titik yang di dihasilkan menyebar dan berbentuk tidak beraturan sehingga pada uji ini tidak terjadi heterokedastisitas.

##### c. Uji Multiikolinieritas

Berdasarkan uji multikolinieritas semua variabel dari penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas karena nilai cut off tolerance >0,10 dan nilai VIF <10.0.

#### 3. Analisis jalur

##### a. Model 1

Mengacu pada output analisis jalur model 1 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari ketiga variable yaitu  $X_1 = 0.037$ ,  $X_2 = 0.734$  dan  $X_3 = 0.029$ . Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa regresi model 1, yakni variable  $X_1$  dan  $X_3$  berpengaruh signifikan terhadap  $Z$ , sedangkan variable  $X_2$  tidak berpengaruh signifikan terhadap  $Z$ . besarnya nilai  $R^2$  atau  $R$  square yang terdapat pada table model summary adalah sebesar 0.204, hal ini menunjukkan bahwa kontribusi atau sumbangan pengaruh  $X_1$ ,  $X_2$  dan  $X_3$  terhadap  $Z$  adalah sebesar 20.4% sementara sisanya merupakan kontribusi dari variable-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. sementara itu, untuk nilai  $e_1$  dapat dicari  $\sqrt{1-0.204} = 0.892$

##### b. Model 2

Mengacu pada output analisis jalur model 2 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari keempat variable yaitu  $X_1 = 0.000$ ,  $X_2 = 0.030$ ,  $X_3 = 0.140$  dan  $Z = 0.034$ . Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa regresi model 2, yakni variable  $X_1$ ,  $X_2$  dan  $Z$  berpengaruh signifikan

terhadap Y, sedangkan variable X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. besarnya nilai R<sup>2</sup> atau R square yang terdapat pada table model summary adalah sebesar 0.521, hal ini menunjukkan bahwa kontribusi atau sumbangan pengaruh X1, X2 dan X3 terhadap kepuasan kerja adalah sebesar 52.1% sementara sisanya merupakan kontribusi dari variable-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. sementara itu, untuk nilai e<sup>2</sup> dapat dicari  $\sqrt{1 - 0.521} = 0.692$

#### 4. Uji Hipotesis

##### a. Uji t

Berdasarkan uji t menunjukkan bahwa variabel X1, X3 terhadap Z dinyatakan signifikan dengan nilai signifikansinya 0.037 dan  $0.029 < 0.05$ , X2 dinyatakan tidak signifikan terhadap Z karena nilai signifikansinya  $0.734 > 0.05$ . Sedangkan X1, X2 dan Z dinyatakan signifikan terhadap Y karena nilai signifikannya 0.000, 0.030 dan  $0.034 < 0.05$ , X3 dinyatakan tidak signifikan terhadap Y karena nilai signifikansinya  $0.734 > 0.05$

##### b. Uji Determinasi

###### Model 1

Berdasarkan hasil uji determinasi model 1 dengan nilai koefisien di ketahui bahwa X1, X2, X3 terhadap Z sebesar 0.204, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepuasan kerja (Z) dipengaruhi 20.4% oleh profesionalisme (X1), komitmen organisasi (X2) dan Komunikasi organisasi (X3). Sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak termasuk dalam penelitian ini misal motivasi kerja, kepemimpinan dan sebagainya.

###### Model 2

Berdasarkan hasil uji determinasi model 2 dengan nilai koefisien di ketahui bahwa X1, X2, X3 terhadap Y melalui Z sebesar 0.521, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja guru (Y) dipengaruhi 52.1% oleh profesionalisme (X1), komitmen organisasi (X2), Komunikasi organisasi (X3) melalui kepuasan kerja (Z). Sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak termasuk dalam

penelitian ini misal motivasi kerja, kepemimpinan dan sebagainya.

#### 5. Uji sobel

##### a. Uji sobel X1 terhadap Y melalui Z

Dari hasil uji sobel menunjukkan bahwa variabel profesionalisme (X1) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja guru (Y) melalui kepuasan kerja (Z), karena hasil t hitung  $< t$  tabel sebesar  $1.58349207 < 2.021$ .

##### b. Uji sobel X2 terhadap Y melalui Z

Dari hasil uji sobel menunjukkan bahwa variabel komitmen organisasi (X2) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja guru (Y) melalui kepuasan kerja (Z), karena hasil t hitung  $< t$  tabel sebesar  $0.41922421 < 2.021$ .

##### c. Uji sobel X3 terhadap Y melalui Z

Dari hasil uji sobel menunjukkan bahwa variabel komunikasi organisasi (X3) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja guru (Y) melalui kepuasan kerja (Z), karena hasil t hitung  $< t$  tabel sebesar  $1.76209433 < 2.021$ .

#### INTERPRETASI

##### A. Pengaruh profesionalisme terhadap kepuasan kerja

Hasil dari uji analisis jalur pada uji t terdapat H1 variabel profesionalisme berpengaruh secara langsung terhadap kepuasan kerja. Hal ini dikarenakan bentuk sikap profesional yang diterapkan di SMK Negeri Kalibaru sudah memberikan kepuasan tersendiri walaupun belum seluruh guru merasakan kepuasan dengan sikap profesional yang diterapkan.

##### B. Pengaruh komitmen organisasi terhadap kepuasan kerja

Hasil dari uji analisis jalur pada uji t terdapat H2 variabel komitmen organisasi berpengaruh secara tidak langsung terhadap kepuasan kerja. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran untuk berkomitmen terhadap sekolah dari diri guru, yang menyebabkan guru tidak merasakan kepuasan dalam bekerja.



### **C. Pengaruh komunikasi organisasi terhadap kepuasan kerja**

Hasil dari uji analisis jalur pada uji t terdapat H3 variabel komunikasi organisasi berpengaruh secara langsung terhadap kepuasan kerja. Hal ini disebabkan karena komunikasi yang diterapkan sangat baik oleh sekolah sehingga guru dapat merasakan kepuasan dalam bekerja.

### **D. Pengaruh komitmen organisasi terhadap kepuasan kerja**

Hasil dari uji analisis jalur pada uji t terdapat H4 variabel profesionalisme berpengaruh secara langsung terhadap kinerja guru. Hal ini dikarenakan adanya sikap profesional yang konsisten diterapkan oleh para guru sehingga dapat meningkatkan kinerja para guru.

### **E. Pengaruh komitmen organisasi terhadap kepuasan kerja**

Hasil dari uji analisis jalur pada uji t terdapat H5 variabel komitmen organisasi berpengaruh secara langsung terhadap kinerja guru. Hal ini dapat disebabkan karena sekolah menanamkan sikap komitmen dalam diri guru sehingga kinerja lebih baik dan berkualitas.

### **F. Pengaruh komunikasi organisasi terhadap kinerja guru**

Hasil dari uji analisis jalur pada uji t terdapat H6 variabel komunikasi organisasi berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja guru. Hal ini karena kualitas komunikasi yang ada di SMK Negeri Kalibaru terganggu, dapat disebabkan salah satunya yaitu media penyampaian yang kurang mumpuni dan penyampaian pesan yang tidak menyeluruh.

### **G. Pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja guru**

Hasil dari uji analisis jalur pada uji t terdapat H7 variabel kepuasan kerja berpengaruh secara langsung terhadap kinerja guru. Hal ini menandakan bahwa apabila guru merasakan kepuasan dalam bekerja maka guru akan lebih bersemangat dalam meningkatkan kinerjanya.

### **H. Pengaruh profesionalisme terhadap kinerja guru melalui kepuasan kerja**

Hasil dari uji sobel pada analisis hipotesis H8 variabel profesionalisme tidak berpengaruh terhadap kinerja guru melalui kepuasan kerja. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pihak SMKN Kalibaru akan pentingnya bersikap profesional sehingga guru belum merasakan kepuasan dalam bekerja yang berimbas terhadap kinerja guru.

### **I. Pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja guru melalui kepuasan kerja**

Hasil dari uji sobel pada analisis hipotesis H9 variabel komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja guru melalui kepuasan kerja. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya sikap penerimaan terhadap organisasi/sekolah sehingga tidak ada kepuasan dalam bekerja yang dapat meningkatkan kinerja guru.

### **J. Pengaruh komunikasi organisasi terhadap kinerja guru melalui kepuasan kerja**

Hasil dari uji sobel pada analisis hipotesis H10 variabel komunikasi organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja guru melalui kepuasan kerja. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya hambatan-hambatan dalam proses penyampaian komunikasi misalnya keterbatasan alat komunikasi ataupun keterbatasan dalam penggunaan bahasa sehingga menyebabkan guru tidak merasa puas dalam bekerja yang akan berakibat menurunnya kinerja guru.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Profesionalisme, berpengaruh secara langsung terhadap kinerja guru pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Kalibaru Banyuwangi.
- 2) Komitmen Organisasi tidak berpengaruh secara langsung terhadap kinerja guru pada

- Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Kalibaru Banyuwangi.
- 3) Komunikasi Organisasi berpengaruh langsung terhadap kinerja guru pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Kalibaru Banyuwangi.
  - 4) Profesionalisme, berpengaruh secara langsung terhadap kepuasan kerja pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Kalibaru Banyuwangi.
  - 5) Komitmen organisasi, berpengaruh secara langsung terhadap kepuasan kerja pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Kalibaru Banyuwangi.
  - 6) Komunikasi organisasi tidak berpengaruh secara langsung terhadap kepuasan kerja pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Kalibaru Banyuwangi.
  - 7) Kinerja guru berpengaruh langsung terhadap kepuasan kerja pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Kalibaru Banyuwangi.
  - 8) Profesionalisme, berpengaruh secara langsung terhadap kinerja guru melalui kepuasan kerja pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Kalibaru Banyuwangi.
  - 9) Komitmen organisasi, berpengaruh secara langsung terhadap kinerja guru melalui kepuasan kerja pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Kalibaru Banyuwangi.
  - 10) Komunikasi organisasi berpengaruh secara langsung terhadap kinerja guru melalui kepuasan kerja pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Kalibaru Banyuwangi.

### IMPLIKASI

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa Profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru dan kepuasan kerja hal ini dapat disebabkan oleh sikap keprofesionalan yang diterapkan dengan sangat baik oleh guru maupun karyawan di SMK Negeri Kalibaru.

Komitmen Organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru dan kepuasan kerja hal ini dapat disebabkan oleh komitmen yang kuat oleh para guru, staf karyawan SMK Negeri Kalibaru sehingga kinerja yang baik dan juga kepuasan kerja dapat di tingkatkan.

Komunikasi Organisasi tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kinerja guru dan kepuasan kerja pada SMK Negeri Kalibaru, hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya kualitas komunikasi yang baik antar guru, guru dengan karyawan ataupun antara guru dengan atasan.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Majid.2016.*Strategi Pembelajaran*,Bandung:PT. Remaja Rosda Karya
- [2] Budiati, R.A Ayuningtyas, Suryalena, 2018, *Pengaruh Komunikasi Organisasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kepuasan Karyawan Pada Bagian Produksi Mie Instan PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Cabang Pekanbaru*
- [3] Arikunto, S. 2010.*Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*.Jakarta: Rineka Cipta
- [4] Danim, 2002, *Inovasi Pendidikan Dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan*.Bandung:Pustaka Setia
- [5] Devito ,Joseph.1997.*Komunikasi Antar Manusia*.Jakarta: Profesional Book
- [6] Ghozali, Imam.2013.*Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*.Semarang : Universitas Diponegoro
- [7] Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS19*. Semarang: UNDIP.
- [8] Hasibuan, Malayu.2014.*Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- [9] Hasibuan, Abdurrozzaq.2017.*Etika Profesi*.UISU Press
- [10] Hayati, Rita dkk. 2020,*Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Motivasi*

- Kerja Terhadap Kinerja Guru Pada SMA I sungai Rotan.*
- [11] Herman, Sofyandi.2008.*Manajemen Sumber Daya Manusia*.Yogyakarta: Graha Ilmu
- [12] Kuncoro, Agus.2012. *Analysis Multivariat*. Bandung : Penerbit Alfabeta.
- [13] Lestiwati, Nila.2019.*Pengaruh Komunikasi Organisasi Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Guru SMAN 2 Singkawang.*
- [14] Mangkunegara.2009.*Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi 2*. BPFE.Yogyakarta
- [15] Nur ,syarif .2018.*Pengaruh Kepeminmpinan Dan Profesionalisme Guru Terhadap Kepuasan Kerja Guru SMAN Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone.*
- [16] Jamil Suprihatinngrum.2013.*Guru Profesional*.Jakarta: Ar-ruzz Media
- [17] Mas'ud, Fuad. 2004. *Survai Diagnosis Organisasional Konsep dan Aplikasi*, Semarang :Badan Penerbit UNDIP
- [18] Mathis, R. L & Jackson,.2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*.Jakarta. Salemba Empat
- [19] Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 16 Tahun 2007.*Tentang Standar Kompetensi Guru* . Jakarta:Balai PustakaHasibuan, Malayu.2014.*Manajemen Sumber Daya Mausia Edisi Revisi*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- [20] Hasibuan, Abdurrozzaq.2017.*Etika Profesi*.UISU Press
- [21] Hayati, Rita dkk. 2020,*Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru Pada SMA I sungai Rotan.*
- [22] Herman, Sofyandi.2008.*Manajemen Sumber Daya Manusia*.Yogyakarta: Graha Ilmu
- [23] Kuncoro, Agus.2012. *Analysis Multivariat*. Bandung : Penerbit Alfabeta.
- [24] Lestiwati, Nila.2019.*Pengaruh Komunikasi Organisasi Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Guru SMAN 2 Singkawang.*
- [25] Mangkunegara.2009.*Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi 2*. BPFE.Yogyakarta
- [26] Nur ,syarif .2018.*Pengaruh Kepeminmpinan Dan Profesionalisme Guru Terhadap Kepuasan Kerja Guru SMAN Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone.*
- [27] Jamil Suprihatinngrum.2013.*Guru Profesional*.Jakarta: Ar-ruzz Media
- [28] Mas'ud, Fuad. 2004. *Survai Diagnosis Organisasional Konsep dan Aplikasi*, Semarang :Badan Penerbit UNDIP
- [29] Mathis, R. L & Jackson,.2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*.Jakarta. Salemba Empat
- Ramatulassama, K., & Rao, D. B.2003.*Job Satisfaction Of Teacher Educators*.New Delhi: First Republik Indonesia. *Permendiknas No.16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru*. Jakarta:Balai Pustaka
- [30] Robbins, Stephen P. 2013. *Manajemen Jilid 1*. Jakarta : Erlangga
- [31] Rokib, Nur ,dkk. 2018.*Pengaruh Gaya Kepemimpinan Partisipatif Dan Komunikasi Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening Pada KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan Semarang*
- [32] Sannusy. M. Dkk.2016. *Pengaruh Profesionalisme Dan Motivasi kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru Pada SMPN Sekecartan Kuto Baro*
- [33] Setyowsti. Dkk .2014.*Pengaruh Gaya Organisasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja Guru Pada SMP Muhammadiyah Di Kabupaten Purworejo*
- [34] Sondang, P Siagian, 2014, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta

- [35] Sopiah. 2008. *Perilaku Organisasi*. Malang : Cv. Andi Offset
- [36] Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- [37] Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- [38] Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [39] Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- [40] Tahir, Muh. 2019. *Pengaruh Komunikasi Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja Dosen Tetap PTM Di Sulawesi Selatan*
- [41] Ttresnawati, Nia. 2015. *Pengaruh Profesionalisme Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Auditor Internal Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening*.
- [42] Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005. *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta
- [43] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta
- [44] Wibowo, Retmo. 2018. *Pengaruh Budaya Organisasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening Di Lembaga Pendidikan Islam Terpadu Bina Anak Sholeh (LPIT BBIAS)* Yasinta Anis. 2018. *Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Guru Di MTS N 1 Bandar Lampung*. Republik Indonesia. *Permendiknas No.16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru*. Jakarta: Balai Pustaka
- [45] Robbins, Stephen P. 2013. *Manajemen Jilid 1*. Jakarta : Erlangga
- [46] Rokib, Nur ,dkk. 2018. *Pengaruh Gaya Kepemimpinan Partisipatif Dan Komunikasi Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening Pada KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan Semarang*
- [47] Sannusy. M. Dkk. 2016. *Pengaruh Profesionalisme Dan Motivasi kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru Pada SMPN Sekecartan Kuto Baro*
- [48] Setyowsti. Dkk .2014. *Pengaruh Gaya Organisasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja Guru Pada SMP Muhammadiyah Di Kabupaten Purworejo*
- [49] Sondang, P Siagian, 2014, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta
- [50] Sopiah. 2008. *Perilaku Organisasi*. Malang : Cv. Andi Offset
- [51] Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- [52] Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- [53] Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [54] Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- [55] Tahir, Muh. 2019. *Pengaruh Komunikasi Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja Dosen Tetap PTM Di Sulawesi Selatan*
- [56] Ttresnawati, Nia. 2015. *Pengaruh Profesionalisme Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Auditor Internal Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening*.
- [57] Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005. *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta
- [58] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta
- [59] Wibowo, Retmo. 2018. *Pengaruh Budaya Organisasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel*

---

*Interveninig Di Lembaga Pendidikan  
Islam Terpadu Bina Anak Sholeh (LPIT  
BBIAS)*

- [60] Yasinta Anis.2018.*Pengaruh Kepuasan  
Kerja Terhadap Kinerja Guru Di MTS N  
1Bandar Lampung.*

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGGAJIAN DAN  
PENGUPAHAN PEGAWAI SEBAGAI UPAYA Mendukung  
PENGENDALIAN INTERN PADA UPT. PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI  
MUTU BARANG MEDAN

Oleh

Filza<sup>1)</sup>, Juliana Nasution<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup>Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam  
Negeri Sumatera Utara

Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang,  
Sumatera Utara

Email : <sup>1</sup>[filzaza02@gmail.com](mailto:filzaza02@gmail.com), <sup>2</sup>[juliananasution@uinsu.ac.id](mailto:juliananasution@uinsu.ac.id)

**Abstract**

Karyawan yang berkualitas akan melakukan pertimbangan untuk kesejahteraan diri sendiri dan keluarga. Agar penanganan yang dilakukan oleh setiap bagian yang terkait berjalan lancar maka perusahaan membutuhkan sistem informasi akuntansi penggajian dan pengupahan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan Studi Pustaka. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan sistem penggajian dan pengupahan yang sudah ada dalam perusahaan yang meliputi fungsi yang terkait, dokumen dan catatan akuntansi yang digunakan serta prosedur yang membentuk sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa sistem akuntansi penggajian UPT. Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang belum sepenuhnya mendukung dalam upaya pengendalian internal. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya kekurangan dalam pemisahan dan pembagian tugas dalam struktur organisasi dan praktik yang sehat.

**Keywords: Sistem Akuntansi Penggajian Dan Pengupahan, Sistem Pengendalian Internal**

**PENDAHULUAN**

Perkembangan perekonomian semakin berkembang dari waktu ke waktu. Setiap perusahaan yang ada pasti mempunyai maksud dan tujuan yang kurang lebih sama yaitu memperoleh laba yang besar. Dalam mendukung maksud dan tujuan tersebut perusahaan membutuhkan adanya sumber daya, dari sumber daya yang ada, salah satu sumber daya yang penting ialah sumber daya manusia atau karyawan. Karyawan yang berkualitas akan melakukan pertimbangan untuk kesejahteraan diri sendiri dan keluarga. Agar penanganan yang dilakukan oleh setiap bagian yang terkait berjalan lancar maka perusahaan membutuhkan sistem informasi akuntansi penggajian dan pengupahan. Setiap perusahaan harus menggunakan sistem untuk mengatur kegiatan

operasional perusahaan. Dengan menggunakan sistem yang baik, maka perusahaan bisa mencegah kecurangan-kecurangan yang akan terjadi. Salah satu sistem yang baik bagi perusahaan adalah sistem pengendalian internal.

UPT. Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang merupakan sebuah instansi pemerintahan yang bergerak di bidang uji laboratorium. Proses perhitungan dan pembayaran gaji dikelola langsung oleh pemerintah pusat dan dibayarkan langsung setiap bulan. Pada UPT. Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang terdapat masalah yang terjadi pada sistem pembayaran gaji. Masalah lain juga terdapat pada proses absensi di mana tidak adanya pengawasan khusus dari bagian yang terkait. Masalah ini dikhawatirkan akan mengakibatkan karyawan datang terlambat dan

pulang tidak sesuai dengan waktu pulang kerja. Perusahaan dapat melakukan pencegahan penyelewengan dengan memanfaatkan sistem pengendalian internal. Sistem akuntansi penggajian dan pengupahan merupakan rangka prosedur yang ada hubungannya, tugasnya membantu menjalankan fungsi utama perusahaan (Baridwan, 2009:3). Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa pada umumnya sistem akuntansi penggajian dan pengupahan adalah suatu sistem yang dirancang untuk menetapkan secara tepat dan teliti berapa gaji dan upah yang diterima oleh tiap karyawan dan sistematis pembayarannya.

### TINJAUAN PUSTAKA

**Pengertian Sistem Akuntansi.** Sistem akuntansi adalah formulir, catatan, prosedur, dan seperangkat alat yang dipakai untuk mengolah data, tujuannya dapat menghasilkan laporan-laporan yang menunjang usahanya dan berguna bagi pihak lain untuk menilai hasil operasi (Stettler dalam Baridwan 2009:4).

**Sistem akuntansi penggajian dan pengupahan.** sistem akuntansi penggajian dan pengupahan adalah suatu sistem yang dirancang untuk menetapkan secara tepat dan teliti berapa gaji dan upah yang diterima oleh tiap karyawan dan sistematis pembayarannya.

**Fungsi-fungsi yang Terkait.** Menurut Mulyadi (2016 : 382) fungsi-fungsi yang terkait di dalam sistem akuntansi penggajian yaitu: (1) Fungsi Kepegawaian; (2) Fungsi Pencatatan Waktu Hadir; (3) Fungsi Pembuat Daftar Gaji; (4) Fungsi Akuntansi; dan (5) Fungsi Keuangan.

**Dokumen-dokumen yang Digunakan.** Menurut Mulyadi (2016 : 310), dokumen-dokumen yang digunakan di dalam sistem akuntansi gaji dan upah adalah: (1) Dokumen pendukung perubahan gaji; (2) Kartu jam hadir; (3) Kartu jam kerja; (4) Daftar gaji; (5) Rekap daftar gaji; (6) Surat pernyataan gaji; (7) Amplop gaji; dan (8) Bukti kas keluar.

**Catatan-catatan Akuntansi yang Digunakan.** Mulyadi (2016 : 317) menyatakan

catatan-catatan akuntansi yang digunakan di dalam pencatatan gaji dan upah meliputi: (1) Jurnal Umum; (2) Kartu harga pokok produk; (3) Kartu biaya; dan (4) Kartu penghasilan karyawan.

### Jaringan Prosedur Pencatatan Sistem Akuntansi Penggajian.

Mulyadi (2016 : 320) menyatakan bahwa jaringan prosedur pencatatan sistem akuntansi penggajian meliputi: (1) Prosedur pencatatan waktu hadir; (2) Prosedur pembuatan daftar gaji; (3) Prosedur pembuatan bukti kas keluar; dan (4) Prosedur pembayaran gaji.

### Sistem Pengendalian Internal.

Sistem pengendalian internal ialah elemen yang meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen Mulyadi (2017:129).

### METODE PENELITIAN

**Jenis penelitian.** Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan Studi Pustaka.

**Tempat dan Waktu Penelitian.** Lokasi pada penelitian ini bertempat di UPT. Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Jalan STM No.17 Medan. Waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan Januari sampai Februari 2022.

**Jenis data.** Jenis data didalam penelitian ini adalah data kualitatif. Peneliti mengambil data kualitatif dari UPT. Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang berupa data non-numerik seperti hasil wawancara mengenai system informasi akuntansi penggajian dan pengupahan serta system pengendalian internal yang dijalankan perusahaan.

**Sumber data.** Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan menggunakan sumber data primer. Data primer dalam penelitian ini adalah data-data dalam



proses sistem akuntansi penggajian dan pengupahan serta sistem pengendalian internal yang digunakan perusahaan.

**Metode Pengumpulan Data.** Penelitian ini menggunakan teknik analisis diskriptif kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan sistem penggajian dan pengupahan yang sudah ada dalam perusahaan yang meliputi fungsi yang terkait, dokumen dan catatan akuntansi yang digunakan serta prosedur yang membentuk sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Kemudian apakah sistem penggajian dan pengupahan sudah sesuai dengan teori sistem penggajian dan pengupahan dan juga dapat meningkatkan efektivitas pengendalian intern perusahaan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan.

Fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem informasi akuntansi penggajian pada UPT.Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang adalah :

a. Bagian Akuntansi

Bagian akuntansi bertugas untuk membuat rekap daftar hadir karyawan, daftar gaji karyawan, slip gaji, lembar penerimaan gaji, bukti kas keluar, dan Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi bertanggung jawab mencatat transaksi-transaksi penggajian pada jurnal umum dan buku besar.

b. Keuangan

Keuangan berwenang dalam proses pembayaran gaji pokok karyawan. Melakukan transfer gaji pokok, tunjangan jabatan, uang makan, dan premi hadir ke rekening masing-masing karyawan dan mentransfer biaya pembayaran pendapatan per bulan ke rekening Bagian Akuntansi melalui Ebankin (Electronic Banking). Fungsi-fungsi yang terkait dengan sistem informasi akuntansi penggajian pada UPT.Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

sudah cukup baik dan sudah sesuai dengan teori yang ada.

#### Dokumen – dokumen yang digunakan.

Dokumen yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi penggajian dan pengupahan pada UPT.Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, yaitu : (1) Surat pendukung perubahan gaji; (2) rekap daftar hadir karyawan; (3) Daftar gaji karyawan; (4) slip gaji karyawan; dan (5) Bukti Transfer.

Catatan-catatan Akuntansi yang Digunakan. Jurnal umum dan Buku besar.

Jaringan prosedur dalam pencatatan system akuntansi penggajian dan pengupahan

1. Prosedur pencatatan waktu hadir. Prosedur ini bertujuan untuk mencatat waktu hadir karyawan.
2. Prosedur pembuatan daftar gaji dan upah. Dalam prosedur pembuatan gaji, bagian Bendahara Keuangan kantor membuat daftar gaji karyawan setiap bulan.
3. Prosedur pembayaran gaji dan upah. Dalam prosedur ini, bagian akuntansi menerima daftar gaji dari bagian keuangan dan melakukan perhitungan gaji. Bagian akuntansi kemudian membuat surat perintah pengeluaran uang yang akan diteruskan pada bagian keuangan. Bagian keuangan kemudian melakukan pembayaran gaji karyawan melalui bank.

#### Unsur-Unsur Pengendalian Internal

UPT.Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang. Unsur-unsur pengendalian internal dalam sistem informasi akuntansi penggajian dan pengupahan pada UPT.Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, yaitu:

a. Organisasi

1. Fungsi pembuat daftar gaji terpisah dengan fungsi keuangan.
2. Fungsi pencatatan waktu hadir tidak terpisah dengan pembuat daftar gaji.

b. Sistem otorisasi dan Prosedur pencatatan

1. Setiap nama yang tercantum dalam daftar gaji karyawan memiliki surat keputusan

pengangkatan sebagai karyawan UPT. Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang yang ditandatangani oleh Direktur Utama.

2. Setiap adanya perubahan dan potongan gaji karyawan selain PPh 21 dan BPJS Ketenagakerjaan didasarkan pada surat keputusan diotorisasi oleh bagian HRD.
3. Data print out fingerprint dan daftar gaji diotorisasi oleh bagian HRD.
4. Perintah pengeluaran uang diperiksa dan disetujui oleh bagian akuntansi.
5. Perubahan catatan penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan daftar gaji karyawan.

#### c. Praktik yang sehat

1. Pemasukan jam hadir dengan menggunakan sidik jari pada mesin fingerprint tidak diawasi oleh bagian HRD.
2. Pembuatan daftar gaji diperiksa dan diotorisasi oleh bagian akuntansi sebelum bagian keuangan melakukan pembayaran.
3. Perhitungan PPh 21 direkonsiliasi dengan catatan penghasilan karyawan
4. Catatan penghasilan karyawan disimpan oleh bagian HRD

## PEMBAHASAN

**Fungsi yang terkait.** Berdasarkan penelitian yang dilakukan fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian pada UPT. Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang adalah fungsi akuntansi dan fungsi keuangan. Fungsi-fungsi yang terkait dengan sistem informasi akuntansi penggajian pada UPT. Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang sudah cukup baik dan sudah sesuai dengan teori yang ada.

**Dokumen - dokumen yang Digunakan.** Berdasarkan penelitian yang dilakukan dokumen yang digunakan di dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan sudah cukup baik namun belum sepenuhnya sesuai dengan teori yang ada.

**Catatan – catatan Akuntansi yang Digunakan.** Berdasarkan penelitian yang dilakukan catatan-catatan akuntansi yang

digunakan UPT. Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang sudah baik. Perusahaan melakukan pemasukan data transaksi yang berhubungan dengan proses penggajian ke dalam software kemudian dibuat jurnal umum dan buku besar pada software yang sama.

**Jaringan Prosedur Pencatatan Sistem Penggajian.** Berdasarkan penelitian yang dilakukan jaringan prosedur dalam sistem akuntansi penggajian pada UPT. Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang yaitu prosedur pencatatan waktu hadir, prosedur pembuatan daftar gaji, prosedur distribusi biaya gaji, prosedur pembuatan bukti kas keluar, dan prosedur pembayaran gaji. Jaringan prosedur dalam sistem akuntansi penggajian pada UPT. Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan teori yang ada.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa sistem akuntansi penggajian UPT. Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang belum sepenuhnya mendukung dalam upaya pengendalian internal. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya kekurangan dalam pemisahan dan pembagian tugas dalam struktur organisasi dan praktik yang sehat.

### Saran

Berdasarkan analisa data yang telah dibahas sebelumnya, maka penulis memberikan saran antara lain:

1. Dalam menjalankan proses penggajian UPT. Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang sebaiknya memperbaiki struktur organisasi dengan menambah fungsi pencatatan waktu hadir dan fungsi pembuat daftar gaji agar tidak ada perangkapan tugas yang dilakukan bagian HRD.

2. UPT. Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang perlu meningkatkan pengawasan terhadap kedisiplinan dari karyawan baik dalam

hal absensi maupun dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing bagian.

3. UPT. Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang perlu lebih memperhatikan dan mengikuti perkembangan teknologi yang ada yang berhubungan dengan sistem penggajian perusahaan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Brenda Langi, D. P. (2019). ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGGAJIAN DAN PENGUPAHAN DALAM UPAYA PENGENDALIAN INTERNAL PADA PT. GEMILANG EMAS INDONESIA. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 14(1)*, 2019, 148-153.
- [2] Fabiana Dwi Widyasari, F. Y. (2015). ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PENGGAJIAN DAN PENGUPAHAN KARYAWAN BAGIAN PRODUKSI SEBAGAI UPAYA Mendukung PENGENDALIAN INTERN PERUSAHAAN . *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)/Vol. 27 No. 2 Oktober 2015/*.
- [3] Fibriyanti, Y. V. (2017). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian dalam Rangka Efektivitas Pengendalian Internal. *Jurnal Akuntansi*, 2(1), 14. <https://doi.org/10.30736/jpensi.v2i1.97>.
- [4] Fionita, I. &. (2015). Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pada Usaha Kecil Menengah Di Provinsi Lampung. *Jurnal Bisnis Darmajaya*, 1(2), 98-107.
- [5] Hidayat, M. T. (2013). Analisis penerapan sistem akuntansi penggajian dan pengupahan dalam mendukung pengendalian intern. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 6(2), 1-8.
- [6] Ridha, N. (2017). Proses Penelitian, Masalah, Variabel, dan Paradigma Penelitian. *Jurnal Hikmah*, 14(1), 62-70.
- [7] Saraswati, K. (2014). Analisis Sistem Akuntansi Penggajian & Pengupahan Karyawan Dalam Usaha Meningkatkan Pengendalian Intern Perusahaan (Studi pada PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk Kantor Cabang Sidoarjo). *Jurnal Administrasi Bisnis SI Universitas Brawijaya*, 8(1), 79466.
- [8] Sunaryo, S. (2011). Analisis Sistem Informasi Akuntansi (Vol. 53). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- [9] Tri, D. R. (2015). Dalam Upaya Mendukung Pengendalian Intern Perusahaan ( Studi Kasus Pada Perusahaan Kacang Shanghai “Gangsar” Ngunut Tulungagung ). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 1(1), 1-10.
- [10] Youdhi Prayogo, Z. (2017). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian dan Pengupahan Pegawai Harian Lepas pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. *Innovatio*, Vol. XVII, No. 1, Januari-Juni 2017 .

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

DE-READINESS PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH  
(SIMKAH) PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN CIGUGUR  
KABUPATEN PANGANDARAN

Oleh

Santi Nurmalasari<sup>1)</sup>, Khaerul Umam<sup>2)</sup> & Herabudin<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Administrasi Publik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: <sup>1</sup>[santinurmalasari22.sn@gmail.com](mailto:santinurmalasari22.sn@gmail.com), <sup>2</sup>[umam@uimnsgd.ac.id](mailto:umam@uimnsgd.ac.id),

<sup>3</sup>[herabudin64@gmail.com](mailto:herabudin64@gmail.com)

**Abstract**

The implementation of the SIMKAH application is the primary problem addressed by this research; nevertheless, there are still a number of impediments to this process, one of which is a lack of community readiness to participate in the deployment of the SIMKAH program. Furthermore, information concerning the existence of SIMKAH has not been widely disseminated, which has resulted in the information not being appropriately given to the general population. To determine whether users of the Marriage Management Information System (SIMKAH) at the Office of Religious Affairs in Cigugur District, Pangandaran Regency, were prepared to use the system in an electronic environment, this study was conducted. The descriptive method is combined with a qualitative approach in this investigation. Observation and interviews were used to get the information. Data analysis was carried out, which included data reduction, data presentation, and drawing of conclusions from the data collected. Based on the findings and discussion presented above, it can be determined that the Office of Religious Affairs (KUA) in Cigugur District, Pangandaran Regency, is well prepared to implement the Marriage Management Information System (MMIS) (SIMKAH). On the basis of numerous parameters, including network access (including speed), community access (including cost), and economic access (including cost), this is determined for the Cigugur District, Pangandaran Regency's Marriage Management Information System Users (SIMKAH).

**Keywords: E-government, E-Readiness, Marriage Management Information System**

**PENDAHULUAN**

Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi dengan masif dewasa ini harus bisa diikuti oleh kemajuan pada bidang lainnya. Seperti adaptasi yang mesti dilakukan oleh instansi pemerintahan agar mampu bertahan dan tetap relevan dengan cara merubah beberapa kebijakan dalam pelayanan masyarakat (Nur, 2014). Dengan adanya digitalisasi saat ini, pemerintah di Indonesia menerapkan beberapa kebijakan dengan sistem digital atau dikenal dengan *e-government*. Lapisan Pemerintah harus mendayagunakan teknologi upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) serta mempercepat demokrasi sebagaimana yang

disebutkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informasi)

Kemudian pemerintah dalam penerapan *E-Government* mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun (2003) tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* sebagai bentuk keseriusan agar tercapainya peningkatan kualitas pelayanan publik. Harapan dikeluarkannya Inpres tersebut adalah untuk memudahkan pemerintah dalam mendukung proses pemerintahan berbasis teknologi informasi (Engkus, 2020). Untuk mewujudkan sebuah tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, akuntabel, transparan, serta pelayanan

publik yang berkualitas dan terpercaya maka melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun (2018) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik akan menjawab perubahan globalisasi yang kian terus mengalami perkembangan.

Adanya Perpres ini sangat mendukung pada tujuan strategis *e-government* diantaranya yaitu; Membantu dalam pengembangan sistem pelayanan yang berkompeten dan transparan serta memudahkan akses untuk seluruh elemen masyarakat, membantu dalam penataan sistem manajemen serta proses kerja baik pada pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah, dimanfaatkannya teknologi informasi ini dengan secara optimal supaya dapat meningkatkan peran serta dalam dunia usaha, membantu pengembangan kinerja sumber daya manusia yang ada di pemerintahan pusat atau di pemerintahan daerah serta mendukung pada peningkatan *e-literacy* di masyarakat dan dalam penggunaan teknologi informasi ini harus dikembangkan secara teratur dengan tahapan-tahapan yang efektif serta dapat diukur (Instruksi Presiden Indonesia, 2003).

Dengan tujuan strategis ini maka dalam penerapan *e-government* di Indonesia sangat membantu untuk mempercepat serta mempermudah tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Choiriyah, 2020). Selain itu, dengan penerapan ini akan membantu dalam proses kerja yang akan dikerjakan, baik secara perorangan atau kelompok yang memiliki tujuan yang sama (R. Nugroho, 2014). Menurut Indrajit (2016) *e-government* adalah mekanisme baru untuk pemerintah, masyarakat, serta orang-orang yang berkepentingan untuk memudahkan berinteraksi melalui penggunaan teknologi informasi sebagai cara meningkatkan mutu pelayanan. *E-government* ini jika ditinjau dari pandangan administrasi publik yaitu merupakan bentuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan pada masyarakat. Selain itu *e-government* ini untuk menjadi sarana

komunikasi yang interaktif dan sebagai media informasi. Sehingga *e-government* menjadi sebuah jawaban dari tuntutan masyarakat untuk memperbaiki layanan publik dalam penyampaian informasi serta pengolahan data yang dibutuhkan oleh masyarakat supaya lebih efisien, efektif, transparansi serta akuntabel (Aprianty, 2016).

Berdasarkan pengertian di atas, maka dalam penerapan *e-government* harus dilaksanakan melalui empat tahapan agar dapat memberikan pelayanan yang optimal dengan berbasis teknologi informasi yaitu; 1) Melalui tahapan persiapan, baik kesiapan dari lembaganya, sumber daya manusia, menyediakan media yang mudah untuk diakses serta diadakannya sosialisasi untuk internal maupun masyarakat. 2) Tahapan pematangan, tahapan pematangan ini yaitu membuat situs informasi untuk publik yang interaktif dan terhubung dengan lembaga lain. 3) Tahapan pemantapan, yaitu dengan dibuatnya aplikasi atau situs pada pelayanan masyarakat, mewujudkan interoperabilitas pada aplikasi atau dengan data pada lembaga lain. 4) Tahapan pemanfaatan, dalam tahapan pemanfaatan ini *e-government* mempunyai empat tipe relasi yaitu *Government to Citizen*, *Government to Government*, *Government to Business* dan *Government to Employ*.

Dua tipe relasi dalam pemanfaatan *e-government* ini yaitu *government to citizen* yang mempunyai fungsi layanan kepada masyarakat dan *government to government* yang menjadi penghubung informasi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ke sistem yang berada di pusat. Sistem Informasi Manajemen didefinisikan sebagai pola pada manusia atau mesin yang dipadukan untuk menyajikan sebuah informasi dalam mendukung operasi, manajemen, serta mengambil kebijakan pada suatu organisasi (Davis, 2013). Sistem Informasi Manajemen Nikah adalah aplikasi dengan berbasis website sebagai media dalam mempermudah pengelolaan data-data pernikahan serta mempunyai keunggulan dalam

penyimpanan data secara online. Data yang telah di input akan tersimpan dengan baik serta data-data yang telah disimpan akan terintegrasi keberadaan di Kantor Urusan Agama, Kantor Wilayah Kementerian Agama tingkat kota hingga provinsi serta di Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam (Sutisana et al., 2019). Keberadaan SIMKAH ini juga mempunyai tujuan untuk memperbaiki administrasi pernikahan supaya lebih mudah dan aman. Selain itu SIMKAH ini sangat membantu KUA dalam menyelesaikan tugas dari Kementerian Agama sebagai organisasi pemerintah yang memberikan layanan dalam bidang keagamaan.

Menurut Kasubid Mutu dan Prasana KUA bahwa SIMKAH berbasis web ini mempunyai beberapa keunggulan dalam memberikan pelayanan kepada publik yaitu; Terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) dari Kemdagri, Sistem Informasi PNPB Online (SIMPONI) dari Kemenkeu, dan Sistem Penelusuran Perkara (SIPP) dari Mahkamah Agung, dapat mengurangi pemalsuan buku nikah karena sudah dilengkapi dengan keamanan, dapat melihat laporan data nikah dan PNPB nikah-rujuk secara real-time sehingga membantu pusat untuk memonitoring pelaksanaan nikah secara nasional dan catin dapat membooking jadwal pernikahannya melalui email pribadinya yang kemudian di konfirmasi kepada pihak KUA (Kemenag, 2018)

Dalam penerapan e-government yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi ini maka perlu adanya sebuah kesiapan dari pengguna. Adanya konsep *e-readiness* menjadi alat untuk membantu dalam melakukan evaluasi terhadap penerapan e-government agar sesuai dengan tingkatan kemampuan organisasi dan user/masyarakat (Nugroho, 2020). Penilaian *e-readiness* dikembangkan sebagai alat untuk menilai indikator kinerja utama untuk mengelola sumber daya manusia secara efisien dalam

penerapan e-government (Potnis & Pardo, 2011). Dengan menilai *e-readiness*, pemerintah dapat mengidentifikasi hambatan untuk penyebaran *e-government* dan mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan. Temuan penilaian dapat membantu pemerintah dalam menentukan tingkat kesiapsiagaan mereka, mengidentifikasi kesenjangan, dan kemudian mendesain ulang rencana khusus pemerintah mereka (Josep, 2014). Jika digunakan dalam proses evaluasi, *e-readiness assessment* merupakan langkah awal dalam melakukan perubahan positif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Menurut Direktorat Jendral Bimas Islam Kementerian Agama RI yang dicatat oleh Kepala Subdit Mutu, Sarana Prasarana, dan Sistem Informasi KUA Ditjen Bimas Islam Jajang Ridwan beliau mencatat sebanyak 5819 Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan di seluruh Indonesia telah terintegrasi dengan aplikasi Simkah berbasis web dari jumlah keseluruhan 5.945 KUA yang tersebar di tiap kecamatan (Fahlevi, 2021). Jadi, masih ada 126 KUA yang belum terintegrasi dengan Simkah Web.

Di Kabupaten Pangandaran ada 10 KUA di bawah naungan Kementerian Agama Pangandaran. KUA Kecamatan Cigugur merupakan salah satu lembaga yang ada di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran yang mempunyai visi yaitu “Mewujudkan pelayanan yang maksimal berbasis lima nilai budaya kerja kementerian Agama Republik Indonesia dalam rangka menciptakan masyarakat Cigugur yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri, dan sejahtera lahir batin”. Kemudian visi ini didorong oleh misi Kantor Urusan Agama (KUA) Cigugur yang salah satunya yaitu meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Memberikan kualitas layanan kepada masyarakat menjadi kewajiban dalam penyelenggaraannya (Rianti et al., 2019).

Visi dan Misi KUA ini sebagai salah satu upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cigugur untuk ikut andil dalam percepatan *good governance*. Untuk mewujudkannya maka perlu adanya kesiapan dalam penerapan *e-government* melalui Aplikasi Berbasis Window Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang merupakan wujud inovasi yang dikeluarkan oleh Bimbingan Masyarakat Islam melalui Sistem Informasi Manajemen Berbasis Islam (SIMBI). Hal ini didasari oleh Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No : DJ. II/369 Tahun (2013) tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan. Keputusan dalam penerapan SIMKAH ini sebagai upaya penyederhanaan pelayanan terhadap masyarakat serta peningkatan kualitas pelayanan.

Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, sebagai pengganti Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan maka dalam pengisian formulir, pencatatan, pemeriksaan serta rujuk nikah melalui aplikasi SIMKAH berbasis website. Perubahan ini disesuaikan sebagaimana kebutuhan pada masa sekarang ini. Prosedur pendaftaran nikah secara online mengikuti pedoman SIMKAH dan daftar melalui Aplikasi SIMKAH dengan mengunjungi Web [www.simkah.kemenag.go.id](http://www.simkah.kemenag.go.id).

Grafik 1

Data Pendaftar Calon Pengantin Tahun 2020



Sumber : Hasil penelitian (diolah peneliti), 2021

Berdasarkan grafik di atas terdapat 186 pasangan yang melangsungkan pernikahan dengan mendaftarkan melalui bantuan Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) atau yang sering disebut amil. Padahal kantor Urusan Agama Kecamatan Cigugur merupakan salah satu KUA yang menerapkan *e-government* melalui aplikasi berbasis website sejak dari tahun 2018. Namun, fakta dilapangan masyarakat yang mendaftar nikah pada tahun 2020 belum mengakses SIMKAH dengan sendirinya. Hal ini menunjukkan kurang kesiapannya masyarakat tentang perubahan layanan berbasis elektronik. Sehingga, peneliti menjadikan fokus penelitian dengan data pernikahan masyarakat pada tahun 2020. Peneliti menjadikan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigugur sebagai objek penelitian karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigugur merupakan salah satu Kantor Urusan Agama yang telah menerapkan *e-government* dalam pelayanan pencatatan nikah secara online. Meskipun, pada penerapannya aplikasi SIMKAH ini sudah pada tahap pemanfaatan. Namun, perlu konsep e-readiness untuk mengetahui kesiapan pihak lembaga, infrastruktur, kesiapan masyarakat dan sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia bisa ditinjau dari segi pendidikan, kompetensi, keterampilan dan jabatan (Nurjaya et al., 2021).

Berdasarkan hasil wawancara kepada kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigugur (AgsK) dalam penerapan aplikasi SIMKAH ini masih banyak faktor penghambatnya, yaitu salah satunya adalah kesiapan masyarakat yang kurang dalam penerapan aplikasi SIMKAH. Selain itu belum tersosialisasi informasi tentang keberadaan SIMKAH ini yang menyebabkan tidak tersampainya informasi secara baik kepada masyarakat. Selain itu juga unit komputer yang masih kurang sehingga operator simkah harus saling bergantian untuk menginput data ke dalam simkah. (Wawancara pada tanggal 16



Juli 2021 bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigugur).

Model Harvard University Center for International Development (CID) (2019) digunakan untuk mengkaji banyak aspek yang berkontribusi pada kesiapan jaringan komunitas di negara berkembang. Pendekatan ini dirancang untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kesiapan masyarakat untuk tujuan penilaian selama perencanaan strategis. Model ini mencakup lima (lima) dimensi untuk menilai *e-readiness*: Akses Jaringan (*Network Acces*), yang mengukur ketersediaan, biaya, dan kualitas jaringan, layanan teknologi informasi, dan peralatan; Akses Pembelajaran (*Networked Learning*), yang mengukur ketersediaan integrasi sistem pendidikan ke dalam proses peningkatan program pendidikan dan pelatihan teknis di masyarakat; Akses Masyarakat (*Networked Society*), yang diukur dengan sejauh mana individu menggunakan TIK di tempat kerja dan kehidupan pribadi mereka, bagaimana peluang bagi mereka yang memiliki keterampilan TIK; Akses Ekonomi (*Networked Economy*) bagaimana dunia bisnis dan pemerintah menggunakan TIK untuk berinteraksi dengan publik atau yang lain; dan Akses Kebijakan (*Network Policy*) yang diukur dengan bagaimana lingkungan kebijakan mempromosikan atau menghambat pertumbuhan adopsi dan penggunaan TIK. Model CID Harvard ini dirancang untuk memberikan gambaran komprehensif tentang kesiapan pengguna untuk tujuan perencanaan strategis.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah karya Eko dkk dengan judul “Kesiapan Pengguna Intranet Berbasis Android Di Kementerian Perindustrian” Artikel ini membahas bagaimana pendekatan penilaian kesiapan Harvard CID digunakan untuk mengevaluasi kesiapan pengguna aplikasi seluler berbasis Android untuk Intranet Kementerian Perindustrian. Temuan menunjukkan bahwa pengguna Intranet siap pada level 4 (dari empat

tingkat kesiapan), menunjukkan bahwa mereka sangat siap untuk memanfaatkan aplikasi seluler berbasis Android untuk mengakses Intranet Kementerian Perindustrian. (Fahlevi, 2021).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan dengan judul “Kajian Analisis Model *E-Readiness* Dalam Rangka Implementasi *E-Government*” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji *e-preparedness* pemerintah, untuk menentukan kesiapannya saat ini, untuk memanfaatkan kemungkinan TIK, untuk mengevaluasi implementasi *e-government*, dan untuk menetapkan kebijakan yang sesuai. Dengan melakukan literature review dan mengevaluasi model *e-readiness* assessment yang paling sesuai dengan fitur objek penelitian (R. A. Nugroho, 2020)

Penelitian terdahulu berikutnya berjudul “E-Readiness Model for Measuring the Readiness of DIY E-Lapor Complaint Management”. Sementara penelitian ini mencoba untuk mengukur *e-readiness*, langkah kritis harus diambil, yaitu mengidentifikasi model *e-readiness* yang sesuai. Studi ini menggunakan tinjauan pustaka untuk membandingkan berbagai model *e-readiness* yang menonjol dan sering digunakan dalam penelitian di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi model *e-preparedness* Mutula Brakel yang paling tepat untuk menilai kesiapan penanganan pengaduan melalui aplikasi DIY E-report. (Lestari et al., 2021).

Berikutnya penelitian pendahulu dengan judul “Analisis E-Readiness Internal di kalangan UMK di Sumatra barat dalam menggunakan E-Commerce”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana UMK di Sumbar mengadopsi *e-commerce* dan menganalisis pengaruh faktor kesiapan pemanfaatan *e-commerce* secara internal terhadap UMK di Sumbar. Analisis data mengungkapkan bahwa *e-readiness* internal memiliki pengaruh yang menguntungkan pada pemanfaatan *e-*

commerce. Hasil pengujian SEM (structural equation modeling) menggunakan perangkat lunak SmartPLS menunjukkan bahwa beberapa faktor memiliki pengaruh yang baik terhadap adopsi e-commerce, sementara yang lain tidak berpengaruh. (Satriawan, 2012).

Adapun yang menjadi perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu di atas adalah dari segi penggunaan model penelitian yang mana penelitian ini menggunakan model CID Harvard dengan 5 kategori sedangkan penelitian-penelitian pendahulu lainnya hanya menggunakan 3 kategori yaitu *network access*, *networked society*, dan *networked economy*. Selain itu lokus penelitian berbeda dengan penelitian terdahulu, peneliti mengambil lokus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran untuk menganalisis kesiapan pengguna dalam penggunaan sistem informasi manajemen nikah.

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk meneliti tentang *E-readiness* Pengguna Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama di Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis *E-readiness* Pengguna Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran.

## METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif pada penelitian ini. Karena, peneliti akan memberikan gambaran tentang kesiapan pengguna SIMKAH di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran. Secara kompleks dan holistik dengan menggunakan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan melakukan penelitian dengan setting alamiah (Creswell, 2016).

Peneliti dalam pengumpulan data menggunakan teknik : Observasi, Wawancara dan Studi Kepustakaan/literatur. Observasi dilakukan peneliti sejak bulan Juli untuk mengumpulkan data-data yang dilakukan peneliti ketika turun ke lapangan untuk melakukan pengamatan (Creswell, 2016). Wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan melakukan wawancara secara berhadapan dengan orang yang akan berbagi informasi (Creswell, 2016). Studi pustaka adalah mengumpulkan data dengan melalui buku, dokumentasi serta literatur yang sesuai dengan permasalahan pada evaluasi SIMKAH ini.

Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah kepala KUA Kecamatan Cigugur dan pengelola aplikasi SIMKAH di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigugur dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Dengan teknik *purposive sampling* maka informan yang dipilih adalah orang yang paling mengetahui tentang analisis dari penerapan *e-government* melalui aplikasi SIMKAH pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigugur sehingga akan membantu menjawab permasalahan peneliti. Sedangkan penentuan informan dari masyarakat di lingkungan KUA Kecamatan Cigugur dengan menggunakan teknik *snowball sampling*. Data dilapangan terdapat 186 pasangan yang telah melaksanakan pernikahan pada tahun 2020 sebagai penerima manfaat dari penerapan *e-government* melalui aplikasi SIMKAH pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigugur. Namun, hanya 5 orang informan yang terpilih untuk melengkapi data dengan kemampuan mereka di bidang TI.

Adapun daftar informan yang ditetapkan dalam penelitian dan akan menjadi sumber dari informasi yang peneliti butuhkan untuk melengkapi penelitian ini dapat diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2

Data Informan Penelitian		
No	Nama	Jabatan/Kapasitas
1.	H.Agus Kurnia.S.Ag	Kepala KUA Kec. Cigugur
2.	Abdul Aziz	Pengelola SIMKAH
3.	SN	Masyarakat
4.	AN	Masyarakat
5.	AM	Masyarakat
6.	SA	Masyarakat
7.	TR	Masyarakat

Sumber : Hasil Penelitian ( Diolah Peneliti),  
2021

Keterangan :

1. Informan Kunci : H.Agus  
Kurnia.S.Ag
2. Informan Utama : Abdul Aziz
3. Informan Pendukung : SN, AN, AM,  
SA, TR

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yaitu dengan *data collection*, *data condensation*, *display data* dan *conclusing drawing* (Miles et al., 2014). Untuk membantu peneliti dalam memperoleh data dan menganalisis secara tepat tentang kesiapan pengguna SIMKAH. Sedangkan dalam uji kredibilitas peneliti menggunakan Triangulasi Data untuk memudahkan peneliti dalam memvalidasi data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menerapkan e-government pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigugur sangat penting sekali untuk mengetahui kesiapan dari para user/pengguna simkah ini. Berdasarkan model CID Harvard dengan 5 kategori yang peneliti gunakan maka hasil penelitian dapat kemukakan sebagai berikut.

### Akses Jaringan (*Network Acces*)

Pemanfaatan akses internet ditengah perkembangan zaman hari ini sudah menjadi kebutuhan oleh semua pihak tidak terkecuali pemerintah dalam proses pemberian pelayanan. Proses pemberian pelayanan berbasis online dengan memanfaatkan akses internet saat ini digunakan oleh pemerintah baik pusat maupun

daerah untuk mengefisiensikan dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Pangandaran melalui Pengguna Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).

Berdasarkan temuan lapangan, saat ini ada beberapa inisiatif pemerintah yang mendorong penggunaan internet. Salah satunya diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), yakni melalui pemberian internet gratis kepada masyarakat melalui program Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan Pusat Layanan Internet Kecamatan Keliling (MPLIK). Proyek PLIK dan MPLIK berupaya menghubungkan seluruh masyarakat Indonesia dengan memberikan akses internet guna mewujudkan masyarakat informasi Indonesia. Inisiatif ini terutama ditujukan untuk lokasi-lokasi yang belum terjangkau jaringan ISP atau daerah pedesaan. (Alam, 2014). Akses internet dapat digolongkan ke dalam tiga aspek dalam Sistem Informasi Manajemen Perkawinan Pengguna (SIMKAH), yaitu ketersediaan jaringan, biaya dan kualitas jaringan, serta layanan dan perangkat TI.

### Ketersediaan Akses

Dari hasil penelitian di lapangan berkaitan dengan Pengguna Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) ditemukan bahwa kesiapan akses jaringan atau IT di wilayah kantor urusan agama kecamatan cigugur sudah dapat dikatakan cukup mumpuni yaitu ditunjang dengan adanya sarana wifi di kantor urusan agama kecamatan cigugur yang jaringan internetnya cukup baik. Bahkan jaringan internet untuk wilayah kecamatan cigugur juga hampir merata. Sehingga user/pengguna mempunyai kemudahan dalam mengakses layanan pemerintahan khususnya SIMKAH ini, mengingat bahwa pelayanan ini dilakukan secara tidak langsung/berbasis online sehingga ketersediaan akses internet merupakan akses yang dibutuhkan agar

pelayanan yang diberikan dapat berjalan dengan baik.

Meskipun ketersediaan jaringan sudah dapat dikatakan mumpuni untuk menunjang penerapan layanan berbasis SIMKAH, namun disisi lain pelayanan ini memiliki kelemahan yakni terkendala saat aliran listrik mati dimana tidak bisa membuka aplikasi SIMKAH di desktop dan penginputan data biasanya tertunda. Oleh karena itu maka hal ini perlu menjadi perhatian oleh Pemerintah Daerah sebagai upaya dalam mengoptimalkan pelayanan berbasis online yang diterapkan di Kabupaten Pangandaran salah satunya SIMKAH.

### **Biaya dan Kualitas Jaringan**

Dalam proses pemberian pelayanan publik kepada masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah maupun instansi pelaksana seharusnya terbebas dari biaya sehingga masyarakat selaku sasaran dapat menerima pelayanan dengan mudah. Hal ini sesuai dengan asas pelayanan publik dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik pada pasal 4 disebutkan bahwa pelayanan publik harus berasaskan salah satunya kecepatan kemudahan dan keterjangkauan.

Hasil penelitian di lapangan ditemukan bahwa dalam proses pelayanan berbasis aplikasi SIMKAH yang diterapkan salah satunya oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran kepada masyarakat yang akan melakukan pernikahan tidak dipungut biaya atau gratis. Masyarakat hanya perlu untuk memiliki akses seperti handphone dan kuota internet serta mempersiapkan berkas yang dibutuhkan sesuai prosedur pra nikah yang ditetapkan secara tidak langsung dapat menerima layanan yang diberikan. Ini menunjukkan bahwa prosedur pelayanan yang ditawarkan oleh KUA Kecamatan Cigugur sama sekali tidak memberatkan masyarakat.

### **Peralatan TI**

Dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat yang akan menikah melalui

pelayanan berbasis Pengguna Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) salah satunya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cigugur maka diperlukan peralatan Teknologi Informasi (TI) yang mumpuni. Mengingat bahwa layanan yang diberikan berbasis online maka kebutuhan akan peralatan TI seperti laptop, komputer/pc menjadi kebutuhan bagi instansi pelaksana. Dengan begitu maka pelaksana dalam hal ini KUA Kecamatan Cigugur dapat dengan maksimal memberikan pelayanan serta mengontrol jalannya layanan.

Hasil penelitian di lapangan ditemukan bahwa pada kantor Urusan Agama Kecamatan Cigugur juga masih kekurangan komputer/pc untuk pendaftaran melalui SIMKAH, yang mana hanya tersedia satu pc saja. Hal ini berbanding terbalik dengan SDM yang tersedia/bertugas sebagai admin SIMKAH lebih dari satu orang sehingga inisiatif yang dilakukan oleh pelaksana yakni dengan menggunakan komputer/pc pribadi yang dimiliki. Meskipun para pegawai SDM pelaksana dalam penggunaan SIMKAH sangat ditunjang dengan adanya pelatihan yang sering diadakan oleh kemenag namun dengan fenomena yang ada yakni kurangnya peralatan TI yang tersedia akan sangat mengganggu pemberian layanan kepada masyarakat khususnya di Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran yang akan menikah.

Permasalahan kurangnya peralatan TI tersebut perlu menjadi perhatian salah satunya dengan melakukan penambahan komputer/pc di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cigugur agar kedepannya pelayanan SIMKAH yang diberikan dapat berjalan lebih optimal dengan ketersediaan sarana prasarana yang mendukung.

### **Akses Pembelajaran (*Networked Learning*)**

Ditengah perkembangan teknologi yang semakin masif dan menguasai hampir semua liding sektor dalam penyelenggaraan bernegara maka tingkat pengetahuan dari sumberdaya manusia pelaksana maupun masyarakat

sangatlah penting. Penggunaan teknologi yang masif ditunjukkan oleh instansi pemerintah maupun pelaksana di bawahnya salah satunya dalam hal pemberian pelayanan sebagaimana yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran. Hasil dilapangan pelayanan kepada masyarakat khususnya beragama muslim yang akan melakukan pernikahan dan mengurus kebutuhan surat-menyerurat melalui SIMKAH tentunya membutuhkan pengetahuan yang mumpuni terhadap teknologi baik pelaksana maupun masyarakat.

Akses pembelajaran yang dimiliki SDM KUA sebagai pelaksana pelayanan sudah dapat memahami terkait dengan teknologi yang ada dan digunakan dalam proses penggunaan SIMKAH berjalan dengan maksimal. Sehingga dalam hal pemberian pelayanan berbasis SIMKAH dibutuhkan SDM pelaksana yang melek teknologi khususnya di KUA Kecamatan Cigugur. Disisi lain pengetahuan masyarakat terkait dengan teknologi informasi juga sangat mendukung penyelenggaraan layanan berbasis SIMKAH kepada masyarakat yang mempersiapkan pernikahan khususnya di Kecamatan Cigugur.

#### **Ketersediaan Integrasi Sistem Pendidikan**

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting khususnya terkait dengan pendidikan tentang teknologi informasi. Latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh para sumber daya manusia pelaksana sangat menunjang kemampuan mereka untuk mengoperasikan layanan simkah. Sehingga para pegawai tidak kesulitan ketika adanya instruksi pencatatan perkawinan melalui aplikasi simkah. Begitupun, para calon pengantin yang melakukan pernikahan pada tahun 2020 mereka juga mempunyai pengetahuan yang cukup mumpuni terkait TI. Disisi lain dengan adanya digitalisasi ini masyarakat juga sangat perlu dibekali pelatihan yang lebih mumpuni untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan zaman.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan ditemukan bahwa sebagian besar

SDM pelaksana di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cigugur tidak memiliki latar belakang pendidikan IT yang mumpuni. Sebagian besar SDM pelaksana berlatar belakang pendidikan SMA dan non-IT sehingga secara pengetahuan dapat dikatakan kurang mumpuni. Namun meskipun dengan keterbatasan pengetahuan IT yang dimiliki oleh SDM pelaksana di KUA Kecamatan Cigugur pelayanan yang diberikan dalam pendaftaran SIMKAH ini dapat dikatakan cukup baik karena ditunjang dengan pelatihan yang sering dilakukan oleh Kantor Wilayah Kemenag Pangandaran.

Selanjutnya dari aspek masyarakat selaku sasaran dari pelayanan yang diberikan, hasil di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar mempunyai latar belakang pendidikan yang mumpuni. Namun yang menjadi kendala adalah pengetahuan yang dimiliki tidak digunakan untuk ikut melakukan perubahan pendaftaran pernikahan dengan secara online. Hal ini juga sangat disayangkan karena keberhasilan dari proses pelayanan yang diberikan bukan hanya dari faktor pelaksana melainkan juga dari partisipasi masyarakat yang pada dasarnya merupakan sasaran dari pelayanan.

#### **Program Pelatihan Teknis**

Sebagai upaya untuk mendorong SDM yang mumpuni dan melek teknologi salah satunya berkaitan dengan pemberian layanan dan penggunaan pelayanan berbasis SIMKAH khususnya di Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran maka perlu ditunjang dengan peroses pelatihan teknis. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, peneliti menemukan bahwa program pelatihan teknis lebih banyak dilakukan oleh Kanwil Kemenag yang hanya ditunjukkan untuk pegawai KUA saja. Program pelatihan teknis ini juga bertujuan agar pelaksana dapat melakukan langkah-langkah inovasi dalam proses pemberian pelayanan di lapangan dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat di Kecamatan Cigugur. Selain itu, pelatihan yang dilakukan bertujuan untuk mempermudah operator dalam

penggunaan aplikasi SIMKAH. Adapun berkaitan dengan Pengguna Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang diterapkan salah satunya oleh KUA Kecamatan Cigugur belum ada pelatihan yang diberikan kepada masyarakat terkait penggunaan SIMKAH. Sehingga masyarakat tidak paham bahkan tidak mengetahui terkait penggunaan aplikasi SIMKAH ini.

#### **Akses Masyarakat (*Networked Society*)**

Istilah "masyarakat informasi" pertama kali muncul pada tahun 1970-an, sebagai akibat dari pergeseran dari masyarakat industri ke masyarakat informasi. Masyarakat informasi adalah masyarakat yang aktivitas utamanya adalah penciptaan, penyebaran, dan manipulasi informasi. Menurut William Martin (dalam Syifa, [www.geocities.com](http://www.geocities.com)), masyarakat informasi adalah masyarakat di mana kualitas hidup, serta potensi perubahan sosial dan kemajuan ekonomi, bergantung pada pertumbuhan dan penggunaan informasi. Sementara itu, ilmu komunikasi mendefinisikan masyarakat informasi sebagai masyarakat yang memperlakukan informasi sebagai komoditas ekonomi yang bernilai tinggi, berinteraksi dengan masyarakat lain melalui sistem komunikasi global, dan memiliki akses ke *superhighway* informasi. (Ratna A, et al., 2013)

Dalam hal pemberian pelayanan berbasis SIMKAH kepada masyarakat yang akan menikah khususnya yang diterapkan oleh KUA Kecamatan Cigugur, maka masyarakat perlu mendapatkan akses yang memadai. Dengan begitu maka pelayanan SIMKAH yang diberikan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat khususnya di Kecamatan Cigugur atau dengan kata lain, pelayanan tersebut tepat sasaran.

Sebagaimana hasil di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Cigugur sudah memiliki akses yang memadai baik perangkat elektronik seperti *handphone* maupun ketersediaan jaringan sehingga sangat membantu dalam penerapan pelayanan

SIMKAH bagi masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan. Mengingat bahwa pada dasarnya pelayanan ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus segala urusan administrasi pernikahan dengan waktu yang lebih cepat dan prosedur yang lebih sederhana maka masyarakat hanya membutuhkan akses agar dapat menerima layanan SIMKAH. Selanjutnya berkaitan dengan akses masyarakat maka digolongkan kedalam dua aspek yaitu penggunaan TIK dan peluang memiliki ketrampilan.

#### **Penggunaan TIK**

Berdasarkan hasil di lapangan menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi komunikasi (TIK) khususnya oleh masyarakat di Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran dapat dikatakan mumpuni. Kecamatan Cigugur merupakan salah satu kecamatan yang tergolong cukup aktif dalam hal penggunaan teknologi seperti *handphone*, *laptop*, komputer maupun teknologi informasi komunikasi lainnya. Meskipun pengguna teknologi informasi di Kecamatan Cigugur cukup tinggi namun lebih banyak digunakan untuk hal-hal yang tergolong kurang produktif sebagaimana pengguna teknologi pada umumnya.

Penggunaan teknologi informasi komunikasi yang cukup tinggi di Kecamatan Cigugur menjadi hal yang positif lebih khusus dalam hal pemberian pelayanan SIMKAH yang diterapkan salah satunya oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Mengingat bahwa pelayanan SIMKAH merupakan layanan berbasis online sehingga teknologi informasi dan komunikasi seperti *handphone* merupakan akses yang harus dimiliki masyarakat untuk menerima pelayanan ini. Meskipun berdasarkan hasil wawancara tidak semua provider dapat diakses dengan baik, hanya provider tertentu saja yang bisa digunakan. Selain itu sangat disayangkan bahwa penggunaan teknologi yang cukup tinggi oleh masyarakat khususnya di Kecamatan Cigugur belum mampu dimaksimalkan oleh pelaksana

dalam hal ini Kantor Urusan Agama untuk mendorong penggunaan SIMKAH yang maksimal.

### **Peluang Memiliki Ketrampilan TIK**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa kesiapan masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi juga harus diperhatikan khususnya oleh KUA sebagai pemberi pelayanan. Mengingat bahwa pelayanan SIMKAH ini bukan hanya saja diperuntukkan pegawai KUA saja. Pelayanan SIMKAH ini pada dasarnya diperuntukkan untuk masyarakat melakukan pendaftaran pernikahan, maka dapat dilakukan melalui aplikasi SIMKAH secara mandiri dengan bantuan perangkat elektronik yang dimiliki. Hasil di lapangan juga menunjukkan bahwa masyarakat yang mendaftarkan pernikahannya pada tahun [2020](#) tidak mengetahui keberadaan simkah ini. Mereka melakukan pendaftaran pernikahannya dengan bantuan PPPN. Yang kemudian nantinya pegawai KUA yang akan mendaftarkan pernikahan para catin melalui aplikasi SIMKAH.

Ditengah penggunaan aplikasi SIMKAH yang belum secara maksimal inilah yang dapat memberikan dampak terhadap kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat. Penggunaan teknologi yang masif apabila tidak ditunjang dengan proses pelatihan yang maksimal maka sangat kecil kemungkinan untuk mengembangkan suatu hal baru meskipun ketersediaan akses dapat dikatakan memadai. Ketrampilan masyarakat sangat perlu untuk diasah dan dikembangkan sehingga menunjang dalam proses pemberian pelayanan berbasis online SIMKAH.

### **Akses Ekonomi (*Networked Economy*)**

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan aplikasi SIMKAH ini, tentunya untuk mempermudah layanan pemerintahan kepada masyarakat sehingga tidak banyak pengeluaran yang harus dilakukan masyarakat yang akan mengurus administrasi pernikahannya khususnya di Kecamatan

Cigugur Kabupaten Pangandaran. Dengan adanya pelayanan SIMKAH maka masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan tidak banyak melakukan pengeluaran seperti transportasi dan pengurusan dokumen seperti proses sebelumnya dan dapat langsung dilakukan dengan bantuan perangkat elektronik yang dimiliki dari mana saja sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh pihak pelaksana dalam hal ini KUA Kecamatan Cigugur.

Banyak manfaat dan keuntungan apabila menggunakan aplikasi simkah ini yaitu; Pertama, aplikasi ini terpusat dengan data pada kementerian terkait secara nasional. Misalnya, Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) dari Kemenkeu, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dari Mahkamah Agung dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) dari Kemdagri. Permasalahan yang sering kali muncul yang berhubungan dengan akurasi data yaitu terjadi pada input dokumen seperti e-KTP. Aplikasi ini terkadang bermasalah dalam memasukan Nomor KTP yang tercantum, akan tetapi datanya tidak sesuai, sehingga ini langsung berhubungan langsung dengan aplikasi SIAK. Maka pendaftar harus membetulkan kembali KTP ke Disdukcapil yang ada dan kadang membutuhkan waktu yang cukup lama. Sehingga akan menghambat pada proses pendaftaran. Namun, untuk saat ini aplikasi simkah sudah semi manual dan tidak terkoneksi kepada aplikasi SIAK yang terhubung ke Disdukcapil Kab. Pangandaran.

Kedua, ketika buku nikah dicetak, akan dihasilkan QR Code yang ditautkan ke program. Ini adalah elemen keamanan yang mencegah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk dengan mudah memalsukan buku nikah. Ketiga, laporan data perkawinan dan PNBP terkait perkawinan dapat diperiksa secara real time. Ini akan memungkinkan pemantauan pernikahan di seluruh negeri, termasuk ketersediaan buku nikah di setiap lokasi. Keempat, pendaftaran pernikahan

online tersedia. Pengantin (catin) dapat melengkapi entri data dasar dan memesan tanggal pernikahan yang diinginkan. Namun, Catin harus tetap menyerahkan dokumen fisik kepada petugas KUA. Kelima, program ini juga menampilkan faktor data lain yang terkait dengan kategori tertentu, seperti data pernikahan menurut usia, pendidikan, dan pekerjaan. Keenam, komunikasi antar KUA bersifat real-time. Pemberitahuan akan muncul ketika masyarakat mengajukan surat rekomendasi pernikahan dan mengesahkan buku nikah. Selain itu, program ini mudah digunakan (user-friendly), sehingga memudahkan petugas KUA dalam melakukan pekerjaannya. Selain itu, aplikasi ini mudah dipahami, yang menghilangkan kebutuhan akan saran dan keahlian berkelanjutan. Intinya, program ini akan meningkatkan pelayanan masyarakat dan memodernisasi tampilan data.

Dengan hasil yang diperoleh maka secara umum dapat dikatakan bahwa dari aspek ekonomi masyarakat sangat terbantu dengan hadirnya pelayanan melalui Pengguna Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) salah satunya yang diterapkan oleh KUA Kecamatan Cigugur. Masyarakat tidak perlu lagi mengeluarkan sejumlah biaya untuk kebutuhan transportasi ke KUA untuk mengurus administrasi pra nikah, namun dapat dilakukan secara langsung melalui pelayanan SIMKAH dengan bantuan PPPN.

Disisi lain jika dilihat dari kesesuaian antara apa yang menjadi tujuan awal diadakannya pelayanan SIMKAH dengan yang terjadi di lapangan maka dapat di katakana bahwa sudah efektif. Ini didasarkan pada penerapan pelayan SIMKAH yang memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin menikah salah satunya di Kecamatan Cigugur, yang mana mereka dapat memboking tanggal pernikahan terlebih dahulu tanpa harus datang ke KUA. Disisi lain, masyarakat dapat menerima layanan SIMKAH ini hanya dengan memanfaatkan akses elektronik yang mereka miliki dan sesuai dengan perkembangan zaman

hari ini sehingga pelayanan yang diterapkan ini dapat dikatakan efisien.

#### **Akses Kebijakan (*Network Policy*)**

Jaringan ekonomi dapat dibantu atau dirugikan oleh kebijakan publik. Suasana yang menguntungkan untuk penggunaan Internet dan e-commerce yang diciptakan oleh kebijakan pemerintah mendorong komunitas, organisasi, dan orang-orang untuk berinvestasi dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Kebijakan publik berdampak pada komponen penting dari Kesiapan Jaringan, termasuk ketersediaan dan biaya Internet, ketersediaan dan keterjangkauan perangkat keras dan perangkat lunak, TIK di sekolah, dan perdagangan elektronik. Untuk mempersiapkan masyarakat untuk Jaringan Dunia, pembuat kebijakan yang tepat harus memahami konsekuensi dari tindakan mereka mengenai adopsi dan penggunaan TIK.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Agama Pasal 36 Nomor 20 Tahun (2019) tentang Pencatatan Pernikahan ini sangat membantu masyarakat khususnya di Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran. Adanya kebijakan ini sebagai bukti kesiapan pemerintah dalam penerapan e-government sebagai aturan yang harus patuhi dan dikerjakan oleh pegawai KUA dalam perubahan pencatatan pernikahan. Yaitu yang tadinya manual menjadi berbasis online. Pencatatan pernikahan secara online di aplikasi SIMKAH berbasis website ini yaitu dalam rangka mempercepat proses pelayanan, memberikan kemudahan, dan jauh dari pungutan liar serta dalam pengoperasiannya melalui pedoman SIMKAH.

Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) sebagai salah satu contoh kebijakan yang menunjukkan bahwa ada bentuk transformasi yang dilakukan oleh pelaksana lebih khususnya dalam hal pelayanan publik. Sebagaimana kebijakan pada umumnya yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan di masyarakat, maka tidak berbeda jauh dengan SIMKAH yang pada realitasnya hadir untuk



menyelesaikan permasalahan masyarakat akan pelayanan yang lambat dengan metode yang lebih cepat dan sederhana dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada.

Namun, berdasarkan hasil dilapangan bahwa pelaksana dalam hal ini KUA salah satunya di Kecamatan Cigugur perlu untuk membuat kebijakan baru dalam upaya memaksimalkan pelayanan berbasis SIMKAH bagi mereka yang akan menikah, salah satunya dengan sosialisasi yang masif. Meskipun Kecamatan Cigugur merupakan salah satu yang cukup kecil secara geografis dengan tujuh desa di bawahnya namun proses sosialisasi perlu dilakukan sehingga bukan hanya pegawai KUA yang mengetahui adanya pelayanan SIMKAH bagi mereka yang akan menikah, melainkan juga masyarakat secara umum di Kecamatan Cigugur. Sebagaimana program pemerintah pada umumnya, maka proses awal yang harus dilakukan adalah langkah sosialisasi di tujuh desa yang ada di Kecamatan Cigugur, dengan begitu maka semakin banyak masyarakat yang mengetahui serta dapat mengakses layanan SIMKAH tersebut.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas maka secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran sudah cukup siap dalam Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Hal ini didasarkan pada beberapa faktor yaitu dari Akses Jaringan (*Networked Learning*) sudah mumpuni dalam menunjang penerapan Pengguna Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) oleh KUA Kecamatan Cigugur baik berkaitan dengan ketersediaan dan kualitas jaringan maupun dalam hal biaya yang tidak dibebankan kepada masyarakat yang akan menikah dan ingin mendapatkan pelayanan ini. Selain itu dari Akses Masyarakat (*Networked Society*)

sangat mumpuni baik dilihat dari tingkat penggunaan masyarakat terhadap teknologi informasi maupun peluang masyarakat dalam memiliki keterampilan dalam penggunaan teknologi informasi komunikasi sehingga mendorong kesiapan KUA dalam penerapan SIMKAH. Kemudian dari Akses Ekonomi (*Networked Economy*) masyarakat sangat dibantu dengan hadirnya pelayanan berbasis SIMKAH yang diterapkan khususnya di Kecamatan Cigugur tidak banyak pengeluaran yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk menerima pelayanan tersebut, hanya melalui perantara elektronik dan dapat dilakukan dari mana saja dengan mengikuti prosedur yang telah diatur. Sedangkan dilihat dari Akses Kebijakan (*Network Policy*) tentunya pelayanan SIMKAH ini memberikan solusi terhadap permasalahan masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan, sehingga layanan pencatatan pernikahan bisa dilakukan dengan mudah dan cepat.

Saran-saran untuk untuk penelitian lebih lanjut untuk menutup kekurangan penelitian. Tidak memuat saran-saran diluar untuk penelitian lanjut.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Alam, N. (2014). Potensi Penggunaan Koneksi Internet Instansi Pemerintah Bersama Masyarakat di Kota Makassar. *Jurnal Penelitian Komunikasi, Informatika Dan Media Massa*, 17(3), 189–196.
- [2] Aprianty, D. R. (2016). Penerapan Kebijakan E-Government Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. 4(4), 1589–1602.
- [3] Choiriyah, I. U. (2020). Penerapan E-Government Melalui M-BONK Di Kabupaten Sidoarjo. 5(2).
- [4] Creswell, J. W. (2016). *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran* (Keempat). Pustaka Pelajar.

- [5] Davis, G. B. (2013). *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen*. Maxikom.
- [6] Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat. (2013). *Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan* (pp. 2–4).
- [7] Engkus. (2020). *Digital-Era Government (DEG): Policy Analysis in Government West Bandung Regency, Indonesia*. 560(9), Atlantis Press SARL 560(9), 1–4.
- [8] Fahlevi, F. (2021). *Kemenag: 5.819 KUA Teintegrasi Aplikasi Simkah untuk Layanan Kartu Nikah Digital*. Tribunnews.Com.  
<https://www.tribunnews.com/nasional/2021/08/11/kemenag-5819-kua-terintegrasi-aplikasi-simkah-untuk-layanan-kartu-nikah-digital>
- [9] Instruksi Presiden Indonesia. (2003). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government*.
- [10] Kemenag. (2018). *Bimas Islam Segera Rilis Aplikasi Simkah Web, Ini Keunggulannya*. Kemenag.Go.Id.  
<https://kemenag.go.id/read/bimas-islam-segera-rilis-aplikasi-simkah-web-ini-keunggulannya-qba7v>
- [11] Lestari, D., Winarno, W. W., & Kurniawan, M. P. (2021). Model E-Readiness Untuk Pengukuran Kesiapan Pengelolaan Aduan E-Lapor DIY. *Creative Information Technology Journal*, 7(2), 86.  
<https://doi.org/10.24076/citec.2020v7i2.249>
- [12] Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Soucebook*.
- [13] Nugroho, R. (2014). *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Pustaka Pelajar.
- [14] Nugroho, R. A. (2020). *Kajian Analisis Model E-Readiness Dalam Rangka Implementasi E-Government*. 1(1), 65–78.  
<https://doi.org/10.17933/mti.v1i1i1.171>
- [15] Nur, E. (2014). *Penerapan E-Goverment Publik Pada Setiap SKPD Berbasis Pelayanan Di Kota Palu*. 265–280.
- [16] Nurjaya, Affandi, A., Ilham, D., & Sunarsi, D. (2021). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Kemampuan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kinerja Aparatur Desa Pada Kantor Kepala Desa Di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta*. 4(3), 332–346.
- [17] Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencacatan Pernikahan*.
- [18] Peraturan Presiden Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*.
- [19] Ratna A, D., A, V., S, F., & S, S. (2013). Peranan Teknologi Komunikasi dalam Menciptakan Masyarakat Informasi di Indonesia. *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, 1(1), 73–86.  
<https://doi.org/10.24002/jik.v1i1.159>
- [20] Rianti, S., Rusli, Z., & Yuliani, F. (2019). *Kualitas Pelayanan Publik*. 15, 412–419.
- [21] Satriawan, F. (2012). Analisis E-Readiness Internal di kalangan UMK di Sumatra barat dalam menggunakan E-Commerce. *Thesis Universitas Andalas*.
- [22] Sutisana, Rifa, A. B., & Yuliani. (2019). *Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah dalam Peningkatan Kualitas Layanan*. 4(April), 189–206.  
<https://doi.org/10.15575/tadbir>

---

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP IMPOR BARANG  
KONSUMSI DI INDONESIA**

Oleh

**Juni Mashita****Program Studi Pendidikan Ekonomi****Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, Universitas Indraprasta PGRI**Email [junimashita11@gmail.com](mailto:junimashita11@gmail.com)**Abstract**

Impor bahan konsumsi merupakan salah satu hal yang tidak dapat dihindari bagi pemerintahan Indonesia, dengan populasi terbesar keempat di dunia membuat barang konsumsi yang ada sangat terbatas, oleh sebab itu pemerintah melakukan perdagangan internasional untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia, secara trandline menunjukkan bahwa terjadi peningkatan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis pengaruh inflasi, cadangan devisa, kurs dolar Amerika dan poduk domestic bruto (PDB) terhadap Impor barang konsumsi di Indonesia. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistika (BPS). Berdasarkan nilai t-statistic, tingkat inflasi berpengaruh positif dan signifikan, namun nilai cadangan devisa, kurs dan prduk domestik bruto berpengaruh tidak signifikan terhadap impor barang konsumsi di Indonesia. Demikian juga berdasarkan nilai F-statistic, pengaruh inflasi, cadangan devisa, kurs dan prduk domestik bruto secara simultan berpengaruh terhadap impor barang konsumsi di Indonesia.

**Keyword : Inflasi, Cadangan Devisa, Kurs, Produk Domestic Bruto, Impor Barang Konsumsi**

**PENDAHULUAN****Latar Belakang**

Amerika Serikat lewat kantor perwakilan perdagangan atau *Office of the US Trade Representative* (USTR) di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), tidak lagi memasukan Indonesia sebagai negara berkembang (kompas.com, 2020). Alasan Amerika Serikat mencoret Indonesia dari negara berkembang karena Indonesia memiliki 0,5% atau lebih dari total perdagangan di dunia. Kegiatan perdagangan internasional bertujuan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasional dengan melakukan ekspor/impor barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak dapat diperoleh dari dalam negeri. Perdagangan internasional juga berguna untuk meningkatkan akumulasi kapital yang digunakan untuk mengimpor barang-barang kapital yang tidak

dapat diproduksi di dalam negeri, menjaga kestabilan harga dalam negeri dan meningkatkan kerja sama dengan negara lain.

Melakukan ekspor dan impor merupakan kegiatan yang cukup penting bagi setiap negara. Peran ekspor bagi setiap negara adalah sebagai sumber perolehan devisa negara, mendorong ekonomi nasional, memperluas lapangan kerja, memperluas pasar komoditi Indonesia ke luar negeri dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Indonesia hingga saat ini juga maih menjadi konsumen dalam pasar dunia, keterbatasan faktor produksi memaksa pemerintahan melakukan impor. Impor yang dilakukan adalah impor barang baru industri, impor barang modal dan impor barang konsumsi.

Impor bahan baku industri dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dalam negeri dikarenakan substitusi bahan baku industri impor dalam negeri yang dihasilkan belum

mampu memenuhi kebutuhan dan permintaan akan bahan baku oleh industri-industri dalam negeri untuk melakukan produksi. Sama halnya dengan impor barang modal yang merupakan barang yang meliputi semua jenis barang tahan lama yang merupakan sebuah peralatan berat seperti mesin penggerak, mesin pengolah logam kendaraan dan lain-lain. Begitu juga dengan Impor barang konsumsi adalah impor yang dilakukan oleh Negara Indonesia untuk memenuhi kebutuhan dari Negara karena persediaan dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan masyarakat luas (Nababan & Perdana, 2021).



Sumber : BPS

Gambar 1.1  
Impor Barang Konsumsi Indonesia

Impor bahan konsumsi merupakan salah satu hal yang tidak dapat dihindari bagi pemerintahan Indonesia, dengan populasi terbesar keempat di dunia membuat barang konsumsi yang ada sangat terbatas, oleh sebab itu pemerintah melakukan perdagangan internasional untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Berdasarkan gambar diatas kita dapat melihat fluktuasi dari kegiatan impor barang konsumsi yang cenderung terus menaik disetiap tahunnya. Hal ini harus selalu diperhatikan oleh pemerintahan Indonesia untuk mengendalikan kegiatan impornya. Seharusnya impor hanya dilakukan untuk tambahan kebutuhan barang konsumsi bukan sebagai kebutuhan utama barang konsumsi di Indonesia. Pemerintah seharusnya dapat menekan dan lebih mengembangkan produksi barang konsumsi di Indonesia dibandingkan

harus terus menerus mengandalkan impor barang konsumsi dari pasar internasional.

Produk yang di impor dari pasar internasional seharusnya hanya dimanfaatkan sebagai nilai lebih yang harus bisa dikembangkan lagi didalam negeri. Terlepas dari untuk memenuhi kebutuhan impor barang konsumsi akan membebani devisa negara, sehingga pemerintah juga memerlukan suatu kebijakan yang dapat mengatur keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan barang konsumsi dengan pengeluaran devisa. Dalam hal ini ada beberapa faktor yang dianggap dapat mempengaruhi impor barang konsumsi, antara lain Inflasi, Cadangan Devisa, Kurs dan Produk Domestik Bruto (PDB).

Dalam pengertiannya inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi timbul dikarenakan adanya tekanan dari tingginya permintaan atas barang atau jasa sedangkan ketersediaannya atau kapasitas perekonomian. Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, cadangan devisa adalah aset yang dimiliki oleh bank sentral dan otoritas moneter, biasanya dalam mata uang asing. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Desember 2021 tetap tinggi sebesar 144,9 miliar dolar AS, meskipun menurun dibandingkan dengan posisi pada akhir November 2021 sebesar 145,9 miliar dolar AS. Penurunan posisi cadangan devisa pada Desember 2021 antara lain dipengaruhi oleh kebutuhan pembayaran utang luar negeri pemerintah (Haryono, 2022). Kurs adalah nilai atau harga mata uang sebuah negara yang diukur dalam mata uang negara lain. Salah satu indikator penting untuk mengetahui keadaan ekonomi pada suatu negara dalam periode tertentu adalah data Produk Domestik Bruto (PDB), dalam pengertiannya PDB merupakan jumlah nilai tambahan yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan pernyataan pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Apakah inflasi, cadangan devisa, kurs dan produk domestik bruto secara parsial berpengaruh terhadap impor barang konsumsi di Indonesia?
2. Apakah inflasi, cadangan devisa, kurs dan produk domestik bruto secara simultan berpengaruh terhadap impor barang konsumsi di Indonesia?

### Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini yaitu:

1. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh inflasi, cadangan devisa, kurs dan produk domestik bruto terhadap impor barang konsumsi di Indonesia
2. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh inflasi, cadangan devisa, kurs dan produk domestik bruto terhadap impor barang konsumsi di Indonesia.

### Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan ini yaitu:

1. Bagi pemerintah, penulisan ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menentukan kebijakan di sektor perdagangan luar negeri khususnya impor
2. Bagi peneliti, penulisan ini diharapkan menjadi sarana untuk menambah wawasan ilmiah dan ilmu pengetahuan serta mampu menerapkan teori-teori ekonomi secara nasional. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pembanding dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

## LITERATURE REVIEW

### Impor Barang Konsumsi

Perdagangan internasional merupakan alat penggerak bagi pembangunan ekonomi dengan memperbesar kemampuan konsumsi suatu negara, perdagangan internasional cenderung meningkatkan keadilan dan persamaan internasional dan domestik yang lebih merata

dengan menyamakan harga faktor produksi, meningkatkan pendapatan riil negara-negara yang melakukan perdagangan dan menjadikan penggunaan sumber-sumber dari masing-masing negara dan dunia secara efisien (Todaro, 1987). Motif untuk mengadakan perdagangan internasional adalah kemungkinan diperolehnya manfaat atau *gains of trade*, yang ditunjukkan oleh timbulnya perubahan konsumsi dari masing-masing konsumen di negara yang melakukan perdagangan sehingga lebih sesuai dengan selera konsumen yang meningkatkan kepuasan semua pihak tanpa ada yang merasa dirugikan (Boediono, 1990 : 10).

Menurut Smith suatu negara akan mengeksport barang tertentu karena negara tersebut bisa menghasilkan barang dengan biaya yang secara mutlak lebih murah dari pada negara lain, yaitu karena memiliki keunggulan mutlak dalam produksi barang tersebut (Sofyan, 2017). Teori Absolute Advantage lebih mendasarkan pada besaran/variabel riil bukan moneter sehingga sering dikenal dengan nama teori murni (pure theory) perdagangan internasional. Murni dalam arti bahwa teori ini memusatkan perhatiannya pada variabel riil seperti misalnya nilai suatu barang diukur dengan banyaknya tenaga kerja yang dipergunakan untuk menghasilkan barang. Makin banyak tenaga kerja yang digunakan akan makin tinggi nilai barang tersebut (Labor Theory of value).

Impor adalah pengeluaran atau perdagangan internasional yang dilakukan oleh suatu negara untuk membeli barang atau jasa yang diproduksi oleh negara lain. Besarnya impor yang dilakukan oleh suatu negara ditentukan oleh persaingan mutu barang yang lebih baik atau lebih murah dengan barang produksi dalam negeri, namun terwujudnya impor tersebut masih ditentukan oleh kesanggupan untuk membayar impor (Sukirno, 1994 : 341). Pada umumnya negara melakukan impor terhadap barang yang belum dapat atau belum cukup diproduksi dalam negeri, karena faktor produksi yang dimiliki tersedia dalam

jumlah yang kurang untuk dapat memenuhi kebutuhan (Gilarso, 1992 : 303).

### **Inflasi**

Inflasi merupakan suatu keadaan yang mengakibatkan naiknya harga secara umum atau suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Ketika tingkat inflasi suatu negara meningkat maka impor barang menurun dan apabila tingkat inflasi menurun maka impor barang akan mengalami peningkatan (Widiya, Siregar, & Hilmiatussahla, 2019). Beberapa penelitian sebelumnya (Cahyani, 2021), (Purba & Ateta, 2021) dan (Sihotang & Gulo, 2020) menyatakan adanya pengaruh positif dan signifikan antara inflasi terhadap impor barang konsumsi di Indonesia. Pernyataan berbeda dengan yang dilakukan oleh (Safitri, 2020) dan (Kamil, 2016) yang menemukan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara inflasi terhadap impor barang konsumsi di Indonesia.

### **Cadangan Devisa**

Cadangan devisa adalah keseluruhan portofolio kekayaan maupun kewajiban luar negeri dari suatu negara. Cadangan devisa merupakan pembatas terhadap kegiatan impor. pada saat cadangan devisa menipis pemerintah harus menekan angka impor. Permintaan impor akan memberikan dampak negatif bila impor terbesar berupa impor barang untuk konsumsi. Hal ini disebabkan karena jenis impor ini lambat tahun akan mematikan produksi dalam negeri atau daerah importir. selain itu juga akan mengurangi cadangan devisa negara (Alkaf, Noor, Sunuraya, Fajriyah, & Azzahra, 2021). Impor perlu ditekan mengingat banyaknya impor akan mengurangi jumlah cadangan devisa akibat membayar impor yang dilakukan. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Cahyani, 2021), (Purba & Ateta, 2021), (Richart & Meydianawati, 2014) dan (Nababan & Perdana, 2021) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara cadangan devisa terhadap impor barang konsumsi. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan dengan (Safitri, 2020) yang

menyatakan tidak adanya pengaruh yang signifikan antara cadangan devisa terhadap impor barang konsumsi.

### **Kurs**

Kurs adalah harga atau nilai sebuah mata uang dari suatu negara yang diukur atau dinyatakan dalam mata uang asing lainnya. Nilai tukar mata uang sangat berguna bagi negara karena digunakan sebagai satuan alat pembayaran pada saat melakukan transaksi internasional. Dengan semakin tingginya nilai tukar mata uang domestik, menunjukkan semakin kuatnya perekonomian suatu negara (Jalunggono, Cahyani, & Juliprijanto, 2020). Kurs merupakan salah satu harga yang lebih penting dalam perekonomian terbuka, karena ditentukan oleh adanya keseimbangan antara permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar (Wilaga, 2021) . Pemerintah akan menekan angka impor barang konsumsi jika nilai kurs rupiah mengalami penurunan dibandingkan dengan mata uang negara lainnya. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Cahyani, 2021), (Safitri, 2020), (Sihotang & Gulo, 2020), (Widiya, Siregar, & Hilmiatussahla, 2019), (Richart & Meydianawati, 2014) dan (Nababan & Perdana, 2021) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kurs terhadap impor barang konsumsi di Indonesia. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Purba & Ateta, 2021) yang menyatakan tidak ada pengaruh yang signifikan antara kurs terhadap impor barang konsumsi di Indonesia.

### **Produk Domestik Bruto**

Produk domestik bruto merupakan jumlah *output* dari total yang dihasilkan suatu negara selama satu tahun dengan dasar harga konstan. Peningkatan ekonomi suatu negara yang diukur dari produktifitas produk yang dihasilkannya dari waktu ke waktu (Zatira, Sari, & Apriani, April 2021). Perkembangan ekonomi sendiri merupakan peningkatan dari pendapatan perkapita yang diimbangi dengan pertambahan jumlah penduduk sehingga dapat terjadi pemerataan pendapatan. Kenaikan barang

impor akan menaikkan barang produksi yang diimpor dari luar negeri sehingga produk-tifitas dalam negeri semakin menurun yang akan menurunkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri (Astuti & Ayuningtyas, 2018). Nilai impor tergantung dari nilai tingkat pendapatan nasional negara tersebut, semakin tinggi pendapatan nasional, semakin rendah produksi barang dalam negeri, semakin tinggi impor sebagai akibat dari banyaknya kebocoran pendapatan nasional (Hodijah & Angelina, 2021). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Cahyani, 2021), (Safitri, 2020), (Purba & Ateta, 2021) (Sihotang & Gulo, 2020) dan (Richart & Meydianawati, 2014) menyatakan produk domestik bruto berpengaruh signifikan terhadap impor barang konsumsi di Indonesia. Namun hal ini berbeda dengan yang dilakukan oleh (Nababan & Perdana, 2021) yang memperoleh hasil tidak adanya pengaruh signifikan antara produk domestik bruto terhadap impor barang konsumsi di Indonesia.

## RESEARCH METHOD

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan (Library Research) yang dimaksud dengan metode kepustakaan adalah suatu penelitian yang dilakukan berdasarkan data-data dalam bentuk sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak-pihak lain umumnya sudah dalam bentuk publikasi serta mempelajari referensi-referensi yang ada relevansinya dengan penelitian yang dilakukan (Alkaf, Noor, Sunuraya, Fajriyah, & Azzahra, 2021).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data berkala dari tahun 2005-2021. Data berkala merupakan data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk memberikan gambaran tentang perkembangan suatu variabel. Data tersebut adalah data impor bahan konsumsi Indonesia, inflasi, cadangan devisa, kurs dan produk domestik bruto (PDB). Peneliti memperoleh data tersebut dari instansi-instansi terkait, yaitu

Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia dan Bank Indonesia (BI).

## RESULT AND DISCUSSION

Impor bahan baku memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap total impor di Indonesia, hal ini demi memenuhi keersediaan kebutuhan barang konsumsi yang dibutuhkan dalam negeri. Berikut ini akan dijelaskan seberapa besar pengaruh inflasi, cadangan devisa, kurs dan prduk domestik bruto terhadap impor barang konsumsi di Indonesia selama periode 2015 sampai dengan 2021. Berdasarkan tabel dibawah kita dapat melihat fluktuasi yang terjadi antara impor bahan baku, inflasi, cadangan devisa, kurs, dan PDB yang cenderung meningkat.

Tabel 4.1

Pengaruh Inflasi, Cadangan Devisa, Kurs Dan Prduk Domestic Bruto Terhadap Impor Barang Konsumsi Di Indonesia Selama Periode 2015 Sampai Dengan 2021

Tahun	impor (juta US\$)	inflasi	devisa (juta US\$)	kurs (US Dollar)	PDB (juta US\$)
2005	4.620,50	17,11%	34.724,00	9.830,00	285.900,00
2006	4.738,20	6,60%	42.586,00	9.020,00	364.600,00
2007	6.539,10	6,59%	56.920,00	9.419,00	432.200,00
2008	8.303,70	11,06%	51.639,00	10.950,00	510.200,00
2009	6.752,60	2,78%	66.105,00	9.400,00	539.600,00
2010	9.991,60	6,96%	96.207,00	8.991,00	755.100,00
2011	13.392,90	3,79%	110.123,00	9.068,00	893.000,00
2012	13.408,60	4,30%	112.781,00	9.670,00	917.900,00
2013	13.138,90	8,38%	99.387,00	12.189,00	912.500,00
2014	12.667,20	8,36%	111.862,00	12.440,00	890.800,00
2015	10.876,50	3,35%	105.931,00	13.795,00	860.900,00
2016	12.351,70	3,02%	116.362,00	13.436,00	931.900,00
2017	14.075,10	3,61%	130.196,38	13.548,00	1.016.000,00
2018	17.181,30	3,13%	120.654,27	14.481,00	1.042.000,00
2019	16.454,60	2,72%	129.183,28	13.901,00	1.119.000,00
2020	14.656,00	1,68%	135.897,00	14.105,00	1.058.000,00
2021	16.366,36	1,87%	144.905,38	14.269,00	1.062.000,00

Sumber : BPS & BI (data olah)

Berdasarkan data diatas kita dapat melihat titik terendah impor barang konsumsi terjadi pada tahun 2005 dan titik tertinggi impor barang konsumsi terjadi pada tahun 2018 dengan total 17.181,30 juta US dollar. Inflasi mengalami titik terendah pada tahun 2020 dengan nilai 1,68% dan titik tertinggi berada pada tahun 2005 dengan nilai 17,11%. Menurut data BPS tingginya inflasi pada tahun 2005 terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks pada semua kelompok barang dan jasa salah satunya adalah

bahan konsumsi. Cadangan devisa mengalami nilai terendah pada tahun 2005 dan mengalami titik tertinggi pada tahun 2021 dengan nilai 144.905,38 juta US dollar. Kurs memiliki nilai terendah pada tahun 2010 dengan nilai tukar sebesar Rp. 8.991,- per 1 US dollar dan mengalami titik tertinggi pada tahun 2018 dengan nilai Rp. 14.481,- per 1 US dollar. Produk domestik bruto memiliki nilai terendah pada tahun 2005 dengan nilai 285.900 juta US dollar dan memiliki nilai tertinggi pada tahun 2019 dengan nilai 1.119.000 juta US dollar.

Tabel 4.2

Ringkasan Analisis Regresi Multiples  
(Berganda)

Variabel	Koefisien Regresi	t- hitung	Sig.
Konstanta	1648,753	-	
inflasi (X1)	8341,737	3,66	0,003
Devisa (X2)	-0,023	0,148	0,885
Kurs (X3)	0,025	-0,587	0,568
PDB (X4)	0,018	0,905	0,383
F-hitung = 62,915			0,000
R Square = 0,954			
Y = 8341,737 (X1) – 0,023 (X2) + 0,025 (X3) + 0,025 (X4)			

Sumber : SPSS 25 (data olah)

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dijelaskan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

- Nilai R Square sebesar 0,954 yang berarti bahwa 95,4% variasi atau perubahan dalam impor barang konsumsi dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen inflasi, cadangan devisa, kurs dan produk domestik bruto, sedangkan 4,6% sisanya dijelaskan oleh variabel lain
- Berdasarkan uji simultan diketahui bahwa variabel independen mempunyai signifikan sebesar  $0,000 <$

$0,05$  dan nilai t-hitung  $62,915 >$  t-tabel 2,000 hal ini berarti secara parsial berpengaruh terhadap impor barang konsumsi

- Pengaruh Inflasi terhadap impor barang konsumsi di Indonesia  
Berdasarkan parsial nilai inflasi yakni  $0,003 <$   $0,05$  dan nilai persamaan regresi sebesar 8.341,737 maka inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap impor barang konsumsi. Koefisien regresi menunjukkan bahwa apabila terjadi kenaikan tingkat inflasi sebesar 1 maka akan dapat meningkatkan impor barang konsumsi Indonesia sebesar 8.341,737 dari segi jumlah kenaikan impor sebagai akibat inflasi adalah cukup besar. Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh sebelumnya (Cahyani, 2021), (Purba & Ateta, 2021) dan (Sihotang & Gulo, 2020)
- Pengaruh Cadangan Devisa terhadap impor barang konsumsi di Indonesia  
Berdasarkan parsial nilai cadangan devisa yakni  $0,885 >$   $0,05$  dan nilai persamaan regresi sebesar -0,023 maka cadangan devisa tidak berpengaruh signifikan terhadap impor barang konsumsi. Koefisien regresi menunjukkan bahwa apabila terjadi kenaikan tingkat cadangan devisa sebesar 1 maka akan dapat menurunkan impor barang konsumsi Indonesia sebesar 0,023 hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Safitri, 2020). Cadangan devisa merupakan simpanan mata uang asing (dollar, euro, yen, dll) yang merupakan asset bank sentral yang tersimpan dan digunakan untuk menjadi jaminan kewajiban mata uang local yang diterbitkan. impor dapat ditekan oleh kesanggupan atau kemampuan dalam menghasilkan barang-barang yang



- bersaing dengan barang luar negeri, hal ini dapat menghemat cadangan devisa
- e. Pengaruh Kurs terhadap impor barang konsumsi di Indonesia

Berdasarkan parsial nilai kurs yakni  $0,568 > 0,05$  dan nilai persamaan regresi sebesar  $0,025$  maka kurs tidak berpengaruh signifikan terhadap impor barang konsumsi. Koefisien regresi menunjukkan bahwa apabila terjadi kenaikan nilai kurs terhadap dollar sebesar 1 maka akan dapat meningkatkan impor barang konsumsi Indonesia sebesar  $0,025$  hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Purba & Ateta, 2021).

- f. Pengaruh PDB terhadap impor barang konsumsi di Indonesia

Berdasarkan parsial nilai kurs yakni  $0,383 > 0,05$  dan nilai persamaan regresi sebesar  $0,018$  maka produk domestik bruto tidak berpengaruh signifikan terhadap impor barang konsumsi. Koefisien regresi menunjukkan bahwa apabila terjadi kenaikan nilai PDB sebesar 1 maka akan dapat meningkatkan impor barang konsumsi Indonesia sebesar  $0,018$  hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nababan & Perdana, 2021).

## CONCLUSIONS, SUGGESTIONS AND LIMITATIONS

### Kesimpulan

Berdasarkan nilai *t-statistic*, tingkat inflasi berpengaruh positif dan signifikan, namun nilai cadangan devisa, kurs dan prduk domestik bruto berpengaruh tidak signifikan terhadap impor barang konsumsi di Indonesia. Demikian juga berdasarkan nilai *F-statistic*, pengaruh inflasi, cadangan devisa, kurs dan prduk domestik bruto secara simultan berpengaruh terhadap impor barang konsumsi di Indonesia. Berdasarkan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ), pengaruh inflasi, cadangan devisa, kurs dan

prduk domestik bruto dapat menjelaskan sebesar 95,4 persen keragaman impor barang konsumsi di Indonesia.

### Saran dan Batasan

Diharapkan bagi pemerintah agar dapat mengurangi atau menekankan impor karena terjadinya peningkatan impor barang konsumsi dibandingkan produksi barang sejenis di dalam negeri akan mengancam dan mengakibatkan kerugian yang serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang serupa. Untuk penelitian berikutnya diharapkan dapat menambah periode tahun pengamatan dan jumlah variabel seperti selain variabel yang diterapkan sehingga lebih mampu untuk dapat dilakukan generalisasi atas hasil penelitian tersebut.

Untuk mengatasi keterbatasan penelitian ini, hal-hal yang disarankan untuk penelitian selanjutnya adalah agar peneliti berikutnya dapat memperluas objek penelitian sehingga mendapatkan hasil yang lebih objektif lagi. Penelitian selanjutnya mungkin juga dapat meneliti juga hasil impor barang dan jasa lain untuk dapat membandingkan secara konseptual pengaruh ekspor dan impor secara terintegrasi.

## REFERENCES

- [1] Alkaf, F., Noor, L., Sunuraya, M., Fajriyah, N., & Azzahra, S. (2021). *Analisis Struktur Impor Di Indonesia Periode 1997-2019*.
- [2] Astuti, I., & Ayuningtyas, F. (2018). Pengaruh Ekspor Dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, Volume 19, Nomor 1, hlm. 1-10.
- [3] Boediono. (1990 : 10). *Ekonomi Internasional*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- [4] Cahyani, I. N. (2021). Analisis Impor Barang Konsumsi Di Indonesia Tahun 1989-2018.
- [5] Gilarso, T. (1992 : 303). *Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Makro*. Yogyakarta: Kanisius.

- [6] Haryono, E. (2022, Januari 7). *Departemen Komunikasi Bank Indonesia*. Retrieved from [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id): [https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp\\_240422.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_240422.aspx)
- [7] Hodijah, S., & Angelina, G. (2021). Analisis Pengaruh Ekspor Dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan*, Vol. 10 No. 01.
- [8] Jalunggono, G., Cahyani, Y., & Juliprijanto, W. (2020). Pengaruh Ekspor, Impor Dan Kurs Terhadap Cadangan Devisa Indonesia Periode Tahun 2004 – 2018. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi (JEBA) Volume 22 No 2*.
- [9] Kamil, A. (2016). Pengaruh Pendapatan Perkapita Dan Inflasi Terhadap Impor Barang Konsumsi Di Indonesia Periode 1999-2014.
- [10] *kompas.com*. (2020, 02 22). Retrieved from Indonesia Masuk Negara Maju atau Berkembang? Ini Penjelasan WTO: [money.kompas.com](http://money.kompas.com)
- [11] Nababan, & Perdana, I. C. (2021). Analisis Pengaruh PDB, Kurs, Tingkat Suku Bunga dan Cadangan Devisa terhadap Impor Barang Konsumsi di Indonesia Periode Tahun 2000-2019.
- [12] Purba, B., & Ateta, M. (2021). Analisis Determinan Perkembangan Impor Indonesia. Tesis. Medan: Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan,.
- [13] Richart, P., & Meydianawati, L. (2014). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Impor Barang Konsumsi Di Indonesia (E-Jurnal Ep Unud, 3 [12] : 613-623).
- [14] Safitri, A. (2020). Pengaruh Produk Domestik Bruto, Inflasi, Kurs Dan Cadangan Devisa Terhadap Impor Barang Konsumsi Di Indonesia.
- [15] Sihotang, J., & Gulo, Y. (2020). Analisis Pengaruh Produk Domestik Bruto, Tingkat Inflasi, Dan Nilai Tukar Rupiah Atas Us Dollar Terhadap Impor Indonesia Periode 2010.Q1 – 2017.Q4 (Volume: 01, No 01 Juni 2020 (31-43)).
- [16] Sofyan, M. I. (2017). *Teori Perdagangan Internasional (II)*. Retrieved from <https://bbs.binus.ac.id/ibm/2017/06/teori-perdagangan-internasional-ii/>
- [17] Sukirno, S. (1994 : 341). *Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: LPFE UI.
- [18] Todaro, M. (1987). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Terjemahan Mursyid*. Jakarta: Erlangga. Retrieved from Jakara.
- [19] Widiya, H., Siregar, E. P., & Hilmiatussahla. (2019). Pengaruh Pendapatan Nasional, Kurs, Inflasi, Suku Bunga, Terhadap Impor Barang Modal. *Fakultas Ekonomi – Ekonomi Pembangunan*.
- [20] Wilaga, S. (2021). Analisis Kurs, Pdb, Bi Rate, Dan Cadangan Devisa Terhadap Neraca Perdagangan Indonesia Tahun 1990 – 2019. *Skripsi Universitas Muhamadiyah Surakarta*.
- [21] Zatira, D., Sari, T., & Apriani, M. (April 2021). Perdagangan Internasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *JEQu Vol. 11 No. 1*.

---

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP CASHBACK DI SHOPEE**

Oleh

**Febia Nisaul Chamsa**

**Hukum Ekonomi Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta**

E-mail: [FebiaNisaul@gmail.com](mailto:FebiaNisaul@gmail.com)

**Abstract**

Cashback merupakan penawaran bagi customer berupa poin digital atau uang digital yang akan diberikan kepada customer jika telah membeli sebuah barang dari penjual dengan kesepakatan bersama. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan pendekatan fiqh. Penelitian tersebut bertujuan untuk menghindari suatu transaksi yang bertentangan dengan hukum Islam. Cashback merupakan tipuan marketing dengan tujuan menarik pelanggan, cashback termasuk dalam khiyar ghabn. Fungsi khiyar dalam hukum Islam ialah jika seseorang melakukan jual beli dapat memikirkan dampak yang ditimbulkan kedepannya supaya tidak ada penyesalan dikemudian hari. Khiyar ghabn diperbolehkan oleh ulama Hanafiyah jika tipuannya (ghabn) mengandung bujukan (taghrir). Jadi, cashback dibolehkan karena sebuah tipuan untuk membujuk pelanggan di shopee. Dinyatakan dalam al-Ikhtiyarat, Boleh membuat kesepakatan potongan pembayaran cicilan yang dan ini merupakan pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat dan satu keterangan dari Imam as-Syafi'i. Alasan Ibnul Qoyim yang membolehkan hal tersebut, karena kesepakatan ini kebalikan dari riba. Dalam transaksi riba, waktu pelunasannya ditambah dan nilai utang dinaikkan. Ulama yang mengharamkan kesepakatan ini, meng-qiyas-kan kesepakatan ini dengan riba. Padahal sangat jelas perbedaan antara orang mengatakan, "Lunasi sekarang atau ditunda dan ada ribanya." dengan orang mengatakan, "Lunasi segera, nanti saya kasih potongan 100rb." Bagaimana ini bisa disamakan. Sehingga tidak ada dalil yang menunjukkan haramnya, tidak pula ijma', maupun qiyas yang shahih. Cashback dibolehkan karena tidak mengandung riba dan termasuk dalam khiyar ghabn.

**Keywords: Cashback; Hukum Cashback; Pelanggan**

**PENDAHULUAN**

Cashback merupakan penawaran bagi customer berupa poin digital atau uang digital yang akan diberikan kepada customer jika telah membeli sebuah barang dari penjual dengan kesepakatan bersama. Sebelum menggunakan cashback tentu saja ada sedikit keraguan apakah cashback diperbolehkan atau tidak. Permasalahan yang harus diselesaikan bagaimana hukum penggunaan cashback dalam hukum Islam. Penggunaan cashback dalam hukum Islam terdapat dua pendapat, ada yang mengharamkan ada juga yang membolehkan. Pembahasan yang penting untuk diketahui ialah bagaimana akad yang digunakan oleh cashback dan bagaimana hukum cashback. Oleh karena itu, dibutuhkan tinjauan pustaka untuk

mengulas masalah yang berkaitan dengan cashback. Cashback merupakan tipuan marketing dengan tujuan menarik pelanggan, cashback termasuk dalam khiyar ghabn. Al-ghabn berasal dari bahasa Arab dari kata غيب ن secara istilah al-ghabn memiliki makna yang sama dengan an-nasq yaitu pengurangan.

Fungsi khiyar dalam hukum Islam ialah jika seseorang melakukan jual beli dapat memikirkan dampak yang ditimbulkan kedepannya supaya tidak ada penyesalan dikemudian hari. Khiyar ghabn diperbolehkan oleh ulama Hanafiyah jika tipuannya (ghabn) mengandung bujukan (taghrir). Oleh karena itu cashback dibolehkan karena sebuah tipuan untuk membujuk pelanggan di shopee. Dinyatakan dalam al-Ikhtiyarat, Boleh

membuat kesepakatan potongan pembayaran cicilan yang dan ini merupakan pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat dan satu keterangan dari Imam as-Syafi'i. Alasan Ibnul Qoyim yang membolehkan hal tersebut, karena kesepakatan ini kebalikan dari riba.

Dalam transaksi riba, waktu pelunasannya ditambah dan nilai utang dinaikkan.

Mereka yang mengharamkan kesepakatan ini, meng-qiyas-kan kesepakatan ini dengan riba. Padahal sangat jelas perbedaan antara orang mengatakan, "Lunasi sekarang atau ditunda dan ada ribanya." dengan orang mengatakan, "Lunasi segera, nanti saya kasih potongan 100rb." Bagaimana ini bisa disamakan. Sehingga tidak ada dalil yang menunjukkan haramnya, tidak pula ijma', maupun qiyas yang shahih. (I'lamul Muwaqqi'in, 3/359).

## LANDASAN TEORI

### Pengertian Jual Beli Non Tunai

Jual beli sebagai transaksi yang mengharuskan pihak pertama untuk menyerahkan objek transaksi kepada pihak kedua, pihak pembeli juga harus menyerahkan harga transaksi kepada pihak penjual sesuai kesepakatan. Transaksi jual beli ini telah menjadi salah satu akad yang paling banyak digunakan baik sebagai perbuatan hukum untuk bisnis maupun untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Secara literal dalam bahasa Arab jual beli diistilahkan dengan al-ba'i yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-ba' dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy-syira' (beli). Dengan demikian kata al-bai' berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

Sedangkan arti secara terminologi, jual beli ini memiliki berbagai definisi yang telah diformulasikan oleh fuqaha. Berikut ini penulis paparkan beberapa definisi jual beli dalam berbagai mazhab, yaitu: Menurut mazhab Hanafiah, sebagaimana dikemukakan oleh Ali

Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan transaksi tukar menukar harta antara penjual dan pembeli, dalam hal ini pihak penjual menyerahkan objek transaksi yang dibutuhkan oleh pihak pembeli, sedangkan pihak pembeli menyerahkan harga pembelian produk kepada pihak penjual sebagai tanda pelunasan harga yang ditetapkan oleh pihak penjual.

Jual beli sebagai transaksi pemindahan kepemilikan harta dan memiliki hak mutlak untuk tasharruf harta, dapat dilakukan dengan berbagai bentuk baik secara tunai, non tunai maupun cicilan. Dalam kajian ini penulis fokuskan pada transaksi non tunai baik pelunasannya dalam satu tempo waktu maupun dilakukan secara angsuran. Dalam literatur fiqh muamalah, akad jual beli non tunai ini diistilahkan dengan ba'i al-dain, sebagai istilah tersendiri untuk transaksi jual beli non tunai. Meskipun dalam literatur fiqh juga dikenal dengan 'aqd al-qardh sebagai transaksi utang piutang yang didasarkan pada peminjaman harta yang menghabiskan objek dan penggantian dengan objek lainnya secara terstandarisasi nilainya.

### Pengertian Qardh

Secara bahasa qardh diartikan dengan al-qath'u yang berarti potongan, dikatakan dengan qardh karena hal tersebut merupakan potongan dari harta orang yang memberikan pinjaman (muqaridh) 11. Sedangkan qardh menurut bahasa dalam buku fiqh Imam Syafi'i berarti "membagi". Ia kadang menggunakan dalam bentuk kata benda bermakna "sesuatu yang dipinjamkan" dan bentuk masdar dengan makna "peminjaman".<sup>12</sup> Dalam kamus Al-Misbah, qardh merupakan "qaradhtu al-syai'a qardhan" yang berarti saya memotong atau memutuskannya. Kata ini biasanya digunakan pada jenis harta yang diberikan kepada orang lain untuk dikembalikan. Dinamai qardh karena si pemilik memotong hartanya.<sup>13</sup> Kata qardh menurut syara' ialah memberikan harta kepada

seseorang dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan gantinya dengan jumlah yang sama.

#### **Dasar Hukum Jual Beli Non Tunai**

Akad qardh sebagai akad transaksi hutang piutang atau pinjam meminjam yang dikategorikan dalam akad tabarr' (kebajikan) atau akad ta'awun (pertolongan) yang merupakan akad untuk saling tolong-menolong serta saling membantu kepada orang-orang yang membutuhkan. Saling tolong menolong dalam melakukan kebajikan, termasuk utang piutang.

Islam pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan qardh (memberikan hutang) kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipat gandakan oleh Allah. Dari sisi muqridh (orang yang memberikan hutang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi hutang. Dari sisi muqtaridh, hutang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berhutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang dihutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

#### **Konsekuensi Transaksi Jual Beli Non Tunai Terhadap Para Pihak**

Ba'i al-dain adalah seseorang mempunyai hak mengutip utang yang akan dibayar pada masa yang akan datang, dan juga dapat menjual haknya kepada orang lain dengan harga yang disepakati. Jual beli utang dapat terjadi, pada transaksi yang tidak dapat dilunasi oleh pihak pembeli saat transaksi. 58 Jual beli hutang merupakan salah satu bentuk perniagaan yang diperdebatkan statusnya. Sebagian ulama membolehkan jual beli hutang pada pengutang (orang yang berutang). Dengan demikian jual beli hutang dilakukan, baik kepada pengutang atau selain pihak pengutang. Juga dapat dilaksanakan dalam dua hal, baik pembayaran harga secara tunai maupun bertangguh. Ada beberapa pendapat ulama tentang status hukum jual beli tersebut. Apabila transaksi pinjam-

meminjam telah sah, konsekuensi hukumnya harus dijalankan, yaitu pindahnya kepemilikan harta yang dipinjam dari pemberi pinjaman kepada peminjam. Dengan ketentuan, peminjam harus mengganti harta tersebut ketika orang yang meminjamnya menagihnya. Sementara itu, para ahli fikih berbeda pendapat mengenai waktu penetapan kepemilikan, apakah kepemilikan sudah terjadi semenjak peminjam menerima barang atau ketika menggunakannya.

Berdasarkan ketentuan ini, jika transaksi sudah selesai dan peminjam sudah menerima barang yang dipinjamnya, pemberi pinjaman tidak berhak memintanya kembali, kecuali atas kerelaan peminjam. Namun ia berhak meminta pengganti (atas barang yang dipinjamnya) karena itu merupakan kewajiban dalam transaksi al-qardh. Pendapat ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Muhammad dan pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Sementara itu, pendapat yang paling kuat dikalangan ulama Syafi'iah adalah pemberi pinjaman berhak meminta kembali barang yang dipinjamkan selama keadaan barang itu masih tetap utuh seperti semula yang tidak berkaitan dengan hak-hak orang lain. Pendapat ini tidak bertentangan dengan pendapat mereka mengenai hak kepemilikan peminjam saat ia menerima barang yang dipinjam sebab pemberi pinjaman berhak meminta pengganti barang yang ia pinjamkan ketika barang itu sudah tidak ada (di tangannya). Meminta kembali pengganti dalam bentuk yang asli lebih utama karena lebih dekat pada yang asli. Sementara itu peminjam harus mengembalikan pinjamannya jika pemberi pinjaman menagihnya. Perbandingannya seperti dua orang melakukan transaksi barang dengan barang, kemudian masing-masing menemukan kecacatan dalam barang yang ia terima, berarti keduanya berhak mengambil kembali barang miliknya masing-masing sekalipun sudah menjadi milik orang lain.

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif (Qualitative Research) jenis penelitian lapangan yang berkaitan dengan hukum Islam yang besumber dari Al-Quran, Hadis, dan pendapat jumbuh ulama terhadap cashback dari marketplace shopee. Penelitian qualitative yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam materi yang terdapat di penelitian kualitatif (Soekanto dan Mamudji: 2001).

Penelitian kualitatif merupakan penelitian memiliki tujuan pengumpulan data atau informasi dari qualitative (Arikunto, 2014:13). Jadi, masalah tersebut akan mengkaji tentang literatur yang berhubungan dengan kajian hukum Islam tentang cashback dalam hukum Islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Cashback merupakan penawaran bagi costumer berupa poin digital atau uang digital yang akan diberikan kepada costumer jika telah membeli sebuah barang dari penjual dengan kesepakatan bersama. Salah satu marketplace di Indonesia yaitu shopee, seller1 di shopee memberikan penawaran cashback kepada costumer jika telah memberi barang, cashback akan diberikan dalam bentuk poin, sehingga poin tersebut bisa digunakan belanja.

Cashback di shopee bertujuan untuk menarik pelanggan atau disebut sebagai trik marketing/tipuan marketing. Selain sebagai trik marketing, cashback bisa diartikan sebagai bentuk hadiah kepada costumer karena telah membeli barang dagangan penjual. Shopee menggunakan trik ini bertujuan untuk membujuk pelanggan, jika Shopee tidak menawarkan cashback bisa saja pelanggan tidak akan tertarik untuk berbelanja di shopee sehingga seller di shopee bisa saja rugi disebabkan barang/jasa yang ditawarkan tidak laku terjual. Pengaruh cashback terhadap shopee begitu erat sehingga costumer di shopee semakin tertarik untuk berbelanja.

Untuk memperoleh cashback, pelanggan di Shopee harus membeli sebuah barang atau jasa yang ditawarkan seller kepada pelanggan. Penawaran ini hanya berlaku bagi toko yang menawarkan cashback contohnya jika sedang berada di mall, di mall tersebut terdapat banyak toko, misalnya toko A menawarkan cashback jika pelanggan membeli produknya, tetapi toko B tidak menawarkan cashback. Jadi, sama seperti di shopee tidak semua seller menawarkan cashback tetapi hanya toko tertentu. Pelanggan harus melihat penawaran seller apakah seller tersebut menawarkan cashback jika menawarkan cashback maka pelanggan harus memasukkan voucher cashback yang ditawarkan. Jika pelanggan memasukkan voucher cashback maka terjadilah akad jual beli. Sebelum transaksi dimulai terjadilah akad antara seller dengan costumer. Jika membeli barang maka ada cashback untuk costumer.

Adapun syarat-syarat umum transaksi yaitu transaksi harus terhindar dari ketidakjelasan, penggunaan cashback di Shopee termasuk transaksi yang jelas karena ada kesepakatan antara seller dengan costumer sebelum melakukan transaksi atau pembayaran suatu barang. Jual beli harus terhindar dari pemaksaan, penggunaan cashback tidak ada unsur pemaksaan didalamnya karena cashback tersebut tidak akan terpakai jika costumer tidak memasukkan voucher cashback sebelum transaksi selesai (Hidayat, 2015:25). Cashback juga tidak memiliki batasan waktu contohnya “saya memberikan cashback untukmu berlaku setahun” jika memiliki batasan maka cashback tersebut tidak sah karena jual beli tidak mensyaratkan pembatasan waktu (Zainuddin dan Cahya, 2019:4).

Cashback diperoleh dengan beberapa syarat antara lain pelanggan harus mengaktifkan dompet digital ovo (ovo adalah salah satu dompet digital yang bekerjasama dengan shopee untuk melakukan transaksi) karena cashback akan masuk melalui ovo poin, jika pelanggan tidak mengaktifkan ovo maka

cashback tidak bisa didapatkan karena shopee bekerjasama dengan dompet digital ovo, shopee fungsinya hanya sebagai marketplace sedangkan ovo berfungsi sebagai dompet digital, jadi shopee tidak bisa dipakai untuk transaksi tetapi shopee hanya penyedia barang atau jasa. Contohnya mall adalah penyedia barang, jadi pelanggan yang berbelanja di mall maka bebas melakukan transaksi menggunakan ATM, ovo, atau cash, begitu pula dengan shopee. Jadi persyaratan cashback yang harus menggunakan ovo maka boleh saja karena shopee menggunakan ovo sebagai dompet digital.

Cashback adalah hadiah atau bonus untuk pelanggan. Rasulullah ketika berdagang, beliau ketika berdagang pasti akan memberikan tambahan kepada pembeli setelah membeli barang jadi cashback juga merupakan bonus tambahan atau hadiah bagi pelanggan. Hibah mencakup hadiah. Dalam definisi syara', hibah adalah akad pemberian kepemilikan kepada orang lain tanpa adanya ganti yang dilakukan secara suka rela.

#### **Analisis Hukum Islam terhadap Cashback di Shopee**

Transaksi yang sah adalah transaksi yang didalamnya terdapat akad, akad jual beli dapat dibagi empat macam yaitu, barter (bay'ul 'ain bil 'ain) menukar barang dengan barang, akad jual beli ('ain bid dain) menjual barang tertentu dengan benda tidak tertentu misalnya menjual barang menggunakan dirham atau dinar atau menjual menggunakan uang, akad sharf (bay'ud dain bin dain) menjual benda tidak tertentu dengan menjual benda tidak tertentu lainnya, akad salam (Wahbah, 2011: 238). Akad penggunaan cashback yaitu akad salam, karena cashback yang dimaksud jika memesan barang di shopee maka akan mendapatkan cashback, shopee adalah salah satu marketplace untuk memesan suatu barang jadi akad yang digunakan untuk berbelanja online adalah akad salam.

Teknologi yang semakin pesat karena perkembangan teknologi yang begitu cepat

sehingga hampir semua kebutuhan bisa dibeli secara online. Hampir semua masyarakat di Indonesia menggunakan media online khususnya berbelanja online. Karena belanja online semakin pesat banyak perusahaan yang menawarkan berbagai macam diskon hingga cashback sehingga masyarakat semakin tergiur untuk berbelanja online. Masyarakat mengetahui adanya cashback melalui promosi yang tersebar di media online seperti instagram, whatsapp dan Facebook. Aplikasi online seperti e-commerce sangat mudah diakses dan di pahami oleh masyarakat oleh karena itu perusahaan startup digital semakin banyak membuat promosi untuk menarik pelanggan. Salah satu fitur yang digunakan shopee salah satunya penggunaan dompet digital ovo. Shopee bekerja sama dengan ovo untuk melakukan transaksi digital sehingga ovo dan shopee menyediakan cashback bagi pengguna shopee cashback merupakan salah satu kebutuhan pelanggan untuk menghemat pengeluaran jadi hal tersebut menjadi alasan masyarakat untuk menggunakan shopee karena ada cashback yang ditawarkan.

Ada tiga syarat yang diusulkan oleh para Fuqaha dalam melakukan ijab qobul dalam transaksi jual beli yaitu jala'ul ma'na. Jala'ul ma'na merupakan salah satu tujuan yang yang jelas dari pernyataan sehingga jenis akad yang digunakan dapat dipahami. Shopee salah satu situs belanja online yang terkenal di Indonesia, shopee mempermudah transaksi masyarakat karena tidak perlu menggunakan ATM untuk transaksi. Jika menggunakan shopee maka customer bisa mendapatkan cashback.

Penetapan harga diberikan secara langsung kepada pelanggan shopee dengan harga yang terjangkau dibandingkan membeli secara langsung di mall. Penjual di shopee akan mengirimkan barang pesanan kepada pelanggan. Di shopee menyediakan berbagai macam barang dengan harga terjangkau atau murah sehingga banyak masyarakat yang ingin menjadi mitra selain Pelanggan biasa, mitra juga diberikan cashback dari shopee jika ovo

yang dimiliki mitra tersebut diaktifkan. Penawaran yang seperti inilah yang membuat pelanggan atau mitra shopee semakin tertarik menggunakan shopee. Meskipun ada dua pendapat yang bertentangan bahwa cashback merupakan transaksi yang riba (Adiwarman, 2016: 34).

Dinyatakan dalam al-Ikhtiyarat, Boleh membuat kesepakatan potongan pembayaran cicilan yang dan ini merupakan pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat dan satu keterangan dari Imam as-Syafi'i. (al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyah, 1/478). Alasan Ibnul Qoyim yang membolehkan hal ini, karena kesepakatan ini kebalikan dari riba. Dalam transaksi riba, waktu pelunasannya ditambah dan nilai utang dinaikkan (Romdhon, 2015: 67).

Ibnul Qoyim mengomentari ta'wil yang disampaikan jumhur, Karena kesepakatan ini kebalikan dari riba. Dalam transaksi riba, ada tambahan pembayaran sebagai ganti dari penundaan. Sementara kesepakatan ini bentuknya mengurangi beban pembayaran, sebagai ganti dari pengurangan waktu pelunasan.

Sehingga masing-masing mendapat manfaat, dan di sana tidak ada riba, baik secara hakiki, bahasa, maupun urf. Karena riba itu tambahan, dan di sini itu tidak ada.

Beliau juga membantah pendapat jumhur yang melarang, dengan alasan itu mirip riba. Mereka yang mengharamkan kesepakatan ini, meng-qiyas-kan kesepakatan ini dengan riba. Padahal sangat jelas perbedaan antara orang mengatakan, "Lunasi sekarang atau ditunda dan ada ribanya." dengan orang mengatakan, "Lunasi segera, nanti saya kasih potongan 100rb." Bagaimana ini bisa disamakan. Sehingga tidak ada dalil yang menunjukkan haramnya, tidak pula ijma', maupun qiyas yang shahih. (I'lamul Muwaqqi'in, 3/359).

Sementara riwayat yang menjadi acuan dari Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ketika memerintahkan untuk mengusir Bani Nadhir, datang beberapa orang diantara mereka

dan mengatakan, 'Wahai Nabi Allah, engkau memerintahkan untuk mengusir kami, sementara kami masih punya urusan utang piutang yang belum lunas.'

Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memberi saran,

Berikan potongan dan segerakan pembayarannya. (HR. Daruquthni dan Baihaqi dalam al-Kubro dan dalam sanadnya ada yang dhaif. Ibnul Qoyim mengatakan, hadis ini sesuai syarat kitab sunan, sanadnya tsiqah)

Juga disebutkan dalam riwayat lain dari Ka'ab radhiyallahu 'anhu, bahwa beliau menagih utang dari Ibnu Abi Hadrad di masjid, sampai teriak-teriak, hingga terdengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Kemudian beliau keluar rumah memanggil Ka'ab,

"Wahai Ka'ab, berikan potongan untuk utangnya," beliau berisyarat setengah.

Ka'ab berkata, 'Aku lakukan Ya Rasulullah.' Beliau perintahkan kepada orang ini, "Lunasi utangnya." (Muttafaq 'alaih) (Susilo, 2017: 50).

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam meminta kawannya Ka'ab untuk segera melunasi utangnya dan sebagai gantinya, diberi potongan setengahnya.

Ketiga, ketentuan ini dibolehkan khusus untuk akad mukatabah, sementara untuk akad yang lain tidak dibolehkan. Ini merupakan pendapat Imam Syafii dan Imam Abu Hanifah dalam salah satu riwayat.

Akad mukatabah adalah menjanjikan budak untuk merdeka jika bisa membayar sekian dinar selama rentang waktu sekian. Dianjurkan jika bisa melunasi lebih cepat untuk diberi potongan. Karena berarti menyegerakan pembebasan budak yang itu dianjurkan. (I'lamul Muwaqqi'in, 3/359) (Baits, 2021).

Tetapi ada juga pendapat lain bahwa cashback merupakan transaksi jual beli yang akadnya jelas, selain akadnya yang jelas cashback juga merupakan transaksi yang boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarang. Cashback yang ditawarkan dalam bentuk poin



sehingga tidak dapat digunakan secara tunai atau cashback tersebut dijadikan uang tunai. Cashback mirip dengan voucher belanja tetapi bedanya cashback adalah uang yang dikembalikan. Cashback diberikan kepada pelanggan setelah barang diterima atau sampai dengan jumlah sebesar promo yang telah disepakati Voucher Cashback, selama paket promo cashback tersebut masih berlangsung.

Cashback tersebut ada yang senilai 20%, bahkan ada yang 50% dari harga ia belanja. Aturannya telah ditetapkan atau penjelasannya ada di FAQ shopee disampaikan secara terbuka. Cashback yang berlaku atas pihak shopee tersebut bukan hasil dari utang. Kedudukan pelanggan dalam marketplace sama saja dengan pelanggan di pasar perbedaannya hanya masalah tempat saja. Jika pelanggan mendapatkan cashback, penjual tidak akan rugi karena sebelum Memberikan cashback penjual telah merinci atau memperkirakan berapa keuntungan dan kerugian. Sebenarnya pemberian cashback tidak termasuk rugi, alasannya belanja online sudah bisa diakses melalui aplikasi khususnya melalui aplikasi shopee sehingga masyarakat tidak perlu keluar dari rumah untuk belanja karena sepanjang 2020 telah terjadi pandemi covid-19 sehingga masyarakat dihimbau untuk tetap di rumah, dari tahun ke tahun belanja online semakin meningkat terutama pada marketplace Shopee yang semakin di gandrungi oleh masyarakat karena menawarkan cashback kepada pelanggan bahkan cashbacknya bisa dikumpulkan lalu bisa dipakai berbelanja. Jual beli online sama seperti jual beli secara langsung yaitu ada akad sebelum membeli barang. Sebelum pelanggan membeli barang maka ada kesepakatan yang telah disetujui oleh penjual dan pembeli. Untuk bisa melakukan jual beli maka pelanggan harus terlebih dahulu menggunakan shopee dan harus mengaktifkan dompet digital ovo karena shopee hanya menggunakan dompet digital ovo.

Dalam dunia perdagangan, penjual pasti ingin mendapatkan keuntungan yang besar

dengan cara memberikan cashback. Konsep cashback tidak berbeda jauh dari diskon. Diskon diberikan untuk pelanggan di awal sedangkan cashback diberikan kepada pelanggan diakhir transaksi jual beli.

Perlu dipahami bahwa cashback di shopee tidak berbentuk tunai melainkan berbentuk e-wallet. Jadi cashback yang diperoleh masuk kedalam dompet digital (e-wallet) sehingga pelanggan yang mendapatkan cashback bisa menggunakan cashback yang diperoleh. Shopee menggunakan e-wallet ovo yang bisa dipakai bertansaksi secara digital. Kelebihan cashback ialah mampu memberikan uang kembalian kepada pelanggan karena hal tersebut adalah bonus bagi pelanggan. Alasan penjual memberikan cashback karena penjual ingin pelanggan tersebut repeat order atau pembelian ulang.

Cashback merupakan tipuan marketing dengan tujuan menarik pelanggan, cashback termasuk dalam khiyaar ghabn. Al-ghabn berasal dari bahasa arab dari kata غبن secara istilah al-ghabn memiliki makna yang sama dengan an-nasq yaitu pengurangan. Fungsi khiyar dalam hukum islam ialah jika seseorang melakukan jual beli dapat memikirkan dampak yang ditimbulkan kedepannya supaya tidak ada penyesalan dikemudian hari. Contohnya penjual yang memberikan cashback kepada pelanggan telah memikirkan dampak apa yang didapatkan kemudian hari jika memberikan cashback kepada pelanggan (Muhammad, 2015:62).

Khiyaar ghabn diperbolehkan oleh ulama hanafiyah jika tipuannya (ghabn) mengandung bujukan (taghrir). Oleh karena itu cashback dibolehkan karena sebuah tipuan untuk membujuk pelanggan di shopee. Tetapi perlu dipahami tipuan marketing dari shopee tidak terlalu banyak jumlahnya misalnya toko A memberikan cashback hanya 20.000 dari harga barang 150.000 jadi toko Ahanya meraih keuntungan 130.000. Jika cashbacknya terlalu besar bisa saja pemilik toko akan rugi jadi untuk mencegah kemudharatan maka seller di shopee

hanya memberikan cashback yang jumlahnya kecil karena cashback tujuannya untuk menarik pelanggan. Cashback yang ditawarkan oleh shopee tidak berlaku bagi pelanggan yang tidak terbujuk, jika pelanggan tidak terbujuk tentu saja pelanggan tidak akan memakai cashback dari seller di shopee, jadi hak khiyar ghabn akan gugur karena sifat yang disyaratkan telah hilang.

Cashback dibolehkan atau hukumnya halal karena cashback merupakan hadiah bagi pelanggan ada unsur kerelaan didalamnya. Seller di shopee membuat cashback karena rela dan tujuannya untuk membujuk pelanggan. Disini ada sifat kerelaan dari penjual ke pelanggan, begitu pula dengan pelanggan ada rasa bahagia karena mendapatkan hadiah dari seller. Cashback yang berlaku di marketplace sama saja dengan transaksi langsung di pasar, misalnya si A membeli baju di toko, disaat si A datang ke toko tersebut kebetulan toko tersebut memberikan cashback 10.000 dari harga 100.000 jadi setelah si A selesai transaksi maka si A berhak mendapatkan cashback 10.000 dan cashback tersebut bukan riba melainkan sebuah hadiah karena penjual dan pelanggan sama-sama rela menerima tidak ada unsur paksaan.

Imam Ahmad berpendapat dalam satu riwayat Ibnul Qoyim, dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnul Qoyim menyebutkan bahwa ini adalah pendapat Ibnu Abbas dan Zufar dari Hanafiyah. Dinyatakan dalam al-Ikhtiyarat,

Boleh membuat kesepakatan potongan pembayaran cicilan yang dan ini merupakan pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat dan satu keterangan dari Imam as-Syafi'i. (al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyah, 1/478)

Ibnul Qoyim membolehkan potongan pembayaran karena bukan termasuk riba atau bertolah belakang dari riba. Riba menggunakan sistem waktu pelunasan bertambah dan nilai utang dinaikkan. Sementara kesepakatan cashback mengurangi pembayaran pelanggan setelah transaksi. Cashback akan diberikan dari shopee setelah barang sudah sampai ke alamat penerima dan cashback akan masuk ke dompet

digital. Seller yang memberikan cashback harus menyelesaikan dengan segera karena aturan cashback dalam fikih harus segera dilunasi jika tidak maka akan menimbulkan utang. Pemilik cashback kapan saja bisa memakai cashback yang diberikan tanpa campur tangan dari seller karena cashback tersebut sudah milik pelanggan. Cashback dari shopee akan masuk dalam 1x24 jam ke ovo point atau toko poin. Marketplace shopee menyediakan fitur cashback dengan beberapa alasan yaitu meningkatkan penjualan bagi seller, meningkatkan jumlah pengguna, meningkatkan rating aplikasi di app store atau di playstore (Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 85/DSN-MUI/XII/2012).

- a. Cashback merupakan bentuk janji untuk pelanggan karena cashback diberikan diakhir jika transaksi sudah selesai. Berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang janji (wa'ad) dalam transaksi keuangan dalam bisnis syariah bahwa: Janji (wa'ad) dari seseorang atau penjual kepada pihak yang lain (pembeli) dimasa yang akan datang,
- b. Wa'id adalah orang yang memberikan janji,
- c. Mau'ud adalah orang yang dijanji
- d. Mau'ud bih adalah sesuatu yang dijanjikan
- e. Mulzim adalah mengikat, yaitu wa'id wajib menunaikan janjinya kepada mau'ud.

Cashback bukan termasuk dalam kategori riba, sesuatu yang berbentuk riba pasti akan mengalami pengurangan atau kelebihan atau akadnya yang berubah. Misalnya penjual memberikan cashback 10.000 dari harga barang maka pelanggan harus mendapatkan 10.000 jika pelanggan mendapatkan kurang dari 10.000 atau lebih dari 10.000 maka bisa saja mengandung riba tetapi di shopee tidak pernah melebihi cashback atau mengurangi cashback yang akan diberikan kepada

pelanggan. Jika cashback termasuk riba pasti aka nada teguran dari ulama untuk tidak memakai cashback. Cashback termasuk khiyar ghabn, penjual bisa menipu pelanggan untuk alasan tertentu tanpa mengundang kemudharatan.

Berdasarkan pasal 33 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ayat 3 a dan b bahwa tidak pernah ada pemberitahuan sebelumnya bahwa cash back adalah bunga. Cash back yang diterimanya tidak selamanya berbentuk uang, ada yang berbentuk voucher belanja, handphone, kue/roti, atau souvenir lainnya. Undang-Undang tersebut telah menjelaskan bahwa cashback bukan bunga, seperti yang diketahui bunga ialah bentuk tambahan atau pengurangan dari uang atau poin (Pasal 1337 KUHPerdara).

Berbelanja online tentu saja ada kesepakatan antara penjual dan pembeli, kesepakatan atau perjanjian tersebut telah diatur didalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur syarat sah perjanjian yaitu sepakat dengan tercapainya kesepakatan antara penjual dan pembeli maka ada hak dan kewajiban atas perjanjian yang telah disepakati dan telah diatur didalam Pasal 1321 KUHPerdara bahwa kesepakatan yang tidak sah apabila terjadi kekhilafan atau adanya paksaan. Penggunaan cashback sama sekali tidak ada unsur paksaan didalamnya karena sebelum menggunakan cashback pelanggan harus memasukkan sendiri voucher cashback atau cashback tersebut tidak otomatis terpakai tetapi harus ada pilihan dari pelanggan, shopee hanya menyediakan cashback sementara pengguna dapat memasukkan cashback tersebut sebelum melakukan pembayaran. Sementara itu konsumen merupakan pihak yang berkepentingan dalam kepemilikan barang. Untuk memiliki barang, maka ia harus belanja. Aktivitas yang disebut belanja secara online adalah ketika harga sudah diserahkan, maka pihak penjual secara tidak langsung memiliki tanggungan berupa segera

mengirimkan barang ke alamat pembeli (konsumen).

Untuk mengetahui sebab halalnya maka hal tersebut telah diatur dalam pasal 1337 KUHPerdara bahwa suatu sebab dilarang jika hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang atau sebab itu bertentangan dengan kesusilaan. Cashback telah dijelaskan di dalam pasal 33 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ayat 3 a dan b, jadi penggunaan cashback adalah halal karena tidak mengandung unsur bunga.

Adapun syarat penggunaan cashback di shopee antara lain sebagai berikut

- a. Kupon cashback shopee diberikan secara gratis,
- b. Kupon dapat digunakan untuk membeli produk di shopee,
- c. Penggunaan kupon cashback akan batal jika belum membayar penuh atau melakukan checkout belanja,
- d. Cashback akan diterima oleh pelanggan 1x24 jam setelah transaksi diselesaikan atau pelanggan telah mengkonfirmasi barang yang sudah sampai.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Shopee merupakan marketplace di Indonesia yang menyediakan fitur cashback. Cashback termasuk khiyar ghabn karena cashback merupakan bentuk tipuan untuk membujuk pelanggan, Khiyaar ghabn diperbolehkan oleh ulama hanafiyah jika tipuannya (ghabn) mengandung bujukan (taghrir). Oleh karena itu cashback diperbolehkan karena sebuah tipuan untuk membujuk pelanggan di shopee cashback di shopee menggunakan akad salam karena cashback yang diperoleh dari hasil belanja online, akad yang digunakan belanja online ialah akad salam.

Hukum menggunakan cashback bukan termasuk riba karena tidak ada pengurangan atau penambahan. Untuk mendapatkan

cashback di shopee, pelanggan wajib menggunakan e-wallet ovo karena shopee hanya layanan untuk belanja sedangkan untuk transaksi bisa melalui ovo.

Dinyatakan dalam al-Ikhtiyarat, Boleh membuat kesepakatan potongan pembayaran cicilan yang dan ini merupakan pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat dan satu keterangan dari Imam as-Syafi'i. Alasan Ibnul Qoyim yang membolehkan hal tersebut, karena kesepakatan ini kebalikan dari riba. Dalam transaksi riba, waktu pelunasannya ditambah dan nilai utang dinaikkan. Ulama yang mengharamkan kesepakatan ini, meng-qiyas-kan kesepakatan ini dengan riba. Padahal sangat jelas perbedaan antara orang mengatakan, "Lunasi sekarang atau ditunda dan ada ribanya." dengan orang mengatakan, "Lunasi segera, nanti saya kasih potongan 100rb." Bagaimana ini bisa disamakan. Sehingga tidak ada dalil yang menunjukkan haramnya, tidak pula ijma', maupun qiyas yang shahih. Dinyatakan dalam al-Ikhtiyarat, Boleh membuat kesepakatan potongan pembayaran cicilan yang dan ini merupakan pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat dan satu keterangan dari Imam as-Syafi'i. Alasan Ibnul Qoyim yang membolehkan hal tersebut, karena kesepakatan ini kebalikan dari riba. Dalam transaksi riba, waktu pelunasannya ditambah dan nilai utang dinaikkan.

Ulama yang mengharamkan kesepakatan ini, meng-qiyas-kan kesepakatan ini dengan riba. Padahal sangat jelas perbedaan antara orang mengatakan, "Lunasi sekarang atau ditunda dan ada ribanya." dengan orang mengatakan, "Lunasi segera, nanti saya kasih potongan 100rb." Bagaimana ini bisa disamakan. Sehingga tidak ada dalil yang menunjukkan haramnya, tidak pula ijma', maupun qiyas yang shahih. (I'lamul Muwaqqi'in, 3/359).

Cashback yang diperoleh akan masuk kedalam dompet digital ovo. Untuk mengetahui sebab halalnya maka hal tersebut telah diatur dalam pasal 1337 KUHPerdara bahwa suatu

sebab dilarang jika hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang atau sebab itu bertentangan dengan kesusilaan.

Cashback telah dijelaskan di dalam pasal 33 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ayat 3 a dan b, jadi penggunaan cashback adalah halal karena tidak mengandung unsur bunga. Berbelanja online tentu saja ada kesepakatan antara penjual dan pembeli, kesepakatan atau perjanjian tersebut telah diatur didalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur syarat sah perjanjian yaitu sepakat dengan tercapainya kesepakatan antara penjual dan pembeli maka ada hak dan kewajiban atas perjanjian yang telah disepakati dan telah diatur didalam Pasal 1321 KUHPerdara bahwa kesepakatan yang tidak sah apabila terjadi kekhilafan atau adanya paksaan. Penggunaan cashback sama sekali tidak ada unsur paksaan didalamnya karena sebelum menggunakan cashback pelanggan harus memasukkan sendiri voucher cashback atau cashback tersebut tidak otomatis terpakai tetapi harus ada pilihan dari pelanggan, shopee hanya menyediakan cashback sementara pengguna dapat memasukkan cashback tersebut sebelum melakukan pembayaran

#### Saran

Saran-saran untuk untuk penelitian lebih lanjut untuk menutup kekurangan penelitian. Tidak memuat saran-saran diluar untuk penelitian lanjut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ad-Dimasyqi, M. I. A. R. Fiqih Empat Mazhab, terj. Alkaf, A. Z. (2015) Bandung: Hasyimi
- [2] Al-Quran Terjemahan. (2015). Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus Sunnah
- [3] Ammi Nur Baits, Hukum Cashback dalam Transaksi, <https://konsultasisyariah.com/29485-hukum-cashback-dalam-transaksi.html>. Diakses pada tanggal 2 Juni 2021

- [4] Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. Arsyad, Azhar. 2013. *Media Pembelajaran*.
- [5] Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 85 Tahun 2012 tentang Janji (Wa'd) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah
- [6] Hidayat, E., (2015). *Fiqh Jual Beli*. Bandung: Rosda.
- [7] Hilal, S. (2013). Qawâ 'Id Fiqhiyyah Furû 'Iyyah Sebagai Sumber Hukum Islam. *Al-'Adalah*, 11(2), 141-154.
- [8] Karim, A. A., & Sahroni, O. (2015). *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [9] Kotler, P. & Kevin, K. L. (2007). *Manajemen Pemasaran*. Indonesia: Indeks. Ed. 12, Jilid 1.
- [10] Mubarok, J. (2017). *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'alah*. Simbiosis Rekatama Media.
- [11] Mufarrih, F., Muthoifin, M. A., & Rosyadi, I. (2018). *Pemikiran Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin Tentang Pendidikan Islam (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta)*.
- [12] Romdhon, M. R. (2015). *Jual Beli Online menurut Madzhab Asy-Syafi'i*. Pustaka Cipasung.
- [13] Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1, Cet. V, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- [14] Susilo, H., Rosyadi, I., & Muthoifin, M. A. (2017). *Shifatush Shalat Al-Filiyah Baina Ikhtiyarat Al-Fiqhiyah Li Asy-Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin Wa Baina Qoul Al-Mutamad Fil Madzhab Asy-Syafii*. (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- [15] Swastha, B. (1999). *Irawan. Manajemen Pemasaran Modern*, Edisi 2. Liberty, Yogyakarta.
- [16] Wahbah, Z., & Islam, F. (2011). *terjemahan Abdul Hayyie al-Khattani. Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jakarta, Gema Insani.
- [17] Zainuddin S. dan Cahya, N. Pengaruh Promo Penjualan dan Cashback terhadap Minat Beli Kendaraan, 2(2), 1-19.

HALAMAN INI SENGAJA  
DIKOSONGKAKN

---

**FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KELUHAN *HEAT STRAIN* PADA  
PEKERJA PABRIK TAHU DI KECAMATAN JELUTUNG**

Oleh

Diandri Saputra<sup>1)</sup>, Subakir<sup>2)</sup>, Abul Ainin Hapis<sup>3)</sup>Program Studi Kesehatan Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Harapan Ibu  
Jambi, IndonesiaEmail: [1\)diandrisaputra1998@gmail.com](mailto:diandrisaputra1998@gmail.com)**Abstract**

*Extreme environmental temperature is one of the physical factors in the work environment that has the potential to cause health problems for workers. Heat strain is a physiological response resulting from heat stress. The average temperature in the Tofu Factory production area in Jambi City is 29.6°C, while the comfortable temperature for Indonesians is around 24-28°C. The purpose of the study was to determine the factors associated with complaints of heat strain in tofu factory workers in Jambi City. The research design was cross sectional. The research sample is tofu factory workers in Jambi City as many as 30 workers. The sampling technique is total sampling. This research was conducted in August 2021. The research instrument was a questionnaire and a heat stress measurement tool. The data were analyzed using the Spearman test. As many as 66.7% of respondents experienced severe heat strain complaints, the average heat stress of the respondent's work environment was 29.6°C, 56.7% of respondents consumed less drinking water, 10.0% of respondents had an obese BMI and 6.7% of respondents had fat BMI. The results of the bivariate analysis showed that there was a relationship between heat stress ( $p=0.000$ ), drinking water consumption ( $p=0.000$ ) and complaints of heat strain from tofu factory workers. There was no relationship between BMI ( $p=0.457$ ) with complaints of heat strain of tofu factory workers. It is expected that workers consume drinking water > 11 glasses and use clothes that can reflect heat such as wearing thin clothes, wearing loose-fitting shirts and easily absorbing sweat.*

**Keywords: Heat Strain, Heat Pressure, Drinking Water Consumption, BMI****PENDAHULUAN**

*Heat strain* merupakan reaksi fisiologis tubuh terhadap paparan panas baik internal maupun eksternal (NIOSH, 2017). Reaksi tubuh terhadap paparan panas bervariasi mulai dari meningkatnya denyut nadi, meningkatnya pengeluaran keringat, meningkatnya suhu tubuh, dan vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah palifer dibawah kulit (Tarwaka, 2016). Jika *heat strain* tidak segera dilakukan pengendalian maka akan menyebabkan penyakit akibat iklim kerja panas seperti kejang (*heat cramps*), penat panas (*heat exhaustion*), *heat stroke* dan miliaria (Suma'mur & Soedirman, 2014).

Kejadian *heat strain* di Indonesia dapat dilihat dari beberapa penelitian terkait yang

telah dilakukan. Penelitian (Artha, 2016) menunjukkan bahwa sebesar 92,0% pekerja mengalami *heat strain*. Hasil penelitian (Amir, Hardi, & Sididi, 2021) menunjukkan bahwa sebesar 67,5% pekerja mengalami *heat strain*. Penelitian (Tumbol, 2018) juga menunjukkan bahwa pekerja yang mengalami *heat strain* sebesar 80,0%. Keluhan yang dirasakan pekerja diantaranya yaitu keringat di seluruh tubuh, sangat haus, lelah, dan nyeri otot.

Kejadian *heat strain* yang dialami oleh pekerja dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor lingkungan yaitu iklim kerja, faktor pekerjaan yaitu beban kerja dan faktor individu yaitu usia, jenis kelamin, masa kerja, status gizi dan aklimatisasi (Suma'mur & Soedirman, 2014). Sedangkan menurut (NIOSH, 2017)

menyatakan bahwa selain tekanan panas, *heat strain* juga disebabkan oleh faktor umur, Indeks Massa Tubuh (IMT), dan status hidrasi.

Selain tekanan panas, konsumsi air minum merupakan salah satu faktor yang menyebabkan *heat strain* pekerja. Pekerja yang bekerja pada lingkungan kerja panas maka suhu tubuhnya akan mengalami peningkatan sehingga akan mengeluarkan keringat. Jika pekerja tidak mengkonsumsi air dengan jumlah yang cukup maka akan terjadi *heat strain* (Tarwaka, 2015). Menurut (Kemenkes RI, 2014), pekerja dalam lingkungan panas sekurang-kurangnya harus mengkonsumsi air sebanyak 2,8 liter atau sekitar 11 gelas ukuran 250 ml. (Sari, 2017) menyatakan bahwa efek dari dehidrasi yang dimiliki pekerja dapat menurunkan kemampuan kognitif seperti penurunan konsentrasi dan daya ingat sesaat, mempengaruhi suasana hati dan semangat kerja, serta menurunkan kapasitas kerja fisik akibat kelelahan, lemas, atau pusing.

Pada pekerja dilingkungan panas, tenaga kerja berisiko untuk kehilangan cairan tubuh berlebih. Jumlah keringat yang keluar berbanding lurus dengan peningkatansuhu inti tubuh. Saat seseorang mengalami kekurangan cairan akibat iklim kerja panas dapat menyebabkan terjadinya *heat strain* (Hunt, 2011).

Obesitas merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya *heat strain*. Tenaga kerja yang obesitas dengan lemak yang tebal, rasio antara luas permukaan tubuh dengan berat badan relatif rendah dan hal tersebut menyebabkan halangan dalam pengaturan suhu tubuh sehingga risiko *heat strain* akan terjadi pada tenaga kerja yang bekerja di lingkungan yang panas (Nawawinetu, 2010).

Kecamatan Jelutung merupakan salah satu kecamatan produsen tahu. Proses kerja pabrik tahu di Kecamatan Jelutung terdiri dari 6 tahapan yaitu persiapan, penggilingan, pemasakan, penyaringan, pengendapan dan pencetakan. Pada proses persiapan ini kedelai direndam selama 3 jam untuk mempermudah

proses penggilingan. Proses penggilingan dilakukan dengan menggunakan mesin penggiling biji kedelai dengan tenaga penggerak dari motor listrik. Proses pemasakan dilakukan dengan menggunakan sumber panas dari kayu bakar yang diatasnya diletakkan tungku/wadah bubur kedelai. Panas yang dihasilkan pada pemasakan ini berdampak pada suhu lingkungan disekitar pekerja. Hal tersebut menyebabkan pekerja berisiko mengalami *heat strain*.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan keluhan *heat strain* pada pekerja pabrik tahu di Kecamatan Jelutung.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross sectional dimana yang bertujuan untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan *heat strain* pada pekerja pabrik tahu di Kecamatan Jelutung tahun 2021. Penelitian ini dilakukan di Pabrik Tahu yang ada di Kecamatan Jelutung pada bulan Agustus 2021. Sampel penelitian adalah pekerja Pabrik Tahu di Kecamatan Jelutung sebanyak 30 pekerja. Besar sampel ditentukan dengan total populasi, sehingga jumlah sampel sebanyak 30 orang. Instrumen penelitian adalah kuesioner dan alat ukur *heat stress*. Data yang terkumpul dianalisis secara univariat dan bivariat dengan menggunakan uji *uji spearman*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis univariat diperoleh hasil sebanyak 66,7% responden mengalami keluhan *heat strain* berat, rata-rata tekanan panas lingkungan kerja responden adalah 29,6°C, sebanyak 56,7% responden kurang mengkonsumsi air minum, 10,0% responden memiliki IMT kategori obesitas dan 6,7% responden memiliki IMT gemuk (tabel 1, 2).

Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa ada hubungan antara tekanan panas ( $p=0,000$ ) dan konsumsi air minum ( $p=0,000$ ) dengan keluhan *heat strain* pekerja pabrik tahu. Tidak



ada hubungan antara IMT ( $p=0,457$ ) dengan keluhan *heat strain* pekerja pabrik tahu (Tabel 3).

Tabel 1. Gambaran Keluhan *Heat Strain*

Variabel	Frekuensi	Persentase
<b>Keluhan <i>Heat Strain</i></b>		
Berat	20	66,7
Sedang	4	13,3
Rendah	6	20,0
<b>Konsumsi Air Minum</b>		
Kurang (< 11 gelas)	17	56,7
Cukup ( $\geq 11$ gelas)	13	43,3
<b>IMT</b>		
Obesitas	3	10,0
Gemuk	2	6,7
Normal	24	80,0
Kurus	1	3,3

Tabel 2. Gambaran Tekanan Panas, Konsumsi Air Minum, IMT pada Pekerja Pabrik Tahu

Variabel	Rata-rata	SD	Minimal	Maksimal
Tekanan Panas	29,6	1,56	29,6	34,6

Tabel 2. Hubungan Tekanan Panas, Konsumsi Air Minum, IMT pada Pekerja Pabrik Tahu dengan Keluhan *Heat Strain*

Keluhan <i>Heat Strain</i>	Variabel		n	r	p-value
	Heat	Suhu Lingkungan			
	Konsumsi Air	Minum	30	0,681	0,000
	IMT		30	0,141	0,457

Produksi tahu merupakan salah satu usaha kecil menengah yang berpotensi memiliki iklim kerja panas. Proses produksi yang membutuhkan api sebagai media masak dapat menimbulkan iklim kerja yang panas. Proses pembuatan tahu memiliki 5 tahap diantaranya yaitu penggilingan, proses pemasakan, penyaringan, pengerasan, dan pencetakan. Dalam proses produksi tahu terlihat bahwa penggunaan api digunakan dalam skala yang cukup besar. Hal ini dilakukan untuk menunjang proses memasak kedelai giling yang memiliki tempat masak yang cukup besar. Penggunaan kayu bakar yang cukup besar merupakan salah satu hal yang mendukung timbulnya api yang besar. Meskipun penggunaan api hanya terjadi pada proses memasak kedelai giling, namun panas lingkungan kerja dapat dirasakan pada seluruh

area produksi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa rata-rata tekanan panas yang dialami oleh responden saat bekerja adalah  $29,6^{\circ}\text{C}$ , hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata suhu lingkungan melebihi NAB yaitu  $28^{\circ}\text{C}$ .

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh  $p\text{-value}=0,000$  sehingga ada hubungan antara tekanan panas dengan keluhan *heat strain* pada pekerja pabrik tahu.

Hasil penelitian (Tumbol, 2018) pada pekerja proyek Apartement Arandra Residence menunjukkan bahwa ada hubungan antara tekanan panas dengan keluhan *heat strain* ( $p\text{-value}=0,001$ ).

Pekerja yang bekerja pada lingkungan kerja panas dapat mengalami tekanan panas sehingga tubuh akan melakukan adaptasi dengan lingkungan. Suhu lingkungan kerja yang panas dapat menyebabkan meningkatnya suhu tubuh sehingga kelenjar hipotalamus akan mengaktifkan mekanisme regulasi panas tubuh. Mekanisme ini bertujuan untuk menyeimbangkan panas yang diterima tubuh dan panas yang keluar dari dalam tubuh melalui proses penguapan yaitu pernapasan dan berkeringat (Nawawinetu, 2010).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara tekanan panas dengan keluhan *heat strain* pada pekerja pabrik tahu, hal tersebut disebabkan salah satu proses produksi tahu adalah pemasakan dengan menggunakan sumber panas dari kayu bakar sehingga suhu lingkungan kerja menjadi tinggi/panas, hal tersebut menyebabkan pekerja mengalami *heat strain*. Paparan suhu tinggi dapat menyebabkan hipotalamus merangsang kelenjar keringat untuk mengeluarkan keringat sebagai bentuk respon dari keadaan lingkungan sekitarnya. Pengeluaran keringat ini menyebabkan berkurangnya cairan tubuh yang berakibat pada timbulnya rasa haus dan dehidrasi. Dehidrasi yang dialami oleh responden akan meningkatkan suhu inti tubuh responden sehingga responden mengalami keluhan *heat strain*.

Hasil analisis hubungan konsumsi air minum dengan *heat strain* menunjukkan hasil ada hubungan antara konsumsi air minum dengan keluhan *heat strain* pada pekerja pabrik tahu ( $p=0,000$ ).

Penelitian (Hidayat, 2016) pada pekerja pandai besi di Desa bantaran Probolinggo menunjukkan bahwa ada hubungan antara konsumsi air minum dengan keluhan subjektif akibat tekanan panas ( $p\text{-value}=0,011$ ). Penelitian (Huda & Suwandi, 2018) pada pekerja di Pabrik Tahu UD Sumber Kencana bahwa sebagian besar pekerja mengkonsumsi air minum dengan jumlah yang kurang yaitu sebesar 64.29%.

Pada pekerja dilingkungan panas, tenaga kerja tersebut berisiko untuk kehilangan cairan tubuh berlebih. Apabila cairan yang hilang dalam tubuh tidak diganti maka dehidrasi akan terjadi yang mengakibatkan peningkatan suhu inti tubuh, hal ini dapat menyebabkan terjadinya *heat strain* (Hunt, 2011).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara konsumsi air minum dengan keluhan *heat strain* pada pekerja pabrik tahu, hal tersebut dikarenakan responden mengkonsumsi air minum dalam jumlah yang kurang pada saat bekerja. Pada saat proses perebusan bahan baku tahu, suhu lingkungan mengalami peningkatan, suhu lingkungan yang panas mengakibatkan responden mengeluarkan keringat dalam jumlah banyak sehingga tubuh mengalami kekurangan cairan, untuk mengganti cairan yang hilang dari tubuh maka responden harus mengkonsumsi air minum dalam jumlah yang cukup, jika responden tidak mengkonsumsi air minum dalam jumlah yang cukup maka akan mengalami dehidrasi, dehidrasi yang dialami oleh responden akan meningkatkan suhu inti tubuh responden sehingga responden mengalami keluhan *heat strain*.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh  $p\text{-value}=0,457$  sehingga tidak ada hubungan antara indeks massa tubuh (IMT) dengan keluhan *heat strain* pada pekerja pabrik tahu.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Amir et al., 2021) pada pekerja divisi produksi PT. Industri Kapal Indonesia Makassar menunjukkan bahwa ada hubungan antara status gizi dengan *heat strain* ( $p\text{-value}=0,001$ ). Hasil penelitian (Istiqomah & Nawawinetu, 2012) pada tenaga kerja di PT Iglas menunjukkan bahwa ukuran tubuh memiliki hubungan yang bermakna dengan munculnya keluhan subjektif akibat tekanan panas ( $p\text{-value}=0,005$ ).

Berdasarkan teori yang ada, dapat disimpulkan bahwa seseorang yang memiliki kelebihan berat badan akan lebih mudah untuk menghasilkan panas sehingga lebih berisiko untuk mengalami *heat strain*. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori yang ada. Hal ini bisa dikarenakan sebaran dari indeks massa tubuh responden dalam sampel penelitian yang tidak merata. Jika dilihat dari distribusi responden yang memiliki status gizi obesitas yaitu sebanyak 3 orang dan yang memiliki status gizi lebih yaitu sebanyak 2 orang. Jumlah tersebut cukup sedikit jika dibandingkan dengan pekerja yang memiliki status gizi normal, yaitu sebanyak 24 orang.

*Heat strain* yang dialami oleh responden disebabkan responden menerima paparan tekanan panas yang berlebih sehingga dengan tekanan panas yang diterima, responden akan tetap mengalami *heat strain* meskipun responden memiliki status gizi normal maupun berlebih.

## PENUTUP

### Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang berhubungan dengan kejadian *heat strain* pada pekerja pabrik tahu di kecamatan Jelutung adalah tekanan panas dan konsumsi air minum.

Diharapkan kepada pekerja untuk mengkonsumsi air minum > 11 gelas dan menggunakan pakaian yang dapat merefleksikan panas seperti menggunakan

pakaian yang tipis, menggunakan kaos yang longgar dan mudah menyerap keringat sehingga hal tersebut dapat mempermudah perindahan panas dari kulit menuju lingkungan, sehingga pekerja tidak mengalami dehidrasi.

Melakukan olahraga secara teratur, serta menjaga pola makan agar memiliki IMT normal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amir, A., Hardi, I., & Sididi, M. (2021). Faktor yang Berhubungan dengan Heat Strain Pada Pekerja Divisi Produksi PT. Industri kapal Indonesia (Persero) Makassar. *Window Of Public Helath*, 1(6), 785–796.
- [2] Artha, D. P. (2016). *Gejala Heat Strain Akibat Paparan Panas Pada Pekerja di Pabrik Tahu Sumedang Kecamatan Medan Polonia Tahun 2015*. Universitas Sumatera Utara.
- [3] Hidayat, R. A. (2016). Hubungan Konsumsi Air Minum dengan Keluhan Subjektif Akibat Panas pada Pekerja Pandai Besi di Desa Bantaran Probolinggo. *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah*, 1(1), 1–11.
- [4] Huda, A. I., & Suwandi, T. (2018). Relations Between Workload and Consumption of Drinking Water With Dehydration in Workers of Tofu Factory. *Indones J Occup Saf Heal*, 7(1), 310–320.
- [5] Hunt, A. P. (2011). *Heat Strain, Hydration Status, and Symptoms of Heat Illness in Surface Mine Workers*. Queensland University of Technology.
- [6] Istiqomah, F. H., & Nawawinetu, E. D. (2012). Faktor Dominan yang Berpengaruh Terhadap Munculnya Keluhan Subjektif Akibat Tekanan Panas Pada Tenaga Kerja di PT. Iglas (Persero) Tahun 2013. *The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health*, 2(2), 175–184.
- [7] Kemenkes RI. (2014). *Pedoman Kebutuhan Cairan bagi Pekerja agar Tetap Sehat dan Produktif. Edisi Satu*. Jakarta: Direktorat Kesehatan Kerja dan Olah Raga Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- [8] Nawawinetu. (2010). *Modul Kuliah Heat Strain*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- [9] NIOSH. (2017). *Heat Stress*. United States: Centers for Disease Control and Prevention.
- [10] Sari, M. P. (2017). Iklim Kerja Panas dan Konsumsi Air Minum Saat Kerja Terhadap Dehidrasi. *HIGEIA : Journal Public Health*, 1(2), 108–118.
- [11] Suma'mur, & Soedirman. (2014). *Kesehatan Kerja dalam Perspektif Hiperkes & Keselamatan Kerja*. Jakarta: Erlangga.
- [12] Tarwaka. (2015). *Ergonomi Industri Dasar-Dasar Pengetahuan Ergonomi dan Aplikasi di Tempat Kerja Revisi Edisi II*. Surakarta: Harapan Press.
- [13] Tarwaka. (2016). *Dasar-dasar Keselamatan Kerja serta Pencegahan Kecelakaan di Tempat Kerja*. Surakarta: Harapan Press.
- [14] Tumbol, C. M. (2018). *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Heat Strain pada Pekerja di Proyek Apartement Arandra Residence oleh PT. Wika Gedung Tbk Tahun 2018*. Universitas Esa Unggul.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

---

**PERANCANGAN SISTEM PEMESANAN PERCETAKAN  
PADA TOKO BORNEO****Oleh****Halimatussa'diah****Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Indraprasta PGRI  
Jalan Raya Tengah No 80, Kelurahan Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur  
Email: [gbhock300679@gmail.com](mailto:gbhock300679@gmail.com)****Abstract**

Borneo Store is a company or agency that is engaged in printing and selling stationery. At this time the printing system carried out at the Borneo store is still running with a series of processes where customers come directly to the physical store and may queue with other customers to print documents, which will slow down other activities of the customer. In this problem, an idea arises to create a website system that can make it easier for customers to order printing online, where customers only need to upload documents to be printed and wait for confirmation by the service provider for orders that have been processed. Research method Research and Development (R&D), Research and Development (R&D) is a research method where the author designs and builds an information system or program which is then applied to Toko Borneo, covering the initial process of designing to implementing the program. This system uses the PHP programming language with the database management system used is Mysql. The results of this study are a website-based printing order information system that makes it easier for customers to print without having to carry documents and queue with other customers at the printing location.

**Keywords: Information System, Php, Website, Mysql, Printing****PENDAHULUAN**

Dokumen merupakan suatu media informasi yang biasanya berbentuk tulisan. Dokumen dapat berbentuk digital maupun berbentuk fisik yaitu dengan mencetak dokumen digital yang sudah dibuat sebelumnya. Dokumen merupakan hal penting dalam kehidupan manusia, contohnya seperti dimana dokumen dapat menjadi media penyampai informasi yang ril untuk kebutuhan manusia.

Melihat hal diatas muncul suatu persoalan atau masalah tentang bagaimana seorang pengguna komputer yang tidak memiliki mesin pencetak dokumen dapat mencetak maupun menduplikasi, dokumen dengan mudah dan waktu yang singkat.

Dalam penelitian penulis menemukan masalah yang terjadi di toko Borneo seperti sistem percetakan yang dilakukan pada toko Borneo masih berjalan dengan rangkaian proses

pelanggan datang secara langsung untuk mencetak dokumen, dimana hal ini akan memperlambat aktifitas lain dari pelanggan tersebut.

Pada masalah ini timbul suatu gagasan untuk membuat sistem *website* yang dapat mempermudah pelanggan dalam pemesanan percetakan secara online, dimana pelanggan hanya perlu mengunggah dokumen yang akan dicetak dan menunggu konfirmasi oleh penyedia layanan untuk pemesanan yang sudah selesai diproses. Tentu hal ini akan mempermudah pelanggan dalam hal percetakan tanpa harus membawa dokumen dan antri dengan pelanggan lain di lokasi percetakan. Diharapkan sistem ini dapat menjadi suatu pijakan pada toko Borneo untuk mendapat posisi pasar dan bersaing dengan instansi serupa di sekitar.

**LANDASAN TEORI**

Percetakan adalah sebuah proses industri untuk memproduksi secara massal atau bersamaan berupa tulisan dan gambar, menggunakan tinta di atas kertas menggunakan mesin cetak (Pratama, 2019). Perancangan adalah suatu proses analisis, pengembangan atau pembuatan prototype yang bertujuan untuk mencapai suatu sistem fisik maupun non-fisik dengan ketentuan analisis sebelumnya, sehingga tercapai suatu sistem yang kompleks. Perancangan adalah suatu proses pemilihan dan pemikiran yang menghubungkan fakta-fakta berdasarkan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan masa datang dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan tertentu yang diyakini diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dan menguraikan bagaimana pencapaiannya (Cahyaningtyas & Iriyani, 2015). Aplikasi adalah program siap pakai yang dapat digunakan untuk menjalankan perintah dari pengguna aplikasi itu sendiri dengan tujuan mendapatkan hasil yang lebih akurat sesuai dengan tujuan pembuatan aplikasi tersebut (Abdurahman & Riswaya, 2014). Arief (dalam Ibrahim & Ambarita, 2018) menyatakan bahwa *website* adalah kumpulan dari halaman web yang sudah dipublikasikan di jaringan internet dan memiliki *domain/URL (Uniform Resource Locator)* yang dapat diakses semua pengguna internet dengan cara mengetikkan alamatnya. Hal ini dimungkinkan dengan adanya teknologi *World Wide Web (WWW)*. Sutarman dalam (Rivai & Purnama, 2015) menyatakan bahwa *browser* merupakan suatu program yang dirancang untuk mengambil informasi informasi dari suatu server computer pada jaringan internet. Jadi untuk mengakses web diperlukan suatu program yaitu *web browser* atau bisa disebut *browser* saja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu menyelesaikan masalah sistem yang masih dilakukan secara manual di toko Borneo, dapat memberikan kemudahan bagi toko Borneo dalam mengelola data, mempermudah dan membantu dalam pembuatan laporan, meningkatkan kinerja dan memudahkan dalam

menyajikan informasi secara cepat, tepat dan akurat.

*Indonesian Journal of Network & Security* dengan artikel berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan Produk Percetakan Berbasis Web Dengan Pemodelan UML. Tujuan dari penelitian ini adalah Dengan menggunakan aplikasi basis data yang diintegrasikan dengan tampilan berbasis web untuk menyediakan informasi penjualan Produk Percetakan secara online sehingga pelanggan yang ingin mengetahui tentang produk-produk, harga, model serta cara pembayaran dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja asal terhubung dengan internet (Aji, 2018). *Journal of Information System, Informarics and Computig* dengan artikel berjudul Desain dan Penerapan Website Tata Kelola Percetakan pada CV ApicDesign Kreasindo Jakarta dengan Metode Prototyping. Tujuan dari penelitian ini adalah CV ApicDesign Kreasindo dapat memanfaatkan media *website* sebagai sebuah sistem yang mampu mengelola order percetakan dari pelanggannya. Kesalahan tata kelola yang ditimbulkan dalam perusahaan percetakan menggunakan metode konvensional diharapkan dapat diselesaikan (Anis Rohmadi, 2020). Jurnal Suara Wawasan Sukabumi dengan artikel berjudul Sistem Informasi Pemesanan Jasa Percetakan Berbasis Web. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun sebuah sitem informasi berbasis web yang dapat mempermudah dan menghasilkan suatu perkembangan dalam hal produk yang diinginkan oleh konsumen serta dapat memberikan kemudahan kepada konsumen baik dalam hal mencari informasi detail produk maupun transaksi pemesanan untuk produk yang diinginkan (Supriyatna, 2017).

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian metode *Research and Development (R&D)*, *Research and Development (R&D)* adalah metode penelitian dimana penulis merancang dan membangun

sebuah sistem informasi atau program yang kemudian diterapkan pada Toko Borneo, meliputi proses awal perancangan hingga penerapan program tersebut. Metode pengumpulan data yang digunakan antara lain:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan mempelajari buku-buku, yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas yang diperoleh dari perpustakaan Universitas, pengumpulan data dan informasi dilakukan di Universitas Indraprasta PGRI, dan kutipan buku-buku, dan browsing melalui *search engineering* di internet.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

a. Observasi

Observasi dilakukan pada selama lima bulan (5) yang dimulai pada bulan Maret sampai Juli 2021 pada Toko Borneo dengan bapak Ridwan Saleh selaku pimpinan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan sistem yang berjalan serta mencari dan mengumpulkan data yang dibutuhkan langsung dari sumbernya yaitu dengan pengamatan langsung terhadap penyeleksian *news* untuk melengkapi wawancara.

b. Wawancara

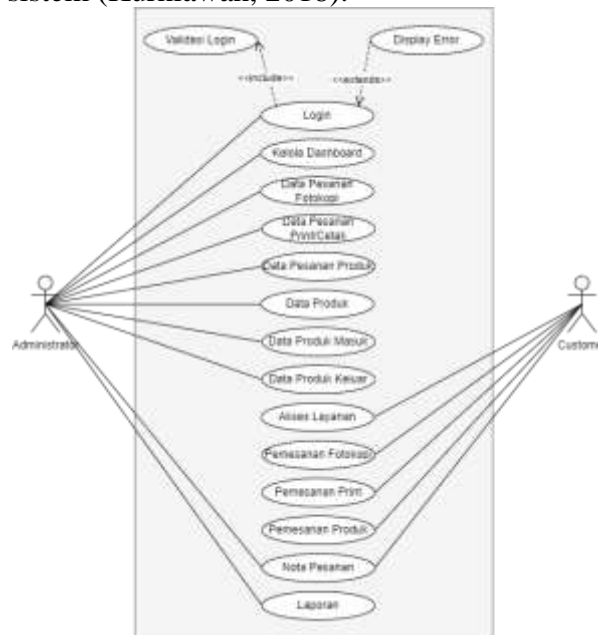
Pengumpulan data dengan wawancara ini dilakukan untuk mencari data. Wawancara dilakukan dengan Lembaga atau instansi yang dijadikan objek penelitian dengan bapak Ridwan Saleh selaku pimpinan pada toko Borneo, dalam wawancara dengan Ridwan Saleh selaku pemilik penulis dapat menyimpulkan beberapa poin yang harus dilakukan oleh penulis untuk mengatasi masalah yang terjadi adapun permasalahannya sebagai berikut:

- 1) Bahwa alur pemesanan percetakan yang dilakukan Toko Borneo Fotocopy dilakukan secara manual.
- 2) Penginputan data barang masih dilakukan secara manual belum terkomputerisasi.
- 3) Sistem pembuatan laporan masih dilakukan secara manual.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Use Case Diagram* Sistem yang Diusulkan

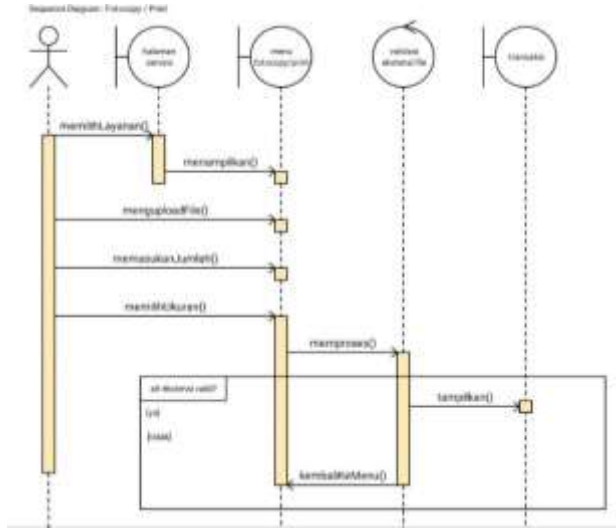
*Use case* dideskripsikan secara tekstual dalam bentuk *use case scenario* untuk menjelaskan interaksi yang terjadi antara aktor dengan sistem (Kurniawan, 2018).



**Gambar 1.** *Use Case Diagram* Sistem yang Diusulkan

### *Sequence Diagram* Proses Pemesanan

*Sequence Diagram* adalah *tool* yang sangat populer dalam pengembangan sistem informasi secara *object-oriented* untuk menampilkan interaksi antar objek (Nurdam, 2014).



Gambar 2. Sequence Diagram Proses Pemesanan

Tampilan Layar Sistem  
Tampilan Halaman Login

Login

Gambar 3. Tampilan Halaman Login  
Pada halaman Login pengguna diharuskan memasukkan email dan password yang sudah didaftarkan.

Tampilan Halaman Utama



Gambar 4. Tampilan Halaman Utama

Pada halaman utama terdapat bar navigasi yang menunjukkan layanan fotokopi, *printing* dan pemesanan produk.

Tampilan Form Fotokopi

Gambar 5. Tampilan Form Fotokopi  
Gambar diatas adalah form pemesanan fotokopi, yaitu pengguna memasukkan masukan yang diperlukan pada setiap form.

Tampilan Form Print dan Cetak Foto

Gambar 6. Tampilan Form Print dan Cetak Foto

Gambar diatas adalah form pemesanan print dan cetak foto, sama seperti fotokopi yaitu pengguna memasukkan masukan yang diperlukan pada setiap form.



**Tampilan Halaman Pemesanan Produk**



**Gambar 7.** Tampilan Halaman Pemesanan Produk

Pada halaman *shop* atau pemesanan produk, produk yang tersedia ditampilkan dalam bentuk kartu dan disusun dalam tiga kolom, terdapat tombol pada setiap kartu produk untuk menambahkan produk yang akan dipesan kedalam keranjang.

**Tampilan Halaman Keranjang**



**Gambar 8.** Tampilan Halaman Keranjang

Pada halaman keranjang menampilkan produk yang akan dipesan sebelum *check-out*. Terdapat tombol untuk menghapus produk yang tidak jadi dipesan, tombol “Lanjutkan Belanja” untuk kembali ke halaman *shop* dan tombol “Checkout” untuk melanjutkan pemesanan.

**Tampilan Halaman Nota**



**Gambar 9.** Tampilan Halaman Nota

Halaman nota ditampilkan setelah pengguna menekan tombol “Checkout” pada halaman

keranjang, menampilkan produk yang dipesan dalam bentuk tabel.

**Tampilan Laporan Bukti Pemesanan**



**Gambar 10.** Tampilan Laporan Bukti Pemesanan

Tampilan nota pesanan ditampilkan dalam bentuk tabel, ditampilkan setelah pengguna melakukan pemesanan (fotokopi, *print*, *shop*).

**Tampilan Laporan Proses Penyelesaian Pesanan**



**Gambar 11.** Tampilan Laporan Proses Penyelesaian Pesanan

Laporan pesanan fotokopi diserahkan oleh admin kepada petugas fotokopi, diserahkan beserta dokumen yang akan difotokopi yang sudah dicetak dalam jumlah satu sebelumnya oleh admin.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Dengan dibangunnya sistem informasi pemesanan percetakan maka kendala yang dihadapi Toko Borneo yaitu pembatasan pelanggan pada masa pandemi *Covid-19* dapat terselesaikan, kepadatan yang terjadi dilokasi percetakan dapat diminimalisir, proses pendataan dapat dilakukan secara akurat serta lebih menghemat waktu dan untuk kedepannya data-data yang diperlukan sebagai bahan pendataan atau laporan tersimpan secara terstruktur pada database, membantu menyelesaikan masalah sistem yang masih dilakukan secara manual, hal ini dapat meningkatkan kinerja dan produktifitas karyawan dalam bekerja, serta informasi yang disampaikan lebih cepat, tepat dan akurat dengan serta sistem yang ramah dan mudah digunakan.

### Saran

Perlu adanya pemeliharaan program aplikasi serta penyempurnaan, maka evaluasi dalam jangka waktu dekat diperlukan. Misalnya dalam satu bulan sampai satu tahun ini, sehingga dapat menjadikan tolak ukur keberhasilan dari aplikasi ini. Ataupun juga sebagai acuan dalam pengembangan pada sistem yang lebih baik lagi. Menempatkan penggunaan yang telah memahami prosedur pemakaian program sistem informasi pemesanan percetakan, sehingga menghindari terjadinya kesalahan dalam pengoperasian yang mengakibatkan terhambatnya kegiatan operasional pada bagian percetakan. Perlu dilakukan *back up* secara berkala untuk menghindari rusak atau hilangnya data ketika perangkat keras maupun perangkat lunak mengalami masalah.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] N., Ibrahim, A., & Ambarita, A. (2018). Sistem Informasi Pengaduan Pelanggan Air Berbasis Website Pada Pdam Kota Ternate. *IJIS - Indonesian Journal On Information System*, 3(1). <https://doi.org/10.36549/ijis.v3i1.137>
- [2] Abdurahman, H., & Riswaya, A. R. (2014). Aplikasi Pinjaman Pembayaran Secara Kredit Pada Bank Yudha Bhakti. *Jurnal Computech & Bisnis*, 8(2), 61–69.
- [3] Aji, A. M. B., Riyanto, V., Wijaya, G., & Rudianto, B. (2018). Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan Produk Percetakan Berbasis Web Dengan Pemodelan UML. *Indonesian Journal on Networking and Security*, 8(1), ISSN: 2302-5700.
- [4] Anis Rohmadi, V. Y. (2020). Desain dan Penerapan Website Tata Kelola Percetakan Pada CV APICDESIGN KREASINDO JAKARTA dengan Metode Prototyping. *Journal of Information System, Informatics and Computing*, 4(1), 70–85.
- [5] Cahyaningtyas, R., & Iriyani, S. (2015). Perancangan Sistem Informasi Perpustakaan Pada Smp Negeri 3 Tulakan, Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. *Indonesian Journal on Networking and Security*, 4(2), 15–20.
- [6] Kurniawan, T. A. (2018). Pemodelan Use Case (UML): Evaluasi Terhadap beberapa Kesalahan dalam Praktik. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 5(1), 77. <https://doi.org/10.25126/jtiik.201851610>
- [7] Nurdam, N. (2014). Sequence Diagram Sebagai Perangkat Perancangan Antarmuka Pemakai. *Jurnal ULTIMATICS*, 6(1), 21–25. <https://doi.org/10.31937/ti.v6i1.328>
- [8] Pratama, S. (2019). Bab II Landasan Teori. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- [9] Rivai, D. A., & Purnama, B. E. (2015). Pembangunan Sistem Informasi Pengolahan Data Nilai Siswa Berbasis Web Pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Miftahul Huda Ngadirojo. *Indonesian Journal on Networking and Security*, 3(2), 2302–5700.

- 
- [10] Supriyatna AMIK BSI Karawang Jl Ahmad Yani No, A. (2017). Sistem Informasi Pemesanan Jasa Percetakan Berbasis Web. *Swabumi*, 5, 65–73.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

---

**PENAMBAHAN SERBUK AMPAS KOPI SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN NILAI  
KALOR BRIKET LIMBAH KERTAS****Oleh****Dianta Mustofa Kamal****Master's Program in Applied Manufacturing Technology, State Polytechnic of Jakarta,****Jl. Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI Depok 16425, Indonesia****E-mail: [dianta@pnj.ac.id](mailto:dianta@pnj.ac.id)****Abstrak**

Briket yang dihasilkan dari kertas bekas dikenal karena nilai kalorinya yang rendah. Nilai kalor briket dari kertas bekas berada pada urutan keempat setelah limbah kayu, arang dan serbuk gergaji. Oleh karena itu, diperlukan perbandingan komposisi campuran yang tepat untuk menghasilkan nilai kalor yang lebih tinggi. Serbuk Ampas Kopi (SAK) dipilih sebagai bahan tambahan dalam komposisi campuran biomassa karena SAK memiliki nilai kalor yang tinggi dan mudah ditemukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan rasio yang tepat yang dapat meningkatkan nilai kalor briket yang terbuat dari kertas bekas, berdasarkan pengujian dan analisis proksimat. Ada empat komposisi sampel campuran yang digunakan dalam penelitian ini. Komposisi campuran pertama adalah 90% kertas bekas dan 10% perekat; yang kedua adalah 70% kertas bekas, 20% SAK dan 10% perekat; komposisi campuran ketiga adalah 50% kertas bekas, 40% SAK, 10% perekat; dan komposisi campuran keempat meliputi 30% kertas bekas, 60% SAK dan 10% perekat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin besar rasio SAK yang digunakan dalam komposisi akan menghasilkan nilai kalor yang lebih tinggi hanya saja briket semakin rapuh. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa briket mencapai performa terbaiknya pada komposisi campuran 40% SAK. Pada rasio yang diusulkan, briket tidak rapuh, dan menghasilkan nilai kalori 5,366 kkal/kg; 6,58% kadar air; 5,37% kadar abu; 28,28% dari bahan yang mudah menguap; dan 8,91% dari indeks pecah. Oleh karena itu, komposisi yang dipelajari dapat dipertimbangkan untuk menghasilkan briket biomassa yang paling efisien yang terbuat dari kertas bekas.

**Kata Kunci: Biobriket, Nilai Kalor, Ampas Kopi****PENDAHULUAN**

Kebutuhan energi dari sektor industri, transportasi, dan komersial terus meningkat tiap tahunnya seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan pertumbuhan di bidang ekonomi. Eksploitasi bahan bakar fosil secara besar-besaran terjadi akibat dari ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan bahan bakar tersebut yang berdampak kepada semakin rusaknya kondisi bumi. Selain itu, meningkatnya penggunaan bahan bakar fosil akan menyebabkan berkurangnya cadangan minyak bumi yang akan membuat harga bahan bakar menjadi naik di kemudian hari [1].

Salah satu cara untuk mengurangi ketergantungan penggunaan bahan bakar fosil dan mengatasi krisis lingkungan yaitu dengan mengimbangi persediaan energi alternatif yaitu biomassa. Biomassa merupakan energi terbarukan yang bersumber dari bahan limbah organik hasil penguraian daun, ranting, kotoran hewan, limbah kehutanan, dan limbah pertanian [2]. Pemanfaatan biomassa sebagai energi alternatif dapat dilakukan dengan berbagai proses, salah satunya dengan konversi termokimiawi. Konversi energi biomassa secara termokimiawi akan menghasilkan panas dan listrik dengan menggunakan bahan bakar padat, cair, dan gas [3].

Kertas merupakan salah satu limbah yang sering ditemui di lingkungan karena penggunaannya yang masih cukup banyak dipakai pada institusi pemerintah maupun korporasi contohnya dalam pengarsipan dokumen. Pada tahun 2019, jumlah konsumsi kertas di Indonesia mencapai 13,6 juta ton. Dari data komposisi sampah yang tercatat di Indonesia berdasarkan jenisnya pada jenjang waktu 2019 dan 2020, kertas merupakan salah satu yang menyumbang produksi sampah. Selain itu, dalam rentang waktu satu tahun konsumsi kertas meningkat sebesar 0,57% dari 11,4% di tahun 2020 [4]. Menurut Suwardi (2021) “Pengolahan limbah masih menggunakan metode *landfill* konvensional, yaitu sampah-sampah tersebut hanya ditampung sementara dan kemudian akan diangkut dan dikumpulkan ke TPA setempat”. Limbah kertas tersebut masih dapat ditingkatkan nilai gunanya dengan cara pengolahan yang baik, seperti dijadikan briket.

Briket merupakan sumber energi terbarukan dengan bahan padat yang berasal dari hasil konversi energi biomassa untuk mempertahankan nyala api. Briket yang diproduksi dari bahan-bahan biomassa disebut dengan biobriket [5]. Biobriket yang dipakai sebagai bahan bakar alternatif akan memiliki karakteristik yang berbeda-beda tergantung bahan utama pembuatan, ukuran partikel, campuran yang dipakai dan juga persentase jumlah perekatnya. Kualitas dari biobriket dapat dapat dinilai baik sesuai dengan standar mutu briket SNI yaitu briket dengan nilai kalor dan lama pembakaran yang tinggi serta kadar air yang rendah.

Pembuatan biobriket akan melalui beberapa tahapan yaitu pencacahan menjadi partikel yang lebih kecil, pengurangan, penyaringan dengan ukuran 60 mesh, pencampuran dengan perekat, pencetakan, dan pengeringan [6]. Komposisi yang dipakai untuk pembuatan biobriket ini menggunakan serbuk ampas kopi dan perekat berupa tepung tapioka. Serbuk ampas kopi merupakan limbah yang

cukup banyak ditemui dan dapat menimbulkan bau yang tidak sedap apabila tidak diperlakukan dengan benar. Penambahan serbuk ampas kopi ke dalam campuran briket kertas guna meningkatkan nilai kalor briket karena kandungan kalor kulit kopi dan serbuk ampas kopi memiliki nilai yang cukup tinggi yaitu sebesar 6.983 kcal/kg [7].

## LANDASAN TEORI

Biomassa atau dikenal sebagai *bioresource* merupakan semua bahan organik yang berasal dari tanaman hijau yang molekulnya sudah rusak setelah mengalami proses pencernaan, pembakaran, atau dekomposisi. Energi kimia dari biomassa akan tersimpan di bahan organik tersebut yang kemudian dapat dimanfaatkan menjadi sumber energi alternatif. Salah satu sumber energi yang utama bagi umat manusia adalah biomassa dengan perkiraan untuk berkontribusi terhadap keberlangsungan hidup sebesar 10-14% dari pasokan energi dunia [8]. Satu faktor penting yang menjadi pertimbangan penggunaan energi biomassa yaitu untuk membantu mengurangi penggunaan bahan bakar fosil yang mana merupakan salah satu penyumbang terbesar terjadinya pemanasan global. Secara spesifik, bahan organik yang termasuk biomassa yaitu kayu, serbuk gergaji, eceng gondok, batok kelapa, serabut kelapa, sekam padi, sampah dapur, kotoran hewan, kayu putih, kelapa sawit, tebu, kopi, dan kakao [9].

Salah satu sumber pemasok energi biomassa adalah sampah. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tahun 2020 total produksi sampah nasional mencapai 67,8 juta ton. Menurut Suwardi (2021), pengelolaan limbah masih belum dilakukan secara maksimal, “Pengolahan limbah masih menggunakan metode *landfill* konvensional, yaitu sampah-sampah tersebut hanya ditampung sementara dan kemudian akan diangkut dan dikumpulkan ke TPU setempat”. Dengan mengolah sampah

berdasarkan sifatnya, pemanfaatan sampah terhadap produksi biomassa akan semakin maksimal.

Pirolisis merupakan proses konversi energi biomassa bahan padat tanpa menggunakan oksigen dengan tujuan menghilangkan kandungan zat terbang karbon. Produk yang dihasilkan dari teknologi konversi pirolisis dapat berbentuk padatan, cair, dan gas. Bahan bakar padat yang dihasilkan dari proses pirolisis berupa arang (*char*) yang disebut dengan karbonisasi. Karbonisasi akan melepaskan zat yang mudah terbakar seperti. Karbonisasi dilakukan untuk meningkatkan nilai kalor biomassa yang dapat digunakan untuk pembakaran dengan hasil yang bersih dan sedikit kandungan asap. Proses pirolisis biomassa menghasilkan nilai kalor dan efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan pembakaran secara langsung [10].

Dalam metode konversi biomassa pirolisis, salah satu bahan bakar yang dapat dihasilkan adalah biobriket. Penelitian biomassa menggunakan jerami padi dan tongkol jagung dengan menggunakan proses pirolisis pada temperatur 250 – 450 °C menghasilkan bioarang dengan kadar karbon dan nilai kalor yang meningkat [11]. Jumlah arang yang dihasilkan untuk dibuat menjadi biobriket bergantung pada komposisi awal bahan organik yang dipakai. Arang yang sedikit dihasilkan karena kandungan zat *volatile matter* yang semakin banyak.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan menguji empat buah sampel dengan komposisi limbah kertas dan ampas kopi yang berbeda-beda, yaitu:

- Sampel 1 = 90% kertas : 10% perekat
- Sampel 2 = 70% kertas : 20% ampas kopi : 10% perekat
- Sampel 3 = 50% kertas : 40% ampas kopi : 10% perekat
- Sampel 4 = 30% kertas : 60% ampas kopi : 10% perekat



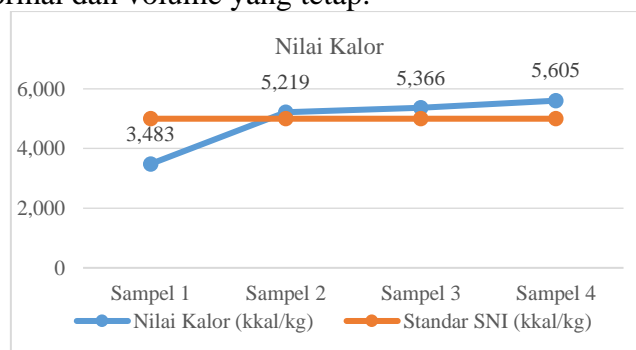
Gambar 1. Sampel yang akan diuji

Kemudian semua sampel tersebut diuji besarnya nilai kalor, kadar air (*moisture content*), kadar abu (*ash content*), kadar zat menguap (*volatile matter*), dan keteguhan fisik (dengan metode *shatter index* briket) kemudian membandingkan hasil pengujian dengan standar SNI briket No. 01-6235-2000.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Nilai Kalor

Nilai kalor atau *heating value* suatu bahan bakar merupakan jumlah panas yang diperoleh atau dihasilkan dengan menggunakan pembakaran yang sempurna. Untuk menghitung nilai kalor dari suatu bahan bakar digunakan alat yang bernama bom kalorimeter. Penggunaan bom kalorimeter untuk pengujian nilai kalor dilakukan dengan membakar sedikit sampel bahan bakar dengan temperatur udara normal dan volume yang tetap.



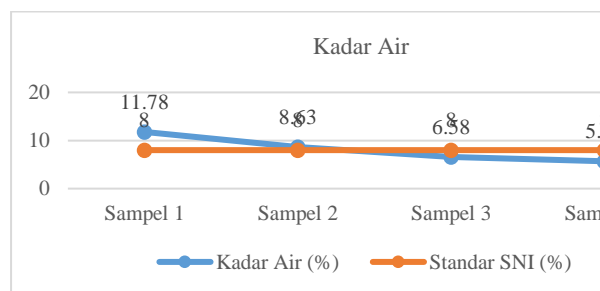
Gambar 2. Nilai Kalor Briket (ASTM D5865-13)

Pada Gambar 2 nampak hasil pengujian nilai kalor terhadap empat sampel variasi komposisi briket mengalami kenaikan. Nilai kalor tertinggi terdapat pada variasi sampel 4 komposisi 30% kertas, 60% ampas kopi, dan 10% perekat yaitu dengan nilai sebesar 5.605 kkal/kg. Sedangkan nilai kalor terendah terdapat

pada sampel 1 komposisi 90% kertas dan 10% perekat dengan nilai sebesar 3.483 kal/kg. Dari keempat sampel dengan variasi komposisi berbeda yang diuji, nilai kalor yang memenuhi standar SNI 01-6235-2000 briket dengan besar nilai kalor minimal lebih dari 5.000 kkal/kg yaitu sampel 2, sampel 3, dan sampel 4. Sampel 1 belum memenuhi standar SNI karena nilai kalor yang dihasilkan masih dibawah 5.000 kkal/kg.

### **Kadar Air (Moisture Content)**

Kadar air akan berhubungan dengan tinggi atau rendahnya nilai kalor yang dihasilkan. Besarnya kadar air dalam bahan bakar menyebabkan kalor yang dihasilkan dan daya pembakaran yang rendah. Metode pengeringan yang dilakukan untuk mengetahui besarnya kadar air dalam penelitian ini memakai standar ASTM E871-82 yang akan berjalan selama 24 jam dengan temperatur 105°C.



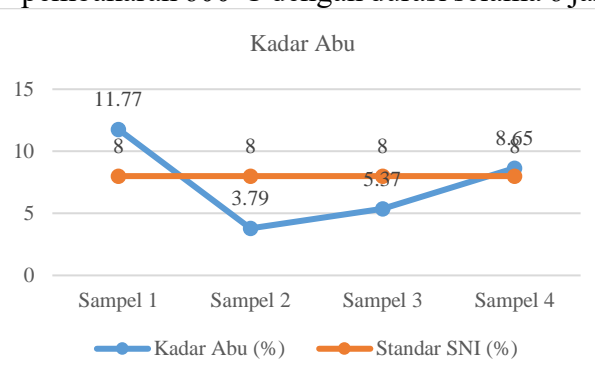
Gambar 3. Kadar Air Briket (ASTM E871-82)

Pada Gambar 3 terlihat grafik perbandingan hasil pengujian kadar air empat buah sampel briket dengan variasi komposisi yang berbeda. Berdasarkan hasil pengujian, nilai kadar air tertinggi terdapat pada sampel 1 sebesar 11,78%. Kemudian kadar air briket mengalami penurunan pada sampel 2, sampel 3, dan sampel 4 memiliki kadar air paling rendah yaitu sebesar 5,68%. Besar kadar air yang terkandung pada briket sesuai standar SNI 01-6235-2000 yaitu < 8%. Sampel 1 dan sampel 2 mencatat masing-masing memiliki kadar air sebesar 11,78 dan 8,63% yang mana masih diatas 8%. Bahan yang digunakan pada campuran komposisi briket juga mempengaruhi tinggi-rendahnya kadar air yang terkandung.

Sampel 1 memiliki nilai kadar air yang tinggi karena komposisi campuran briket yang digunakan adalah 90% kertas dan 10% perekat. Kertas yang dipakai sebagai campuran diolah terlebih dahulu menjadi bubur kertas untuk mendapatkan ukuran partikel yang lebih kecil.

### **Kadar Abu (Ash Content)**

Setelah menguji kandungan kadar air yang terdapat pada biobriket, selanjutnya dilakukan pengujian kadar abu. Kadar abu juga berpengaruh terhadap nilai kalor suatu bahan bakar, dimana semakin banyak kadar abu yang terkandung dalam bahan bakar akan mengurangi nilai kalor. Proses pengabuan yang digunakan yaitu menggunakan metode pengabuan langsung memakai temperatur pembakaran 600°C dengan durasi selama 6 jam.



Gambar 4. Kadar Abu (ASTM D1102-84)

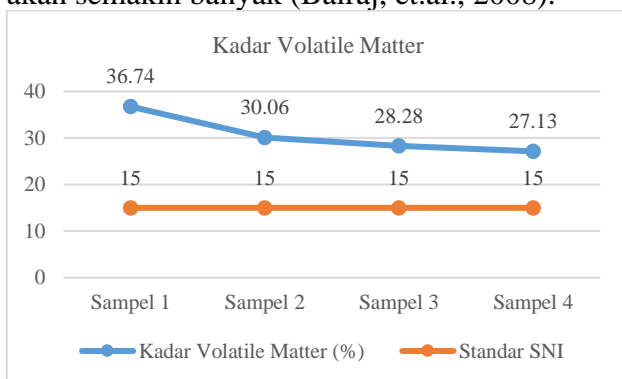
Pada Gambar 4, terdapat dua sampel dengan nilai kadar air yang tidak sesuai standar SNI. Pada sampel 1 memiliki nilai kadar abu tertinggi sebesar 11,77%. Kemudian pada sampel 2 nilai kadar abu mengalami penurunan menjadi 3,79%, pada sampel 3 kadar abu mengalami kenaikan menjadi 5,37, dan pada sampel 4 kadar abu mengalami kenaikan serta melewati standar SNI dengan nilai 8,65%. Selain kadar air, kadar abu juga menjadi salah satu parameter yang penting karena tidak dapat terbakar dengan baik. Kadar abu yang tinggi mempengaruhi besar nilai kalor yang dihasilkan, pada sampel 1, kadar abu tercatat memiliki nilai yang paling tinggi.

### **Kadar Zat Menguap (Volatile Matter)**

Kadar zat menguap atau *volatile matter* merupakan kandungan dari bahan organik yang



dapat menguap dan dapat berpengaruh terhadap kesempurnaan pembakaran biobriket. Untuk menilai kandungan *volatile matter* dilakukan dengan cara membandingkan kandungan karbon dengan zat terbang dan disebut dengan rasio bahan bakar atau *fuel ratio*. Dengan dihasilkannya *fuel ratio* yang tinggi maka dapat dipastikan jumlah karbon yang tidak terbakar akan semakin banyak (Balraj, et.al., 2008).



Gambar 5. *Volatile Matter* (ASTM E872-72)

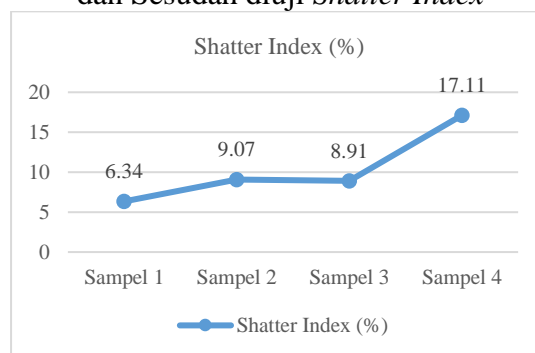
Hasil pengujian kadar zat menguap (*volatile matter*) yang dapat dilihat pada Gambar 5 tercatat keempat sampel tidak ada yang memenuhi standar SNI. Sampel 1 dengan komposisi 90% kertas dan 10% perekat memiliki kadar zat menguap paling banyak, hal itu dipengaruhi oleh adanya kandungan air dari kertas yang dibuat dengan bubur kertas pada penelitian ini.

#### Keteguhan Tekan (*Shatter Index*)

Pengujian keteguhan tekan briket dilakukan untuk menentukan kekuatan suatu briket. Briket dengan mutu yang baik memiliki sifat fisik yang keras dan kuat. Pengujian ini dilakukan dengan menjatuhkan dan membenturkan briket dari ketinggian 1,8 meter kemudian ditimbang dengan timbangan digital yang memiliki ketelitian 0,01 gram. Massa briket dihitung sebelum dilakukan uji *drop test* kemudian ditimbang ulang untuk mendapatkan berapa massa atau partikel yang hilang akibat pengujian. Gambar 6 memperlihatkan bentuk sebelum dan sesudah pengujian keteguhan tekan.



Gambar 6. Tampak Visual Biobriket Sebelum dan Sesudah diuji *Shatter Index*



Gambar 7. Massa Briket yang Menghilang Metode *Shatter Index* (ASTM D440-86 R02)

Pada Gambar 7, massa briket sampel 1 dengan variasi campuran 90% kertas dan 10% perekat yang hilang setelah dilakukan pengujian *shatter index* yaitu sebesar 6,34%. Angka tersebut mengalami kenaikan pada sampel 2 menjadi 9,07%. Massa yang hilang pada sampel ketiga mengalami penurunan sedikit dengan nilai 8,91% lalu terjadi kenaikan dengan nilai hampir dua kali lipat pada sampel 4 yaitu sebesar 17,11%. Dari hasil pengujian tersebut, sampel 4 dengan komposisi 30% kertas, 60% ampas kopi, dan 10% perekat merupakan sampel briket yang paling rapuh,

sehingga sampel 4 merupakan sampel yang sangat tidak layak sebagai briket. Hal tersebut terjadi karena ampas kopi memiliki partikel yang lebih kecil dibanding kertas.

Tabel 1 menunjukkan standar SNI untuk nilai kalor, kadar air, kadar abu, dan *shatter index* yang dibandingkan dengan semua sampel. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sampel 3 dengan komposisi 40% ampas kopi memiliki nilai yang memenuhi standar SNI.

Tabel 1. Perbandingan Hasil Pengujian Karakteristik Briket

No	Nama Sampel	Nilai Kalor Kcal/kg	Kadar Air (%)	Kadar Abu (%)	Shatter Index (%)
1	Sampel 1	3.483	11,78	11,77	6,34
2	Sampel 2	5.219	8,63	3,79	9,07
3	Sampel 3	5.366	6,58	5,37	8,91
4	Sampel 4	5.605	5,68	8,65	17,11
5	Standar SNI 01-6235-2000	>5.000	<8	<8	-

## PENUTUP

### Kesimpulan

- Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin banyak komposisi kopi yang dipakai untuk membuat briket, maka semakin tinggi nilai kalor yang didapat hanya saja briket akan semakin rapuh. Sebaliknya, semakin tinggi kadar air yang terkandung pada briket maka semakin rendah nilai kalornya.
- Biobriket paling terbaik dan memenuhi standar mutu SNI adalah biobriket dengan komposisi 40 % ampas kopi dengan nilai kalor 5,366 kcal/kg, kadar air 6,58%, kadar

abu 5,37%, kadar volatile matter 28,28%, dan hasil shatter index 8,91%.

### Saran

Serbuk ampas kopi yang digunakan jangan melebihi 50% dari komposisi campuran briket karena partikel ampas kopi yang lebih kecil dibandingkan dengan kertas membuat briket menjadi rapuh dan mudah hancur. Meskipun dengan menambahkan serbuk ampas kopi dapat meningkatkan nilai kalor, kualitas fisik daripada briket tersebut juga perlu diperhatikan agar nilai jual briket tidak berkurang.

### DAFTAR PUSTAKA

- I. . S. dan I. M. Suartika, "Konversi Energi Biomassa Kotoran Sapi Melalui Rancangan Biodigester Untuk Rumah Tangga," *J. Log.*, vol. 17, no. 3, pp. 164–166, 2017.
- Y. Pan, R. A. Birdsey, O. L. Phillips, and R. B. Jackson, "The Structure, Distribution, and Biomass of the World's Forests," *Annu. Rev. Ecol. Evol. Syst.*, vol. 44, pp. 593–622, 2013, doi: 10.1146/annurev-ecolsys-110512-135914.
- I. Heriansyah, "Potensi Pengembangan Energi dari Biomassa Hutan di Indonesia," *Inovasi*, vol. 5/XVII, pp. 34–38, 2005.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, "Pasar Kertas Domestik Terbuka," Nov. 11, 2020.
- V. V. Sakhare and R. V. Ralegaonkar, "Use of Bio-briquette Ash for the Development of Bricks," *J. Clean. Prod.*, vol. 112, pp. 684–689, 2016, doi: 10.1016/j.jclepro.2015.07.088.
- A. Balraj, J. Krishnan, K. Selvarajan, and K. Sukumar, "Potential Use of Biomass and Coal-fine Waste for Making Briquette for Sustainable Energy and Environment," *Environ. Sci. Pollut. Res.*, no. 2008, 2020, doi: 10.1007/s11356-020-10312-2.
- Y. H. Lucky Budiawan, Bambang

- Susilo, "Pembuatan Dan Karakterisasi Briket Bioarang Dengan Variasi Komposisi Kulit Kopi," *J. Bioproses Komod. Trop.*, vol. 2, no. 2, pp. 152–160, 2014.
- [8] P. McKendry, "Energy Production from Biomass (part 1): Overview of Biomass," *Bioresour. Technol.*, vol. 83, no. 1, pp. 37–46, 2002, doi: 10.1016/S0960-8524(01)00118-3.
- [9] M. Nawawi, "Pengaruh Suhu dan Lama Pengeringan Terhadap Karakteristik Briket Arang Tempurung Kelapa," 2017.
- [10] X. Hu and M. Gholizadeh, "Biomass Pyrolysis: A Review of the Process Development and Challenges from Initial Researches up to the Commercialisation Stage," *J. Energy Chem.*, vol. 39, no. x, pp. 109–143, 2019, doi: 10.1016/j.jechem.2019.01.024.
- [11] H. Hindarso and A. L. Maukar, "Proses Konversi Biomassa menjadi Bioarang sebagai Bahan Bakar Alternatif," 2000.
- [12] Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, "Komposisi Sampah Nasional Berdasarkan Jenisnya," 2020.
- [13] D. M. Novita and E. Damanhuri, "Perhitungan Nilai Kalor Berdasarkan Komposisi dan Karakteristik Sampah Perkotaan di Indonesia dalam Konsep Waste To Energy," *J. Tek. Lingkung.*, vol. 16, no. 2, pp. 103–114, 2009.
- [14] A. Brunerová *et al.*, "Valorization of Bio-briquette Fuel by Using Spent Coffee Ground as an External Additive," *Energies*, vol. 13, no. 1, pp. 1–15, 2019, doi: 10.3390/en13010054.
- [15] Triono, "Karakteristik Briket Arang dari Campuran Serbuk Gergajian Kayu Afrika (*Maesopsis enrinii*) dan Sengon (*Paraserianthes falcutaria* L. Nielsen) dengan Penambahan Tempurung Kelapa (*Cocos nucifera* L.)," in *Skripsi: Fakultas Kehutanan IPB*, 2006.
- [16] A. Setiawan, O. Andrio, and P. Coniwanti, "Pengaruh Komposisi Pembuatan Biobriket dari Campuran Kulit Kacang dan Serbuk Gergaji Terhadap Nilai Pembakaran," *J. Tek. Kim.*, vol. 18, no. 2, pp. 9–16, 2012.
- [17] I. T. Sulistiana, "Uji Kalor Bakar Bahan Bakar Campuran Bioetanol Dan Minyak Goreng Bekas," *J. Neutrino*, vol. 3, no. 2, pp. 163–174, 2012, doi: 10.18860/neu.v0i0.1653.
- [18] M. E. Satmoko, D. D. Saputro, and A. Budiyono, "Karateristik Briket dari Limbah Pengolahan Kayu Sengon dengan Metode Cetak Panas," *J. Mech. Eng. Learn.*, vol. 2, no. 1, pp. 1408–1412, 2013.
- [19] N. V. Avelar, A. A. P. Rezende, A. de C. O. Carneiro, and C. M. Silva, "Evaluation of Briquettes Made from Textile Industry Solid Waste," *Renew. Energy*, vol. 91, pp. 417–424, 2016, doi: 10.1016/j.renene.2016.01.075.
- [20] D. Sumangat and W. Broto, "Kajian Teknis dan Ekonomis Pengolahan Briket Bungkil Biji Jarak Pagar Sebagai Bahan Bakar Tungku," *Bul. Teknol. Pasca Panen*, vol. 5, no. 1, pp. 18–26, 2016.
- [21] A. R. I. Kesuma, "Pemanfaatan Kertas Bekas dan Serbuk Kayu Menjadi Biobriket sebagai Energi Alternatif Ramah Lingkungan," 2017.
- [22] T. D. A. Putri, A. Setyaningrum, and P. Yuwono, "Pengaruh Jenis Dan Level Bahan Perekat Terhadap Laju Pembakaran Dan Drop Test Briket Bioarang Berbahan Feses Sapi Potong," *J. Anim. Sci. Technol.*, vol. 1, no. 3, pp. 274–280, 2019.
- [23] A. Saleh, L. Novianty, S. Murni, and A. Nurrahma, "Analisis Kualitas Briket Serbuk Gergaji Kayu Dengan Penambahan Tempurung Kelapa Sebagai Bahan Bakar Alternatif," *Al-Kimia*, vol. 5, no. 1, pp. 21–30, 2017, doi: 10.24252/al-kimia.v5i1.2845.
- [24] N. Binti Mohd Rani and P. Darul Ridzuan, "The Production of Briquette

- From Coffee Waste,” 2014.
- [25] Syahrums and Salim, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- [26] F. T. Bonner, “Measurement and Management of Tree Seed Moisture,” *Dep. Agric. For. Serv. Res.*, pp. 50–177, 1995.
- [27] R. Sunartaty and R. Yulia, “Pembuatan Abu Dan Karakteristik Kadar Air Dan Kadar Abu Dari Abu Pelepah Kelapa,” *Eksplor. Kekayaan Marit. Aceh di Era Glob. dalam Mewujudkan Indones. sebagai Poros Marit. Dunia*, vol. 1, pp. 560–562, 2017.
- [28] A. Gandhi B, “Pengaruh Varian Jumlah Campuran Perekat Terhadap Karakteristik Briket Arang Tongkol Jagung,” *J. Ilm. Pop. dan Teknol. Terap.*, vol. 8, no. 1, pp. 1–12, 2010.

DISEMINASI MEDIA PROMOSI KAMPUNG WISATA BALUWARTI GUNA  
MENINGKATKAN *BRAND IDENTITY* DESTINASI PARIWISATA BUDAYA KOTA  
SURAKARTA

Oleh

Nanang Wijayanto<sup>1)</sup>, Tomi Agfianto<sup>2)</sup>, Deria Adi Wijaya<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3</sup>Usaha Perjalanan Wisata, Universitas Sebelas Maret

E-mail: [nanang3upwuns@staff.uns.ac.id](mailto:nanang3upwuns@staff.uns.ac.id)

**Abstract**

This activity carried out an inventory of the right Baluwarti tourist attractions to be used as content in making promotional media, the right arrangement of interesting tourism activities followed by making promotional media and managing promotional media for one year and seeing the response of tourists visiting Baluwarti Tourism Village based on promotional media references. which has been published. Baluwarti Tourism Village with an attraction that offers, namely nuances that can be enjoyed by tourists, feel the atmosphere of living together with the culture of the palace, learn and process to be involved in the activities of the local community, tourists do not just see but are also involved in the cultural joints of the people in it Tourists can feel and fully enjoy the socio-cultural activities in the Baluwarti Tourism Village. From these activities the objectives to be achieved are: 1. Creating promotional media to promote community-based tourism and the culture contained therein. 2. Provide benefits to the community, to improve brand identity. 3. Can preserve culture and to avoid reduction and degradation of culture. In addition to these goals, there are also several benefits to be achieved, namely: 1. Play an active role in introducing and promoting tourism so that cultural preservation can be maintained as a national identity. 2. Excite the arts and culture to support the development of the Baluwarti Tourism Village as a Tourism Village. 3. To be able to maintain the nobility of culture, especially the sacred values of the palace, do not become profane passed down from generation to generation, so that harmony, welfare, and safety can be maintained. 4. Strengthening and using the right promotional media in order to increase Brand Identity will be able to increase the value of benefits for the people of the Baluwarti Tourism Village by increasing tourism activities, it will increase welfare for the community.

**Keywords: Dissemination, Promotional Media, Baluwarti Tourism Village, Brand Identity of Tourism Destinations.**

**PENDAHULUAN**

Pariwisata saat ini menjadi salah satu *trend* yang berkembang cukup pesat dan dianggap sebagai industri yang cukup menjanjikan, alasannya karena pariwisata memiliki banyak manfaat bagi masyarakat juga negara baik dari segi ekonomi, budaya, lingkungan, ilmu pengetahuan, dan lainnya. Tentang perkembangan industri pariwisata tidak lepas dari 3 hal dalam dunia pemasaran yakni: *Positioning-Differentiation-Branding*, tiga dasar itulah yang digunakan dalam sebuah promosi, termasuk dalam promosi destinasi

pariwisata (Kartajaya. 2007). Setelah mengetahui *Positioning* suatu destinasi (bagaimana suatu destinasi ingin dikenal atau diingat oleh konsumen), kemudian mengetahui *Differentiation* (pembeda suatu destinasi dari destinasi pesaing lainnya), yang perlu dilakukan selanjutnya adalah *Branding*. *Brand Identity* dapat menarik wisatawan membedakan suatu destinasi dengan destinasi lainnya. Kota Solo merupakan salah satu kota yang memiliki potensi wisata yang beragam dan unik sekaligus menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor andalannya khususnya pariwisata

budaya. Pengembangan dan pemberdayaan potensi wisata budaya di Kota Solo sebagai destinasi wisata yang menjanjikan dan potensi bagi pembangunan Kota Solo. Pengembangan pariwisata Kota Solo diarahkan pada pengembangan produk wisata budaya, pemasaran daya tarik wisata budaya, pembinaan dan pengembangan nilai-nilai budaya, pembinaan kesenian, peninggalan sejarah yang bertujuan untuk mengembangkan daya tarik wisata potensial sebagai daya tarik utama bagi wisatawan, hal ini menjadikan pariwisata sebagai sarana peningkatan pendapatan masyarakat, dan daerah, mampu menciptakan lapangan kerja.

Salah satu daya tarik yang berpotensi untuk dikembangkan adalah Kampung Wisata Baluwarti Kelurahan Baluwarti yang merupakan salah satu kampung yang terletak di Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Kampung ini memiliki keunikan dan daya tarik tersendiri yakni Adat istiadat Keraton Kasunanan Surakarta yang memiliki nilai luhur sehingga cocok untuk dikembangkan sebagai kampung Wisata. Tidak jauh halnya dengan Desa wisata, kampung wisata Baluwarti menawarkan pengalaman baru, hidup menyatu dengan aktivitas masyarakat setempat, sehingga wisatawan tidak hanya melihat performa kehidupan, tetapi dapat berpartisipasi di dalamnya. Wisatawan dapat merasakan dan menikmati aktifitas budaya yang dimiliki. Dengan keunikan yang memiliki daya tarik dalam aktifitas wisata maka perlu dikemas dilanjutkan dengan promosi dengan media yang tepat sesuai segmen pasar wisatawan yang berorientasi pada budaya.

Baluwarti berasal dari bahasa Portugis "*Baluarte*" yang berarti benteng, dalam bahasa Jawa artinya tembok istana. Baluwarti merupakan batas istana yang di dalamnya terdapat istana dan tempat tinggal raja beserta keluarganya (*sentana dalem*) serta *abdi dalem* terdekat dengan raja. Kawasan Baluwarti yang menjadi kajian penelitian merupakan pemukiman yang terletak di dalam tembok

benteng Kraton (*jeron benteng*), keberadaannya diantara benteng *Kedhaton* dengan benteng Baluwarti, tidak termasuk *Dalem Kraton*.

Dikaitkan dengan konsepsi kota Jawa masa lalu, Kampung Baluwarti dapat diartikan sebagai "*kutha*" Sala. Pengertian *kutha* dalam masyarakat Jawa bersifat simbolis, adalah suatu lingkungan pemukiman yang terletak di dalam tembok Benteng kediaman pemimpin daerah atau wilayah. Secara harafiah, *kutha* berarti daerah pemukiman yang dilindungi oleh dinding yang dibangun mengelilingi bentuk persegi (Wiryomartono, 1995).

Awal pembentukan Kampung Baluwarti bersamaan dengan berdirinya Kraton Kasunanan Surakarta. Sebagai ikutan keberadaan Kraton, lingkungan Baluwarti merupakan pemukiman yang sengaja dibuat untuk mendukung keberadaan Kraton, sekaligus menjadi area pertahanan Kraton. Oleh karena itu, keberadaan pemukiman di Baluwarti merupakan bagian dari satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Kraton Kasunanan Surakarta. Istilah Kraton, menunjukkan pada kediaman ratu atau raja (Darsiti, 1989). Dalam pemahaman tersebut, Kraton mempunyai beberapa pengertian, yakni: pertama, berarti negara atau kerajaan; kedua berarti pekarangan raja yang meliputi wilayah *cepuri*; ketiga berarti *cepuri* dengan alun-alun.

Kampung Baluwarti menjadi unik karena lingkungan rumah penduduknya berada di dalam tembok keraton dengan ukuran ketebalan 2 m dan tinggi 6 m, serta hampir semua bentuk bangunannya bercirikan arsitektur tradisional khas Baluwarti yang dipengaruhi arsitektur Jawa, Cina dan Eropa dengan pola ruang yang khas. Selain arsitekturnya, kampung Baluwarti juga masih memegang teguh dalam hal adat-istiadat, kebiasaan, tata cara dan budaya masyarakatnya. Lingkungan perumahan Kampung Baluwarti terdapat *regol* yang khas dengan tembok pembatas pekarangan. Dengan adanya tembok ini seolah-olah menyembunyikan rumah-rumah

di dalamnya, menghalangi pandangan keluar bagi penghuninya

Kekhasan ini yang menjadikan lingkungan perumahan yang berada di Baluwarti masuk dalam kawasan cagar budaya yang ada di Kota Solo, dan sekaligus merupakan peninggalan yang bernilai sejarah.

Luas dan Pembagian Wilayah Kampung Baluwarti, Secara administratif, wilayah Kampung Baluwarti merupakan kawasan sebuah Kelurahan (Kelurahan Baluwarti). Luas wilayah  $\pm$  40,70 Ha, mencakup lima kampung, yakni Kampung Gambuhan, Hordenasan, Wirengan, Carangan, dan Tamtaman. Kelurahan Baluwarti tersebut terbagi dalam 12 Rukun Warga (RW) dan 38 RT, dengan jumlah penduduk sebanyak 7.478 jiwa (laporan Monografi Maret 2015)

Bentuk dan Struktur Lingkungan Pemukiman Baluwarti. Struktur lingkungan pemukiman di Kampung Baluwarti terbentuk oleh unsur-unsur kawasan pemukiman berdasarkan pengelompokan kegiatan dan fungsi pemukiman. Hal tersebut terkait karena peran penghuninya secara historis. Pengelompokan lingkungan pemukiman di Kampung Baluwarti lebih lanjut dibedakan menjadi dua kawasan, berdasarkan status penghuninya; kawasan hunian bangsawanan dan kawasan hunian abdidalem.

#### **METODE PENELITIAN**

Pelaksanaan kegiatan dalam pengabdian kepada masyarakat ini, sebagai hilirisasi dari kegiatan penelitian sebelumnya yang bahwasanya kampung wisata Baluwarti memiliki potensi wisata yang dapat menjadi brand wisata budaya kota solo, perlu didukung media promosi yang tepat dan berkelanjutan, dalam prosesnya melalui beberapa tahapan secara garis besar digambarkan sebagai berikut :

1. Koordinasi dengan mitra untuk menentukan potensi budaya yang dapat menjadi daya tarik wisata yang dapat dikemas sebagai program wisata

budaya terdapat di Kampung Baluwarti sekaligus sebagai media promosi.

1. Diskusi penentuan potensi wisata sebagai bahan konten media promosi yang sesuai dengan keunggulan produk wisata sebagai kegiatan wisata budaya yang dapat dilaksanakan di Baluwarti.
2. Menyusun dan menentukan skenario pengambilan video sebagai konten promosi yang tepat sehingga sesuai dengan daya tarik wisata Baluwarti dan segmentasi wisatawan.
3. Menentukan media promosi yang teapt sesuai dengan segmentasi media yang dapat diterima oleh berbagai segmentasi wisatawan khususnya wisatawan yang tertarik pada budaya.
4. Mengelola media promosi yang telah di tentukan yakni youtube dan Instagram dengan melihat respon dari viewer serta tindak lanjut kunjungan wisatawan ke Baluwarti sesuai dengan program wisata yang ditawarkan dan di promosikan.

Dalam hal ini mitra terlibat dalam memberikan arahan dan gambaran potensi wisata yang ada di Kampung Baluwari, sehingga potensi tersebut akan dikemas menjadi program wisata sebagai bagian program wisata budaya sekaligus bagian dari konten media promosi sesuai dengan segmentasi pasar wisatawan, khususnya adalah segmentasi wisatawan yang tertarik dengan budaya. Dalam satu tahun dengan konten promosi yang dikelola oleh tim pengabdian, akan melihat viewer dan wisatawan yang berkunjung, apakah ada peningkatan dari wisatawan atau tidak, sehingga dengan kondisi tersebut akan ada evaluasi, perbaikan dan peningkatan untuk mencapai hasil yang optimal dalam mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke Kampung Baluwarti sesuai dengan media promosi yang dipublikasikan ke masyarakat dengan media yang tepat khususnya adalah media sosial

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Media Promosi Kampung Wisata Baluwarti

Kampung Wisata Baluwarti dengan wisata budaya sebagai unggulannya, perlu didukung dengan sumber daya manusia (SDM), strategi, media promosi agar menjadi wisata budaya unggulan sebagai *brand identity* pariwisata kota solo. Selama ini Kampung Wisata Baluwarti menerapkan pemasaran *gethok tular* (*word of mouth*) dari wisatawan wisatawan yang pernah berkunjung ke Baluwarti sebelumnya dan memanfaatkan media sosial, rekan media cetak. Pada pelaksanaan promosi perlu di dukung dengan media yang selalu *up to date* serta kekinian dan mudah diakses berbagai segmentasi wisatawan sehingga menarik perhatian *viewer*, hingga tertarik untuk berkunjung secara langsung untuk menikmati program wisata budaya yang ditawarkan oleh kampung wisata Baluwarti

Konten media promosi yang dapat diposting pada media sosial yang mempunyai segala macam fitur, sehingga memudahkan pengguna berbagi foto dan video dengan pengguna lainnya. Melalui media sosial pengelola kampung wisata Baluwarti dapat membagikan konten media promosi dengan postingan ke akun media sosial yang dimilikinya atau kepada sesama pengguna media sosial lain sehingga dapat memperluas sebuah informasi. Pengelola juga dapat memposting sebuah konten dengan menambahkan lokasi tempat diambilnya postingan tersebut menggunakan fitur *geotag*.

Kampung wisata Baluwarti memiliki media sosial berupa Instagram bisnis, Youtube, sehingga untuk penguatan media tersebut pada pelaksanaan pengabdian masyarakat program studi D3 Usaha Perjalanan Wisata membuat konten promosi wisata untuk penguatan *brand identity* wisata budaya. Penguatan kampung wisata baluwarti untuk menarik dikunjungi oleh wisatawan dengan mengangkat, mengelola dan mengemas wisata budaya sekaligus memiliki

muatan edukasi dapat mendorong pelestarian wisata budaya yang ada di Baluwarti sekaligus mampu memberikan kontribusi kesejahteraan kepada masyarakat Baluwarti.

### Media branding

Perkembangan era digital mendorong semua industri baik barang maupun jasa untuk berbenah dalam membangun *persona brand*-nya melalui promosi dengan memanfaatkan media sosial, hal ini juga termasuk kampung wisata Baluwarti. Pesan secara harfiah maupun literal yang disampaikan berpengaruh besar dalam *branding* wisata budaya. Dengan menentukan *caption* atau deskripsi yang tepat dari konten promosi dan media yang tepat mampu meningkatkan *brand identity* wisata budaya. Oleh karena itu konten media promosi harus selaras dengan produk wisata budaya kampung wisata Baluwarti.

### Meningkatkan komunikasi dengan wisatawan

Kebutuhan komunikasi dan informasi merupakan menjadi alasan mayoritas orang untuk menggunakan media sosial hamper setiap saat. Hal ini peluang besar setiap produk baik barang maupun jasa untuk memunculkan brandnya. Media bukan sekedar hubungan antar personal tetapi jagan mampu membawa yang lebih luas khususnya pada industry wisata termasuk yang berbasis budaya dan dikelola oleh masyarakat. media promosi khususnya media social lebih cepat memperoleh respon dari wisatawan terkait pertanyaan, komplain, maupun apresiasi dari wisatawan. Media promosi yang terkelola dengan baik, didukung dengan konten promosi yang relevan akan meningkatkan branding yang lebih luas dalam hal ini kampung wisata Baluwarti sebagai brand identity wisata budaya kota Solo.

### Meningkatkan kunjungan wisatawan

Memanfaatkan peningkatan pengguna media sosial sebagai peluang besar untuk secara langsung mengenalkan program wisata budaya kampung wisata Baluwarti, sebelum wisatawan berkunjung ke daerah tujuan wisata, hal pertama yang dilakukan adalah mencari



informasi atau mereview program wisata yang ditawarkan oleh pengelola daya tarik wisata, yang dapat dilihat lewat media sosial kampung wisata Baluwarti. Memanfaatkan media sosial tidak sekedar untuk berinteraksi secara personal, tetapi juga efektif untuk digunakan sebagai media promosi untuk meningkatkan brand identity wisata budaya kota Solo. Media promosi yang tepat mampu membangun hubungan antara pengelola kampung wisata Baluwarti dengan wisatawan jadi lebih mudah. Kemudahan dan banyaknya pilihan media promosi dapat dimanfaatkan dengan membuat konten media promosi pariwisata yang berkualitas, efektif, dan sesuai dengan segmentasi wisatawananya.

### **Pembuatan Konten Media Promosi**

Pelaksanaan pembuatan konten sebagai media promosi melibatkan pihak pengelola kampung wisata Baluwarti sebagai pemilik potensi yang menarik untuk dikelola dan dikemas dalam produk wisata berbasis edukasi budaya, dengan berkerjasama dengan penggiat media sosial dan pembuat konten yang cukup kometen dibidangnya.



Dokumentasi Tim Pengabdian D3 UPW SV UNS 2021

### **Menentukan tema konten promosi**

Tim pengabdian menentukan latar belakang dari pembuatan konten media promosi kampung wisata Baluwarti sebagai *brand identity* wisata budaya kota Solo, dengan potensi budaya serta nilai sejarah yang menarik, kekayaan budaya Baluwarti menyimpan nilai-nilai budaya luhur yang dapat dikemas sebagai

wisata budaya, pengemasan dan media promosi yang tepat membuat banyak wisatawan yang tertarik untuk berkunjung menikmati dengan terlibat langsung dengan aktifitas wisata budaya yang ditawarkan oleh kampung wisata Baluwarti. Dalam menentukan tema konten promosi tim kolaborasi dengan mitra dan tim kreator. Sangat penting kesesuaian konten, media promosi dengan potensi yang ada menjadikan lebih menarik mudah dipahami, mencerminkan kondisi sesungguhnya di Baluwarti, menghindari kondisi yang tidak sebenarnya sehingga akan lebih meminimalisir hal yang dapat menjadikan wisatawan merasa tidak puas karena ketidaksesuaian antara kondisi real dengan yang di promosikan.

### **Menentukan media promosi**

Media promosi sesuai dengan segmentasi wisatawan yang menjadi target untuk dapat berkunjung ke Baluwarti, dalam pelaksanaannya dipilih media yang dapat diakses oleh setiap orang yang menggunakan gadget dapat mengakses darimanapun, kapanpun. Pengguna media sosial yang cukup tinggi, maka media yang dipilih adalah media sosial seperti Youtube, Instagram, facebook yang dimiliki oleh kampung wisata Baluwarti, dengan tingkat viewer yang paling banyak adalah di media youtube karena lebih support memuat konten promosi dengan durasi 8 menit 14 detik telah disaksikan sebanyak 1,1 ribu penonton.



Kampung Wisata Budaya Baluwarti SOLO  
 1,1 rb x ditonton · 7 bin lalu BALUWARTI

### **PENUTUP** **Kesimpulan**

Konten media promosi dengan menggunakan aplikasi Instagram, Facebook dan juga Youtube merupakan langkah konkrit dalam mengelola dan mengenalkan wisata budaya untuk menarik wisatawan sekaligus branding dan pelestarian potensi budaya yang dapat memberi nilai tambah pada kesejahteraan masyarakat kampung wisata Baluwarti. Promosi pada Instagram dilakukan dengan *Daily posting*, *Social Media Advertising* Sedangkan di akun Youtube kampung wisata Baluwarti memposting video konten promosi yang telah dibuat pada agenda pengabdian ini.

Perlu adanya kesinambungan dalam membuat konten promosi dan kesiapan pengelola untuk tetap berinovasi sehingga ketika ada permintaan dari wisatawan dapat siap untuk mengakomodir kegiatan wisata budaya yang ada di kampung wisata Baluwarti.

- [8] Positioning, Diferensiasi Dan Brand, Bandung: Mizan Pustaka, 2007. Kartajaya
- [9] Santosa, I. (2007). Kajian Estetika dan Unsur Pendukungnya pada Keraton Surakarta. *ITB Journal of Visual Art and Design*, 1(1), 108–127. <https://doi.org/10.5614/itbj.vad.2007.1.1.8>
- [10] Soeroso, A., & Susuilo, Y. S. (2008). Strategi konservasi kebudayaan lokal yogyakarta. *Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan*, 1(2), 144–161.
- [11] Soekardjo, RG, “*Anatomi Pariwisata*”, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bagoes P. Wiryomartono. Gramedia Pustaka Utama, 1995 - Architecture - 201
- [2] BLH. 2016. Laporan Akhir Perencanaan Penyusunan Masterplan Hutan Wisata Mangrove Dukuh Kaliuntu Desa Pasarbanggi. Rembang
- [3] BPS Kota Solo. 2019. Kota Surakarta Dalam Angka 2019. BPS Surakarta
- [4] Bungin, Burhan. (2015). *Komunikasi Pariwisata (Pemasaran Dan Brand Destinasi)*. Cetakan ke-1. Jakarta: Prenadamedia Group.
- [5] Darsiti, (1989). Kehidupan Dunia Keraton Surakarta 1830-1939, Taman Siswa, Yogyakarta Teknik Arsitektur, Vol. 33, No. 1, Desember 2005: 112 – 124 Soeratman, Darsiti, (1989). Kehidupan Dunia Keraton Surakarta 1830-1939, Taman Siswa, Yogyakarta
- [6] Gunardi, G. (2010). Identifikasi Potensi Kawasan Wisata Kali Pasir, Kota Tangerang. *Planesa*, 1(1), 28–35.
- [7] Lukito Kartono, J. (2005). Konsep Ruang Tradisional Jawa dalam Konteks Budaya. *Dimensi Interior*, 3(2), 124–136.

FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KELUHAN GANGGUAN  
PERNAFASAN PADA PEKERJA BATU BATA DI DESA TALANG BELIDO  
KECAMATAN SUNGAI DELAM KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2021

Oleh

Muhammad Ainurrazaq<sup>1)</sup>, Abul Ainin Hapis<sup>2)</sup>, Hamdani<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Harapa Ibu Jambi

E-mail: [muhhamdainurrazaq@gmail.com](mailto:muhhamdainurrazaq@gmail.com)

**Abstract**

*Brick workers are one of the workers who are at risk of experiencing respiratory problems. This is due to exposure to dust generated during the combustion process. Talang Belido Village is the center of brick business in Sungai Gelam District. Based on the initial survey, 60% of eye stone workers in Talang Belido Village have respiratory problems. The purpose of the study was to determine the factors associated with respiratory complaints in brick workers. The research design used a cross sectional design. The research sample is 50 brick workers in Talang Belido Village. The sampling technique used was total sampling technique. This research was conducted in August 2021 in Talang Belido Village. The research instrument is a questionnaire. Data collection techniques by means of interviews and observations. Data were analyzed by univariate and bivariate using chi square test. As many as 63.2% of respondents have complaints of respiratory problems, 57.9% of respondents have long working periods, 52.6% of respondents work with risky length of work, 52.6% of respondents do not use PPE and 63.2% of respondents smoke. Bivariate results showed that there was a relationship between years of service ( $p=0.000$ ), length of work ( $p=0.001$ ), use of PPE ( $p=0.000$ ) and smoking habits ( $p=0.000$ ) with complaints of respiratory problems among brick workers in Talang Belido Village. . It is expected that brick workers always use PPE at work, reduce the number of cigarettes they consume, work according to working hours..*

**Keywords: Lung Function Disorders, Working Period, Length of Work, Personal Protective Equipment, Smoking**

**PENDAHULUAN**

Penyakit akibat kerja (PAK) merupakan penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan atau lingkungan kerja (PP RI No 7, 2019). Penyakit akibat kerja terjadi akibat pajanan faktor fisik, kimia, biologi, ataupun psikologi pada tempat kerja. Data International Labour Organization (ILO) tahun 2018 menyebutkan bahwa terdapat 270 juta pekerja mengalami kecelakaan akibat kerja setiap tahunnya dan 160 juta terkena penyakit akibat kerja. Angka kematian akibat kerja di Dunia setiap tahunnya sebesar 2,78 juta. Di kawasan Asia dan Pasifik sendiri terdapat 1,8 juta kematian akibat kerja terjadi setiap tahunnya. Bahkan dua pertiga

kematian akibat kerja di Dunia terjadi di Asia (ILO, 2018).

Data ILO mengungkapkan bahwa penyebab kematian yang berhubungan dengan pekerja sebesar 34% akibat penyakit kanker, 25% akibat kecelakaan, 21% penyakit saluran pernafasan, 15% penyakit kardiovaskuler dan 5% disebabkan oleh faktor lain. Kematian pekerja akibat saluran pernafasan menempati urutan ke 3 setelah kecelakaan kerja (ILO, 2018). Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal PPM & PL, di Indonesia Penyakit Paru-paru *Obstructive Kronis* (PPOK) menempati urutan pertama penyumbang angka kesakitan (35%), diikuti dengan *asma*

*bronchial* (33%), kanker paru-paru (30%), dan lainnya (2%) (Yulianto, Sahira, & Putra, 2021).

Penyakit pada saluran pernafasan merupakan salah satu penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh paparan debu pada lingkungan tempat kerja (Suma'mur, 2009). Salah satu faktor kimia yang sering terdapat dan berbahaya di tempat kerja adalah debu. Berdasarkan Permenakertrans RI No.13 tahun 2011 mengenai Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Kimia di tempat kerja bahwa kadar debu maksimal di tempat kerja ialah 3 mg/m<sup>3</sup> (Corwin, 2016).

Industri batu bata merupakan salah satu industri yang menghasilkan kadar debu yang dapat berdampak pada gangguan pernafasan karena seperti yang kita ketahui bahwa salah satu sumber debu adalah proses pembakaran dengan suhu tinggi dan debu bersifat racun, terutama terhadap paru-paru. Lingkungan kerja yang penuh oleh debu, uap, gas dan lainnya yang disatu pihak mengganggu produktifitas dan mengganggu kesehatan dipihak lain. Hal ini sering menyebabkan gangguan pernafasan ataupun dapat mengganggu kapasitas vital paru (Dewi, 2015). Sistem pernafasan manusia apabila sering terpapar debu akan mengakibatkan penyakit seperti asma, bronchitis, pneumonia, peradangan lainnya, asfiksi dan sebagainya (Setiadi, 2012).

Hasil penelitian (Siregar, 2020) yang menyebutkan bahwa paparan debu batu bata merah menyebabkan 76,5% pekerja mengalami gangguan pernafasan dan 23,5% tidak mengalami gangguan pernafasan. Hasil penelitian (Yulianto et al., 2021) menunjukkan pekerja batu bata mengalami gangguan pernafasan sebesar 87,1% dan yang tidak mengalami gangguan pernafasan sebesar 12,9%.

Gangguan pernafasan atau fungsi paru pada pekerja dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut antara lain lingkungan kerja yang banyak menghasilkan debu, uap, gas dan lainnya, riwayat penyakit, lama kerja/lama paparan, masa kerja (Suma'mur, 2009). Selain

faktor tersebut, faktor lain adalah penggunaan APD Masker, jenis kelamin, kebiasaan merokok (Tarwaka, 2014).

Desa Talang Belido merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Sungai Gelam sebagai produsen batu bata paling tinggi. Letaknya yang dekat dengan Kota Jambi menyebabkan tingginya konsumen batu bata, karena sebagian besar konsumen batu bata dari Kota Jambi memesan batu bata dari Desa Talang Belido. Jumlah produsen batu bata di Desa Talang Belido sebanyak 14 unit dengan jumlah pekerja sebanyak 90 orang.

Hasil survei awal menunjukkan bahwa sebanyak 4 orang tidak mengalami gangguan pernafasan dan 6 mengalami keluhan gangguan pernafasan seperti batuk, sesak dan hidung tersumbat sekaligus bahkan ada yang merasakan nyeri dada. Keluhan yang paling sering dirasakan oleh pekerja adalah batuk-batuk dan sesak nafas selama bekerja. Sebanyak 7 orang bekerja > 8 jam/hari. 6 orang memiliki masa kerja > 5 tahun. Terdapat 3 orang menggunakan masker, dan 2 orang menggunakan baju untuk menutup hidung, serta 5 orang tidak menggunakan masker. Pekerja yang tidak menggunakan masker dikarenakan tidak nyaman saat bekerja, muka terasa panas dan memakai masker malah menghambat pekerjaan.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan keluhan pernafasan pada pekerja batu bata.

#### **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan *cross sectional* yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan keluhan gangguan pernafasan pada pekerja batu bata di Desa Talang Belido Kecamatan Sungai Gelam Tahun 2021. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pekerja batu bata yang ada di Desa Talang Belido. Sampel penelitian adalah pekerja batu bata yang ada di Desa Talang Belido sebanyak 50 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan *teknik total sampling*.

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 22 s/d 30 Agustus 2021 di Desa Talang Belido. Instrumen penelitian adalah kuesioner. Teknik pengambilan data dengan cara wawancara dan observasi. Data dianalisis secara univariat dan bivariat dengan menggunakan uji *chi square*.

## HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 63,2% responden ada keluhan gangguan pernafasan, 57,9% responden memiliki masa kerja lama, 52,6% responden bekerja dengan lama kerja berisiko, 52,6% responden tidak menggunakan APD dan 63,2% responden merokok (Tabel 1).

Hasil bivariat menunjukkan bahwa ada hubungan antara masa kerja ( $p=0,000$ ), lama kerja ( $p=0,001$ ), penggunaan APD ( $p=0,000$ ) dan kebiasaan merokok ( $p=0,000$ ) dengan keluhan gangguan pernafasan pada pekerja batu bata di Desa Talang Belido (Tabel 2).

Tabel 1. Gambaran Masa Kerja, Lama Kerja, Penggunaan APD, kebiasaan merokok, Keluhan Gangguan Pernafasan

Variabel	Jumlah	%
<b>Gangguan Pernafasan</b>		
Ada keluhan	24	63,2
Tidak ada keluhan	14	36,8
<b>Masa Kerja</b>		
Lama (> 5 tahun)	22	57,9
Baru (< 5 tahun)	16	42,1
<b>Lama Kerja</b>		
Berisiko (>8 jam)	20	52,6
Tidak Berisiko (< 8 jam)	18	47,4
<b>Penggunaan APD</b>		
Tidak Menggunakan	20	52,6
Menggunakan	18	47,4
<b>Kebiasaan Merokok</b>		
Merokok	24	63,2
Tidak Merokok	14	36,8

Tabel 2 Hubungan Masa Kerja, Lama Kerja, Penggunaan APD, kebiasaan merokok dengan Keluhan Gangguan Pernafasan

Variabel	Gangguan Pernafasan				Total		p-value
	Ada keluhan		Tidak ada		n	%	
	n	%	n	%	n	%	
<b>Masa Kerja</b>							
Lama	20	90,9	2	9,1	22	100,0	0,000
Baru	4	25,0	12	75,0	16	100,0	
<b>Lama Kerja</b>							
Berisiko	18	90,0	2	10,0	20	100,0	0,001
Tidak Berisiko	6	33,3	12	66,7	18	100,0	
<b>Penggunaan APD</b>							
Tidak Menggunakan	20	100,0	0	0,0	20	100,0	0,000
Menggunakan	4	22,2	14	77,8	18	100,0	
<b>Kebiasaan Merokok</b>							
Merokok	22	91,7	2	8,3	24	100,0	0,013
Tidak Merokok	2	14,3	12	85,7	14	100,0	

## PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh  $p$ -value=0,000 sehingga ada hubungan antara masa kerja dengan keluhan gangguan pernafasan pada pekerja batu bata di Desa Talang Belido Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Putra & Afrian, 2017) pada pekerja batu bata menunjukkan bahwa ada hubungan antara masa kerja dengan gejala penyakit ISPA pada pekerja pabrik batu bata manggis ganteng Bukittinggi ( $p$ -value=0,026). Hasil penelitian (Abrihari, Suwarni, & Sudaryanto, 2014) pada pekerja industri batu bata menunjukkan bahwa ada hubungan antara masa kerja dengan gejala subjektif pneumokoniosis ( $p$ -value=0,008).

Kerja fisik apalagi kerja yang berat dan momoton yang dilakukan di tempat-tempat berdebu dalam waktu yang lama tanpa disertai dengan rotasi kerja, istirahat, dan rekreasi yang cukup, akan berakibat terjadinya penurunan kapasitas paru dari tenaga kerja. Semakin lama seseorang bekerja di suatu daerah berdebu maka kapasitas paru seseorang akan semakin menurun sehingga akan mengalami gangguan pernafasan (Suma'mur, 2009). Pada pekerja yang berada dilingkungan dengan kadar debu tinggi dalam waktu lama memiliki risiko tinggi terkena penyakit paru obstruktif (Tarwaka, 2014).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara masa kerja dengan keluhan gangguan pernafasan pada pekerja batu bata di Desa Talang Belido, pekerja bangsal batu bata memiliki masa kerja > 5 tahun sehingga semakin lama masa kerja semakin banyak terpapar olehdebu dan asap pembakaran batu bata. Para pekerja dapat terpapar cemaran lingkungan kerja sejak pertama kali bekerja, yang dalam hal ini terdapat faktor bahaya cemaran kimia asap dan debu, sehingga dengan kata lain masa kerja akan berhubungan dengan proses masuknya cemaran udara tersebut ke dalam sistem pernafasan. Dampak cemaran tersebut khususnya partikel debu yang

mengendap di paru dapat terakumulasi tergantung lama kerja dari para pekerja dan jumlah cecaran yang dihasilkan setiap harinya, serta tergantung pada upaya para pekerja untuk menetralkan racun dan partikel yang masuk dalam tubuh tersebut. Pada tenaga kerja, masa kerja yang lama pada lingkungan kerja berdebu menyebabkan semakin banyak partikel debu yang terhirup sehingga dalam hal ini dapat mengakibatkan *pneumokoniosis*, dengan gejala-gejala seperti batuk kering, sesak napas, dan kelelahan.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh  $p\text{-value}=0,001$  sehingga ada hubungan antara lama kerja dengan keluhan gangguan pernafasan pada pekerja batu bata di Desa Talang Belido Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Siregar, 2020) pada pekerja batu bata di Jati Baru yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara lama kerja dengan gangguan pernafasan pada pekerja pembuatan batu bata di Jati Baru ( $p\text{-value}=0,004$ ). Hasil penelitian (Helmy, 2019) menunjukkan bahwa ada hubungan antara lama paparan dengan status faal paru dengan nilai  $p\text{-value}=0,013$ .

Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan antara lama kerja dengan keluhan gangguan pernafasan pada pekerja batu bata di Desa Talang Belido, semakin lama pekerja terpapar oleh paparan akan semakin memperbesar risiko terjadinya gangguan fungsi paru. Lama kerja mengakibatkan berbedanya intensitas pajanan dan banyaknya debu yang terhirup oleh masing-masing pekerja bangsal batu bata, sehingga pekerja yang cukup lama terlibat dalam aktivitas pekerjaannya, berpotensi menghirup debu lebih banyak jika dibandingkan dengan pekerja bangsal batu bata yang tidak lama terlibat dalam aktivitas pekerjaannya, pekerja yang bekerja > 8 jam/hari dan tidak memiliki keluhan pernafasan dikarenakan pekerja selalu memperhatikan keamanan pada saat bekerja dan sudah terbiasa menggunakan masker pada saat bekerja.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh  $p\text{-value}=0,000$  sehingga ada hubungan antara penggunaan APD dengan keluhan gangguan pernafasan pada pekerja batu bata di Desa Talang Belido Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Putra & Afrian, 2017) pada pekerja batu bata menunjukkan bahwa ada hubungan antara penggunaan masker dengan gejala penyakit ISPA pada pekerja pabrik Batu Bata Manggis Gantiang Bukittinggi ( $p\text{-value}=0,002$ ). Hasil penelitian (Abrihari et al., 2014) menunjukkan bahwa ada hubungan antara penggunaan APD dengan gejala subjektif pneumokoniosis pada pekerja industri batu bata di Desa Sitimulyo, Piyungan, Bantul ( $p\text{-value}=0,010$ ). Berdasarkan hasil penelitian (Windari, 2016) terdapat hubungan antara penggunaan masker dengan terjadinya gangguan fungsi paru. Pemakaian masker oleh pekerja industri yang udaranya banyak mengandung debu, merupakan upaya mengurangi masuknya partikel debu kedalam saluran pernapasan. Walaupun demikian, tidak ada jaminan bahwa dengan mengenakan masker, seorang pekerja di industri akan terhindar dari kemungkinan terjadinya gangguan pernafasan.

Alat pelindung diri adalah suatu alat yang melindungi diri dan tubuh terhadap bahaya-bahaya kecelakaan kerja untuk mengurangi tingkat keparahan dari kecelakaan yang terjadi. Pemakaian alat pelindung diri (masker) oleh pekerja ditempat kerja yang udaranya banyak mengandung debu, merupakan upaya mengurangi masuknya partikel debu kedalam saluran pernapasan (Tarwaka, 2014).

Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan antara penggunaan APD dengan keluhan pernafasan pada pekerja batu bata di Desa Talang Belido, alasan pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri yaitu bahwa mereka merasa tidak nyaman bekerja dengan penutup mulut/masker, ini menunjukkan minimnya perhatian dan pengetahuan terhadap

risiko pekerjaan, dimana pekerja lebih mementingkan kenyamanan dibanding keamanan bekerja.

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa pekerja yang memakai APD pada saat bekerja dan mengalami kejadian ISPA dikarenakan dalam pemeliharaan alat pelindung diri pun pekerja tidak pernah mengganti dan jarang mencuci kain yang dialih fungsikan sebagai masker dikarenakan pekerja merasa bahwa masker yang digunakan masih layakpakai dan belum terlalu kotor, padahal masker yang tidak pernah dicuci mengandung debu yang dapat dihirup oleh pekerja pada saat memakainya, Dan pekerja yang tidak memakai Alat Pelindung diri dan tidak mengalami kejadian keluhan pernafasan dikarenakan pekerja pada saat pembakaran batu bata berlangsung pekerja tidak menunggu ditempat pembakaran, oleh sebab itu asap yang dihirup oleh pekerja tidak terlalu banyak.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh  $p$ -value=0,000 sehingga ada hubungan antara kebiasaan merokok dengan keluhan gangguan pernafasan pada pekerja batu bata di Desa Talang Belido Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Putra & Afrian, 2017) pada pekerja pabrik batu bata menunjukkan bahwa ada hubungan antara kebiasaan merokok dengan gejala penyakit ISPA pada pekerja batu bata ( $p$ -value=0,031). Hasil penelitian (Lantong, Asfian, & Erawan, 2016) menunjukkan bahwa ada hubungan antara kebiasaan merokok dengan kejadian ISPA pada pekerja penggilingan padi ( $p$ -value=0,001). Berdasarkan hasil penelitian (Windari, 2016) terdapat hubungan antara kebiasaan merokok dengan terjadinya gangguan fungsi paru ( $p$ -value=0,024).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara kebiasaan merokok dengan keluhan gangguan pernafasan pada pekerja batu bata di Desa Talang Belido, kebiasaan merokok para pekerja dilakukan sebelum mereka bekerja

dan saat bekerja. Kebiasaan merokok sulit dihilangkan para pekerja karena mereka merasa sudah kecanduan dan membuat mereka lebih nyaman melakukan pekerjaannya. Didalam pembakaran batu bata tersebut larangan merokok tidak ada untuk pekerjanya, jadi para pekerja dengan bebas merokok meskipun saat bekerja.

Dari keterangan diatas diketahui bahwa kebiasaan merokok dengan kategori berat dan tidak mengalami keluhan pernafasan dikarenakan pekerja tidak pernah memeriksakan diri ke pelayanan kesehatan dan mengabaikan pada saat pekerja mengalami keluhan seperti demam, batuk, pilek dan sering nyeri tenggorokan, dan pekerja yang memiliki kebiasaan merokok ringan tapi menderita keluhan pernafasan ini di karenakan pekerja berada dalam lingkungan kerja dimana sebagian besar pekerjanya merokok, asap rokok yang di keluarkan oleh perokok dapat menyebabkan toksik pada orang disekitarnya di tambah lagi tempat kerja sangat berdebu, berasap dan kurangnya penggunaan APD Masker.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor yang berhubungan dengan keluhan gangguan pernafasan pada pekerja batu bata adalah masa kerja, lama kerja, penggunaan APD dan kebiasaan merokok.

Diharapkan kepada pekerja batu bata untuk mengawasi proses pembakaran secara bergantian dengan pekerja yang lain sehingga dapat meminimalisir paparan debu. Selalu memperhatikan keselamatan kerja dengan menggunakan masker sebagai alat pelindung diri atau penutup hidung agar debu tidak langsung terhirup ke dalam saluran pernafasan. mengurangi kebiasaan merokok sehingga dapat mencegah gangguan pernafasan.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abrihari, O., Suwarni, A., & Sudaryanto, S. (2014). Hubungan Kadar Debu

- Lingkungan Kerja, Masa Kerja dan Penggunaan Alat Pelindung Diri dengan gejala Subjektif Pneumokoniosis Pada Pekerja Industri Batu Bata di Desa Sitimulyo, Piyungan, Bantul. *Sanitasi, Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 5(3), 109–115.
- [2] Corwin, E. J. (2016). *Buku Saku Patofisiologi Edisi 3*. Jakarta: EGC.
- [3] Dewi, Y. P. (2015). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Fungsi Paru pada Pekerja Pembuat Batu Bata di Kelurahan penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Semarang Tahun 2015. *Artikel Penelitian: Universitas Dian Nuswantoro*, 1–12.
- [4] Helmy, R. (2019). Hubungan Paparan Debu dan karakteristik Individu dengan status Faal Paru Pedagang di Sekitar Kawasan Industri Gresik. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 11(2).
- [5] ILO. (2018). *Meningkatkan Keselamatan dan Kesehatan Pekerja Muda*. Jakarta: ILO.
- [6] Lantong, J. F., Asfian, P., & Erawan, P. E. M. (2016). Faktor Yang Berhubungan dengan Kejadian ISPA Pada Pekerja Penggilingan Padi Di Desa Wononggrere Kecamatan Polinggona Kabupaten Kolaka Tahun 2016. *JIMKESMAS*, 2(6), 1–6.
- [7] PP RI No 7. (2019). *Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 2019 Tentang Penyakit Akibat Kerja*. Jakarta.
- [8] Putra, B. H., & Afrian, R. (2017). Kajian Hubungan Masa Kerja, pengetahuan, Kebiasaan Merokok, dan Penggunaan Masker dengan Gejala Penyakit ISPA pada Pekerja Pabrik Batu Bata Manggis Gantiang Bukittinggi. *Human Care Journal*, 2(2), 48–54.
- [9] Setiadi, B. (2012). *Anatomi Tubuh Manusia*. Jakarta: Laskar Aksara.
- [10] Siregar, W. W. (2020). Hubungan Paparan Debu dengan Gangguan Pernafasan Pada Pekerja Pembuatan Batu Bata di Jati Baru. *Jurnal Kesehatan Masyarakat & Gizi*, 3(1), 81–90.
- [11] Suma'mur, P. K. (2009). *Higiene Perusahaan dan Keselamatan Kerja*. Jakarta: Sagung Seto.
- [12] Tarwaka. (2014). *Keselamatan dan Kesehatan Kerja: Manajemen dan Implementasi K3 di Tempat Kerja*. Surakarta: Harapan Press.
- [13] Windari, D. (2016). *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Gangguan Fungsi Paru pada Pekerja Bagian Refinery di PT. Antam Tbk UBPN Sultra Tahun 2016*. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo.
- [14] Yulianto, B., Sahira, N., & Putra, Z. W. (2021). Gangguan Pernapasan, Kadar Debu di Pembuatan Batu Bata di Kecamatan Tenayan Raya. *PREPOTIF Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 5(1), 236–242.



FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KELUHAN NYERI  
PUNGGUNG BAWAH PADA PEKERJA BATU BATA DI DESA TALANG BELIDO  
TAHUN 2021

Oleh

Tito Nurfajri<sup>1)</sup>, Subakir<sup>2)</sup>, Abul Ainin Hapis<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Harapa Ibu Jambi, Jambi

E-mail: [titonurfajri28@gmail.com](mailto:titonurfajri28@gmail.com)

**Abstract**

Complaints of low back pain is one of the complaints that can reduce work productivity. Bricks workers are one of the workers who are at risk for low back pain. The purpose of this study was to determine the factors associated with complaints of low back pain among brick workers in Talang Belido Village. This study used a cross sectional design. The research sample was male brick workers in Talang Belido Village as many as 38 people. Sampling using total sampling technique. This research was conducted in August 2021 in Talang Belido Village. The research instrument is a questionnaire. Data were analyzed by univariate and bivariate using chi square test. As many as 55.3% of respondents experienced complaints of low back pain, 31.6% of respondents worked with risky manual handling, 55.3% of respondents had a moderate workload and 42.1% of respondents had a very high risk work attitude. There is a relationship between manual handling ( $p = 0.007$ ), workload ( $p = 0.000$ ) and work attitude ( $p = 0.020$ ) with complaints of lower back pain among brick workers in Talang Belido Village, Muaro Jambi Regency in 2021. with ergonomic principles. Posture when working in a balanced state in order to work comfortably and for a long time.

**Keywords: Lower Back Pain, Manual Handling, Workload, Work Attitude**

**PENDAHULUAN**

Prevalensi nyeri punggung bawah di setiap tahunnya sangat bervariasi dengan angka mencapai 15-45%. WHO juga menyatakan bahwa di negara berkembang sebesar 33% penduduk mengalami nyeri punggung bawah (WHO, 2013). Prevalensi kejadian nyeri punggung bawah di Indonesia belum pasti, namun berdasarkan Perhimpunan Dokter Saraf Indonesia (PERDOSSI) tahun 2016 menunjukkan bahwa prevalensi nyeri punggung bawah sebesar 35,86% (PERDOSSI, 2016).

Penelitian (Arthadana, Sali, & Sujaya, 2019) pada pekerja di industri batu bata press menunjukkan sebesar 83,3% pekerja mengalami keluhan nyeri punggung bawah. Penelitian (Kasjono, Yamtana, & Pandini, 2017) pada pembuat batu bata menunjukkan sebanyak 66,7% pekerja mengalami nyeri

punggung bawah akut dan 33,3% pekerja mengalami nyeri punggung bawah kronis. Penelitian (Rinaldi, Utomo, & Nauli, 2015) pada pekerja industri batu bata menunjukkan bahwa sebesar 57,7% pekerja memiliki risiko tinggi mengalami kejadian nyeri punggung bawah.

Nyeri punggung bawah adalah rasa nyeri yang dirasakan pada punggung bawah yang sumbernya adalah tulang belakang daerah spinal (punggung bawah), otot, saraf atau struktur lainnya sekitar daerah tersebut (Suma'mur, 2014). Keluhan nyeri punggung bawah juga merupakan salah satu keluhan yang dapat menurunkan produktivitas kerja (Tarwaka, 2014).

Faktor-faktor yang berhubungan dengan keluhan nyeri punggung bawah adalah usia, jenis kelamin, masa kerja, kebiasaan merokok, lama kerja, faktor lingkungan yaitu tekanan dan

getaran (Tarwaka, 2014). Faktor yang berhubungan dengan keluhan nyeri punggung bawah adalah beban kerja, lama kerja, dan sikap kerja (Suma'mur, 2014). Menurut (Nurmianto, 2010), nyeri punggung bawah merupakan efek umum dari *Manual Handling*. Pekerja berusaha untuk mempertahankan kecepatan dan beban yang diangkat, sehingga tubuh semakin lama semakin lelah. Dalam mengangkat beban yang tidak terlalu berat tapi terjadi dalam waktu yang lama tanpa istirahat akan cepat menurunkan kemampuan pekerja dalam mengangkat beban dan cenderung mudah lelah. Kelelahan ini jika terjadi dalam waktu yang lama dapat mengakibatkan cedera serius pada system *musculoskeletal*. Cedera ini nantinya bisa berkembang menjadi kondisi kronis dan dapat meningkatkan resiko kecelakaan.

Salah satu industri informal yang pekerjaannya berisiko untuk mengalami keluhan nyeri punggung bawah adalah batu bata. Desa Talang Belido merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi sebagai produsen batu bata paling tinggi di Kabupaten Muaro Jambi. Letaknya yang dekat dengan Kota Jambi menyebabkan tingginya konsumen batu bata, karena sebagian besar konsumen batu bata dari Kota Jambi memesan batu bata dari desa Talang Belido. Jumlah produsen batu bata di Desa Talang Belido sebanyak 14 unit dengan jumlah pekerja sebanyak 50 orang pekerja.

Dari kegiatan proses percetakan batu bata tersebut mulai dari pencangkulan bahan baku sampai dengan pengangkutan batu bata yang sudah jadi, setiap tahapan proses pembuatan batu bata beresiko gangguan kesehatan, tahapan yang berisiko nyeri punggung bawah pada pekerja yaitu pada saat pekerja mencangkul dengan posisi punggung membungkuk, pada proses percetakan batu bata pekerja juga beresiko karena melakukan pekerjaan yang monoton dalam kondisi berdiri sambil membungkuk dan pada proses pengangkutan batu bata yang sudah jadi untuk di

keringkan dengan posisi punggung membungkuk sambil memuntir. Aktifitas pekerja industri batu-bata yang dilakukan secara manual dapat menjadi faktor risiko terjadinya NPB. Hal ini dikarenakan beberapa tahapan proses pekerjaan terdiri dari mencangkul tanah, memasukkan tanah ke dalam gerobak sorong, mencetak batu bata dengan alat cetak, mengangkat batu bata dengan gerobak sorong serta menyusun batu-bata yang akan dibakar serta mengangkat ke dalam mobil pengangkut.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan keluhan nyeri punggung bawah pada pekerja batu bata di Desa Talang Belido Tahun 2021.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan *cross sectional* yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan keluhan nyeri punggung bawah pada pekerja batu bata di Desa Talang Belido tahun 2021. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pekerja batu bata laki-laki di Desa Talang Belido. Sampel penelitian adalah pekerja batu bata laki-laki di Desa Talang Belido sebanyak 38 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan *teknik total sampling*. Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus 2021 di Desa Talang Belido. Instrumen penelitian adalah kuesioner. Teknik pengambilan data dengan cara wawancara dan observasi. Data dianalisis secara univariat dan bivariat dengan menggunakan uji *chi square*

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 55,3% responden mengalami keluhan nyeri punggung bawah, 31,6% responden bekerja dengan *manual handling* berisiko, 55,3% responden memiliki beban kerja sedang dan 42,1% responden memiliki sikap kerja risiko sangat tinggi (tabel 1).

Hasil bivariat menunjukkan ada hubungan antara manual handling ( $p=0,007$ ), beban kerja ( $p=0,000$ ) dan sikap kerja ( $p=0,020$ ) dengan keluhan nyeri punggung bawah pekerja batu bata di Desa Talang Belido Kabupaten Muaro Jambi tahun 2021 (Tabel 2).

Tabel 1. Gambaran manual handling, beban kerja, sikap kerja dan keluhan nyeri punggung bawah

Variabel	Jumlah	%
Keluhan Nyeri Punggung Bawah		
Ada keluhan	21	55,3
Tidak ada keluhan	17	44,7
Manual Handling		
Berisiko	12	31,6
Tidak Berisiko	26	68,4
Beban Kerja		
Sedang	21	55,3
Ringan	17	44,7
Sikap Kerja		
Sangat Tinggi	16	42,1
Tinggi	15	39,5
Sedang	7	18,4

Tabel 2. Hubungan manual handling, beban kerja, sikap kerja dengan keluhan nyeri punggung bawah

Variabel	Nyeri Punggung Bawah				Total		p-value
	Ada		Tidak Ada		n	%	
	n	%	n	%	n	%	
Manual Handling							
Berisiko	11	91,7	1	8,3	12	100	0,007
Tidak Berisiko	10	38,5	16	61,5	26	100	
Beban kerja							
Sedang	19	90,5	2	9,5	21	100	0,000
Ringan	2	11,8	15	88,2	17	100	
Sikap Kerja							
Sangat Tinggi	13	81,3	3	18,8	16	100	0,020
Tinggi	6	40,0	9	60,0	15	100	
Sedang	2	28,6	5	71,4	7	100	

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara *manual handling* dengan keluhan nyeri punggung bawah pada pekerja batu bata di Desa Talang Belido Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dengan  $p\text{-value}=0,007$ . Hasil penelitian (Kasjono et al., 2017) pada pembuat batu bata diperoleh hasil bahwa ada hubungan antara *manual handling* dengan keluhan nyeri punggung bawah pada pembuat batu bata ( $p\text{-value}=0,028$ ). Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (As'adi, Sujoso, & Prasetyowati, 2014) menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara variabel Manual Material Handling (MMH) dengan keluhan

muskuloskeletal akibat kerja karena nilai  $p\text{-value} < 0,05$ .

*Manual handling* didefinisikan sebagai suatu pekerjaan yang berkaitan dengan mengangkat, menurunkan, mendorong, menarik, menahan, membawa atau memindahkan beban dengan satu tangan atau kedua tangan dan atau dengan pengerahan seluruh badan (Tarwaka, 2014). Beberapa faktor yang berpengaruh pada proses mengangkat dan mengangkut adalah beratnya beban, intensitas, jarak yang harus ditempuh dan lingkungan kerja, keterampilan dan peralatan yang digunakan. Untuk efisiensi dan kenyamanan kerja perlu dihindari manusia sebagai alat untuk mengangkat dan mengangkut. Titik berat bahasan biomekanika adalah pada fisik manusia, khususnya pada saat manusia melakukan kegiatan penanganan material secara manual (*manual handling*) yang biasanya tanpa menggunakan alat bantu apapun (Irzal, 2016).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara *manual handling* dengan keluhan nyeri punggung bawah pada pekerja batu bata di Desa Talang Belido, proses pembuatan batu bata di Desa Talang Belido masih dilakukan secara manual, rata-rata beban yang diangkat dan dipindahkan oleh pekerja adalah 48 kilo, beban angkat yang terlalu berat menyebabkan tulang belakangnya mengalami penekanan sehingga lama kelamaan sikap tubuhnya berubah. Perubahan terjadi sebagai akibat dari kebiasaan bertumpu saat membawa beban, cara bekerja didalam waktu lama dengan sikap yang salah (tidak ergonomi), dapat menyebabkan *low back pain* kronis.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara beban kerja dengan keluhan nyeri punggung bawah pada pekerja batu bata di Desa Talang Belido Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dengan  $p\text{-value}=0,000$ . Semakin ringan beban kerja maka kejadian nyeri punggung bawah dapat diperkecil dan sebaliknya semakin berat beban

kerja maka semakin besar kesempatan kejadian nyeri punggung bawah.

Hasil penelitian (Kattang, Kawatu, & Tucunan, 2018) pada pengrajin gerabah di Desa Pulutan Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa diperoleh hasil bahwa ada hubungan antara beban kerja dengan keluhan muskuloskeletal pada pengrajin gerabah di Desa Pulutan Kecamatan Remboken ( $p\text{-value}=0,000$ ). Hasil penelitian (Utami, Karimuna, & Jufri, 2017) pada petani di Desa Ahuhu Kecamatan Meluhu diperoleh hasil bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara beban kerja dengan keluhan muskuloskeletal pada petani di Desa Ahuhu Kecamatan Meluhu Kabupaten Konawe ( $p\text{-value}=0,000$ ).

Beban kerja merupakan beban yang ditanggung oleh tenaga kerja sesuai dengan jenis pekerjaannya baik beban kerja secara fisik, mental dan sosial (Suma'mur, 2014). Beban yang berat akan menyebabkan iritasi, inflamasi, kelelahan otot, kerusakan otot, tendon dan jaringan lainnya sehingga menyebabkan low back pain (Tarwaka, 2014).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara beban kerja dengan keluhan nyeri punggung bawah pada pekerja batu bata di Desa Talang Belido, beratnya beban yang diangkat oleh responden  $> 40$  kg untuk sekali angkat memberikan pembebanan yang berlebih. Semakin berat beban yang diangkat, tulang belakang akan bekerja semakin keras untuk menahan beban tersebut, pembebanan berlebih pada tulang belakang mengakibatkan tulang belakang menjadi rusak sampai terjadi *hernia nukleus pulposus* yang merupakan salah satu faktor terjadinya nyeri punggung bawah.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara sikap kerja dengan keluhan nyeri punggung bawah pada pekerja batu bata di Desa Talang Belido Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dengan  $p\text{-value}=0,020$ . Semakin aman sikap kerja yang dilakukan maka kejadian nyeri punggung bawah dapat diperkecil dan sebaliknya semakin

tidak aman sikap kerja yang dilakukan maka semakin besar kesempatan kejadian nyeri punggung bawah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Arthadana et al., 2019) pada pekerja di Industri Batu Bata Press diperoleh hasil bahwa ada hubungan antara sikap kerja dengan keluhan *low back pain* ( $p\text{-value}=0,003$ ). Hasil penelitian (Syarlina & Hidayat, 2019) pada pengrajin gerabah di Linglungan Sandi Kelurahan Pallantikang diperoleh hasil bahwa ada hubungan antara sikap kerja dengan keluhan nyeri punggung bawah ( $p\text{-value}=0,000$ ). Hasil penelitian (Rinaldi et al., 2015) pada pekerja industri Batu Bata diperoleh hasil bahwa ada hubungan posisi kerja pada pekerja Industri Batu Bata ( $p\text{-value}=0,021$ ).

Cara kerja harus dilakukan dengan benar, karenanya sangat perlu mendapatkan perhatian yang layak, sebab cara kerja yang tidak benar dari segi faal kerja atau ergonomi dapat menyebabkan risiko gangguan kesehatan, penyakit bahkan juga kecacatan. Pekerjaan yang dapat menyebabkan nyeri punggung bawah adalah pekerjaan mengangkat, membawa, menaikkan atau mendorong beban berat atau yang dilakukan dengan posisi tubuh yang tidak alami/dipaksakan (Suma'mur, 2014).

Terdapat hubungan antara sikap kerja dengan keluhan nyeri punggung bawah pada pekerja batu bata di Desa Talang Belido Kabupaten Muaro Jambi, sikap kerja dengan risiko sangat tinggi dan tinggi yang dilakukan oleh responden menyebabkan responden mengalami keluhan nyeri punggung bawah. Sikap kerja dengan risiko sangat tinggi dan tinggi disebabkan semua pekerjaannya dilakukan secara manual, selain itu sikap kerja para pekerja terlalu dipaksakan yang menyebabkan tubuh akan mudah capek dan posisi tubuh menjahui dari sikap kerja yang alamiah. Posisi kerja yang salah dan dipaksakan dapat menyebabkan mudah lelah sehingga kerja menjadi kurang efisien, dalam jangka panjang dapat menyebabkan gangguan fisik dan

psikologis dengan keluhan yang dirasakan pada punggung.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Faktor yang berhubungan dengan keluhan nyeri punggung bawah pada pekerja batu bata di Desa Talang Belido adalah manual handling, beban kerja dan sikap kerja.

### Saran

Disarankan kepada para pekerja batu bata untuk sikap tubuh berdiri, duduk dan jongkok hendaknya disesuaikan dengan prinsip-prinsip ergonomi pada bagian pengolahan dan pengeringan agar mengurangi atau menghindari posisi kerja membungkuk maupun pada bagian pencetakan agar menghindari posisi batang tubuh terlalu condong ke depan sesuai dengan fasilitas kerja yang tersedia sehingga dapat memberikan kenyamanan dan mengurangi keluhan yang dirasakan saat bekerja. Mengatur durasi waktu kerja dengan mengurangi gerakan berulang pada tiap posisi janggal yang dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arthadana, M. A. W., Sali, I. W., & Sujaya, I. N. (2019). Hubungan Sikap Pekerja dan Lama Kerja Terhadap Keluhan Low Back Pain pada Pekerja di Industri Batu Bata Press. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 9(2), 126–135.
- [2] As'adi, A. M., Sujoso, A. D. P., & Prasetyowati, I. (2014). Hubungan Antara Karakteristik Individu dan Manual Material Handling dengan Keluhan Muskuloskeletal Akibat Kerja. *Pustaka Kesehatan*, 2(4).
- [3] Irzal. (2016). *Dasar-dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja*. Jakarta: Kencana.
- [4] Kasjono, H. S., Yamtana, & Pandini, D. I. (2017). Faktor Risiko Manual Handling dengan Keluhan Nyeri Punggung Bawah Pembuat Batu Bata. *Jurnal Kesehatan*, VIII(2), 202–121.
- [5] Kattang, S. G., Kawatu, P. A., & Tucunan, A. (2018). Hubungan Antara Masa Kerja dan Beban Kerja dengan Keluhan Muskuloskeletal pada Pengrajin gerabah di Desa Pulutan Kecamatan Remboken kabupaten Minahasa. *Jurnal KESMAS*, 7(4), 1–10.
- [6] Nurmianto, E. (2010). *Ergonomi: Konsep Dasar dan Aplikasinya. Cetakan II*. Surabaya: Prima Printing.
- [7] PERDOSSI. (2016). *Panduan Praktis Klinis Neurologi*. Jakarta: PERDOSSI.
- [8] Rinaldi, E., Utomo, W., & Nauli, F. A. (2015). Hubungan Posisi Kerja pada Pekerja Industri Batu Bata dengan Kejadian Low Back Pain. *Jurnal Online Mahasiswa*, 2(2), 1085–1093.
- [9] Suma'mur, P. K. (2014). *Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja (Hiperkes). Edisi Kedua*. Jakarta: Sagung Seto.
- [10] Syarlina, & Hidayat. (2019). Faktor Yang Berhubungan dengan Keluhan Nyeri Punggung bawah pada Pengrajin Gerabah di Lingkungan Sandi Kelurahan Pallantikang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar. *Jurnal Sulolipu: Media Komunikasi Sivitas Akademika Dan Masyarakat*, 19(1), 7–14.
- [11] Tarwaka. (2014). *Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Ergonomi (K3E) dalam Perspektif Bisnis*. Surakarta: Harapan Press.
- [12] Utami, U., Karimuna, S. R., & Jufri, N. (2017). Hubungan Lama Kerja, Sikap Kerja dan Beban Kerja Dengan Keluhan Muskuloskeletal Disorders (MSDs) Pada Petani di Desa Ahuhu Kecamatan Meluhu Kabupaten Konawe Tahun 2017. *Jimkesmas*, 2(6).
- [13] WHO. (2013). *Low Back Pain: Priority Medicines For Europe And The World*. WHO.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

**EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN DARING MENGGUNAKAN MEDIA WEB PJJ  
MATA PELAJARAN TIK SELAMA PANDEMI COVID-19 DI SMAN 1  
JAMPANGKULON**

Oleh

Muhammad Iqbal<sup>1)</sup>, Heni Wulandari<sup>2)</sup>, Thariq Aziz<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3</sup>Pendidikan Teknologi Informasi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Jl. R. Syamsudin, S.H. No. 50, Cikole, Kec. Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43113

Email: [1iqbalgrizzly@gmail.com](mailto:iqbalgrizzly@gmail.com), [2heni.mpa@gmail.com](mailto:heni.mpa@gmail.com), [3thariq@ummi.ac.id](mailto:thariq@ummi.ac.id)

**Abstrak**

Pelaksanaan pembelajaran daring dengan menggunakan media WEB yang belum maksimal di sekolah atau guru yang hanya memberikan tugas tanpa menjelaskan materinya kepada siswa akan berdampak pada siswa. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pembelajaran daring menggunakan media web PJJ mata pelajaran TIK selama pandemi covid-19 di SMAN 1 Jampangkulon. Penelitian pada skripsi ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah: Wakasek Kurikulum, Guru Pengembang WEB PJJ dan Siswa. Objek penelitian ini adalah Media Pembelajaran WEB PJJ (E-learning) dilakukan di rumah. Prosedur pengumpulan data digunakan oleh peneliti yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Peneliti menggunakan analisis data dengan model Miles dan Huberman yaitu melalui beberapa proses yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pembelajaran daring menggunakan media web PJJ mata pelajaran TIK selama pandemi Covid-19 di SMAN 1 Jampangkulon efektif karena telah mencapai indikator yang peneliti terapkan sebagai pencapaian sebagai ukuran penelitian dengan di tambahnya nilai PTS TIK.

**Kata Kunci: Efektivitas; Media Web; Pembelajaran Daring; TIK**

**PENDAHULUAN**

Sejak awal tahun 2020 perubahan drastis dibidang pendidikan mulai mengalami revolusi. Pembelajaran yang tadinya didominasi oleh pembelajaran tatap muka harus beralih dengan pembelajaran dalam jaringan (daring) di semua level pendidikan, termasuk perguruan tinggi. Guna mencegah penularan corona virus 2019 (Covid-19), kebijakan pendidikan banyak yang dilahirkan. Surat edaran yang diterbitkan Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang pencegahan Covid-19 pada Satuan Pendidikan dan Nomor 36926/MPK.A/HK/2020 tentang Pembelajaran daring, para pendidik diharapkan menghadirkan proses pembelajaran menyenangkan bagi siswa. Di level perguruan tinggi juga membuat surat edaran yang isinya sama yaitu menerapkan pembelajaran daring dikampus. (Sari Widya et all, 2020)

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 Pasal 1, "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara". Sistem pendidikan nasional merupakan bagian integral dari pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Kelompok virus ini yang dapat menyebabkan penyakit pada burung dan mamalia, termasuk manusia. Pada manusia, coronavirus menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang umumnya ringan, seperti pilek, meskipun beberapa bentuk penyakit

seperti; SARS, MERS, dan COVID-19 sifatnya lebih mematikan. Terkait perkembangan virus corona tersebut, akhirnya pemerintah membuat kebijakan sebagai langkah pertama yaitu berupa anjuran *social distancing*. Ini dimaknai bahwa pemerintah menyadari sepenuhnya penularan dari covid-19 ini bersifat

droplet percikan lendir kecil-kecil dari dinding saluran pernapasan seseorang yang sakit yang keluar pada saat batuk dan bersin. Oleh karena itu, pemerintah menganjurkan kepada siapapun yang batuk dan yang menderita penyakit *influenza* untuk menggunakan masker, tujuannya untuk membatasi percikan droplet dari yang bersangkutan. Selain mengatur jarak antar orang, agar kemungkinan peluang tertular penyakit bisa menjadi lebih rendah.

Seperti yang telah di laksanakan oleh SMAN 1 Jampangkulon, dengan kebijakan tinggal di rumah yang diberlakukan oleh pemerintah, membatasi semua aktivitas yang biasa kita lakukan di luar rumah. Seperti kegiatan pendidikan di sekolah yang harus dilakukan dari rumah ke rumah akhir tahun 2020. Kebijakan tersebut mendorong staf pengajar untuk mencari inovasi baru yang dapat digunakan dalam kegiatan belajar di rumah dengan menggunakan media pembelajaran WEB PJJ untuk mengakses pembelajaran yang di dalamnya berisikan materi ajar, soal, ajar dan juga quiz harian. Tidak semua daerah di Indonesia bisa mengalami koneksi internet tanpa terganggu dan tidak semua pelajar di Indonesia memiliki *smartphone*. Benda ini, hanya akan berdampak stres pada siswa tanpa buat dia mengerti materi pelajaran yang diberikan. Sebagai hasil dari aktivitas proses belajar mengajar tidak dilakukan seefektif metode konvensional yang biasa dilakukan di sekolah.

Pelaksanaan pembelajaran daring dengan menggunakan media WEB yang belum maksimal di sekolah atau guru yang hanya memberikan tugas tanpa menjelaskan materinya kepada siswa akan berdampak pada

siswa. Terlepas dari kendala tersebut, tentunya masih ada manfaat menerapkan pembelajaran daring dengan menggunakan media pembelajaran pada saat terjadi pandemi covid19. Dalam situasi pembelajaran dengan situasi seperti ini, guru dituntut untuk lebih aktif dalam memahami bagaimana berkomunikasi dengan siswa bahasa dan alat yang sangat berbeda. Penggunaan media pembelajaran dan metode pembelajaran daring harus dapat dimanfaatkan oleh guru secara optimal. Hal ini untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran daring selama ini periode pandemi dalam periode yang belum ditentukan kapan akan berakhir penerapan pembelajaran daring ini, Dengan permasalahan di atas melalui penelitian ini di harapkan bisa mengetahui tingkat keefektivitas pembelajaran daring yang menggantikan pembelajaran langsung atau bisa di sebut dengan tatap muka pada masa pandemic covid-19. Yang kemudian peneliti mengangkat judul Penelitian “Efektivitas Pembelajaran Daring di Masa Pandemi Covid-19 Menggunakan Media Web PJJ Mata Pelajaran TIK di SMAN 1 Jampangkulon”.

## LANDASAN TEORI

### Pembelajaran Daring

Bilfaqih & Qomarudin (2015 : 1) mengatakan “Pembelajaran daring merupakan program penyelenggaraan kelas pembelajaran dalam jaringan untuk menjangkau kelompok target yang masif dan luas. Melalui jaringan, pembelajaran dapat diselenggarakan secara masif dengan peserta tidak terbatas”.

### Media Pembelajaran

Media pembelajaran pada pembelajaran daring digunakan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. (Nuriansyah F. 2020). Media pembelajaran *online* sebagai sebuah alternatif pembelajaran yang berbasis elektronik memberikan banyak manfaat terutama terhadap proses pendidikan yang dilakukan dengan jarak jauh. Pemanfaatan media pada dasarnya



dimaksudkan untuk membantu agar kegiatan pembelajaran lebih efektif mencapai tujuan dan efisien dalam hal tenaga, waktu dan biaya (Iwan Falahudin, 2014).

### **E – Learning / Web PJJ**

E-learning (*Electronical Learning*), Proses pembelajaran jarak jauh dengan menggabungkan prinsip-prinsip dalam proses pembelajaran dengan teknologi. E-learning adalah proses pembelajaran yang difasilitasi dan didukung melalui pemanfaatan teknologi informasi dan internet.

### **Efektivitas Pembelajaran**

Menurut Afifatu dalam (Rosmita, 2020) efektivitas pembelajaran adalah ukuran keberhasilan dari suatu proses interaksi antar siswa maupun antara siswa dengan guru dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Deassy dan Endang (2018 : 2) menyatakan bahwa efektivitas pembelajaran adalah belajar yang bermanfaat dan bertujuan bagi peserta didik yang memungkinkan peserta didik untuk belajar keterampilan spesifik, ilmu pengetahuan dan sikap dengan mudah, menyenangkan, dan dapat terselesaikan tujuan pembelajaran sesuai harapan.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian pada skripsi ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif ini digunakan untuk memahami meneliti objek dan perilakunya melalui teknologi riset kualitatif, seperti Observasi wawancara mendalam dan dokumentasi. Karena kita perlu mendapatkan hasil dari penelitian yang mendalam Efektivitas pembelajaran daring.

Subjek dalam penelitian ini adalah: Wakasek Kurikulum, Guru Pengembang WEB PJJ dan Siswa. Objek penelitian ini adalah Media Pembelajaran WEB PJJ (E-learning) dilakukan di rumah.

Prosedur pengumpulan data digunakan oleh peneliti yaitu triangulasi sumber,

triangulasi teknik dan triangulasi waktu. peneliti menggunakan analisis data dengan model Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2018:242-249) yaitu melalui beberapa proses yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Efektivitas Pembelajaran Daring**

Menurut Afifatu dalam (Rosmita, 2020) efektivitas pembelajaran adalah ukuran keberhasilan dari suatu proses interaksi antar siswa maupun antara siswa dengan guru dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Deassy dan Endang (2018 : 2) menyatakan bahwa efektivitas pembelajaran adalah belajar yang bermanfaat dan bertujuan bagi peserta didik yang memungkinkan peserta didik untuk belajar keterampilan spesifik, ilmu pengetahuan dan sikap dengan mudah, menyenangkan, dan dapat terselesaikan tujuan pembelajaran sesuai harapan

Menurut Slavin (dalam Rosmita, 2020) strategi pembelajaran digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan tujuan yang telah dirancang dan hasil yang diperoleh adalah keefektifan pembelajaran. Adapun beberapa indikator dalam mengukur keefektifan pembelajaran yaitu:

- 1) Kualitas Pembelajaran, adalah seberapa jauh informasi yang diuraikan sehingga peserta didik dapat mempelajarinya dengan tingkat kesalahan kecil.
- 2) Kesesuaian tingkat pembelajaran, adalah sejauh mana guru membawa peserta didik siap mempelajari materi yang baru.
- 3) Insentif, adalah seberapa besar usaha memberikan motivasi kepada peserta didik untuk menyelesaikan tugas belajar dan mempelajari materi yang diberikan.

- 4) Waktu, seberapa banyak waktu yang diberikan kepada peserta didik untuk mempelajari materi yang disampaikan.

Penelitian yang telah di laksanakan di SMAN 1 Jampangkulon ini di temukan bahwa guru telah melakukan pembelajaran daring sejak bulan maret 2020 dan telah melakukan beberapa perencanaan proses pembelajaran daring yang dapat digunakan dengan mudah oleh guru dan siswa dengan melauli Website yaitu WEB PJJ. Hal ini diperkuat dengan pernyataan guru mata pelajaran TIK melalui wawancara dengan peneliti pada 08 September 2020 yang menyatakan bahwa:

“Di tahun ini akibat COVID-19 dan sesuai arahan dari SKB 4 Menteri dan Diknas bahwa pembelajaran tatap muka diganti dengan pembelajaran daring mulai Maret, kemarin sebenarnya dimulai sekitar tanggal 16 tetapi karena ada masa libur karena virus ini, tetapi pada saat yang sama, siswa kelas X diberi libur karena siswa kelas X sedang mengikuti ujian. Setelah itu pembelajaran online hanya dilakukan dimana siswa kelas X hanya diberikan tugas saat itu saja, tetapi tidak ada perintah untuk memberikan pembelajaran daring.”

Dalam hal ini peneliti mengemukakan tiga teori yang telah peneliti pilih sebagai acuan efektivitas, dari ke tiga teori tersebut menurut peneliti sangat bagus dan relevan dengan penelitian dan kondisi yang peneliti teliti saat ini, akan tetapi peneliti hanya memilih teori satu teori yang peneliti anggap sangat akurat dengan penelitian peneliti di tempat dan kondisi pandemi. Peneliti memilih teori dari Menurut Slavin (dalam Rosmita, 2020)

Peneliti menggunakan Indikator Efektivitas untuk mengukur hasil dari penelitian yang telah di lakukan peneliti di Sekolah. Dalam hal tersebut peneliti memilih teori yang menurut peneliti sangat relevan dengan kondisi dan permasalahan yang ada di SMAN 1 Jampangkulon yaitu Menurut Slavin (dalam Rosmita, 2020), dalam teori teori

tersebut ter dapat empat indicator yang menjadi acuan peneliti:

1. Kualitas Pembelajaran, adalah seberapa jauh informasi yang diuraikan sehingga peserta didik dapat mempelajarinya dengan tingkat kesalahan kecil.
2. Kesesuaian tingkat pembelajaran, adalah sejauh mana guru membawa peserta didik siap mempelajari materi yang baru.
3. Insentif, adalah seberapa besar usaha memberikan motivasi kepada peserta didik untuk menyelesaikan tugas belajar dan mempelajari materi yang diberikan.
4. Waktu, seberapa banyak waktu yang diberikan kepada peserta didik untuk mempelajari materi yang disampaikan.

## 2. Hasil Penelitian.

### 1) Indikator Kualitas Pembelajaran

Kualitas belajar adalah adalah seberapa jauh informasi yang diuraikan sehingga peserta didik dapat mempelajarinya dengan tingkat kesalahan kecil. Dalam indikator ini dapat di pahami bahwa kualitas pembelajaran diawali dari kualitas pendidik atau guru pada saat menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik atau siswa. Dalam hal ini guru di tuntut kompeten pada bidangnya khususnya yang berkaitan dengan mata pelajaran yang di ampuhnya,

Pada penelitian ini peneliti akan membahas mengenai kualitas pembelajaran daring mata pelajaran TIK pada Web PJJ dengan memfokuskan penelitian dengan wawancara secara mendalam kepada Guru selaku narasumber penelitian. Selanjutnya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber petama yaitu Guru mata pelajaran TIK adapun pertanyaannya sebagai berikut:

Peneliti: Seberapa jauh pemahaman guru mengenai materi pembelajaran TIK yang akan di sampaikan kepada peserta didik?

Narasumber 1: Tentu kami sebagai guru di tuntutan untuk memahami materi ajar yang akan di sampaikan kepada siswa dan kami juga selalu mempersiapkan materi yang akan di bahas dalam proses pembelajaran dalam pembelajaran daring, tidak hanya itu kami juga sebagai guru mempunyai pedoman ajar atau bisa di sebut sebagai RPP terkait materi yang akan di sampaikan.

Peneliti: Seberapa kreatif guru dalam menyampaikan materi pembelajaran TIK?

Narasumber 1: Bagi guru hal kreatif tentu di perlukan supaya materi yang di sampaikan oleh guru dapat di terima oleh peserta didik, tentunya kami pun mengembangkan materi ajar yang terdapat dalam RPP se kreatif mungkin

Peneliti: Apa indikator tercapainya kualitas belajar peserta didik dalam memahami materi yang telah di sampaikan guru?

Narasumber 1: Siswa mampu memahami dan menguasai materi ajar yang telah di sampaikan oleh guru dan juga siswa mampu untuk mencapai nilai yang telah menjadi standar dari sekolah

Menurut jawaban dari Narasumber bahwa mengenai kualitas pembelajaran di SMAN 1 Jampangkulon berjalan sebagaimana semestinya dengan kualitas guru yang kreatif dan juga penyampaian materi yang bagus serta di dukung dengan RPP sebagai acuan bahan ajar untuk narasumber

Peneliti: Apakah bapak sebelumnya mempelajari lebih mendalam tentang Web PJJ?

Guru: ya, mereka mengikuti pelatihan oleh pengembang WB PJJ nya, mulai dari Absensi, upload materi belajar, soal kuis di lakukan pelatihan tiap minggunya agar guru-guru memahami tentang WEB PJJ dan proses pembelajaran maksimal seperti pada pembelajaran secara tatap muka.

Narasumber 2: Jelas guru juga ada pelatihan untuk mempersiapkan pembelajaran daring tersebut khususnya pelatihan mengenai

WEB PJJ yang di laksanakan di sekolah, pelatihannya selama 3 hari agar mereka bisa dan terbiasa.

Peneliti: Bagaimana menurut Bapak mengenai kemudahan akses terhadap media daring yang digunakan?

Guru: Kalo bagi guru sendiri sangat mudah karena sudah di sediakan fasilitas oleh sekolah, tiap guru di berikan 1 komputer dan fasilitas internetnya yang cepat. Jadi guru tidak ada kendala saat mengakses WEB PJJ agar keberlangsungan pembelajaran daring sangat baik dan juga meningkatkan kualitas pembelajaran.

Narasumber 2: ya sangat mudah karena guru juga kan tadi melaksanakan dulu pelatihan untuk memakai WEB PJJ tersebut, dan juga fitur untuk di dalamnya sangat mudah yak karena saya membuatnya tidak begitu rumit seperti WEB LMS pada biasanya

Peneliti: Apakah ada kendala saat media daring yang di buat untuk keberlangsungan belajar para siswa?

Guru: Banyak sebenarnya Faktor pertama listrik yang terkadang mati, sinyal karena ada beberapa siswa yang rumah nya sangat jauh, dan kuota dikarenakan ada berapa orang yang kurang mampu itupun ada bantuan dari pemerintah tetapi kurang cukup, kemudian waktu pertama kali WEB PJJ di pakai banyak terjadi Bug pada WEB karena banyaknya user atau siswa dan guru yang masuk ke WEB, namun tim perancangpun berupaya melakukan perbaikan agar pembelajaran daring maksimal dalam mata pelajaran TIK.

Wawancara narasumber di atas dapat di simpulkan bahwa tidak banyak kendala yang di hadapi guru dalam proses pembelajaran daring, guru juga sangat memahami mengenai penggunaan Web PJJ hanya saja Mati listrik yang tidak menentu yang menjadi kendala namun itupun hanya di daerah tertentu termasuk di daerah pedalaman.

Narasumber 2: Kendalanya yaitu listrik sinyal kan kita termasuk di daerah kabupaten jadi menurut bapak kendalanya itu, kalo dari

WEB nya sendiri mungkin ketika awal percobaan ada sedikit Bug tapi untuk kesininya alhamdulillah tidak ada kendala lagi dari WEB PJJ.

Adapun pertanyaan yang sama di tanyakan kepada peserta didik sebagai berikut:

2) Indikator Kesesuaian tingkat Pembelajaran

Kesesuaian tingkat pembelajaran, adalah sejauh mana guru membawa peserta didik siap mempelajari materi yang baru. Dalam indikator kesesuaian tingkat pembelajaran ini tentunya guru harus menyesuaikan materi ajar yang akan di berikan kepada siswa dan juga guru harus menyiapkan materi ajar yang di berikan kepada siswa dalam Web PJJ supaya siswa mampu memahami materi yang di berikan oleh guru.

Pada penelitian ini peneliti membahas indikator kesesuaian tingkat belajar dan memfokuskan penelitian melalui wawancara secara mendalam kepada Narasumber 1 sebagai narasumber 1, Guru Pembuat Web sebagai Narasumber

Peneliti: Bagaimana Bapak menentukan media daring apa saja yang akan diterapkan?

Narasumber 1: Sekolah menentukan kebijakan melalui rapat sekolah, langkah apa yang harus di tentukan. Maka dari itu sekolah harus membuat system untuk membuat pelajaran jarak jauh, team IT beserta sekolah membuatlah sebuah WEB PJJ untuk memfasilitasi pembelajaran jarak jauh tersebut

Narasumber 2: Kita menyesuaikan aja menurut intruksi dari sekolah dan juga media tersbut menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah, yang di terapkan dalam media tersebut miri seperti LMS yak karena supaya tidak ribet untuk siswa sama guru juga dalam mengkses atau mengoprariskan media.

Peneliti: Bagaimana menurut Bapak respon yang diberikan oleh siswa mengenai?penyampaian materi atau tugas yang diberikan?

Narasumber 1: Guru: Respon nya cukup bagus ketika di lihat dari absensi pengerjaan tugas TIK hampir 95% sisanya itu tadi terkait

kendala yang tidak memiliki HP dan kendala sinyal

Narasumber 2: responya sangat baik namun untuk penjelasan terkait pembelajaran TIK menurut saya kurang mendetail ya karenayak arena barengi dengan praktek dan bimbingan secara langsung oleh guru jadi lebih menditeil secara tatap muka.

Peneliti: Apa saja Fitur yang di sediakan dalam media daring tersebut?

Narasumber 1: Bisa Upload materi pelajaran baik berbentuk PDF atau file lain seperti gambar Video, juga soal-soal kuis, UTS dan UAS baik berbentuk PG atau esay. Kemudian guru bias melihat nilainya secara otomatis dan juga guru bias melihat absensi

Narasumber 2: untuk fiturnya disana bisa upload materi terkait mata pelajaran TIK ada juga untuk pengaturannya mau berapa hari materi tersebut di tampilkan bisa juga real time, di WEB juga bisa upload soal-soal dan unduh soal-soal.

Peneliti: Apakah Fitur yang ada di dalam media daring tersebut mudah di pahami siswa?

Narasumber 1: Sangat mudah, siswa juga dapat memahami tampilannya ketika di buka di HP tinggal login saja memasukan username dan password jadi siswa tinggal memilih fiur mana yang akan di gunakan misalkan fitur mata pelajaran TIK di sana juga ada fitur untuk kuisnya

Narasumber 2: Terdapat fitur untuk materi ajar,soal kuis, dan juga soal UTS/UAS, untuk fiturnya sendiri sangat mudah di gunakan seperti WEB pada umumnya. Web juga dapat di akses di PC/HP.

Dari jawaban guru di atas dapat di simpulkan bahwa dari petanyaan idnikator kesesuaian tingkat belajar yang peneliti ajukan kepada Narasumber, menurut peneliti dar segi media penyampaian materi dan fitur yang ada di Web PJJ sangat memenehu untuk kebutuhan guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran daring, kemudian respon peserta didik juga sangat bagus baik dari penugasan

.....

cara menema materi dan juga tanggapan mengenai Web PJJ

Adapun pertanyaan yang di ajukan kepada peserta didik sebagai berikut: Peneliti: Apakah materi yang di sampaikan oleh guru dalam media daring/WEB PJJ bisa di mengerti?

Narasumber 3: untuk mata pelajaran TIK sendiri cukup di mengeti ka, tapi ketika ada materi yang di praktekin kadang kurang di mengerti walaupun sudah ada penjelasan dan langkah-langkahnya tanpa di bombing langsung oleh guru.

Narasumber 4: lumayan sih ka cuman kalo ada tentang praktikum agak susah di pahami karena engga langsung di bombing sama gurunya untuk materi yang lainnya mah alhamdulillah bias di mengerti

Narasumber 5: lumayan ka cuman materi praktikum saja yang agak kurang di mengerti untuk maeri seperti biasa itu bias di pahami

Narasumber 6: bagi aku mudah di mengerti ka sejauh ini terumata materi pelajaran TIK begitu juga pelajaran lain.

Peneliti: Bagaimana pemahaman anda mengenai fitur yang ada di WEB PJJ?

Narasumber 3: kaget ka awalnya soalnya kurang tau pembelajaran lewat Web tapi semakin kesini semakin terbiasa ka dan juga paham cara memakai Web nya Narasumber 4: pertama di beritahu kurang paham ka tapi guru juga menjelaskan cara mengakses Web nya, sekarang mah alhadulillah paham ka soalnya kan kita juga sering belajar di Web PJJ ini sudah hamper dua tahun lebih

Narasumber 5: kurang paham ka pas awal-awal tapi karena seiring berjalan waktu paham karena sudah terbiasa

Narasumber 6: untuk sekarang paha ka terutama fitur-fitur yang ada di dalamnya sampai hafal, untuk awal doang ka agak kurang paham soalnya awam belum pernah belajar di Web.

Dari jawaban peserta didik di atas dapat di simpulkan bahwa peserta didik mampu memahami materi yang di berikan oleh guru, peserta didik pun mampu menguasai Web PJJ

yang di sediakan oleh sekolah sesuai dengan kebutuhan sekolah, tidak hanya peserta didik mendapat wawasan serta pemahan mengeni Website, dan juga sekamin banyaknya sumber belajar peserta didik yang di tuntunt untuk lebih mandiri.

### 3) Indikator Insentif

Insentif, adalah seberapa besar usaha memberikan motivasi kepada peserta didik untuk menyelesaikan tugas belajar dan mempelajari materi yang diberikan. Dalam indikator ini terlihat bahwa indikator insentif menjelaskan bagai mana cara guru untuk memotivasi siswanya dalam proses pembelajara termasuk pada saat pandemi seperti ini.

Dalam indikator ini peneliti melakukan wawancara secara mendalam kepada Guru TIK sebagai Narasumber 1 dan Guru Pembuat Web sebagai Narasumber 2. Adapun beberapa pertanyaan yang peneliti tanyakan kepada Narasumber sebagai berikut:

Peneliti: Apakah siswa mesara nyaman dengan menggunakan media daring dalam proses pembelajaran termasuk mata pelajaran TIK

Guru: kemarin udah saya tanya kepada siswanya, enak pembelajaran tatap muka atau enak pembelajaran daring, jawabanya ada yang bilang enak tatap muka dan ada bilang juga enak daring jadi. Untuk pembelajaran TIK sendiri kana da beberapa hal yang harus di praktikan nah guru tinggal mengintruksikan kepada siswa dengan mengirim sebuah file beserta langkah-langkahnya.

Narasumber 2: sangat nyaman siswa tanpa pelu dating kesekolah bisa di akses dimana saja dan kapan saja. Itu saja sih kendalanya yang tadi untuk mata pelajaran TIK sendiri kurang mendetail penyampaian materi untuk itu terkadang guru menanyakan di WA kepada siswa dan juga memberikan sedikit penjelasan bila mana siswa tidak begiu memahami materi

Peneliti: Bagaimana cara guru dalam memotivasi siswa dalam pembelajaran daring?

Narasumber 1: Walaupun dalam kondisi seperti pandemi ini kita juga harus tetap semangat untuk menyampaikan materi pada peserta didik tidak lupa kita juga selalu memberi motivasi kepada siswa agar tetap semangat dalam belajar baik itu perkataan maupun materi yang di berikan melalui sekolah berupa kuota.

Narasumber 2: Semangat itu perlu baik untuk guru maupun peserta didik walaupun dalam kondisi pandemi kami guru selalu memberikan semangat kepada siswa baik sebelum belajar dan setelah belajar melalui grup WA, sekolah juga menyediakan wifi di lingkungan sekolah bagi siswa yang jangkauan sinyal di rumahnya sangat tidak stabil, maka dari itu kami mendukung sekali peserta didik dalam pembelajaran daring ini agar proses pembelajaran berlangsung dengan baik.

Peneliti: Pesan dan kesan bapak mengenai pembelajaran daring saat ini

Guru: sebenarnya kesannya bagus yak arena bisa mengakses dimana saja

Narasumber 2: bagus dan juga kita siap untuk keberlangsungan pembelajaran daring ini

Dari pertanyaan yang di ajukan mengenai indikator insentif kepada Narasumber dapat di simpulkan bahwa guru sebagai tenaga pendidik harus mampu memotivasi siswanya dalam hal apapun terutama dalam proses pembelajaran, tidak hanya motivasi saja guru di tuntut untuk kreatif supaya materi ajar yang di terima oleh peserta didik dapat di terima dan juga dengan adanya hal tersebut bias menggugah semangat belajar bagi peserta didik selain itu guru pun harus membuat materi ajar semenarik mungkin agar peserta didik lebih bersemangat dalam proses pembelajaran. Sekolah juga menyediakan akses wifi bagi siswa yang rumahnya memiliki sinyal internet yang kurang stabil hal tersebut salah satu bentuk perhatian sekolah terhadap peserta didik.

Adapun pertanyaan yang di ajukan kepada peserta didik sebagai berikut:

Peneliti: Bagaimana cara guru dalam memotivasi siswa dalam pembelajaran daring?

Narasumber 3: Sebelum pelajaran biasanya guru suka memberitahu di grup WA dan menyemangati kita untuk belajar walaupun dalam kondisi pandemi.

Narasumber 4: ngasih semangat kak sebelum mulai pelajaran biasanya atau sesudah pelajaran

Narasumber 5: kaya ngasih semangat gitu kak kalo udah selalai belajar biasanya kadang di grup WA juga kak. Tapi terkadang suka sedikit ngeluh kak karena kita juga membutuhkan kuota yang banyak untuk mengakses Web, itupun ada bantuan dari pemerintah terkadang kurang juga.

Dari jawaban Peserta didik di atas dapat di simpulkan bahwa mereka merasa semangat dalam belajar walaupun dalam kondisi pandemi akan tetapi ada beberapa yang mengeluh terkait dengan kuota yang minim yang di berikan pemerintah melalui sekolah akan tetapi hal tersebut tidak membuat siswa tersebut menjadi malas belajar. Tidak hanya sekedar itu sekolah juga menyediakan fasilitas wifi di lingkungan sekolah bagi siswa yang jangkauan sinyal internetnya kurang stabil dengan demikian peserta didik merasa sangat di perhatikan oleh sekolah dan membuat peserta didik menjadi termotivasi dalam proses pembelajaran daring ini

#### 4) Indikator Waktu

Waktu, seberapa banyak waktu yang diberikan kepada peserta didik untuk mempelajari materi yang disampaikan. Dalam indikator ini lebih focus terhadap waktu dalam proses pembelajaran baik itu jam belajar peserta didik, waktu mata pelajaran atau pun materi yang di sampaikan kepada peserta didik apakah dapat di terima atau tidak.

Terkait indikator waktu peneliti memfokuskan mengenai beberapa pertanyaan secara mendalam kepada Guru TIK sebagai Narasumber 1 dan Guru pembuat Web sebagai Narasumber 2 dan kepada peserta didik sebagai Narasumber 3,4,5,& 6

Peneliti: Sudah berapa lama Bapak menggunakan media daring dalam proses pembelajaran?

Narasumber 1: Selama pandemi berarti sudah hampir 2 tahun lebih hitungannya 4 semester. Namun saya juga dulu sempat menggunakan Web seperti LMS untuk pembelajaran daring ini, ketika ada hal tersebut saya sudah paham harus seperti apa menyampaikan materi kepada siswa agar materi yang disampaikan menarik apalagi ini waktunya hampir dua tahun lebih terkadang ada siswa juga yang merasa jenuh akan tetapi dengan kreatifitas guru di SMAN 1 Jampangkulon siswa merasa senang dalam proses pembelajaran. Kita juga selaku tenaga pendidik terus memotivasi siswa agar giat dalam mencari ilmu dan pandemi ini tidak menjadikan sebagai hambatan

Narasumber 2: dua tahun kurang lebih, sudah empat semester penggunaan Web PJJ ini, selaku pembuat Web saya menuntut kepada guru agar kreatif dalam membuat bahan ajar supaya siswa tidak merasa jenuh tidak hanya itu kami juga selalu mengadakan quiz agar proses pembelajaran menjadi menarik dan tidak monoton. Pembelajaran daring ini menurut saya menjadi penambah wawasan bagi peserta didik selain itu sumber belajar bagi peserta didik juga menjadi banyak tidak terpacu kepada buku saja mungkin ini pengalaman terbaik selama pandemi.

Adapun pertanyaan yang peneliti lontarkan kepada peserta didik sebagai berikut:

Peneliti: Berapa lama mata pelajaran TIK di laksanakan secara daring?

Narasumber 3: Kalau jamnya itu ka mungkin sekitar 2x 45 menit tapi kalau pembelajarannya udah dua tahun lebih ka

Narasumber 4: Udah dua tahun lebih ka tapi untuk jam pelajarannya 2x 45 menit sangat terbatas tapi kami juga terkadang searching google kalau ada materi yang kurang di mngerti

Narasumber 5: Ada sekitar dua tahun lebih ka pembelajaran daring ini,

menyenangkan sih ka menambah wawasan juga dan tidak jenuh

Narasumber 6 : untuk jam pelajarannya itu ka 2x45 menit terus kalo pembelajaran daringnya ada sekitar dua tahun lebih kamungkin hampir tiga tahun.

Dari jawaban peserta didik bahwa jam pelajaran yang ada di pembelajaran daring ini sedikit berkurang namun tidak menjadikan semangat belajar mereka menjadi menurun, wawasan juga semakin bertambah dan sumber belajar juga semakin banyak biasanya hanya menggunakan buku paket atau modul akan tetapi sekarang bisa searching untuk mendapatkan sumber belajar

### **WEB PJJ**

Web adalah salah satu aplikasi yang berisikan dokumendokumen multimedia (teks, gambar, suara, animasi, video) di dalamnya yang menggunakan protokol HTTP (hypertext transfer protocol) dan untuk mengaksesnya menggunakan perangkat lunak yang disebut browser. Web PJJ yang di gunakan oleh SMAN 1 Jampangkulon adalah hasil buatan Narasumber 1, WEB tersebut di buat untuk membantu system pembelajaran yang awalnya belajar seperti biasa tatap muka berubah menjadi daring. WEB PJJ ini di rancang untuk mempermudah siswa melaukan pembelajaran daring salah satunya dalam mata pelajaran TIK

Seperti pernyataan yang di berikan guru mata pelajaran TIK sebelumnya bahwa pembelajaran daring di SMAN 1 Jampangkulon menggunakan Web PJJ sebagaimana di anjurkan oleh kebijakan pemerintah. Hal ini di perkuat dengan pernyataan guru sebagai berikut:

Untuk pembelajaran daring ini kita mengikuti intruksi peraturan dari pemerintah dimana pembelajaran tersebut menggunakan Web PJJ yang kemudian di terapkan oleh sekolah.

Berikut adalah Web PJJ yang di maksud oleh guru, peneliti menemukan sebagai berikut:



**Gambar 1 tampilan menu login**

*Sumber, Web PJJ SMAN 1 Jampangkulon*

Dari pernyataan guru di atas sebelumnya tentang Web PJJ yang di pakai SMAN 1 Jampangkulon terlihat dari gambar ini bahwa web tersebut dapat di akses oleh guru dan siswa dengan cara memasukan Username dan Password.

Web PJJ ini, di buat oleh Guru SMAN 1 Jampangkulon dan Tim IT, menu ini juga menyediakan fitur-fitur untuk guru dan peserta didik dalam keberlangsungan proses pembelajaran secara daring. Dalam Web PJJ tersebut guru dapat mengupload materi, soal-soal atau kuis baik itu berbentuk file atau gambar begitupun siswa dapat mengunduh file materi atau gambar dari Web PJJ tersebut apalagi terkait dengan mata pelajaran TIK. Fitur selanjutnya adalah fitur profile peserta didik sebagai berikut:



**Gambar 2 Menu Profile**

*Sumber, Web PJJ SMAN 1 Jampangkulon*

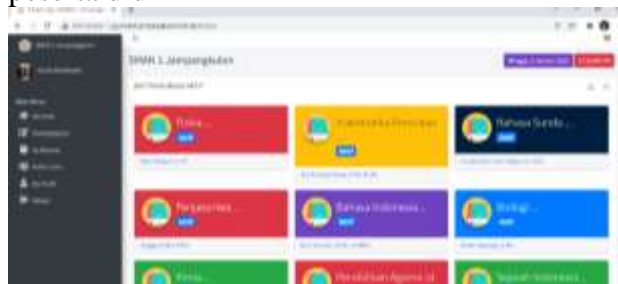
Pernyataan yang di berikan guru terkait fitur ini sebagai berikut:

Setelah melakukan login maka kita langsung menuju profile akun yang di login baik itu guru maupun peserta didik, sangat mudah sekali untuk mengoperasikan Web lalu disana

tinggal memilih saja fitur mana yang mau kita buka.

Dari pernyataan guru di atas bahwa dalam mengoperasikan fitur Web PJJ sangat mudah tidak ribet dan juga fitur yang di tampilkan Web sangat sederhana sehingga mengakses Web tersebut sangat mudah

Dapat dilihat dari Fitur tersebut muncul profile peserta didik adapun menu di dalam fiturnya yang berisikan nama siswa, no hp, password dan juga profile peserta didik dalam fitur ini peserta didik juga dapat mengubah password mereka akan tetapi sekolah menyarankan agar tidak mengubahnya seperti username dan password yang di berikan oleh sekolah melalui Operator Web PJJ. Adapun fitur selanjutnya yaitu fitur terkait pembelajaran peserta didik



**Gambar 3 Menu Pembelajaran**

*Sumber, Web PJJ SMAN 1 Jampangkulon*

Dalam Fitur ini terdapat menu terkait pembelajaran dan di dalam menu tersebut ada banyak sekali daftar mata pelajaran yang di ampu peserta didik, adapun tentang materi ajar bila mana daftar menu tersebut kita klik salah satunya dan juga di menu tersebut kita bisa mengisi soal mengunduh materi bagi peserta didik dan juga bagi guru kita bisa upload materi kedalam menu tersebut, di menu pembelajaran ini juga peserta didik dapat mengakses Web kapan saja akan tetapi ketika ada kuis dan soal yang perlu di isi peserta didik ada batasan untuk mengaksesnya karena di tentukan waktunya dan nantinya akan hilang. Adapun wawancara terkait fitur Web PJJ sebagai penguat:

Peneliti: Apa saja Fitur yang di sediakan dalam media daring tersebut?



Narasumber 1: Bisa Upload materi pelajaran baik berbentuk PDF atau file lain seperti gambar Video, juga soal-soal kuis, UTS dan UAS baik berbentuk PG atau esay. Kemudian guru bias melihat nilainya secara otomatis dan juga guru bias melihat absensi

Narasumber 2: untuk fiturnya disana bisa upload materi terkait mata pelajaran TIK ada juga untuk pengaturannya mau berapa hari materi tersebut di tampilkan bisa juga real time, di WEB juga bisa upload soal-soal dan unduh soal-soal. Adapun wawancara pendukung dari peserta didik sebagai berikut:

Peneliti: Bagaimana pemahan anda mengenai fitur yang ada di WEB PJJ?

Narasumber 1: kaget ka awalnya soalnya kurang tau pembelajaran lewat Web tapi semakin kesini semakin terbiasa ka dan juga paham cara memakai Web nya

Narasumber 2: pertama di beritahu kurang paham ka tapi guru juga menjelaskan cara mengakses Web nya, sekarang mah alhadulillah paham ka soalnya kan kita juga sering belajar di Web PJJ ini sudah hamper dua tahun lebih

Narasumber 3: kurang paham ka pas awal-awal tapi karena seiring berjalan waktu paham karena sudah terbiasa

Narasumber 4: untuk sekarang paha ka terutama fitur-fitur yang ada di dalamnya sampai hafal, untuk awal doang ka agak kurang paham soalnya awam belum pernah belajar di Web. Selanjutnya peneliti memperdalam kembali pembahasan kepada salah satu mata pelajaran yang menjadi focus peneliti sebagai berikut:



**Gambar 4 Menu Mata Pelajaran TIK**

*Sumber, Web PJJ SMAN 1 Jampangkulon*

Menu ini adalah masih menu terkait pembelajaran akan tetapi lebih terfokus pada mata pelajaran TIK, dalam menu ini peserta didik dapat mendownload materi ajar yang di berikan guru melalui Web PJJ juga di menu ini siswa bisa berkomentar terkait dengan pembelajaran baik itu ada yang kurang memahami tentang materi ajar yang telah guru sampaikan dalam Web, adapun terkait absensi yang telah guru tentukan bisa melalui aplikasi WA ataupun bisa di Web PJJ karena di Web juga tersedia menu untuk absensi. Adapun pernyataan dari guru mengenai menu pembelajaran sebagai berikut:

Terkait pembelajaran di Web PJJ ini kami sebagai guru terus memperbaharui Web tersebut seminggu sekali mengenai materi ajar yang akan di sampaikan kepada peserta didik dan juga kami menyiapkan absensi tentunya pagi setiap orang yang mengakses Web. Begitu juga operator Web setiap minggunya selalu mengecek absensi dan melaporkan kepada guru mata pelajaran jadi kehadiran siswa dan juga ke aktifan siswa dalam mengakses Web terpantau.



**Gambar 5 Daftar Guru SMAN 1 Jampangkulon**

*Sumber, Web PJJ SMAN 1 Jampangkulon*

Gambar di atas ini merupakan tampilan dari menu daftar guru yang ada di sekolah SMAN 1 Jampangkulon. dari menu tersebut peserta didik dapat melakukan komunikasi dengan melalui profile yang menampilkan No Handphone dimana bila ada mata pelajaran yang kurang di mengeti bisa langsung menghubuninya secara pribadi atau melalui grup WA. Selanjutnya tampilan menu daftar absensi peserta didik sebagai berikut:

**Gambar 4.6 Menu Absensi Peserta Didik**

Sumber, Web PJJ SMAN 1 Jampangkulon

Gambar tampilan menu di atas merupakan daftar absensi peserta didik, dalam menu ini guru bisa memeriksa peserta didik mana yang mengikuti mata pelajaran TIK pada jam pelajarannya. Untuk penggunaannya menu ini peserta didik dapat memilih tombol biru pada menu dengan tulisan Klik Absensi dengan itu peserta didik dinyatakan mengikuti mata pelajaran TIK atau Web PJJ. Absensi tersebut melampirkan sebuah foto sebagai bukti kehadiran peserta didik agar tidak berbohong ketika mengikuti Web PJJ.

#### C. Kemudahan dan kendala dalam pembelajaran daring

Dari hasil observasi dan di dukung hasil wawancara yang telah peneliti dapatkan maka dari itu dapat di Tarik kesimpulan bahwa ada beberapa kemudahan dan juga kelebihan. Namun ada sedikit kendala utama dalam proses pembelajaran daring mata pelajaran TIK di SMAN 1 Jampangkulon. Adapun kelebihan dan kendala-kendala dalam proses pembelajaran daring sebagai berikut:

- a. Kelebihan atau kemudahan dalam proses pembelajaran daring
  - 1) Dalam proses pembelajaran daring peserta didik bisa mengakses Web di mana saja berarti peserta didik memiliki waktu yang cukup untuk belajar
  - 2) Peserta didik dan guru dapat menambah pengetahuannya dalam bidang Teknologi Informasi terkait pembelajaran daring maupun dalam bidang pendidikan
  - 3) Peserta didik memiliki sumber belajar yang luas begitupun guru

- 4) Menambah variasi dalam mengajar bagi guru ataupun siswa dalam proses pembelajaran
  - 5) Menumbuhkan jiwa mandiri bagi peserta didik dalam proses pembelajaran daring
- b. Kendala-kendala yang ada dalam pembelajaran daring
- 1) Jaringan internet yang masih belum merata, seperti yang telah di jelaskan oleh peneliti
  - 2) Terjadinya pemadaman listrik yang tidak menentu membuat sinyal terkadang hilang membuat siswa sulit untuk mengakses Web namun tidak di semua daerah

#### D. Nilai TIK Peserta didik

Pembelajaran daring yang di mulai dari bulan maret tahun 2020 dan penelitian ini dilaksanakan pada tahu 2021 berarti proses pembelajaran sudah berjalan dua tahun sampai 2022 dan tentunya peserta didik sudah bisa melihat perolehan hasil belajar selama pembelajaran daring berjalan. Pada penelitian ini, standar KKM yang ditetapkan untuk matapelajaran TIK yaitu sebesar 70. Pada saat observasi dilakukan terlihat nilai TIK rata-rata siswa dari kelas X IPA satu, dua dan tiga mampu mencapai standar KKM yang ditetapkan pada pembelajaran sebelum daring dilakukan (tatap muka). Pada peneliti melakukan wawancara mencoba menanyakan mengenai nilai TIK siswa

Narasumber 1: ya sebenarnya ketika awal-awal pembelajaran dengan model pembelajaran daring seperti ini, awalnya saya juga takut peserta didik tidak memahaminya akan tetapi ketika di beri penjelasan mengenai pembelajaran daring peserta didik akan tetapi ketika melihat hasil dari nilai TIK semester ini berarti pembelajaran sudah berjalan 2 tahun hasilnya peserta didik mencapai KKM yang di tentukan namun ada beberapa yang tidak mencapai.

Nilai PTS yaitu Penilaian Tengah Semester yang peneliti dapatkan dari pihak

sekolah, dari table di atas bisa di lihat bahwa nilai yang di dapat peserta didik kelas X-MIPA.1 dari perolehan PTS yang telah dilaksanakan sekolah. Dari nilai peserta didik dapat di lihat bahwa 95% mencapai KKM yang telah di tentukan sekolah yaitu KKM nya 70 di lihat dari perolehan nilai peserta didik dapat di simpulkan bahwa pembelajaran daring yang di laksanakan di SMAN 1 Jampangkulon berjalan dengan efektif.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian tentang Efektivitas Pembelajaran Daring Menggunakan Media Web PJJ Mata Pelajaran TIK Selama Pandemi Covid-19 di SMAN 1 Jampangkulon maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kualitas pembelajara, kualitas pembelajaran pada pembelajaran daring dapat dikatakan efektif karena memenuhi hal yang peneliti temukan di lapangan melalui hasil dari wawancara yang di ajukan kepada narasumber. Dengan demikian hasil temuan peneliti di katakana efektif karena telah mencapai indikator kualitas pembelajaran
2. Indikator kesesuaian tingkat belajar, kesesuaian tingkat belajar pada pembelajaran daring dapat dikatakan efektif kektika memenuhi hal yang peneliti temukan di lapangan melalui hasil dari wawancara yang berisikan tentang kebutuhan sekolah, Fitur Web PJJ, dan materi yang di sampaikan . Dengan demikian hasil temuan peneliti dari wawancara yang di ajukan kepada narasumber tercapai maka dari itu indikator kesesuaian tingkat belajar dikatakan Efektif.
3. Indikator insentif, indikator insentif pada pembelajaran daring dapat di katakana efektif keitka memenuhi pencapaian indikator yang telah peneliti tuangkan dalam bentuk wawancara bagai mana cara guru untuk memotivasi

peserta didik yang di lihat dari kenyamanan peserta didik, cara guru memotivasi saat pembelajaran daring. Dengan demikian indikator insentif dilihat dari wawancara yang peneliti ajukan kepada narasumber efektif.

4. Indikator waktu, indikator waktu pada pembelajaran daring dikatakan efektif ketika memenuhi pencapaian waktu belajar, jam pelajaran peserta didik, dari wawancara yang peneliti ajukan kepada narasumber yang mencapai indikator waktu.

Dari ke empat inikator di atas bahwa penelitian tentang Efektivitas Pembelajaran Daring Menggunakan Media Web PJJ Mata Pelajaran TIK Selama Pandemi Covid-19 di SMAN 1 Jampangkulon efektif karena telah mencapai indikator yang peneliti terapkan sebagai pencapaian sebagai ukuran penelitian dengan di tambahnya nilai PTS TIK.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agustina, M. 2013. *Pemanfaatan E-learning sebagai Media Pembelajaran.*
- [2] Ahmed, S., Shehata, M., & Hassaniien, M. 2020. *Emerging Faculty Needs for Enhancing Student Engagement on a Virtual Platform.*
- [3] Ardiansyah Fitriyana, R. 2017. *NALISIS SEMIOTIKA PADA LOGO BRAND PHILLIP WORKS DI KOTA BANDUNG.*
- [4] Bilfaqih, Yusuf. 2015. *Esesnsi Pengembangan Pembelajaran Daring.* Yogyakarta: Deepublish.
- [5] Chabibie, M. Hasan, Wildan Hakim. 2016. *Pengaruh Penerimaan Teknologi dengan Kebergunaan Web: Studi Kasus Portal Rumah Belajar Kemendikbud.* *ULTIMACOMM.* 8 (1): 37-59
- [6] Chandrawati S, R. 2010. *Pemanfaatan E-leaning dalam Pembelajaran.* Vol, No 2.
- [7] Deassy May Andini dan Endang Supardi. 2018. *Kompetensi Pedagogik Guru Terhadap Efektivitas Pembelajaran*

*Dengan Variabel Kontrol Latar Belakang Pendidikan Guru. Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran. Vol. 1, No. 2, hal. 1-7.*

- [8] Gunawan, Suranti, N. M. Y., & Fathoroni. (2020). *Variations of Models and Learning Platforms for Prospective Teachers During*
- [9] Iwan F. 2014. *Pemanfaatan Media dalam Pembelajaran*. Edisi 1 No. 4, Oktober – Desember 2014, p.104-117. Jakarta Timur.
- [10] Nur, G, D, L. 2014. *Pembelajaran Vokal Grup Dalam Kegiatan Pembelajaran Diri di SMPN 1 Panumbangan Ciamis*.
- [11] Nuriansyah Fazar. 2020. *EFEKTIFITAS PENGGUNAAN MEDIA ONLINE DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PADA MAHASISWA PENDIDIKAN EKONOMI SAAT AWAL PANDEMI COVID-19*. Vol 1, No 2.
- [12] Rosmita. 2020. *SKRIPSI. EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN DARING (STUDI KASUS HASILBELAJAR MATA PELAJARAN EKONOMI KELAS X IPS SMA NEGERI 9 TANJUNG JABUNG TIMUR*. Universitas Jambi
- [13] Sari W, Rifki M, A, & Karmila M. *ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN TERKAIT IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN JARAK JAUH PADA MASA*.
- [14] Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- [15] Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS.

PENGARUH EDUKASI KESEHATAN TERHADAP PENGETAHUAN TENTANG  
KEKERASAN SEKSUAL DAN KDRT

Oleh

Hardilah Ayu Ramadani<sup>1)</sup>, Farcha Fahrica<sup>2)</sup>, Fitria Simatupang<sup>3)</sup>, Retno Dwiyan Putri<sup>4)</sup>,  
Putra Apriadi Siregar<sup>5)</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [hardilah2000@gmail.com](mailto:hardilah2000@gmail.com)

**Abstract**

Sexual violence is an act or behavior that is applied with the aim of getting sexual acts or other actions and of course that leads to a person's sexuality which is carried out by force regardless of the honor and status of the relationship with the victim himself. Domestic Violence or Domestic Violence is gender-based violence that occurs in the personal realm. Based on KEMENPPPA data in 2020, there were 8,600 cases of violence against women. And the National Data on Physical and Sexual Violence against women in 2021 is 26.1. In detail, as many as 13.8 women aged 15-49 years have experienced physical violence in 2021. This study aims to prevent sexual violence and domestic violence in various perspectives, namely health, psychological and Islamic religious perspectives. The data collection instrument used a questionnaire in the form of pre-test and post-test to find out whether there was an increase in knowledge of the respondent. Factors that cause domestic violence are the husband's cheating factor, economic factors and socio-cultural factors. The data analysis that the researcher uses is univariate analysis and also bivariate analysis. And the researcher described shapiro wilk by using the normality test of the data and getting a pre test result of  $0.004 < 0.05$  and the researcher getting a post test result of  $0.00 < 0.05$  which means that the two data have an abnormal contribution, so that in terms of This is continued using the Wilcoxon test analysis with bivariate analysis.

**Keywords : Domestic Violence, Knowledge, Women .**

**PENDAHULUAN**

Kekerasan pada perempuan menurut WHO adalah kekerasan atau sebuah perlakuan dalam segala bentuk kelakuan yang buruk secara fisik ataupun mental baik secara kekerasan seksual, pengabaian (penelantaran) yang mengakibatkan bahaya yang nyata atau potensi kekerasan yang melibatkan perempuan. Di duni tercatat atu dari tiga perempuan yang ada di elurh dunia ini yng njadi korban dari kekeraan seksual maupun fisik. Dan berdasar data dari WHO yang di terbitkan pada tahun 2021 jumlah korban kekerasan seksual ataupun fisik mencapai angka 852 juta perempuan yang berusia 15-49 tahun. Dan data Nasional Kekerasan fisik dan seksual terhadap perempuan pada 2021 sebesar 26,1. Secara detail, sebanyak 13,8 perempuan usia 15-49

tahun selama hidupnya pernah mengalami kekerasan fisik pada 2021.

Sama halnya dengan kekerasan pada perempuan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga merupakan hal yang lumrah terjadi. Kekerasan dalam rumah tangga cukup banyak terjadi sehingga tak luput memakan korban jiwa, dan faktor dari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga juga tidak selalu permasalahan besar, bisa saja faktornya hanya masalah kecil namun sangat berdampak jika hal itu terjadi kepada orang yang cukup emosional. Kekerasan dalam rumah tangga sendiri tidak hanya perempuan yang selalu jadi korban tetapi juga ada pada laki-laki, tetapi memang lebih banyak kasus yang dilaporkan terjadi pada perempuan.

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan (DPPPA) Anak Provinsi Sumatera Utara diketahui bahwa proporsi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan jenis kelamin sebanyak 764 orang (75%) berjenis kelamin perempuan dan sebanyak 249 orang (25%) berjenis kelamin laki-laki. Lalu, terdata pada tahun 2019 jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 997 korban, namun sayangnya mengalami peningkatan jumlah korban pada tahun 2020 sebanyak 1013 orang korban. Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan jumlah korban kekerasan pada tahun 2020 yaitu sebanyak 16 orang .

Upaya promotif berkaitan erat dengan proses perubahan perilaku pada masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pendidikan kesehatan bertujuan untuk memberikan informasi pengetahuan kepada masyarakat terkait kekerasan pada perempuan dan KDRT sehingga secara sadar melibatkan diri mereka untuk menciptakan perubahan dalam menurunkan faktor-faktor resiko yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan pada perempuan dan KDRT.

Pelaksanaan pendidikan kesehatan dilakukan dengan tujuan dapat meningkatkan dan memberdayakan masyarakat dalam mencapai derajat kesehatan yang maksimal. Dalam upaya pencegahan terjadinya kekerasan pada perempuan dan KDRT, pihak yang terlibat harus memiliki pengetahuan yang cukup dan sikap yang positif. Menurut Lawrence Green bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku kesehatan seseorang adalah faktor predisposisi dimana di dalamnya sikap dan pengetahuan termasuk faktor tersebut. Literasi kesehatan yang baik sangatlah penting guna meningkatkan kesadaran diri seseorang dalam melakukan pencegahan akan penyakit secara inisiatif. Pemberian edukasi dapat meningkatkan pengetahuan seseorang, sehingga dapat melakukan gaya hidup dengan baik.

Berdasarkan pada uraian diatas dapat disimpulkan bahwa adanya angka kasus kekerasan pada perempuan dan KDRT yang tinggi di Provinsi Sumatera Utara, serta salah satu upaya dalam mengatasinya yaitu dengan melakukan pendidikan kesehatan. Hal ini menjadi alasan peneliti untuk melakukan studi ini yaitu mengenai bagaimana pengaruh promosi kesehatan terhadap peningkatan pengetahuan dan perubahan sikap pada masyarakat terhadap kekerasan pada perempuan dan KDRT .

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian secara kuantitatif dengan menggunakan desain penelitian *quasyexperimental*. Total sampling pada penelitian ini sebanyak 27 responden. Instrumen pengumpulan data menggunakan kuesioner berbentuk pre-test dan post-test untuk mengetahui apakah ada peningkatan pengetahuan pada responden. Dimana untuk variabel independent yaitu pengetahuan dan untuk variabel dependet yaitu pemberian edukasi tentang pencegahan terjadinya kekerasan seksual dan KDRT.

Analisis data menggunakan analisis univariat dan analisis bivariat. Uji normalitas data menggunakan shapiro wilk dengan hasil pre-test  $0,004 < 0,05$  dan post-test  $0,00 < 0,05$  yang artinya data kedua data tersebut berdistribusi tidak normal, sehingga dilanjutkan dengan analisis bivariat menggunakan uji wilcoxon untuk mengukur perbedaan 2 kelompok data berpasangan yaitu data pre-test dan post-test Webinar Kesehatan Nasional.

Penelitian ini dilakukan secara *online* dengan mengadakan acara Webinar Kesehatan Nasional yang dengan tema “Pencegahan Terjadinya Kekerasan Seksual dan KDRT” pada tanggal 26 Februari 2022 Pukul 08:00 WIB – Selesai. Dimana dalam acara webinar ini diberikan intervensi berupa edukasi mengenai pencegahan terhadap kekerasan seksual dan KDRT.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 1. Karakteristik Responden**

Variabel	N	%
Usia		
17-25 tahun	27	100.0
Jenis Kelamin		
Laki-laki	6	22.7
Perempuan	21	77.8

Hasil studi ini menunjukkan bahwa responden merupakan berusia 17-25 tahun. Hasil juga didapat bahwa sebagian besar responden merupakan perempuan yaitu sebanyak 21 responden (77.8%) (Tabel 1).

**Tabel 2. Uji Normalitas Shapiro-Wilk**

Variabel	Statistik	df	P-value
Pre-Test	0.878	27	0.004
Post-Test	0.428	27	0.000

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa variabel pengetahuan Pre-Test dan Post-Test memiliki *p-value* <0.05 (Tabel 2). Hasil ini menunjukkan bahwa distribusi pada studi penelitian pada variabel pengetahuan terhadap kekerasan seksual dan kdrt merupakan distribusi yang tidak normal.

Maka dari hasil uji normalitas diatas, diambil tindakan analisis bivariat dengan menggunakan uji wilcoxon untuk mengukur perbedaan 2 kelompok data berpasangan yaitu data Pre-Test dan Post-Test webinar kesehatan nasional

**Tabel 3. Uji Wilcoxon Terhadap Pengetahuan Sebelum dan Sesudah Webinar Kesehatan**

Variabel	Pre			Post			P-value
	Mean	Median	SD	Mean	Median	SD	
Pengetahuan	24.37	25	2.339	26.74	27	0.712	0.00

Berdasarkan dari tabel diatas terlihat bahwa nilai sig. adalah 0,000, yang artinya lebih kecil dari 0,05 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya adalah adanya perbedaan rata-rata antara nilai webinar pre-test dan post-test sehingga dapat dikatakan ada pengaruh penyampaian materi dengan metode webinar pada responden yang hadir.

Hasil Penelitian yang dilakukan peneliti menunjukkan ada pengaruh edukasi melalui webinar terhadap tingkat pengetahuan tentang

kekerasan seksual dan KDRT. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho, dkk., (Nugroho & Wardani, 2016) yang mengatakan bahwa didapatkan  $p=0,001$ , artinya ada perbedaan yang signifikan antara pengetahuan responden mengenai NAPZA sebelum dan sesudah mengikuti webinar.

Menurut Notoatmodjo (2017) dengan pendidikan yang cukup baik terjadi proses pertumbuhan, perkembangan dan perubahan kearah yang lebih dewasa, lebih baik dan matang pada individu, kelompok maupun masyarakat.

Audiovisual dapat membantu participant dalam menambah pengetahuan dan wawasan karena lebih menarik untuk dilihat dan didengar karena disajikan 3 dimensi sehingga informasi yang disampaikan diterima oleh responden.

Permasalahan kekerasan seksual dan KDRT memerlukan pemecahan masalah melibatkan seluruh pemangku kebijakan dan komponen masyarakat. Penyintas kekerasan seksual dan KDRT harus diberikan *support* oleh orang disekitarnya dengan mendengarkan cerita mereka dan memberikan berbagai dukungan terhadap aktifitas yang mereka lakukan. Keluarga dan teman sangat berperan penting dalam kebangkitan penyintas kekerasan seksual dan KDRT untuk dapat menjalankan berbagai aktifitas mereka dan tidak merasa dikucilkan oleh keluarga.

Kegiatan webinar dilakukan untuk menyajikan bagaimana pencegahan kekerasan seksual dan KDRT dalam berbagai perspektif yaitu kesehatan, psikologis dan perspektif agama Islam sehingga dapat memberikan berbagai informasi kepada participant tentang kekerasan seksual dan KDRT.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Kegiatan webinar kesehatan nasional dengan tema “Pencegahan Terjadinya Kekerasan Seksual dan KDRT” ini dilaksanakan untuk menyajikan bagaimana

prevention of sexual violence and KDRT in various perspectives namely health, psychological and religious perspective so that can provide various information to participants about sexual violence and KDRT.

Based on the results of the webinar after giving Pre-test and Post-test to measure the knowledge of participants before and after giving the material by the source of material using Shapiro-Wilk test which shows that the data Pretest and Posttest are normally distributed. The results of the hypothesis test using Wilcoxon test which is significant, is 0,000 which means less than 0,05 so the  $H_0$  is rejected and  $H_a$  is accepted. It means that there is a difference in average values between the webinar pre-test and post-test so that it can be said that there is an effect of material delivery with the webinar method on the respondents who attended.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] World Health Organization, 2021, World Health Statistic 2021 : Monitoring Health For The SDGs.
- [2] Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020, Profil Dinas
- [3] Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara
- [4] 2020, Medan : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- [5] Nadra, K. (2017). Situasi Strategi Promosi Kesehatan Di Vico Indonesia, Tahun
- [6] 2016. Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education, 5(1), 102–114.
- [7] Rahman, H., Ramli, R., La Patilaiya, H., Djafar, M. H., & Musiana, M. (2021).
- [8] Promosi Kesehatan untuk Meningkatkan Peran Aktif Masyarakat dalam
- [9] Pencegahan Penyakit Tidak Menular. BAKTI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat), 1(1), 1–11.
- [10] Wang, C., Lang, J., Xuan, L., Li, X., & Zhang, L. (2017). The effect of health
- [11] literacy and self-management efficacy on the health-related quality of life of
- [12] hypertensive patients in a western rural area of China: a cross-sectional study. International Journal Forequity in Health, 16(1), 1–11.
- [13] Nugroho, R. F., & Wardani, E. M. (2016). PENGARUH EDUKASI MELALUI
- [14] WEBINAR TERHADAP TINGKAT PENGETAHUAN TENTANG NAPZA DAN GIZI BAGI REMAJA. 2006(229), 1– 4.
- [15] Notoatmodjo. (2017). Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Jakarta: Rineka Cipta



.....

**KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM PENERAPAN SIMKAH (SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH) DI KUA KECAMATAN CIPARAY KABUPATEN BANDUNG**

Oleh  
Neng Yanti  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
E-mail: [nengyanti1112@gmail.com](mailto:nengyanti1112@gmail.com)

**Abstract**

Referring to the Observation Data which shows the quality of public services in the implementation of SIMKAH at KUA, Ciparay District, which is quite good. The purpose of this study was to determine the effectiveness of the application of simkah in improving the quality of public services in the religious affairs office of the Ciparay sub-district; explained that this simkah can help and facilitate online marriage services. To respond to this, the researchers conducted research at the KUA office in Ciparay District with the aim of knowing the role of implementing simkah in improving the quality of public services in terms of marriage. This research was conducted at the KUA Ciparay District with a qualitative approach and descriptive method. Collecting data in this study using study documentation and interviews. This study found that the application of online simkah in improving service quality went well. With marriage registration from 2018 to 2021 with details; at the beginning of 2018 to be exact from September there were 315 registrants; In 2019 there was an increase to 1556 registrants; In 2020 it decreased due to the pandemic and PPKM became 1341 registrants and in 2021 it increased again to 1521 registrants. This shows that the application of simkah can help in providing good, fast and precise service to the community.

**Keywords: Service Quality, Implementation, Simkah**

**PENDAHULUAN**

Kualitas dalam pelayanan adalah suatu peristiwa khusus dan khas, karena dimensi dan indikatornya bisa berlainan di antara tiap orang-orang yang terkait dengan pelayanan tersebut. Kualitas pelayanan mengacu pada suatu peringkat keutuhan dalam pemberian pelayanan pada pelanggan atau masyarakat, dalam memenuhi kebutuhan dan tuntutan tersebut harus terus diperbaiki dan di perbaharui menjadi pelayanan yang memang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakatnya. Dengan demikian kualitas pelayanan mengacu pada peringkat keutuhan dalam memberikan pelayanan hingga melahirkan kepuasan pada diri setiap pelanggan atau masyarakat para pemakai jasa pelayanan.

Di masa kini, saat dimana penyebaran informasi semakin cepat sejalan dengan

berkembangnya teknologi yang semakin mutakhir, kebutuhan manusia pun menjadi semakin bertambah, salahsatu nya yakni kebutuhan akan informasi yang tengah beredar di kalangan masyarakat. Adanya Penerapan Sistem Informasi Manajemen yang berbasis komputerisasi merupakan salahsatu upaya dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Disamping itu, hal ini pun dilakukan dengan harapan dapat meningkatkan suatu kualitas dalam pelayanan kepada masyarakat sebagai objek dari lahirnya Penerapan Sistem Informasi Manajemen.

Sistem Informasi Manajemen merupakan suatu upaya dalam pemanfaatan sistem informasi yang berperan dalam pengelolaan transaksi dan memberikan dukungan informasi sebagai bentuk peningkatan mutu kualitas dari pelayanan atau manajemen suatu organisasi

dalam mempermudah proses pengambilan keputusan serta membantu kinerja dalam pemberian pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat. Dengan adanya penerapan Sistem Informasi Manajemen dapat menyokong peningkatan mutu kualitas pelayanan publik di masyarakat.

Pelaksanaan pelayanan publik merupakan suatu kewajiban aparatur pemerintah sebagai sumbu kekuasaan tertinggi dalam mewujudkan masyarakat yang elok dan sejahtera. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Pasal 23 ayat 5 tentang Sistem Informasi Pelayanan Publik yang berbunyi “Penyelenggaraan berkewajiban dalam menyajikan informasi seperti yang dijelaskan dalam ayat (4) penyelenggaraan bertanggungjawab dalam hal pengelolaan Sistem Informasi yang tersusun atas sistem informasi elektronik atau nonelektronik minimalnya mencakup: (a) Profil Penyelenggaraan, (b) Profil Pelaksana, (c) Standar Pelayanan, (d) Maklumat Pelayanan, (e) Pengelolaan Pengaduan; dan (f) Penilaian Kinerja. (5) kepada publik secara terbuka serta aksesibilitasnya mudah.

Makna dalam pasal 5 ini yaitu pelayanan yang disediakan bagi publik dengan lebih terbuka atau *transparan* serta memudahkan dalam mengakses suatu layanan yang diberikan, tidak mempersulit dengan diberikan informasi secara terang-terangan dan mudah dipahami. Salahsatu bentuk Ikhtiarnya dalam memberikan suatu pelayanan yang dapat diterima oleh publik dari beragam kelompok, baik dari kelompok terpendidik hingga masyarakat awam. Sehingga pelayanan ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat secara menyeluruh.

Pembangunan nasional yang menitikberatkan pada pengoptimalan kualitas Sumber Daya Manusia memerlukan pendukung sistem manajemen yang sebaik mungkin dan lebih efektif pula dengan meninjau semakin kompleksnya dimensi-dimensi pembangunan pada semua sektor, yang

mendorong fungsi manajemen agar dapat lebih diandalkan, sehingga dapat dikatakan bahwa pengolahan sistem informasi pun ditekankan untuk dapat lebih baik, agar dapat membantu dalam mewujudkan sistem manajemen yang andal dan efektif dalam pemenuhan kebutuhan dan penuntasan permasalahan dalam masyarakat yang terkait.

Akibat dari adanya perkembangan tersebut perlu peningkatan pengorganisasian dan keserasian juga kualitas pelayanan sebagai campur tangan pengelolaan yang ikut mendasarkan sistem manajemen terpadu, yang pelibatangannya meliputi pimpinan, pengelola, pelaksana serta masyarakatnya. Proses yang dilaksanakan menuntut adanya sokongan secara optimal dari berbagai bentuk informasi yang teliti, terpercaya, dan *ready*. Berhubungan dengan langkah ditingkatkannya integritas sistem informasi serta pemanfaatan dalam hal ekspansi sumber daya manusia dan pendayagunaan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam sistem komunikasi, maka peran informasi juga semakin luas, kompleks, dan variatif. Sehingga dapat dikatakan bahwa “jika manajemen sistem informasinya baik maka akan mendukung proses manajemen yang efektif” (Sutabri, 2005)

SIMKAH yang merupakan akronim dari “*system* informasi manajemen nikah” adalah suatu program aplikasi *computer* berbasis windows yang berperan dalam mewedahi data pernikahan dari semua KUA (Kantor Urusan Agama) di Indonesia secara “*online*”, yang mana himpunan data yang dimasukan akan terdokumentasikan dengan baik di KUA setempat, baik KUA kabupaten atau kota, KUA Provinsi dan di Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam. Data tersebut berfungsi sebagai patokan untuk bahan pertimbangan dalam menyusun beragam analisa serta laporan yang disesuaikan dengan beragam kebutuhannya. (Riandinie , 2019)

**Table 1. Tampilan Pendaftaran Nikah****Sumber : Beranda Simkah**

Dalam tabel 1 merupakan tampilan awal ketika calon pengantin mendaftarkan diri untuk melangsungkan pernikahannya sebelum mendaftarkan secara langsung atau melalui Perpanjangan Tangan Para Penghulu (P3N) di desanya masing- masing. Namun perbedaan mendaftar melalui P3N dengan mendaftarkan secara langsung ke kantor KUA Kecamatan secara mandiri adalah dalam segi biaya pendaftaran yang dikeluarkan oleh calon pengantin (CATIN). Jika mendaftar langsung ke KUA catin hanya membayar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 Revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004, kecuali apabila pernikahan di langsungkan di balai nikah KUA setempat ini gratis tidak dipungut biaya apapun, Serta apabila mendaftar pernikahan di luar KUA melalui P3N/Penghulu Desa yang ditarifkan biaya dengan standar yang sudah di sepakati setiap desa di kecamatan tersebut, sebagai uang jasa bagi P3N biasanya biaya yang dikeluarkan dua kali lipat dengan biaya yang dibayarkan ke kua.

Didalam pertumbuhannya, pengaplikasian SIMKAH mendapatkan berbagai ungkapan yang baik. Beberapa diantaranya memberikan respon positif, baik dari bidang *Internal* seperti Operator Simkah atau Pegawai Di KUA Kecamatan serta dari bidang *eksternal* yaitu masyarakat umum yang mendapatkan kemudahan dari pengaplikasian simkah ini. Respon-respon tersebut sangat dibutuhkan oleh para pengelola SIMKAH,

sebab dengan demikian pengelola dapat mengetahui persentase ketercapaian dari program SIMKAH tersebut, yang lebih jauhnya dapat membantu pengelola SIMKAH dengan tujuan sebagai bahan evaluasi dalam Pengembangan Sistem Informasi Nikah di masa yang akan mendatang (Oktaviani, 2020)

Program SIMKAH ini dapat dikatakan perlu diterapkan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan serta kinerja dari pelayanan para administator nikah KUA Kecamatan, oleh karena itu mulai tahun 2007 Dirjen Bimas Islam telah sepakat untuk dapat mengoptimalkan kapasitas KUA melalui pemberdayaan dan peningkatan pelayanan berbasis IT (*Information and Technology*), (islam, 2007) hal ini dilakukan sebagai bentuk dari respon positif terhadap pelayanan pencatatan nikah yang pada masa sebelumnya dilakukan dengan cara yang kurang efektif, yakni secara manual kini beralih dengan memberlakukan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) *Online*, dengan bentuk web (daftar nikah online- simkah-kemenag, n.d.) kita bisa melakukan pendaftaran nikah secara *Online* kapanpun dan dimanapun.

Penyeragaman data didalam pengelolaan sistem informasi, penting untuk dilakukan dengan tujuan agar data yang dihasilkan dapat lebih efektifi dan efisien sehingga mempermudah dalam penanganan permasalahan ataupun keperluan yang terjadi. Penerapan *Backup* data merupakan suatu usaha untuk menyelamatkan dan mengumpulkan data yang telah didapatkan dari berbagai permasalahan yang tidak diharapkan dan bisa muncul dengan tiba-tiba seperti bencana alam, pembajakan dan lain sebagainya. Program SIMKAH ini merupakan suatu aplikasi yang dibuatkan khusus untuk kepentingan dalam perkawinan, rancangan dari aplikasi ini agar berkolaborasi dengan kemajuan teknologi yakni terhubung dalam jaringan internet, sebagai salahsatu penyedia pelayanan kebutuhan masyarakat yang dipandang lebih efektif, efisien dan aman.

Menyikapi permasalahan tersebut, Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 dalam Bab VII pasal 21 ayat (1) mengatakan Administrasi Pencatatan Pernikahan dilaksanakan dengan memanfaatkan aplikasi *system* informasi manajemen pernikahan berbasis *Online* atau dikenal dengan Aplikasi SIMKAH *Online*. Oleh karenanya penelitian ini sangat penting untuk dilakukan dan dibahas, dengan harapan berbagai jenis pelayanan di KUA terhadap masyarakat di Kecamatan Ciparay dapat terus mengalami peningkatan, terutama dalam bidang pernikahan.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Ade Ani Satriani pada tahun (2014), dengan judul Skripsi “Penerapan Sistem Manajemen Nikah (SIMKAH) *online* di KUA kota surabaya dalam perspektifnya Peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007. Fokus dalam penelitiannya mengenai prosedur diterapkannya SIMKAH *online* di KUA Kota Surabaya dalam bentuk modernisasi pengarsipan data pernikahan yang umumnya dilakukan dengan metode konvensional, saat ini beralih pada sistem yang mengharuskan mendaftarkan secara *online*. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh ade bukan hanya lokus yang membedakan dalam penelitian ini tetapi dari fokus penelitian pun berbeda, penelitian ade berfokus pada prospek PMA No 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah, sedangkan penelitian ini berfokus dalam menambah kualitas pelayanan nikah melalui diterapkannya Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Ciparay. (Ani Satriani, 2014)

Penelitian terdahulu lainnya adalah dari Andi Imran Paturusi (2015) dengan judul skripsi Pemeriksaan dan Pengawasan Perkawinan di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang (Studinya tentang penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), fokus dalam penelitian ini adalah keefektifan penggunaan dalam sistem aplikasi ini pada KUA Kecamatan Klojen serta prosedur

pengontrolan serta pengendalian perkawinan sebelum maupun sesudah adanya pengimplementasian dari sistem Simkah. Perbedaan penelitian ini bukan hanya lokus pada Kota Malang dengan Kabupaten Bandung namun fokus di penelitian andi adalah pengimplementasian Simkah serta pengawasan perkawinan dan proses pemeriksaan ketika sebelum dan sesudah diberlakukannya simkah, sedangkan penelitian ini berfokus pada kualitas pelayanan nikah dalam Penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Ciparay. (Imran Paturusi, 2015)

Menurut Parasuraman et,al (lupiyoadi, 2008) Analisis kualitas Pelayanan atau *Service Quality* (SERVQUAL), yaitu suatu ukuran seberapa optimalnya suatu pelayanan yang bertemu dengan kecocokan dan harapan pelanggannya. Penyelenggaraan kualitas pelayanan ini suatu kompromi dengan harapan pelanggan dengan cara yang konsisten. Maka terdapat beberapa dimensi *Servqual* diantaranya: (1) bukti nyata (*tangible*), (2) kehandalan (*reliability*), (3) daya tanggap (*responsiveness*), (4) keyakinan (*assurance*), dan (5) kepedulian (*emphaty*). Dengan kelima dimensi ini kualitas pelayanan dapat dikatakan optimal atau baik dalam suatu instansi atau organisasi. (Algifari, 2019, Cet: 2)

Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat beberapa perihal yang menarik untuk di kaji, salah satunya adalah asumsi masyarakat terkait dengan pelayanan di KUA, yang pada dasarnya dibentuk untuk memberikan pelayanan dan mempermudah dalam berbagai keperluan. dalam hal ini keperluan terkait dengan nikah, masyarakat masih berasumsi bahwa setiap proses yang dijalankan di KUA berkesan rumit, serta penerapan SIMKAH ini masih tabu di masyarakat dalam pengaplikasiannya. Dan sosialisasi yang dilakukan pihak KUA belum sepenuhnya tersampaikan dengan baik, sehingga strategi apa yang harus dilakukan oleh pihak KUA dalam penerapan SIMKAH *Online* kepada masyarakat dan para P3N atau penghulu desa.

## METODE PENELITIAN

Pengkajian tentang penerapan SIMKAH dalam peningkatan kualitas pelayanan nikah di KUA Kecamatan, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Kehadiran pendekatan kualitatif, Menurut prof. Parsudi Suparlan (Suparlan 1994: 25) umumnya dihubungkan dengan definisi yang senada dengan pendekatan yang pada keilmuan antropologi diketahui sebagai pendekatan holistik. Pada pendekatan ini, tidak terdapat sampel; namun penelitian harus dilaksanakan secara teliti, mendalam serta ekstensif guna mendapatkan gambaran terkait berbagai kaidah umum atau berbagai paradigma yang berlaku secara umum berkaitan dengan berbagai fenomena yang terjadi pada kehidupan sosial bermasyarakat yang teliti sebagai kasus itu sendiri (Patilima, Metode Penelitian Kualitatif, 2010)

Peneliti menerapkan jenis penelitian deskriptif dengan maksud agar lebih mempermudah dalam menjelaskan serta memahami kondisi dan kajian yang diteliti. Dipaparkan oleh (Anggara, 2015) bahwa penelitian deskriptif dilakukan untuk menyingkap berbagai aspek atau berbagai aspek berdasarkan sasaran penelitiannya. Sehingga secara komprehensif dapat diketahui secara mendalam serta dipahami secara jelas dalam memberikan makna dan nilai yang disampaikan. Serta objek penelitian dengan jenis deskriptif ini berbentuk orang, lembaga, masyarakat dan lain sebagainya yang di masa kini berdasarkan berbagai fakta yang ada atau tampak.

Untuk mendukung analisis penelitian ini, peneliti menerapkan teknik *purposive sampling* dalam pemilihan informan, teknik *purposive sampling* ini yaitu metode pengambilan sampel data yang dilandaskan pada alasan estimasi khusus. Subjek dan objek penelitian yang sudah diputuskan oleh peneliti sesuai dengan kebutuhan penelitiannya. (sugiyono, Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D, 2017) berdasarkan hasil

telaah dan perbandingan yang dilakukan secara eksklusif oleh peneliti. Peneliti juga telah melakukan wawancara dengan berbagai informan, antara lain: Informan Kunci: Drs. H. A. Rojali sebagai Kepala KUA Kecamatan Ciparay. Informan Utama: Ujang Firmanysah, S.Ag., M.Ag sebagai Penghulu, dan Deden Humron, SHI sebagai penghulu.

Peneliti juga telah melakukan pengumpulan data dengan beberapa tahapan diantaranya Observasi secara partisipasi yang dilakukan dengan memahami wawasan dari seluruh gejala sosial berdasarkan pengetahuan serta ide atau konsep yang telah diketahui sebelumnya. Menurut Sugiyono Observasi Partisipatif yaitu pengamatan berperan serta (sugiyono, 2013). Sehingga peneliti ikut berperan dalam pengamatan kinerja dari tanggal 1 Agustus 2021 sampai 27 Agustus 2021 dibidang Operator Pelayanan Nikah KUA Kecamatan Ciparay.

Tahap berikutnya melakukan wawancara secara bebas terpimpin dengan hanya menanyakan garis besarnya saja kepada para informan. Atau sama dengan wawancara tak terstruktur secara khas hanya mempunyai satu *interview guide*, yang secara khas dicakup. Karena kelebihan dari wawancara tak terstruktur memiliki kelebihan sebab dapat *probing*. Dimana *probing* ini dapat memotivasi responden dalam mengolaborasi suatu jawaban dan membantu fokus percakapan, sehingga *probing* lebih penting menjadi suatu instrumen untuk mendapatkan dan mengharapkan informasi lebih lanjut. (Silalahi, 2009)

Dan tahapan terakhir adalah studi dokumentasi secara resmi dengan pengambilan bukti dan dokumen pendukung salah satunya studi dokumentasi terkait data presentasi Perkawinan terhitung dari bulan September 2018 sampai dengan bulan Desember 2021. Menurut sugiyono Studi Dokumentasi ialah sebuah teknik pengumpulan data melalui pengkajian dokumen agar dapat menemukan data atau informasi yang berkenaan dengan

permasalahan yang sedang diteliti. (Sugiyono, 2015)

Kemudian teknik menganalisis data dalam penelitian ini mengkiblat pada teori Milles & Hubberman (Sugiyono, 2015) melalui tiga tahapan dalam penelitian diantaranya reduksi data atau bentuk analisis yang memfokuskan, mengklasifikasikan atau membidikkan, mengeliminasi data yang kurang diperlukan, lalu penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Melalui tiga tahapan ini dapat memudahkan peneliti dalam menganalisis data yang akan disajikan dalam penelitian ini.

Serta dalam teknik menguji keabsahan data menggunakan Triangulasi data, Di mana peneliti mencari tahu lebih lanjut terkait kebenaran informasi yang didapatkan dengan menggunakan metode ataupun sumber perolehan data. Triangulasi data-data akan dihimpun melalui sumber yang plural guna memasukkan data pengamatan, wawancara ataupun diskusi kelompok yang terfokus (Patilima, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, 2004) Menurut Moleong (2010) triangulasi yaitu teknik pengecekan keabsahan data yang mendayagunakan hal lain yang ada di luar data tersebut demi kebutuhan pemeriksaan atau sebagai unsur yang bandingan terhadap data tersebut. (Moleong, 2010)

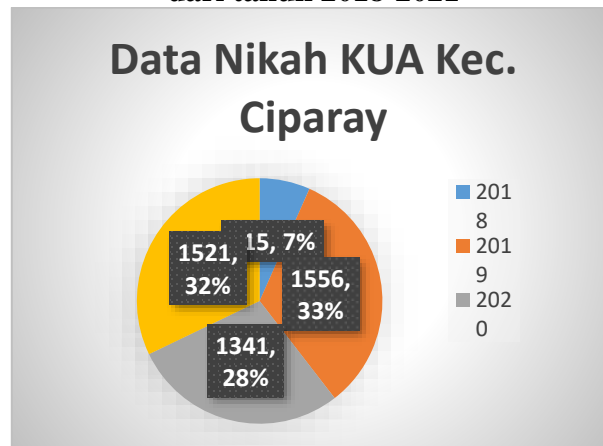
## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pelayanan Publik dalam Penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan

Menurut Moenir pelayanan yaitu “sebuah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang berorientasi pada sebuah komponen entitas melalui sistem, prosedur dan metode khusus sebagai upaya guna mencukupi kebutuhan orang lain sesuai dengan haknya masing-masing” (Moenir, 2010). *Service* adalah suatu komoditas yang tidak kasat mata, serta berjalan dengan waktu yang tidak lama juga diterima oleh konsumennya. Pelayanan adalah hal yang amat dibutuhkan oleh setiap orang Menurut

Parasuraman (2001: 69) segala wujud pelayanan membutuhkan adanya kejelasan dari pelayanan yang disediakan. Wujud dari kejelasan dari suatu pelayanan amat bergantung pada jaminan dari pegawai yang menyediakan jasa, karenanya pihak yang memperoleh pelayanan dapat merasakan kepuasan serta percaya bahwa seluruh wujud dari hal-hal yang terkait dengan pelayanan yang dilaksanakan dapat rampung serta tuntas sesuai dengan efisiensi, efektivitas, kemudahan, kelancaran serta mutu layanan yang disediakan. (Alif, 2013)

**Tabel 2 Presentasi keseluruhan Perkawinan dari tahun 2018-2021**



**Sumber : Simkah KUA Kecamatan Ciparay**

Dengan dilampirkannya tabel presentasi keseluruhan perkawinan dari bulan September 2018 dengan 315 pendaftar hingga Desember 2021 dengan 1556 pendaftar, merupakan bukti dengan adanya pengaplikasian simkah dalam menambah kualitas pelayanan di KUA kecamatan ciparay harus lebih ditingkatkan kembali dalam berbagai aspek pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Karena pelayanan nikah akan terus bertambah dan menjadi hal yang amat penting sehingga harus terus di *upgrade* pelayanannya. Ditahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 1556 pendaftar; di tahun 2020 mengalami penurunan angka pendaftaran nikah menjadi 1341 pendaftar dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) serta ada penambahan

persyaratan yang diberlakukan terhadap catin yang tetap akan melangsungkan pernikahan dimasa pandemi sehingga banyak catin yang mengundurkan diri untuk menunda pernikahannya; di tahun 2021 mengalami kenaikan kembali angka pendaftaran nikah menjadi 1521 pendaftar nikah di kua kecamatan ciparay. Ini menunjukkan bahwa pelayanan yang terus diperbaharui dan dimaksimalkan dengan tujuan agar pelayanan yang disediakan bisa lebih bermutu serta efektif dan efisien.

Sehingga kualitas pelayanan menjelma sebagai suatu ketentuan yang amat substansial dalam menciptakan hasil yang sesuai dengan harapan semua konsumen jasa layanan. Pelayanan yang baik bisa melahirkan rasa puas bagi penerima layanan atau publik. Menurut Lewis & Boms dalam Tjiptono kualitas pelayanan didefinisikan sebagai “Tolak ukur seberapa bagus tingkat pelayanan yang diberikan dapat sesuai dengan harapan pelanggan atau konsumen” (Tjiptono, 2012). Sedangkan Menurut Goetsch dan Davis (Goetsch David Lcfan Davis, 2008) mendefinisikan bahwa kualitas pelayanan sebagai sebuah limitasi dinamis yang berkaitan dengan manusia, jasa, proses, produk, serta lingkungan yang mencukupi atau bahkan mungkin melampaui target. Kualitas pelayanan juga didefinisikan sebagai hal yang berkaitan dengan tercukupinya target atau kepentingan konsumen atau publik, dimana pelayanan disebut bermutu jika bisa menyediakan produk dan atau jasa sesuai dengan kepentingan publik.

Sistem Informasi Manajemen yang umum diketahui oleh kebanyakan orang sebagai suatu sistem manusia atau mesin yang terprogram untuk menyediakan informasi dalam mendukung tugas operasi organisasi, manajemen, serta prosedur ditentukannya keputusan dalam suatu organisasi. Seperti yang dikemukakan oleh Donald W. Kroeber (1984: 232) bahwa “Sistem Informasi Manajemen membantu terhadap kegiatan manajemen data informasi khususnya yang memiliki keterkaitan langsung dengan basis informasi, keaktualan

informasi, arus informasi serta perluasan dalam proses penghimpunan informasi”. Selain itu, menurut Robert G. Murdick dan Joel E. Ross dalam bukunya yang berjudul “Sistem Informasi untuk Manajemen Modern” (terjemahan) dijelaskan bahwa SIM sebagai metode komunikasi di mana informasi yang diterima (*input*) dicatat, didokumentasikan, serta diolah guna menghasilkan *output* yang berbentuk kebijakan terkait perencanaan, pengoperasian, ataupun pengawasan.”

Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) merupakan suatu program aplikasi komputer berbasis web yang gunanya adalah untuk menghimpun berbagai data nikah dari seluruh KUA (Kantor Urusan Agama) yang berada dalam wilayah Republik Indonesia secara "online", kemudian, data dapat terdokumentasikan dengan baik di KUA setempat, di kantor kabupaten/kota di kantor wilayah provinsi dan di Bimas Islam. Himpunan data tersebut gunanya adalah untuk menyusun beragam analisa serta laporan berdasarkan kebutuhan. Kapabilitas pokok dari program Simkah ini yaitu akses data yang terbilang mudah dari KUA untuk disetor ke Kantor Kementrian Agama (Kankemenag), Kantor Wilayah (Kanwil) serta Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam dengan memanfaatkan internet agar murah dan efektif.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Drs. H. A. Rojali sebagai Kepala KUA kecamatan Ciparay saat peneliti wawancara:

“Dengan diberlakukannya Simkah *Online* ini pada tanggal 8 november 2018 dengan tujuan agar mempermudah pelayanan simkah dirancang untuk mempermudah pengelolaan administrasi nikah dengan dukungan validitas data yang terintegrasi dengan data kependudukan dan catatan sipil. Sehingga pendaftaran di simkah secara *online* diperuntukan kepada catin yang akan mendaftar nikah di KUA, jadi sebelum daftar ke kantor, catin harus sudah daftar online secara mandiri, setelah itu baru datang ke kantor KUA dengan membawa

berkas atau persyaratan yang harus di penuhi. Serta melampirkan nomor pendaftaran *online*, setelah itu catin membayar biaya nikah sebesar Rp.600.000 ke Bank yang telah bekerja sama dengan kemenag. Sebetulnya mudah dengan kita mendaftar secara mandiri, karena sekarang sudah difasilitasi pendaftaran *online* melalui simkah.”

Sehingga kita pun sebagai masyarakat yang baik seharusnya sudah bisa memanfaatkan kemajuan teknologi dengan menggunakan sebaik mungkin dan memanfaatkan kemudahan teknologi informasi dan komunikasi dengan mempermudah segala sesuatu yang menjadi keperluan kita pada saat ini. Salah satunya mendaftar nikah secara *online* serta mudah kita dapatkan informasi apapun yang kita butuhkan di internet dan media sosial lainnya.

### **Bukti Fisik (Tangibles) atau Sarana Prasarana yang menunjang Kualitas Pelayanan Publik di Kantor KUA Kecamatan**

Menurut menteri agama (Lukman Hakim Saifuddin) “keberadaan KUA termasuk sarana dan prasarana yang memadai sangat penting selain berfungsi melayani urusan keagamaan masyarakat sekitar. KUA di Indonesia sebanyak 5.945 unit yang masih diupayakan untuk mewujudkan pembangunan-pembangunan KUA di kecamatan yang belum memiliki unit.” Mencakup penampakan fasilitas fisik, peralatan, sumber daya manusia, dan bahan-bahan komunikasi lainnya sangat penting sebagai penunjang dalam *output* pelayanan yang berkualitas.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Deden Humron. SHI sebagai penghulu KUA kecamatan Ciparay saat peneliti wawancara:

“Pegawai KUA ciparay semuanya 15 orang Pegawai termasuk Bapak Kepala, 4 orang Penghulu 2 orang Pengawas, 2 orang Penyuluh dan 6 orang Pegawai Tata Usaha kadang dengan jumlah pegawai 14 orang ini kami masih kewalahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga kami

selalu menerima siswa/siswi yang magang dari sekolah atau mahasiswa dari Universitas yang ingin mengabdikan dan membantu dalam pelayanan di KUA kecamatan ciparay. Untuk fasilitas pun kami tidak semua memakai sarana dan prasarana kantor karena terbatas jadi ada beberapa pegawai juga yang memakai laptop (Barang Pribadi) untuk digunakan dalam menyelesaikan tugas dan kewajibannya masing masing. Bahkan untuk kantor sendiri pun masih bukan hak milik melainkan kontrak pertahun. Dan perencanaan untuk tahun 2022 KUA kecamatan ciparay akan dibuatkan unit tetap di Jl. Raya Laswi, Gununglutek, Ciparay samping Mesjid Al Karomah Ciparay.”

Sehingga ini menjadi hal yang sangat krusial, dimana disamping kita didesak agar dapat menyediakan pelayanan yang baik bagi publik. Pihak KUA Kecamatan pun masih bergelut dengan kesejahteraan dalam menyediakan pelayanan yang baik dengan bentuk fisik atau sarana dan prasarana yang belum dibuatkannya unit tetap KUA Kecamatan Ciparay oleh pusat. Karena kenyamanan suatu Kantor dapat memberikan energi positif terhadap kinerja para sumber daya didalamnya.

**Tabel 3. Struktur Organisasi Kantor KUA Kecamatan Ciparay**

NO	NAMA	JABATAN
1	Des. H. A. Rojali	Kepala Kua
2	Drs. Tatang Hadayat M.Mpd	Pengawas
3	Deni Hamdani M.Mpd	Pengawas
4	H. Jajang Mulyadi	Penyuluh
5	Maman Suparman S.Pd.i	Penyuluh
6	Ujang Firmansyah S.Ag., M.Sy	Penghulu
7	Iwan Shoefwan S.Pd.i	Penghulu
8	H. Sobari S.Ag	Penghulu
9	Deden Humron S.HI	Penghulu
10	N. Wiwi Wihaendah S.Ag	Tata Usaha
11	Dra. Maria Ulfah	Tata Usaha
12	Dewi Purnama	Tata Usaha
13	N. Oja Rojanah S.Ag	Tata Usaha
14	Rizqi Fadillah	Tata Usaha
15	Siti Nurazizah	Tata Usaha

**Sumber :LAKIP Kantor KUA Kecamatan Ciparay**  
**Kehandalan Sumber Daya Manusia (SDM) KUA Kecamatan**

Kemahiran serta wawasan yang diperlukan agar bisa memberikan jasa sesuai



dengan keperluan konsumen. Di dalamnya termasuk wawasan serta kompetensi karyawan, wawasan serta kompetensi personil dukungan operasional serta kemampuan riset organisasi. Fokus dalam aspek kemahiran sumber daya manusia harus diperhatikan dalam tugas personalia atau *staffing*. Tugas ini adalah tugas dari setiap manajer yang berinteraksi dengan para pegawai di wilayah pimpinannya agar para pegawai tergerak untuk mengerjakan tugas dengan semaksimal mungkin guna mewujudkan tujuan dari kantor atau Visi Misi dari pimpinan. (Manullang, 2012)

Hal ini disampaikan oleh Bapak Ujang Firmansyah, S.Ag., M.Sy sebagai penghulu KUA kecamatan Ciparay saat peneliti wawancara:

“Di kantor Kua Kecamatan Ciparay suka merekrut pegawai honorer yang membantu pekerjaan kami disini, setiap tahunnya tidak lebih dari 1-2 orang pegawai honorer karena gaji dari pegawai honorer ini dibayar dari dana Kas KUA Kecamatan. Sehingga kami merekrut setiap tahun ya dengan sistem kontrak satu tahun tidak lebih dari dua orang. Dengan pemilihan pegawai pembantu kita pun tetap mengedepankan keahlian, skill dan latarbelakang pendidikan, hal ini memberi kesempatan kepada adik adik *fresh graduate* yang baru mencari pengalaman di dunia kerja jadi kami fasilitasi sambil belajar dan menambah pengalaman kerja, dan biasanya yang datang lagi kekantor yaitu orang-orang yang dulu nya pernah mengabdikan atau magang waktu sekolah/kuliah di kantor kami”

### **Responsivitas atau daya tanggap dari Para Pegawai KUA Kecamatan dalam memberikan Pelayanan Nikah di KUA Kecamatan**

Kesanggupan serta kesiapan para Pegawai kantor kua guna mendorong para catin dan memberikan jasa secara cepat seperti ketepatan waktu pelayanan, pemberian layanan secara cepat. Dari hasil penelitian Ulbert Silalahi (dalam Zulkarnaen, 1996: 55)

ditemukan bahwa pelayanan yang disediakan belum baik dalam penyelenggaraan berhubungan dengan hal tersebut. Hidayat dan Sucherly (1956: 87) berpendapat bahwa; secara umum, organisasi pemerintah seringkali menemui tiga masalah yang mencakup kurangnya efektivitas, kurangnya efisiensi serta kualitas pelayanan yang belum optimal. Budaya yang berkibat pada tercapainya target adalah salah satu identitas dari organisasi birokrasi, (Mulyadi, 2018).

Sehingga permasalahan yang menjadi daging para *stake holder* dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya masih dirasa acuh atau mengabaikan. Tanggungjawab dalam memberikan pelayanan yang baiknya hanya dilakukan diawal-awal pelayanan saja. Namun kembali tidak bisa menyalahkan para pegawainya juga dibalik *problems* ini ada faktor yang mempengaruhi diantaranya upah yang tidak memadai, apalagi untuk para pegawai pembantu. Dengan tugas dan kewajiban yang besar namun tidak sebanding dengan penghasilan yang didapatkan. Sehingga ini menjadi faktor yang harus di perhatikan dalam memperbaiki kualitas pelayanan bagi publik.

Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Ujang Firmansyah, S.Ag., M.Sy sebagai penghulu KUA kecamatan Ciparay saat peneliti wawancara:

”Terkait upah para pegawai pembantu yang ada dikantor kami pun, upah yang diberikan dari dana Kas KUA Kecamatan sehingga upah yang diberikanpun tidak menentu, terkadang kita upah sebesar Rp.700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) hingga Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya, karena tidak ada dana untuk pegawai pembantu dari pusat sehingga kami sebisa mungkin *manage* keuangan kas KUA dalam pemberian upah pegawai pembantu”

### **Keyakinan atau Reliabilitas**

Mencakup 2 unsur pokok, yaitu konsistensi kinerja (*performance*) serta sifat bisa dipertanggungjawabkan (*dependability*).

Hal tersebut artinya adalah perusahaan bisa menyediakan jasanya dengan benar sejak awal (*right the first time*), menepati janjinya sesuai kesepakatan serta andal (contohnya, menyediakan jasa sesuai dengan jadwal yang diagendakan), merekam data (*record*) dengan tepat. Keyakinan dari pegawai kantor sangat dibutuhkan oleh para penikmat kepentingan pelayanan kantor kua kecamatan sehingga ketika pegawai memberikan jaminan berupa keyakinan kepada masyarakat dalam melaksanakan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Sehingga pelayanan akan lebih efektif dan efisien serta kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan atau masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Karena pelayanan yang baik adalah pelayanan yang diakui secara positif dan diterima dengan baik.

Hal ini disampaikan oleh oleh Bapak Ujang Firmansyah, S.Ag., M.Sy sebagai penghulu KUA kecamatan Ciparay saat peneliti wawancara:

“Dalam perihal keyakinan yang diberikan sebagai jaminan kepada catin, dalam waktu satu minggu berkas harus sudah selesai dan siap untuk dipakai atau diterima oleh P3N, karena waktu pendapftaran di web Simkah *Online* minimal 10 hari sebelum tanggal pernikahan, sehingga berkas yang kita proses 3x24 jam atau 3 hari kerja. Dan sebagai kelanjutannya dalam Hari H pernikahannya dokumen ini dibawa dan di tandatangani oleh kedua mempelai sebagai simbolis dan dokumentasi”

### **Kepedulian memahami kebutuhan Pelanggan atau Masyarakat**

Berusaha mengerti keinginan konsumen serta keperluan spesifik mereka, memberikan perhatian individual, serta mengenali masyarakatnya. Sehingga kita mesti paham dengan masyarakat yang awam mengenai pendaftaran nikah di kua kecamatan sehingga bentuk upaya dari kepedulian ini dengan memberikan informasi secara *transparan* dan mudah di pahami, tidak bertele-tele juga membantu dengan senang hati kepada

masyarakat yang sangat tertinggal dalam kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di zaman modern ini. Contohnya seperti orang tua yang akan menikah lagi, baik dikarenakan cerai hidup ataupun cerai mati dengan mendaftar sendiri ke Kantor KUA sehingga perlu pengawasan dari kita untuk membimbing pendaftaran secara onlinenya, karena tidak sedikit masyarakat khususnya orang tua yang gagah teknologi (*gaptek*).

Hal ini disampaikan oleh oleh Bapak Drs. H.A Rojali sebagai Kepala KUA kecamatan Ciparay saat peneliti wawancara:

“ini menjadi PR bagi kami, karena banyak kendala juga yang kami rasakan salah satunya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atau calon pengantin, baik dari segi sarana dan prasarana dan pelayanan yang masih kurang yang kita akui. Namun kedepannya setelah di bangun kantor baru KUA Kecamatan Ciparay yang nantinya akan pindah pada kantor tetap di Pinggir Mesjid Al-Karomah ciparay sehingga akan lebih tertata dengan baik pelayanan, sarana dan prasarana dan fasilitas-fasilitas yang menunjang pelayanan di KUA Kecamatan Ciparay seperti layaknya KUA kecamatan dengan adanya balai nikah yang nyaman, karena untuk sekarang jika ada yang Nikah di KUA kita menggunakan mesjid terdekat sebagai balai nikah”

### **Hambatan yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik**

Faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik dalam organisasi memberikan gambaran mengenai pencapaian dari pelaksanaan pelayanan yang telah diberikan kepada pengguna layanan. Menurut Moenir (Moenir A. , 2001) bahwa faktor-faktor *internal* birokrasi pemerintah yang mempengaruhi kualitas pelayanan adalah sebagai berikut: Faktor kesadaran aparatur pemerintah melaksanakan fungsi pelayanan; Faktor aturan yang memadai dalam organisasi, agar organisasi dan pekerjaan dapat berjalan secara teratur dan terarah; Faktor organisasi sebagai

suatu mekanisme sistem dalam pencapaian tujuan kualitas pelayanan; Faktor pendapatan pegawai aparatur pemerintah; Faktor kemampuan dan keterampilan pegawai; Faktor tersedianya sarana pelayanan.

Keberhasilan instansi dalam pelayanan publik juga tidak lepas dari unsur atau sarana manajemen instansi tersebut. Komponen manajemen diperlukan agar manajemen organisasi terlaksana dengan baik juga benar serta tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan harapan. Menurut Manullang sebagaimana dikutip oleh Mastini (2013:61) (Mastini, 2013) tentang komponen manajemen, terdiri atas *man*, *material*, *machine*, *method*, *money* dan *markets*, setiap komponen tersebut mempunyai penjelasan serta kontribusi bagi suatu manajemen agar memahami bahwa manajemen mempunyai beberapa komponen yang harus dimanfaatkan.

a. Manusia (*Man*).

Media substansial atau sarana pokok setiap manajer dalam mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan oleh individu-individu tersendiri atau manusianya. Berbagai kegiatan yang bisa dilakukan dalam mewujudkan tujuan seperti yang bisa dilihat dari paradigma proses, perencanaan, pengorganisasian, *staffing*, pengarahan, serta pengawasan atau bisa juga kita lihat dari sudut bidang. *Man* /manusia ataupun juga sering dikenal dengan sumber daya manusia dalam dunia manajemen adalah unsur yang sangat penting serta berpengaruh. Manusia yang menyusun tujuan, menentukan tujuan serta manusia juga yang nantinya akan melaksanakan proses dalam mewujudkan tujuan yang telah ditentukan tersebut.

b. Material (*Material*).

Pada proses dilaksanakannya kegiatan, manusia memakai material atau bahan-bahan. Karenanya, material dinilai juga sebagai media atau alat manajemen dalam mewujudkan tujuan. Bahan atau bisa disebut sebagai media serta prasarana ini amat mendukung manusia dalam melaksanakan tugas maupun kewajibannya. Tanpa *Material* manusia tidak

dapat menyediakan pelayanan dengan maksimal.

c. Mesin (*Machine*).

Seiring dengan kemajuan teknologi, manusia tidak lagi sebagai pembantu mesin seperti pada masa lalu sebelum Revolusi Industri terjadi. Bahkan, sebaliknya kedudukan mesin sudah berubah menjadi pembantu manusia. Karenanya, kita sebagai manusia harus dapat bersahabat baik dengan mesin yang bisa mendukung dalam mempermudah segala kegiatan serta pekerjaan manusianya sendiri.

d. Metode (*Method*).

Guna bisa melaksanakan aktivitas dengan benar dan berhasil guna, manusia dipertemukan pada berbagai cara alternatif dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut sehingga cara yang dilakukan bisa menjadi media atau instrumen manajemen dalam mencapai tujuan. Hal tersebut sangat penting dalam menjangkau manusia, Material, dan Mesin. Metode ini seperti strategi yang dilakukan atau rancangan yang diberlakukan guna mempermudah pelayanan yang diberikan.

e. Uang (*Money*).

Uang sebagai alat manajemen harus dimanfaatkan sedemikian rupa agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Aktivitas atau ketidaklancaran proses manajemen kurang lebih diimplikasi oleh pengelolaan keuangan. Seperti halnya Uang ini diibaratkan sebagai Roda dalam kehidupan suatu organisasi. Kita mesti pandai mengelolanya, seperti yang dikatakan Kepala KUA saat diwawancarai, beliau mengatakan:

"Pengelolaan uang yang menjadi Anggaran dari Kemenag sudah mendapatkan aliran dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dimana kemenag menargetkan pembangunan 135 unit Balai Nikah dan Manasik Haji pada tahun 2021. Mengingat pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji ini merupakan salah satu bagian peningkatan fungsi KUA, banyak Kua di Indonesia berada dalam kondisi kurang layak sebagai tempat pelayanan

publik. Jika dilihat dengan Kantor-Kantor Pelayanan Publik lainnya. Sedangkan KUA pun memiliki peran yang sama sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat. Sehingga ditahun 2022 perencanaan pembangunan Kantor Kua Kecamatan Ciparay yang akan dibangun di samping Mesjid Al-Karomah Ciparay, dana yang digulirkan oleh pemerintah kita harus bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan pelayanan nikah.”

f. Pasar (*Markets*).

”Market bagi kami adalah kepuasan dari masyarakat, atas pelayanan yang diberikan kepada catin dengan adanya bimbingan kawin (BINWIN) yang dilakukan sebelum melakukan pernikahan, kita bekali dulu mereka dengan sedikit pengetahuan-pengetahuan yang dapat menjadi bekal dalam melangsungkan kehidupan barunya yaitu Berumah Tangga.”  
Ucap Bapak Drs. H. A. Rojali.

#### **Upaya dalam mengatasi segala hambatan yang terjadi**

Beberapa upaya yang harus direalisasikan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penerapan simkah di KUA kecamatan ciparay dalam meningkatkan kualitas pelayanan, seperti yang disampaikan oleh kepala KUA Bapak Drs. H.A Rojali saat peneliti wawancara :

“Upaya yang telah dilakukan KUA kecamatan ciparay untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi ialah dengan cara memberlakukan bimbingan pelatihan baik untuk pegawai dan operator pelayanan di KUA sendiri juga kepada para P3N dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang menunjang keberlangsungan pelayanan nikah, seperti pelatihan pendaftaran *online* , juga menyediakan bahan untuk menjadi bekal para P3N dalam membimbing para catin yang akan melangsungkan pernikahan. Pelatihan ini dilakukan setiap 6 bulan sekali biasa nya sekaligus evaluasi terhadap progres kerja dari kita. Tetapi jika ada informasi *up to date*

kita akan informasikan secara cepat tanpa harus menunggu waktu evaluasi”

Dalam mengatasi permasalahan lain, seperti yang disampaikan oleh Pak Deden Humron., SHI sebagai Penghulu saat peneliti wawancara:

“Upaya lainnya adalah dengan digencarkan informasi-informasi di media sosial seperti youtube, instagram, forum whatsapp pegawai dan juga forum whatsapp P3N untuk di media sosialnya. Namun untuk di dunia nyata nya dengan di *print out* kan atau dibuatkan mading informasi bagi para catin untuk mempermudah pelayanan dengan memberikan informasi secara terbuka, isi dari mading informasi ini diantaranya seperti informasi persyaratan nikah, data bank yang bekerja sama dengan kemenag untuk pembayaran Nikah melalui bank, persyaratan permasalahan jika surat nikahnya hilang ketika di urus kembali apa saja persyaratannya. Serta upaya kami dalam membantu para catin yang sudah orang tua dan tidak *up to date* dalam penggunaan teknologi maka kita bantu dengan senang hati.”

Hal ini perlu untuk direalisasikan karena bentuk program seperti bimbingan teknis bagi para pegawai sangat membantu dalam hal produktivitas bekerja dan merupakan sebuah kewajiban untuk seluruh pegawai kua agar dapat memahami bagaimana pelaksanaan teknis daripada sistem simkah tersebut.

#### **PENUTUP**

##### **Simpulan**

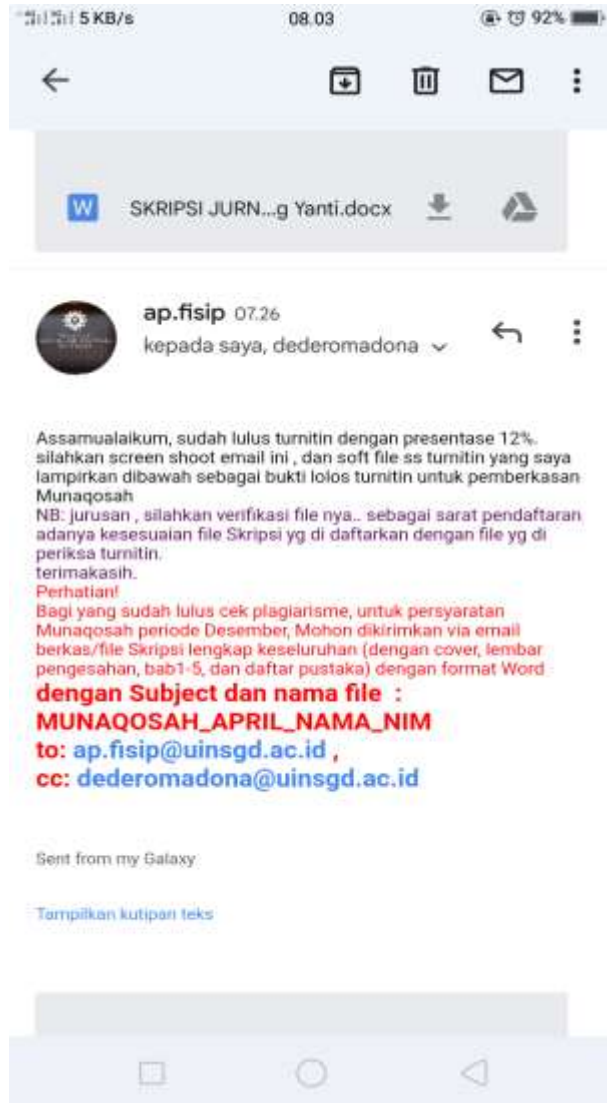
Penerapan dari simkah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat atau khususnya calon pengantin yang akan melakukan pendaftaran nikah di kantor kua kecamatan ciparay sudah dikatakan cukup baik, hal tersebut dapat ditunjukkan bahwa data nikah pada tahun 2018 hingga 2021 setiap tahunnya mengalami kenaikan jumlah pelayanan yang diberikan. Meskipun di tahun 2020 mengalami penurunan angka jumlah

pendaftaran nikah dikarenakan masih dalam kondisi Pandemi Covid-19 serta Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dimana ada tambahan beberapa peraturan yang diberlakukan jika tetap memberlangsungkan pernikahan salah satunya adanya pembatasan jumlah tamu undangan serta melampirkan beberapa dokumen seperti surat keterangan sudah melakukan vaksinasi minimal dosis pertama untuk kedua calon pengantin dan orang tua, sehingga ditahun 2020 mengalami sedikit penurunan dalam pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Ciparay. Penerapan simkah ini diterima dengan baik oleh masyarakat dalam pengurusan pendaftaran nikah secara *online*, meskipun masih dibantu oleh P3N dalam pendaftaran secara *online* yang seharusnya ketentuan ini dikhususkan untuk calon pengantin yang akan mendaftarkan pernikahannya namun ini masih menjadi adaptasi baru bagi masyarakat, disamping itu sudah banyak pula masyarakat yang sudah menerima dengan baik dan paham dalam penggunaan simkah online dimana sasaran dari pemberlakuan simkah online ini adalah catin sebagai anak muda atau milenial yang sudah tidak asing dengan dunia teknologi. Sehingga mudah diterima dan di apresiasi dengan baik oleh masyarakat.

Meski demikian, berdasarkan teori Parasuraman ada beberapa kriteria yang harus diperbaiki yakni (1) Bentuk fisik (*Tangible*) atau sarana dan prasarana pelayanan kantor kua kecamatan ciparay, dengan dimaksimalkan kembali seperti penambahan Unit komputer untuk penghulu dan operator simkah, agar tidak memakai barang pribadi dalam melakukan pekerjaannya. (2) kehandalan (*Reliability*) para pegawai, khususnya pegawai yang sudah tidak muda lagi, agar diberikan pembekalan dalam memberikan pelayanan secara *online* agar lebih optimal dalam penyesuaian di pekerjaannya (3) Daya Tanggap (*Responsivitas*) pegawai yang masih belum disiplin terhadap datang dan pulang kerja, sehingga dapat mengganggu pelayanan yang diberikan (4) Keyakinan

(*Assurance*) memberikan keyakinan dengan menjamin pelayanan yang diberikan dengan sebaik mungkin dan tuntas. (5) Kepedulian (*Emphaty*) terhadap kebutuhan masyarakatnya dengan memberikan pelayanan yang lebih transparan, efektif dan efisien sehingga paham apa yang menjadi kebutuhan masyarakatnya.

Dengan demikian peneliti merekomendasikan sebagai bentuk evaluasi dari pelayan publik yang diberikan dalam penerapan simkah *online* pada kantor kua kecamatan dalam pelayanan nikah; (1) Adanya pelatihan pada P3N dalam kepengurusan akta nikah harus lebih dikuasai lagi, jangan sampai dari calon pengantin menyerahkan pada jasa P3N dan P3N menyerahkan kembali kepada para operator kua, yang mana dengan adanya ketentuan ini diberlakukan untuk mempermudah pelayanan nikah. Sehingga tidak boleh *stuck* disana ketika tidak bisa, dengan begitu kita harus aktif dimedia sosial agar informasi dapat disampaikan lebih cepat dan mudah seperti di instagram, youtube. Sehingga perlu dikhususkan pegawai yang aktif dalam mengelola informasi di media sosial. (2) Sarana dan prasarana pelayanan kua harus lebih di dimaksimalkan kembali seperti komputer yang menjadi mesin pembantu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (3) Adanya transparansi pelayanan dengan tidak ada pungutan liar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.



.....  
**PENGUKURAN KINERJA PEGAWAI DENGAN METODE ANALYTICAL HIERARCHY  
 PROCESS DALAM PEMBERIAN TUNJANGAN PEGAWAI DI DESA CIHERANG  
 KECAMATAN PACET KABUPATEN CIANJUR**  
 .....

Oleh

Eryna Syahadatina A.B<sup>1)</sup>, Cecep Wahyu Hoerudin<sup>2)</sup>, Husen Saeful Anwar<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: <sup>1</sup>[erynabadar23@gmail.com](mailto:erynabadar23@gmail.com), <sup>2</sup>[cecepwahyu@uin.ac.id](mailto:cecepwahyu@uin.ac.id),

<sup>3</sup>[husahafulanwar@yahoo.com](mailto:husahafulanwar@yahoo.com)

**Abstract**

Having the quality of creative and innovative human resources (HR) becomes the focus in realizing the aims and objectives of Ciherang Village in carrying out the duties and responsibilities of employees at the village level. As a public agency that has a policy of Ciherang Village, it provides allowances in addition to the basic salary to spur the performance and work productivity of its employees. As for how to measure employee performance at the Ciherang Village Office, the Analytical Hierarchy Process (AHP) and rating scale methods are applied. The purpose of this study is to design a specific, objective, and structured employee performance measurement process and select employees who are entitled to be the main priority for additional benefits. . The research method used is descriptive with a quantitative approach. Data collection techniques for primary data are observation, interviews, and questionnaires. For secondary data obtained from literature study. The results of this study are that there are six main criteria consisting of work quality, attendance discipline, attitude, initiative, honesty and cooperation and includes 16 sub-criteria. From the results of the weighting that becomes the main priority in measuring employee performance is the work quality criterion (0.241) and in the sub-criteria there is the lowest weight, namely being able to maintain work tools (0.034) and being able to complete tasks on time (0.132) being the highest weight. And the main priority for getting additional allowances is the employee who serves as the planning department with a total score of 3,272.

**Keywords: Performance Measurement, Employee Benefits, Analytical Hierarchy Process (AHP)**

**PENDAHULUAN**

Sumber daya manusia (SDM) yang profesional merupakan salah satu modal pokok dan faktor keberhasilan dari suatu organisasi pemerintahan. Artinya kualitas sumber daya manusia perlu dikelola agar mendorong suatu organisasi menuju kepada apa yang menjadi tujuannya. Oleh karena itu, tercapainya tujuan sebuah organisasi atau instansi tidak akan terlepas dan akan sejalan dengan kinerja yang baik dari setiap individu pegawai. Kinerja yang merupakan *performance* atau prestasi kerja yang dimiliki oleh masing-masing individu mengenai proses kerja hingga pada hasil kerja. Berlandaskan pada pengetahuan, pemahaman,

kemahiran serta sikap individu pegawai dalam bekerja. Untuk mengelola sumber daya manusia tersebut dapat dilakukan melalui pengukuran kinerja pegawai atau *performance measurement* (Ismail, 2020).

Pengukuran kinerja pegawai dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan pelaksanaan pekerjaan individu pegawai dengan dinilai partisipasi pegawai terhadap organisasi untuk periode waktu yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja sendiri digunakan untuk menguji, mengecek serta mengukur dan membuat penilaian terhadap kinerja seseorang dalam melaksanakan tugas organisasi (Rani & Mayasari, 2015). Pengukuran kinerja dapat

dilakukan untuk memberikan informasi mengenai penetapan gaji atau juga tunjangan. Menurut Siti Mujanah menyatakan bahwa pemberian tunjangan yang paling baik untuk meningkatkan kinerja pegawai adalah tunjangan yang diberikan berdasarkan pada indikator pengukuran kinerja yang telah ditetapkan (Mujanah, 2019). Selain itu, mengacu pada peraturan Kemenpan RB nomor 63 tahun 2011 bahwa keberhasilan dari reformasi birokrasi adalah adanya tunjangan pegawai yang sesuai dengan kinerja masing-masing pegawai dalam pemerintahan.

Desa Ciherang Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur sebagai desa yang memiliki wewenang untuk mengurus, menyelenggarakan, memerintah pemerintahannya sendiri, serta memiliki hak-hak tradisional, asal usul yang disahkan dalam sistem pemerintahan Indonesia tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, menyadari bahwa pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi itu sangat penting. Sehingga Desa Ciherang Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur memiliki upaya untuk membangkitkan semangat dan motivasi pegawai agar memiliki kinerja yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah adanya tambahan tunjangan kepada pegawai desa. Tunjangan tersebut berbeda dengan tunjangan pokok yang telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan pangkat yang terdapat pada Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2019 mengenai tunjangan yang diberikan kepada pegawai desa sebesar 30% dari anggaran belanja desa. Maksud dan tujuan Desa Ciherang sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam upaya pengelolaan sumber daya manusia untuk menjalankan roda organisasinya yaitu, ikut serta dalam mendukung dan mewujudkan visi misi Kabupaten Cianjur dengan mengedepankan pelayanan yang optimal sinergi, meningkatkan tata pemerintahan yang baik dan dukungan aparat

yang kreatif dan inovatif (Desa Ciherang: 2020).

Tunjangan atau bonus tambahan yang diberikan oleh Desa Ciherang Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur merupakan tunjangan tidak tetap, dimana diperoleh dari dana gotong royong. Dana tersebut merupakan hasil dari kebijakan kepala desa yang sebelumnya sudah dimusyawarakan dengan badan permusyawaratan desa (Peraturan Desa Ciherang, Nomor 03 Tahun 2020). Tambahan tunjangan tersebut diberikan kepada pegawai dengan jabatan dibawah kepala desa, yaitu terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi, kepala urusan, dan kepala dusun. Besaran tunjangan untuk seluruh pegawai desa tersebut setiap bulannya berbeda-beda tergantung pada hasil pendapatan dari desa. Berikut besaran keseluruhan tambahan tunjangan pegawai pada periode bulan Januari 2021- September 2021:

Tabel 1. Tambahan Tunjangan Pegawai

No	Bulan	Total Besaran Tambahan Tunjangan
1	Januari	Rp3.720.000,00
2	Februari	Rp1.500.000,00
3	Maret	Rp3.200.000,00
4	April	Rp2.620.000,00
5	Mei	Rp2.500.000,00
6	Juni	Rp3.000.000,00
7	Juli	Rp2.000.000,00
8.	Agustus	Rp1.800.000,00
9.	September	Rp1.910.000,00

Sumber: Desa Ciherang 2021

Dari table diatas diketahui total tunjangan terbesar untuk pegawai yaitu Rp3.720.000,00/bulan dan total tambahan tunjangan terkecil sebesar Rp1.500.000,00/bulan untuk seluruh pegawai desa. Namun, perolehan tambahan tunjangan yang didapatkan para pegawai selama ini seluruhnya berdasarkan kebijakan tersendiri dari kepala desa. Dimana belum ada kriteria penilaian yang jelas. Hal tersebut menyebabkan keputusan menjadi bersifat subjektif dan tidak tepat. Padahal tambahan tunjangan tersebut



sebagai “*extra pay for extra performance*”. Serta fungsi diberikannya tambahan tunjangan terhadap pegawai Desa Ciherang Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur tersebut yaitu untuk memotivasi pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab secepat optimal; meningkatkan sistem karir; meningkatkan profesionalisme; meningkatkan sumber daya; meningkatkan kepuasan kerja; serta meningkatkan kesejahteraan pegawai. Oleh karena itu pemimpin Desa Ciherang mengeluarkan kebijakan dan memutuskan memberikan tambahan tunjangan agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai dengan kinerja pegawai yang meningkat. (Desa Ciherang, 2020)

Selanjutnya hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa pegawai di kantor Desa Ciherang Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, menyatakan bahwa konsep pemberian tambahan tunjangan yang bersifat subjektif dan tidak terdokumentasi tersebut menimbulkan rasa tidak terima dari beberapa pegawai. Dimana terdapat pegawai yang langsung mendapatkan tambahan tunjangan begitu saja. Sehingga kegiatan pemberian tambahan tunjangan pun mendapatkan “efek samping” dimana tidak adanya bukti konkrit dan proses administrasi kurang baik atas hasil kerja. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya perbedaan pemberian tunjangan antara pegawai yang melakukan pekerjaan dengan baik atau memenuhi harapan dengan pegawai yang melebihi harapan, para pegawai akan sama-sama mendapatkan tambahan tunjangan. Pegawai dengan kriteria melebihi harapan seharusnya mendapatkan poin lebih besar dan berpotensi lebih besar pula untuk mendapatkan tambahan tunjangan. Selain itu faktor internal dari para pegawai yang dimiliki oleh Desa Ciherang Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur berlatar belakang pendidikan dan jabatan yang berbeda-beda, sehingga kompetensi yang dimiliki oleh pegawai pun berbeda-beda. Dengan demikian, pada proses evaluasi pengukuran kinerja diperlukan prosedur yang

baku ditetapkan sebagai syarat bagi seseorang pegawai untuk mendapatkan tambahan tunjangan. Lebih lanjut rasa tidak terima dan adanya efek samping tersebut, disebabkan karena atasan yang tidak memiliki kriteria dalam mengukur kinerja pegawainya. Padahal suatu organisasi harus memiliki kebijakan atau ketentuan dan standarnya sendiri dalam melaksanakan tugas agar diperoleh kinerja yang baik dan maksimal (Syarif & Alwi, 2014).

Maka dari itu, masalah yang terjadi di Desa Ciherang Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur adalah belum ditetapkannya metode pengukuran kinerja pegawai guna pemberian tambahan tunjangan pegawai. Umpan balik atau kebermanfaatannya dari adanya pengukuran kinerja pegawai adalah adanya pembahasan mengenai kinerja dan kemajuan para pegawai serta membantu rencana pengembangan yang perlu dilakukan kedepannya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan dengan tepat, agar menjamin objektivitas pegawai aktif yang pro-aktif di Desa Ciherang Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur. Dengan adanya pengukuran kinerja yang tepat, maka produktivitas kinerja pegawai dapat dinilai dan dihargai sesuai dengan usahanya. Serta bonus tambahan tunjangan yang diterima oleh pegawai akan sesuai dengan kinerja masing-masing pegawai.

Tolok ukur atau indikator yang dibuat sebagai acuan dalam mengukur kinerja pegawai dalam penelitian, agar bersifat objektif ditunjukkan masing-masing pegawai, yaitu kriteria atau indikator yang dikemukakan oleh (Afandi, 2018): Pertama, indikator kualitas kerja yang didalamnya termasuk ketelitian serta efisiensi merujuk pada keberhasilan dalam bekerja dan pencapaian terhadap hasil kerja. Kedua, indikator disiplin dalam kehadiran taat dan patuh terhadap ketentuan jam kerja serta taat terhadap peraturan organisasi. Ketiga indikator inisiatif kerja atau kreatifitas mengukur kemampuan, kapabilitas dan keandalan melaksanakan pembaharuan dalam pengetahuan serta inovasi kerja. Keempat

indikator kejujuran mengacu pada sifat dan tindakan pertanggungjawaban pekerjaan. Kelima sikap kepemimpinan individu dalam mengendalikan diri, bersikap atau berinteraksi memberikan pelayanan. Keenam indikator kerjasama atau efisien dalam suatu pekerjaan, bekerja dengan bijak terhadap penggunaan sumberdaya yang dimiliki.

Sementara itu alat untuk menilai suatu kreadibilitas kinerja pegawai, yaitu dengan memanfaatkan metode pengambilan keputusan yakni *Analytical Hierarchy Process* atau yang disingkat menjadi AHP dan dengan pendekatan *rating scale*. Metode AHP dikembangkan oleh seorang ahli matematika Tomas L.Saaty. Penggunaan metode AHP ini dapat memecahkan masalah yang rumit namun saling berhubungan, dimana kriteria yang diambil cukup banyak, stuktur masalah yang belum jelas, serta adanya ketidak pastian pada presepsi pembuat keputusan. Dimana AHP ini dapat menerjemahkan mengenai penilaian dari perspektif manusia tersebut kemudian diubah menjadi nilai rasio dengan ketersediaan data statistik yang akurat (Simanjuntak, Uker, & Meizul, 2019). Sumber dari perspektif manusia tersebut berdasar pada para ahli (expert) dibidangnya, yaitu orang-orang yang mengerti dengan benar permasalahan yang diajukan, merasakan akibat dari suatu masalah, atau juga memiliki kepentingan terhadap masalah tersebut.

Kemudahan dalam menggunakan metode AHP yaitu dapat membuat model yang lebih fleksibel, menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan secara tepat, cepat, efektif dan efisien atas permasalahan yang kompleks, luas dan tidak terstruktur. Selain itu, penggunaan penghitungan matematika yang sederhana dapat memudahkan dalam proses analisis. Bentuk yang ditampilkan dalam metode AHP yaitu adanya suatu stuktur hierarki yang terdiri dari tujuan, kriteria, beberapa subkriteria dan alternatif. Digunakan sebagai hubungan antar kriteria yang dipilih lalu dipecahkan menjadi beberapa subkriteria

paling dalam, berada pada level dibawahnya. Dimana antar kelompok entitas pada level yang sama akan dilakukan perbandingan untuk membuat sebuah keputusan terbaik serta alasan yang jelas untuk setiap pilihan yang dibuat (Ludfiandini & Nugroho, 2016). Lebih lanjut, metode ini pula memperhatikan suatu validasi hingga batas toleransi inkonsisten dan memperhitungkan daya tahan analisis sensitivitas dari kriteria atau indikator yang dipilih oleh para pengambil keputusan. Selain itu, studi yang pernah dilakukan oleh *Centre for International Forestry Research* (CIFOR) dalam (Ilhami & Rimantho, 2017) menekankan bahwa hasil dari proses AHP dapat memberikan keputusan terbaik dengan alasan yang jelas mengenai pilihan yang dibuat.

Penggunaan metode AHP bertujuan untuk menentukan bobot setiap komponen kriteria kinerja pegawai. Penentuan bobot prioritas inilah yang merupakan bagian terpenting dari penggunaan metode *analytical hierarchy process*. Bobot prioritas kepentingan tertinggi menunjukkan pada tuntutan utama dalam melaksanakan tugas. Sedangkan bobot terendah menunjukkan pada kriteria pengukuran kinerja yang tidak terlalu sensitif. Dengan prosedur penentuan bobot prioritas sebagai berikut (Sarwindah & Marini, 2019):

1. Menyusun stuktur hierarki

Pada metode AHP, diawali dengan membuat stuktur hierarki berupa stuktur linear dimana pengaruh terdistribusi dari atas kebawah. Penyusunan hierarki ini merupakan awal untuk mendefinisikan masalah yang rumit dan kompleks menjadi lebih jelas dan mudah dipahami. Di mulai dengan hierarki pertama mengenai tujuan (goal) dari permasalahan yang ada, kemudian dibuat uraian dalam bentuk bagian-bagian berupa komponen atau kriteria, lalu sub-subkriteria yang dipengaruhi oleh kriteria yang berada pada level diatasnya.

2. Menilai kriteria dan subkriteria

Hierarki yang telah dibuat diatas akan dilakukan perbandingan antara dua elemen pada satu tingkat kriteria dengan kriteria yang

berada pada sub sistem hierarki yang sama. Pembuatan perbandingan tersebut menggunakan skala 1 sampai 9. Dibuat sebagai bagian dari kuesioner yang diisi oleh responden. Skala perhitungan dapat diperoleh dari tabel analisis sebagai berikut (Setyadi, Ina, & Tena, 2014):

Tabel 2. Skala Nilai Perbandingan Berpasangan

Tingkat ketertarikan	Definisi	Keterangan
1	Sama penting	Kriteria atau subkriteria A dengan kriteria pasangannya mempunyai nilai atau pengaruh yang sama.
3	Cukup penting	Kriteria A sedikit lebih penting dari pada komponen pasangannya / 1 level lebih penting dibandingkan kriteria lainnya.
5	Lebih penting	Kriteria A lebih disukai dan lebih penting dibanding pasangannya / 2 level lebih penting dibandingkan kriteria lainnya.
7	Sangat lebih penting	Kriteria A jelas sangat penting dibandingkan dengan kriteria elemen pasangannya / 3 level lebih penting dibandingkan kriteria lainnya.
9	Mutlak lebih penting	Kriteria A mutlak sangat penting dari pada komponen B sebagai pasangannya / 4 level lebih penting dibandingkan kriteria lainnya.
2, 4, 6, 8	Nilai tengah	Merupakan poin hampir sama yang dimiliki. Disebut juga sebagai poin kompromi berisi tentang pandangan responden terhadap keragu-ruguan diantara tingkatan yang berdekatan.

Proses perbandingan berpasangan tersebut menerjemahkan kuesioner yang ada kedalam suatu nilai berdasarkan pandangan masing-masing responden.

### 3. Menghitung bobot atau prioritas dari masing-masing indikator

Setelah dilaksanakan tahapan perbandingan berpasangan atau *pairwise*

*comparisons*, selanjutnya pembobotan pada masing-masing indikator. Dimana jawaban responden di transformasikan ke dalam bentuk matriks untuk analisis numerik. Pada tahap ini pula dibuat suatu urutan dari keseluruhan indikator yang ada. Berbagai pertimbanganpun dilakukan untuk menetapkan variabel atau indikator yang memiliki bobot prioritas paling tinggi sampai terendah dan berperan sebagai sesuatu yang mempengaruhi hasil dari situasi yang ada.

### 4. Menghitung konsistensi;

Agar tidak terjadinya inkonsisten dalam perbandingan AHP, maka terdapat cara untuk mengukur konsisten tersebut. Serta terdapat pula cara untuk meningkatkan konsisten dari hasil penilaian. Manfaat dari penghitungan ini yaitu, agar penelitian yang didapat bukan berdasarkan dari konsistensi yang rendah. Untuk mengetahui hal tersebut dilakukan penghitungan konsistensi indeks (CI) dengan rumus, konsistensi indeks =  $(\lambda \text{ maks}-n) / (n-1)$  huruf n tersebut merupakan banyaknya elemen yang digunakan. Setelah mengetahui konsistensi indeks, selanjutnya dengan menjumlahkan penghitung rasio konsistensi (CR) menggunakan rumus:  $CR = CI / RI$ . Kuesioner dapat diterima dan dapat dinyatakan benar atau konsisten apabila  $CR \leq 10\%$  atau tidak melebihi 0,1 dan ketika adanya ketidak konsistenan apabila  $CR \geq 10\%$ . Maka ketika diketahui adanya ketidak konsistenan maka proses harus diperbaiki dengan mengulang proses pembobotan diseluruh tingkatan.

Setelah didapatkan bobot prioritas kriteria dan subkriteria dilanjutkan dengan pengalihan pada perolehan nilai yang didapatkan dari masing-masing pegawai. Pada tahap ini menggunakan pendekatan *rating scale*. Kegunaannya untuk menyelidiki suatu penilaian secara bertingkat yang berisi mengenai daftar faktor-faktor, sifat, dan ciri-ciri pegawai dalam melakukan pekerjaannya. Proses penilaian diberikan oleh penilai berdasarkan observasi terhadap perilaku pegawai dalam bersikap, berinteraksi serta

berkomunikasi terhadap orang lain, berlangsung pada periode tertentu. Para pemberi nilai diharuskan melakukan suatu penilaian yang berhubungan dengan hasil kerja pegawai menggunakan skala-skala yang telah disediakan, mulai dari yang terendah hingga tertinggi (Negara, Setiawan, & Ummi, 2017).

Sehingga secara sederhana *rating scale* adalah alat pengumpulan data untuk menilai individu pegawai dengan menggunakan skala dalam pengukurannya. Penggunaan skala yang digunakan oleh peneliti yaitu skala unipolar dari 1 sampai 5 untuk merujuk pada skala evaluasi (Marisa & Faida, 2018). Kemudahan dalam menerapkan *rating scale* yaitu mudah untuk dirancang dan dibuat, mudah untuk diimplementasikan, penilai hanya membutuhkan sedikit pelatihan, sederhana serta penilaian bersifat objektif karena karakteristik penilaian bersifat sangat penting. Selepas itu, pengukuran kinerja menggunakan *rating scale* dapat dijadikan sebagai rekomendasi acuan guna menentukan pegawai yang menjadi prioritas mendapatkan tambahan tunjangan. Berikut kategori yang akan digunakan pada penilaian dibagi kepada beberapa kategori, terdiri dari lima kategori dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 3. Kategori Penilaian

Skala penilaian	Keterangan
1	Tidak memuaskan ( <i>unsatisfactory performance</i> )
2	Perlu perbaikan ( <i>improvement desired</i> )
3	Memenuhi harapan ( <i>meets expectation</i> )
4	Melebihi harapan ( <i>exceeds expectation</i> )
5	Luar biasa ( <i>outstanding performance</i> )

Sumber: Rizka Shoumil Ilhami dan Dino Rimantho (2017)

Penghitungan untuk mendapatkan skor dari setiap kriteria adalah: Skor = bobot x nilai. Skor merupakan nilai akhir suatu kriteria kinerja. Sedangkan nilai merupakan skala penilaian berdasarkan metode rating scale.

Kemudian dihitung total nilai kinerja pegawai dengan rumus  $X = \sum$  skor setiap subkriteria.

Adapun yang menjadi acuan dalam penulisan, yaitu mengutip dari penelitian yang pernah dilakukan oleh (Marbun, Sagala, & Rahayu, 2018) dengan judul “Menentukan Kelayakan Tunjangan Kesejahteraan Pegawai Menggunakan Metode AHP”. Penelitian dilakukan di Dinas Kesehatan Pangan Serdang Bagadai. Tujuan pada penelitian yaitu untuk mengetahui kelayakan pegawai mendapatkan tunjangan secara penuh dari proses pembobotan dan pendukung keputusan menggunakan metode AHP. Selanjutnya mengutip penelitian dari (Anggraini & Alim, 2015) yang menerapkan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) berjudul “Evaluasi Penilaian Kinerja Karyawan dengan Metode Analytical Hierarchy Process Berdasarkan Prestasi Kerja dalam Pemberian Insentif Karyawan”. Lokasi penelitian berada di PT. Bersama Makmur Raharja Cabang Pekanbaru yaitu salah satu perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan otomotif. Penggabungan metode AHP dengan metode Rating Scales dapat membuat rancangan penilaian kerja pegawai. Serta hasil penelitian tersebut adalah ketika pegawai ingin mendapatkan insentif yang lebih besar maka karyawan perlu memiliki prestasi kerja yang lebih tinggi pula di perusahaan tempatnya bekerja tersebut. Kemudian penelitian yang berjudul “Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Bonus Karyawan Menggunakan Metode AHP” dilakukan di CV Alun-Alun Digital Printing (Ifiansyah, 2015). Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa penggunaan AHP cukup efektif terlebih pada era digital saat ini, penggunaannya yaitu agar tidak kembali lagi pada sistem konvensional.

Penelitian terdahulu berfungsi membantu peneliti untuk lebih spesifik memahami masalah yang akan diteliti. Sehingga penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yang dilakukan dalam berbagai

.....

sektor dapat diambil kesimpulan, bahwa belum ditemukan adanya pengukuran kinerja yang dilakukan di desa menggunakan metode AHP. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan pengukuran kinerja menggunakan metode AHP kepada pegawai Desa Ciherang Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur. Sehingga kebaruan dalam penelitian ini yaitu bentuk sudut pandang baru terhadap pembangun sistem pendukung keputusan menggunakan metode AHP di desa dalam menentukan prioritas utama pemberian tunjangan berdasarkan pada kinerja pegawai. Berdasarkan pernyataan tersebut tujuan penelitian berfokus pada bagaimana merancang penilaian dengan multikriteria dalam mengukur kinerja pegawai yang spesifik, objektif untuk keperluan tambahan tunjangan serta dilanjutkan dengan menentukan pegawai yang berhak menjadi prioritas utama mendapatkan tambahan tunjangan.

#### **METODE PENELITIAN**

Peneliti menggunakan penelitian deskriptif pendekatan kualitatif yang berlokasi di kantor Desa Ciherang Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, dikarena permasalahan berhubungan dengan manusia secara esensial, diawali dengan membuat suatu gambaran kompleks, mengkaji setiap kalimat dan kata-kata yang diperoleh selanjutnya dibuat laporan terperinci berdasarkan sudut pandang responden (Sugiyono, 2013). Objek yang diteliti pada penelitian ini adalah pengukuran kinerja pegawai di Desa Ciherang Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur guna tambahan tunjangan. Subjek penelitian terdiri dari orang-orang yang memahami mengenai pengukuran kinerja yang ditetapkan oleh kebijakan instansi. Selain itu, ditentukan berdasarkan kepada mereka yang ahli dibidangnya, telah memahami dan menekuni lebih dari satu tahun dan menempati jabatan yang berada diposisi tanpa sebelumnya ada rotasi jabatan. Hal tersebut dikarenakan untuk menjamin agar data yang diperoleh relevan, dapat dipercaya dan

dikatakan layak sesuai dengan tujuan penelitian.

Kualitas serta kuantitas instrumen penelitian dalam pengumpulan data merupakan hal utama yang mempengaruhi kredibilitas, kepercayaan dan keunikan hasil penelitian. Maka dari itu, untuk mendapatkan hasil penelitian yang berkualitas. Jenis sumber data untuk data primer yang diperoleh langsung sebagai sumber data yang diamati dan dicatat untuk pertama kalinya, yaitu berupa data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan penyebaran kuesioner. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan berupa Stuktur Organisasi Kantor Desa Ciherang Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, profil mengenai Desa Ciherang Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, serta bersumber pada artikel, buku-buku, internet yang memiliki kaitannya dengan penelitian.

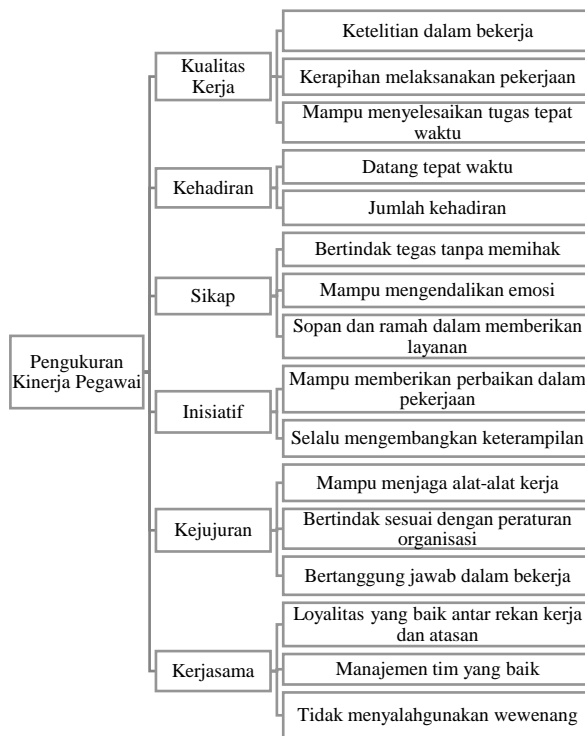
Untuk teknik analisis dan pengolahan data peneliti akan menerapkan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dan pendekatan *rating scale*. Tahapan yang dilakukan peneliti pada proses pengambilan dan pengolahan data yang dilakukan, yaitu: (1) Melakukan wawancara dan observasi langsung untuk menentukan kriteria dan subkriteria sebagai indikator penilaian kinerja. Proses wawancara tersebut dilakukan dengan tidak mempertemukan subjek secara bersamaan. Sehingga pendapat antar subjek penelitian tidak akan mempengaruhi pendapat yang lain. (2) Penyebaran kuesioner pertama, merupakan kuesioner perbandingan berpasangan, kuesioner perbandingan berpasangan ini dibuat berdasarkan kriteria dan subkriteria yang telah ditentukan pada tahap wawancara. Lalu data yang diperoleh diolah menggunakan *software expert choice* untuk memperoleh bobot dari setiap kriteria dan subkriteria serta dilakukan uji konsistensi.(3) Kuesioner kedua yaitu kuesioner penilaian kinerja pada masing masing pegawai dengan metode *rating scale*. Dimana responden menjawab berdasarkan pada salah satu jawaban angka yang tersedia.

Kuesioner ini berfungsi untuk memperoleh nilai dari masing-masing pegawai yang selanjutnya dapat ditentukan pegawai yang memiliki nilai tertinggi sebagai prioritas dalam pemberian tunjangan.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Menyusun Stuktur Hierarki**

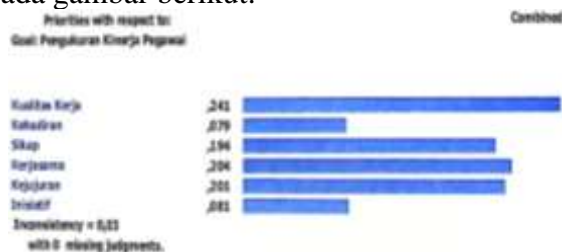
Pengukuran kinerja pegawai guna tambahan tunjangan di Desa Ciherang Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur menggunakan metode *analytical hierarcy process* (AHP), diawali dengan penyusunan hierarki. Pengisian dari setiap level hierarki berasal dari data kriteria indikator pengukuran kinerja yang dikemukakan oleh Afandi 2018 serta adanya subkriteria yang berasal dari hasil wawancara kepada Kepala Desa Ciherang dan Kepala Badan Permusyawaratan Desa Ciherang. Berdasarkan pernyataan tersebut maka pengolahan data yang dilakukan diperoleh 3 level hierarki yaitu hierarki level 0 tujuan, hierarki level 1 kriteria dan hierarki level 2 subkriteria. Terdiri dari 6 kriteria utama serta 16 subkriteria, sebagai berikut:



Gambar 1 Stuktur Hierarki Pengukuran Kinerja Pegawai **Menghitung Bobot Prioritas Dan Menguji Konsistensi Masing-Masing Indikator**

Perolehan 6 kriteria utama dan 16 subkriteria di atas, selanjutnya dilakukan pengisian kuesioner perbandingan berpasangan yang diisi oleh Kepala Desa Ciherang serta Kepala Badan Permusyawaratan Desa yang memahami pengukuran kinerja pegawai (ahli), untuk dilihat kriteria mana yang memiliki bobot terbesar dan terendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa kriteria dengan bobot terbesar harus mendapatkan perhatian yang besar dari para pegawai di Desa Ciherang Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur agar para pegawai memperoleh keseluruhan nilai yang luar biasa. Data yang diperoleh dari kuesioner kemudian diolah menggunakan *software expert choice version 11*, sehingga diperoleh bobot dari setiap elemen hierarki pengukuran kinerja. Nilai bobot prioritas dari kriteria utama yaitu kualitas kerja, disiplin kehadiran, sikap,

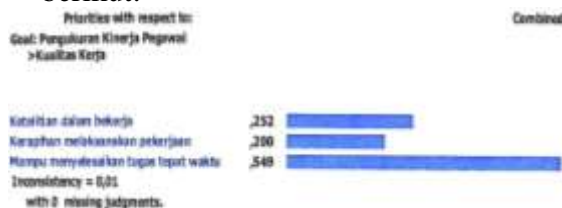
kerjasama, kejujuran dan inisiatif. Dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. Prioritas Kriteria Utama dalam Pengukuran Kinerja Pegawai beserta nilai bobotnya

Hasil pembobotan dari gabungan kuesioner hasilnya dapat diterima karena diperoleh nilai konsistensi 0,03 menunjukkan kekonsistenan di mana nilai konsistensi rasio lebih rendah dari 0,1. Pada keenam kriteria utama didapatkan hasil pembobotan prioritas mulai dari yang terbesar hingga terendah, kriteria kualitas kerja memiliki besaran bobot terbesar yaitu 0,241; yang kedua yaitu kriteria kerjasama memiliki bobot 0,204; diposisi ketiga terdapat kriteria kejujuran memiliki bobot 0,201; keempat yaitu kriteria sikap yang memiliki bobot 0,194; kelima yaitu kriteria inisiatif yang memiliki bobot 0,081 dan terakhir kriteria dengan bobot terendah yaitu kriteria disiplin kehadiran dengan bobot 0,079 berada di posisi keenam bobot prioritas kriteria.

- a. Subkriteria pengukuran kinerja pegawai di Desa Ciharang Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur berdasarkan kriteria kualitas kerja diperoleh hasil sebagai berikut:

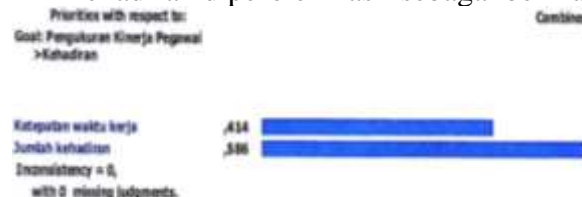


Gambar 3. Subkriteria dari Kriteria Kehadiran dalam Pengukuran Kinerja Pegawai beserta nilai bobotnya.

Berdasarkan analisis gabungan kuesioner pada gambar 3 menunjukkan bahwa subkriteria mampu menyelesaikan tugas tepat waktu dari kriteria kualitas kerja merupakan bagian yang lebih penting dari subkriteria lainnya dengan nilai bobot sebesar 0,549 atau 54,9% dari total subkriteria, kedua subkriteria ketelitian dalam

bekerja dengan nilai bobot 0,252 serta bobot terendah subkriteria kerapuhan melaksanakan pekerjaan dengan nilai bobot 0,200 atau 20% dari total subkritea.

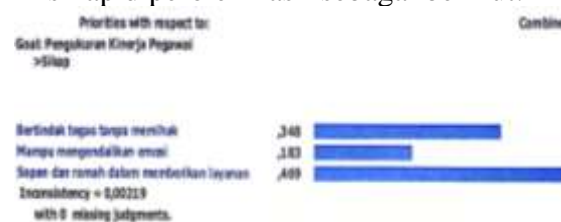
- b. Subkriteria pengukuran kinerja pegawai di Desa Ciharang Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur berdasarkan kriteria kehadiran diperoleh hasil sebagai berikut:



Gambar 4. Subkriteria dari Kriteria Kehadiran dalam Pengukuran Kinerja Pegawai beserta nilai bobotnya.

Berdasarkan analisis gabungan kuesioner pada gambar 4 menunjukkan bahwa subkriteria jumlah kehadiran dari kriteria disiplin kehadiran merupakan bagian yang lebih penting dari subkriteria lainnya dengan nilai bobot sebesar 0,586 atau 58,6% dari total subkriteria, dilanju dengan subkriteria ketepatan waktu kerja dengan nilai bobor sebesar 0,414 atau 41,4% dari total subkriteria.

- c. Subkriteria pengukuran kinerja pegawai di Desa Ciharang Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur berdasarkan kriteria sikap diperoleh hasil sebagai berikut:



Gambar 5. Subkriteria dari Kriteria Kehadiran dalam Pengukuran Kinerja Pegawai beserta nilai bobotnya.

Berdasarkan analisis gabungan kuesioner pada gambar 5 menunjukkan bahwa subkriteria sopan dan ramah dalam memberikan layanan dari kriteria sikap merupakan bagian yang lebih penting dari subkriteria lainnya dengan nilai bobot sebesar 0,469 atau 46,9% dari total subkriteria, kedua subkriteria bertindak tegas tanpa memihak dengan nilai bobot 0,348 serta bobot terendah subkriteria mampu mengendalikan emosi dengan nilai bobot 0,183 atau 18,3% dari total subkriteria.

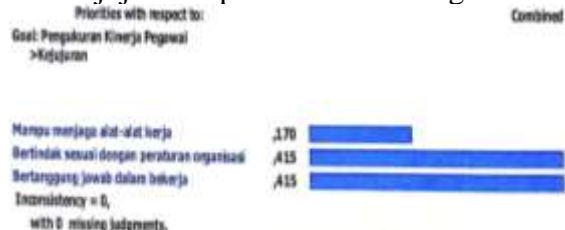
d. Subkriteria pengukuran kinerja pegawai di Desa Ciherang Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur berdasarkan kriteria kualitas kerja diperoleh hasil sebagai berikut:



Gambar 6. Subkriteria dari Kriteria Inisiatif dalam Pengukuran Kinerja Pegawai beserta nilai bobotnya.

Berdasarkan analisis gabungan kuesioner pada gambar 6 menunjukkan bahwa subkriteria mampu memberikan perbaikan dalam bekerja serta subkriteria selalu mengembangkan keterampilan dari kriteria inisiatif memiliki bobot nilai yang sama yaitu 0,500 atau 50% bobot nilai pada masing-masing subkriteria.

e. Subkriteria pengukuran kinerja pegawai di Desa Ciherang Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur berdasarkan kriteria kejujuran diperoleh hasil sebagai berikut:



Gambar 7. Subkriteria dari Kriteria Kejujuran dalam Pengukuran Kinerja Pegawai beserta nilai bobotnya.

Berdasarkan analisis gabungan kuesioner pada gambar 7 menunjukkan bahwa subkriteria bertindak sesuai dengan peraturan organisasi serta subkriteria bertanggung jawab dalam bekerja dari kriteria kejujuran memiliki nilai bobot kriteria yang sama penting yaitu sebesar 0,415 atau 41,5% dari total subkriteria. Sedangkan subkriteria mampu menjaga alat-alat kerja menjadi bobot terendah dengan bobot nilai sebesar 0,170 atau 17% dari total subkriteria.

f. Subkriteria pengukuran kinerja pegawai di Desa Ciherang Kecamatan Pacet

Kabupaten Cianjur berdasarkan kriteria kerjasama diperoleh hasil sebagai berikut:



Gambar 8. Subkriteria dari Kriteria Kerjasama dalam Pengukuran Kinerja Pegawai beserta nilai bobotnya.

Berdasarkan analisis gabungan kuesioner pada gambar 8 menunjukkan bahwa subkriteria loyalitas yang baik antar rekan kerja dan atasan dari kriteria kerjasama merupakan bagian yang lebih penting dari subkriteria lainnya dengan nilai bobot sebesar 0,369 atau 36,9% dari total subkriteria, kedua subkriteria tidak menyalahgunakan wewenang dengan nilai bobot 0,336 serta bobot terendah subkriteria management tim yang baik dengan nilai bobot 0,296 atau 29,6% dari total subkriteria.

### Mengolah Data Pengukuran Kinerja Pegawai

Pada penelitian, diperoleh data pembobotan AHP yang memiliki rasio konsistensi seluruh matriks perbandingan berpasangan menunjukkan nilai konsisten dari kriteria dan subkriteria. Selanjutnya bobot nilai kinerja yang akan digunakan yaitu menggunakan bobot global, yaitu hasil pembobotan dari perkalian bobot subkriteria dengan bobot kriteria, proses tersebut dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 4. Pembobotan Global

Kriteria	Subkriteria	Bobot Sub kriteria	Bobot Global
Kualitas Kerja (0,241)	Ketelitian dalam bekerja	0,252	0,060
	Kerapihan melaksanakan pekerjaan	0,200	0,048
	Mampu menyelesaikan tugas tepat waktu	0,549	0,132
Disiplin Kehadiran (0,079)	Ketepatan waktu kerja	0,414	0,035
	Jumlah kehadiran	0,586	0,046



Sikap (0,194)	Bertindak tegas tanpa memihak	0,348	0,067
	Mampu mengendalikan emosi	0,183	0,035
	Sopan dan ramah dalam memberikan layanan	0,469	0,090
Inisiatif (0,081)	Mampu memberikan perbaikan dalam bekerja	0,500	0,040
	Selalu mengembangkan keterampilan dan pengetahuan	0,500	0,040
Kejujuran (0,201)	Mampu menjaga alat-alat kerja	0,170	0,034
	Bertindak sesuai dengan peraturan organisasi	0,415	0,083
	Bertanggung jawab dalam bekerja	0,415	0,083
Kerjasama (0,204)	Loyalitas yang baik antar rekan kerja dan atasan	0,369	0,075
	Manajemen tim yang baik	0,296	0,060
	Tidak menyalahgunakan wewenang	0,336	0,068

Hasil dari pada subkriteria yang telah diperoleh, menunjukkan bobot global subkriteria yang menjadi indikator dalam pengukuran kinerja pegawai. Subkriteria global dengan bobot terbesar adalah subkriteria mampu menyelesaikan tugas tepat waktu dengan bobot 0,132; diikuti dengan subkriteria sopan dan ramah dalam memberikan layanan dengan bobot 0,090; bertindak sesuai dengan peraturan organisasi dengan bobot 0,083; bertanggung jawab dalam bekerja dengan bobot 0,083; loyalitas yang baik antar rekan kerja dan atasan dengan bobot 0,75; tidak menyalahgunakan wewenang dengan bobot 0,068; bertindak tegas tanpa memihak dengan bobot 0,067; ketelitian dalam bekerja dengan bobot 0,060; manajemen tim yang baik dengan bobot 0,060; kerapihan melaksanakan

pekerjaan 0,048; jumlah kehadiran dengan bobot 0,046; mampu memberikan perbaikan dalam bekerja dengan bobot 0,040; selalu mengembangkan keterampilan dan pengetahuan dengan bobot 0,040; mampu mengendalikan emosi dengan bobot 0,035; ketepatan waktu kerja dengan bobot 0,035; dan yang berada di urutan terakhir subkriteria global yaitu, mampu menjaga alat-alat kerja dengan bobot 0,034. Dari ke enam belas subkriteria yang telah ditentukan tersebut, keberadaannya sangat berpengaruh terhadap rekapitulasi pengukuran kinerja masing-masing pegawai di Desa Ciherang Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur.

Setelah mendapatkan bobot prioritas global dari setiap subkriteria maka tahap selanjutnya yaitu melakukan pengukuran kinerja pada masing-masing individu pegawai menggunakan *rating scale*. Kuesioner *rating scale* diisi oleh kepala desa karena sesuai dengan wewenang kepala desa untuk menilai, mengangkat atau bahkan memberhentikan pegawai desa. Serta diharuskan adanya kedekatan dan sering adanya interaksi langsung dengan bawahan atau dengan pegawai yang dinilai. Berikut salah satu penilaian menggunakan *rating scale* terhadap pegawai Desa Ciherang Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 5. Pengukuran kinerja pegawai dengan *rating scale*

Nama : Hilman Iskandar  
 Jabatan: Kaur Perencanaan

Kinerja Pegawai			
Kriteria	Subkriteria	Nilai	Nilai X Bobot
Kualitas Kerja	Ketelitian dalam bekerja	4	0,240
	Kerapihan melaksanakan pekerjaan	3	0,144
	Mampu menyelesaikan tugas tepat waktu	3	0,396
Disiplin Kehadiran	Ketepatan waktu kerja	3	0,096
	Jumlah kehadiran	3	0,138
Sikap	Bertindak tegas tanpa memihak	3	0,201

	Mampu mengendalikan emosi	4	0,140
	Sopan dan ramah dalam memberikan layanan	4	0,360
Inisiatif	Mampu memberikan perbaikan dalam bekerja	4	0,160
	Selalu mengembangkan keterampilan dan pengetahuan	3	0,120
Kejujuran	Mampu menjaga alat-alat kerja	3	0,102
	Bertindak sesuai dengan peraturan organisasi	3	0,249
	Bertanggung jawab dalam bekerja	3	0,249
Kerjasama	Loyalitas yang baik antar rekan kerja dan antasan	3	0,225
	Manajemen tim yang baik	3	0,180
	Tidak menyalahgunakan wewenang	4	0,272
Total			3,272

Setelah dilakukan penilaian untuk mengukur kinerja pegawai tahap selanjutnya yaitu pemilihan pegawai yang memiliki prioritas utama mendapatkan tambahan tunjangan dengan melihat nilai tertinggi dari hasil total nilai pegawai Desa Ciherang Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, berdasar pada bobot kriteria dan subkriteria yang memudahkan untuk mengukur tingkat kinerja yang dicapai. Terdapat sembilan sampel nama yang telah diberikan nilai untuk mengukur kinerja masing-masing pegawai dengan hasil nilai sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Akhir Proses Pengukuran Kinerja

Nama	Total nilai	Kategori kinerja	Rank
<b>Hilman Iskandar</b>	3,272	Memenuhi harapan	1
Jabatan Kaur Perencanaan			
<b>Ira Septiani</b>	3,191	Memenuhi harapan	2
Jabatan Kasi Pemerintahan			
<b>Muhammad Rizki</b>	3,187	Memenuhi harapan	3
Jabatan Kadus 2 Buniaga			
<b>Asep Zaenuman Jazali</b>	3,057	Memenuhi harapan	4
Jabatan Kasi Pelayanan			

<b>Wanti Setiawati</b>	2,919	Perlu perbaikan	5
Jabatan Kaur Umum			
<b>Rachmat Hidayat</b>	2,839	Perlu perbaikan	6
Jabatan Kasi Kestra			
<b>Isti Widayanti</b>	2,787	Perlu perbaikan	7
Jabatan Kaur Keuangan			
<b>Maya Ismariana</b>	2,660	Perlu perbaikan	8
Jabatan Kadus 3 Malebebr			
<b>Asep Suherman</b>	2,541	Perlu perbaikan	9
Jabatan Kadus 1 Panyaweyan			

Berdasarkan tabel diatas hasil dari penilaian pengukuran kinerja pegawai menggunakan *rating scale* yang sudah dilakukan, dapat diketahui pegawai yang menjadi prioritas utama hingga prioritas terbawah pada pemberian tambahan tunjangan pegawai di Desa Ciherang Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur.

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui metode *analytical hierarchy process* terdapat enam kriteria utama dan 16 subkriteria sebagai bahan pertimbangan dalam mengukur kinerja pegawai. Terdiri dari kualitas kerja mencakup ketelitian dalam bekerja (0,060), kerapian melaksanakan pekerjaan (0,048), dan mampu menyelesaikan tugas tepat waktu (0,132); kriteria disiplin kehadiran mencakup ketepatan waktu kerja (0,035) dan jumlah kehadiran (0,046); kriteria sikap mencakup bertindak tegas tanpa memihak (0,067), mampu mengendalikan emosi (0,035) dan sopan dalam memberikan layanan (0,090); kriteria inisiatif mencakup mampu memberikan perbaikan dalam pekerjaan secara berkala (0,040) dan selalu mengembangkan keterampilan dan pengetahuan (0,040); kriteria

kejujuran mencakup mampu menjaga alat-alat kerja (0,034), bertindak sesuai dengan peraturan organisasi (0,083), dan bertanggung jawab dalam bekerja (0,083); kriteria kerjasama mencakup loyalitas yang baik antar rekan kerja dan atasan (0,075), manajemen tim yang baik (0,060), dan tidak menyalahgunakan wewenang (0,068).

Hasil penelitian didapatkan bahwa yang menjadi prioritas utama dalam mengukur kinerja pegawai adalah kriteria kualitas kerja (0,241) dan pada subkriteria terdapat indikator pengukuran kinerja pegawai terendah yaitu mampu menjaga alat-alat kerja (0,034) dan mampu menyelesaikan tugas tepat waktu (0,132) menjadi bobot tertinggi. Hal tersebut menunjukkan hal yang paling sensitif dalam proses pengukuran kinerja. Maka untuk meningkatkan nilai kinerja pegawai yaitu dengan memiliki kualitas kerja yang profesional yaitu kemampuan dalam berkinerja secara konsisten dengan segala kondisi dan situasi dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Pengukuran kinerja yang dilakukan terhadap pegawai desa menggunakan *rating scale*. Dari sembilan pegawai yang diberi nilai, terdapat empat orang pegawai dengan kategori memenuhi harapan, sedangkan lima pegawai lainnya perlu melakukan perbaikan untuk meningkatkan hasil dari pengukuran kinerja. Pegawai yang menjabat sebagai kaur perencanaan dengan total nilai 3,272 yang berhak dan menjadi prioritas utama mendapatkan tambahan tunjangan jika dibandingkan dengan pegawai desa lainnya.

Dengan demikian rekomendasi setelah dilakukannya penelitian serta simulasi pengukuran kinerja pegawai, maka pengukuran kinerja menggunakan metode AHP yang menghasilkan sebuah kriteria dan subkriteria kinerja serta penggunaan *rating scale* dapat diterapkan dan digunakan secara berkelanjutan, serta dapat diusulkan sebagai peraturan desa untuk mengukur kinerja pegawainya guna pemberian tambahan tunjangan pegawai.

Karena penentuan tambahan tunjangan menjadi lebih objektif, terstuktur dan tidak menimbulkan kekhawatiran adanya subjektivitas. Serta pengukuran ini sangat penting dilakukan kepada pegawai guna memicu semangat kerja yang tinggi untuk mendapatkan total hasil yang tertinggi, mengingat adanya *reward* berupa tambahan tunjangan untuk pegawai terbaik.

### Saran

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yaitu diperlukannya kajian lebih mendalam terutama pada beberapa bagian kriteria dan subkriteria yang menjadi harapan untuk evaluasi perbaikan lebih lanjut.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ismail, S. M. (2020). *Pengukuran Kinerja SDM*. Banyumas, Jawa Tengah: CV Pena Persada .
- [2] Rani, I. H., & Mayasari, M. (2015). Pengaruh Penilaian Kinerja terhadap Kinerja Pegawai. *Jurnal Akuntansi Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 164-170.
- [3] Mujanah, S. (2019). *Manajemen Kompensasi*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara.
- [4] Kepala Desa Ciherang, 2020. *Peraturan Desa Ciherang, 2020*.
- [5] Syarif, W., & Alwi. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi Publik*. Sumedang Jawa barat: IPDN Press.
- [6] Afandi, P. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori, Konsep, dan Indikator)*. Riau: Zanafa Publishing.
- [7] Simanjuntak, R. B., Uker, D., & Meizul .(2019). Penilaian Kinerja Operator Pabrik CPO di PT. Dharma Pratama (DPP) Lubuk Bento Dengan Metode AHP dan Rating Scale. *Jurnal Agro Industri*, 159-166.
- [8] Ludfiandini, K., & Nugroho, S. (2016). Analisis dan Penilaian Kinerja Karyawan pada Operator Dump Truck Perusahaan Pertambangan Menggunakan Metode

- AHP dan Rating Scale (Studi Kasus pada PT. Pama Indo Mining). *Industrial Engineering Online Journal*, vol. 4 no. (1).
- [9] Ilhami, R. S., & Rimantho, D. (2017). Penilaian Kinerja Karyawan Dengan AHP dan Metode Rating Scale. *Jurnal Optimasi Sistem Industri*, 150-157.
- [10] Sarwindah, & Marini. (2019). Sistem Penilaian Kinerja karyawan PT. Cahaya Iqra Mandiri Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process . *ILKOM Jurnal Ilmiah* , 110-117.
- [11] Setyadi , Y. A., Ina, W., & Tena, S. (2014). Sistem Penilaian Kinerja Pegawai Dengan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) (Studi Kasus Kantor Stasiun Meteorologi El Tari Kupang). *Jurnal Media Elektro*, 59-66.
- [12] Negara, P., Setiawan, H., & Ummi, N. (2017). Penilaian Perilaku Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menggunakan Metode Rating Scale Untuk Menentukan Pegawai Berprestasi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang. *Jurnal Teknik Industri*, 239-246.
- [13] Marisa, S., & Faida, E. W. (2018). Evaluasi Kinerja Petugas Rekam Medis Berdasarkan Metode ating Scale Di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya. *Jurnal Berkala Kesehatan*, 65-69.
- [14] Marbun, M., Sagala, J. R., & Rahayu, D. P. (2018). Menentukan kelayakan tunjangan kesejahteraan pegawai menggunakan metode AHP. *Journal Of Informatic Pelita Nusantara*, 46-55.
- [15] Anggraini, W., & Alim, A. (2015). Evaluasi Penilaian Kinerja Karyawan dengan Metode Analytical Hierarchy Proses Berdasarkan Prestasi Kerja dalam Pemberian Insentif Karyawan. *Jurnal Teknik Industri*, 111-116.
- [16] Ifiansyah, s. (2015). Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Bonus Karyawan Menggunakan Metode AHP . *Artikel Skripsi Universitas Nusantara PGRI Kediri*, 4-9.
- [17] Sugiyono. (2013). *Merode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.

---

**POLA OPERASI KEAMANAN LAUT DIPERAIRAN KEPULAUAN INDONESIA**

---

Oleh

Mirza<sup>1)</sup>, Hikmat Zakky Almubaroq<sup>2)</sup><sup>1,2</sup>Pascasarjana Manajemen Pertahanan, Universitas PertahananEmail: [1mirzawwk@gmail.com](mailto:mirzawwk@gmail.com)**Abstract**

Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan sesuai UU No. 32, sudah seharusnya Badan Keamanan Laut Indonesia melaksanakan tugas tersebut. BAKAMLA (Badan Keamanan Laut) merupakan revitalisasi dan penguatan kapasitas kelembagaan dari Badan Koordinasi Keamanan Laut. Dalam melaksanakan operasinya, BAKAMLA memerlukan pola pelaksanaan operasi bersama keamanan laut melalui Gelar Kekuatan Operasi Bersama keamanan laut yang selama ini dilakukan. Pelaksanaan gelar operasi tersebut perlu dikaji atau ditelaah, salah satunya dalam hal kesesuaian dengan jumlah kejadian kejahatan di laut yang semakin marak terjadi di wilayah perairan yurisdiksi Indonesia. Jenis-jenis pelanggaran dan kejahatan itu meliputi, pelanggaran atau tindak pidana di laut.

**Keywords: Kemanan Laut, Sistem, Maritim****PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara kepulauan (*achipelagic state*) terbesar di dunia yang memiliki posisi geografis yang sangat strategis. Jumlah pulau di Indonesia yang resmi tercatat mencapai 16.056 pulau. Kepastian jumlah ini ditentukan dalam forum *United Nations Confrences on the Standardization of Geographical Names* (UNCSGN) dan *United Nations Group of Experts on Geographical Names* (UNGEGN) yang berlangsung pada 7-18 Agustus 2017 di New York, Amerika Serikat. Selain itu, garis pantai Indonesia adalah sepanjang 99.039 km<sup>2</sup>. Luas daratannya mencapai sekitar 2,012 juta km<sup>2</sup> dan laut sekitar 5,8 juta km<sup>2</sup> (75,7%), 2,7 juta km<sup>2</sup> diantaranya termasuk dalam *Zona Ekonomi Eksklusif* (ZEE), sehingga timbul suatu keamanan dan ketertiban di ZEE dengan otomatis kepentingan khusus negara pantai dapat terlindungi dan diharapkan semua negara dapat bekerja sama dalam menjaga kelestarian ekosistem laut sekaligus menjaga keamanan pelayaran di laut sehingga dapat tercipta suatu hubungan internasional yang baik antar negara, khususnya di bidang kemaritiman. Laut

Indonesia yang sangat luas 2,5 kali lipat dari wilayah daratan pastinya memiliki potensi yang sangat besar, baik dari segi kekayaan alam maupun jasa lingkungan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan ekonomi pada tingkat lokal, regional, dan nasional.

Indonesia berpotensi menjadi poros maritim dunia yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia. Hal ini juga harus diliputi dengan pembangunan proses maritim dari aspek infrastruktur, politik, sosial-budaya, hukum, keamanan, dan ekonomi, penegakan kedaulatan laut Indonesia, revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan, penguatan dan pengembangan konektivitas maritim, rehabilitasi kerusakan lingkungan dan konservasi *biodiversity*, serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelautan.

Pemerintah telah mencanangkan lima pilar untuk menjadikan cita-cita Indonesia sebagai inti maritim dunia, yaitu:<sup>1</sup>

- 1) Pilar Pertama: Membangun Kembali Budaya Maritim Indonesia;
- 2) Pilar Kedua: Berkomitmen untuk melestarikan dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilarnya.
- 3) Pilar Ketiga: Komitmen untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan, logistik dan industri maritim serta pariwisata bahari.
- 4) Pilar Keempat: Diplomasi Maritim yang mengajak seluruh sekutu Indonesia untuk bekerja sama di bidang maritim.
- 5) Pilar Kelima: Membangun Kekuatan Pertahanan Maritim

Dengan posisi Indonesia yang sangat strategis menjadikan wilayah perairan Indonesia dilewati oleh jalur utama kapal-kapal laut dari berbagai negara, baik kapal-kapal dagang maupun kapal-kapal angkatan laut dari berbagai negara di dunia. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (selanjutnya disebut UU Kelautan) memberikan amanah kepada Pemerintah untuk melakukan upaya perlindungan lingkungan laut melalui konservasi laut; pengendalian pencemaran laut; penanggulangan bencana kelautan; dan pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan dan bencana.

Banyaknya potensi yang dapat digali dari perairan Indonesia, hal ini tentunya akan memberikan dampak yang tidak dapat dielakkan, yaitu munculnya ancaman terhadap kepentingan bangsa Indonesia, khususnya di sektor maritim. Ancaman maritim ini dapat dibedakan menjadi dua: ancaman keamanan kawasan; dan ancaman terhadap kelestarian sumber daya laut Indonesia. Ancaman tersebut dapat datang dari berbagai sumber, baik dari negara tertentu maupun dari lembaga non-

pemerintah sehingga Indonesia perlu merespon dengan kemampuan dan kekuatan keamanan maritim yang memadai agar ancaman tersebut dapat diminimalisir. Namun sudah menjadi rahasia umum bahwa operasi keamanan maritim tidak mudah karena memerlukan pengelolaan atau pengawasan yang sistematis serta aturan atau pengelolaan yang baik.<sup>2</sup>

Pelaksanaan gelar operasi tersebut perlu dikaji atau ditelaah, salah satunya dalam hal kesesuaian dengan jumlah kejadian kejahatan di laut yang semakin marak terjadi di wilayah perairan yurisdiksi Indonesia. Jenis-jenis pelanggaran dan kejahatan itu meliputi, pelanggaran atau tindak pidana di laut.

### LANDASAN TEORI

Undang-undang nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dalam salah satu pasalnya disebutkan “Dalam rangka penegakan hukum di perairan dan wilayah hukum Indonesia khususnya dalam melakukan patroli keselamatan dan keamanan. Badan Keamanan Laut dibentuk”. penguatan kapasitas kelembagaan Komite Koordinasi Keamanan Laut sejak tahun 1972. Badan Keamanan Laut dibentuk sejak tahun 1972. BAKAMLA laut bertanggung jawab atas patroli keamanan dan keselamatan di perairan dan yurisdiksi Indonesia.<sup>3</sup>

BAKAMLA memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Membentuk kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia dan yurisdiksi rakyat Indonesia.
- 2) Menyelenggarakan sistem peringatan dini untuk keselamatan dan keamanan di perairan Indonesia dan yurisdiksi Indonesia.
- 3) Mengkoordinasikan dan memantau operasi patroli air oleh instansi terkait.
- 4) Memberikan dukungan teknis dan operasional kepada departemen terkait.

- 5) Memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di perairan Indonesia dan wilayah hukum Indonesia.
- 6) Serta melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan negara.<sup>4</sup>

Tata kelola keamanan dan keselamatan di laut selama ini masih bersifat sektoral berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada instansi pemerintah sesuai dengan dimensi tugas dan fungsi instansi tersebut, seperti kepabeanan, keimigrasian, perikanan, dan pelayaran. Tata kelola tersebut masih mengacu pada *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie Staatsblad 1939 (TZMKO)*. Terdapat beberapa sektor yang keberadaannya layak mendapat perhatian karena telah diatur dalam perangkat perundang-undangan, di antaranya perikanan, perairan, pelayaran, kepabeanan, imigrasi, kelestarian Sumber Daya Alam, cagar budaya, lingkungan hidup, dan kehutanan. Namun dalam praktik operasional, fungsi keamanan laut dari tiap sektor tersebut masih dijalankan secara terpisah oleh beberapa institusi atau kementerian/ lembaga yang memiliki kewajiban atas tiap sektor tersebut.

Sistem keamanan maritim sektor atau *multiagency single task* yang memungkinkan kementerian/ lembaga memiliki unit patroli maritim. Patroli laut dalam rangka tugasnya menegakkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidangnya masing-masing.<sup>5</sup> Saat ini, Indonesia memiliki satuan patroli laut dari berbagai instansi yang berperan dalam penegakkan hukum di laut, seperti TNI AL, Polri, Direktorat KPLP (Kementerian Perhubungan), Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Kementerian Kelautan dan Perikanan), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kementerian Keuangan), dan Direktorat Jenderal Keimigrasian

Dengan diundangkannya UU Kelautan memberikan amanat tentang munculnya lembaga baru yang disebut dengan BAKAMLA yang menggantikan Badan Koordinasi

Keamanan Laut (BAKORKAMLA). Kemudian kedudukan BAKAMLA semakin diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (selanjutnya disebut PERPRES 1278/2014). Selanjutnya, Pasal 59 ayat (3) UU Kelautan menyatakan: "Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yuridiksi, khususnya dalam melaksanakan patrol keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yuridiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut"

Pasal 61 UU Kelautan memberikan tugas kepada BAKAMLA untuk melakukan patrol keamanan dan keselamatan di wilayah laut perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia. Selain itu, Pasal 62 UU Kelautan, BAKAMLA dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- 1) Menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia;
- 2) Menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia;
- 3) Melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia;
- 4) Menynergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait;
- 5) Memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait;
- 6) Memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia; dan
- 7) Melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.

Meningkatnya jumlah kapal asing tidak berdokumen yang tertangkap di perairan Indonesia secara ilegal. Hal ini menyebabkan bukti bahwa kejahatan terhadap sumber daya alam yang dimiliki oleh orang Indonesia tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan. Selain itu, masih belum efektifnya dalam pelaksanaan pengamanan di wilayah laut, merupakan salah satu kendala yang dihadapi dalam penanganan tindak kejahatan terhadap kekayaan sumber daya alam.<sup>6</sup> Permasalahan pokok yang menjadi perhatian penting hingga kini, adalah tumpah tindih mengenai kewenangan yang ada, seperti halnya antara Tentara Negara Indonesia Angkatan Laut (selanjutnya disebut TNI AL) dan BAKAMLA dalam menangani kasus pelanggaran yang terjadi di wilayah perairan Indonesia.

BAKAMLA berwenang melakukan pengejaran instan; memberhentikan, memeriksa, menangkap, mengangkut, dan menyerahkan kapal kepada instansi terkait yang berwenang untuk melakukan proses hukum lebih lanjut; dan mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah hukum Indonesia. (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan terpadu dalam satu kesatuan komando dan pengendalian.<sup>7</sup>

TNI AL sebagai komponen utama pertahanan negara di wilayah perairan berkewajiban untuk menjaga kedaulatan negara dan integritas wilayah Indonesia, mempertahankan stabilitas keamanan di wilayah perairan, melindungi sumber daya alam di wilayah perairan dari berbagai bentuk gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah perairan yuridiksi nasional Indonesia. Konsepsi dasar terhadap perwujudan keamanan di wilayah perairan pada hakikatnya memiliki dua dimensi yaitu penegakan kedaulatan dan penegakan keamanan yang saling berkaitan satu sama lainnya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata, dalam definisi yang singkat. Penelitian Hukum Normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Menurut Piter Mahmud Marzuki Penelitian hukum normative merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini, terutama mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum yang bertujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum serta permasalahan yang timbul didalamnya, sehingga hasil yang akan dihadapi kemudian adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang ada atas isu yang diajukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tata Kelola Keamanan Perairan laut Indonesia

Secara yuridis formal, berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang mengatur mengenai Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat TNI), wilayah perairan laut Indonesia, maupun mengenai tindak pidana tertentu di wilayah perairan laut Indonesia. Angkatan Laut Indonesia mempunyai tugas dan wewenang menegakkan hukum di perairan laut Indonesia yang terbatas pada ruang lingkup pengejaran, penangkapan, penyidikan, dan penyidikan, yang akan dikirim ke kejaksan



untuk penuntutan lebih lanjut. Hal ini sebagaimana tertuang dalam uraian Pasal 9 huruf b UU TNI.<sup>8</sup>

Dengan demikian secara yuridis formal, kewenangan TNI AL dalam melakukan penegakan hukum di wilayah perairan laut Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Sesuai dengan ketentuan hukum serta dengan mengingat tugas dari pada TNI AL khususnya dalam bidang penegakan hukum, maka TNI AL sangat berkewajiban, berkepentingan, dan melaksanakan serta melakukan penegakan hukum di wilayah perairan laut Indonesia guna menciptakan keamanan dan ketertiban.

Pasal 9 UU TNI telah disebutkan dengan jelas mengenai tugas pokok TNI AL. Apabila di fokuskan pada tugas TNI AL pada poin-poin diatas maka usaha menegakkan hukum dan menjaga keamanan di laut yurisdiksi nasional adalah segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan penegakan hukum di laut sesuai dengan kewenangan TNI AL (*constabulary function*) yang berlaku secara universal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatasi ancaman tindakan kekerasan, ancaman navigasi, serta pelanggaran hukum di wilayah perairan laut yurisdiksi nasional. Dengan demikian tugas pokok TNI AL selain bidang pertahanan di laut juga menyelenggarakan keamanan laut bagi penggunanya.

Pada akhir abad ke-21, pertumbuhan kapal laut memperluas cakrawala perdagangan di tingkat global. Namun, meskipun perkembangan teknologi transportasi lambat dan secara kumulatif signifikan, selama era pelayaran, ketidakstabilan maritim yang tinggi atau ancaman perompakan tetap menjadi hambatan yang signifikan untuk perdagangan jarak jauh. Dengan adanya keamanan dalam laut secara regional dapat membantu memusatkan dan menyebarkan praktik terbaik, mengembangkan sinergi yang lebih besar di antara kebijakan dan institusi publik, dan secara nasional menciptakan keberlanjutan konservasi

yang lebih besar dengan integrasi kepedulian sosial-ekonomi dan harmonisasi perencanaan strategis, praktik, dan kebijakan.<sup>9</sup>

Pelaksanaan tugas TNI AL dalam bidang keamanan laut, tidak hanya terfokus pada penegakan hukum di laut, karena keamanan laut mengandung pengertian bahwa laut bisa dikendalikan dan aman digunakan oleh pengguna untuk bebas dari ancaman atau gangguan terhadap aktifitas pemanfaatan laut. *Pertama*, laut bebas dari ancaman tersebut dapat berupa, pembajakan perompakan, sabotase, maupun aksi terror bersenjata. *Kedua*, laut bebas dari ancaman navigasi, yang ditimbulkan dari kondisi geografi dan hidrografi serta kurang memadainya sarana bantu navigasi sehingga membahayakan keselamatan pelayaran. *Ketiga*, laut bebas dari ancaman terhadap sumber daya laut berupa pencemaran dan kerusakan ekosistem laut serta eksploitasi dan eksplorasi berlebihan. *Keempat*, laut bebas dari ancaman pelanggaran hukum, baik hukum nasional maupun hukum internasional seperti *illegal fishing*, *illegal logging*, *illegal migrant*, penyelundupan dan lain-lain.

Berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (untuk selanjutnya disingkat UU Kelautan) menyebutkan bahwa tugas BAKAMLA adalah melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Jika ditinjau dari luasnya wilayah maka tugas BAKAMLA sangat luas yakni melakukan patrol keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Tata kelola keamanan dan keselamatan di laut selama ini masih bersifat sektoral berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undangundang kepada instansi pemerintah sesuai dengan dimensi tugas dan fungsi instansi tersebut, seperti kepabeanan, keimigrasian, perikanan, dan pelayaran. Di tingkat nasional, kapasitas yang diperlukan untuk menyediakan keamanan maritim mencakup pengaturan

koordinasi antara berbagai lembaga yang terlibat dan kemampuan operasional penegakan hukum maritim untuk memberikan ketertiban di laut.<sup>10</sup>

Tata kelola tersebut masih mengacu pada *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie* Staatsblad 1939 (TZMKO). Apabila kita cermati lebih mendalam, terdapat beberapa sektor yang keberadaannya layak mendapat perhatian karena telah diatur dalam perangkat perundang-undangan, di antaranya perikanan, perairan, pelayaran, kepabeanan, imigrasi, kelestarian Sumber Daya Alam, cagar budaya, lingkungan hidup, dan kehutanan. Akan tetapi, dalam praktik operasional, fungsi keamanan laut dari tiap sektor tersebut masih dijalankan secara terpisah oleh beberapa institusi atau kementerian/ lembaga yang memiliki kewajiban atas tiap sektor tersebut. Sistem keamanan laut yang bersifat sektoral atau “multiagency single task” memberikan kewenangan terhadap kementerian/ lembaga untuk mempunyai satuan-satuan patroli laut. Satuan patrol laut tersebut dalam rangka pelaksanaan tugas untuk menegakkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan sektor masing-masing. Saat ini, Indonesia memiliki satuan patroli laut dari berbagai instansi yang berperan dalam penegakkan hukum di laut, seperti TNI AL, Polri, Direktorat KPLP (Kementerian Perhubungan), Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Kementerian Kelautan dan Perikanan), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kementerian Keuangan), dan Direktorat Jenderal Keimigrasian (Kementerian Hukum dan HAM). Dalam praktik operasional di lapangan, sering timbul permasalahan tumpang tindih kewenangan dan pengawasan yang bersifat sektoral. Guna menangani permasalahan tersebut dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penjagaan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut, pada 29 Desember 2005 dibentuklah Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla)

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005

### **Sarana dan Prasarana Pendukung Keamanan Laut**

Pemangku kepentingan yang berpartisipasi dalam operasi tingkat kamla beroperasi dengan kamla. Tentunya operasional perlu didukung dengan sarana dan prasarana pendukung untuk menjaga keselamatan dan keamanan maritim. Pemangku kepentingan tertentu memiliki sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung tingkat kekuatan operasional dengan Kamla seperti yang diharapkan. Berikut sarana dan prasarana pendukung keamanan maritim. Sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki TNI AL antara lain 1) kapal perang 2) penunjang kapal patroli 3) pesawat 4) pasukan pendarat.<sup>11</sup>

Kapal TNI AL berjumlah 132 dengan inisial KRI (Kapal Republik Indonesia). KRI dibagi menjadi tiga kelompok kekuatan, yaitu 1. Kekuatan pemukul (*striking force*) terdiri atas 40 KRI yang memiliki persenjataan strategis; 2. Kekuatan patroli (*patrolling force*) berjumlah 50 KRI. 3. Kekuatan pendukung (*supporting force*) berjumlah 48 KRI. TNI AL sudah mempunyai 4 kapal LPD, 2 kapal multipurpose yang dibuat di Korea Selatan (KRI MKS dan KRI SBY), dan 2 unit dikerjakan oleh PT PAL yaitu KRI BAC dan KRI BJN. Selain itu, kapal TNI AL juga memiliki 12 radar yang ditempatkan di seluruh Indonesia.

Instansi Polri yang terkait langsung dengan patroli keamanan laut adalah polair (polisi air). Sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki polair adalah a. 10 kapal kelas A (panjang 48 m), b. 11 kelas B (panjang 28 m), c. 5 kelas C (motor boat, panjang 15 m) yang tersebar di Riau (2 kapal), Kaltim (2 kapal), dan Jakarta (1 kapal). d. 86 kapal 15 m tetapi kurang sesuai dengan standar operasi Polri.

Sarana dan prasarana yang dimiliki Kementerian Perhubungan terkait kamla terbagi menjadi dua, yaitu Direktorat Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai serta Badan Search and Rescue

Nasional (BASARNAS). Kapal milik Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terdiri atas 7 kapal negara kenavigasian dan 4 kapal KPLP. Adapun kapal negara Penjagaan Laut dan Pantai (Armada PLP) saat ini berjumlah 159 unit yang terdiri atas 4 unit kapal kelas I, 9 unit kapal kelas II, 27 unit kapal kelas III, 42 unit kapal kelas IV, dan 77 unit kapal kelas V. Adapun kapal negara Penjagaan Laut dan Pantai (Armada PLP) saat ini berjumlah 159 unit yang terdiri atas 4 unit kapal kelas I, 9 unit kapal kelas II, 27 unit kapal kelas III, 42 unit kapal kelas IV, dan 77 unit kapal kelas V.

Sarana dan Prasarana Pendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Fasilitas infrastruktur dan sarana pendukung yang dimiliki KKP terkait dengan tugas pengawasan laut sesuai dengan kewenangannya adalah 20 kapal patroli, 20 kapal latih, dan 31 speed boat. Selain itu, ada fasilitas infraststruktur pendukung yang telah digunakan oleh KKP, antara lain Monitoring Controlling & Surveillance (MCS) serta Vessel Monitoring Surveillance (VMS). Sarana dan Prasarana Pendukung Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) memiliki sarana dan prasarana pendukung, yaitu 27 fast patrol boat 28 meter bahan dasar kayu, 5 fast patrol boat 28 meter bahan dasar kayu, 10 LPC (Local Patrol Craft) dengan bahan dasar fiberglass, 10 VSV (very silinder vessel), dan 155 speed boat.

### **Teknologi Penunjang keamanan laut Indonesia**

BAKAMLA mempunyai sistem teknologi informasi National Picture Compilation (NPC). Sistem ini merupakan sistem yang dikembangkan oleh Bakorkamla dengan mengoptimalkan akses dua satelit, yakni Inmarsat dan Vsat. Kedua satelit ini juga digunakan oleh Kemenhub dan KKP. Sistem NPC ini bekerja dengan menggabungkan data prakiraan cuaca, peta dasar rupa bumi, pola arus, peta fishing ground (daerah penangkapan ikan), serta informasi dari Vessel Monitoring System (VMS). Semua data dan informasi

tersebut terkumpul dalam BAKAMLA Integrated Information System (BIIS) yang telah dikembangkan sejak tahun 2007. MRCC dan RCC Selain itu, BAKAMLA mempunyai Maritime Regional Crisis Center (MRCC) dan Regional Crisis Center (RCC), yaitu stasiun pemantau yang tersebar di seluruh Indonesia terutama untuk memantau jalur ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia).<sup>12</sup>

Stasiun teknologi tersebut dilengkapi dengan alat deteksi radar, AIS, Long Range Camera, dan peralatan komunikasi lain yang ditempatkan hampir di seluruh Indonesia. Lokasi MRCC dan RCC yang dimiliki BAKAMLA.<sup>13</sup> Terkait keamanan laut, BAKAMLA lebih menekankan pada sinergitas dan terintegrasinya sarana prasarana Early Warning System (EWS) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Dengan demikian, informasi dan data yang terkait dengan bidang kemaritiman dapat memberikan kontribusi positif bagi pelaksanaan penjagaan keamanan dan keselamatan laut di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi nasional. Hal itu membuat pelaksanaan penjagaan keamanan dan keselamatan laut lebih efektif dan efisien.

### **Tugas pokok BAKAMLA dalam keamanan laut**

Pembentukan BAKAMLA merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. BAKAMLA berwenang menyinergikan pelaksanaan patroli keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut. Pembentukan BAKAMLA ini adalah bentuk keseriusan bangsa Indonesia dalam rangka mengukuhkan supremasi kedaulatan dan hukum di wilayah laut Indonesia. Pembentukan BAKAMLA telah mengubah paradigma pemerintah dalam mengelola keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut yang selama ini dianggap tidak efisien dan efektif.<sup>14</sup>

BAKAMLA sebagai lembaga sipil di wilayah maritim sebagai komponen utama keamanan maritim nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Tata Ruang Laut

yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982. Serta mengoptimalkan BAKAMLA sebagai koordinator tunggal lembaga sipil negara dalam menjaga keselamatan dan keamanan penjaga laut dan pantai melalui Blue Secure Strategy. Blue Secure Strategy yang diterapkan sebagai sistem keamanan yang terkoneksi antar wilayah perairan Indonesia akan membuat wilayah jelajah otoritas BAKAMLA lebih leluasa mulai dari zona perairan nusantara hingga zona delimitasi sekaligus menegakkan implementasi Blue Secure Strategy Indonesia.<sup>14</sup>

Jika dicermati kembali, berdasarkan Pasal 61 UU Kelautan maka tugas BAKAMLA sangatlah luas, namun tugas yang demikian belum luas jika belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana patroli yang memadai. Kapal patroli BAKAMLA berukuran kecil yang hanya mampu melaksanakan patroli di laut teritorial dan belum mampu menjangkau sampai perairan laut lepas maupun Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Padahal pada kenyataan normatifnya, laut lepas dan ZEEI merupakan tanggung jawab BAKAMLA untuk harus dijaga keamanannya. Adapun Tugas BAKAMLA terkait dengan menjaga keamanan dan keselamatan yang mungkin terjadi di laut dan perlu di waspadai antara lain:

- 1) Adanya ancaman terhadap tindakan kekerasan, yaitu ancaman dengan menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisir yang mempunyai kemampuan untuk mengganggu serta membahayakan baik personel maupun material serta ancaman terhadap negara. Ancaman tersebut dapat berupa ancaman pembajakan, ancaman terhadap adanya perompakan, ancaman terhadap kegiatan sabotase obyek vital nasional di laut, ancaman adanya penyebaran ranjau dan ancaman terjadinya aksiteror di laut.
- 2) Ancaman terhadap bahaya navigasi, yaitu ancaman yang ditimbulkan oleh

kondisi geografi dan hidrografi serta kurang memadainya sarana dan alat bantu navigasi, antara lain seperti suar, buoy dan lain-lain yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga dapat membahayakan keselamatan pelayaran.

- 3) Ancaman terhadap perusakan sumber daya laut, yakni berupa pencemaran laut dan perusakan ekosistem laut, serta adanya konflik pengelolaan sumber daya laut, sehingga memiliki kecenderungan mudah dipolitisasi dan selanjutnya akan diikuti dengan penggelaran kekuatan militer, misalnya dalam sengketa kepulauan dan sengketa perbatasan.
- 4) Ancaman terhadap pelanggaran hukum, yaitu kegiatan yang dilakukan secara melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik perundang-undangan secara nasional maupun internasional, jenis pelanggaran yang sering dilakukan antara lain ancaman terhadap kegiatan *illegal fishing*.<sup>4</sup>

#### **Pentingnya Koordinasi Keamanan Laut**

Sinkronisasi merupakan suatu hal yang penting dilakukan sebagai bentuk penguatan lembaga dan aparat penegak hukum dapat diposisikan sebagai lini terdepan dalam penegakan hukum di wilayah wilayah selat sunda. Untuk mewujudkan terobosan kreatif tersebut bukanlah hal yang mudah mengingat banyaknya jenis kejahatan yang terjadi di selat sunda. Oleh karena itu, perlu adanya adaptasi dalam terobosan kreatif tersebut. Pelaksanaan fungsi adaptasi sebagaimana yang di kemukakan oleh Parsons bahwa fungsi adaptasi adalah proses menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Aparat penegak hukum sebagai sub sistem kepribadian harus mampu melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan menetapkan tujuan sistem dan memobilisasi sumber daya yang ada untuk mencapainya.

Tidak adanya kebijakan keamanan nasional yang strategis dan strategi keamanan

maritim nasional menempatkan kepentingan nasional dipertaruhkan dan di bawah ancaman yang konsisten yang menimbulkan tanggapan reaktif di antara badan-badan keamanan nasional. Hal ini juga berdampak pada kerjasama keamanan maritim regional yang mengakibatkan terbatasnya koordinasi terhadap kepentingan maritim bersama, sehingga memungkinkan terjadinya berbagai ancaman dan kejahatan maritim yang terus berlanjut.<sup>15</sup>

Melalui sistem kepribadian itu, aparat penegak hukum harus mampu melakukan terobosan sinkronisasi karena kondisi dilapangan masih banyak ditemukan masyarakat nelayan yang tidak taat dan patuh terhadap Undang-undang dan peraturan tentang batasan perijinan penggunaan perahu dan alat tangkap yang digunakan. Deteksi dini ini disebabkan kurangnya pemahaman instansi terkait dalam pembagian mandat untuk memberikan pelayanan kepada nelayan. Selain itu, ketegasan birokrasi dalam mengeluarkan peraturan perundang-undangan membuat pengurusan izin berlayar menjadi sangat sulit. dari kesulitan ini Karena terlalu banyak instansi yang terlibat dalam pengelolaan kapal penangkap ikan. Birokrasi terlalu lama.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Permasalahan Keamanan Laut di Perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang banyak menghadapi berbagai masalah. Penyebabnya antara lain:

1. Luasnya perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
2. Perairan Indonesia menjadi perlintasan laut internasional (khususnya di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia).
3. Tumpang tindih kewenangan antarinstansi kama karena operasi masih bersifat sektoral.
4. Banyaknya instansi yang terlibat dalam kama meyebabkan permasalahan keamanan dan keselamatan laut terkendala. BAKAMLA sebagai badan

keamanan laut mengupayakan agar permasalahan keamanan dan keselamatan laut dapat diatasi. Oleh karena itu, BAKAMLA beserta instansi terkait terutama instansi yang terkait dengan satuan tugas patroli.

### Saran

Perlu koordinasi terstruktur guna Gelar Kekuatan Operasi Bersama. Usaha yang dilakukan secara maksimal akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Akan tetapi, gelar kekuatan yang hanya dilaksanakan beberapa kali dalam setahun, sedangkan pelanggaran pengguna laut hampir terjadi setiap hari. Hal ini diakibatkan letak Indonesia yang sangat strategis dan menjadi perlintasan transportasi dunia. Di antara tiga wilayah Perairan yang paling rawan di wilayah barat adalah Selat Malaka, di wilayah tengah Laut Sulawesi, dan di wilayah timur sekitar Perairan Ambon. Berdasarkan berbagai kejadian di laut, dapat dibuat peta kejadian aktivitas di laut. Dengan demikian, dapat dibandingkan dengan data dinamika laut sehingga melalui perbandingan tersebut dapat diperoleh korelasi dari kejadian di laut dengan model dinamika laut.

Selain itu, perlu adanya sinergitas operasi maupun *sharing* data dan informasi yang sudah terjalin antara BAKAMLA dengan TNI AL dapat membangun keamanan dan keselamatan; baik di wilayah perairan maupun wilayah yurisdiksi Indonesia, belum efektifnya pengamanan laut Indonesia; hasil sangat terkait dengan efektifitas, hasil tidak akan maksimal jika pelaksanaan tersebut tidak efektif; belum adanya kebijakan nasional yang mengatur secara jelas tentang tugas dan wewenang tiap instansi di bidang keamanan laut, masih adanya ego sektoral antar instansi di laut, serta belum jelasnya secara hukum BAKAMLA ketika melakukan penangkapan kapal apakah melakukan penyidikan atau penyelidikan.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Syahrin MN Al. Kebijakan Poros Maritim Jokowi dan Sinergitas Strategi

- Ekonomi dan Keamanan Laut Indonesia. *Indones Perspect.* 2018;3(1):1-17. doi:10.14710/IP.V3I1.20175
- [2] Aryani C. Mendorong Lahirnya RUU Keamanan Laut dalam Penguatan Sistem Keamanan Laut Nasional. *J Pembang Huk Indones.* 2021;3(2):155-173. doi:10.14710/JPHI.V3I2.155-173
- [3] Iswardhana MR, Adi W, Chotimah HC. Strategi Keamanan Laut Pemerintah Indonesia Untuk Menjaga Keamanan Maritim. *Nusant J Ilmu Pengetah Sos.* 2021;8(6):1406-1428. doi:10.31604/JIPS.V8I6.2021.1406-1428
- [4] Azis NA, R LTS, Hardiwinoto S, et al. Indonesia adalah salah satu Negara laut yang cukup unik yang digunakan akan dibarengi oleh masalah yang sama Indonesia serta dibarengi pula dengan niat membangun Indonesia menjadi poros maritim dunia , maka Indonesia Presiden Nomor 81 Tahun 2005 secara je. 2016;5:1-13.
- [5] Wulansari EM. Penegakan Hukum Di Laut Dengan Sistem Single Agency Multy Tasks. In: *Media Pembinaan Hukum Nasional.* ; 2014:1-6.
- [6] Siahaan Iestari yosefin, Sarswati R, Soemarmi amiek. Kajian Yuridis Terhadap Kedudukan Kementeriankelautan Dan Perikanan Dalam Meledakkan Kapal Asing Yang Melakukan Penangkapan Ikan Secara Ilegal Di Perairan Indonesia. *Diponegoro Law J.* 2017;6(2):1-8.
- [7] Palupi DA. The Role of BAKAMLA in Law Enforcement in Indonesian Waters and Indonesian Jurisdiction. Published online April 5, 2019. doi:10.2991/SORES-18.2019.41
- [8] Ansori, Ikhsanudin AH, Suhardono E. Sinergi BAKAMLA Dengan Tni Al Guna Penanggulangan Tindak Pidana Di Laut Dalam Rangka Penegakan Hukum . *J Strateg Pertahanan Laut.* 2017;3(3):47-68.
- [9] Broohm D. Maritime Security Governance: A New Strategy Management To Avoid Piracy In The Gog And Its Legal Guarantee. *Adv Soc Sci Res J.* 2021;8(10):405-437. doi:10.14738/ASSRJ.810.11138
- [10] Bateman S. Maritime security governance in the Indian Ocean region. *J Indian Ocean Reg.* 2016;12(1):5-23. doi:10.1080/19480881.2016.1138709
- [11] Arletiko T. Penegakan Hukum Di Perairan Indonesia Oleh Badan Keamanan Laut Menurut Uu No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. *LEX Soc.* 2017;5(10).doi:10.35796/LES.V5I10.18494
- [12] R. Munaf D, Sulistyaningtyas T. Kajian Sistem Operasi Tersinergi BAKAMLA Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. *J Sositologi.* 2015;14(3):273-288. doi:10.5614/SOSTEK.ITBJ.2015.14.3.6
- [13] Adipta IKDS. Sistem Informasi Pendataan Kapal Pada BAKAMLA Menggunakan Framework Laravel. Published online 2020.
- [14] Ramadhan A. Tinjauan Yuridis Peran Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) Dalam Menjaga Keamanan Laut Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. Published online 2020.
- [15] Charo AM. Role of Maritime Policies and Strategies in Shaping the Maritime Security Threats in Kenya. *African J Empir Res.* 2021;2(1):115-131. doi:10.51867/AJER.V2I1.18

SPORT HYPNOSIS: EGO STATE DALAM MEREDUKSI ANXIETY ATLET  
TAE KWON DO  
(Studi Kasus pada Atlet PPOPD Tae Kwon Do Kota Salatiga)

Oleh

Guntur Ratih Prestifa Herdinata<sup>1)</sup>, Mona Saparwati<sup>2)</sup>, Noer Indah Aprianti<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Ngudi Waluyo, Kabuapten Semarang, Indonesia

Email: [1ratihprestifa@unw.ac.id](mailto:ratihprestifa@unw.ac.id)

**Abstract**

Sport Hypnosis or Sports hypnosis refers to the use of hypnotherapy with athletes to improve sports performance. Every athlete must feel the mental turmoil, the mental that usually arises is anxiety. Anxiety or anxiety can arise during practice or during matches, and during the COVID-19 pandemic. The purpose of this study was to determine whether the implementation of sport hypnosis : ego state could reduce the anxiety of taekwondo athletes in Salatiga This study uses a qualitative approach with comparative descriptive analysis. The data used in this study through the results of observations, interviews and documentation of objects and informants. The results of this study obtained information that exercise of sport hypnosis : ego state uses a combination of techniques commonly used in transactional analysis. After going through several stage of sport hypnosis : ego state, it was proven to be able to reduce the level of anxiety in taekwondo PPOPD athletes in Salatiga. It can be seen that by reducing the level of anxiety in athletes, it is able to improve the performance of athletes which is marked by an increase in the achievement of taekwondo PPOPD athletes in Salatiga. Ego state therapy or ego state counseling is expected to add insight regarding counseling techniques that can be developed in a variety of problems faced by athletes, especially taekwondo PPOPD athletes in salatiga.

**Keywords:** sport hypnosis, ego state, anxiety, tae kwon do

**PENDAHULUAN**

*Sport Hypnosis* atau Hipnotis olahraga mengacu pada penggunaan hipnoterapi dengan atlet untuk meningkatkan kinerja olahraga. Hipnotis dalam olahraga memiliki fungsi [terapeutik](#) dan [meningkatkan kinerja](#). Kondisi mental atlet selama latihan dan kompetisi dikatakan mempengaruhi performa. Hipnosis adalah salah satu bentuk pelatihan mental dan karena itu dapat berkontribusi untuk meningkatkan kinerja atlet. Hipnosis olahraga digunakan oleh atlet, pelatih, dan psikolog. Hipnosis olahraga menggabungkan metodologi ilmu kognitif dan ilmu olahraga. Oleh karena itu, hipnosis dalam olahraga tumpang tindih dengan bidang-bidang seperti [biomekanik](#), nutrisi, fisiologi, dan psikologi olahraga. Umumnya hipnosis olahraga dipelajari dalam bidang psikologi

olahraga, yang meneliti dampak variabel psikologis terhadap kinerja atlet (Donald R. Liggett: 2000).

Tae kwon do kota Salatiga melakukan pembenahan dalam pembinaan dan pembibitan yang bekerjasama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga sejak tahun 2019. Dikarenakan, atlet pelajar dalam semua ajang kompetisi mengalami kendala dalam prestasi. Salah satu kendala yang paling dominan adalah masalah yang dihadapi atlet adalah psikologi, khususnya kecemasan atau *anxiety*. Beberapa reaksi kecemasan/*anxiety* yang muncul diantaranya adalah terjadinya beberapa kesalahan yang disebabkan oleh kendala fisiologis tubuh seperti bergetarnya bagian anggota gerak bawah seperti tungkai, kesalahan-kesalahan teknik yang semestinya tidak perlu terjadi dikarenakan saat latihan

semua teknik tergolong baik. Gejala seperti ini sangat mungkin disebabkan karena reaksi kecemasan/*anxiety* yang datang saat bertanding, apalagi gelajanya muncul saat menit-menit awal pertandingan dimulai. Jantung berdebar dengan sangat kencang, sementara emosi terlalu cepat muncul

Hipnosis adalah salah satu dari beberapa teknik yang dapat digunakan atlet untuk mencapai tujuan olahraga mereka dan juga bermanfaat bagi pelatih serta atlet. Hipnosis mungkin berpengaruh pada pikiran seperti yang dilakukan aktivitas fisik bagi tubuh seorang atlet. Teori di balik hipnosis olahraga adalah bahwa relaksasi adalah kunci untuk meningkatkan kinerja olahraga dan atlet dapat tampil lebih baik jika mereka mampu untuk rileks secara mental dan fokus pada tugas yang sedang dikerjakan. Hipnosis dapat membantu atlet mencapai relaksasi selama latihan dan kompetisi. Hipnosis juga dapat membantu mengendalikan kecemasan dan mengatasi stres pada atlet. Atlet dapat mengembangkan respons otomatis terhadap rangsangan yang telah ditetapkan sebelumnya yang diarahkan untuk mencapai tingkat kinerja yang optimal (Donald R. Liggett: 2016). *Sports Hypnosis* juga dapat menghilangkan respons fobia, panik/cemas, dan ketakutan akan cedera lebih lanjut pada olahragawan setelah cedera.

Pencapaian prestasi yang maksimal seorang atlet membutuhkan beberapa kesiapan yaitu fisik, teknik, dan taktik, selain itu diperlukan kesiapan mental untuk dapat mencapai kemampuan permainan terbaik karena faktor mental sendiri salah satunya meliputi kecemasan, yang mana faktor ini dapat memicu psikologi atlet. Gejala-gejala rasa cemas dan stress dalam pertandingan misalnya rasa cemas, rasa khawatir, ketegangan, kebingungan, kurang atau hilang konsentrasi, dan rasa percaya diri yang menurun suatu pertandingan. Faktor utama dalam kegagalan yang dialami oleh para atlet yaitu kurangnya pembinaan mental bagi atlet itu sendiri. Permasalahan kecemasan yang dialami oleh atlet bermacam-

macam seperti permasalahan yang ditimbulkan dari faktor eksternal, yaitu permasalahan yang berasal dari luar diri atlet, misalnya adanya lawan, wasit, penonton, dan lingkungan. Adapun permasalahan yang timbul karena faktor internal yaitu permasalahan yang timbul dari dalam atlet itu sendiri misalnya permasalahan emosi, motivasi, intelegensi, kecemasan yang tinggi, stress yang berlebihan. Semua permasalahan itu tentu akan berpengaruh terhadap prestasi atlet, namun dalam kesempatan ini akan dilakukan mengambil salah satu permasalahan yang ditimbulkan dari faktor internal yaitu kecemasan/*anxiety* (Husdarta : 2014).

Kecemasan/*anxiety* muncul akibat ketakutan akan dinilai secara negative oleh berbagai hal, antara lain; ribuan penonton yang merupakan ancaman terhadap harga diri atlet, dilihat dari kecenderungan masyarakat yang memberikan penilaian positif terhadap atlet yang memenangkan pertandingan dan cenderung memberikan penilaian negatif terhadap atlet yang kalah. Kecemasan/*anxiety* yang disebabkan faktor intrinsic antara lain; berpenampilan buruk sebagai akibat dari rasa takut gagal, sifat kepribadian yang memang pencemas dan pengalaman bertanding yang masih kurang, sedangkan akibat kecemasan yang disebabkan oleh faktor ekstrinsik, antara lain; lawan, penonton, teman, pengurus, tempat pertandingan, fasilitas pertandingan, perlengkapan dan tuntutan dari pelatih dan keluarga (Husdarta: 2014). Salah satu kondisi yang menarik untuk dibahas dalam penelitian ini adalah kondisi emosi remaja. Emosi remaja cenderung labil dengan fluktuasi perasaan yang mudah berubah. Remaja dapat dengan mudah jatuh ke dalam kondisi afek yang sangat negative namun berpeluang berubah menjadi kondisi afek yang positif (Santrock; 2017). Periode remaja merupakan periode dimana terjadi pergolakan tekanan seksual dan sosial sehingga mereka berusaha diterima dan mendapatkan dukungan dari keluarga dan teman sebaya. Semua aspek perkembangan



dalam masa remaja secara global berlangsung antara umur 12 - 21 tahun, dengan pembagian usia 12-15 tahun adalah masa remaja awal, 15-18 tahun adalah masa remaja pertengahan, 18-21 tahun adalah masa remaja akhir (Monks; 2019).

### **Pengertian Ego State**

*Ego State*, menurut Watkins dan Watkins adalah sebuah sistem perilaku dan pengalaman yang terorganisir yang elemen-elemennya saling terhubung melalui beberapa prinsip yang sama tetapi saling dipisahkan oleh batas-batas yang dapat ditembus (*permeabilitas*) hingga derajat kedalaman dan fleksibilitas tertentu. *Ego State* adalah bagian kecil dari kepribadian seseorang. Sebuah *Ego State* merupakan satu bagian dari sekumpulan kelompok yang mempunyai keadaan atau kondisi emosi yang setara, yang dibedakan berdasarkan tugas khusus, perasaan (*mood*), dan fungsi mental, dimana kesadaran diasumsikan sebagai identitas dari orang tersebut.

Kumpulan dari *Ego State* membentuk kepribadian utuh dari seseorang dan jumlahnya tidak dapat dihitung akan tetapi dalam satu minggu *Ego State* seseorang yang muncul berjumlah sekitar 5 hingga 15 *Ego State*. Menurut Watkins *Ego State* terbentuk karena tiga hal. Pertama melalui normal *differentiation* yaitu anak belajar membedakan satu hal dengan yang lainnya, misalnya makanan yang ia suka dan tidak suka, orang yang baik dan tidak baik terhadap dirinya. Kedua adalah *introjection of significant others* yaitu anak menyerap energi positif atau negatif dari orang “penting” di sekitar anak, misalnya orangtua, guru, teman, atau siapa saja yang dianggap penting oleh anak, dan energi ini termanifestasi dalam diri anak dalam bentuk “Bagian Diri” yang dinamakan *Introject*. Dengan kata lain *introject* adalah manifestasi/perwujudan suatu figur yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan seseorang yang diadopsi/tersimpan dan “hidup” di dalam ingatan/mental/pikiran bawah sadar orang tersebut. Contoh *introject* antara lain sosok atau figur dari ayah, ibu,

suami, istri, saudara, anak, tokoh agama, guru spiritual, dan lain-lain. Ketiga, *Part* atau bagian diri yang terbentuk akibat pengalaman traumatik. Saat anak mengalami suatu pengalaman traumatik dan tidak ada *Ego State* dalam dirinya yang mampu menangani trauma ini maka akan muncul atau tercipta *Ego State* baru yang khusus berfungsi menangani trauma ini. Teori perkembangan otak, *Ego State* terbentuk sebagai akibat dari pengalaman atau kejadian yang dialami anak yang bersifat berkesinambungan atau berulang.

J.G. Watkins & H.H Watkins (2018) mendefinisikan *Ego State therapy* sebagai sebuah terapi yang menggunakan pendekatan individu, keluarga, dan terapi kelompok dalam mengakses dan berhubungan dengan *Ego State* yang bertujuan untuk melepaskan dan mengatasi konflik *Ego State* yang terjadi. Konflik *Ego State* yang terjadi seringkali membuat seseorang mengalami kecemasan, depresi bahkan perilaku salah satunya. *Ego State* adalah bagian kecil dari kepribadian seseorang. *Ego State* dalam *transactional analysis* merupakan konsep komunikasi interaksional bagian diri yang terdiri dari tiga yaitu *Ego State* anak, *Ego State* dewasa dan *Ego State* orang tua. Tujuan inti dari *hypnosis Ego State* adalah membuat *Ego State* yang faded, retro atau konflik menjadi *Ego State* normal sehingga individu terbebas dari sabotase diri dan mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya.

### **Kecemasan (ANXIETY)**

Kecemasan dapat timbul kapan saja, salah satu penyebabnya adalah ketegangan yang berlebihan dan berlangsung lama. Semua orang yang normal pasti mengalami *anxiety*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kecemasan adalah suatu keadaan kekhawatiran atau kebimbangan. Berikut ini beberapa penjelasan tentang kecemasan (*anxiety*), antara lain:

1. James Tangkudung dan Apta Mylsidayu (2017) *anxiety* adalah salah satu gejala

- mental yang identik dengan perasaan negatif.
2. Leitenberg (2014) *anxiety* merupakan kecenderungan belajar untuk menanggapi kecemasan kognitif dan somatik terhadap situasi olahraga yang kompetitif sebagai kelengkapan evaluasi kinerja atlet.
  3. Straub dalam Husdarta (2014) kecemasan adalah reaksi situasional terhadap berbagai rangsang stress.
  4. Dadang Hawari (2019) kecemasan adalah gangguan alam perasaan (*affective*) yang ditandai dengan perasaan ketakutan atau kekhawatiran yang mendalam dan berkelanjutan, tidak mengalami gangguan dalam menilai realitas, kepribadian masih tetap utuh (tidak mengalami keretakan kepribadian/*splitting of personality*, perilaku dapat terganggu tetapi masih dalam batas-batas normal.
  5. Secara sederhana kecemasan atau dalam bahasa psikologi biasa disebut dengan *anxiety* didefinisikan sebagai aktivasi dan peningkatan kondisi emosi (Bird, 2010).
  6. Weinberg & Gould (2016) menyatakan bahwa kecemasan adalah keadaan emosi negatif yang ditandai dengan gugup, khawatir, dan ketakutan dan terkait dengan aktivasi atau kegairahan pada tubuh.
  7. Kenny (2017) *anxiety* adalah emosi universal, terkadang sulit untuk membedakan antara kecemasan normal atau gangguan kecemasan.
  8. Cashmore (2018) menjelaskan bahwa kecemasan mengacu kepada emosi yang tidak menyenangkan yang ditandai dengan perasaan samar, tetapi terus-menerus merasa prihatin dan ketakutan.
  9. Viera dalam Carlos Eduardo Lopes Verardi (2016) kecemasan adalah emosi yang dipicu oleh stres dari kondisi internal dan eksternalnya.
  10. Evangelos Bebetos (2012) kecemasan adalah respons emosional yang ditandai dengan rasa kekhawatiran.
  11. Cox dalam Evangelos Bebetos (2013) kecemasan adalah salah satu dari banyak emosi yang dapat muncul sebagai reaksi atlet dalam situasi yang kompetitif.
  12. Kalkant T (2017) Kecemasan didefinisikan sebagai antisipasi bahaya masa depan atau kesalahan seseorang, disertai dengan emosi negatif yang kuat dan gejala stres.
  13. Kecemasan adalah reaksi yang salah satu menampilkan di bawah tekanan emosional atau fisik. Dalam kehidupan sehari-hari kecemasan sering menggambarkan situasi yang dinyatakan dengan istilah ketakutan, keprihatinan dan kegelisahan (Özen G; 2018).
- Dari beberapa pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa kecemasan (*anxiety*) adalah salah satu gejala jiwa yang negatif pada seseorang ditandai dengan kekhawatiran dan ketegangan.

#### Jenis-jenis Kecemasan

Para ahli psikologi olahraga menjelaskan dan membagi kecemasan menjadi 2 (dua) yaitu *trait* dan *state* (Evangelos Bebetos, 2012). *State anxiety*: kecemasan dapat dianggap sebagai salah satu perasaan dasar pada manusia, kita semua memiliki sedikit kecemasan dalam situasi tertentu yang dianggap berbahaya (Batumluand and Erden, 2007). Sedangkan menurut Steffen J. Hoover (2017) kecemasan karena itu juga diakui sebagai konstruk multidimensi yang terdiri dari komponen kognitif dan somatik dan juga dapat dilihat sebagai karakteristik kepribadian yang agak stabil (*trait anxiety*) atau sebagai respon terhadap situasi tertentu (*state anxiety*). Menurut Krista M. Hixson (2017) *state anxiety* merujuk kepada bagaimana seseorang merasa disaat berbagai situasi. Sedangkan *trait anxiety* menggambarkan karakteristik kepribadian yang berfokus pada berbagai ancaman dirasakan.

James Tangkudung dan Apta Mylsidayu (2017), Berdasarkan jenis-jenisnya, kecemasan dibagi menjadi dua macam yaitu *state anxiety* dan *trait anxiety*. *State anxiety* adalah keadaan emosional yang terjadi mendadak/pada waktu

tertentu yang ditandai dengan kecemasan, takut, tegang, dan biasanya kecemasan ini terjadi saat menjelang pertandingan, kecemasan lainnya yang terjadi pada atlet biasanya takut gagal dalam pertandingan, takut akan akibat sosial atas kualitas prestasinya, takut cedera atau hal lain menimpa dirinya, takut terhadap agresi fisik baik oleh lawan maupun dirinya, dan takut bahwa kondisi fisiknya tidak akan mampu menyelesaikan tugasnya atau pertandingannya dengan baik. Beberapa alat evaluasi keadaan kecemasan adalah *Spielberger State Anxiety Inventory* (SSAI) yang diciptakan oleh *Spielberger* dan kawan-kawan pada tahun 1970. Format lain dari alat tes ini adalah *Competitive State Anxiety Inventory* (CSAI). Martens dalam Vuong Ngo (2017) “*State anxiety* berhubungan dengan ketakutan akut akan kegagalan dan pikiran negatif yang dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan diri dan konsentrasi.

*Trait anxiety* adalah rasa cemas yang merupakan sifat pribadi/bawaan (sifat pencemas). Menurut Singgih D. Gunarsa (2018:74) sifat kecemasan adalah suatu predisposisi untuk mempersepsikan situasi lingkungan yang mengancam dirinya. Seorang atlet pada dasarnya memiliki sifat kecemasan maka manifestasi kecemasannya akan selalu berlebihan dan mendominasi aspek psikisnya. Hal ini merupakan kendala yang serius bagi atlet tersebut untuk dapat bernampilan baik. Berikut tipe kepribadian pencemas antara lain: cemas, khawatir, tidak tenang, ragu dan bimbang, was-was/khawatir, kurang percaya diri, gugup/demam panggung, sering merasa tidak bersalah dan menyalahkan orang lain, tidak mudah mengalah atau ‘ngotot’, gerakan sering serba salah, tidak tenang dan gelisah, sering mengeluh, khawatir berlebihan terhadap penyakit, mudah tersinggung, suka membesar-besarkan masalah kecil (dramatisasi), sering bimbang dan ragu dalam mengambil keputusan, sering histeris saat emosi (Dadang Hawari, 2019).

### Sumber Kecemasan (Anxiety)

- 1) Sumber dari Dalam
  - a. Atlet terlalu terpaku pada kemampuan teknisnya. Akibatnya didominasi oleh pikiran-pikiran yang terlalu membebani, seperti komitmen yang berlebihan bahwa harus bermain sangat baik.
  - b. Muncul pikiran-pikiran negatif, seperti ketakutan akan dicemooh oleh penonton jika tidak memperlihatkan penampilan yang baik.
  - c. Alam pikiran atlet akan sangat dipengaruhi oleh kepuasan yang secara subjektif dirasakan di dalam dirinya. Pada atlet akan muncul perasaan khawatir akan tidak mampu memenuhi keinginan pihak luar sehingga menimbulkan ketegangan baru (James Tangkudung & Apta Mylsidayu: 2017).
- 2) Sumber dari Luar
  - a. Munculnya berbagai rangsangan yang membingungkan, rangsangan tersebut dapat berupa tuntutan/harapan dari luar yang menimbulkan keraguan pada atlet untuk mengikuti hal tersebut atau sulit dipenuhi. Keadaan ini menyebabkan atlet mengalami kebingungan untuk menentukan penampilannya, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Secara mandiri, terlalu mengkritik atau mengejek kegagalan anak-anak, dan mengabaikan upaya anak-anak dalam proses pemecahan masalah, akan merusak perkembangan keyakinan anak-anak dalam kemampuan mereka untuk menghadapi tantangan dan ancaman. berhasil dalam situasi masalah (ekspektasi kompetensi), yang pada gilirannya, akan mengarah ke tingkat kecemasan yang lebih tinggi. Contoh kasus: Psikologis mengendalikan perilaku pengasuhan, seperti mengecilkan atau membatasi tindakan anak-anak untuk memecahkan masalah secara mandiri, terlalu mengkritik atau mengejek kegagalan anak-anak, dan mengabaikan upaya anak-anak dalam proses pemecahan

masalah, akan merusak perkembangan keyakinan anak-anak dalam kemampuan mereka untuk menghadapi tantangan dan ancaman. berhasil dalam situasi masalah (ekspektasi kompetensi), yang pada gilirannya, akan mengarah ke tingkat kecemasan yang lebih tinggi (Xiaobo Xu: 2017).

- b. Pengaruh massa. Dalam kompetisi atau perlombaan apa pun, emosi massa sering berpengaruh besar terhadap penampilan atlet, terutama jika pertandingan tersebut sangat ketat dan menegangkan. Atlet sepakbola yang bertanding di lapangan biasa tingkat kecemasannya akan lebih kecil dibandingkan dengan atlet yang bertanding di stadion Gelora Bung Karno dengan jumlah penonton yang ribuan.
- c. Saingan-saingan lain yang bukan lawan tandingnya. Seorang atlet menjadi sedemikian tegang ketika menghadapi kenyataan bahwa mengalami kesulitan untuk bermain sehingga menjadi terdesak. Misalnya, dalam suatu tim Sepak Bola, Evan adalah pemain andalan dalam tim dan top score, ketika David mendapatkan bola dan berkesempatan untuk mencetak goal/point, kecemasannya akan muncul karena takut tidak menghasilkan poin. Sehingga bola tersebut diberikan kepada Evan.
- d. Pelatih yang memperlihatkan sikap tidak mau memahami bahwa telah berupaya sebaik-baiknya, pelatih sering menyalahkan atau mencemooh atletnya yang sebenarnya dapat mengguncang kepribadian atlet tersebut.
- e. Hal-hal non teknis seperti kondisi lapangan, cuaca yang tidak bersahabat, angin yang bertiup terlalu kencang, atau peralatan yang dirasakan tidak memadai (James Tangkudung & Apta Mylsidayu: 2017).

### Hubungan Kecemasan (Anxiety) dengan Olahraga

Dampak dari ketegangan terhadap penampilan keterampilan gerak pada atlet antara lain menimbulkan kecemasan, emosi, ketegangan pada otot, kelentukan, dan koordinasi. Selain kapasitas fisik, kebanyakan atlet hebat/bagus terungkap bahwa dimensi psikologis tidak bisa diabaikan untuk meningkatkan prestasi, ketika diperhitungkan bahwa psikologi memiliki banyak kompetensi seperti motivasi, fokus, penetapan tujuan, dan manajemen kecemasan. Kepercayaan diri/*confidence* sangat berhubungan dengan konsistensi emosi positif, seperti kegembiraan dan kebahagiaan, sedangkan kepercayaan diri yang rendah berhubungan dengan emosi negatif seperti kecemasan, keraguan dan depresi. Orang yang mengalami kecemasan tingkat tinggi tanpa dibarengi rasa percaya diri mungkin akan mengalami penurunan performa (Komaruddin: 2017). Salah satu faktor yang bisa mempengaruhi *peak performance* atlet adalah yang berhubungan dengan keadaan atlet, yaitu kecemasan (*anxiety*) bertanding; takut cedera, takut sah, takut kalah, dsb (Harsono: 2017).

Hubungan antara kecemasan dengan olahraga yang sering terjadi yaitu kecemasan yang dialami oleh atlet saat bertanding, hal ini tentunya sisi negatif yang dapat mempengaruhi penampilan dan merugikan seorang atlet. Dampak kecemasan terhadap penampilan atlet secara bertingkat yang berakibat negatif seperti gambar berikut:



**Gambar 1. Dampak Kecemasan yang Merugikan Atlet Gejala Kecemasan (*Anxiety*)**

Efek kecemasan pada kinerja atlet telah menjadi target utama studi dalam psikologi olahraga baru-baru ini. Setiap gangguan kecemasan memiliki gejala yang berbeda, tetapi mereka mengelompokkan ketakutan dan ketakutan yang tidak masuk akal dan berlebihan (Tomás Zambrano: 2016). Individu dengan gangguan kecemasan mengalami gangguan kualitas hidup dan fungsi pendidikan dan pekerjaan, serta peningkatan resiko komoditas medis. Secara umum atlet yang mengalami kecemasan ditandai dengan gejala-gejala yang biasanya diikuti dengan timbulnya ketegangan atau stres pada diri atlet. Indikator yang bisa dijadikan bahwa atlet mengalami kecemasan bisa dilihat dari perubahan secara fisik maupun secara psikis.

Gejala-gejala kecemasan secara fisik, antara lain;

1. Adanya perubahan yang dramatis tingkah laku, gelisah atau tidak tenang dan sulit tidur.
2. Terjadinya peregangan otot-otot leher, pundak, perut terlebih lagi pada otot-otot ekstremitas.
3. Terjadi perubahan irama pernafasan.
4. Terjadi kontraksi otot pada dagu, sekitar mata dan rahang (Komaruddin: 2017).

Sedangkan gejala-gejala secara psikis, antara lain;

1. Gangguan pada perhatian dan konsentrasi,

2. Perubahan emosi,
3. Menurunnya rasa percaya diri,
4. Timbul obsesi,
5. Tidak ada motivasi (Komaruddin: 2017).

Dalam perubahan fisik yang terjadi akibat *anxiety*, antara lain; kepala pusing, keinginan seks menurun, cepat marah, meningkatnya ketegangan otot, keluar keringat berlebihan, sakit dada, pernafasan cepat, jantung berdebar, tekanan darah meningkat, sering buar air besar (mencret) (Komaruddin: 2017). Kecemasan somatik mengacu pada penangkapan arousal fisiologis secara individu yang memiliki karakteristik negatif, seperti peningkatan denyut nadi, sakit perut, berkeringat, dll (Evangelos Bebetos: 2012).

Ada perbedakan gejala-gejala kecemasan menjadi 2 (dua), yaitu; *cognitive anxiety* dan *somatic anxiety*. Antara lain, yaitu ciri-cirinya adalah;

- a) Gejala *cognitive anxiety*, adalah; Individu cenderung terus menerus merasa khawatir akan keadaan yang buruk yang akan menimpa dirinya/orang lain yang dikenalnya dengan baik. Biasanya cenderung tidak sabar, mudah tersinggung, sering mengeluh, sulit berkonsentrasi, dan mudah terganggu tidurnya atau mengalami kesulitan tidur.
- b) Gejala *somatic anxiety*, adalah; Sering berkeringat berlebihan walaupun udara tidak panas dan bukan setelah berolahraga, jantung berdegup cepat, tangan dan kaki terasa dingin, mengalami gangguan pencernaan, mulut dan tenggorokan terasa kering, tampak pucat, sering buang air kecil melebihi batas kewajaran, gemetar, berpeluh dingin, mulut menjadi kering, membesarnya pupil mata, sesak nafas, percepatan nadi dan detak jantung, mual, muntah, murus atau diare, mengeluh sakit pada persendian, otot kaku, merasa cepat lelah, tidak mampu rileks, sering terkejut, dan kadang disertai gerakan wajah/anggota

tubuh dengan intensitas dan frekuensi berlebihan, misalnya pada saat duduk menggoyangkan kaki atau meregangkan leher secara terus menerus (James tangkudung dan apta Mylsidayu: 2017).

Berdasarkan fenomena tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Sport Hypnosis: Ego State dalam Mereduksi Anxiety Atlet Tae Kwon Do”**, maka peneliti berkeinginan untuk melakukan studi analisa tingkat kecemasan/*anxiety* yang dimiliki oleh masing-masing atlet PPOPD (Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar Daerah) Kota Salatiga. Harapan dari peneliti adalah, mampu membantu individu dalam penyelesaian masalah yang dihadapinya, sehingga atlet mampu meraih prestasi secara optimal sesuai dengan tumbuh kembangnya. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui (1) bentuk *Sport Hypnosis: Ego State* dalam Mereduksi Anxiety Atlet Tae Kwon Do, (2) faktor penghambat dan pendukung proses *Sport Hypnosis: Ego State* dalam Mereduksi Anxiety Atlet Tae Kwon Do, (3) hasil akhir dari *Sport Hypnosis: Ego State* dalam Mereduksi Anxiety Atlet Tae Kwon Do.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya (Moleong: 2014). Penelitian deskriptif ini mempunyai maksud untuk mengetahui dan menemukan informasi serta memberikan gambaran tentang aspek psikologis kecemasan terhadap prestasi. Penelitian deskriptif ini hanya menggambarkan apa adanya tentang analisis *ego state* dalam mereduksi *anxiety*/kecemasan atlet PPOPD Tae Kwon Do Kota Salatiga terhadap prestasi.

Peneliti menggunakan jenis penelitian studi kasus karena dalam penelitian ini obyek

yang diteliti adalah suatu kasus yang melibatkan atlet PPOPD Tae Kwon Do Kota Salatiga yang membutuhkan penelitian secara mendalam, intensif dan menyeluruh.

Subjek dalam penelitian ini adalah atlet PPOPD Tae Kwon Do Kota Salatiga. Sampel diambil secara acak sebanyak 15 atlet. Adapun lokasi penelitian ini di ambil dari tempat latihan subjek penelitian yakni di GOR Pelajar Hati Beriman Salatiga dan Sasana KONI Kota Salatiga.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Konseli dalam penelitian ini adalah atlet PPOPD Tae Kwon Do Kota Salatiga. Konselor yang menggunakan terapi *ego state* membantu untuk menyembuhkan masalah trauma yang dihadapi oleh konseli. Ketika masalah trauma terselesaikan, gejala-gejala trauma seperti kecemasan, takut yang berlebihan mulai menghilang karena sudah tidak lagi dalam pengendalian *ego state* yang negatif (Barabasz *et all*, 2011). Teknik *ego state therapy* yang secara efektif dapat membantu menangani trauma adalah dengan menggunakan kondisi hipnosis (Emmerson, 2013).

Melalui kondisi hipnosis, terapis dapat secara cepat menemukan akar masalah dan *ego state* yang terluka serta melakukan proses ekspresi dan pelepasan emosi. Berikut beberapa tahapan *sport hipnosis* dan *ego state therapy* dalam mereduksi *anxiety* atlet taekwondo PPOPD Kota Salatiga;

1. Tahapan pertama dilakukan oleh terapis dengan mengakses *ego state* (*Accessing Ego State*) dengan menggunakan teknik *Resistance Deepening*.

Pada tahap ini, terapis membimbing atlet memasuki kondisi hipnosis dengan teknik *resistance deepening* yang tanpa disadari atlet telah berada dalam konsisi hipnosis. Teknik *resistance deepening* menekankan pada unsur perasaan pada saat melakukan pengambilan kondisi hipnosis. Langkah awal dilakukan oleh terapis dengan meminta atlet untuk membayangkan situasi yang membuat dia

trauma dan menanyakan perasaan yang muncul ketika berada dalam situasi tersebut. Tahapan ini bertujuan untuk mengakses *ego state* yang terluka atau kondisi yang membuat atlet trauma. Pengalaman traumatis biasanya membuat atlet mengalami ketakutan yang sangat kuat ketika menghadapi situasi yang menjadi pemicu trauma dan saat itulah *ego state* yang terluka muncul (*executive*). Selanjutnya, terapis melakukan cek skala kedalaman dari 1 sampai 10. Angka 10 menandai bahwa emosi sangat terasa dan 1 jika emosi tersebut tidak terasa. Tanyakanlah pada atlet “Ada di angka berapa emosi yang saat ini anda rasakan?”, bila angkanya rendah misalkan 6, konselor meminta atlet untuk melipatgandakan perasaan itu sampai sembilan atau sepuluh.

2. Tahap kedua melakukan regresi dengan menggunakan teknik *Resistance Bridging*.

Pada tahap ini, atlet dibawa ke dalam memori peristiwa pertama kali munculnya *ego state* yang terluka. Emmerson (2016) menjelaskan bahwa teknik *resistance bridge* adalah sebuah teknik hipnosis yang membawa atlet untuk berpindah secara langsung setelah selesai melakukan teknik *resistance deepening*. Penggunaan teknik ini diintegrasikan secara langsung setelah melakukan teknik *resistance deepening*. Pada saat melakukan teknik *resistance bridging*, terapis menanyakan beberapa pertanyaan sebagai berikut : (1) Apa yang anda rasakan saat peristiwa itu terjadi?, (2) bisa anda ceritakan apa saja peristiwa yang terjadi disana?

3. Tahap selanjutnya adalah melakukan proses ekspresi terhadap *ego state* yang negatif.

Dalam tahapan ini, atlet harus mengekspresikan dan mengungkapkan permasalahan yang terpendam. Hal ini bertujuan untuk melepaskan semua emosi yang terpendam dan seringkali menjadi masalah yang memicu kembali terjadinya kecemasan /*anxiety*.

4. Tahap keempat adalah tahapan removal atau pelepasan rasa kesal.

Pada tahap removal, atlet diminta untuk meluapkan rasa kesal ( meluapkan *ego state* negatif dalam dirinya) . Setelah melakukan pelepasan rasa kesal, atlet akan merasakan lega dan hal ini dapat mengurangi kecemasan/*anxiety*.

5. Tahap selanjutnya adalah proses relief atau penenangan

Pada tahap ini terapis memunculkan pikiran positif atlet , bahwa atlet harus senantiasa memaafkan dan mengikhlaskan segala bentuk *ego state* negatif dalam dirinya sehingga mengurangi kecemasan dalam diri .

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa *Sport Hypnosis* dengan *Ego State therapy*, mampu mengurangi tingkat kecemasan/*anxiety* pada atlet taekwon do PPOPD Kota Salatiga. Hal ini terlihat bahwa dengan berkurangnya tingkat kecemasan pada diri atlet mampu meningkatkan performa atlet yang ditandai dengan peningkatan prestasi atlet taekwondo PPOPD Kota Salatiga dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- [2] Barabasz, Arreed, Marianne Barabasz & Jhon G. Watkins. 2011. *Single Session Manualized Ego State Therapy For Combat Stress Injury, Post Traumatic Stress Disorder, Acuted Stress Disorder, Part 1 : The Theory. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis*, 59, 379-391.
- [3] Dadang Hawari. 2019. *Manajemen Stres, Cemas, dan Depresi*. Jakarta: FKUI.
- [4] Donald R. Ligett. 2016. *Sport Hypnosis*. English: Humant Kinetics; 4 st Edition.
- [5] Emmerson, Gordon. 2016. *Ego state Therapy*. Carmethen, United Kingdom : Crown House.

- [6] Guilherme Pineschi dan Andr'ea Di Pietro, "Anxiety Management Through Psychophysiological Techniques: Relaxation And Psyching-Up In Sport". *Journal Of Sport Psychology In Action*, 4:181–190, 2013.
- [7] Kalkan T. "Situational Anxiety and Sportive Variables as Predictors of Sportspersonship Orientations in Handball Players". *Journal Sport & Society*. 2017.
- [8] Komaruddin. 2017. *Psikologi Olahraga Latihan Keterampilan Mental dalam Olahraga Kompetitif*. Cetakan Kelima. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- [9] Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- [10] Özen G."The Effect Of Recreational Activities On Trait And State Anxiety Levels". *Journal Science, Movement And Health*, Vol. 18, Issue 1, 2018.
- [11] Selman Çutuk. "The Investigation of The Relationship Between Psychological Resilience Levels and Anxiety Levels of Judo Athletes". *Journal Of Physical Education & Sports Science*. Vol (11), 1, 2017.
- [12] Sugiyono. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta.
- [13] Tangkudung, James dan Apta Mylsidayu. 2017. *Mental Training AspekAspek Psikologi dalam Olahraga*. Bekasi: Cakrawala Cendikia.
- [14] Vuong Ngo . "A Multidisciplinary Investigation of the Effects of Competitive State Anxiety on Serve Kinematics in Table Tennis". *Journal of Human Kinetics*. Vol 55, 83-95, 2017.
- [15] Weinberg, Robert S. 2016. *Foundations of Sport and Exercise Psychology*. USA: Human Kinetics.
- [16] Xiaobo Xu. "Adolescents' Perceived Parental Psychological Control and Test Anxiety: Mediating Role of Academic Self-Efficacy". *International Journal of Social Behavior and Personality*. Vol 45(9), 1573–1584, 2017.



**ANALISIS EFEKTIVITAS APLIKASI CASH MANAGEMENT SYSTEM (CMS)  
KCPSY BANK SUMUT SYARIAH MULTATULI  
(Studi Bank Sumut Syariah Multatuli )**

Oleh

**Rahmawati Zein**

**Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara**

**E-mail: [rahmawatizein1506@gmail.com](mailto:rahmawatizein1506@gmail.com)**

**Abstract**

Laporan akhir studi magang di PT BankSumut Capem Syariah Multatuli Medan, ProgramStudi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Praktik magang ini dilaksanakan di Bank Muamalat KCU Padang Sidempuan yang beralamatkan di Jl.Multatuli No.38,Hamdan, Kec. Medan Maimun, Kota Medan. Sumatera Utara 20151. Kegiatan magang ini dilaksanakan pada tanggal 01 Febuari- 01 Maret 2022 Tujuan dari penulisan laporan magang ini untuk mengetahui mengenai pengaplikasian teori yang selama ini dipelajari dibangku perkuliahan dalam praktik magang di Bank Muamalat KCU Padang Sidempuan. Selain itu pelaksanaan magang ini merupakan upaya dalam meningkatkan pengetahuan mahasiswa. Cash Management System (CMS) merupakan salah satu jenis system perbankan yang dirancang buat para nasabah korporasi (non eksklusif) agar bisa melakukan pengelolaan keuangan mandiri secara online (non tunai). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi CMS pada belanja wilayah kabupaten Sleman. Objek pada penelitian dilakukan di dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten Sleman dengan tujuan buat melakukan analisis terhadap penerapan atau implementasi berasal proses transaksi menggunakan memakai Cash Management System (CMS) dalam belanja daerah. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif menggunakan jenis case study. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. yang akan terjadi dari penelitian ini ditemukan bahwa implementasi cash management system (CMS) pada dinas perindustrian serta perdagangankabupaten Sleman telah sesuai menggunakan ketentuan berasal peraturan kementerian dalam negeri.

**Keywords: ANALISIS EFEKTIVITAS APLIKASI CASH MANAGEMENT SYSTEM (CMS) KCPSY BANK SUMUT SYARIAH MULTATULI (Studi Bank Sumut Syariah Multatuli )**

**PENDAHULUAN**

pada era globalisasi yg berkembang pesat, kebutuhan terhadap isu dan komunikasi meningkat kebutuhan tadi tidak hanya diperlukan sang warga namun kebutuhan informasi serta komunikasi ini pula diperlukan sang perusahaan, forum dan instansi pemerintahan baik instansi pemerintahan pusat juga wilayah. Teknologi gosip dan komunikasi artinya sebuah kawasan yg mempunyai hubungan dengan sebuah proses yg memiliki korelasi erat menggunakan cara menggunakan

indera bantu yang berguna buat melakukan prosedur transfer data asal satu perangkat ke perangkat lainnya Bagi mereka yg mempunyai kebutuhan terhadap teknologi info agar memudahkan kinerja bagi setiap perusahaan juga instansi pemerintahan.

supaya perusahaan maupun instansi pemerintahan tadi bisa bekerjasama, memecahkan problem dan memenuhi kebutuhan satu menggunakan lainnya, mereka harus mampu mengembangkan isu. Jadi, dengan demikian banyak perusahaan juga

instansi pemerintahan memakai teknologi berita buat dimanfaatkan pada hal mengembangkan isu. dalam global perbankan, teknologi informasi dan komunikasi sudah membawa akibat positif bagi perbankan serta nasabahnya sendiri. Selain buat menabung dan menyampaikan pinjaman, bank juga dijadikan menjadi tempat sarana untuk melakukan tagihan-tagihan seperti tagihan air, listrik, telepon serta sebagainya yg dapat dilakukan melalui layanan perbankan. Pelayanan yang mudah dan cepat pada bertransaksi sangat diharapkan oleh seluruh nasabah. dengan hadirnya teknologi isu dan komunikasi telah mendorong serta menghipnotis layanan perbankan yang diharapkan dalam hal memenuhi kebutuhan nasabah terhadap kemudahan dan kecepatan pelayanan. Manajemen sistem berita serta penerapan teknologi yang canggih dan memadai sangat diharapkan supaya mampu memberikan kualitas pelayanan yang sesuai dengan hasrat nasabah serta supaya bisa permanen bersaing dengan banklainnya.

Bank artinya badan usaha yg kekayaannya terutama pada bentuk aset keuangan (financial assets) serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya meraup sejumlah laba.

Adapun menurut Dictionary of Banking and Financial Service by Rosenberg, bank ialah suatu forum yang mendapatkan simpanan giro, deposito dan membayar atas dasar dokumen yang ditarik atau lembaga eksklusif Bank berfungsi menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan pulang pada rakyat buat tujuan eksklusif. Selain mempunyai fungsi tersebut, bank jugamempunyai fungsi menjadi pembawa kepercayaan . Bank dinilai sebagai suatu forum yg mengandalkan kepercayaan nasabah menjadi kunci dasar utama aktivitas pada perbankan. kepercayaan tadi mencakup segala kegiatan operasional yang menyangkut kepentingan rakyat menjadi nasabahnya.

Setiap masyarakat yang telah menitipkan dana di bank tersebut sudah

memiliki kepercayaan terhadap lembaga keuangan tadi. pada hal ini, kepercayaan tersebut berupa keyakinan masyarakat yang menitipkan dana pada bank yang dapat diambil uang tadi di ketika-saat tanpa adanya persoalan. Tanpa adanya ketakutan pihak bank tersebut akan mengalami kebangkrutan serta lain sebagainya. sebagai akibatnya nasabah bisa menarik dana kapanpun dan dimanapun. buat mengatasi persoalan tersebut, maka pihak bank menyediakan sebuah perangkat lunak yang memudahkan nasabah buat melakukan transaksi sinkron dengan keinginan nasabah butuhkan. aplikasi yang disediakan tadi bagi nasabah agar sewaktuwaktu nasabah bisa menggunakannya. Sistem aplikasi perbankan adalah penggunaan komputer, handpone, serta alat-alat pendukungnya pada operasional perbankan yang akan mencakup pencatatan, penghitungan, peringkasan, penggolongan, dan pelaporan seluruh kegiatan pada bidang perbankan. pada inovasi perbankan berbasis teknologi info memberikan dampak efisiensi dan efektivitas yg sangat luar biasa bagi kebutuhan publik. menjadi model, adanya produkproduk electronic banking seperti ATM, Kartu Kredit, Kartu Debit, Internet Banking, SMS/mobile banking, phone banking, dan lain sebagainya. Hal ini sudah mendorong pelayanan perbankan menjadi relatif tidak mempunyai batasan, baik asal sisi waktu juga dari sisi jangkauan daerah. Menyadari kebutuhan nasabah yang semakin beragam, bank pula menyediakan produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan nasabah perusahaan keliru satunya artinya cash management.

Cash Management merupakan salah satu faktor yg sangat menentukan dalam hal keberhasilan keuangan perusahaan, yaitu dengan cara mengoptimisasikan pengelolaan dana dan memaksimalkan yang akan terjadi investasi dari dana yg dimiliki perusahaan. Cash Management adalah salah satu faktor yang sangat memilih pada hal keberhasilan keuangan perusahaan, yaitu dengan cara

mengoptimalkan pengelolaan dana dan memaksimalkan yang akan terjadi investasi berasal dana yang dimiliki perusahaan. dengan hadirnya Cash Management, adalah salah satu solusi layanan perbankan berbasis internet yg memungkinkan nasabah perusahaan melakukan monitoring transaksi keuangan melalui fasilitas internet online setiap waktu. Layanan Cash Management System (CMS) artinya komputer online yang ditujukan bagi perusahaan buat memenuhi transaksi perbankan. Layanan perbankan online ini memungkinkan nasabah buat melakukan transaksi harian dan mengatur keuangan menggunakan mudah, cepat dan akurat.

Layanan ini dilengkapi menggunakan banyak sekali fitur unggulan yang bisa mendukung pengelolaan perjuangan CMS merupakan salah satu jenis layanan pengelolaan keuangan yang diperuntukkan nasabah nonperorangan (perusahaan/lembaga) dimana segala pembayaran nantinya bisa pribadi dibayarkan secara nontunai melalui aplikasi ini menggunakan memakai handphone atau laptop yang terhubung internet dan proses pembayaran mampu pribadi berjalan. berbagai manfaat yg mampu diperoleh menggunakan memanfaatkan CMS yaitu sebuah layanan perbankan online buat memungkinkan nasabah melakukan transaksi harian dan mengatur keuangan menggunakan mudah, cepat dan akurat, kapanpun dan di manapun tanpa terikat sang ruang serta ketika. Kemudahan pada melakukan transaksi keuangan dan mengelola kas menjadi kebutuhan utama bagi setiap perusahaan.

Hal tadi memilih efisiensi saat serta biaya pada pengelolaan usaha serta kejelasan arus kas. Keputusan usaha bisa diambil menggunakan cepat serta seksama sebagai akibatnya peningkatan daya saing usaha dan laba di era yang semakin bergerak maju seperti ketika ini lebih terjamin. Kehadiran PT. Bank Sumut Syariah Multatuli (yang telah mengkonversikan diri berasal konvensional ke syariah di lepas 04 November 2004) ialah satu-

satunya bank Sumut Syariah yg bermanfaat buat mempertinggi perekonomian rakyat Pemprov, serta Pemerintah Daerah juga memerlukan sebuah forum keuangan yg berbentuk Bank, yang mempunyai kiprah spesifik buat membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah khususnya seluruh sumatra utara. Maka pada hal ini, Bank Sumut Syariah Multatuli merasa berkewajiban pada menyukseskan Gerakan Non Tunai sinkron menggunakan sinkron menggunakan biar prinsip BI No. 62 DPIPPrzMdn tanggal 17 April dan izin pembukaan cabang syariah Medan dan Padang Sidempuan No. 6142PrzMdn tanggal 18 Oktober 2005 dan diikuti dengan dibukanya cabang syariah Tebing Tinggi pada tanggal 26 Desember 2005 sesuai dengan izin Operasional Bank Indonesia Medan kepada Direksi PT. Bank Sumut No. 7177DPIPPrzMdn tanggal 15 Desember 2005 perihal rencana pembukaan cabang syariah, kantor cabang pembantu dan kantor kas Bank Sumut.

Untuk mendukung Transaksi Non Tunai, aplikasi CMS boleh dimiliki instansi khususnya instansi Pemerintah Sumut. Penggunaan aplikasi ini yaitu melalui handphone, laptop/komputer yang terhubung dengan jaringan internet yang disediakan untuk nasabah perusahaan atau instansi pemerintah. Pada tanggal 2 Oktober 2018 Bank Sumut Syariah Multatuli meluncurkan sebuah layanan aplikasi yg diberinama CMS kepada semua ketua Satuan Kerja Pemerintah seluruh Sumut serta ketua Badan Pengelolaan Keuangan kabupaten/kota seluruh Sumut dengan peluncuran perangkat lunak ini, diharapkan seluruh serta Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten/Kota Pemprov supaya memanfaatkan aplikasi digital ini buat segala jenis pembayaran nontunai serta tidak ada lagi yg membayar tunai. Melalui aplikasi digital CMS ini, segala bentuk pembayaran mampu langsung dibayarkan non-tunai seutuhnya. tidak perlu lagi melalui proses manual mirip saat ini yang dilakukan Bila terdapat yang

berbeda kawasan tidak terdapat yang teken. dengan hadirnya perangkat lunak ini, bisa bekerja atau merespon dimana saja hanya menggunakan memakai smartphone atau laptop yang terhubung dengan internet. Proses pembayaran mampu eksklusif berjalan. contohnya tugas yg terkait 8 pertama kali masuk ke pada aplikasi CMS, Bila yang akan terjadi- hasil yang telah dilakukan buat hal tersebut dilakukan, kedua pembayaran uang yang masuk ke rekening penerima, yang sudah ditindaklanjuti pejabat Bila semua sudah terpenuhi (Bank Sumut Syariah 2004).

sementara baru diluncurkan, aplikasi CMS ini bukan hal yang baru, banyak yang sudah menggunakan pada 208 forum seluruh Sumut. Pemerintah Sumut sudah menjalin kerjasama menggunakan Bank Sumut Syariah. Jadi seluruh pemda serta kabupaten kota pada Sumut mempunyai CMS KASDA dengan pihak Bank Sumut Syariah. Jadi, seluruh instansi Dinas serta perangkat kerja daerah mampu mengajukan permohonan CMS ke pihak Bank Sumut Syariah. Pasalnya, melalui software ini semua pejabat terkait proses pembayaran itu bisa bekerja atau merespon dimana saja hanya dengan memakai smartphone laptop yg tersambung internet. Proses pembayaran yang dibutuhkan tetap bisa berjalan. misalnya pejabat terkait pertama tinggal menekan enter pada perangkat lunak CMS. Bila hasil berkas diperiksanya telah lengkap buat selanjutnya ditindaklanjuti pejabat kedua sampai akhirnya uang pembayaran itu masuk ke rekening penerima, jikalau telah ditindaklanjuti pejabat ketiga Jika seluruh kondisi sudah terpenuhi (Bank Sumut Syariah). Sebelumnya pemkot seluruh Pemprov Sumut melalui Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) bekerja sama dengan pihak Bank Sumut syariah meluncurkan software Mobile informasi anggaran Bank Sumut Syariah Multatuli perangkat lunak ini dibuat buat menyampaikan berita aturan di Pemerintahan Kota Pemprov Sumut nantinya dapat diakses oleh public melalui smartphone yang

terhubung internet. perangkat lunak CMS ini bermanfaat buat mendukung serta mempertinggi pelayanan perbankan khususnya dalam hal pengelolaan keuangan daerah yg berdiskusi serta berbasis non tunai. tidak terdapat lagi melalui Proses manual seperti selama ini yang bisa tertunda Jika pejabat terkait sedang ada tugas

diluar daerah karena tidak terdapat yg menandatangani. namun waktu ini penulis menemukan suatu keunikan, Jika dulunya segala bentuk pembayaran dilakukan secara manual maka menggunakan hadirnya CMS segala bentuk pembayaran yg ingin dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Sumut Syariah bisa dengan praktis dilakukan melalui digital. Selain itu juga, penerapan CMS ini dilakukan sang pihak perusahaan serta perbankan, saat ini CMS sudah dipergunakan pada pemerintahan. mirip yg diterapkan sang pemerintah Kota perovmsu serta Bank Sumut Syariah. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Efektivitas Aplikasi Cash Management System Bank Sumut Syariah Multatuli”

#### • Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif serta memakai pendekatan yang bersifat lapangan. supaya aktivitas penelitian bisa dilakukan secara baik serta benar buat mendapatkan yang akan terjadi yang tepat, maka peneliti memakai metode kualitatif menjadi instrumen fokus penelitian, serta pemilihan informasi yang tepat mengenai objek yang ingin dikaji menjadi sumber data. Jenis penelitian kualitatif dipilih sebab memandang bahwa realita/fenomena yg ingin dikaji peneliti dapat dijelaskan melalui makna yang berasal dari keterangan-informasi yang ditemukan di lapangan (Moleong, 2010).

Penelitian ini termasuk pada jenis kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu menganalisis data yang bersifat penerangan atau penguraian data informasi yang nantinya lalu akan dikaitkan dengan teori serta konsep-

konsep yang mendukung pembahasan yang relevan. dengan kata lain, penelitian ini bertujuan buat menerima ilustrasi atau realita yang terjadi sebenarnya dalam pemkot Pemprov Sumut selaku pengguna aplikasi CMS serta pengaruhnya aplikasi CMS terhadap pengguna perangkat lunak CMS pada Pemerintah Kota Pemprov Sumut apakah semakin membaik, atau justru memburuk.

#### • Lokasi Penelitian dan Objek Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan di Kantor Pusat PT. Bank Sumut Capem Syariah Multatuli Medan selaku yang mempunyai aplikasi CMS yang beralamat Jl. Multatuli Raya Blok. FF No. 38,

Hamdan Medan, Medan Provinsi Sumatera Utara, Indonesia dan penulis juga melakukan penelitian di kantor Pemerintah Kota Medan selaku pengguna aplikasi CMS yang beralamat Jl. Multatuli, Kelurahan: Medan, Kecamatan: Medan Maimun, Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan objek penelitian ini adalah karyawan divisi treasury pada Kantor Pusat bank Sumut syariah multatuli dan Badan Pengelolaan Keuangan Kota Medan selaku pengguna aplikasi CMS yaitu: Bendahara, Kasubbag Keuangan dan Sekretaris.

### PEMBAHASAN

#### 1. Efektivitas

- Pengertian Efektivitas
- Efektivitas dalam Perspektif

#### Manajemen Keuangan

Efektivitas merupakan suatu berukuran yg memberikan ilustrasi seberapa jauh target sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sang lembaga atau organisasi bisa tercapai. Hal ini sangat penting peranannya didalam sebuah lembaga atau organisasi yang bermanfaat buat melihat perkembangan dan kemajuan yang telah dicapai sang suatu lembaga atau organisasi itu sendiri (Sedarmayanti, 2006: 61). Efektivitas juga artinya unsur utama untuk mencapai tujuan atau target yang sudah dipengaruhi pada dalam setiap organisasi, aktivitas ataupun acara.

Dikatakan efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang sudah ditentukan (Emerson, 1996: 16).

Selanjutnya, Ravianto (2014: 11) mendefinisikan bahwa efektivitas artinya seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang membentuk keluaran sesuai dengan yang diperlukan. Maksudnya merupakan, apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam segi waktu, biaya juga mutunya maka bisa dikatakan efektif.

#### 2. Aplikasi Cash Management System

- Sebuah layanan perbankan yang memakai jaringan internet supaya sebuah perusahaan/instansi pemerintahan praktis pada melakukan proses pengumpulan dan pengelolaan uang tunai, buat dipergunakan sebagai investasi jangka pendek. Bendahara perusahaan/instansi pemerintahan dan atasan terkait acapkali sekali bertanggung jawab atas manajemen kas secara keseluruhan.

Maka berasal itu, sebuah perusahaan/instansi pemerintahan sangat membutuhkan aplikasi Cash Management System (Mengetahui Sistem Pengelolaan Keuangan Perusahaan (Cash Management System) Berbasis Perbankan, 2018a

- Pengertian Aplikasi

dari Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), aplikasi artinya suatu program personal komputer yg dirancang buat mengerjakan dan melaksanakan tugas spesifik asal user (pengguna). Sedangkan menurut Dhanta (2009: 32) aplikasi adalah perangkat lunak yg dirancang oleh suatu perusahaan personal komputer buat mengerjakan tugas-tugas eksklusif misalnya seperti Microsoft Word, Microsoft Excel.

- Hubungan Aplikasi dan Cash Management System

aplikasi artinya sebuah acara berbentuk aplikasi yang beroperasi pada suatu sistem eksklusif yang mempunyai tujuan buat membantu banyak sekali aktivitas yg dilakukan sang manusia. Sedangkan aplikasi CMS ialah

sebuah layanan perangkat lunak online yg diperuntukkan bagi perusahaan atau institusi untuk memenuhi segala kebutuhan perbankan (Bank Aceh, 2018d). perangkat lunak CMS sangat erat kaitannya menggunakan layanan yg diperuntukkan bagi perusahaan atau instansi yg terdapat pada perbankan. Pengaplikasian CMS yang terjadi secara real time yang menyampaikan warta tentang penggunaan aplikasi CMS terhadap penggunaanya mirip bendahara di suatu perusahaan atau instansi pemerintahan.

## **Tinjauan tentang Cash Management System**

### **1. Pengertian Cash Management System**

Cash Management System ialah sebuah layanan perbankan berbasis internet yg memungkinkan nasabah perusahaan atau instansi melakukan monitoring transaksi keuangan melalui fasilitas internet online setiap ketika. Hal ini buat memilih efisiensi saat dan biaya pada pengelolaan pemerintahan dan kejelasan transaksi arus kas. Keputusan bisa diambil dengan cepat, tepat dan akurat sehingga peningkatan daya saing pemerintahan pada era yang semakin dinamis mirip waktu ini lebih terjamin (Badan Keuangan serta Aset wilayah, 2018).

Hal ini juga sesuai dengan Surat Edaran Menteri pada Negeri (SE Mendagri) No. 910/1866/SI lepas 17 april 2017 perihal Implementasi transaksi non tunai di pemda provinsi serta Surat Edaran Mendagri No. 910/1867/SJ lepas 17 april 2017 perihal Implementasi transaksi non tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Provinsi serta pemda Kabupaten/Kota, 2017). dari definisi diatas maka bisa disimpulkan bahwa CMS ialah sebuah aplikasi layanan perbankan yang dijadikan sebagai 27 rekapan data dari segala transaksi yg terjadi baik berasal pihak internal juga eksternal.

### **2. Tujuan Cash Management System**

Pengelolaan CMS tak hanya buat menghindari kebangkrutan, namun pula buat mengurangi homogen-homogen piutang jangka panjang yg tersebar, meningkatkan dalam hal penagihan serta menaikkan transaksi non-tunai buat menaikkan posisi kas dan profitabilitas perusahaan (Mengenal Sistem Pengelolaan Keuangan Perusahaan (Cash Management System) Berbasis Perbankan, 2018b).

### **3. Peranan Perbankan Syariah**

Peranan perbankan syariah yang antara lain tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yg dikeluarkan oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution) dan dikutip oleh (Sudarsono, 2008:43), menjadi berikut:

1. Penyedia jasa keuangan serta lalu lintas pembayaran, bank syariah menyediakan jasa keuangan, jasa non-keuangan dan jasa keagenan. aktivitas ini di biasanya sama seperti bank konvensional sepanjang tidak bertentangan menggunakan prinsip syariah pelaksanaan aktivitas sosial, menjadi ciri yg merekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam jua memiliki kewajiban buat mengeluarkan serta mengelola zakat dan dana-dana sosial.

## **HASIL PENELITIAN**

### **A. Sejarah PT. Bank Sumut KCP Syariah**

Awal berdiri bank sumut merupakan Bank Pembangunan wilayah Sumatra Utara yang didirikan pada tanggal 04 November 1961 menggunakan sebutan BPSU. sesuai menggunakan ketentuan utama Bank Pembangunan wilayah tingkat I Sumatra Utara maka pada tahun 1962 bentuk usaha dirubah menjadi Badan usaha Milik daerah (BUMD) dengan modal dasar di waktu itu sebesar Rp. 100 Juta menggunakan sahamnya dimiliki oleh pemda taraf II se Sumatra Utara.

Perkembangan Bank Sumut di tahun 1999, bentuk hukum BPDSU dirubah sebagai perseroan terbatas menggunakan nama PT.

Bank Pembangunan wilayah Sumatra Utara atau disingkat PT. Bank Sumut yg berkedudukan dan berkantor pusat di Medan, Jl. Imam Bonjol No. 18 Medan. modal pada dasar di waktu itu menajdi Rp. 400 Miliar yang selanjutnya menggunakan pertimbangan kebutuhan proyeksi pertumbuhan bank, di tahun yg sama modal dasar pulang ditigkatkan menjadi Rp. 500 Miliar.

Bank Sumut masa kini laju pertumbuhan Bank Sumut kian menunjukkan perkembangan yg sangat signifitkan diliat dari kinerja serta prestasi yang diperoleh asal tahun ke tahun, tercatat total asset Bank Sumut mencapai 10,75 Triliyun di tahun 2009 dan menjadi 12,76 Triliyun di tahun 2010. Didukung semangat bank profesional dan andal menghadapi persaingan dengandigalakkannya acara to the best yang sejalan dengan road map BPRD Regional Champion 2014, tentunya menggunakan konsenkuensi harus memperkuat modal yang tidak lagi mengadakan pertanyaan saham dari Pemerintah Daerah, melainkan jua membuka akses permodalan lai seperti penerbitan obligasi, buat itu kapital dasar Bank Sumut kemabli ditingkatkan berasal Rp. 1 Triliyun di tahun 2008 menjadi Rp. 2 Triliyun di tahun 2011 denagn total asset .dampak krisis yg melanda Indonesia disegala bidang di tahun 1997 termasuk dibidang ekonomi yg menyebabkan poly perusahaan yg rol tika akhirnya berimbas pada banyaknya bank swasta serta bank pemerintah yang tutup serta melakukan merger buat menyelamatkan asset karena kerugian akibat kredit macet.oleh karena itu pemerintah menduga PT Bank Sumut mampu buat bangkit pulang serta mengingat pentingnya peranan PT Bank Sumut dalam menunjang pembangunan di wilayah Sumatera Utara, maka pemerintah hanya memasukkan PT Bank Sumut ke dalam bank yang direkapitalisasi.

Gagasan serta ihwal untuk mendirikan Unit/Divisi perjuangan Syariah sebenarnya sudah berkembang cukup lama dikalangan stakeholder PT Bank Sumut, khususnya direksi

serta komisaris, yaitu semenjak dikeluarnya UU No. 10 Tahun 1998.akibat krisis yang melanda Indonesia disegala bidang pada tahun 1997 termasuk dibidang ekonomi yg menyebabkan banyak perusahaan yang gulung tikar akhirnya berimbas banyaknya bank swasta serta bank pemerintah yg tutup dan melakukan merger untuk menyelamatkan asset karena kerugian dampak kredit macet.

sang karena itu pemerintah menduga PT Bank Sumut bisa buat bangkit balik serta mengingat pentingnya peranan PT Bank Sumut dalam menunjang pembangunan pada daerah sumatera utara, maka pemerintah hanya memasukan PT Bank Sumut kedalam bank yg direkapitalisasi.

PT Bank Sumut menyampaikan kesempatan bagi bank konvensional buat mendirikan Unit perjuangan Syariah juga berdasarkan pada kultur masyarakat Sumatera Utara yang religius, khususnya umat Islam yg semakin sadarakan pentingnya menjalankan ajarannya pada semua aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi.

Komitmen buat mendirikan Unit usaha Syariah semakin menguat seiring dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yg menyatakan bahwa bunga haram. Tentunya, fatwa ini mendorong impian warga muslim buat menerima layanan jasa-jasa perbankan sesuai prinsip- prinsip syariah.

dari akibat informasi lapangan yang dilakukan di 8 (delapan) kota di Sumatera Utara, menerangkan bahwa minat masyarakat terhadap pelayanan Bank Syariah cukup tinggi yaitu mencapai 70% buat taraf ketertarikan dan diatas 50% buat impian menerima pelayanan perbankan syariah. Atas dasar ini dan komitmen PT Bank Sumut terhadap pengembangan layanan Perbankan Syariah maka di lepas 04 November 2004 PT Bank Sumut membuka Unit usaha Syariah dengan dua (2) tempat kerja Cabang Syariah yaitu kantor Cabang Syariah Padang Sidimpuan sinkron izin asal BI NO.6/DPIP/PRZ/Mdn tanggal 18 Oktober 2004.

Bank Sumut Unit Syariah artinya salah satu bank yg beroperasi berdasarkan prinsip syariah sesuai menggunakan biar pembukaan tempat kerja Cabang Syariah Medan serta Padang Sidimpuan No.5/142/PRZ/Mdn lepas 28 Oktober 2005 diikuti dengan dibukanya Cabang Syariah Tebing Tinggi pada tanggal 26 Desember 2005 sesuai menggunakan ketentuan utama Bank Pembangunan wilayah tingkat I Sumatra Utara maka pada tahun 1962 sesuai menggunakan biar operasional Bank Indonesia sesuai menggunakan surat Bank Indonesia Medan pada Direksi PT Bank Sumut Syariah, tempat kerja Cabang Pembantu dan tempat kerja Kas Bank Sumut.

PT Bank Sumut Unit usaha Syariah sudah didukung oleh sistem operasional perbankan yang dianggap OLIB'S Syariah. Kas Bank Sumut. PT Bank Sumut Unit usaha Syariah telah didukung oleh sistem operasional perbankan yang disebut OLIB'S Syariah. pada menjalankan operasional perbankan sehari-hari PT Bank Sumut Unit Syariah memakai sistem operasional perbankan yang menguat pada prinsip Syariah.

pada sistem operasi Bank Sumut Unit usaha Syariah pemilik dana menanamkan uangnya di Bank tidak menggunakan motif menerima bunga, tapi dalam rangka menerima keuntungan bagi akibat. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan pada mereka yang membutuhkan pada bentuk modal usaha, menggunakan perjanjian keuntungan sudah disepakati PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah diresmikan pada tanggal 04 November 2004, dengan dibukanya 2 unit Kantor operasional yaitu :

- a. Kantor Cabang Syariah Medan
- b. Kantor Cabang Syariah P. Sidimpuan

Sejalannya waktu sampai dengan tahun 2018 ini Bank Sumut Unit Usaha Syariah telah memiliki 22 kantor Operasional yang terdiri dari 5 Kantor Cabang dan 17 Kantor Cabang Pembantu yang tersebar di Medan dan kota-kota besar lainnya di Sumatera Utara yaitu :

- a. Kantor Cabang Syariah Medan :
  - 1) Kantor Capem Syariah Karya
  - 2) Kantor Capem Syariah HM. Jhoni
  - 3) Kantor Capem Syariah Marelan Raya
  - 4) Kantor Capem Syariah H. M Yamin
  - 5) Kantor Capem Syariah Kota Baru
- b. Kantor Cabang Syariah Medan Ring Road
  - 1) Kantor Capem Syariah Multatuli
  - 2) Kantor Capem Syariah Binjai
  - 3) Kantor Capem Syariah Stabat
  - 4) Kantor Capem Syariah Hamparan Perak
  - 5) Kantor Capem Syariah Kayu Besar
- c. Kantor Cabang Syariah Padang Sidimpuan
  - 1) Kantor Capem Syariah Panyabungan
- d. Kantor Cabang Syariah Tebing Tinggi
  - 1) Kantor Capem Syariah Lubuk Pakam
  - 2) Kantor Capem Syariah Kisaran
  - 3) Kantor Capem Syariah Kampung Pon
- e. Kantor Cabang Syariah Sibolga
- f. Kantor Cabang Syariah Pematang Siantar
  - 1) Kantor Capem Syariah Perdagangan
  - 2) Kantor Capem Syariah Rantau Prapat.

## 2. Tujuan Cash Management System Bank Cash Management System PT. Bank Sumut Capem Syariah Multatuli Medan

berdasarkan Haizir Sulaiman selaku Direktur utama Bank Sumut Capem Syariah, menjelaskan bahwa:

1. Melalui aplikasi CMS ini, segala pembayaran pada Satuan Kerja Pemerintah pemprov serta Satuan kerja Pemerintah Kabupaten/kota (SKPK), baik untuk pihak internal juga eksternal akan lebih safety serta nyaman. Pasalnya, tidak terdapat lagi dilakukan manual seperti selama ini melalui bendahara yang mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) pada pihak bank. kemudian, pihak bank membayar sesuai SPPD, termasuk buat pajak. Melalui digital CMS ini, segala bentuk pembayaran bisa dibayarkan secara nontunai seutuhnya. tidak lagi melalui proses manual



mirip selama ini yang bisa tertunda Jika pejabat terkait sedang diluar wilayah karena tidak ada yg pertanda tangan. tiga. menggunakan perangkat lunak CMS ini pula semua pejabat, terkait proses pembayaran mampu bekerja atau merespon di mana saja hanya dengan memakai Smartphone atau laptop yang tersambung internet. Proses pembayaran mampu langsung berjalan pada tanggal 17 April 2017 Syariah resmi meluncurkan sebuah layanan aplikasi yg diberi nama CMS yg diperuntukkan pada semua Satuan Kerja Pemerintah Pemprov (SKPP) dan Satuan Kerja Pemerintah kabupaten/Kota Pemprov dengan menggunakan handphone atau laptop melalui jaringan internet. Adapun menurut Faizil selaku karyawan di Divisi Treasury sekaligus pemandu di penggunaan aplikasi CMS . pada instansi-instansi pemerintahan di Provinsi pemprov mengungkapkan Tujuan diluncurkan aplikasi CMS ini artinya menjadi berikut:

1. Bila dulunya nasabah hanya mampu melakukan transaksi perbankan dari Senin-Jumat di pukul 08.00-16.00, maka dari itu dengan hadirnya aplikasi CMS transaksi yang ingin dilakukan nasabah mampu 24 jam tidak terdapat batasan saat juga kawasan asalkan terdapat jaringan internet yang bagus untuk melancarkan proses transaksi perbankan yang ingin nasabah lakukan. Bila dulunya nasabah menyetorkan langsung uang ke bank secara tunai, maka dengan adanya aplikasi CMS nasabah tidak perlu lagi tiba ke bank buat melakukan transaksi serta keamanan pun lebih terjamin. Terhindar berasal perampokan dan lain sebagainya. asal sisi inflasi pula mampu menekan aliran uang, Jika inflasinya tinggi harga barang pula tidak ada nilainya. Maka asal itu dengan kurangnya uang tersebar maka harga dipasar bisa terkendali dengan hadirnya aplikasi CMS nilai-nilai inflasi bisa dijaga oleh pihak pemerintah.

2. asal sisi kesehatan jua nasabah tak jarang memegang uang, yg mana taraf peredarannya tinggi dalam sehari ke pasar buat

belanja serta perpindahan lembar rupiah asal satu tangan ketangan lain yang mana kuman-kuman melekat pada lembaran rupiah.

Maka berasal itu dengan adanya aplikasi CMS mampu menjaga kesehatan bagi nasabah. lima. berasal sisi aliran uang palsu juga bisa pada minimalisir dengan adanya software CMS.

6. menggunakan adanya aplikasi CMS, nasabah mampu menghemat ketika dalam melakukan pekerjaan tanpa harus datang ke bank buat melakukan transaksi perbankan.

7. dengan adanya aplikasi CMS, selain mampu melakukan transaksi keuangan nasabah pula bisa mengakses informasi keuangan, mengetahui jumlah saldo pada kas sehingga bisa mempercepat mengambil konklusi terhadap tindakan-tindakan terkait dengan program-program yang ingin dijalankan.

8. dengan adanya perangkat lunak CMS dapat mengurangi porto-porto operasional yg dikeluarkan mirip Bahan Bakar Minyak (BBM).

9. Jika dulunya pemerintah setiap tahun mengeluarkan porto buat pencetakan uang, maka asal itu dengan adanya aplikasi CMS pemerintah bisa berhemat biaya pencetakan uang berasal 3-3,5 triliun porto pencetakan uang yang dimuntahkan menjadi berkurang dalam hal ini lebih ditujukan buat membantu pihak negara.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

sesuai pembahasan berasebelumnya hasil penelitian yang penulis lakukan terkait efektivitas aplikasi Cash Management System (CMS) Bank Sumut Capem Syariah Multatuli Medandi pemkot Medan. Sebelum mengetahui seberapa efektif perangkat lunak CMS Badan Pengelolaan Kota Banda Aceh (BPKK) maka berasal itu kita lihat dulu alur kerja pada perangkat lunak CMS:

1. pada aplikasi Cash Management System (CMS)

ada 3 level yaitu Maker, Checker, serta Realeaser. Masing-masing berasal ketiga level ini memiliki tugasnya yaitu: Maker membuat masukan daftar transaksi pembayaran ataupun pembelian lalu sistem mengirimkan email pemberitahuan adanya .

transaksi yang dilakukan maker agar selanjutnya ditindaklanjuti ke atasan selaku checker. Checker selaku atasan maker mendapatkan email adanya transaksi yang dilakukan maker, lalu checker melihat yang akan terjadi masukan transaksi yg dilakukan maker berdasarkan email ataupun berkas dari maker. Setelah dilakukan pembuktian data sinkron data yg dimasukkan maker, data yang masuk melalui email serta disesuaikan menggunakan berkas telah sah kemudian pada approve, ketika dilakukan approve akan masuk kode password ke email selaku maker. kemudian selaku maker memasukkan kode password, selesainya itu dilakukan proses. Releaser melakukan pengecekan ulang data masukan yg dibuat oleh maker serta sudah disetujui oleh checker. Bila data sudah sah, maka selanjutnya releaser akan melakukan proses approve. kemudian akan masuk kode password ke email kepala kantor selaku releaser, selanjutnya releaser memasukkan kode password itu lalu akan pada proses. Maka uang akan masuk ke rekening penerima serta transaksi yg dilakukan berhasil melalui perangkat lunak Cash Management System.

dua. menjadi pengguna perangkat lunak Cash Management System (CMS), Badan Pengelolaan Keuangan Kota Medan mendapat kemudahan dari kemanfaatan perangkat lunak tadi. Adapun kemudahan yang diperoleh pada antaranya: Pertama, nasabah (Pemerintah Daerah) dapat mengakses dan dapat melakukan transaksi perbankan secara rahasia, kapan saja serta tanpa wajib mengantri pada bank dan efisien dari segi waktu serta biaya dan administrasi. ke 2, merasa nyaman menggunakan fitur yang dipergunakan serta lengkap misalnya seperti pembayaran gaji karyawan, pembayaran iuran listrik, air serta

sebagainya, pembayaran Belanja pribadi dan Belanja tidak pribadi. Ketiga, memantau buat pengendalian terhadap arus kas lebih mudah, cepat serta akurat dalam hal merogoh keputusan. Keempat, merasa safety sebab dukungan sistem web yg stabil dan dilengkapi dengan notifikasi login. Kelima, dapat dilakukan pembagian wewenang secara sedikit demi sedikit sehingga arus kas dapat pada kontrol oleh pemerintah.

dengan demikian, penulis bisa menyimpulkan bagi PT. Bank Sumut Capem Syariah Multatuli Medanselaku yang memiliki jasa layanan dan Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh sebagai pengguna jasa layanan aplikasi Cash Management System (CMS), maka pada hal ini, menggunakan memakai CMS semakin mempermudah kebutuhan transaksi bagi instansi pemerintahan pada industri perbankan, sehingga dapat mempertinggi efektivitas aplikasi Cash Management System Bank Sumut Syariah Multatuli terhadap Pemerintah Kota Medan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aplikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- [2] BIMTEK BI. (Bank Sumut Syariah 2017). *Cash Management System*. Sumatra utara Departemen Pendidikan Nasional. (2008). Pusat Bahasa Departemen
- [3] Harahap, Chairul Arief. (2018). *Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Bank Dengan Layanan Jasa Cash Management System*. Studi Kasus: PT. Jasa Artha 72 73 Cabang Medan. Skripsi. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- [4] Imam, Gunawan. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah

- Kabupaten/Kota (2017). Diakses pada 04 Desember 2018. Dari <http://keuda.kemendagri.go.id/asset/kcfinder/upload/file/OJK.pdf>. Indrawan Rully & Yaniawati Poppy. (2014). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan. Bandung: PT. Refika Aditama.
- [6] Juliansyah Akbar. (2017). Perhitungan Manfaat Tangible Penerapan Cash Management System. Studi Kasus: Bank Daerah Mataram. *Jurnal Akuntansi dan Auditing* Vol. 6.
- [7] Bandung: PT. Refika Aditama. Mengenal Sistem Pengelolaan Keuangan Perusahaan (Cash Management System) Berbasis Perbankan. (2018). Diakses pada 04 Desember 2018. Dari <http://www.kompasiana.com>. Moleong, L. J. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya. Mulyadi (2007). Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen. Jakarta: Salemba Empat.



**2. Menfotocopi Warna Dan Hitam Putih Fomulir Pembukuan Rekening Nasabah**



**3. Menggaris dan Tempel Kertas Nama Nasabah Ke Buku CS**

## LAMPIRAN



**1. Menulis Surat Masuk Dan Surat Keluar**



**4. Meyusun ulang dan Mencatat Nama-nama nasabah yang tidak ada**



**5. Menulis Kelengkapan Fomulir**

**Pembukuan Rekening Nasabah**



**6. Mengutip infaq di Masjid Agung Medan**



**Gambar: Ruang Tunggu Antrian**



**7. Melayanin nasabah membuka rekening Di Binjai**



**Gambar: Customer Service**



**Gambar : Parkir Bank Sumut  
Capem Syariah Multatuli**



**Gambar: Teller**



**Gambar: Ruang Back Officer Surat Izin Magang Dari Kampus**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate 20171  
Telp. (061) 6015663-6622923 Fax. 6015683

Nomor : B-10513/EB.LKS-02/12/2021 10 Desember 2021  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Magang Mahasiswa

Yth. Bapak/Ibu Kepala  
**Bank Sumut Syariah kcp. Multatuli**  
**Jl. Multatuli raya. Blok FF no 38.,kel**  
**Hamdan. Kec meda maimun. Kota medan**  
Di  
Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, sehubungan dengan Program Magang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan, dengan ini kami mohon Bapak/Ibu berkenan untuk memberikan Izin Pelaksanaan Magang kepada Mahasiswa sebagai berikut:

No	NAMA	NIM	Jurusan/Semester
01	Rahmawati Zein	0203181284	Perbankan Syariah/VIII (Delapan)
02	Bilka Suryani Tanjung	0503181043	Perbankan Syariah/VIII (Delapan)

Waktu Pelaksanaan: 1 Febuari-2022-1 Maret 2022

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Medan, 10 Desember 2021  
a.n. DEKAN  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Dt. Marliah M. As  
NID. 197601262003122001

**Surat Balasan Izin Magang**



HALAMAN INI SENGAJA  
DIKOSONGKAN

FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KENAIKAN BERAT BADAN IBU  
HAMIL KEKURANGAN ENERGI KRONIS DI PUSKESMAS RALLA KABUPATEN  
BARRU

Oleh

Rismawati<sup>1)</sup>, Wirawati Amin<sup>2)</sup>, Marhaeni<sup>3)</sup>, Indriani<sup>4)</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Makassar

E-mail: <sup>1</sup>[rismawati211@poltekkes-mks.ac.id](mailto:rismawati211@poltekkes-mks.ac.id), <sup>2</sup>[wirawatiamin80@gmail.com](mailto:wirawatiamin80@gmail.com),

<sup>3</sup>[marhaeni865@gmail.com](mailto:marhaeni865@gmail.com), <sup>4</sup>[Indriani@poltekkes-mks.ac.id](mailto:Indriani@poltekkes-mks.ac.id)

**Abstract**

Chronic energy deficiency (KEK) is a condition in which a person's nutritional status is poor due to a lack of consumption of food sources of energy containing macronutrients that lasts for a long time or are chronic. A person is said to be suffering from Chronic Energy Deficiency when the LILA (upper arm circumference) is  $< 23.5$  cm. To find out the factors that influence the weight gain of pregnant women with Chronic Energy Deficiency (KEK) at the Ralla Health Center. The method used in this research is an analytical survey with a cross sectional approach. The population in this study were all pregnant women with chronic energy deficiency as many as 73 respondents and a sample of 34 respondents. This research was conducted in February-May 2021 using a data collection format. The results of the *univariate* analysis showed that of the 34 respondents who stated the role of the midwife in the good category were 32 people (94.1%) and who stated the role of the midwife in the sufficient category were 2 people (5.9%), there were 32 respondents (94.1%) have good motivation and 2 respondents (5.9%) have less motivation. *Bivariate* results show the role of midwives with a P value = 0.05, motivation with a p value = 0.05. It can be concluded that the role of midwives and motivation has a relationship which means that it affects the weight gain of pregnant women with Chronic Energy Deficiency. The need for counseling about the importance of eating nutritious foods in order to increase weight in pregnant women with Chronic Energy Deficiency.

**Keywords: The Role Of The Midwife, Motivation, Weight Gain**

**PENDAHULUAN**

Kehamilan pada umumnya berlangsung selama 40 minggu atau 9 bulan di hitung dari awal periode menstruasi terakhir sampai melahirkan. Pada masa kehamilan terjadi peningkatan akan metabolisme gizi baik gizi mikro maupun gizi makro. Status gizi ibu hamil sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan janin sehingga status gizi ibu hamil harus seimbang antara asupan dan kebutuhan gizi. Apabila selama proses kehamilan asupan tidak seimbang dengan kebutuhan gizi, ibu dan janin dapat mengalami: janin mengalami kecacatan, berat badan lahir rendah (BBLR) pada ibu dapat mengalami

anemia, perdarahan dan Kekurangan Energi Kronis.

World Health Organization (WHO,2015) mengemukakan bahwa prevalensi Kekurangan Energi Kronis (KEK) pada kehamilan secara global 35-75%.

Riskesdes Tahun 2018 mengemukakan persentase Kurang Energi Kronis pada ibu hamil di Indonesia berdasarkan umur (tahun) 15-19 tahun 33,5%,20-24 tahun 23,3%,25-29 tahun 16,7%,30-34 tahun 12,3%,35-39 tahun 8,5%,40-44 tahun 6,5%,45-49 tahun 11,1% (Riskesdes, 2018)

Persentase Kurang Energi Kronis pada ibu hamil di Sulawesi Selatan sebanyak 17,2% hal ini menunjukkan bahwa persentase Kurang

Energi Kronis pada ibu hamil di Sulawesi Selatan masih tinggi (Riskesdes , 2018).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Barru persentase ibu hamil KEK di dapatkan 16,75%. Data yang di peroleh dari Puskesmas Ralla, persentase ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) mencapai 32,92% (105) orang dalam kurun waktu 1 tahun yaitu pada tahun 2019.

Menurut penelitian Marianita Manik dan Rindu, 2017 terdapat hubungan yang signifikan terhadap faktor yang berpengaruh terhadap kenaikan berat badan ibu hamil Kekurangan Energi Kronis. Peran bidan berpengaruh langsung terhadap kenaikan berat badan ibu hamil KEK sebesar 26,57% , Motivasi sebesar 13,38%. Bidan selaku tenaga kesehatan sangat berpengaruh dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Ibu dapat memotivasi dirinya sendiri dengan cara mengkonsumsi makanan yang bergizi selama kehamilan, sehingga dapat memperoleh kehamilan yang sehat dan nutrisi selama kehamilan dapat terpenuhi. Hal tersebut dapat dilihat dari kenaikan berat badan yang sesuai selama kehamilan.

Berdasarkan dari latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kenaikan Berat Badan Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis di Puskesmas Ralla Tahun 2020”.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan survey analitik dengan pendekatan *cross sectional*. Variabel independen dan variabel dependen dilakukan dalam kurun waktu bersamaan.

### Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan bulan februari - Mei 2021 di Puskesmas Ralla Kelurahan Lompo Riaja Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Pengambilan data awal dilakukan pada bulan November 2020 .

### Jumlah dan cara pengambilan sampel

Jumlah populasi di Puskesmas Ralla sebanyak 105 orang dan jumlah sampel sebanyak 73 orang, cara pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah “*purposive sampling*” yaitu teknik sampling yang menggunakan kriteria yang telah dipilih oleh peneliti dalam memilih sampel. Kriteria pemilihan sampel terbagi menjadi kriteria inklusi dan eksklusi.

## HASIL PENELITIAN

Penelitian tentang faktor yang berpengaruh terhadap kenaikan berat badan ibu hamil kekurangan energi (KEK) di wilayah kerja Puskesmas Ralla telah dilaksanakan, dan didapatkan sampel sebesar 34 orang dengan teknik pengampilan sampel secara *purposive sampling*. Data diperoleh secara primer dan sekunder sesuai dengan variabel dan karakteristik akseptor yang diperlukan dan dianggap menunjang penelitian ini. Hasilnya kemudian diolah dan dianalisis yang selengkapnya di sajikan berikut ini:

### Analisis Univariat

#### a. Peran bidan

**Tabel 5. 1: Distribusi Frekuensi berdasarkan Peran Bidan di Puskesmas Ralla Kabupaten Barru Tahun 2021.**

Peran Bidan	Frekuensi(F)	Persen%
Baik	32	94,1
Cukup	2	5,9
Total	34	100

Sumber: Data Primer 2021

Berdasarkan tabel 5.1 diatas menunjukkan bahwa dari 34 responden yang menyatakan peran bidan dalam kategori baik sebanyak 32 orang (94,1%) dan yang menyatakan peran bidan dalam kategori cukup 2 orang (5,9%).



b. Motivasi Ibu

**Tabel 5. 2 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Motivasi Ibu di Puskesmas Ralla Kabupaten Barru Tahun 2021**

Motivasi Ibu	Frekuensi(f)	Presentase(%)
Baik	32	94,1
Kurang	2	5,9
Total	34	100

Sumber: Data Primer 2021

Berdasarkan tabel 5.2 menunjukkan bahwa dari 34 responden, terdapat 32 responden (94,1%) memiliki motivasi baik dan 2 responden (5,9%) yang memiliki motivasi Kurang.

c. Kenaikan Berat

**Tabel 5. 3 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kenaikan Berat Badan di Puskesmas Ralla Tahun 2021**

Kenaikan Berat Badan	Frekuensi (f)	Presentase (%)
Ya	31	91,2
Tidak	3	8,8
Total	34	100

Sumber: Data Primer 2021

Menunjukkan bahwa dari 34 responden diperoleh data bahwa ada 31 responden (91,2%) yang mengalami kenaikan berat badan dan 3 responden (8,8%) yang tidak mengalami kenaikan berat badan.

2. Analisis Bivariat

Analisis bivariat digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Untuk melihat pengaruh peran bidan dan motivasi ibu terhadap kenaikan berat badan ibu hamil Kekurangan Energi Kronis di Puskesmas Ralla Kabupaten Barru. Teknik analisis dilakukan dengan uji *Chi-square* dengan tingkat kemaknaan  $\alpha=0,05$  atau interval kepercayaan  $p<0,05$  menggunakan program SPSS versi 25.0 for windows.

a. Pengaruh Peran Bidan Dengan Kenaikan Berat Badan

**Tabel 5.4 Pengaruh Peran Bidan dengan Kenaikan Berat Badan Di Puskesmas RallaKab.Barru Tahun 2021.**

Peran bidan	Kenaikan berat badan		Total		Pvalue
	Ya	Tidak	F	%	
Baik	31	12,94	32	94,12	0,005
Cukup	0	2	2	5,88	
Total	31	38,82	34	100	

Sumber: Data Primer 2021

b. Pengaruh Motivasi Ibu dengan Kenaikan Berat Badan

**Tabel 5.5 Motivasi Ibu dengan Kenaikan Berat Badan Di Puskesmas Ralla Kab. Barru Tahun 2021.**

Motivasi ibu	Kenaikan berat badan		Total		Pvalue
	Ya	Tidak	F	%	
Baik	31	12,94	32	94,12	0,005
Cukup	0	2	2	5,88	
Total	31	38,82	34	100	

Berdasarkan tabel 5.4 menunjukkan bahwa dari 34 responden, yang menyatakan peran bidan baik, terdapat 31 responden (91,17%) yang mengalami kenaikan berat badan dan 1 responden (2,94%) yang tidak mengalami kenaikan berat badan. Dari 2 responden yang menyatakan peran bidan cukup, tidak ada responden (0%) mengalami kenaikan berat badan dan 2 responden (5,88%) yang tidak mengalami penambahan berat badan.

Dari hasil uji *Chi-square* dengan nilai  $p=0,05 \leq \alpha=0,05$  artinya  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak yaitu ada hubungan antara Peran Bidan dengan Kenaikan Berat Badan di Puskesmas Ralla Kabupaten Barru Tahun 2021.

Berdasarkan tabel 5.5 menunjukkan bahwa dari 34 responden, terdapat 31 orang dengan motivasi baik (91,17%) yang mengalami kenaikan berat badan dan 1 responden (2,94%) yang tidak mengalami kenaikan berat badan. Responden yang memiliki motivasi cukup sebanyak 0 responden (0%) mengalami kenaikan berat badan dan 2 responden (5,88%) yang tidak mengalami penambahan berat badan.

Dari hasil uji *Chi-square* dengan nilai  $p=0,05 \leq \alpha=0,05$  artinya  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak yaitu ada hubungan antara Motivasi Ibu

dengan Kenaikan Berat Badan di Puskesmas Ralla Kabupaten Barru Tahun 2021.

## PEMBAHASAN

a. Pengaruh peran bidan dengan kenaikan berat badan ibu hamil kekurangan energi kronis.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Puskesmas Ralla Kabupaten Barru terhadap 34 responden. Hasil uji statistik *chi-Square* diketahui bahwa nilai signifikan *p-value* sebesar  $0,05 \leq 0,05$ , artinya  $H_a$  di terima dan  $H_o$  ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan antara Peran bidan dengan kenaikan berat badan.

Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Manik & Rindu (2017) yang menyatakan peran bidan memiliki pengaruh langsung dan positif secara signifikan terhadap kenaikan berat badan ibu hamil dengan KEK trimester III dengan nilai *T-Statistik*  $4,814 > 1,96$  pada  $\alpha = 0,05$  atau *CI* 95% dan adapun besarnya 0,331.

Dapat disimpulkan bahwa ketika peran bidan baik dan ibu melaksanakan atau mematuhi arahan bidan maka apa yang diinginkan responden dalam kenaikan berat badan akan tercapai. Sebaliknya apabila peran bidan cukup dan ibu tidak mematuhi arahan yang diberikan bidan maka kenaikan berat badan yang diinginkan responden tidak akan tercapai.

b. Motivasi Ibu dengan kenaikan berat badan ibu hamil kekurangan energi kronis

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Puskesmas Ralla Kabupaten Barru terhadap 34 responden. Hasil uji statistik *chi-Square* diketahui bahwa nilai signifikan *p-value* sebesar  $0,05 \leq 0,05$ , artinya  $H_a$  di terima dan  $H_o$  ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan antara Peran bidan dengan kenaikan berat badan.

Penelitian ini tidak sejalan dengan (Prasojo, 2015) menggunakan hasil uji kolmogorov smirnov distribusi data motivasi Ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan menghasilkan *p value* ( $0,000 < B 0,05$ ) artinya

distribusi data tidak normal. Karena distribusi data tidak normal, maka *cut of point* yang digunakan adalah median 81,00. Jika nilai motivasi ibu hamil  $C 81,00$  maka motivasi ibu hamil dikategorikan tinggi, jika nilai motivasi  $< 81,00$  maka motivasi ibu hamil dikategorikan rendah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di puskesmas Ralla Kabupaten Barru, ibu yang menjadi responden penelitian mayoritas memiliki motivasi yang baik. Apabila peran bidan baik dalam memberikan motivasi maka ibu akan menunjukkan motivasi yang baik atau sikap yang positif seperti mematuhi arahan atau saran yang disampaikan bidan terkait informasi kesehatan yang diberikan utamanya pada ibu hamil dengan masalah KEK. Seperti bidan memberikan informasi kesehatan, mengenai gizi/nutrisi yang baik untuk dikonsusmsi oleh ibu dengan masalah KEK sehingga dapat memotivasi dirinya. Ibu dengan motivasi cukup dan tidak mematuhi arahan bidan terkait informasi kesehatan yang diberikan sehingga ibu tidak mengalami penambahan berat badan.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka diambil kesimpulan yaitu:

1. Ada hubungan antara Peran Bidan dengan kenaikan berat badan Ibu hamil Kekurangan Energi Kronis di Puskesmas Ralla Kabupaten Barru.
2. Ada hubungan antara Motivasi ibu dengan kenaikan berat badan Ibu hamil Kekurangan Energi Kronis di Puskesmas Ralla Kabupaten Barru.

### Saran

Dari kesimpulan di atas beberapa saran yang dapat disampaikan adalah:

1. Perlunya penyuluhan oleh tenaga kesehatan tentang pentingnya makan makanan bergizi guna untuk peningkatan berat badan pada ibu hamil Kekurangan Energi Kronis.

2. Diperlukan informasi atau konseling dari tenaga kesehatan untuk ibu hamil Kekurangan Energi Kronis untuk memotivasi ibu dalam kenaikan berat badan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Angga. (2016) *Berat Badan Optimal Kehamilan. Jurusan Gizi* .
- [2] Primadani, (2016). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kekurangan Energi Kronis.
- [3] Ariani,A.P. (2017). *Ilmu Gizi.Nuha Medika*. Yogyakarta.
- [4] Arisman. (2002). *Buku Ajar Ilmu Gizi Dalam Daur Hidup Kehidupan. Buku Kedokteran*. Palembang.
- [5] Aritonang, & dkk. (2015). *Pengaruh Penyuluhan Tentang Gizi Masa Hamil Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Ibu Hamil Dalam Pencegahan Kekurangan Energi Kronis (KEK)* .
- [6] Boediman. (D.2009). *Sehat Bersama Gizi.Sagung Seto*. Jakarta.
- [7] Chandra, D. (2013). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta.
- [8] Fitriahadi, E. (2017). *Asuhan Kehamilan Disertai Daftar Tilik*. Yogyakarta: Universitas Aisyiyah Yogyakarta.
- [9] Manik, M., & Rindu. (2017). *Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kenaikan Berat Badan Ibu Hamil Dengan Kekurangan Energi Kronis Trimester III* . *Jurnal Ilmiah Kesehatan* .
- [10] Manuaba. (2013). *Kuliah Obstetri: Kuliah Kebidanan*. Jakarta: EGC.
- [11] Prawirohardjo, S. (2016). *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: PT.Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- [12] Riskesdes. (2018). *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia* . *Riskesdes 2018*.
- [13] Rukiah. (2015). *Asuhan Kebidanan Kehamilan*. Jakarta: Trans Info Media.
- [14] Varney, H. (2007). *Asuhan Kebidanan Edisi 4. Cetakan I*. Jakarta: EGC.
- [15] Yosephin, D. (2019). *Buku Pegangan Petugas KUA Sebagai Konselor 1000 PHK Dalam Mengedukasi Calon Pengantin Menuju Bengkulu Bebas Stunting* . Yogyakarta.
- [16] Republik indonesia, K. k. (2016). *Asuhan Kebidanan Kehamilan*. Jl.Hang Jebat III Blok F, Kebayoran Baru Jakarta Selatan .
- [17] Tekno, D. (2015). *Buku Bumil KEK. Healt & Medicine* , 15.
- [18] Widiyanti, R., & Nirmaya, M. (2018). *Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan Kenaikan Berat Badan Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis. Jurnal Asuhan Ibu Dan Anak* , 34.
- [19] Zuhairani, dkk 2016. *Indeks Massa Tubuh Awal Kehamilan Ibu Sebagai Indikator Yang Paling Berperan Terhadap Kenaikan Berat Badan Ibu Selama Hamil. Jurnal Departemen Ilmu Gizi Medik Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran*.
- [20] Prasojo, dkk 2015. *Motivasi Ibu Hamil Untuk Melakukan Pemeriksaan Kehamilan. Jurnal Ilmiah Kesehatan*.

HALAMANN INI SENGAJA  
DIKOSONGKAN

**PENGARUH KESADARAN, PENGETAHUAN, PELAYANAN FISKUS DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA SURAKARTA**

Oleh

Sukma Trihana<sup>1)</sup>, Ismunawan<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta, Sukoharjo

E-mail: [Sukmahanna61@gmail.com](mailto:Sukmahanna61@gmail.com), [wanismu@ymail.com](mailto:wanismu@ymail.com)

**Abstract**

The government in current years has taken various methods to increase country sales, particularly tax income. every year the variety of tax income goals will increase due to the need for country spending which maintains to growth each year. Taxes are received from network contributions, while paying taxes, the country does now not offer direct compensation. Taxes are coercive and the proceeds need to be used for country wishes. This have a look at goals to look at the effect of taxpayer focus, taxpayer information, tax provider services and tax sanctions on character taxpayer compliance because of the impact of covid-19. This research have become performed on character taxpayers in the town of Surakarta, the sort of records used modified into quantitative information. The statistics supply uses number one information. The populace within the take a look at become 142,210 character taxpayers. The variables on this have a observe are independent variables, especially taxpayer cognizance (X1) Taxpayer knowledge (X2) financial provider (X3) and Tax Sanctions (X4), on the same time because the structured variable is person taxpayer compliance (Y) The sample used is a hundred respondents the use of Slovin's additives. gathering facts the usage of a questionnaire. Assumption check using take a look at: multicollinearity, heteroscedasticity and normality. The records evaluation technique used more than one linear regression analysis, t test, F take a look at and R2 test with the assist of SPSS version 19 for home home windows. The results of the have a look at know-how that: 1) taxpayer consciousness has a huge impact on man or woman taxpayer compliance; 2) Taxpayer knowledge has no considerable impact on individual taxpayer compliance; 3) tax sanctions have a big effect on man or woman taxpayer compliance; and 4) tax provider services have a large impact on character taxpayer compliance.

**Keywords:** Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan

**PENDAHULUAN**

Pemerintah beberapa tahun terakhir telah berusaha dalam memaksimalkan pendapatan penerimaan negara, terutama penerimaan pajak. Setiap tahun jumlah target penerimaan pajak bertambah dikarenakan kebutuhan belanja negara yang terus meningkat setiap tahunnya. Pajak diperoleh berasal dari iuran masyarakat, pada waktu membayar pajak, negara tidak secara langsung memberikan imbalan Pajakpun sifatnya memaksa dan hasil pungutannya tersebut digunakan untuk kepentingan negara.

Indonesia menjadi negara berkembang dengan memiliki berbagai kemampuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju dari sebelumnya. Pajak ialah salah satu sumber pendapatan negara. Namun, kinerja yang diharapkan belum mendapatkan hasil yang memuaskan. Hal demikian ditimbulkan masih banyak wajib pajak yang belum menyatakan besaran pajak yang sudah dialokasikan oleh negara dan cenderung menurunkan tarif yang telah ditentukan. Bukan hanya itu, beberapa persoalan yang muncul hampir semua bidang. Salah satunya ialah

bidang ekonomi, dampak pandemi COVID-19 membuat perekonomian negara menurun. Hal ini menyebabkan pemotongan pajak yang drastis sehingga pemerintah terus berupaya untuk mengatasi permasalahan ini dengan memperhatikan penerimaan negara terutama dengan memungut pajak. Memang, memungut pajak bukanlah tugas yang mudah, selain dari peran aktif petugas pajak dan sanksi yang dilalai membayar pajak, kesadaran masyarakat juga diperlukan dalam melakukan pembayaran pajak meskipun kondisi keuangan tidak stabil. Singkatnya, wajib pajak akan lebih menghindari pajak dan menghindari diri. Kecenderungan ini terjadi disebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran masyarakat serta kurangnya pemahaman terhadap hukum perpajakan yang berlaku.

Penelitian sebelumnya terkait faktor yang bisa berdampak pada kepatuhan wajib pajak sudah dilaksanakan oleh peneliti terdahulu. Kemungkinan penyebab kepatuhan wajib pajak ialah sanksi perpajakan, pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak serta pelayanan perpajakan. Hasil penelitian (Tulenan, Sondakh, & Pinatik, 2017) perihal persepsi wajib pajak secara positif bermakna memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak serta penelitian (Yuniastuti, 2016) membuktikan bahwa persepsi wajib pajak secara bermakna mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. (Fitria, 2017) mengembangkan bahwa pengetahuan wajib pajak secara positif bermakna mempunyai pengaruh pada kepatuhan wajib pajak, sehingga masyarakat perihal pentingnya membayar pajak sangat. Pelayanan perpajakan (Putri & Setiawan, 2017) serta (Rifana, Kusuma, & Tho'in, 2021) juga berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak, kian baik pelayanannya maka kian besar kemudahan serta kenyamanan bagi wajib pajak. (Siamena, Sabijono, & Warongan, 2017) mengungkapkan bahwa sanksi perpajakan memberi pengaruh positif bermakna.

(Brata, Yuningsih, & Kesuma, 2017) juga melakukan penelitian dengan

menunjukkan akibat bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh bermakna juga memiliki hubungan positif pada kepatuhan wajib pajak. (Tene, Sondakh, & Warongan, 2017) mengungkapkan bahwa kesadaran, pemahaman serta sanksi pajak berpengaruh bermakna pada kepatuhan wajib pajak (Tene et al., 2017) juga mengungkapkan bahwa layanan fiskus tidak memberi pengaruh bermakna pada kepatuhan WP. Hasil dari penelitian oleh (Arisandy, 2017) bahwa kesadaran serta sanksi pajak memberi pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

Tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, perekonomian Indonesia mengalami penurunan yang sangat parah akibat dampak dari pandemi Covid-19, tidak tahu akan berakhir kapan dan hal ini tentu akan berpengaruh pada penurunan penerimaan pajak. Aspek pendapatan perusahaan menurun signifikan, pendapatan masyarakat menurun, tingkat pendidikan yang sulit dicapai karena tidak ada biaya pendidikan, aspek sosial dan psikologis seperti rasa takut akan bahaya Covid-19. Meski begitu hanya kemauan dan kesadaran yang dapat mendorong seseorang untuk terus memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah yang signifikan dimasa pandemi. Setelah dua tahun Indonesia mengalami terpurukan perekonomian, pada awal tahun 2021 pemerintah berupaya untuk membangkitkan kembali perekonomian negara dengan mulai memberikan pelonggaran di semua sektor, baik sektor pendidikan maupun sektor pariwisata. Pemerintah kota Solo juga berupaya untuk bangkit dari keterpurukan perekonomian, perlahan pemerintah kota Solo mulai memberikan pelonggaran masyarakat untuk kembali beraktifitas secara normal. Mall yang sudah mulai dibuka, sektor pariwisata yang perlahan sudah mulai dibuka kembali dengan tujuan ekonomi kota Solo perlahan bisa membaik dan masyarakat akan dengan mudah melaporkan dan membayar kewajiban yaitu membayar pajak. Berdasarkan kutipan yang disebutkan disitus Radar Solo pada tanggal 01 April 2021 (15:02 PM) tercatat oleh KPP Pratama Surakarta sebesar 33.971 wajib Pajak

Orang pribadi pegawai dari jumlah 42.078 WP melaporkan SPT Tahunan sampai 31 Maret. Realisasi sebanyak 80,73% untuk wajib pajak orang pribadi nonkaryawan sebesar 14.210 WP Realisasinya 6.661 WP atau pun 46,88%, hal demikian menyampaikan bahwa kepatuhan wajib pajak di Indonesia tepatnya di Kota Surakarta masih cukup rendah. Tingkat kepatuhan pajak yang rendah akan menyebabkan beberapa usaha penghindaran pajak, yang secara tidak langsung berdampak pada rendahnya penerimaan pajak bagi perbendaharaan.

Perbedaan serta persamaan penelitian ini dengan penelitian (Fitria, 2017) kesamaan penelitian ini dengan penelitian (Fitria, 2017) ialah wajib Pajak Orang pribadi yang menjadi subjek penelitian sama dengan penelitian ini. Variabel yang dipakai oleh (Fitria, 2017) berbeda dan lokasi penelitian yang juga berbeda dengan penelitian ini. Perbedaan selanjutnya adalah penelitian oleh (Fitria, 2017) dilakukan sebelum terjadinya pandemi Covid-19 sedangkan penelitian ini terjadi saat pandemi Covid-19 maka akan ada beberapa faktor pendukung yang mempengaruhinya. Penelitian ini tujuannya agar memahami tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya di Kota Surakarta dari sisi kesadaran, pelayanan fiskus, sanksi perpajakan serta pengetahuan. Pentingnya penelitian ini dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak agar melakukan pembayaran ataupun melaporkan pajak maka akan memaksimalkan penghasilan pajak negara.

## KAJIAN PUSTAKA

### Pajak

Pajak merupakan sumbangan pada tempat menyimpan uang negara dibayar oleh wajib pajak berdasarkan undang-undang perpajakan, pajak digunakan buat membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang ditentukan oleh pemerintah (Waluyo, 2017, p. 2). (Riftiasari, 2019) pembagian terstruktur mengenai pajak dirancang atas dasar bahwa

badan pemungutan pajak, serta pajak ialah sumber primer penghasilan negara yang dipergunakan untuk semua hal yang berkaitan dengan biaya belanja pemerintah.

Pajak berlandaskan UU no. 28 tahun 2007 pasal 1 butir 1 perihal mengubah ketiga atas UU no. 6 tahun 1983 perihal norma perpajakan serta ketentuan umum sebagai berikut:

“Pajak yaitu iuran yang terutang pada kas negara oleh suatu badan atau orang (wajib pajak), yang sifatnya wajib serta secara tidak langsung dibebankan berdasarkan undang-undang perpajakan, serta digunakan sebagai suatu kebutuhan kelemahan negara untuk kepentingan masyarakat.”

### Kepatuhan Wajib Pajak

(Pohan, 2016, p. 543) menekankan bahwa untuk mencapai kepatuhan pajak, penting untuk membangun lingkungan perpajakan (dalam rangka menaikkan kepatuhan pajak) yang tercermin pada: wajib pajak 1) bisa mengetahui UU Perpajakan; 2) bisa melengkapi SPT dengan urutan yang benar; 3) membayar tepat waktu; 4) bisa menghitung pajak yang terutang. Kepatuhan pajak diartikan menjadi syarat wajib pajak agar bisa melaksanakan semua kewajiban perpajakannya. Pada hal ini berarti wajib pajak siap memenuhi utang pajaknya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan (Gunandi, 2013, p. 94). Kepatuhan wajib pajak dilandaskan pada cara seorang WP mentaati seluruh kewajiban serta haknya dalam perpajakan (Nurmantu, 2000)

### Kesadaran Wajib Pajak

Hal ini sebagai karakter dari wajib pajak itu sendiri untuk berkomitmen melunasi pajaknya tepat waktu. Kesadaran masyarakat akan menekan beberapa masyarakat untuk mendaftar sebagai wajib pajak, melapor serta memenuhi kewajiban melunasi pajak secara baik sebagai sarana pelayanan internasional (James & Nobes, 1997). Kesadaran wajib pajak ialah sebuah situasi dimana seorang wajib pajak memiliki itikad baik untuk melaksanakan

kewajiban memenuhi pajak secara sepenuh hati tanpa mendapatkan imbalan (Susilawati & Budiarta, 2013). Ini menjadi satu diantara faktor yang mempunyai dampak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin seorang WP menyadari kewajibannya, semakin besar kemungkinan dia untuk memenuhi kewajibannya. Peningkatan kesadaran wajib pajak meningkatkan validitas kewajiban perpajakan, yang mampu meningkatkan kepatuhan pajak (Putri & Setiawan, 2017).

### **Pengetahuan Wajib Pajak**

Yakni proses yang mana wajib pajak belajar perihal aturan perpajakan serta memakai pengetahuan ini untuk melunasi pajak. Wajib pajak akan melaksanakan serta menjalankan hak serta kewajiban perpajakannya jika telah memahami kewajibannya hingga akhirnya merasakan manfaat dari membayar pajak (Nurlaela, 2013). Penting bagi wajib Pajak untuk tahu serta mengetahui peraturan serta standar perpajakan, seperti cara pengembalian pajak (DDP), cara pembayaran, posisi pajak, sanksi serta batasan dalam menyampaikan atau melaporkan TSP (Resmi, 2017). (Palil, 2005) berpendapat bahwa pengetahuan artinya kunci untuk menaikkan tingkat kesadaran wajib pajak saat melakukan pembayaran pajak.

### **Pelayanan Fiskus**

Pelayanan artinya proses membantu seseorang menggunakan cara eksklusif yang memerlukan kepekaan serta hubungan interpersonal untuk menghasilkan keberhasilan (Boediono, 2003, p. 60). Upaya meningkatkan kualitas pelayanan bisa dilakukan dengan meningkatkan keterampilan teknik karyawan pajak, meningkatkan infrastruktur mirip perluasan kawasan usaha (TPT), pemanfaatan sistem informasi serta teknologi untuk pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak (Supadmi, 2009). WP yang merasa puas terhadap layanan yang didapat memiliki keinginan untuk menjalankan kewajibannya berdasarkan peraturan undang-undang yang ada (Anggraeni, Farida, & Saryadi, 2013). Pelayanan perpajakan ialah faktor lain yang

dapat memberi pengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Pelayanan penyampaian yang baik bisa memaksimalkan kepatuhan wajib pajak, Kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan pada wajib pajak agar menjalankan kewajibannya berlandaskan peraturan yang ada

### **Sanksi Perpajakan**

Sanksi perpajakan artinya bagian dari upaya pemerintah agar dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Pembatasan hukum akan mengharuskan pembayar pajak untuk melakukan pekerjaan mereka. oleh sebab itu, pembatasan pajak wajib diperkenalkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pajak (Doran, 2008). Keputusan perpajakan juga mencakup hal-hal yang memberi pengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Bila terdapat hukum yang ketat bagi wajib pajak, wajib pajak wajib mengetahui hukum perpajakan. (Mardiasmo, 2016, p. 63) beropini bahwa kepatuhan pajak ialah agunan atas kepatuhan/kepatuhan/kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan, atau bisa dikatakan bahwa pajak adalah seperangkat persoalan bagi wajib pajak dan tidak melanggar undang-undang perpajakan. (Resmi, 2017, p. 71) mengemukakan bahwa aturan tercipta karena wajib pajak melanggar peraturan perundang-undangan

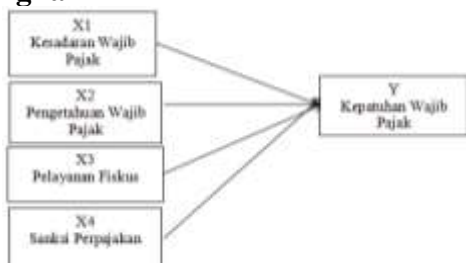
### **GAP Analyst**

(Yuniastuti, 2016) mengeksplorasi manfaat pelayanan pajak, pemahaman wajib pajak, persepsi positif wajib pajak serta manfaat pengetahuan wajib pajak. Kepatuhan wajib Pajak (Survei langsung WPOP KPP Pratama Surakarta 2016). hasil ini menyimpulkan bahwa pemahaman, dukungan pajak, pengetahuan wajib pajak, serta faktor sikap memberi pengaruh positif terhadap kinerja wajib pajak Pajak Terdaftar Pratama Surakarta. (Fitria, 2017) mengeksplorasi manfaat pengetahuan wajib pajak, pengetahuan serta pemahaman perihal kemampuan wajib pajak untuk menghormati pajak. Penggunaan beberapa garis mundur menunjukkan bahwa kombinasi pengetahuan, pengalaman, serta



pemahaman wajib pajak perihal persiapan SPT bermanfaat serta aman untuk kepatuhan.

### Kerangka Pikir



### Hipotesis

#### 1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian (Tulenan, Sondakh, & Pinatik, 2017) membuktikan bahwa sanksi pajak, kualitas layanan fiskus dan kesadaran wajib pajak memberi pengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

H1 : Kesadaran Wajib Pajak memberi pengaruh bermakna pada kepatuhan wajib pajak.

#### 2. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian oleh (Yuniastuti, 2016) memaparkan pengetahuan perpajakan berarti bahwa wajib pajak mengetahui perundang-undangan serta mengikuti praktik perpajakan yang baik. Pengetahuan wajib pajak sesuai menggunakan pengetahuan tata cara pembayaran, pengetahuan fungsi perpajakan, pengetahuan tempat pembayaran pajak dan sanksi perpajakan.

H2 : Pengetahuan Wajib Pajak memberi pengaruh bermakna pada kepatuhan wajib pajak.

#### 3. Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian oleh (Putri & Setiawan, 2017) menyatakan pemahaman dan pengetahuan perihal kualitas pelayanan, undang-undang perpajakan, kesadaran wajib pajak, serta pajak secara positif berdampak pada kepatuhan WP. tingkat kesadaran WP yang tinggi, tingkat pengetahuan dan pemahaman perihal tingkat mutu layanan perpajakan, undang-undang perpajakan, tingkat

kinerja wajib pajak yang didukung oleh penerapan denda keras KPP Pratama Denpasar Timur.

H3 : Kualitas Pelayanan mempunyai pengaruh bermakna pada kepatuhan wajib pajak.

#### 4. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Wajib Pajak

Penelitian oleh (Siamena, Sabijono, & Warongan, 2017) mengungkapkan bahwa secara positif serta signifikan sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dimana kian tegasnya sanksi perpajakan maka akan memaksimalkan kepatuhan wajib pajak.

H4 : Sanksi Pajak memberi pengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

### METODE PENELITIAN

#### Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini memakai metode kuantitatif dengan cara membagikan kuisioner sebagai pengumpulan data. Penelitian ini menerapkan metode asosiatif yakni suatu pertanyaan penelitian yang bersifat meminta keterangan mengenai korelasi antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2019, p. 63). Pengumpulan data memakai data primer dan sekunder. Sumber data primernya yaitu wajib pajak orang pribadi yang mempergunakan angket. Kuesioner/Survey ialah teknik pengumpulan data yang diadakan menggunakan cara menyajikan pernyataan ataupun pertanyaan tertulis pada responden (Sugiyono, 2019, p. 162). Angket/Survey diajukan pernyataan pada 100 responden perihal penelitian saat ini. Pernyataan ini berikan merata secara online (melalui Google form) Setiap elemen dari setiap variabel adalah dasar untuk membuat kuesioner yang mengevaluasi setiap jawaban diberi nilai yakni :

a. TK (Tidak Setuju)	(2)
b. Sangat Setuju (SS)	(5)
c. STS (Sangat Tidak Setuju)	(1)
d. S (Setuju)	(4)
e. Kurang Setuju (KS)	(3)

## Populasi dan Sampel

Populasi yaitu daerah generalisasi yang berisi subjek ataupun objek menggunakan ciri dan mutu tertentu yang peneliti gunakan dalam mengkaji serta menarik kesimpulan (Sugiyono, 2019, p. 117). Populasi di penelitian ini ialah wajib pajak orang pribadi yang bertempat tinggal di Kota Surakarta serta tercatat di KPP Pratama Surakarta per April 2021 yang di kutip di situs Radar Solo sejumlah 142.210 wajib pajak.

Sampel yaitu bagian dari kuantitas serta ciri yang dipunyai suatu populasi (Sugiyono, 2019, p. 180) Teknik pemilihan sampel memakai *teknik convenience sampling*. Teknik tersebut artinya teknik pemilihan sampel yang berdasarkan pada kemungkinan bahwa orang acak bisa bertemu dengan peneliti serta bisa dipergunakan sebagai sampel, bila suatu sampel sinkron dengan sumber data yang cocok (Sugiyono, 2019, p. 96). jumlah sampel ditentukan menggunakan suatu rumus (Riduwan, 2008, p. 65)

$$n = N / (1 + N \cdot (e)^2)$$

$$n = 142.210 / (1 + 142.210 \cdot (10\%)^2)$$

$$n = 142.210 / (1 + 142.210 \times 0,01)$$

$$n = 142.210 / (1 + 1.422,1)$$

$$n = 142.210 / 1.423,1$$

$$n = 99,9297$$

$$= 100 \text{ wajib pajak}$$

Keterangan :

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Total Populasi

e = Batas Toleransi Error

Jadi, jumlah sampel yang akan dipilih ialah 100 wajib pajak

## Definisi Variabel

### 1. Kesadaran Wajib Pajak

Yakni tingkat yang mana wajib Pajak sadar serta bersedia untuk mematuhi aturan secara adil serta memuaskan. dengan bertambahnya pengetahuan serta praktik wajib pajak, maka kesadaran harus pajak juga kian bertambah tinggi, sehingga diharapkan jumlah wajib pajak akan makin tinggi kepatuhannya terhadap pajak. dalam mengukur kesadaran

wajib pajak, penulis menggunakan indikator dibawah ini.

Menurut (Arum, 2012) sebagai berikut :

- Pajak ialah kontribusi masyarakat untuk keuangan pembangunan
- Pajak artinya kontribusi orang pribadi untuk pengeluaran umum pekerjaan serta fungsi umum
- Pajak adalah sumber utama penerimaan pajak
- Pajak artinya kewajiban warga negara.

### 2. Pengetahuan Wajib Pajak (sampai disini)

Yakni yang mana wajib pajak memahami serta mengetahui kaidah perpajakan, jenis pajak yang berlaku, tarif pajak, perkiraan atau pencatatan sampai dengan pengisian laporan perpajakan, dalam mengukur pengetahuan wajib pajak penulis menggunakan indikator dibawah ini

Menurut (Hartini & Sopian, 2018)

Pengetahuan wajib pajak yakni:

- Perihal fungsi perpajakan wajib pajak
- Perihal tarif pajakk
- Perihal cara pembayaran pajak
- Perihal registrasi wajib pajak

### 3. Pelayanan Fiskus

Pelayanan fiskus ialah wahana yang berfungsi untuk membantu, mengawasi dan mempersiapkan setiap kebutuhan wajib pajak. Layanan perpajakan didefinisikan sebagai suatu cara bagi pegawai pajak untuk membantu mempersiapkan segala kebutuhan yang mungkin dibutuhkan oleh wajib pajak. Dalam mengukur pelayanan fiskus penulis menggunakan indikator dibawah ini.

Menurut (Arum, 2012) yakni :

- Petugas pajak memnyampaikan layanan yang baik
- Saran otoritas pajak untuk dipahami oleh wajib pajak
- Cara membayar pajak secara efektif.

d. Petugas pajak mempertimbangkan keberatan wajib pajak

#### 4. Sanksi Perpajakan

Yakni jaminan bahwa norma perpajakan (ketetapan peraturan undang-undang perpajakan) akan dipenuhi /ditaati maupun dianggap bahwa upaya hukum perpajakan adalah alat yang digunakan untuk mencegah orang membayar pajak yang melanggar norma perpajakan. Dalam mengukur sanksi perpajakan penulis menggunakan indikator dibawah ini :

Menurut (Arum, 2012) sebagai berikut :

- Sanksi yang diberikan berdasarkan skala pelanggaran
- Sebuah sanksi pajak sangat dibutuhkan
- Sanksi akan diberlakukan secara tegas
- Sanksi diatur menggunakan aturan serta ketentuan yang berlaku.

#### 5. Kepatuhan Wajib Pajak

Hal ini merupakan kondisi wajib pajak untuk sepenuhnya mematuhi kewajiban pajaknya serta menjalankan hak perpajakan. Mengeni ini wajib pajak berarti siap untuk menjalankan kewajiban pajaknya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, bebas dari paksaan, penyidikan, teguran, ancaman serta penenaan sanksi administratif serta hukum. Dalam mengukur kepatuhan wajib pajak penulis menggunakan indikator dibawah ini :

Menurut (Surliani, 2014) sebagai berikut :

- Mengisi lembar isian pajak secara lengkap serta jelas
- Hitung pajak terutang tepat waktu serta bayar pajak tepat waktu.
- Wajib Pajak berusaha tahu serta memahami ketentuan undang-undang perpajakan.

#### ALAT ANALISIS DATA

1. Analisis Regresi Linier Berganda (Ghozali, 2018) memaparkan bahwa analisis ini tujuannya memprediksi n skor mean populasi

variabel dependen sesuai nilai variabel bebas yang terlihat.

Pengolahan data dalam penelitian ini secara komputersasi mempergunakan SPSS versi 19 untuk mendapatkan hasil perhitungan yang akurat, mempercepat pengolahan serta mencapai pengolahan data yang lebih cepat serta akurat.

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan :

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| Y   | = Kepatuhan wajib pajak   |
| X <sub>1</sub>  | = Kesadaran wajib pajak   |
| X <sub>2</sub>  | = Pengetahuan wajib pajak |
| X <sub>3</sub>  | = Pelayanan Fiskus        |
| X <sub>4</sub>  | = Sanksi perpajakan       |
| b <sub>1</sub> , b <sub>2</sub> , b <sub>3</sub> , b <sub>4</sub> | = Koefisien regresi       |
| α   | = Nilai konstanta         |
| E   | = Random error            |

#### 2. Uji Instrumen Data (sampai sini)

##### Uji Validitas

Menggunakan cara mengkorelasikan antara setiap nilai indikator menggunakan total skor konstruk. Bila hubungan antara setiap indikator terhadap jumlah nilai konstruk hasilnya signifikan, kesimpulannya bahwa indikator pertanyaan artinya valid (Ghozali, 2018).

##### Uji Realibilitas

Pada penelitian diukur mempergunakan uji Cronbach's Alpha > 0,60 kebalikannya bila di bawah 0,60 maka tidak andal (Ghozali, 2018, p. 133)).

#### 3. Uji Asumsi Klasik

##### Uji Normalitas

Uji ini yang dipakai ialah *Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual dan Histogram Regression Standardized Residual*. Distribusi normal di tunjukkan pada histogram data distribusi nilai error (residu). Berdasar grafik tersebut bisa diukur dari sebaran data di daerah garis diagonal apakah mengikuti dan searah garis diagonal.

##### Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas salah satu cara untuk mengetahui terdapat tidaknya multikolinearitas antar variabel independent, bisa ditinjau dari skor tolerance variabel ataupun VIF. Tolerance menentukan variabel

bebas yang tidak diterangkan oleh variabel independent yang lain.

1) Angka tolerance < 0,10 ataupun VIF > 10 skor maka tidak ada multikolinearitas.

2) Angka VIF < 10 ataupun skor tolerance > 0,10 maka tidak ada multikolinearitas (Ghozali, 2011)

#### Uji Heteroskedastisitas

Uji ini dipergunakan agar memahami apakah terdapat ketidaksamaan *variance* pada model regresi dari kesalahan antar pengamatan. Model regresi yang baik ialah homokedastisitas. Uji ini memanfaatkan uji glejser. Heteroskedastisitas ditemukan bila p-value < 0,05. Tetapi, jika p-value > 0,05 maka homokedastisitas (Ghozali, 2018, p. 134).

#### 4. Uji Hipotesis

##### Uji T

Berdasarkan (Ghozali, 2018, p. 98) uji statistik t intinya menguji sejauh apa pengaruh secara individu variabel bebas dalam mendeskripsikan variasi variabel tergantung. Uji diadakan dengan tingkat signifikan 0,05. Kriteria penentuan hipotesis ialah bila sig. > 0,05 maka tidak koefisien regresi tidak besar (menolak hipotesis). Sebaliknya bila angka sig. < 0,05 maka menerima hipotesis.

##### Uji F

Berdasarkan (Ghozali, 2018, p. 98) uji statistik F intinya membuktikan apakah setiap variabel bebas seperti dalam contoh memiliki pengaruh secara bersamaan pada variabel tergantung. Uji ini diadakan dengan tingkat signifikan 0,05. Kriteria penentuan hipotesis angka sig. > 0,05 maka koefisien regresi tidak bermakna (menerima hipotesis). ketentuan dan kriteria yakni:

- 1) Jika f hitung > f tabel maka tidak menerima  $H_0$  dan  $H_a$  diterima (memberi pengaruh)
- 2) Bila f hitung < f tabel maka  $H_0$  diterima dan menolak  $H_a$  (tidak memberi pengaruh)

##### Uji R<sup>2</sup>

Koefisien determinasi menilai sejauh mana daya dalam menunjukkan variasi tergantung

(Ghozali, 2018). Nilai determinasi secara matematis yaitu koefisien korelasi (r) yang dikuadratkan. Sebab, skor  $R_2$  sering over estimate,  $R_2$  yang dikoreksi (adjusted  $R_2$ ) akan dihitung oleh sejumlah perangkat lunak statistik. Angka determinasi menunjukkan sebesar apa peran variabel bebas dalam menetapkan variabel tergantung. Angka determinasi antara 0% hingga 100% bahkan hampir 100% maka determinasi dari persamaan regresi kian baik.

## HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients <sup>a</sup>		Standardized Coefficient	t	Sig.
	B	Std. Error			
1	(Constant)	4,728	1,287	3,673	,000
	TOTALN1	,474	,088	,520	,599
	TOTALN2	-,049	,092	-,049	,953
	TOTALN3	,193	,093	,194	,841
	TOTALN4	,100	,049	,175	,085

Sumber : Data Primer Diolah, 2021

Sesuai dengan hasil pengujian tersebut, bisa dimasukkan kedalam persamaan berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

$$Y = 4,728 + 0,474 - 0,049 + 0,193 + 0,100 + e$$

### Uji Instrumen Data

#### Uji Validitas

Variabel	Hasil Uji Validitas		Keterangan
	Korasi	Sig.	
Kesadaran Wajib Pajak	0,404**	0,00	Valid
Pengetahuan Wajib Pajak	0,438**	0,00	Valid
Pelayanan Fiskus	0,302**	0,00	Valid
Sanksi Perpajakan	0,837**	0,00	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	0,543**	0,00	Valid

Sumber : Data Primer Diolah, 2021

#### Uji Reabilitas

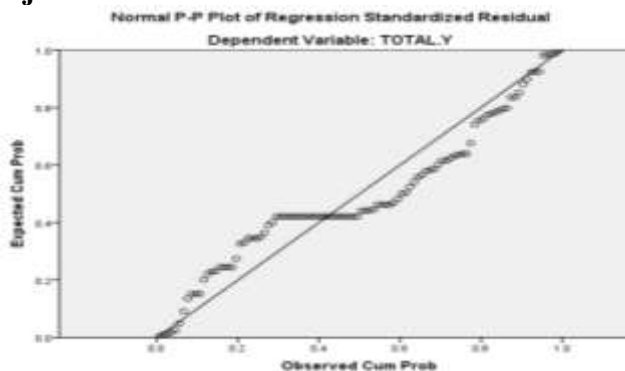
##### Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Batas Cronbach's Alpha	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0,750	0,60	Reliabel
Pengetahuan Wajib Pajak	0,693	0,60	Reliabel
Pelayanan Fiskus	0,642	0,60	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,880	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,852	0,60	Reliabel

Sumber : Data Primer Diolah, 2021

Sesuai hasil uji validitas, membuktikan bahwa setiap indikator pada pertanyaan angket dianggap valid. serta sesuai dengan uji reliabilitas, bisa terlihat bahwa tiap indikator yang bersangkutan dianggap andal. Tiap variabel mempunyai skor Cronbach's Alpha > 0,60.

**Uji Asumsi Klasik  
Uji Normalitas**



Sumber : Data Primer Diolah, 2021

Dari grafik tersebut bisa diketahui bahwa model regresi sebagai suatu yang dapat dipergunakan pada penelitian ini, dalam grafik tersebut grafik normal bisa terlihat pada titik-titik yang tersebar di daerah diagonal serta penyebar pada arah diagonal dianggap memenuhi asumsi normalitas.

**Uji Multikolinieritas**

Model	Colinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
TOTALX1	,514	1,946
TOTALX2	,564	1,772
TOTALX3	,544	1,839
TOTALX4	,647	1,545

Sumber : Data Primer Diolah, 2021

Sesuai hasil uji tersebut membuktikan bahwa skor tolerance tiap variabel bebas >0,10 serta skor VIF masing-masing variabel < 10 maka kesimpulannya tidak ada multikolinieritas dalam variabel.

**Uji Heteroskedastisitas**

Model	Coefficients <sup>a</sup>				t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient			
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	2,115	,903			2,342	,021
TOTALX1	-,092	,062	-,206		-1,496	,138
TOTALX2	-,011	,064	-,022		-,164	,870
TOTALX3	,046	,065	,094		,705	,483
TOTALX4	-,037	,034	-,132		-1,075	,285

Sumber : Data Primer Diolah, 2021

Hasil uji di atas mengungkapkan bahwa skor signifikan tiap variabel ialah 0,870 pengetahuan wajib pajak, serta 0,483 untuk pelayanan fiskus, 0,138 untuk kesadaran wajib pajak dan 0,285 untuk sanksi perpajakan. Sehingga kesimpulannya bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dikarenakan angka signifikan > 0,05.

**Uji Hipotesis**

**Uji T**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	4,728	1,237		3,875	,000
TOTALX1	,474	,088	,526	5,387	,000
TOTALX2	-,049	,092	-,049	-,536	,593
TOTALX3	,193	,095	,194	2,069	,041
TOTALX4	,100	,049	,173	2,036	,045

Sumber : Data Primer Diolah, 2021

- 1) Hasil uji t variabel pengetahuan wajib pajak. Berdasar hasil regresi skor  $t_{hitung}$  variabel ini senilai  $0,536 <$  dibandingkan dengan  $t_{tabel}$   $1,29053$  dan angka signifikan senilai  $0,593 >$   $0,05$  maka menerima  $H_0$  yaitu tidak ditemukan pengaruh bermakna pengetahuan wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak.  $H_2$ : Pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh besar pada kepatuhan WP dan belum terbukti kebenarannya.
- 2) Hasil uji t X1. Terlihat dari hasil regresi skor  $t_{hitung}$  variabel ini senilai  $5,387 >$   $t_{tabel}$   $1,29053$  yang mempunyai angka sig.  $0,000 <$   $0,05$  maka tidak menerima  $H_0$ . Membuktikan bahwa secara signifikan kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan WP.  $H_1$  : Kesadaran wajib pajak mmeberi pengaruh bermakna pada kepatuhan wajib pajak, terbukti benar adanya.
- 3) Hasil pengujian t variabel sanksi perpajakan. Terlihat dari hasil regresi skor  $t_{hitung}$  variabel ini senilai  $2,036 >$  dibandingkan  $t_{tabel}$   $1,29053$  dengan angka signifikan senilai  $0,045 <$   $0,05$  yang artinya  $H_0$  ditolak. Membuktikan bahwa variabel sanksi perpajakan mmepunyai pengaruh bermakna pada kepatuhan wajib pajak.  $H_4$  : Sanksi Perpajakan terdapat pengaruh bermakna pada kepatuhan wajib pajak terbukti kebenarannya.
- 4) Hasil uji t pelayanan pajak variabel. Telihat dari hasil regresi bahwa skor  $t_{hitung}$  variabel ini senilai  $2,069 >$  dari tabel  $1,29053$  menggunakan nilai signifikansi  $0,041 <$  dari  $0,05$  artinya  $H_0$  tidak termasuk/ditolak. Memperlihatkan bahwa variabel pelayanan fiskus memberi pengaruh yang bermakna pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.  $H_3$ : Kualitas layanan secara bermakna

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yang terbukti benar.

### Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	105,687	4	26,422	28,422	,000 <sup>a</sup>
Residual	88,313	95	,930		
Total	194,000	99			

Sumber : Data Primer Diolah, 2021

Berlandaskan pada tabel ANOVA membuktikan bahwa model regresi ini mempunyai skor  $F_{hitung}$  24,422 dengan angka signifikan senilai  $0,000 < 0,05$  berarti ditemukan pengaruh yang signifikansi antara  $X_1, X_2, X_3$  serta  $X_4$  secara bersamaan pada  $Y$ .

### Uji R<sup>2</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std Error of the Estimate
1	,738 <sup>a</sup>	,545	,526	,964

Sumber : Data Primer Diolah, 2021

Berlandaskan tabel tersebut, membuktikan bahwa Adjusted  $R^2$  untuk model ini senilai 0,526 yang artinya distribusi pengaruh semua variabel bebas terhadap  $Y$  senilai 52,6% sisanya  $(100\% - 52,6\%) = 47,6\%$  diterangkan oleh faktor lainnya diluar model yang diteliti.

### PEMBAHASAN

- 1) Hasil uji-t pengetahuan wajib pajak. Hasil regresi memperlihatkan bahwa skor  $t$  hitung variabel ini senilai  $0,536 < \text{skor } t \text{ tabel } 1,29053$  dengan angka sig.  $0,593 > 0,05$  yang berarti menerima  $H_0$  yaitu pengetahuan wajib pajak tidak memberi pengaruh bermakna pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil demikian selaras dengan penelitian Nelsi (2017) bahwa pengetahuan ataupun pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh bermakna pada kepatuhan wajib pajak.
- 2) Sesuai dengan hasil uji-T variabel kesadaran wajib pajak. Terlihat dari hasil regresi bahwa skor  $t$  hitung variabel ini sebesar  $5,387 > \text{dari } t \text{ tabel } 1,29053$  dengan angka sig.  $0,000 < \text{dari } 0,05$  artinya  $H_0$  tidak termasuk. Menunjukkan bahwa cara pandang wajib

- pajak berdampak bermakna pada kepatuhan wajib pajak. Kian banyaknya orang yang tahu cara membayar pajak, semakin tinggi penerimaan pajak. Hasil demikian sesuai dengan pemaparan (Tulenan et al., 2017) bahwa persepsi wajib pajak memberi pengaruh besar pada kepatuhan wajib pajak.
- 3) Berlandaskan hasil uji  $t$  variabel pelayanan fiskus. Terlihat bahwa hasil regresi skor  $t_{hitung}$  variabel pelayanan fiskus senilai  $2,069 > t_{tabel} 1,29053$  dengan angka sig.  $0,041 < 0,05$  yang artinya tidak menerima  $H_0$ . Membuktikan bahwa variabel pelayanan fiskus memberi pengaruh bermakna pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal demikian sesuai dengan penelitian (Putri & Setiawan, 2017) yang mengungkapkan bahwa pelayanan fiskus memberi pengaruh bermakna pada kepatuhan wajib pajak.
  - 4) Berdasar hasil uji-t variabel sanksi pajak. Terlihat hasil regresi bahwa skor  $t$  hitung variabel ini senilai  $2,036 > t \text{ tabel } 1,29053$  dan angka sig.  $0,045 < 0,05$  maka menolak  $H_0$ . Memperlihatkan bahwa secara signifikan terdapat pengaruh variabel sanksi perpajakan pada kepatuhan WP. Penelitian ini selaras dengan (Siamena, Sabijono, & Warongan, 2017) yang memaparkan bahwa sanksi perpajakan memberi pengaruh bermakna pada kepatuhan wajib pajak.

### Kesimpulan

Berlandaskan hasil uji hipotesis dengan uji regresi berganda, pengetahuan wajib pajak tidak mempunyai pengaruh bermakna pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Surakarta. Hal demikian memperlihatkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak tidak mendapat pengaruh dari tinggi rendahnya pengetahuan wajib pajak.

Saran bagi petugas pajak ialah senantiasa meningkatkan kesadaran wajib pajak selama masa pandemi dengan menyampaikan informasi serta penyuluhan perihal fungsi perpajakan serta peraturan perpajakan yang berlaku, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan, pelayanan

perpajakan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Peneliti lebih perlu menambahkan variabel lain seperti tanggung jawab moral, pengenalan pajak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anggraeni, I. Y. (2013). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu*. Diponegoro: Journal of Social and Politic.
- [2] Arum, H. P. (2012). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Sanksi Pajak, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menjalankan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap). *Skripsi.Semarang: Universitas*.
- [3] Boediono, B. (2003). *Pelayanan Prima Perpajakan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- [4] Destria Ayunda Rifana, I. L. (2021). Analisis Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Di KPP Pratama Surakarta Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Pajak, 22(01),2*
- [5] Fitria, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Applied Business and Economic Vol.4 No1(Sept2017), 30-44*.
- [6] Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [7] Gunandi. (2013). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan PT Niaga Swadaya*. Jakarta: PT Niaga Swadaya.
- [8] IHSAN, M. (2021, April 01). *Pandemi, Pelaporan SPT Tahunan Memuaskan*. Retrieved from <https://radarsolo.jawapos.com/ekonomi/01/04/2021/pandemi-pelaporan-spt-tahunan-memuaskan/>
- [9] James, S. &. (1997). *The Economics of Priciple, Taxation, Practise and Policy*. Europe: Prentice Hall.
- [10] Nurmantu, S. (2000). *Dasar-dasar Perpajakan*. Jakarta: Ind-Hil-Co.
- [11] Mardiasmo. 2016. *Perpajakan: Edisi Revisi*. Andi Offset. Yogyakarta.
- [12]
- [13] Pohan, C. A. (2016). *Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Teori, Nilai, Aplikasi PPN, dan Konsep*. Yogyakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.Jakarta.
- [14] Resmi, S. (2008). *Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- [15] Resmi, S. (2009). *Perpajakan: Teori dan kasus. Buku 1 Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- [16] SSiahaan, M. P. (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo.
- [17] sragen, B. (2018, Februari 23). *Manfaat Fungsi dan Penggunaan Pajak*. Retrieved from <http://bppkad.sragenkab.go.id/index.php/manfaat-fungsi-dan-penggunaan-pajak/>
- [18] Sugiyono. (2012). *“Memahami Penelitian Kualitatif”*. Bandung: ALFABETA.
- [19] Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Suliari dan Kardinal.
- [20] Supadmi, N. L. (2009). Memaksimalkan Kepatuhan Pajak Melalui Kualitas Pelayanan. *AUDI Jurnal Akuntansi dan Bisnis. Vol 2*.
- [21] Susilawati, E. K. (2013). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Udayana 2 ISSN: 2302- 8556, 345-357*.
- [22] Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia, E. k. (2008). Perpajakan Indonesia, Edisi*

---

*kedelapan, Buku Satu.* Jakarta: Salemba Empat.



---

**STRATEGI PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH  
TERHADAP PENJUALAN SARUNG TENUN KHAS BUTON**

Oleh  
Hastuti

Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau  
Sulawesi Tenggara 93728, Indonesia  
E-mail: [tutie977@gmail.com](mailto:tutie977@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah terhadap penjualan sarung tenun khas Buton. Objek penelitian ini adalah usaha mikro kecil dan menengah di Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari Kota Baubau. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan menggunakan Analisis SWOT. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini bahwa pengrajin memperoleh modal dari dua sumber yakni modal mandiri dan modal kerja sama, kelemahan para Pengrajin kain tenun khas Buton yaitu kekurangan wadah atau sarana pasar yang tidak luas, opportuniti atau faktor peluang, ketersediaan sumber daya manusia sudah ada dan faktor ancaman yang bersifat eksternal bagi perkembangan penjualan sarung tenun khas Buton adalah adanya sarung tenun khas Buton yang palsu. Strategi meningkatkan penjualan sarung tenun khas buton menggunakan media sosial sesuai dengan perkembangan teknologi dan zaman.

**Keywords: Strategi, Pemberdayaan, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah & SWOT**

**PENDAHULUAN**

Definisi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mempunyai batasan yang bervariasi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian penting dalam perekonomian dan pembangunan nasional (Rochjadi Hafiluddin & Saleh, 2014). Eksistensi Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) terbukti mampu bertahan dan menjadi penggerak ekonomi.

Dalam mewujudkan kondisi perekonomian secara makro yang maju dan berkualitas di suatu negara khususnya Indonesia diperlukan pembangunan perekonomian mikro di berbagai wilayah

secara merata dan stabil (Ariwibowo, 2017). Namun disisi lain, UMKM juga menghadapi banyak sekali permasalahan, seperti sumber daya manusia yang rendah, terbatasnya modal kerja, minimnya penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi dan terbatasnya pemasaran. Kelemahan yang dihadapi oleh para pengrajin atau kelompok UMKM dalam meningkatkan kemampuan usaha mereka meliputi berbagai indikator yang mana salah satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Serta adanya persaingan yang kurang sehat antar kelompok UMKM serta desakan ekonomi dalam keluarga sehingga mengakibatkan ruang lingkup usaha menjadi sempit dan terbatas. Namun, kendala lain yang dihadapi yaitu keterkaitan dengan prospek usaha yang kurang jelas serta perencanaan, visi dan misi yang belum mantap di dalam ruang lingkup kelompok UMKM.

Dalam menghadapi mekanisme pasar yang makin terbuka dan kompetitif, penguasaan pasar merupakan prasarat untuk

meningkatkan daya saing UMKM. Agar dapat menguasai pasar, maka UMKM perlu mendapatkan informasi dengan mudah dan cepat, baik informasi mengenai pasar produksi maupun pasar faktor produksi (Latisia, 2019). Masalah yang dihadapi dan menjadi kelemahan kelompok UMKM adalah kurangnya akses informasi, khususnya yaitu informasi pasar. Ini menjadi kendala karena dengan terbatasnya akses informasi pasar tersebut dapat mengakibatkan rendahnya peninjauan pasar sehingga dapat menyebabkan melemahnya daya saing. Minimnya informasi mengenai pemasaran dapat menjadikan kelompok UMKM tidak dapat mengembangkan usahanya ke arah yang jelas dan matang, sehingga perkembangannya dapat tidak mampu bergerak. Selain itu juga faktor sumber daya manusia di dalamnya juga memiliki andil tersendiri.

Oleh sebab itu perlu adanya upaya berupa strategi yang tepat sehingga UMKM dapat berkembang. Para pelaku usaha harus merumuskan berbagai macam strategi penjualan agar dapat bersaing guna mempertahankan usahanya.

Penelitian ini kemudian memusatkan perhatian pada Sektor UMKM di kampung tenun Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari Kota Baubau. Berdasarkan hasil observasi kelompok UMKM di kelurahan Sulaa kota Baubau diidentifikasi terdapat 10 kelompok Pengrajin tenun dimana masing-masing kelompok terdiri dari satu ketua kelompok dan 5 anggota kelompok. Awal terbentuknya kelompok pengrajin tenun ini diawali oleh pemerintah Kota Baubau yang terus mengembangkan potensi kerajinan tenun khas Buton. Salah satu wujudnya adalah didirikannya Galeri tenun dan Bangsal tenun, sehingga masyarakat tersebut membentuk 10 kelompok pengrajin tenun lalu didirikan nya 10 bangsal untuk masing-masing kelompok tenun tersebut.

Berdasarkan deskripsi diatas penulis melakukan penelitian dengan judul Strategi

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Terhadap Penjualan Sarung Tenun Khas Buton.

## LANDASAN TEORI

### Konsep Strategi

Merumuskan sebuah strategi bukanlah pekerjaan yang mudah. Kendala utamanya adalah komitmen internal atas segala hal yang telah dirumuskan sebagai konsekuensi strategi (Maulana et al., 2021). Strategi yaitu cara dimana suatu kelompok akan mencapai tujuannya sesuai dengan peluang dan ancaman lingkungan eksternal dan internal yang dihadapi oleh perusahaan (Jatmiko, 2003).

Sarana organisasi yang digunakan untuk mencapai tujuannya diartikan sebagai program utama dari tindakan dan komitmen atas pemahaman dan penempatan produk ke arah pencapaian tujuan menyeluruh berdasarkan kekuatan internal dan peluang yang ada. Makna penting dari pemahaman strategi sebagai sebuah usaha untuk mengambil tindakan yang berbeda dari perusahaan lain atau pesaing dalam satu industri yang sama guna mencapai posisi yang lebih baik (Hamili, 2016).

Fokus utama strategi menekankan memaksimalkan sumber daya produktivitas, misalnya, strategi pemasaran, keuangan, sumber daya manusia dan penelitian dan pengembangan. Proses pengambilan keputusan strategi akan selalu berkaitan dengan pengembangan visi, misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan.

Menurut Hendro (2011) adapun strategi lainnya yang dapat digunakan dalam mengembangkan produk ialah sebagai berikut:

#### 1) Strategi pengembangan pasar

Strategi pengembangan pasar adalah strategi untuk memasarkan produk atau jasa saat ini kepada konsumen di segmen pasar atau wilayah geografis pasar yang baru.

#### 2) Strategi pengembangan produk

Strategi pengembangan produk adalah strategi untuk memperluas pangsa pasar

yang lebih besar dengan menggunakan tambahan pilihan atau varian produk baru.

### 3) Strategi inovasi

Strategi inovasi adalah strategi yang berkaitan dengan penciptaan dan penerimaan pelanggan atau produk baru.

### Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan upaya membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkan (Sunariani et al., 2017). Pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui 3 (tiga) jalur, yaitu: (1) Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (Enabling); (2) Menguatkan potensi dan daya yang dimiliki masyarakat (Empowering); (3) Memberikan perlindungan (Protecting).

Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan biasanya selalu dikaitkan dengan konsep kemandirian, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Menurut Nugroho (2007), partisipasi merupakan komponen terpenting dalam upaya pertumbuhan kemandirian dan proses pemberdayaan. Strategi pemberdayaan menempatkan partisipasi masyarakat sebagai isu pertama pembangunan saat ini.

Konsep pemberdayaan yang dilakukan bertujuan pada pemberdayaan bidang ekonomi dan bidang sosial, dengan maksud kelompok sasaran dapat mengelola usahanya, kemudian memasarkan dan membentuk siklus pemasaran yang relatif stabil dan agar kelompok sasaran dapat menjalankan fungsi sosialnya kembali sesuai dengan peran dan tugas sosialnya.

### Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

Pengertian usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2008 adalah sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu. UMKM merupakan usaha yang masih dikategorikan

usaha kecil dan menengah. Adapun kriteria dari UMKM dilihat dari besarnya modal yang dimiliki dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 1. UMKM Dilihat Dari Besarnya Modal**

Usaha	Aset	Omset
Usaha mikro	Maksimal 50 Juta	Maksimal 300 Juta
Usaha Kecil	Lebih dari 50 Juta sampai 500 Juta	Lebih dari 300 juta sampai 2,5 Miliar
Usaha Menengah	Lebih dari 500 Juta sampai 10 Miliar	Lebih dari 2,5 Miliar sampai 50 Miliar

Sumber: (Maulana et al., 2021)

### METODE PENELITIAN

Dalam menjalankan usaha tentu tidak terlepas dari adanya kendala ataupun hambatan-hambatan. Kendala atau hambatan-hambatan tersebut bisa datang dari internal maupun eksternal. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini adalah UMKM di Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari Kota Baubau.

Oleh karena itu pendekatan yang harus dilakukan dalam menjalankan UMKM yaitu dengan pendekatan Analisis SWOT agar dapat mengetahui faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) maupun faktor-faktor eksternal (peluang dan ancaman). Kemudian setelah dapat diketahui faktor internal maupun faktor eksternal tersebut diharapkan menciptakan strategi alternatif yang tepat dalam meningkatkan pemberdayaan penjualan sarung tenun khas Buton.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi kepada pemilik UMKM di Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari Kota Baubau. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang terdiri atas tahapan pengumpulan data,

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Analisis SWOT

Analisis SWOT yaitu identifikasi berbagai faktor dengan secara sistematis untuk merumuskan suatu strategi bisnis. Analisis SWOT ini didasarkan pada logika agar dapat memaksimalkan faktor-faktor yang dimiliki seperti faktor kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunity*), dan secara bersamaan dapat meminimalisir kelemahan (*weakness*) serta ancaman (*threats*). Pengambilan keputusan strategis ini berkaitan dengan pengembangan misi, strategi, tujuan, serta kebijakan yang diterapkan pada suatu bisnis. Dengan demikian perencanaan strategi harus dengan menganalisis faktor-faktor strategis bisnis seperti:

#### Kekuatan (*Strength*)

Strength atau faktor kekuatan merupakan faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam perusahaan yang dapat mendukung perkembangan bisnis secara optimal. Adapun faktor kekuatan yang dimiliki oleh para Pengrajin sarung tenun khas Buton di Kelurahan Sulaa adalah sebagai berikut:

##### 1. Modal Usaha

Pengrajin sarung tenun khas Buton di Kelurahan Sulaa memperoleh modal usaha berupa benang pewarna alam. Pengrajin memperoleh modal ini dari dua sumber yakni modal mandiri dan modal kerja sama.

##### 1) Modal mandiri

Modal mandiri ini pengrajin merakit sendiri benang yang akan di gunakan untuk proses pembuatan sarung.

##### 2) Modal Kerja Sama

Modal kerja sama ini dimaksud para kelompok pengrajin tenun bisa memperoleh modal berupa benang pewarna alam di galeri tenun Sulaa.

##### 2. Awet atau Tahan Lama

Sarung tenun khas buton Sulaa original, proses pembuatan sarung secara manual per helai benang dengan menggabungkan secara

memanjang dan melintang. Dengan kata lain bersilangnya antara benang lusi dan pakan secara bergantian. Terbuat dari benang asli tanpa pewarna pakaian sehingga tidak luntur, semakin dicuci maka kain tenun khas Buton ini semakin awet atau tahan lama.

#### Kelemahan (*Weakness*)

Para Pengrajin kain tenun Khas Buton di Sulaa pun memiliki beberapa kelemahan, yakni Wadah atau sarana pasar tidak luas. Sulaa memiliki sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, akan tetapi kurangnya wadah atau akses informasi pasar untuk menampung hasil kerajinan dari pengrajin tersebut. Dalam hal ini pengrajin akan menenun jika ada pesanan dari pelanggan yang mencari sarung tenun khas Buton.

Dengan adanya peristiwa ini peneliti memanfaatkan kelemahan ini dengan menghidupkan kembali Bangsal tenun dengan menjadikan Bangsal sebagai wadah untuk menyimpan hasil tenunan ke masing-masing Bangsal tenun yang nantinya mempermudah pengunjung yang datang ke Sulaa mencari sarung tenun dan memanfaatkan media sosial seperti facebook, instagram dan shoope sebagai media tambahan untuk mempromosikan atau menjual hasil kerajinan mereka.

#### Peluang (*Opportuniti*)

Opportuniti atau faktor peluang merupakan faktor eksternal perusahaan dalam bisnis yang akan menjadi kesempatan bagi perusahaan bisnis untuk berkembang secara optimal. Beberapa peluang yang dimiliki oleh para Pengrajin sarung tenun khas Buton adalah sebagai berikut:

##### 1. Ketersediaan Sumber Daya Manusia

Masyarakat di kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari kota Baubau pada umumnya merupakan nelayan untuk kaum laki-laki, dan penenun untuk kaum perempuan. Menenun di Sulaa merupakan warisan turun temurun sehingga pengrajin tenun di Kelurahan Sulaa mudah di temukan.

Berdasarkan penelitian terlihat bahwa sumber daya manusia sudah ada namun

kurangnya akses penjualan menjadi salah satu faktor pendukung turunnya minat menenun oleh para pengrajin di Kelurahan Sulaa. Salah satu strategi penting dalam pembangunan adalah pentingnya pemberdayaan sumber daya manusia. Pemberdayaan pada masyarakat adalah salah satu kekuatan yang sangat vital. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari berbagai aspek seperti aspek fisik, ekonomi, aspek materil dan kelembagaan, aspek pendapatan, kekuatan kerja sama, serta kekuatan intelektual agar dapat mematuhi dan menerapkan prinsip pemberdayaan. Arti pentingnya pemberdayaan sumber daya manusia adalah menciptakan kemandirian agar masyarakat mampu berbuat, memahami serta mengaplikasikan dalam berbagai kegiatan pembangunan.

## 2. Sarung Tenun Khas Buton Sudah di Kenal Oleh Masyarakat Lokal.

Tenun khas Buton selain sebagai perekat sosial bagi masyarakat Buton, juga sebagai identitas diri masyarakat dan sosial. Bagi orang Buton pakaian tidak hanya berfungsi sebagai pelindung tubuh dari terik matahari dan dinginnya angin pada malam hari, tetapi juga berfungsi sebagai identitas diri masyarakat dan sebagai stratifikasi sosial. Dengan melihat pakaian yang digunakan oleh wanita Buton misalnya, dapat diketahui wanita tersebut sudah menikah atau belum menikah, termasuk golongan awam atau bangsawan. Misalnya motif "kasopa" motif ini biasa dipakai oleh kaum perempuan, sedangkan motif "kumbaea" yang didominasi oleh benang emas atau benang perak biasanya dipakai oleh golongan bangsawan yang bergelar La Ode atau Wa Ode di Buton.

Berdasarkan penelitian terlihat bahwa sarung tenun khas Buton memang sudah di kenal oleh masyarakat lokal terlihat dengan adanya masyarakat yang memegang teguh tradisi adat masyarakat Buton yang tetap menggunakan sarung tenun khas Buton untuk segala kegiatan dalam lingkungan masyarakat Kota Baubau. Masyarakat yang tetap

memegang tradisi Buton menjadi peluang oleh para pengrajin sarung tenun khas Buton di Kelurahan Sulaa untuk tetap membuat kerajinan sarung tenun khas Buton.

## Ancaman (*Threats*)

Adapun faktor ancaman yang bersifat eksternal bagi perkembangan penjualan sarung tenun khas Buton oleh pengrajin tenun di Kelurahan Sulaa adalah adanya sarung tenun khas Buton yang palsu (proses pembuatannya menggunakan mesin dan pewarna pakaian).

Berdasarkan hasil penelitian ancaman yang di hadapi oleh pengrajin sarung tenun khas Buton yaitu adanya sarung tenun khas buton yang palsu yang proses pembuatan sarungnya menggunakan mesin dan pewarna pakaian. Untuk menghadapi ancaman tersebut pengrajin tenun khas Buton di Kelurahan Sulaa menggunakan kekuatan internal yaitu sarung tenun khas Buton yang asli lebih tahan lama atau awet. Meski terbilang lebih mahal di banding dengan sarung tenun khas Buton yang palsu namun kualitas dari yang asli lebih baik, warna tidak luntur dan kualitas bahan tebal namun tetap nyaman di pakaidan bisa di gunakan hingga bertahun-tahun tergantung perawatan penggunaannya.

## 2. Strategi Eksplorasi Layanan Permodalan

Pada dasarnya kebutuhan modal untuk melakukan usaha bisnis terdiri dari dua jenis yaitu modal investasi dan modal kerja. Modal investasi ini dapat digunakan untuk jangka panjang serta dapat digunakan berulang-ulang. Biasanya lebih dari satu tahun. Penggunaannya adalah untuk pembelian aktiva tetap seperti gedung, bangunan atau tanah, mesin, peralatan, kendaraan, serta inventaris lainnya. Sedangkan modal kerja adalah modal yang dapat digunakan untuk membiayai operasional perusahaan bisnis pada saat perusahaan sedang beroperasi. Jenis modal tersebut biasanya bersifat jangka pendek, dan biasanya hanya digunakan untuk sekali atau beberapa kali proses produksi kerja. Modal kerja digunakan

untuk keperluan membayar gaji karyawan, membeli bahan baku, dan biaya lain-lainnya.

Berdasarkan penelitian terlihat bahwa layanan permodalan kelompok tenun Kelurahan Sulaa berupa benang pewarna alam. Modal ini bisa diperoleh di galeri tenun Kelurahan Sulaa.

Berdasarkan hasil penelitian strategi layanan permodalan kelompok tenun di Kelurahan Sulaa terlihat cukup baik untuk mendukung kelompok penenun. Layanan permodalan yang didapatkan yakni berupa benang. Benang tersebut di peroleh dengan pengrajin meminjam benang ke galeri tenun dan terkadang ada pula batuan dari Kelurahan Sulaa berupa alat tenun untuk pengrajin tenun tersebut.

### **Peningkatan Kreatifitas**

Strategi peningkatan kreatifitas yaitu suatu proses atau cara yang dilakukan oleh para perajin tenun dalam upaya mempertahankan atau meningkatkan hasil kerajinan mereka, seperti peningkatan kemampuan bersaing dan sekaligus bekerja sama antar perajin tenun. Adapun strategi yang dilakukan oleh perajin meliputi seluruh aktivitas produksinya, mulai dari penyediaan bahan baku, organisasi pengelolaan, sampai dengan pemasarannya. Untuk menjaga kesinambungan usaha bisnis, para perajin tenun juga mewariskan pengetahuan dan keterampilan mereka kepada anak keturunannya atau orang lain yang berminat untuk menenun.

Penjelasan dari masing-masing unsur strategi bisnis yang dilakukan oleh para perajin tenun dapat di lihat sebagai berikut:

#### 1) Penyediaan bahan baku

Untuk penyediaan bahan merupakan modal awal dari para perajin sarung tenun, tanpa adanya modal awal bahan yaitu bahan baku, proses pembuatan sarung tenun tidak akan dapat berjalan. Bagi perajin sarung tenun khas Buton tidak terdapat kesulitan di dalam menyediakan bahan baku. Saat ini mereka bisa memperoleh benang di galeri tenun.

#### 2) Diversifikasi Produk

Untuk mempertahankan kesinambungan produksi kain tenun, perajin tenun di tuntut untuk bergerak kreatif dan inovatif menciptakan bentuk-bentuk baru agar tetap diminati konsumen. Namun, kreativitas dan inovasi yang ada seringkali memerlukan campur tangan pihak lain untuk sebagai motivator atau motor penggeraknya.

Kerajinan sarung tenun khas Buton yang dihasilkan hanya berupa kain sarung khas Buton, baju dan selendang. Namun, dalam perkembangannya, tidak hanya dibuat menjadi sarung, baju dan selendang, tetapi juga barang-barang lainnya yang bisa dibuat dengan adanya sentuhan tenun Buton seperti : tas, taplak meja, hiasan dinding, kipas untuk keperluan souvenir, dan lainnya. Dalam hal ini para pengrajin sarung tenun khas Buton lah yang berperan sebagai motor penggerak kreativitas dan inovasi mereka.

#### 3) Organisasi Pengelolaan

Di samping bersaing untuk memperebutkan peluang pasar, sesama perajin tenun di Kelurahan Sulaa juga saling membantu dan bekerja sama. Agar dapat saling membantu antar sesama perajin tenun, setiap usaha dapat membentuk suatu organisasi. Dalam hal ini organisasi tersebut sudah di bentuk menjadi 10 kelompok tenun yakni Tunas maju, walet, serba usaha, mawar, merpati, nirwana 1, nirwana 2, nuri, cendrawasih dan tenun harapan. Fungsi utama dari kelompok yang dibentuk adalah untuk membantu permodalan dan strategi pemasaran produknya.

#### 4) Pemasaran

Pemasaran adalah tahap yang sangat berperan penting menentukan keberlangsungan suatu jenis kerajinan usaha. Para perajin sarung tenun khas Buton mempunyai dua cara untuk memasarkan. Pertama adalah menjual kepada sentral-sentral sarung tenun khas Buton dan yang kedua menjual sendiri sarung tenun khas Buton tersebut oleh para perajin dengan harga yang lebih murah.

Harga sarung tenun khas Buton bervariasi. Misalnya, sebuah sarung tenun sederhana dijual dengan harga yang cukup murah yaitu, Rp 250.000,-, harga bisa mencapai Rp 800.000,-. Tingkatan harga sarung tenun khas Buton tersebut berdasarkan pada kualitas benang yang digunakan, motif sarung semakin sulit maka semakin mahal harga sarung tersebut, dan ukuran panjang dan lebar kain menentukan harga kisaran sarung tenun.

#### 5) Kesenambungan Usaha

Para perajin tenun harus melakukan regenerasi untuk meneruskan usaha tenun tersebut. Regenerasi dilakukan dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan mereka kepada generasi muda, khususnya anak-anak mereka. Akan tetapi, sebagian perajin tenun mengalami kesulitan, karena generasi muda tidak berminat untuk menggeluti jenis kerajinan seperti menenun tersebut dan memilih bekerja dibidang lain yang dianggap lebih menguntungkan.

Untuk mengatasi kesulitan tersebut, diperlukan peranan pemerintah untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap tenun khas Buton. Kecintaan terhadap tenun khas Buton ini akan berdampak dari semakin meningkatnya permintaan kain tenun khas Buton oleh masyarakat kepada para perajin.

#### 6) Peran pemerintah Daerah

Peranan pemerintah daerah, melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Baubau dalam pembinaan terhadap industri tenun tradisional Buton dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, yakni :

##### a) pendidikan dan pelatihan

Program pendidikan dan latihan dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Baubau kepada para perajin kain tenun khas Buton. Dengan demikian, diharapkan para perajin dapat membuat inovasi dan meningkatkan kreativitas pada seni hiasnya, sehingga karya mereka dapat diminati oleh masyarakat lokal ataupun interlokal. Program yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap

perajin kain tenun khas Buton adalah dengan melakukan pelatihan dan pendampingan, antara lain membuat diversifikasi produk berbahan dasar tenunan; pengembangan program anggota UKM; pengembangan kemitraan; dan pengembangan pasar untuk kain tenun khas Buton.

##### b) Pemberian Bantuan Alat Produksi

Bantuan alat produksi, antara lain diberikan kepada perajin tenun khas Buton. Bantuan alat dan bahan yang diberikan kepada para perajin kain tenun khas Buton adalah beberapa buah alat tenun dan benang di 10 kelompok di Kelurahan Sulaa.

##### c) Pengikut Sertaan Dalam Pameran

Pemerintah daerah juga senantiasa mengikut sertakan beberapa orang perajin dari beberapa kelompok tenun yang ada di kelurahan Sulaa Kota Baubau ke dalam kegiatan pameran secara rutin setiap tahunnya, baik di provinsi, ataupun antar provinsi. Pameran dimaksudkan disini untuk memperoleh peluang pasar penjualan. Dengan keikut sertaan pemerintah sebagai pameran bukan berarti usaha para perajin tergantung pada pemerintah daerah. Pameran yang diselenggarakan oleh pemerintah hanya sebagai ajang untuk mengembangkan jaringan pasar. Dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Baubau hanya bertindak selaku fasilitator. Selanjutnya, perajin sendiri yang harus mampu berperan aktif mempromosikan dan memasarkannya produk hasil tenunan.

##### d) Peningkatan Kecintaan Masyarakat

Upaya untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap produk kerajinan dari daerah mereka sendiri merupakan bagian dari peranan pemerintah daerah. Dalam hal ini Pemerintah Kota Baubau mewajibkan setiap Aparatur Sipil Negara (ANS) di lingkungan instansi pemerintah untuk memakai pakaian dari bahan tenun Khas Buton pada setiap hari Kamis dan Jumat. Di samping itu, pemerintah daerah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merencanakan program Gerakan

Cinta Seni dan Pariwisata. Gerakan ini dimaksudkan agar masyarakat lebih menghargai karya seni dari daerah nya masing-masing.

### Akses Penjualan Melalui Media Sosial

Promosi yang efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan teknologi dan zaman adalah menggunakan media sosial. Tidak hanya membuat halaman facebook dan instagram untuk promosi, perlu juga dibentuk sebuah tim yang fokus (*concern*) untuk mengurus akun di media sosial. Tujuannya agar akun di media sosial tidak terbengkalai. *Up date* atau tidaknya sebuah media sosial juga menjadi catatan bagi publik untuk peka (*aware*) terhadap informasi yang disampaikan oleh akun tersebut. Untuk itu perlu dibentuk semacam *official team* yang bekerja fokus pada urusan promosi dan publikasi.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Analisis SWOT didasarkan pada perencanaan strategi, dengan menganalisis faktor-faktor strategis seperti Strength atau faktor kekuatan, adapun faktor kekuatan yang dimiliki oleh para Pengrajin sarung tenun khas Buton di Kelurahan Sulaa adalah pengrajin sarung tenun khas Buton di Kelurahan Sulaa memperoleh modal usaha berupa benang pewarna alam. Pengrajin memperoleh modal ini dari dua sumber yakni modal mandiri dan modal kerja sama. Kelemahan (*Weaknees*) yaitu para Pengrajin kain tenun Khas Buton di Sulaa pun memiliki beberapa kelemahan, yakni wadah atau sarana pasar tidak luas. *Opportuniti* atau faktor peluang, ketersediaan sumber daya manusia sudah ada namun kurangnya akses penjualan menjadi salah satu faktor pendukung turunnya minat unutup menenun. Adapun faktor ancaman yang bersifat eksternal bagi perkembangan penjualan sarung tenun khas Buton oleh pengrajin tenun di Kelurahan Sulaa adalah adanya sarung tenun khas Buton yang palsu.

Strategi meningkatkan penjualan sarung tenun khas buton menggunakan promosi yang efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan teknologi dan zaman menggunakan media sosial. Tidak hanya membuat halaman facebook dan instagram saja untuk mempromosikan hasil tenun khas Buton, dibentuk semacam *official team* yang bekerja fokus pada urusan promosi dan publikasi.

### Saran

Beberapa Bangsal tenun yang tutup atau dijadikan pergudangan, bisa di jadikan wadah oleh masing-masing kelompok untuk menampung semua hasil kerajinan mereka, sehingga pengunjung yang datang pun bisa langsung ke galeri atau kebangsal-bangsall tenun untuk memilih sarung tenun khas Buton sesuai kebutuhan pengunjung. Dalam hal ini bermaksud menghidupkan kembali bangsal-bangsall yang tutup dengan mengembalikan fungsi ketua, sekretaris, bendahara ataupun anggota-anggota kelompok tenun.

Pengrajin tenun di Kelurahan Sulaa hanya membuat berupa sarung Khas Buton, dengan memanfaatkan keatifitas dan bakat yang dimiliki oleh penenun bisa membuat kerajinan berupa barang-barang lainnya yang bisa dibuat dengan adanya sentuhan tenun Buton seperti: tas, taplak meja, hiasan dinding, kipas untuk keperluan souvenir, dan lainnya.

Memanfaatkan media sosial seperti facebook, instagram dan shoope sebagai media tambahan untuh mempromosikan atau menjual hasil kerajinan mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ariwibowo, P. (2017). Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan Perekonomian di Indonesia. *JABE (Journal of Applied Business and ...*, 173–183.  
<https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/JABE/article/view/1398/1111>



- [2] Latisia, S. (2019). Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Kota Kediri. *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 1(2), 62–75. <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v1i2.202>
- [3] Hamali, A. Y. (2016). Pemahaman Strategi Bisnis dan Kewirausahaan. *Jakarta: Prenadamedia Group*.
- [4] Hendro, I. (2011). *Dasar-dasar kewirausahaan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- [5] Jatmiko, Rammad Dwi. 2003. *Manajemen Stratejik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- [6] Maulana, H. A., Niaga, J. A., & Bengkalis, P. N. (2021). JMK ( Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan ) Lejo Sebauk pada Masa Pandemi COVID-19. *JMK (Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan)*, 6(1), 11–25. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/ManajemenKewirausahaan/index>
- [7] Nugroho, Trilaksono. (2007) *Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah*. Malang, FIA. Universitas Brawijaya.
- [8] Rochjadi Hafiluddin, M., & Saleh, C. (2014). Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis “Community Based Economic Development” (Studi pada pelaku UMKM di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo). *Wacana, Sosial Dan Humaniora*, 17(2), 68–77. <https://wacana.ub.ac.id/index.php/wacana/article/view/305/255>
- [9] Sunariani, N. N., Suryadinata, A. O., & Mahaputra, I. I. R. (2017). Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (umkm) melalui program binaan di provinsi Bali. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 2(1), 1–20.
- [10] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

**PENGARUH BUDAYA ORGANISASI, PENGEMBANGAN KARIR, DAN  
EFIKASI DIRI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. PLN (PERSERO)  
UNIT PELAYAAAN JASA LOMBOK TENGAH**

Oleh

Mustaan<sup>1)</sup>, Nizar Hamdi<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup>STIE AMM Mataram

Email: <sup>2</sup>[nizar\\_hamdi69@yahoo.com](mailto:nizar_hamdi69@yahoo.com)

**Abstract**

This study entitled "The Influence of Organizational Culture, Career Development, and Self-Efficacy on the Performance of Employees of PT. PLN (Persero) Central Lombok Service Service Unit". The purpose of this study was to determine the effect of organizational culture, career development, and self-efficacy on employee performance. The population in this study were all employees of PT. PLN (Persero) UPJ Central Lombok amounted to 80 people, with a sample of 67 people. Based on the results obtained using multiple linear regression with the F test and t test, the Fcount value is 17.599 and Ftable is 2.742 with a significance level of 0.000 which is smaller than the probability coefficient of 0.05, meaning that simultaneously the variables of organizational culture, career development, and self-efficacy has a significant effect on employee performance (Y). While the partial test is known that organizational culture and career development variables have a significant effect on employee performance where tcount is 2,622 and 2,539 is smaller than ttable of 2,651 with probabilities of 0.011 and 0.014 smaller than = 0.05. Then the self-efficacy variable partially has a dominant significant effect on the employee performance variable because it is known that tcount of 3.459 is greater than ttable of 2.651 with a probability of 0.001 less than = 0.05.

**Keywords: Organizational Culture, Career Development, Self-Efficacy, Employee Performance.**

**PENDAHULUAN**

Setiap perusahaan akan berusaha untuk selalu meningkatkan kinerja karyawannya demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Untuk mencapai tujuan memerlukan karyawan yang mempunyai kinerja yang baik. Berbagai cara bisa ditempuh perusahaan dalam meningkatkan kinerja karyawannya diantaranya menciptakan budaya organisasi yang baik, pengembangan karir, dan efikasi diri. Ketiga variabel ini sangat berperan penting dalam meningkatkan kinerja karyawan.

Budaya organisasi (*corporate culture*) sering diartikan sebagai nilai-nilai, simbol-simbol yang dimengerti dan dipatuhi bersama, yang dimiliki suatu organisasi sehingga anggota organisasi merasa satu keluarga dan menciptakan suatu kondisi anggota organisasi

tersebut merasa berbeda dengan organisasi lain (Warididn dan Masrukhin , 2006 dalam Kusumawati, 2008).

Selanjutnya Robbins (2003) menyatakan bahwa pengertian budaya organisasi adalah sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi lain. Sistem makna bersama ini, bila diamati dengan lebih seksama, merupakan seperangkat karakteristik utama yang dihargai oleh suatu organisasi.

Organisasi yang berbudaya kuat akan mempengaruhi ciri khas tertentu sehingga dapat memberikan daya tarik bagi individu untuk bergabung. Setelah itu, individu itu dapat berfikir, bertindak dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai organisasi. Kesesuaian antara budaya organisasi dengan nilai-nilai yang

dimiliki oleh anggota organisasi akan menimbulkan kinerja yang baik, sehingga mendorong individu untuk bertahan pada satu perusahaan dan berkarir dalam jangka panjang (Kotter dan Heskett, 1992, dalam Sutanto, 2002).

Pengembangan karir mempengaruhi kinerja karyawan, dimana pengembangan karir merupakan pendekatan formal yang dilakukan organisasi untuk menjamin orang-orang dalam organisasi mempunyai kualifikasi dan kemampuan serta pengalaman yang cocok ketika dibutuhkan. Menurut Bambang Wahyudi (2002:161), pengembangan karir adalah setiap orang yang bekerja pada suatu perusahaan akan memiliki sejumlah harapan sebagai balas jasa atas pengorbanan atau prestasi yang telah diberikannya. Salah satu diantaranya adalah harapan untuk meraih posisi/jabatan yang lebih tinggi atau lebih baik dari posisi/jabatan sebelumnya. Menurut Handoko (2000:123), karir adalah “semua pekerjaan atau jabatan yang ditangani atau dipegang selama kehidupan kerja seseorang”.

Selain budaya organisasi dan pengembangan karir penting untuk peningkatan kinerja, juga perlu diperhatikan efikasi diri dari para karyawan. Efikasi diri adalah sebuah keyakinan tentang probabilitas bahwa seseorang dapat melaksanakan dengan sukses beberapa tindakan atau masa depan dan mencapai beberapa hasil.

Menurut Bandura (dalam Baron dan Byrne, 2004), efikasi diri mengarah pada keyakinan individu pada kemampuannya dalam mengatur dan melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai hasil yang harus dicapai. Dengan kata lain efikasi diri adalah berisikan evaluasi seseorang terhadap kemampuan atau kompetensinya untuk melakukan sebuah tugas, mencapai tujuan atau mengatasi hambatan. Sehingga konsep efikasi diri berkaitan dengan sejauh mana individu mampu memiliki kemampuan, potensi, serta kecenderungan yang ada pada dirinya untuk dipadukan menjadi tindakan tertentu dalam

mengatasi situasi yang mungkin akan dihadapi di masa yang akan datang.

PT. PLN (persero) UPJ Lombok Tengah adalah suatu perusahaan negara yang pengelolaannya ditujukan untuk melayani masyarakat. Sebagai perusahaan pemerintah, PLN dikategorikan sebagai perusahaan jasa kelistrikan yang mengandalkan kualitas pelayanan jasa yang diberikan pada masyarakat.

Sebagaimana sebuah perusahaan negara, PT. PLN (persero) UPJ Lombok Tengah banyak mendapat sorotan dari berbagai pihak mengenai efektivitas kerjanya dalam organisasi dan kualitas layanan yang diberikannya kepada masyarakat sehingga peningkatan kualitas dan efektivitas kerja menjadi sangat penting. Hal ini dapat dilihat dari seberapa besar tingkat efektivitas organisasi dalam melaksanakan fungsinya. Sebuah organisasi akan dapat bertahan hidup dan akan dapat berkembang apabila mampu beroperasi secara efektif. Oleh karena itu PT. PLN (persero) UPJ Lombok Tengah memposisikan karyawan berdasarkan penempatan kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Bagian karyawan dan populasi

No	Jenis Karyawan	Populasi	Persentase
1	Fungsional Ahli	12	15
2	Bag. Pemasaran dan Niaga	12	15
3	Bagian Perencanaan	8	10
4	Bagian Distribusi	27	33.75
5	Bagian Keuangan	12	15
6	Bagian SDM dan Administrasi	9	11.25
Jumlah Sampel		80	100

Sumber: PT. PLN (persero) UPJ Lombok Tengah

Untuk meningkatkan kinerja karyawan PT. PLN (persero) UPJ Lombok Tengah perlu adanya peningkatan budaya organisasi. Budaya organisasi di perusahaan merupakan faktor penting seperti upaya manajer menciptakan

lingkungan yang nyaman demi meningkatkan kinerja karyawannya. Selain itu, pengembangan karir yang disertai dengan efikasi diri yang kuat dari karyawan diintensifkan agar kinerja dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk meneliti tentang faktor-faktor dalam meningkatkan kinerja karyawan, seperti budaya organisasi, pengembangan karir dan efikasi diri yang dimiliki karyawan pada PT. PLN (Persero) UPJ Lombok Tengah.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, Permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah budaya organisasi berpengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan Jasa Lombok Tengah ?
2. Apakah pengembangan karir berpengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan Jasa Lombok Tengah ?
3. Apakah efikasi diri berpengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan Jasa Lombok Tengah ?
4. Apakah budaya organisasi, pengembangan karir, dan efikasi diri berpengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan Jasa Lombok Tengah ?

### LANDASAN TEORI

#### Pengertian Kinerja

Hasibuan (2002) menyatakan bahwa secara sederhana kinerja adalah apa yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh karyawan. Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. Kinerja ini adalah gabungan dari tiga faktor penting, yaitu

kemampuan dan minat seseorang pekerja, kemampuan dan penerimaan atas penjelasan delegasi tugas dan peran, serta tingkat motivasi seorang pekerja. Semakin tinggi ketiga faktor di atas maka semakin besar kinerja karyawan yang bersangkutan.

Sedangkan menurut Sedarmayati (2001), kegiatan yang paling lazim dinilai dalam organisasi adalah kinerja seseorang, yaitu bagaimana ia melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu jabatan, pekerjaan, atau peranan dalam organisasi. Kinerja berarti prestasi kerja, pelaksanaan kerja, p... an kerja atau hasil kerja untuk penamp... an kerja. Pengertian kinerja tersebut menunjuk pada hasil pelaksanaan pekerjaan karyawan. Dengan demikian, pencapaian hasil kerja yang baik berarti menunjukkan kinerja karyawan sudah baik dan berlaku sebaliknya.

Berdasarkan pengertian-pengertian yang dikemukakan oleh para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan perbandingan hasil kerja yang dicapai oleh karyawan dengan standar yang telah ditentukan. Kinerja juga berarti hasil yang dicapai oleh seseorang, baik kualitas maupun kuantitas dalam suatu organisasi sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.

#### Faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Kinerja dipengaruhi oleh berbagai factor baik yang berhubungan dengan tenaga kerja itu sendiri, maupun yang berhubungan dengan lingkungan perusahaan, masyarakat dan pemerintah secara keseluruhan. Hal tersebut didasarkan atas pernyataan Nawawi (2005) yang membuktikan bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, berdasarkan kecakapan (pengetahuan, ketrampilan/keahlian), pengalaman kerja, dan kepribadian (motivasi, minat, disiplin, kemampuan bekerjasama). Selain itu, Mangkunegara (2000) juga menjelaskan bahwa pencapaian kinerja dipengaruhi oleh factor kemampuan dan faktor motivasi.

### Indikator Kinerja

1. Indikator untuk mengukur kinerja karyawan secara individu ada enam indikator, yaitu (Robbins, 2006:260) :
2. Kualitas. Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan karyawan.
3. Kuantitas. Merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.
4. Ketepatan waktu. Merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain.
5. Efektivitas. Merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang, teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya.
6. Kemandirian. Merupakan tingkat seorang karyawan yang nantinya akan dapat menjalankan fungsi kerjanya.
7. Komitmen kerja. Merupakan suatu tingkat dimana karyawan mempunyai komitmen kerja dengan instansi dan tanggung jawab karyawan terhadap kantor.

### Budaya Organisasi

#### Pengertian Budaya Organisasi

Robbins (2006) menyatakan bahwa budaya organisasi merupakan suatu sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota organisasi yang membedakan organisasi itu dengan yang lain. Budaya organisasi adalah suatu system nilai yang diperoleh dan dikembangkan oleh organisasi dan pola kebiasaan dan falsafah dasar pendirinya, yang terbentuk menjadi aturan yang digunakan sebagai pedoman dalam berfikir dan bertindak dalam mencapai tujuan organisasi. Budaya yang tumbuh menjadi kuat mampu

memacu organisasi kearah perkembangan yang lebih baik.

Mangkunegara (2005) menyimpulkan pengertian budaya organisasi sebagai seperangkat asumsi atau system keyakinan, nilai-nilai, dan norma yang dikembangkan dalam organisasi yang dijadikan pedoman tingkah laku bagi anggota-anggotanya untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal.

#### Dimensi Budaya Organisasi

Jika suatu organisasi menerapkan budaya kuat maka itu akan mendorong terjadinya peningkatan keefektifan pada organisasi tersebut, menurut Robbins (2003:527), budaya yang kuat dicirikan oleh nilai inti dari organisasi yang dianut dengan kuat, diatur dengan baik, dan dirasakan bersama-sama secara luas.

Dibawah ini akan dijelaskan mengenai karakteristik yang merupakan nilai inti dari organisasi yang dapat membantu terciptanya budaya yang kuat. Dimana karakteristik tersebutlah yang membedakan suatu organisasi dengan organisasi lainnya.

#### Indikator Budaya Organisasi

Menurut Robbin (2003 : 721) budaya organisasi mengacu ke sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi itu dari organisasi-organisasi lain. Sistem makna bersama ini, bila diamati dengan seksama, merupakan seperangkat karakteristik utama yang dihargai oleh organisasi itu. Karakteristik primer dalam budaya organisasi pada hakikatnya adalah sebagai berikut

1. Inovasi dan pengambilan risiko, sejauh mana para karyawan didorong agar inovatif dan mengambil risiko.
2. Perhatian terhadap detail, sejauh mana para karyawan diharapkan memperlihatkan presisi (kecermatan), analisis, dan perhatian terhadap detail.
3. Orientasi hasil, sejauh mana manajemen memuaskan perhatian pada hasil bukannya

- pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil itu.
4. Orientasi orang, sejauh mana keputusan manajemen memperhitungkan dampak hasil-hasil pada orang-orang di dalam organisasi itu.
  5. Orientasi tim, sejauh mana kegiatan kerja diorganisasikan berdasarkan tim, bukannya berdasarkan individu.
  6. Keagresifan, sejauh mana orang-orang itu agresif dan kompetitif, bukannya santai-santai.

### **Pengembangan Karir**

#### **Pengertian Pengembangan Karir**

Pengembangan karir adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur kegiatan formal organisasi dalam mengembangkan pekerjanya dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan antara karir individu dengan jenjang karir yang ditentukan organisasi atau perusahaan. Setelah melalui suatu analisa jabatan yang ada bagi suatu awal posisi pekerjaan, maka langkah selanjutnya adalah adanya jabatan-jabatan berikutnya yang lebih tinggi. Jadi, salah satu dorongan pekerja bergabung atau bekerja pada suatu perusahaan adalah adanya kesempatan untuk maju dalam bentuk kemajuan atau keberhasilan pengembangan karir sesuai dengan kebutuhan karir.

Menurut Rivai dan Sagala (2009) pengembangan karir adalah proses peningkatan kemampuan kerja individu yang dicapai dalam rangka mencapai karir yang diinginkan. Dapat disimpulkan suatu pemahaman pengembangan karir adalah suatu proses berkesinambungan yang dilalui individu melalui upaya-upaya pribadi dalam rangka mewujudkan tujuan perencanaan karirnya yang disesuaikan dengan kondisi organisasi.

Dalam model manajemen karir yang baru, perusahaan berperan melalui Manajemen Karir Organisasional (*Organizational Career Management*) disingkat MKO (dalam Felicia, 2006). MKO dapat didefinisikan sebagai aktivitas dan kesempatan organisasi

(perusahaan) untuk menjamin agar manajer dan karyawan dapat memenuhi atau lebih memenuhi kebutuhannya dimasa depan. Praktik MKO meliputi perencanaan karir, jalur karir (*Career Path*), aktivitas pelatihan dan pengembangan, program pengembangan sasaran (*target*), promosi dari dalam, kebijakan staffing formal, criteria promosi standar, *assessment center*, *job posting*, *job matching*, *career counseling*, *out placement counseling*, dan mentor-protege relationship. Praktik-praktik dilakukan secara tepat dengan biaya yang efektif (*cost effective*) dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tersedianya tenaga kerja, kondisi keuangan, *values* manajemen puncak, lingkungan social ekonomi dan industri, dan strategi bisnis perusahaan.

#### **Indikator Pengembangan Karir**

Menurut Veitzhal Rivai (2008 : 290) indikator pengembangan karir adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan karir  
Pegawai harus merencanakan karirnya untuk masa yang akan datang.
2. Pengembangan karir individu  
Setiap pegawai harus menerima tanggung jawab atas perkembangan karir atau kemajuan karir yang dialami.
3. Pengembangan karir yang didukung oleh departemen SDM. Pengembangan karir pegawai tidak hanya tergantung pada pegawai tersebut tetapi juga pada peranan dan bimbingan manajer dan departemen SDM.
4. Peran umpan balik terhadap kinerja  
Tanpa umpan balik yang menyangkut upaya-upaya pengembangan karir maka relatif sulit bagi pegawai bertahun-tahun untuk persiapan yang kadang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan pengembangan karir. Umpan balik didalam usaha pengembangan karir pegawai mempunyai beberapa sasaran:

#### **Efikasi Diri**

#### **Pengertian Efikasi Diri**

Dalam kehidupan manusia memiliki efikasi diri itu merupakan hal yang sangat penting. Efikasi diri mendorong seseorang untuk memahami secara mendalam atas situasi yang dapat menerangkan tentang mengapa seseorang ada yang mengalami kegagalan dan atau yang berhasil. Dari pengalaman itu, ia akan mampu untuk mengungkapkan efikasi diri, yang menurut Kurniawan (2004) efikasi diri merupakan panduan untuk tindakan yang telah dikonstruksikan dalam perjalanan pengalaman interaksi sepanjang hidup individu. Efikasi diri yang berasal dari pengalaman tersebut yang akan digunakan untuk memprediksi perilaku orang lain dan memandu perilakunya sendiri.

Bandura (2001) mendefinisikan efikasi diri sebagai keyakinan seseorang dalam kemampuannya untuk melakukan suatu bentuk kontrol terhadap keberfungsian orang itu sendiri dan kejadian dalam lingkungan. Bandura beranggapan bahwa keyakinan atas efikasi seseorang adalah landasan dari agen manusia. Manusia yang yakin bahwa mereka dapat melakukan sesuatu yang mempunyai potensi untuk dapat mengubah kejadian dilingkungannya, akan lebih mungkin untuk bertindak dan lebih mungkin untuk menjadi sukses dari pada manusia yang mempunyai efikasi diri yang rendah.

Baron dan Byrne (2000) mengemukakan bahwa efikasi diri merupakan penilaian individu terhadap kemampuan atau kompetensinya untuk melakukan suatu tugas, mencapai suatu tujuan, dan menghasilkan sesuatu. Sedangkan, Feist & Feist (2002) menyatakan bahwa efikasi diri adalah keyakinan individu bahwa mereka memiliki kemampuan dalam mengadakan control terhadap pekerjaan mereka terhadap peristiwa lingkungan mereka sendiri.

#### **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efikasi Diri**

Menurut Bandura (1997) ada beberapa faktor yang mempengaruhi efikasi diri yaitu:

a. Pengalaman Keberhasilan. Keberhasilan yang sering didapatkan akan meningkatkan

efikasi diri yang dimiliki seseorang sedangkan kegagalan akan menurunkan efikasi dirinya. Apabila keberhasilan yang didapat seseorang lebih banyak karena faktor-faktor di luar dirinya, biasanya tidak akan membawa pengaruh terhadap peningkatan efikasi diri. Akan tetapi, jika keberhasilan tersebut didapatkan dengan melalui hambatan yang besar dan merupakan hasil perjuangannya sendiri, maka hal itu akan membawa pengaruh pada peningkatan efikasi diri.

b. Pengalaman Orang Lain. Pengalaman keberhasilan orang lain yang memiliki kemiripan dengan individu dalam mengerjakan suatu tugas biasanya akan meningkatkan efikasi diri seseorang dalam mengerjakan tugas yang sama. Efikasi diri tersebut didapat melalui social models yang biasanya terjadi pada diri seseorang yang kurang pengetahuan tentang kemampuan dirinya sehingga mendorong seseorang untuk melakukan modeling. Namun efikasi diri yang didapat tidak akan terlalu berpengaruh bila model yang diamati tidak memiliki kemiripan atau berbeda dengan model.

c. Persuasi Sosial. Informasi tentang kemampuan yang disampaikan secara verbal oleh seseorang yang berpengaruh biasanya digunakan untuk meyakinkan seseorang bahwa ia cukup mampu melakukan suatu tugas.

d. Keadaan fisiologis dan emosional. Kecemasan dan stress yang terjadi dalam diri seseorang ketika melakukan tugas sering diartikan sebagai suatu kegagalan. Pada umumnya seseorang cenderung akan mengharapkan keberhasilan dalam kondisi yang tidak diwarnai oleh ketegangan dan tidak merasakan adanya keluhan atau gangguan perubahan lainnya. Efikasi diri biasanya ditandai oleh rendahnya tingkat stress dan kecemasan sebaliknya efikasi diri yang rendah ditandai oleh tingkat stress dan kecemasan yang tinggi pula.



### Indikator Efikasi Diri

Menurut Smith, dkk (dalam Sya'dullah, 2011:17) indikator dari efikasi diri mengacu pada dimensi efikasi diri yaitu *level*, *strength*, dan *generality*, dengan melihat tiga dimensi ini maka terdapat beberapa indikator dari efikasi diri yaitu:

- Yakin dapat melakukan tugas tertentu, individu yakin dapat melakukan tugas tertentu yang mana individu sendirilah yang menetapkan tugas (target) apa yang harus diselesaikan.
- Yakin dapat memotivasi diri untuk melakukan tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas.
- Yakin bahwa individu mampu berusaha dengan keras, gigih dan tekun dalam rangka menyelesaikan tugas dengan menggunakan segala daya yang dimiliki.
- Yakin bahwa dirinya mampu bertahan menghadapi hambatan dan kesulitan yang muncul serta mampu bangkit dari kegagalan.
- Yakin dapat menyelesaikan permasalahan diberbagai situasi atau kondisi.

### METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif :

Menurut Nazir (2005:54), metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu situasi kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Jenis penelitian deskriptif ini merupakan penelitian yang ditujukan untuk meneliti suatu objek yaitu PT. PLN (Persero) UPJ Lombok Tengah yang bertujuan untuk mendiskripsikan pengaruh budaya organisasi, pengembangan karir, dan efikasi diri terhadap kinerja

karyawan PT. PLN (Persero) UPJ Lombok Tengah.

### Tehnik Pengumpulan Data

Data penelitian ini diperoleh dengan cara kuesioner, yaitu dengan cara membagikan pertanyaan kepada responden untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian yaitu variabel budaya organisasi, pengembangan karir, efikasi diri, dan kinerja karyawan.

### Populasi

Sugiyono (2009:116) menyatakan, populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang akan diteliti yang mana memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT. PLN (Persero) UPJ Lombok Tengah sebanyak 80 karyawan.

### Sampel

Dalam penelitian ini menggunakan metode sensus, yaitu pengambilan jumlah responden diambil dari seluruh anggota populasi (Suparmoko,1999), jumlah 80 karyawan pada PT. PLN (Persero) UPJ Lombok Tengah. Namun untuk mengantisipasi dalam pengembalian kuesioner, maka menggunakan batas minimum sampel dalam data yang dianalisis.

### Teknik Pengambilan Sampel

Sampel yang diambil untuk penelitian ini adalah karyawan PT. PLN (Persero) UPJ Lombok Tengah dengan menggunakan metode penentuan besarnya sampel dengan menggunakan metode Slovin dengan rumus sebagai berikut (Umar, 2003: 108):

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

Keterangan :

n: Ukuran sampel

N: Ukuran populasi

E: Presentase kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditoleransi atau yang diinginkan.

Dengan menggunakan presentase

kelonggaran (5 persen) maka dari populasi sebanyak 80 orang diperoleh ukuran sampel sebesar :

$$n = \frac{80}{1+80(0.05)^n} = 66,66$$

dibulatkan menjadi 67 responden.

Jadi sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 67 orang karyawan PT. PLN (Persero) UPJ Lombok Tengah.

**Identifikasi Variabel**

Adapun variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kinerja Karyawan (Y)
- b. Budaya Organisasi (X1)
- c. Pengembangan Karir (X2)
- d. Efikasi Diri (X3)

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil Penelitian**

**Distribusi Jawaban Responden Terhadap Variabel-variabel Penelitian**

1) Variabel Budaya Organisasi (X1)

Distribusi jawaban responden terhadap variabel budaya organisasi (X1) dalam penelitian ini diukur melalui jawaban responden atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan berdasarkan indikator variabel. Distribusi data jawaban responden yang berjumlah 67 orang terhadap variabel budaya organisasi (X1) dapat dilihat pada tabel 4.6 dibawah ini.

Tabel 2. Jumlah distribusi jawaban responden terhadap variabel budaya organisasi

No.	Jawaban	Sko	Frekue	Juml	Presentase
1	SangatSetuju	5	93	465	19,83
2	Setuju	4	268	1072	57,14
3	Netral	3	75	225	15,99
4	Tidak Setuju	2	33	66	7,04
5	Sangat Tidak	1	0	0	0
J			469	1828	100

Sumber : data primer diolah

Tabel diatas menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap variabel budaya organisasi pada karyawan PT. PLN (Persero) UPJ Lombok Tengah secara umum setuju. Hal

tersebut dibuktikan dengan total skor yang tinggi dari jawaban responden pada kategori setuju dengan total skor 1072 atau 57,14 persen dan sangat setuju dengan total skor 465 atau 19,83. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa secara umum karyawan PT. PLN (Persero) UPJ Lombok Tengah setuju dengan budaya organisasi yang terdapat di perusahaan.

2) Variabel Pengembangan Karir (X2)

Distribusi jawaban responden terhadap variabel pengembangan karir (X2) dalam penelitian ini diukur melalui jawaban responden atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan berdasarkan indikator variabel. Distribusi data jawaban responden yang berjumlah 67 orang terhadap variabel pengembangan karir (X2) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel .3 Distribusi jawaban responden terhadap variebel pengembangan karir

N o.	Jawaban	Sk or	Freku ensi	Juml ah	Presentas e (%)
1	Sangat	5	67	335	20,00
2	Setuju	4	170	680	50,75
3	Netral	3	86	258	25,67
4	Tidak Setuju	2	12	24	3,58
5	Sangat Tidak	1	0	0	0
Jumlah			335	129	100

Sumber : data primer diolah

Tabel diatas menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap variable pengembangan karir pada karyawan PT. PLN (Persero) UPJ Lombok Tengah secara umum setuju. Hal tersebut dibuktikan dengan total skor yang tinggi dari jawaban responden pada kategori setuju dengan total skor 680 atau 50,75 persen. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa secara umum karyawan PT. PLN (Persero) UPJ Lombok Tengah menyetujui dengan adanya pengembangan karir dalam perusahaannya.

3) Variabel Efikasi Diri (X3)

Distribusi jawaban responden terhadap variabel efikasi diri (X3) dalam penelitian ini diukur melalui jawaban responden atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan berdasarkan indikator variable. Distribusi data jawaban responden yang berjumlah 67 orang terhadap variabel efikasi diri (X3) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. Distribusi jawaban responden terhadap variabel efikasi diri

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	Jumlah	Presentase (%)
1	Sangat	5	57	285	21,27
2	Setuju	4	171	684	63,81
3	Netral	3	32	96	11,94
4	Tidak Setuju	2	8	16	2,98
5	Sangat Tidak	1	0	0	0
Jumlah			268	1081	100

Sumber : data primer diolah

Tabel diatas menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap variabel efikasi diri pada karyawan secara umum setuju. Hal tersebut dibuktikan dengan total skor yang tinggi dari jawaban responden pada kategori setuju dengan total skor 684 atau 63,81 persen. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa secara umum karyawan PT. PLN (Persero) UPJ Lombok Tengah mempunyai rasa efikasi diri terhadap tugas-tugas yang diberikan dari perusahaannya.

4) Variabel Kinerja Karyawan (Y)

Distribusi jawaban responden terhadap variabel kinerja karyawan (Y) dalam penelitian ini diukur melalui jawaban responden atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan berdasarkan indikator variabel. Distribusi data jawaban responden yang berjumlah 67 orang terhadap variabel kinerja karyawan (Y) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5. Distribusi jawaban responden terhadap variabel kinerja karyawan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	Jumlah	Presentase (%)
1	Sangat Setuju	5	143	715	35,58
2	Setuju	4	235	940	58,46
3	Netral	3	20	60	4,97
4	Tidak Setuju	2	4	8	0,99
5	Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0
Jumlah			402	1723	100

Sumber : data primer diolah

Tabel diatas menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap variabel kinerja pada karyawan PT. PLN (Persero) UPJ Lombok Tengah secara umum setuju. Hal tersebut dibuktikan dengan total skor yang tinggi pada kategori setuju dengan total skor 940 atau 58,46 persen. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa secara umum karyawan PT. PLN (Persero) UPJ Lombok Tengah mempunyai kinerja yang baik dalam bekerja.

**Analisa Regresi Linier Berganda dan Determinasi Berganda**

1. Analisa Regresi Linier Berganda

Tabel 6. Analisa Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	$\beta$	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.185	.434		2.730	.008
X1	.270	.103	.277	2.622	.011
X2	.213	.084	.269	2.539	.014
X3	.304	.088	.347	3.459	.001

Berdasarkan hasil perhitungan regresi linier berganda dalam tabel tersebut di atas

diperoleh persamaan:

$$Y = 1,185 + 0,270X_1 + 0,213X_2 + 0,304X_3 + e$$

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Konstanta sebesar 1,185 menunjukkan besarnya kinerja pegawai pada PT. PLN (Persero) UPJ Lombok Tengah jika tidak ada pengaruh budaya organisasi, pengembangan karir, dan efikasi diri.
- b. Koefisien regresi budaya organisasi sebesar 0,270 artinya jika nilai budaya organisasi mengalami peningkatan sebesar 1, maka nilai kinerja karyawan akan meningkat sebesar 0,270.
- c. Koefisien regresi pengembangan karir sebesar 0,213 artinya jika nilai pengembangan karir mengalami peningkatan sebesar 1, maka nilai kinerja karyawan akan meningkat sebesar 0,213.
- d. Koefisien regresi efikasi diri sebesar 0,304 artinya jika nilai efikasi diri mengalami peningkatan sebesar 1, maka nilai kinerja karyawan akan meningkat sebesar 0,213.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa variabel efikasi diri merupakan variabel bebas yang berpengaruh secara dominan terhadap kinerja karyawan pada PT. PLN (Persero) UPJ Lombok Tengah dengan nilai koefisien *beta* ( $\beta$ ) paling tinggi sebesar 0,304.

**Pengujian Hipotesis**

1) Uji F

Tabel 7. Hasil Uji F (Pengujian Secara Simultan)

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	6.675	3	2.225	17.599	.000 <sup>b</sup>
Residual	7.965	63	.126		
Total	14.641	66			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $17.599 > 2.742$ ) maka  $H_0$  di tolak dan  $H_a$  diterima, artinya ada pengaruh secara signifikan antara variabel independent (budaya organisasi, pengembangan karir, dan efikasi diri) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependent (kinerja karyawan) pada PT. PLN (Persero) UPJ Lombok Tengah.

2) Uji t

Hasil uji t dapat dilihat dari *output coefficients* dari hasil regresi berganda berikut ini :

Tabel 8. Hasil Uji t (Pengujian Secara Parsial)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.185	.434		2.730	.008
1 X1	.270	.103	.277	2.622	.011
X2	.213	.084	.269	2.539	.014
X3	.304	.088	.347	3.459	.001

a. Dependent Variable: Y

Pada tabel diatas dapat dijelaskan dari masing-masing variabel yaitu sebagai berikut:

1. Pengaruh Variabel Budaya Organisasi (X<sub>1</sub>) terhadap Kinerja Karyawan (Y)

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih kecil dari t tabel yaitu  $2,622 < 2,651$  dengan probabilitas sebesar  $0,011 < 0,05$ . Artinya bahwa variabel budaya organisasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.

2. Pengaruh Variabel Pengembangan Karir (X<sub>2</sub>) terhadap Kinerja Karyawan (Y)

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih kecil dari t tabel yaitu  $2,539$

$< 2,651$  dengan probabilitas sebesar  $0,014 < 0,05$ . Artinya bahwa variabel pengembangan karir secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.

3. Pengaruh Variabel Efikasi Diri ( $X_3$ ) terhadap Kinerja Karyawan (Y) Dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai  $t$  hitung lebih besar dari  $t$  tabel yaitu  $3,459 > 2,651$  dengan probabilitas sebesar  $0,001 < 0,05$ . Artinya bahwa variabel efikasi diri secara parsial berpengaruh signifikan yang dominan terhadap kinerja karyawan.

## PEMBAHASAN

Setelah data yang diperoleh dan dianalisis dengan menggunakan alat analisis regresi linier berganda dalam metode SPSS *release V.20.0* dapat dijelaskan bahwa budaya organisasi, pengembangan karir, dan efikasi diri secara simultan atau bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan di PT. PLN (Persero) UPJ Lombok Tengah. Hal ini ditunjukkan oleh hasil uji-F, dimana nilai  $F_{hitung}$  sebesar 17,599 dan  $F_{tabel}$  sebesar 2,742. Dari hasil perhitungan juga diperoleh tingkat signifikan sebesar 0.000 lebih kecil dari koefisien probabilitasnya 0.05. Sehingga  $F_{hitung} > F_{tabel}$  dan tingkat signifikan kurang dari 5 persen, maka  $H_0$  ditolak.

Kemudian dari hasil pengujian secara parsial (uji-t) diketahui bahwa variabel budaya organisasi ( $X_1$ ) dan pengembangan karir ( $X_2$ ) berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. PLN (Persero) UPJ Lombok Tengah dimana  $t_{hitung}$  sebesar 2.622 dan 2.539 lebih kecil dari  $t_{tabel}$  sebesar 2.651 dengan probabilitas sebesar 0,011 dan 0,014 lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ . Sedangkan variabel efikasi diri ( $X_3$ ) secara parsial berpengaruh signifikan yang dominan terhadap variabel kinerja (Y) karena diketahui bahwa  $t_{hitung}$  sebesar 3,459 lebih besar dari  $t_{tabel}$  yaitu sebesar 2,651 dengan probabilitasnya sebesar 0,001 lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ . Dengan tidak dominannya signifikansi variabel budaya organisasi dan pengembangan karir tersebut,

berarti masih membutuhkan penerapan yang optimal.

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan tentang pengaruh budaya organisasi ( $X_1$ ), pengembangan karir ( $X_2$ ), dan efikasi diri ( $X_3$ ) terhadap kinerja karyawan (Y) PT. PLN (Persero) UPJ Lombok Tengah sebagai berikut:

1. Variabel budaya organisasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT. PLN (Persero) UPJ Lombok Tengah.
2. Variabel pengembangan karir secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT. PLN (Persero) UPJ Lombok Tengah.
3. Variabel efikasi diri secara parsial berpengaruh signifikan yang dominan terhadap kinerja karyawan PT. PLN (Persero) UPJ Lombok Tengah.
4. Variabel budaya organisasi, pengembangan karir, dan efikasi diri secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan Jasa Lombok Tengah.

### Saran

1. PT. PLN (Persero) UPJ Lombok Tengah perlu memperhatikan variabel budaya organisasi karena karyawan yang memiliki budaya organisasi yang tinggi memiliki kinerja yang tinggi pula. Untuk meningkatkan kinerja pada karyawan dengan budaya organisasi yang tinggi perusahaan harus tetap mempertahankan atau memperbaharui di masa yang akan datang yang disesuaikan dengan perubahan kondisi yang ada dalam perusahaan. Sebaiknya pembentuk budaya organisasi melalui pendekatan interaktif, yaitu seluruh individu yang ada dalam perusahaan secara bersama-sama

- untuk merumuskan suatu model budaya organisasi yang ideal dan cocok dengan visi, misi, dan tujuan perusahaan. Pendekatan ini sangat cocok untuk digunakan karena memiliki resiko kegagalan yang minimal dan mengakomodasikan semua pikiran, nilai-nilai, norma-norma, dan kepentingan dari masing-masing pihak dalam organisasi yang memiliki kepentingan berbeda-beda.
2. PT. PLN (Persero) UPJ Lombok Tengah perlu memperhatikan variabel pengembangan karir karena pengembangan karir terbukti mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan. Pengembangan karir dapat ditingkatkan dengan memperhatikan jalur karir setiap karyawan dengan baik sehingga memberikan kesempatan karir kepada karyawan yang lebih memilih untuk menekuni kapabilitasnya melalui sebuah pembinaan. Memberikan dukungan kepada karyawan yang potensial untuk selalu meningkatkan kapabilitasnya dengan menciptakan situasi kerja yang kondusif juga perlu dilakukan, agar karyawan meraih kinerja yang optimal.
  3. PT. PLN (Persero) UPJ Lombok Tengah perlu mempertahankan, memperhatikan dan meningkatkan variabel efikasi diri karena terbukti mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja. Karyawan yang memiliki efikasi diri yang tinggi tentu memiliki kinerja yang tinggi pula. Untuk meningkatkan efikasi diri yaitu dengan memperhatikan tingkat keahlian setiap karyawan yang dimiliki dengan memberikan tantangan pada setiap pekerjaan yang dihadapi. Memberikan arahan, berbagi pengalaman, fasilitas, dan panutan untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif dan efisien juga dapat meningkatkan efikasi diri karyawan.
- [1] Ahmad Arfah, Mislich Anshory. 2002. Pengaruh Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kinerja Dan Kepuasan Kerja Karyawan (Study Pada Perusahaan Air Minum di Batam). *Majalah Ekonomi*, tahun XV, No. 3A.
  - [2] Agung, A.M., Lilik., 2007. Dari Budaya Perusahaan ke Budaya Kerja, dalam buku *Corporate Culture, Challenge to Excellence*, editor Moeljono, D., Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
  - [3] A.A. Anwar Prabu Mangkunegara (2000), *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
  - [4] Bandura, A., 1977. Self-efficacy : Toward A Unifying Theory of Behavioral Change. *Psychology Review*, 84, 191-215.
  - [5] Baron, R.A. & Byrne, P., 1994. *Social Psychology: Understanding Human Interaction*. Boston: Allyn and Bacon Inc.
  - [6] Chasanah, Nur. 2008. Analisis Pengaruh Empowerment, Self-Efficacy dan Budaya Organisasi terhadap Kepuasan Kerja Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawa (Studi Empiris pada Karyawan PT. Mayora Tbk Regional Jateng dan DIY). Tesis Program Pasca Sarjana UNDIP. (Tidak dipublikasikan).
  - [7] Dessler, G., 2000, *Human Resource Management (eighth edition)*, Prentice Hall, New Jersey
  - [8] Feist, J. & Feist, G.J., 2002. *Theories of Personality (5<sup>th</sup> ed)*. Boston: McGraw Hill.
  - [9] Gibson, J.,L, Konopaske,R., 2003. *Organizations: Behavior, Structure, Process, 11<sup>th</sup> ed*, International Edition, New York: McGraw Hill/Irwin.
  - [10] Ghozali, Imam., 2005. *Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Cetakan keempat. Undip, Semarang.
  - [11] Handayani, Wiwik. 2008. Dampak Komitmen Organisasi, Self-Efficacy

## DAFTAR PUSTAKA

- Terhadap Konflik Peran dan Kinerja Karyawan PT. HM SAMPOERNA, Tbk Di Surabaya. *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 8, No. 2, September 2008.
- [12] Handoko, T. Hani. 2001. *Manajemen Personalialia dan Sumber Daya Manusia*. Edisi kedua, BPFE, Yogyakarta.
- [13] Hasibuan, H. Malayu, S.P., 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara. Jakarta.
- [14] Kusumawati, R. 2008. *Analisis Pengaruh Budaya Organisasi dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kepuasan Kerja Untuk Meningkatkan Kinerja Karyawan (Studi Kasus pada RS. Roemani Semarang)*. Tesis Program Pasca Sarjana UNDIP. (Tidak dipublikasikan).
- [15] Majer, K, 2006. *Values Based Leadership, Kepemimpinan Berbasis Nilai*, Edisi Bahasa Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- [16] Mangkunegara, A.A.Anwar Prabu. 2005. *Evaluasi Kinerja SDM*. Cetakan kedua. Bandung : PT. Refika Aditama.
- [17] Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*, Cetakan keenam, Penerbit Balai Pustaka, Gahlia Indonesia : Jakarta.
- [18] Rivai, V. & Sagala, E. J., 2009, *Manajemen Sumber daya Manusia Untuk Perusahaan: Dari Teori ke Praktik*. (Edisi II), PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- [19] Robbins, S.P. and Coulter, M. 1996. **Management (5th ed.)**, New Jersey, Prentice Hall, Inc.
- [20] Sedarmayati. 2001. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Mandar Maju. Bandung.
- [21] Sigit, S., 2003. *Perilaku Organisasional*, Yogyakarta: BPFT Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
- [22] Sinaga, Mangarissan. 2008. *Analisis Pengaruh Budaya Organisasi dan Reward Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Soelong Laoet Medan*. Sekolah Pasca Sarjana USU. (tidak dipublikasikan).
- [23] Simamora, H., 2004, *Manajemen Sumber Daya Manusia (edisi III)*.
- [24] Sudarmadi. 2007. *Analisis Pengaruh Budaya Organisasi dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Karyawan (Studi Empiris: Karyawan Administratif Universitas Semarang)*. Program Pasca Sarjana UNDIP. (tidak dipublikasikan).
- [25] Sugiyono., 2009. *Statistika Untuk Penelitian*. CV. Alfabeta. Bandung.
- Suliyanto. 2009. *Modul Ekonometrika*. Unsoed.
- [26] Sugiyono., 2008, “*Metode Penelitian Bisnis*”, Cetakan Kedua belas, Bandung, Alfabeta.
- [27] Tjitra, H., 2007. *Mencapai Sukses Permanen Melalui Budaya Organisasi*, di dalam buku *Corporate Culture, Challenge to Excellence*, editor: Moeljono, D., Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- [28] Watimena, Abubakar. 2007. *Pengaruh Motivasi, Perilaku Pemimpin, dan Kesempatan Pengembangan Karier Terhadap Kinerja Karyawan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Biak Papua*. *Jurnal Eksekutif*, Vol4, No 3, Desember 2007.
- [29] Wibowo, F. Dewi. 2006. *Analisis Pengaruh Peran Kepemimpinan dan Pengembangan Karir Terhadap Komitmen Organisasi Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan (Studi Kasus: PT. Bank Maspion Indonesia Cabang Semarang)*. Program Pasca Sarjana UNDIP. (Tidak dipublikasikan).
- [30] Wutun, R.,F., 2004. *Sistem Nilai dan Praktik-Praktik Organisasi Perusahaan .X.*, di dalam buku *Peran Budaya Organisasi dalam Meningkatkan Unjuk Kerja Perusahaan*, Jakarta: Bagian Psikologi Industri & Organisasi, Universitas Indonesia.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN



**FAKTOR RISIKO MUSKULOSKELETAL DISORDERS (MSDS) PADA PEKERJA  
PENYORTIR SAMPAH DI UPTD PENGELOLAAN SAMPAH TALANG GULO**

Oleh

Rahmat Faisal<sup>1)</sup>, Rara Marisdayana<sup>2)</sup>, Eti Kurniawati<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Kesehatan Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Harapan Ibu  
Jambi, Indonesia

E-mail: [rahmatfaisal915@gmail.com](mailto:rahmatfaisal915@gmail.com)

*Abstract*

Musculoskeletal is a problem caused by stretching of the muscles and skeleton, if not treated immediately, it will interfere with concentration at work, causing fatigue and ultimately reducing productivity. The research design used was cross sectional. The sample of the study was 26 people in the waste sorting unit at the UPTD Talang Gulo waste management. The research instrument is a questionnaire. Data were analyzed using Kendall's tau-b correlation statistic test. The results showed that there was a significant correlation between attitudes ( $p=0.026$ ), repetitive activities ( $p=0.007$ ) with complaints of musculoskeletal disorders (MSDs) in the waste sorter workers at the UPTD for waste management in Talang Gulo. There was no relationship between age ( $p=0.894$ ) and complaints of musculoskeletal disorders (MSDs) in waste sorting workers at the UPTD for waste management in Talang Gulo. From these results, it can be concluded that the complaints of musculoskeletal disorders in the waste sorter workers at the UPTD Talang Gulo waste management are related to repetitive attitudes and activities. It is recommended for workers to pay attention to body posture when working according to ergonomic principles, then when working it is necessary to pay attention to body posture so that they can work comfortably, so that work attitudes do not risk the occurrence of musculoskeletal disorders.

**Keywords:** Musculoskeletal Disorders (Msd), Attitude, Age, Repetitive Activities

**PENDAHULUAN**

Muskuloskeletal merupakan permasalahan yang diakibatkan adanya peregangan pada otot dan rangka. Muskuloskeletal dapat mengakibatkan *single incident* dan *cumulative effect* trauma. Keluhan *Musculoskeletal Disorders* (MSDs) jika tidak segera diatasi atau dilakukan penanganan segera akan mengganggu konsentrasi dalam bekerja, menyebabkan kelelahan dan pada akhirnya akan menurunkan produktivitas. Dampak yang diakibatkan oleh *Musculoskeletal Disorders* (MSDs) pada aspek produksi yaitu berkurangnya output, kerusakan material produk yang hasil akhirnya mengakibatkan tidak terpenuhinya deadline produksi serta pelayanan yang tidak memuaskan. Selain itu, biaya yang ditimbulkan akibat absensi atau tidak masuknya pekerja

akan menimbulkan penurunan keuntungan. (Evadariato & Endang, 2017)

Keluhan muskuloskeletal disebabkan oleh beberapa faktor. Sikap kerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya keluhan *muskuloskeletal disorders* pada pekerja. Sikap kerja tidak alamiah adalah sikap kerja yang menyebabkan posisi bagian-bagian tubuh bergerak menjauhi posisi alamiah, misalnya pergerakan tangan terangkat, punggung terlalu membungkuk, kepala terangkat, dsb (Tarwaka, 2019). Faktor lain yang mempengaruhi keluhan muskuloskeletal disorders adalah aktivitas berulang. Aktivitas berulang adalah pekerjaan yang dilakukan secara terus menerus seperti pekerjaan mencangkul, membelah kayu besar, angkat-angkut dsb. Keluhan otot terjadi karena otot menerima tekanan akibat beban kerja secara

terus menerus tanpa memperoleh kesempatan untuk relaksasi (Tarwaka, 2019).

Faktor individu yang mempengaruhi keluhan muskuloskeletal disorders adalah usia. Keluhan otot skeletal mulai dirasakan pada usia kerja, yaitu 25-65 tahun. Keluhan pertama biasanya dirasakan pada umur 35 tahun dan tingkat keluhan akan terus meningkat sejalan dengan bertambahnya umur. Hal ini terjadi karena pada umur setengah baya, kekuatan dan ketahanan otot mulai menurun sehingga resiko terjadinya keluhan otot meningkat (Tarwaka et al, 2004).

Penelitian Asti (2018) menunjukkan prevalensi keluhan *Musculoskeletal Disorders* dirasakan oleh 51 pekerja (65,4%). Adapun hasil uji statistik menunjukkan bahwa variabel umur ( $p=0,001<0,05$ ), variabel masa kerja ( $p=0,001<0,05$ ), variabel berat beban ( $p=0,023<0,05$ ) dan variabel sikap kerja ( $p=0,000<0,05$ ). Sehingga dapat disimpulkan bahwa umur, masa kerja, berat beban dan sikap kerja mempunyai hubungan dengan keluhan muskuloskeletal disorders. (Asti, 2018). Penelitian Taufik et al (2018) menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *Musculoskeletal Disorders* pada perawat di rumah sakit umum sari mutiara medan yaitu jenis kelamin ( $p=0,002$ ), masa kerja ( $p=0,049$ ), dan sikap kerja ( $p=0,000$ ) (Taufik, Ketaren, & Salmah, 2018)

Pekerja penyortir sampah di UPTD pengelolaan sampah Talang Gulo merupakan salah satu pekerjaan yang berisiko mengalami keluhan muskuloskeletal disorders. Berdasarkan survei pendahuluan yang penulis lakukan terhadap 5 orang pekerja menunjukkan bahwa rata-rata pekerja penyortir sampah di UPTD pengelolaan sampah berusia 40-50 tahun. Hasil perhitungan sikap kerja menggunakan REBA menunjukkan 5 orang pekerja penyortir sampah memiliki sikap kerja risiko sangat tinggi terhadap keluhan MSDs. 2 pekerja melakukan aktivitas berulang 5 kali dalam 1 menit, 1 pekerja dengan 8 kali pemanit,

1 pekerja dengan 1 kali pemanit, dan 1 pekerja dengan 13 kali pemanit.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “faktor risiko *musculoskeletal disorders (MSDs)* pada pekerja sortir di UPTD Pengelolaan Sampah Talang Gulo.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan rancangan penelitian *cross sectional*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor risiko keluhan *Musculoskeletal Disorders (MSDs)* pada pekerja sortir di UPTD Pengelolaan Sampah Talang Gulo. Penelitian dilakukan di UPTD pengelolaan sampah Talang Gulo kota Jambi pada tanggal 12-23 Agustus tahun 2021. Sampel penelitian adalah pekerja penyortir sampah di UPTD pengelolaan sampah Talang Gulo sebanyak 26 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *total sampling*. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner. Teknik pengumpulan data dengan kuesioner melalui wawancara. Data dianalisis menggunakan uji statistik korelasi dan *man whitney*

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 88,5% responden memiliki sikap kerja risiko tinggi, rata-rata aktivitas berulang yang dilakukan oleh responden saat bekerja adalah 17,5 kali, rata-rata umur responden adalah 40,31 tahun dan 76,9% responden mengalami keluhan muskuloskeletal disorders risiko tinggi (tabel 1).

Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa ada hubungan antara sikap kerja ( $p\text{-value}=0,026$ ) dan aktivitas berulang ( $p\text{-value}=0,007$ ) terhadap keluhan muskuloskeletal disorders. Tidak ada hubungan antara umur ( $p=0,894$ ) dengan keluhan muskuloskeletal disorders (Tabel 2).

Tabel 1. Gambaran Sikap Kerja, Umur, Aktivitas Berulang dan Keluhan Muskuloskeletal Disorders

Variabel	Frekuensi	Persentase
Sikap Kerja		
Risiko Sedang	3	11,5
Risiko Tinggi	23	88,5
Umur		
Rata-rata	40,31	
Standar Deviasi	2,632	
Minimal	20	
Maksimal	60	
Aktivitas Berulang		
Rata-rata	17,5	
Standar Deviasi	5,887	
Minimal	8	
Maksimal	29	
Muskuloskeletal Disorders		
Risiko Sedang	6	23,1
Risiko Tinggi	20	76,9

Tabel 2. Hubungan Sikap Kerja, Umur, Aktivitas Berulang dengan Keluhan Muskuloskeletal Disorders

Variabel		n	r	p-value
Sikap Kerja	Keluhan Muskuloskeletal	26	-0,335	0,026
Umur	Keluhan Muskuloskeletal	26	-0,020	0,894
Aktivitas Berulang	Keluhan Muskuloskeletal	26	0,393	0,007

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara sikap kerja dengan keluhan muskuloskeletal disorders pada pekerja penyortir sampah ( $p=0,026$ ). Grandjen dalam (Eka Rosanti, Mochammad Iqbal F, Ratih Andhika A R, 2020) menunjukkan bahwa sikap kerja tidak alamiah terjadi karena ketidaksesuaian antara tenaga kerja dengan desain stasiun kerja. Responden pada saat bekerja dengan sikap yang tidak ergonomis. Hal tersebut dikarenakan pada saat menjangkau sampah responden bekerja dengan sikap kerja yang membungkuk dan dilakukan dalam waktu yang lama sehingga berisiko untuk mengalami keluhan muskuloskeletal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Tarwaka (2019) postur kerja yang tidak alamiah saat bekerja dapat menyebabkan cedera pada tulang leher belakang, bahu, pergelangan tangan dan lain-lain. Sikap kerja tidak alamiah dapat menyebabkan bagian tubuh bergerak menjauhi posisi alamiah. Semakin jauh posisi bagian tubuh dari pusat gravitasi, maka risiko keluhan MSDs semakin meningkat (Tarwaka, 2019).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Asti (2018) yang menyatakan bahwa ada hubungan antara sikap dengan dengan keluhan muskuloskeletal ( $p=0,000$ ) (Asti, 2018). Penelitian Taufik et al (2018) juga menunjukkan bahwa ada hubungan antara sikap kerja dengan keluhan *muskuloskeletal disorders* ( $p=0,000$ ) (Taufik et al., 2018).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara umur dengan keluhan muskuloskeletal disorders ( $p=0,894$ ). Hasil penelitian ini sejalan dengan (Zulhijjah, 2021) tentang Faktor Yang Berhubungan Dengan Keluhan Muskuloskeletal Disorders Pada Pekerja PT. PLN (Persero) Unit Layanan Transmisi Dan Gardu Induk Jenepono bahwa tidak ada hubungna umur terhadap Keluhan Muskuloskeletal Disorders dengan *p-value* 0,628. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan (Rahayu, 2017) menunjukkan bahwa tidak ada hubungan Usia Terhadap Keluhan Muskuloskeletal Disorders Pada Sopir Bus dengan *p-value* 0,618.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh (Ramdan & Laksmono, 2012) Umur tenaga kerja tidak berhubungan dengan keluhan gangguan muskuloskeletal dengan *p-value* 0,066. Pada saat penelitian peneliti menemukan responden penyortir yang bekerja di talang gulo rentang usia 20 sampai 60 tahun. Dalam penelitian ini dapat dimengerti karena sebagai besar responden berada pada usia di bawah 35 tahun. Keluhan otot skeletal biasanya dialami orang pada usia kerja, 24 – 65 tahun, keluhan pertama dialami pada usia 35 tahun dan tingkat keluhan akan meningkat seiring dengan penambahan umur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara aktivitas berulang dengan keluhan muskuloskeletal ( $p=0,007$ ). Hasil penelitian ini sejalan dengan (Wijayanti, 2020) Hasil uji regresi linier berganda menunjukkan gerakan berulang berhubungan dengan keluhan muskuloskeletal dengan nilai *p value* 0.000. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan (Saputra et al., 2020) Hasil uji statistik

menggunakan chi- square pada penelitian ini didapatkan nilai  $p = 0,040$  ( $p < 0,05$ ) artinya ada hubungan antara aktifitas berulang dengan keluhan musculoskeletal.

Berdasarkan hasil wawancara aktifitas berulang yang beresiko mengalami keluhan disebabkan beban kerja yang dilakukan, postur kerja yang salah dan pekerja melakukan pekerjaan seringkali melakukan aktivitas dengan posisi gerakan berulang seperti membungkuk, memindahkan dan menurunkan beban yang membuat pekerja mengalami musculoskeletal atau gangguan pada otot skeletal akibat pekerjaan berulang, postur tubuh yang tidak alamiah atau peregangan otot yang berlebih. Pekerja tidak memperhatikan waktu istirahat dan peregangan otot sebelum aktifitas fisik seperti membungkuk, mengangkat dan memindahkan beban pada saat melakukan pekerjaan, sehingga kemungkinan terjadinya keluhan musculoskeletal pada pekerja. Upaya pencegahan untuk meminimalisasi timbulnya MSDs bisa dilakukannya peregangan otot sebelum melakukan pekerjaan pada setiap harinya, berlutut saat mengambil barang jangan membungkuk, Mencodongkan punggung saat mengangkat beban.

## PENUTUP

### Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang berhubungan dengan keluhan musculoskeletal disorders pada penyortir sampah di UPTD Pengelolaan Sampah Talang Gulo adalah sikap kerja dan aktivitas berulang.

Untuk itu diharapkan kepada pekerja untuk memperhatikan sikap tubuh berdiri, duduk dan membungkuk hendaknya disesuaikan dengan prinsip-prinsip ergonomi, Kemudian pada saat bekerja perlu diperhatikan postur tubuh dalam keadaan seimbang agar dapat bekerja dengan nyaman dan tahan lama, agar sikap kerja tidak berisiko terjadinya Musculoskeletal Disorders. Megurangi beban kerja yang dilakukan berulang dan menyesuaikan prinsip-prinsip

ergonomi, agar beban kerja tidak berisiko terjadinya Musculoskeletal Disorder.

### Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada UPTD Pengelolaan Sampah Talang Gulo yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di UPTD Pengelolaan Sampah Talang Gulo.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Asti, A. H. (2018). Faktor Yang Berhubungan Dengan Keluhan Nyeri Otot Skeletal (Musculoskeletal Disorders) Pada Pekerja Bongkar Muat Di Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar Tahun 2018. Skripsi. Hasanuddin.
- [2] Eka Rosanti, Mochammad Iqbal F, Ratih Andhika A R, D. A. A. (2020). Penilaian Postur Kerja Dan Prevalensi MSDs Pada Tenaga Kerja Bagian Packing Pabrik Roti X Di Ponorogo. *Journal of Industrial Hygiene and Occupational Health*, 4(2).
- [3] Evadarianto, N., & Endang, D. (2017). Postur kerja dengan keluhan Musculoskeletal Disorders pada pekerja manual Handling bagian Rolling Mill. *The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health*, 6(1), 97. <https://doi.org/10.20473/ijosh.v6i1.2017.97-106>
- [4] Rahayu, D. T. (2017). Hubungan Postur Kerja Dan Faktor Lain Terhadap Keluhan Musculoskeletal Disorder's (Msds) Pada Sopir Bus Antar Provinsi Di Bandar Lampung. Fakultas Kedokteran. Universitas Lampung. Skripsi.
- [5] Ramdan, I. M., & Laksmono, T. B. (2012). Determinan Keluhan Musculoskeletal pada Tenaga Kerja Wanita Determinant of Musculoskeletal Disorders Complaint on Female Workers. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 7, 169–172.
- [6] Saputra, H. M., Sari, M., Husna, M., Kesehatan, P., Padang, K., Fort, U., & Bukittinggi, D. K. (2020). Faktor

- Penyebab Primer dan Kombinasi Dengan Musculoskeletal Disorders Pada Pekerja Peternak Ayam di Nagari Mungka
- MUSCULOSCELETAL DISORDERS AMONG CHICKEN FARMERS IN penelitian yang memberikan gambaran Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota didapatkan hasil 90 %. Journal of Industrial Hygiene and Occupational Health, 5(1).
- [7] Tarwaka. (2019). Ergonomi Industri Dasar Dasar Pengetahuan Ergonomi Dan Aplikasi Di Tempat Kerja (2nd ed.). Surakarta: Harapan Press.
- [8] Taufik, R., Ketaren, O., & Salmah, M. S. U. (2018). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Musculoskeletal Disorders Pada Perawat Di Rumah Sakit Umum Sari Mutiara Medan Tahun 2017. Jurnal Riset Hesti Medan Akper Kesdam I/BB Medan, 3(1), 31. <https://doi.org/10.34008/jurhesti.v3i1.19>
- [9] Wijayanti, E. (2020). Hubungan Gerakan Berulang dan Masa Kerja dengan Keluhan Muskuloskeletal Pekerja Bagian Penempaan Industri Gamelan Desa Wirun, Sukoharjo. Universitas Sebelas Maret.
- [10] Zulhijjah, A. (2021). Faktor Yang Berhubungan Dengan Keluhan Musculoskeletal Disorders Pada Pekerja PT. PLN (Persero) Unit Layanan Transmisi Dan Gardu Induk Jeneponto. Universitas Hasanuddin. Skripsi.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

---

**DIGITAL GOVERNMENT DALAM PELAYANAN KEPENDUDUKAN MELALUI  
APLIKASI SAKEDAP DI KABUPATEN BANDUNG**

Oleh

Nadiya Asyri Nur Fadillah<sup>1)</sup>, Rahayu Kusumadewi<sup>2)</sup>, Nanang Suparman<sup>3)</sup><sup>1,2,3</sup>Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan  
Gunung Djati Bandung;Email: <sup>1</sup>[nadiyaasyri44@gmail.com](mailto:nadiyaasyri44@gmail.com), <sup>2</sup>[rahayukusumadewi@yahoo.com](mailto:rahayukusumadewi@yahoo.com),  
<sup>3</sup>[n.suparman69@gmail.com](mailto:n.suparman69@gmail.com)**Abstract**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *digital government* dalam pelayanan kependudukan melalui aplikasi SAKEDAP (Sistem Pelayanan Kependudukan Terpadu) di Kabupaten Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara secara mendalam kepada informan, serta dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *digital government* dalam pelayanan kependudukan melalui aplikasi SAKEDAP sudah terbilang efektif karena dapat memangkas waktu dan biaya proses permohonan dokumen, meningkatkan pelayan kepada masyarakat, serta dapat menghindari praktek pungutan liar dan percaloan. Akan tetapi penerapannya belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan beberapa hambatan seperti kurangnya SDM yang bertugas dalam mengelola proses pelayanan kependudukan. Selain itu, karena Kabupaten Bandung merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak ke 2 se Jawa Barat, jadi masih banyak masyarakat yang belum tahu dan belum memahami aplikasi SAKEDAP karena sosialisasi yang dilakukan masih kurang dan belum merata khususnya di daerah-daerah terpencil yang ada di Kabupaten Bandung.

**Keywords: Digital Government, Pelayanan Kependudukan, SAKEDAP.****PENDAHULUAN**

Kemajuan era digital saat ini tentu dapat berimplikasi terhadap penyelenggaraan pemerintah dalam berbagai aspek. Hal ini ditandai dengan dibentuknya berbagai inovasi yang bertujuan untuk memberikan pelayan publik yang berkualitas. Semakin berkembangnya teknologi maka dinamika antara harapan masyarakat dengan realitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah akan semakin tinggi (Suparman, 2019). Oleh sebab itu, pemerintah harus berperan aktif dalam memanfaatkan teknologi dengan menyediakan berbagai fasilitas dan infrastruktur dalam sektor publik baik yang berupa fisik maupun non fisik untuk menunjang keberhasilan serta pemenuhan target pelayanan publik yang efektif dan efisien (Fajar, et al., 2018).

Perkembangan teknologi berbasis digital sedang diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintah di Indonesia. Sebagaimana pada tahun 2020 dalam survei *electronic government* yang diadakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia menduduki urutan ke 88 dari 193 negara anggota. Survei ini mengukur efektivitas *e-government* dalam penyediaan layanan publik, yang terdiri dari tiga aspek utama yaitu kesiapan infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia, dan ketersediaan *e-service*. Tujuannya sebagai alat bantu untuk mengukur pembangunan yang dapat mengidentifikasi sejauh mana kekuatan dan kemampuan menghadapi tantangan dalam mengembangkan pelaksanaan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik (Kominfo, 2020).

Gambar 1.1

### Hasil survei *e-government* Indonesia



Sumber: [kominfo.go.id](http://kominfo.go.id)

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa penerapan *e-government* di Indonesia mengalami perkembangan, yang semula pada tahun 2018 berada dalam peringkat ke 107 kini di tahun 2020 Indonesia menunjukkan kenaikan 19 peringkat sehingga menduduki peringkat ke 88.

Penerapan *e-government* di Indonesia saat ini sudah mengalami beberapa kemajuan, hal ini dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan kualitas pelayanan publik yang cepat, tepat serta memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Namun, *e-government* saat ini sudah berkembang menjadi pemerintahan berbasis digital atau dikenal dengan istilah *digital government* (Bahtiar et al., 2021). Sebagaimana dipaparkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) bahwa *digital government* merupakan teknologi digital yang dimanfaatkan sebagai salah satu bagian analitis dari strategi modernisasi pemerintah dalam membentuk nilai publik berdasarkan *digital government* ekosistem. Terdiri dari beberapa aspek yaitu pemerintah, organisasi non pemerintah, bisnis, asosiasi, warga serta individu yang dapat menunjang produksi dan akses data, konten dan layanan melalui suatu hubungan dengan pemerintah (OECD, 2020).

Kendati demikian, pada tahun 2020, *The Institute of Digital Government* Universitas Waseda yang bekerjasama dengan *International Academy of CIO* (IAC) mengumumkan peringkat *digital government* negara-negara di dunia. Dalam laporan tersebut, peringkat pertama ditempati oleh USA lalu Indonesia menempati peringkat ke-40 dari

64 negara. Penilaian ini dilihat dari pengembangan pemerintahan digital di 64 negara di dunia (Obi & Iwasaki, 2020).

Tabel 1.1

*Overall Ranking Digital Government by Waseda University*

Ranking	Digital Government Ranking-64 Countries Around The World	Score
35.	Macau	66.455
36.	Philippines	66.103
37.	China	65.983
38.	Czech	65.962
39.	Poland	65.014
40.	Indonesia	64.708

Sumber: *Waseda International Digital Government Rankings Report*

Berdasarkan data dari tabel tersebut, *score digital government* Indonesia yaitu 64.708 hal ini menunjukkan bahwa pemerintah harus terus berupaya untuk melakukan berbagai perbaikan dan pengembangan agar dapat berdaya saing dan mengejar ketertinggalan transformasi *digital government* dengan negara lain. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemerintah berbasis digital, maka pemerintah harus mampu memanfaatkan percepatan perkembangan teknologi yang dapat mendorong pelayanan publik agar memiliki inovasi baru yang bertumpu pada teknologi. Oleh sebab itu, pemerintah menciptakan suatu kebijakan yaitu Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

Pada awal periode pemerintahan Presiden Joko Widodo menyatakan akan mereformasi pelayanan publik dalam lima tahun ke depan. Beliau ingin mewujudkan *Digital Service Government* (Pemerintahan Digital Melayani) yang berwawasan/orientasi warga (*citizen first*). Pengadopsian *digital government* di Indonesia telah diupayakan oleh Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (WANTIKNAS) agar dapat dilaksanakan di Indonesia secara menyeluruh. Tujuan tersebut



akan dicapai melalui beberapa strategi, seperti mengintegrasikan layanan nasional dan daerah, serta memperkuat layanan *online* (Rohman, 2020).

Salah satu pelayanan dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat yaitu pelayanan dalam bidang kependudukan. Pelayanan administrasi kependudukan terdiri dari pendaftaran penduduk serta pelayanan pencatatan sipil. Maka dalam penyelesaiannya harus dikelola dengan baik oleh pemerintah karena sebagai bentuk tanggung jawab pelayanan kepada publik (Cristianingsih, 2020).

Hadirnya otonomi daerah dapat membantu pemerintah daerah menyelenggarakan pelayanan publik. Seperti halnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bandung adalah unsur pelaksana pelayanan publik terkait administrasi kependudukan yang memiliki tugas untuk mencatat, mendaftarkan, mengelola data secara lengkap yang memuat peristiwa penting terkait pendataan setiap warga (Cristianingsih, 2020). Pemerintah Kabupaten Bandung dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik mengacu pada peraturan perundang-undangan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Bandung, dan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bandung (Jdih.bandungkab, 2014).

Namun dalam pelaksanaannya, menurut pihak Disdukcapil Kabupaten Bandung pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Bandung seringkali ditemukan berbagai masalah seperti sulitnya menghimpun *one big data* terkait dokumen kependudukan, dari 3.583.056 jumlah penduduk Kabupaten Bandung, masih ada ribuan data yang belum valid NIK nya. Lalu, kondisi geografis di

wilayah kabupaten Bandung yang berbeda sehingga tidak sepenuhnya bisa mengakses internet, dari segi layanan (*service*) masih dianggap belum mempercepat proses birokrasi, keterbatasan SDM yang mengelola dokumen kependudukan. Dan yang terakhir dari segi tata kelola (*governance*) banyaknya keluhan dari masyarakat terkait penyelenggaraan pelayanan pemerintah entah itu secara langsung atau tidak langsung.

Dalam menanggapi hal tersebut, Disdukcapil Kabupaten Bandung menciptakan sebuah inovasi baru yang bertujuan agar kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat meningkat dengan dibentuknya sebuah aplikasi digital yang bernama Sistem Pelayanan Kependudukan Terpadu (SAKEDAP) yang dikeluarkan pada tahun 2021. SAKEDAP merupakan akronim dari bahasa Sunda yang bermakna sekejap atau sebentar. Regulasi tertinggi yang mengatur SAKEDAP yaitu Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE, dan Peraturan Bupati Nomor 69 tahun 2021 tentang tata kelola SPBE di Kabupaten Bandung.

Kemajuan sistem aplikasi berbasis android ini akan memberikan kemudahan pada masyarakat dalam memperoleh pelayanan untuk mengurus dokumen kependudukan agar tidak lama dan berbelit-belit. Di dalam aplikasi SAKEDAP memuat berbagai layanan seperti, Antrian *Online* (*booking* waktu dan tanggal pelayanan) agar masyarakat memperoleh kepastian layanan. SAKEDAP juga mengadakan pelayanan *online*, caranya yaitu memilih jenis layanan yang dituju serta ikuti tutorial pengisian sampai proses upload berkas (Hadiyanti, 2021).

Beberapa manfaat dari aplikasi SAKEDAP, pertama dapat memudahkan masyarakat dalam mendapatkan antrian yang jelas serta mempermudah dalam melakukan pelayanan administrasi kependudukan dengan pengajuan secara *online* karena sudah berbasis *web*. Kedua, dapat meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan mengingat bahwa

sekarang masih dalam kondisi pandemi covid-19 sehingga dapat meminimalisir kontak antara petugas dengan pemohon. Ketiga, sebagai pendukung upaya tertib administrasi kependudukan karena memudahkan masyarakat dalam mengakses dan mendapatkan dokumen kependudukan. Keempat, dapat mengefektifkan waktu untuk penduduk yang bertempat tinggal jauh dari kantor Disdukcapil Kabupaten Bandung. Karena aplikasi ini sudah terintegrasi dengan berbagai jenis inovasi pelayanan seperti *Antrian Online*, *Dokumen Kependudukan Kami Antar (DOKKAR)*, dan *Sistem Online Cetak Sendiri (SI OCES)* (casip.bandungkab.go.id, 2021).

Menurut Kepala Disdukcapil Kabupaten Bandung memaparkan bahwa dalam masa pandemi jumlah pemohon pembuatan dokumen kependudukan mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena banyaknya bantuan covid-19 yang diberikan dengan syarat harus memiliki data administrasi. Beliau juga menjelaskan bahwa Kabupaten Bandung memiliki jumlah penduduk sebesar 3,5 juta jiwa, adapun jumlah penduduk yang ditargetkan wajib KTP sekitar 2,48 juta jiwa. Dan 99,032 persen target wajib KTP sudah tercapai. Sebelum ada pandemi, jumlah pemohon bisa mencapai 200-300 setiap harinya. Namun, dengan keadaan seperti saat ini maka pelayanan yang semula tatap muka langsung menjadi pelayanan online (BBCOM, 2021).

Gambar 1.2

Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung dan Jumlah Penduduk Wajib KTP



Sumber: Disdukcapil Kabupaten Bandung  
 Dari gambar diatas dapat dikatakan bahwa kehadiran aplikasi SAKEDAP berbasis

android ini mampu membantu petugas dalam melaksanakan pelayanan kependudukan untuk memenuhi target terkait jumlah penduduk wajib KTP sebanyak 2,48 juta jiwa.

Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang terjadi di lapangan, maka tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan *digital government* dalam aplikasi SAKEDAP sebagai bentuk pelayanan kependudukan di Kabupaten Bandung. Oleh sebab itu, penelitian terdahulu menjadi hal penting untuk menjadi referensi bagi peneliti. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh (Soraya, 2019) dengan judul “Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Online Di Kabupaten Pati”. Hasilnya menunjukkan inovasi pelayanan administrasi kependudukan secara *online* di Kabupaten Pati belum optimal karena masih menemukan beberapa hambatan, seperti masih adanya keraguan dalam keabsahan data yang diinput, pemanfaatan teknologi dari masyarakat masih kurang, serta partisipasi masyarakat masih belum maksimal dalam melakukan pengamatan dikarenakan aplikasi ini masih tergolong baru. Akan tetapi, dapat mempermudah masyarakat mengurus administrasi kependudukan secara efektif dan efisien.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Purwanti, 2021) dengan judul “Inovasi Pelayanan Publik Melalui Aplikasi Selesai Dalam Genggaman (SALAMAN) Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi aplikasi SALAMAN sudah berjalan baik dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan. Namun masih terdapat beberapa hambatan, seperti adanya asumsi masyarakat bahwa pelayanan *offline* lebih mudah dilakukan, serta gangguan jaringan apabila diakses oleh banyak orang maka *server* menjadi *down*.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Bahtiar et al., 2021) berjudul “*Digital Government* Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Berbasis Aplikasi SAMSAT Mobile Jawa Barat (SAMBARA) di Jawa Barat”. Hasilnya menunjukkan bahwa implementasinya sudah berjalan baik namun belum cukup efektif. Hal ini ditandai dengan adanya beberapa temuan, seperti sistem pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang saat ini bereformasi dalam pemungutannya yang semula dengan sistem konvensional, kini menggunakan sistem modern yang terintegrasi. SAMBARA mendapat rating kategori baik dari asumsi pengguna yang rata-rata menyambut baik aplikasi ini. Adapun hambatan yang dihadapi yaitu pengguna memiliki kendala dalam melunasi pembayaran dan ketimpangan layanan digital masih cukup tinggi.

Adapun *novelty* dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian ini menganalisis pelayanan kependudukan melalui aplikasi SAKEDAP di Kabupaten Bandung dengan menggunakan teori *digital government* yang dianggap tepat sasaran dalam mengatasi permasalahan kependudukan yang cukup kompleks di Kabupaten Bandung. Oleh sebab itu, peneliti menggunakan pisau analisis *digital government* dari (Lee et al., 2018) yang mengukur penggunaannya dari beberapa dimensi yang terdiri dari:

1. Integrasi Data (*Data*) : Persebaran data dikumpulkan dalam *database* lokal yang terpusat yang ditujukan untuk berbagai fungsi pemerintah. Selanjutnya, karena sifat data yang sinergis maka basis data lokal ini tersekat dan dikonvergensi satu sama lainnya. Orientasi dari dimensi ini yaitu menghubungkan dan mengintegrasikan.
2. Mengadopsi teknologi (*Technology*) : Pada tahun 1970-1980 data masih sederhana sehingga di tahun 1990 perlu pemisahan data kedalam basis data yang didukung dengan kemajuan teknologi.

Adanya koneksi internet dan jaringan serta instalasi *platform* lintas fungsi menjadi layak secara teknologi. Orientasi dari dimensi ini yaitu memanfaatkan dan mengadopsi teknologi. Teknologi digital harus mampu diterapkan dalam proses pembuatan suatu kebijakan dan desain layanan sejak awal. Hal ini bertujuan supaya transformasi digital pemerintah berhasil dilaksanakan. Teknologi juga digunakan untuk meningkatkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan di berbagai tahap siklus hidup kebijakan dan layanan.

3. Berorientasi pada layanan (*Service*) : Sistem informasi pada awalnya diimplementasikan untuk mendukung rutinitas layanan, tetapi fokusnya telah bergeser ke arah mereplikasi rutinitas dalam sistem. Kemudian, ketika *reengineering* menjadi tren, fokus bergeser ke arah transformasi layanan, seperti arsitektur perusahaan (EA) untuk memperbesar transformasi digital dalam layanan publik, gagasan arsitektur perusahaan (EA) berkontribusi pada kemajuan. Lebih mungkin menjadi contoh yang baik untuk orientasi elemen layanan dan dalam mengembangkan layanan konvergensi baru di berbagai departemen dan fungsi. Orientasinya adalah beradaptasi dan fleksibel.
4. Orang (*People*) : Fokus telah bergeser dari pemanfaatan tugas yang dilakukan orang, melalui literasi dan informatisasi digital, kini berubah menjadi pengetahuan terkait pekerjaan dan proses. Orientasinya yaitu untuk membebaskan orang dari kebosanan dan beban serta mendorong mereka untuk menciptakan sebuah inovasi.
5. Tata Kelola (*Governance*) : Sejak munculnya pemerintahan digital, fokus tata kelola telah bergeser dari aturan dan

politis, melalui transaksi, layanan, interaksi, dan kepuasan, kini menjadi kolaborasi dan partisipasi. Orientasinya supaya terciptanya *open government* (pemerintah terbuka) dan memberikan ruang kepada orang untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan.

Gambar 1.3

Lima Dimensi Digital Government



Sumber: Proposing a value-based digital government model

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan serta masalah yang ditemukan terkait pelayanan kependudukan di Kabupaten Bandung, peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian lebih mendalam, dengan judul penelitian “*Digital Government* Dalam Pelayanan Kependudukan Melalui Aplikasi SAKEDAP Di Kabupaten Bandung”. Sedangkan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan *digital government* dalam pelayanan kependudukan melalui aplikasi SAKEDAP di Kabupaten Bandung. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis penerapan *digital government* dalam pelayanan kependudukan melalui aplikasi SAKEDAP di Kabupaten Bandung.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sebagaimana dipaparkan oleh Creswell bahwa penelitian kualitatif adalah suatu permasalahan yang dapat diselesaikan dengan metode eksplorasi serta memahami arti suatu masalah. Hal ini dilakukan dengan menterjemahkan makna data, analisis data, memberikan

pertanyaan, merekap data yang merupakan sebuah urgensi dalam penelitian. Suatu permasalahan yang menjadi topik utama dalam penelitian ini adalah memahami makna individual atau kelompok dan menterjemahkan kompleksitas (Creswell, 2015). Pendekatan ini digunakan oleh peneliti karena dianggap relevan dengan apa yang diteliti yaitu menganalisis bagaimana penerapan *digital government* dalam pelayanan kependudukan melalui aplikasi SAKEDAP di Kabupaten Bandung. Jenis penelitian ini bertujuan untuk memberi sebuah gambaran serta penjelasan terkait penerapan *digital government* dalam pelayanan kependudukan melalui aplikasi SAKEDAP di Kabupaten Bandung.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara secara mendalam kepada informan yang bersangkutan, studi literatur serta media audio visual (Creswell, 2016). Proses penelitian ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bandung, dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kabupaten Bandung.

Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari:

Tabel 2.1  
Informan Penelian

No	Informan	Jumlah
1.	Ahli Muda Fungsional Administrator Database Kependudukan (Kepala Seksi Inovasi Pelayanan)	1 Orang
2.	Kepala Bidang Aplikasi Informatika	1 Orang
3.	Petugas Pengelolaan Informasi & Dokumentasi	1 Orang
4.	Tenaga Ahli Pengembang Aplikasi	1 Orang
5.	Masyarakat	3 Orang

Sumber : Diolah oleh peneliti

Kemudian, teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu *purposeful sampling* yang merupakan

pengambilan sampel dari sebuah instansi ataupun masyarakat yang dapat memberikan informasi terbaik berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu metode persiapan, penilaian informasi, data coding, *coding application*, penyajian data, dan interpretasi data (Creswell,2017). Adapun pemeriksaan keabsahan dilakukan dengan teknik triangulasi data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Integrasi Data (*Data*)

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan dengan tenaga ahli pengembang aplikasi menyatakan bahwa data yang dimuat dalam aplikasi SAKEDAP diolah dari sektor layanan publik, jadi semua layanan yang memungkinkan khususnya administrasi publik yang ada di Disdukcapil itu di aplikasikan dalam SAKEDAP. Hal ini disesuaikan dengan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Aplikasi SAKEDAP melayani pembuatan dokumen administrasi kependudukan secara gratis kecuali jika hasil dokumennya ingin diantar maka membayar jasa pengiriman sebesar Rp. 12.000. Berikut merupakan beberapa pembuatan dokumen dalam aplikasi SAKEDAP, yaitu: Pembuatan Kartu Keluarga (KK), KTP-el, Kartu Identitas Anak (KIA), Surat pindah datang, Surat pindah keluar, Akta kelahiran, Akta kematian, Akta perkawinan, Akta perceraian, Aktivasi dan validasi NIK, dan sebagainya. Adapun rekapitulasi jumlah pemohon dokumen kependudukan yang menggunakan aplikasi SAKEDAP bisa dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 3.1

Laporan Permohonan Dokumen  
 Kependudukan Melalui Aplikasi SAKEDAP  
 (Periode bulan Mei – November) Tahun 2021

No	JENIS LAYANAN	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	JUMLAH
1	PENCETAKAN KIP-EL	0	20	112	1386	12454	10776	4754		29502
2	KIA (KARTU IDENTITAS ANAK)	0	4	33	173	1297	1268	850		3625
3	AKTA KELAHIRAN	251	120	57	147	1508	1256	1044		4383
4	AKTA KEMATIAN	8	3	5	9	268	191	148		632
5	AKTA PERCERAIAN	0	0	0	0	7	7	4		18
6	AKTA PERKAWINAN	0	0	1	1	31	48	46		127
7	AKTIVASI ADM	0	0	0	0	457	428	183		1068
8	KK-CETAK ULANG	0	6	17	97	961	884	616		2581
9	KK-NUMPANG	0	0	0	3	41	66	36		146
10	KK-PENAMBAHAN ANAK	0	6	27	77	762	744	629		2245
11	KK-PISAH	0	2	10	24	281	266	232		815
12	KONSOLIDASI	0	2	10	45	2246	2692	882		5877
13	PINDAH DATANG	0	0	6	60	894	866	705		2531
14	PINDAH KELUAR	0	0	2	60	795	684	644		2185
	JUMLAH	259	163	280	2082	22002	20176	10773		55735

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Bandung

Dari tabel diatas menunjukkan meskipun aplikasi SAKEDAP ini terbilang aplikasi baru, tetapi antusiasme pengguna cukup banyak. Hal ini bisa dilihat dari peningkatan

jumlah pemohon tiap bulannya terutama dalam jenis pelayanan pencetakan KTP-el.

SAKEDAP merupakan jembatan atau perantara pengajuan dokumen yang mana *endingnya* yaitu SIAK. Jadi pemrosesannya bukan dalam SAKEDAP tetapi hasil *outputnya* yang nanti di upload dalam SAKEDAP. Karena jika SAKEDAP di integrasikan langsung akan menimbulkan berbagai macam kemungkinan seperti kebocoran data. Sejauh ini di Kabupaten Bandung belum ada kebocoran data, karena dari sisi infrastruktur terbagi 2 *server* yaitu *server* aplikasi dan *server storage*.

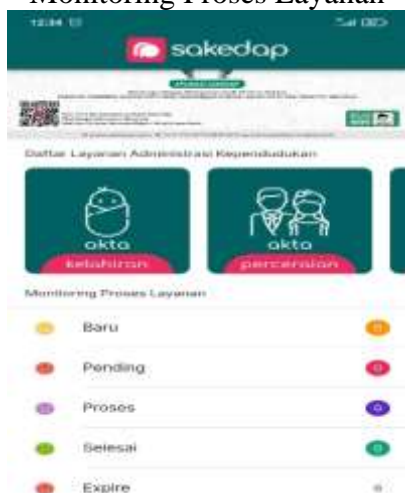
Dalam proses pengumpulan data terdapat 2 jenis yang disimpan di SAKEDAP yaitu ada formulir yang di adaptasi dari formulir

permohonan yang biasanya di mohonkan manual, misalnya formulir F1,F2, yang isinya data-data *by name by address* data identitas permohonannya. Yang kedua data yang di kumpulkan selain formulir itu yang mana berkas tersebut harus di upload. Untuk perekaman KTP-el tetap dilaksanakan di kecamatan atau lokasi terdekat.

Menurut tenaga ahli pengembang aplikasi memaparkan bahwa pihak admin sudah menerapkan konsep *marketplace* dalam aplikasi SAKEDAP sehingga masyarakat bisa mengetahui proses pengerjaan dokumen yang ia ajukan sudah sejauh mana. Terdiri dari beberapa tahapan yaitu baru-*pending*-proses-selesai-*expire*. Limit waktu untuk melengkapi persyaratan yang sudah ditentukan yaitu 3 hari, apabila lebih dari waktu yang ditentukan maka akan *expire* dan pemohon harus memilih kembali tanggal lain yang masih tersedia. Apabila tanggalnya sudah tidak bisa di klik artinya sudah *full booking*. Selain *timeline* permohonan, ada pula *timeline* pengiriman yang mana nanti pihak pos akan menginput nomer resi. Lalu pemohon dapat memilih bentuk dokumen yang akan dicetak apakah *hardfile* atau *softfile* yang dikirim melalui WA atau *email*, khusus untuk pengiriman KTP-el dan KIA dapat dikirim langsung ke rumah pemohon karena Disdukcapil bekerjasama dengan PT.POS.

Gambar 3.1

## Monitoring Proses Layanan



Sumber: Diolah oleh peneliti

Menurut Kasi Inovasi Pelayanan Disdukcapil Kabupaten Bandung memaparkan bahwa data yang ada dalam SAKEDAP digunakan oleh Pemkab. Bandung untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, penegakan hukum, pencegahan kriminal, serta untuk pembangunan demokrasi. Misalnya pada saat pemilu, KPU mengambil data kependudukan yang sudah di konsolidasi bersih oleh pusat bukan data dari BPS. Jadi terdapat 4 data kependudukan diluar data agregat, tetapi apabila menyangkut data pribadi maka harus ada PKS (Perjanjian bersama pemanfaatan data kependudukan).

## 2. Mengadopsi Teknologi (*Technology*)

Terkait *grand design* pemrograman aplikasi SAKEDAP berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan tenaga ahli pengembang aplikasi menjelaskan bahwa dari segi teknis lokus SAKEDAP sudah dipindahkan *servernya* ke pusat data nasional kominfo. Jadi sebelumnya mengalami 3 kali migrasi *server*, yang pertama dari *cPanel* jadi sama-sama web *server* tetapi di satukan dengan *website* yang lain yang kita pindahkan ke *server* yang virtual yang sudah disiapkan *servernya* jadi khusus untuk aplikasi itu saja berjalan jadi 1 IT 1 aplikasi, karena jumlah pemohonnya membludak, kemudian di awal tahun ini dipindahkan ke pusat data nasional kominfo.

Aplikasi SAKEDAP ini memiliki 2 *platform* yang bisa dibuka melalui *website* atau *play store*, juga memakai *neoserver* untuk mengirim notifikasi *email* melalui aplikasi, jadi admin bisa memantau apakah *email* yang dikirim *user* itu sampai atau tidak, contoh misalnya pemohon yang verifikasi akun apakah *user* tersebut menerima akunnya atau tidak. Jadi untuk monitoring ini dipantau apabila mengalami kesulitan di verifikasinya tidak masuk maka akan dibantu oleh petugas.

Kemudian admin juga memantau melalui analitik, jadi selain jumlah permohonan ada pula jumlah pengunjung SAKEDAP. Adapun

yang dicatat di Diskominfo adalah aktifitasnya, jadi selama pengguna masuk SAKEDAP tercatat misalnya pengunjung pakai jam berapa, apa saja menu yang di klik, dan *device* apa yang ia pakai. Dilihat dari sisi *traffict*, SAKEDAP ini cukup besar sebagaimana di pertengahan tahun 2021 *evennya* ada 12 juta aktivitas, dari *page view* sekitar 4 juta yaitu jumlah yang ketika masuk lalu meng-klik menu apa saja, dan dari sisi *usernya* 75 ribu. Biasanya jika waktu pagi jumlah pemohon bisa membludak sekitar 300-400 orang, akan tetapi permohonan dokumen melalui aplikasi di Disdukcapil ini dibatasi agar pemohon yang sudah mengajukan dokumen yang lengkap bisa segera di proses.

Selanjutnya terkait infrastruktur teknologi dan *platform* yang digunakan dalam aplikasi SAKEDAP sejauh ini sudah mendukung, ditambah dari kementerian juga menyediakan *server* yang memang direkomendasikan untuk aplikasi-aplikasi berat yang *usernya* banyak dan SAKEDAP termasuk kriteria tersebut, yang mana layanan publik ini memiliki *user* yang banyak. Dari segi infrastruktur ini, Diskominfo mempunyai bidang TIK yang mengatur internet dan *server*, tetapi untuk internet dan bidang keamanan memakai pihak ketiga.

Dari sisi *server* SAKEDAP memakai 2 *server* yaitu *server* aplikasi dan *server storage*. Masing-masing mempunyai spek tersendiri dan dilihat sesuai kondisi, jika masih membludak maka spesifikasinya dinaikan, tetapi jika masih bisa ke *handle* tetap di spesifikasi yang sekarang. Untuk sistem operasinya memakai *ubuntu* dan *web servernya* memakai *Nginx*, kemudian *database servernya* menggunakan *MySQL*. Tapi tetap akan di evaluasi keterlambatannya dari sisi apa, apakah dari sisi *database*, internet, *server*, atau dari sisi aplikasi.

Lalu hambatan yang ditemukan dalam penggunaan SAKEDAP ini menurut Kepala Bidang (Kabid) Aplikasi Informatika bukan hanya dari aplikasi saja tapi juga dari

manusianya yang kurang disiplin, masyarakatnya yang terkadang belum paham sehingga membutuhkan oranglain untuk membantu mengoperasikannya. Hal ini juga ditambahkan oleh Kasi Inovasi Pelayanan yang memaparkan bahwa hambatan lain yang sering ditemukan yaitu jaringan yang belum bisa semuanya akses karena perbedaan kondisi geografis, serta masih rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi.

Solusi dari hambatan tersebut, Disdukcapil membuat pelayanan keliling yang bernama Jempol Pelanduk (Jemput bola pelayanan adminduk) yang langsung datang ke desa-desa. Selain itu, disdukcapil juga mempunyai petugas registrasi desa untuk membantu masyarakat di desa dan kelurahan. Pemkab Bandung juga melayani pencetakan KTP langsung di desa-desa terluar yang mana di sediakan mesin ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri), untuk *update* datanya bisa melalui SAKEDAP, dan untuk percetakannya bisa lewat desa. Contoh di nagrek nanti di berikan mesin ADM untuk mencetak sendiri KTP. Jadi inti dari SAKEDAP yaitu mempermudah masyarakat agar lebih efektif dan efisien.

Hambatan lain yang ditemukan oleh admin dari Diskominfo yang menangani SAKEDAP juga biasanya tentang *complain* yang masuk dari pengguna terkait dokumen yang sudah di proses dan dikirim via *email*, jika di monitoring admin dokumennya sudah masuk, padahal dalam *email* pengguna belum ada. Dari sisi teknis, optimalisasi sistem yang di demokan, atau dari *database* khususnya jika jumlah pengunjungnya semakin banyak maka solusinya yaitu *databasenya* di naikan.

Adapun hambatan terkait *server down* biasanya dari sisi pengunjung yang selalu membludak banyak, kemudian dari sisi *database* nya. Sebagaimana hasil wawancara dengan tenaga ahli pengembang aplikasi memaparkan sebagai berikut: “*Jadi kalau server sih biasanya engga terlalu berpengaruh, yang berpengaruh ketika pengunjung membludak itu pasti di database servernya.*”

Kalau cuma melihat saja kan tidak ada proses apa-apa ini aman gitu. Tapi kalau misalnya sudah masuk perhitungan akun jumlah permohonan perpengguna di prosesnya di database". Dari pemaparan tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak aktivitas proses data di database nya, itu yang akan membuat lambat. Menurut admin pengelola, beberapa proses yang memungkinkan berat itu di optimalisasi, salah satunya untuk database server biasanya di optimalisasi menggunakan cache. Jadi, selain di aplikasi kita juga evaluasi dari sisi jumlah datanya.

Selanjutnya terkait sistem jaringan yang digunakan oleh implementor dan user SAKEDAP, jika dari non teknisnya misal di daerah-daerah yang jauh biasanya di fasilitasi oleh desa, dengan dibantu proses pendaftarannya. Lalu untuk pengambilan dokumen karena sudah bekerjasama dengan PT.POS jadi bisa dikirim langsung ke rumah pemohon, dan ada juga yang datang langsung ke Disdukcapil. Jadi setiap hari, apabila pemohon sudah melengkapi data dokumen yang dimohonkan, maka Disdukcapil akan memproses langsung kemudian direkap dan di packing untuk diberikan ke kantor POS bagi pemohon yang dokumennya akan diantarkan ke rumahnya.

### 3. Beorientasi Pada Layanan (Service)

Aplikasi SAKEDAP memiliki SOP (Business Process) pelayanan kependudukan sebagai berikut:

Gambar 3.2

Skema/Proses bisnis SAKEDAP



Sumber: [casip.bandungkab.go.id](http://casip.bandungkab.go.id)

Berdasarkan gambar skema/proses SAKEDAP dapat di deskripsikan sebagai berikut: (1) Pemohon/masyarakat membuat akun di aplikasi dan memilih jenis pelayanan yang akan di proses; (2) Pemohon bisa memilih untuk menentukan antrian secara online atau memilih untuk proses mengupload berkas sesuai persyaratan layanan dokumen kependudukan yang dipilih; (3) Setelah berkas terupload, pemohon menunggu verifikasi operator/petugas; (4) Berkas permohonan diperiksa oleh operator dan di verifikasi (konfirmasi berkas diterima atau ditolak) jika berkas yang di upload sudah memenuhi persyaratan. Jika berkas belum lengkap akan ada pemberitahuan; (5) Pemohon bisa melacak proses jika berkas sudah masuk ke bagian proses SIAK; (6) Berkas yang sudah di verifikasi tersambung ke operator yang memproses, dan melalui validasi oleh Pejabat Disdukcapil (Tanda Tangan Elektronik) sampai menjadi dokumen yang diinginkan; (7) Berkas dokumen kependudukan yang sudah terbit seperti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan lain-lain akan dikirim ke email pemohon, untuk KTP-el dan KIA selanjutnya akan melalui tahap pengepakan menggunakan amplop PT.POS Indonesia untuk dikirim ke alamat pemohon; (8) Dari nomor register masing-masing akun pemohon yang didaftarkan sejak awal pembuatan akun permohonan, akan muncul nama, alamat lengkap, nomor handphone agar bisa langsung dicetak menggunakan printer invoice untuk ditempelkan di amplop dokumen kependudukan yang akan dikirimkan melalui ekspedisi PT.POS Indonesia.

Menurut Kasi Inovasi Pelayanan, pengembangan aplikasi SAKEDAP dapat dilihat dari banyaknya masukan-masukan dari masyarakat yang mana nantinya akan di evaluasi dan disesuaikan dengan keinginan pengguna. Jika ada masalah, maka pihak Disdukcapil akan melakukan evaluasi para admin, operator, dan tentunya mengundang programmer dari Diskominfo. Hal ini



dipaparkan juga oleh tenaga ahli pengembang aplikasi SAKEDAP, sebagai berikut “*Kan di play store juga memang banyak masukan dari sisi teknis dan non teknis juga, kalau dari sisi teknis aplikasi sih ada saja improvement perbaikan dan evaluasi yang harus diperbaiki apa*”. Adapun yang sedang dirintis saat ini yaitu adanya *tracking* proses agar pengguna dapat mengetahui dokumen yang sedang dikirim sudah sampai mana. Pengembangan ini sedang di ajukan karena pihak Disdukcapil sudah membuat perjanjian dengan kantor pos, dan memperbaharui aplikasi ke pihak Diskominfo.

Adanya kolaborasi dalam SAKEDAP ini dianggap sudah memangkas waktu dan biaya proses pembuatan dokumen. Masyarakat jadi tidak perlu datang ke kantor kecamatan, jadi hanya daftar melalui aplikasi dan menunggu hasil pengerjaannya dirumah. Fitur-fitur yang ada dalam SAKEDAP juga sudah *user friendly* sehingga memudahkan pengguna untuk memilih layanan sesuai dengan kebutuhannya.

Adapun bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Disdukcapil yaitu dengan cara membuat tutorial di Youtube, melalui media sosial, sosialisasi dengan perangkat desa, operator, mengadakan BIMTEK yang sudah dilaksanakan sebanyak 5 kali, lalu ada Disdukcapil menyapa masyarakat yang diadakan 1 bulan 2 kali, selain itu juga wawancara di tv, radio, penyebaran brosur sambil mengundang RT & RW, pemasangan spanduk, poster. Akan tetapi, meskipun sudah diadakan sosialisasi tapi tetap saja ada masyarakat yang belum paham menggunakan SAKEDAP, maka Disdukcapil membantunya dengan menyediakan petugas 2 orang untuk membuat akun langsung sampai tuntas dokumennya atau ada pula masyarakat yang memilih untuk datang langsung ke kantor Disdukcapil Kabupaten Bandung.

Gambar 3.3  
Disdukcapil Menyapa Masyarakat



Sumber: Diolah oleh peneliti

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan kepada masyarakat, mereka berharap agar sosialisasi yang dilakukan harus lebih gencar agar masyarakat dapat memahami dengan jelas terkait penggunaan aplikasi SAKEDAP terutama masyarakat terpencil yang ada di Kabupaten Bandung. Selanjutnya, menyediakan fitur chat yang terhubung dengan *customer service* agar masyarakat dapat dengan mudah menyelesaikan kendala yang mereka hadapi. Selain itu, aplikasi SAKEDAP harus terus di kembangkan agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan juga permintaan masyarakat serta sesuai dengan salah satu prinsip pelayanan publik yakni selalu melakukan pembaruan untuk mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan.

Mengenai fleksibilitas *upgrade* sistem layanan yang diberikan oleh SAKEDAP waktunya tidak ditentukan. Selama 1 tahun aplikasi SAKEDAP ini berjalan, hampir tiap bulan ada *upgrade* atau perbaikan, misalnya dari fitur di sisi masyarakat dan fitur di sisi operator. Adapun tambahan perbaikannya yaitu modul ADM, karena Disdukcapil mempunyai inovasi cemara desa (cetak mandiri di kelurahan desa) yang mana ada 31 desa yang sudah diberikan mesin ADM. Jadi sebelumnya belum ada modul untuk mendapatkan pin cetak ADM, untuk mencetaknya kita harus mempunyai pin *barcode* misalnya apabila akan mencetak KTP di mesin ADM caranya harus ada pin *barcode*. Saat ini sudah ada pendaftaran untuk mendapatkan pin *barcode* untuk

mencetak dokumen kependudukan melalui mesin ADM.

Gambar 3.4

31 Desa Di Kabupaten Bandung Diberikan Mesin ADM



Sumber: (Radar Bandung.id, 2021)

#### 4. Orang (*People*)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Inovasi Pelayanan menyatakan bahwa aktor yang terlibat dalam pembuatan SAKEDAP sebagai berikut:

Tabel 3.2

Aktor yang terlibat dalam pembuatan SAKEDAP

No	Aktor yang terlibat
1.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung
2.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Kabupaten Bandung
3.	BAPPEDA bagian Penelitian dan Pengembangan
4.	Sekretariat Daerah (Setda) bagian Organisasi Tata Pemerintahan

Sumber: Diolah oleh peneliti

Secara tidak langsung tentu masyarakat juga terlibat dalam pembuatan SAKEDAP karena dari masukan-masukan yang mereka berikan menjadi bahan dalam mengembangkan aplikasi. Namun, pengetahuan masyarakat dalam memahami SAKEDAP ini masih relatif karena ada yang paham dan ada yang tidak tahu sama sekali jadi masih memerlukan bantuan.

Saat ini aktor yang terlibat dalam SAKEDAP sudah terimplementasi dengan baik, karena dari awal pembuatan aplikasi ini sering diadakan evaluasi serta rapat koordinasi

terkait apa saja kendala yang dihadapi para admin selama mengoperasikan aplikasi SAKEDAP. Setiap jenis pelayanan yang ada dalam SAKEDAP memiliki admin masing-masing yang mengatur jumlah kuota pemohon perhari yang tercantum dalam surat tugas. Para admin tersebut rata-rata sudah memahami tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Adapun lintas sektor yang terbangun dalam pembuatan aplikasi ini yaitu pihak ketiga yang mengelola keamanan dalam aplikasi SAKEDAP.

#### 5. Tata Kelola (*Governance*)

Berdasarkan hasil penelitian, menurut Kasi Inovasi Pelayanan Disdukcapil memaparkan bahwa yang melatarbelakangi adanya proses pembuatan kebijakan tentang pelayanan administrasi kependudukan melalui aplikasi SAKEDAP oleh Pemerintah Kabupaten Bandung salah satunya karena adanya pandemi yang masuk ke Indonesia, Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil pusat menyatakan bahwa pelayanan dokumen kependudukan tidak boleh ada tatap muka antara pemohon dengan petugas pelayanan. Maka Disdukcapil menciptakan sistem pelayanan pendaftaran dokumen melalui WA (PANDAWA), akan tetapi ada beberapa kendala yang dihadapi karena jumlah pendaftaran dalam 1 hari bisa mencapai 1000 pendaftar, sedangkan pelayanan dibuka pada pukul 08.00 – 11.00 WIB sehingga tidak bisa di proses secepatnya. Dengan adanya kendala tersebut, maka Disdukcapil Kabupaten Bandung membentuk SAKEDAP yang merupakan aplikasi penyempurnaan PANDAWA sebagai solusi untuk memudahkan pemohon mendapatkan dokumen yang dibutuhkan. Selain itu, SAKEDAP juga diciptakan karena di latar belakang oleh kondisi geografis Kabupaten Bandung yang cukup kompleks dengan jarak yang terbilang luas dan cukup jauh sehingga tidak semua masyarakat mampu menempuh perjalanan untuk datang langsung ke kantor Disdukcapil. Dengan adanya SAKEDAP, maka tujuan utama

untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien serta meningkatkan kualitas layanan kepada publik dapat tercapai.

Untuk mekanisme koordinasi dan kerjasama yang dilakukan oleh para stakeholder dilakukan melalui rapat evaluasi dengan tujuan mencari solusi terkait kendala dan masukan dari masyarakat. Lalu dari segi anggaran pihak Disdukcapil menggunakan anggaran tersebut untuk penyediaan sarana dan prasarana, sosialisasi yang volumenya harus ditambahkan agar pengetahuan masyarakat terhadap aplikasi ini dapat tersebar luas, mengganti fasilitas seperti PC dengan kualitas yang lebih memadai, serta membutuhkan SDM yang lebih banyak supaya tidak *double job* antara petugas yang turun langsung ke lapangan dengan petugas yang mengelola SAKEDAP.

Selanjutnya bentuk penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan yaitu dengan cara memperbaiki kualitas pelayanan, memperbaiki sumber daya manusianya dengan cara diberikan bimbingan secara terus menerus sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap publik. Selain itu, menerima pengaduan baik secara langsung maupun *online*. Apabila secara langsung, ada petugas khusus yang menangani pengaduan dan ada pula ruang konsultasi dan pengaduan, kemudian bisa juga melalui WA dan *website*, lalu pihak penyelenggara pelayanan akan menyelesaikannya. Salah satu caranya yaitu *upgrade* aplikasi SAKEDAP itu sendiri sesuai permintaan dari pengguna. Keluhan-keluhan tersebut ditanggapi dengan responsif sepanjang persyaratan permohonan dokumen terpenuhi.

Gambar 3.5  
Alur Pengaduan Masyarakat



Sumber: (casip.bandungkab.go.id, n.d.)

Dalam rangka menciptakan *open government* (pemerintahan terbuka) dalam proses pembuatan kebijakan terkait SAKEDAP, Disdukcapil mengundang beberapa elemen dalam sebuah forum untuk ikut berpartisipasi seperti Diskominfo, Bappeda, Setda bagian organisasi, Kepala Desa, Ibu-Ibu PKK, serta petugas registrasi desa yang gunanya untuk menampung berbagai masukan dan saran dalam penyempurnaan aplikasi SAKEDAP.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan *digital government* dalam pelayanan kependudukan melalui aplikasi SAKEDAP sudah terbilang efektif karena dapat memangkas waktu dan biaya proses permohonan dokumen, pelayanan kepada masyarakat jadi meningkat sebab dengan adanya aplikasi ini pelayanan jadi terurai sehingga masyarakat memiliki banyak pintu pelayanan yang bisa dipilih apakah datang langsung ke dinas atau *online*, serta dapat menghindari praktek pungutan liar dan percaloan. Meskipun penerapannya belum sepenuhnya optimal, karena kurangnya SDM yang bertugas mengelola proses pelayanan administrasi kependudukan mengingat padatnya jumlah penduduk di Kabupaten Bandung. Selain itu, karena Kabupaten Bandung merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak ke 2 se Jawa Barat, jadi masih banyak masyarakat yang belum tahu dan belum memahami aplikasi SAKEDAP karena sosialisasi yang dilakukan masih kurang dan belum merata khususnya di daerah-daerah terpencil. Maka dari itu, pemerintah Kabupaten Bandung melalui Disdukcapil terus menerus melakukan perbaikan dan pengembangan terkait aplikasi SAKEDAP yang disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan dari masyarakat.

### Saran

Peneliti memiliki saran yang dapat digunakan sebagai rekomendasi untuk menyelesaikan beberapa hambatan yang ditemukan dalam penerapan *digital government* dalam pelayanan kependudukan melalui aplikasi SAKEDAP di Kabupaten Bandung, diantaranya sebagai berikut: (1) Mempererat kerjasama multi sektoral untuk menciptakan sinkronisasi antar aktor yang terlibat dalam mengembangkan aplikasi SAKEDAP agar dapat terakses sampai ke daerah-daerah terpencil di Kabupaten Bandung; (2) Membentuk regulasi yang kuat dalam proses pendataan agar menciptakan sebuah data kependudukan yang valid; (3) Pemerintah Kabupaten Bandung harus memiliki komitmen yang kuat serta terus berupaya melakukan penyempurnaan baik dari segi aplikasinya dan sumber daya manusia dalam melayaninya.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bahtiar, R., Myrna, R., & Susanti, E. (2021). Digital Government Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Berbasis Aplikasi SAMSAT Mobile Jawa Barat (SAMBARA) di Jawa Barat. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 7(2), 230–253. <http://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi>
- [2] BBCOM. (2021). *Alami Peningkatan Layanan, Disdukcapil Kab Bandung Lakukan Pelayanan Online*. <https://bandungberita.com/alami-peningkatan-layanan-disdukcapil-kab-bandung-lakukan-pelayanan-online/#.YX1fy2DMLIV>
- [3] casip.bandungkab.go.id. (n.d.). *Alur Pengaduan Masyarakat*. <https://www.casip.bandungkab.go.id/article/alur-pengaduan-masyarakat>
- [4] casip.bandungkab.go.id. (2021). *SAKEDAP (Sistem Pelayanan Kependudukan Terpadu)*.
- [5] Creswell. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di antara Lima Pendekatan*.
- [6] Creswell. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif Kuantitatif dan Campuran*. Thousand Oaks, California:
- [7] Cristianingsih, E. (2020). Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi*, 12(2). <http://jurnal.unnur.ac.id/index.php/jimia/article/view/329>
- [8] Fajar, et al. (2018). E-PARTICIPATION MELALUI IMPLEMENTASI PROGRAM PESAN SINGKAT PENDUDUK (PESDUK). *Penelitian Komunikasi*, 21.
- [9] Hadiyanti, A. I. (2021). *APLIKASI SAKEDAP (SISTEM PELAYANAN KEPENDUDUKAN TERPADU)*. <https://www.babakan-ciparay.desa.id/artikel/2021/4/19/aplikasi-sakedap-sistem-pelayanan-kependudukan-terpadu>
- [10] Jdih.bandungkab. (n.d.). *PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 12 TAHUN 2014*. <https://jdih.bandungkab.go.id/wp-content/uploads/2014/01/Perda-no-12.pdf>
- [11] Kominfo. (2020). *Hasil Survei PBB, e-Government Indonesia Naik Peringkat*. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/30024/hasil-survei-pbb-e-government-indonesia-naik-peringkat/0/artikel>
- [12] Lee, J., Kim, B. J., Park, S. J., Park, S., & Oh, K. (2018). Proposing a value-based digital government model: Toward broadening sustainability and public participation. *Sustainability (Switzerland)*, 10(9). <https://doi.org/10.3390/su10093078>
- [13] Obi, T., & Iwasaki, N. (2020). The 15th WASEDA International Digital Government Rankings Report. *Institute of Digital Government at Waseda*

- University. [https://idg-waseda.jp/pdf/WASEDA\\_Digital\\_Government\\_Ranking\\_2019\\_2020.pdf](https://idg-waseda.jp/pdf/WASEDA_Digital_Government_Ranking_2019_2020.pdf)
- [14] OECD. (2020). *OECD Digital Kebijakan pemerintah Kerangka: Enam dimensi dari Pemerintah Digital*.
- [15] Purwanti, Y. (2021). *INOVASI PELAYANAN PUBLIK MELALUI APLIKASI SELESAI DALAM GENGAMAN (SALAMAN) DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDUNG*.  
<http://repository.unpas.ac.id/53170/>
- [16] Radar Bandung.id. (2021). *31 Desa Di Kabupaten Bandung Terima Mesin ADM*.  
<https://www.radarbandung.id/2021/12/23/31-desa-di-kabupaten-bandung-terima-mesin-adm/>
- [17] Rohman, H. (2020). *Indonesia's vision for digital government in 2025*.  
<https://govinsider.asia/inclusive-gov/indonesia-digital-government-bappenas-joko-widodo/>
- [18] Soraya, T. (2019). Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Online di Kabupaten Pati. *Astuti, Puji*, 1–10.  
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/viewFile/25018/22273>
- [19] Suparman, M. (2019). *Pelayanan Publik Kontemporer*.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP  
EFEKTIVITAS REALISASI ANGGARAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KOTA TANGERANG SELATAN

Oleh

Futri Safitri

Uin Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail : [Futrisafitri07@gmail.com](mailto:Futrisafitri07@gmail.com)

**Abstract**

Performance-based budgeting is one of the budget preparations that is oriented towards the achievement of work results by allocating existing resources to be efficient, effective and economic. However, in reality, there are problems with the low absorption of the budget accompanied by a decrease in the percentage that occurred at the Department of Population and Civil Registration of South Tangerang City. This study aims to determine whether there is an effect of the implementation of performance-based budgeting on the effectiveness of budget realization. This research was conducted at the Department of Population and Civil Registration of South Tangerang City. The method used is a quantitative method. The collection of data and information was carried out through questionnaires or questionnaires as a research tool which was distributed to all employees of the Department of Population and Civil Registration of South Tangerang City. The analysis used in this study uses validity, reliability, descriptive analysis, Spearman rank correlation analysis, simple regression analysis, coefficient of determination and t test. The results of this study indicate that there is a positive and significant influence between performance-based budgeting on the effectiveness of budget realization.

**Keywords:** Implementation of Performance-Based Budgeting, Budget Realization Effectiveness

**PENDAHULUAN**

Dalam menjalankan roda pemerintahannya, pemerintah Indonesia memiliki salah satu cita-cita yang mana senantiasa memajukan kesejahteraan umum, seperti yang telah tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia. Untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa, pemerintah Indonesia haruslah melaksanakan roda pemerintahannya dengan baik dan juga melaksanakan pembangunan di segala bidang yang mana dapat memberikan fasilitas serta pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat luas.

Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat ini, pemerintah pusatpun menerapkan sistem desentralisasi, yang mana sistem desentralisasi ini pemerintah pusat telah melimpahkan kekuasaan kepada setiap daerah otonom untuk

mengatur urusannya sendiri tidak terkecuali dalam urusan keuangannya. Hal tersebut telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 perihal suatu pelimpahan wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur urusannya sendiri, oleh sebab itu dalam proses penyusunan keuangan daerah yang mana bermula dari konsep anggaran tradisional beralih ke konsep *new public management*. Konsep *new public management* ini lebih menekankan kepada kinerja bukan kepada kebijakannya. Konsep ini diharapkan menjadi suatu harapan baru dalam berlangsungnya kegiatan keuangan agar berjalan dengan efektif dan efisien. Anggaran beebasis

kinerja ini lahir sebagai salah satu perbaikan terhadap proses penganggaran terdahulu, yang mana penganggaran terdahulu terdapat banyaknya kelemahan dalam pelaksanaan anggarannya, salah satunya yakni belum terdapatnya tolok ukur kinerja yang baku dalam pelaksanaannya. Hal ini menjadi suatu acuan untuk untuk mengadakan perbaikan dalam proses penganggaran.

Dalam penerapan program yang sesuai dengan visi, misi serta tujuan suatu organisasi, diperlukan anggaran sebagai sarana penunjang. Sementara itu, baik organisasi pemerintah ataupun swasta memerlukan laporan kinerja guna memastikan sukses atau tidaknya organisasi. Untuk menggapai tujuan yang sudah ditetapkan, organisasi/ lembaga diwajibkan menggunakan anggaran berbasis kinerja dalam proses penganggarnya, dimana anggaran tersebut digunakan untuk membiayai tiap program/ kegiatan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangerang Selatan sudah menjalankan anggaran berbasis kinerja pada penataan anggarannya. Pelaksanaan anggaran berbasis kinerja sudah diresmikan dalam Permendagri Nomor. 13 Tahun 2006 serta diubah lagi dengan Permendagri Nomor. 59 Tahun 2007 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Menurut Mardiasmo (2018) dalam mendapatkan tujuan serta sasaran pelayanan publik, suatu anggaran disusun dengan pendekatan kinerja guna menanggulangi bermacam kelemahan yang ada dalam anggaran tradisional, paling utama kelemahan yang diakibatkan oleh tidak terdapatnya tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja. Penganggaran berbasis kinerja menyalurkan kekuatan sumber daya tidak hanya ke unit organisasi tetapi juga ke program dan menggunakan pengukuran keluaran sebagai indikator kinerja organisasi. Dalam penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan tiap pendanaan yang dituangkan dalam aktivitas dengan keluaran serta hasil

yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam menggapai keluaran tersebut dengan memakai tata cara penganggaran berbasis kinerja. Oleh sebab itu dengan terdapatnya anggaran berbasis kinerja diharapkan anggaran yang sudah disusun dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai .

Bastian mengatakan *performance budgeting* ialah suatu teknik penyusunan anggaran dimana anggaran tersebut berdasarkan dengan pertimbangan beban kerja (*work load*) dan biaya unit (*unit cost*) dari setiap kegiatan yang terstruktur. Pencapaian tujuan, program , dan didasari pemikiran bahwa penganggaran digunakan sebagai alat manajemen itu semua merupakan struktur awal. Tingkat keberhasilan program, baik dari sisi eksekutif maupun legislatif telah dijamin oleh penyusunan anggaran. Mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas ialah yang mana penetapan pengukuran *output* dikaitkan dengan biaya. Hal ini sekaligus merupakan alat untuk dapat menjalankan prinsip akuntabilitas, sebab yang diterima oleh masyarakat pada akhirnya ialah *output* dari suatu proses kegiatan organisasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penganggaran berbasis kinerja didasarkan pada peraturan tersebut. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) telah disusun dalam peraturan tersebut. Dengan demikian, RKA- SKPD diharapkan bisa menciptakan *output* yang maksimal guna memenuhi kebutuhan anggaran berbasis kinerja. Sehingga dapat menghasilkan hasil yang efisien, efektif serta ekonomis dalam penerapan serta pencapaian anggaran berbasis kinerja. Kemudian dengan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja ini, pemerintah dituntut untuk membuat standar kinerja yang jelas dimana standar kinerja menjadi acuan



anggaran kegiatan untuk mengetahui tindakan yang dilakukan, biaya yang diperlukan dan hasil yang diperoleh.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan dituntut harus merencanakan anggaran dengan baik serta diharapkan untuk bisa membuat laporan keuangan sebagai keluaran atau *output* atas kegiatan yang diselenggarakan atau yang telah dilakukan selama satu periode yang dimana hal ini nantinya akan dipertanggung jawabkan. Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan oleh penulis, dengan menganalisis terhadap data yang telah didapatkan dari kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, ditemukanlah beberapa masalah. Pertama ditemukanlah masalah yang mana realisasi anggaran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan belum mencapai 100% anggaran yang ada. serta adanya presentase yang dapat dilihat mengalami penurunan pada tahun 2019. Adapun perbandingan realisasi penyerapan anggaran dari tahun 2017-2019, sebagai berikut :

**Tabel 1. Data Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan**

Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi	Presentase (%)
2017	18.262.332.000,00	17.855.935.329,00	97,77
2018	15.891.565.000,00	15.379.206.106,00	96,78
2019	14.529.222.000,00	14.010.389.831,00	96,43

Sumber : LRA Disdukcapil Kota Tangerang Selatan Tahun 2017-2019

Di lihat dari tabel diatas, diketahui bahwa Pada tahun 2017 realisasi anggaran mencapai Rp. 17,855,935,329.00 dengan presentase 97,77 %. Sedangkan Pada tahun 2018 mengalami penurunan realisasi anggaran mencapai Rp. 15.379.206.106,- dengan presentase 96,78%. Dan pada tahun 2019 menurun realisasi anggaran mencapai Rp. 14.010.389.831,- dengan presentase 96,43%. Jika dilihat dari data tersebut bahwa realisasi anggaran tidak terserap hingga 100% bahkan bisa dilihat adanya penurunan di tiap

tahunnya. Berlandaskan pada wawancara yang mana dilakukan oleh penulis, hal tersebut disebabkan oleh penggunaan anggaran yang mana dilaksanakan sefisien mungkin, maka menjadikan anggaran yang telah dialokasikan tidak terealisasi secara menyeluruh, serta penemuan harga yang mana harga ketika dilapangan lebih miring dibandingkan harga yang telah ditetapkan dalam standar biaya minimum hal tersebut pula menjadi pertimbangan dalam mengalokasikan anggaran. Oleh karena itu anggaran yang telah direncanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tidak terserap semua. Permasalahan kedua yang ditemukan, masih belum maksimalnya realisasi program yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan yang mana masih ditemukannya presentase di bawah angka 80% dalam realisasi program tersebut. Oleh karena itu hal tersebut tidak sesuai dengan pernyataan yang telah diberikan oleh bidang keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan yang kinerja keuangan instansi tersebut dikatakan sangat baik karena mencapai angka 80% dalam perealisasiannya. Tidak hanya itu, ditemukanlah program yang realisasinya belum mencapai minimal 95% bahkan 100% hal tersebut sesuai dengan PMK Nomor 258/PMK.02 Tahun 2015 yang berisi mengenai Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

**Tabel 2. Realisasi Program dan Kegiatan Pendukung Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan Tahun 2019**

Misi	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase (%)
	Manajemen Administrasi Kependudukan	5.463.885.000,00	5.215.484.289,00	95,42
	Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi	435.146.000,00	435.146.000,00	100
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Berbasis Teknologi	Pengembangan Kemampuan Sistem Informasi dan Media Massa	378.401.000,00	378.871.000,00	99,71
	Perencanaan Pembangunan Daerah	506.900.000,00	491.485.000,00	97,11
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Berbasis Teknologi	Pengembangan Pemukiman Kawasan Daerah	52.900.000,00	52.800.000,00	100
	Pengembangan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	149.950.000,00	113.314.000,00	76,02
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Berbasis Teknologi	Manajemen Administrasi Dan Sarana Prasarana	7.541.836.000,00	7.328.398.503,00	97,17
	Pengembangan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	14.529.222.000,00	14.010.389.831,00	96,43
<b>Jumlah</b>				

Sumber : LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan kepada salah satu pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, diketahui bahwa penyebab program yang dilaksanakan belum sepenuhnya terealisasi secara maksimal yaitu dikarenakan adanya kegiatan yang tidak terlaksana dengan baik, kurangnya partisipasi sumber daya manusia yang mana menjadi sasaran serta adanya keterbatasan waktu dalam melaksanakan program ataupun kegiatan sehingga pelaksanaan program tersebut kurang optimal.

Oleh karena itu, atas permasalahan yang ada mengenai realisasi penyerapan anggaran tahun 2017-2019 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada penelitian ini, perlu dikaji lebih mendalam apakah anggaran berbasis kinerja mempengaruhi atas efektivitas realisasi anggaran. Maka dari itu dapat diuraikan dan penulis teliti persoalan yang ada dengan menggunakan dimensi yang relevan atas teori anggaran berbasis kinerja serta efektivitas realisasi anggaran.

Untuk lebih mudah membedah persoalan yang ada menggunakan Gagasan teori anggaran berbasis kinerja oleh (Bastian, 2010) yang mana menyatakan bahwa *performance budgeting* ialah suatu teknik penyusunan anggaran dimana anggaran tersebut berdasarkan dengan pertimbangan beban kerja (*work load*) dan biaya unit (*unit cost*) dari setiap kegiatan yang terstruktur. Pencapaian tujuan, program, dan didasari pemikiran bahwa penganggaran digunakan sebagai alat manajemen itu semua merupakan struktur awal. Tingkat keberhasilan program, baik dari sisi eksekutif maupun legislatif telah dijamin oleh penyusunan anggaran. Mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas ialah yang mana penetapan pengukuran output dikaitkan dengan biaya. Adapun dimensi anggaran berbasis kinerja sebagai berikut:

1. Efisiensi, efisiensi ini terkait dengan hubungan antara output berupa barang atau

pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang dihasilkan yang mana digunakan untuk menghasilkan output tersebut.

2. Ekonomi, indikator ekonomi ini merupakan indikator mengenai tentang input.

3. Efektivitas, indikator ini menunjukkan mengenai kesuksesan ataupun kegagalan dalam pencapaian suatu tujuan.

Sedangkan menurut Halim (2012) efektivitas ialah suatu tingkatan pencapaian hasil program kerja dengan target yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan suatu perbandingan yang mana perbandingan antara output dengan outcome. Dimana outcome ini sering kali dikaitkan dengan tujuan atau target yang akan dicapai. Adapun dimensinya menurut (Hasibuan, 2003) yaitu kuantitas, kualitas dan pemanfaatan waktu. Adapun teori penghubung anggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas realisasi anggaran yang mana telah di kemukakan oleh Halim (2012) yaitu efektivitas dalam pemerintah daerah dapat diartikan pencapaian kegiatan tepat waktu dan dalam batas anggaran yang tersedia, dapat diartikan pula mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah direncanakan. Semakin besar kontribusi pengeluaran yang dilakukan terhadap nilai pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan dapat dikatakan efektif.

Oleh sebab itu teori serta dimensi ini digunakan oleh peneliti untuk mengukur seberapa besar anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap efektivitas realisasi anggaran, serta untuk memecahkan persoalan yang terjadi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan.

Adapun penelitian terdahulu mengenai Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung (Anggraeni & Saleh, 2020) menjelaskan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kota Bandung.

Penelitian lain dari (Wongkar, Senduk, & Tanor, 2021) yang berjudul “ Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Di Kabupaten Minahasa” penelitian tersebut membahas mengenai bahwa adanya pengaruh positif anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. Agar kinerja aparatur pemerintah daerah tetap dapat ,menghasilkan kinerja yang maksimal untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada publik maka pemerintah harus terus memperhatikan setiap anggaran yang dikeluarkan untuk setiap SKPD, peningkatan kinerja dari aparatur pemerintah memberikan dampak terhadap besaran anggaran yang ada.

Penelitian sebelum lainnya dari (Kurniasari, Kurniasari, & Marta, 2017) berjudul “Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat”. ternyata sangat tinggi dalam mencapai efektivitas pengendalian anggaran. Dalam memperhatikan aspek *performance-based budgeting* beserta dimensinya, diperlukan suatu pengendalian organisasi. Dengan demikian anggaran yang ditetapkan oleh organisasi berbasis sistem yang efektif, efisien dan ekonomis dapat terjaga dengan baik. Terdapat pula pengaruh dimensi efektif, efisien dan ekonomis secara parsial dan simultan terhadap efektivitas pengendalian anggaran pada DPPKAD Kabupaten Bandung Barat.

Oleh karena itu yang menjadi perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini ialah bagaimana pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas realisasi anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini ialah sebagai pengetahuan mengenai anggaran berbasis kinerja dan efektivitas realisasi anggaran. Adapun tujuan yang ingin dicapai, yaitu mengetahui bahwa antara variabel terikat yaitu efektivitas realisasi

anggaran dengan variabel bebas yaitu anggaran berbasis kinerja ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan diantara dua variabel tersebut.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ialah pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif. Penelitian menggunakan asosiatif ini sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2019) bahwa suatu metode penelitian yang mempunyai tujuan untuk bisa menganalisis dampak dari satu variabel dengan variabel lainnya disebut penelitian asosiatif karena peneliti menggunakan dua variabel dalam penelitian ini, yaitu anggaran berbasis kinerja (X) selaku variabel independen (bebas) serta efektivitas realisasi anggaran (Y) selaku variabel dependen (terikat). Ini berarti penelitian tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh data yang valid dimana data tersebut mengacu pada permasalahan yang empiris dan memungkinkan untuk dilakukan pengukuran variabel penelitian dan untuk menganalisis data yang didapatkan dari teknik pengumpulan data yang kemudian ditampilkan dalam bentuk informasi.

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Adapun jangka waktu yang diperlukan untuk penelitian ini yaitu mulai bualnn Oktober 2021 sampai Maret 2021.

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan yang berjumlah 94 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *nonprobability sampling* dengan menggunakan teknik sampling jenuh. Sugiyono (2019) mengatakan bahwa sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel jika seluruh anggota populasi dijadikan sampel. Hal ini dilakukan apabila jumlah populasi relatif kecil yang mana jumlah populasi kurang dari 30 orang. Sampling jenuh dapat dikatakan dengan istilah sensus, yang mana dengan menggunakan teknik tersebut seluruh anggota

populasi dijadikan sampel. Sejalan dengan itu jumlah sampel dalam penelitian ini adalah seluruh jumlah populasi yaitu seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan yang mana berjumlah 94 orang, maka jumlah sampel sebanyak 94 orang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data primer dan data sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara menyebarkan kuesioner atau angket dengan metode survey yang mana dibagikan kepada seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan.

Analisis data dengan menggunakan skala likert yang mana skala likert digunakan untuk mengukur jawaban atas masing-masing responden. Agar penelitian ini dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan maka dari itu perlu dipahami konsep operasional dan indikator penelitian pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.Operasionalisasi Variabel

Variabel	Dimensi	Skala
Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (X)	1. Efektif	Likert
	2. Efisien	Likert
	3. Ekonomis	Likert
Efektivitas Realisasi Anggaran (Y)	1. Kuantitas	Likert
	2. Kualitas	Likert
	3. Pemanfaatan Waktu	Likert

Uji kualitas data dalam penelitian ini yaitu menggunakan uji validitas, reliabilitas dan analisis deskriptif. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas. Kemudian metode analisis data yang digunakan ialah regresi linier sederhana, metode ini digunakan karena hanya ada satu variabel independen. Serta penulis juga menggunakan uji determinasi (R<sup>2</sup>) dan uji hipotesis (t).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif ini digunakan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dari tiap variabel yang diteliti. Berikut variabel penerapan anggaran berbasis kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. Nilai Batas Kategori Tanggapan Responden Mengenai Variabel Anggaran Berbasis Kinerja

Dimensi	Skor Terendah	Skor Tertinggi	Jumlah Klasifikasi	Klasifikasi	
Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja	357	411	5	91% - 100%	Sangat Baik
				81% - 90%	Baik
				65% - 80%	Cukup Baik
				55% - 64%	Kurang Baik
				0% - 54%	Tidak Baik
Hasil dari tingkat capaian responden pada variabel anggaran berbasis kinerja				81,9%	
Kategori jawaban responden terhadap variabel penerapan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan adalah Baik					

Dapat dilihat tabel diatas bahwa kategori pada variabel penerapan anggaran berbasis kinerja ialah 81,9% yang mana terletak pada rentang 81% sampai 90%, dengan demikian, yang mana hasil tersebut dihasilkan melalui penyebaran kuesioner maka dapat ditarik kesimpulan penerapan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan dapat dikatakan sudah berjalan dengan **baik**.

Sedangkan untuk nilai batas kategori variabel efektivitas realisasi anggaran disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5. Nilai Batas Kategori Tanggapan Responden Mengenai Variabel Efektivitas Realisasi Anggaran

Dimensi	Skor Terendah	Skor Tertinggi	Jumlah Klasifikasi	Klasifikasi	
Efektivitas Realisasi Anggaran	380	412	5	91% - 100%	Sangat Baik
				81% - 90%	Baik
				65% - 80%	Cukup Baik
				55% - 64%	Kurang Baik
				0% - 54%	Tidak Baik
Hasil dari tingkat capaian responden pada variabel efektivitas realisasi anggaran				84,7%	
Kategori jawaban responden terhadap variabel penerapan efektivitas realisasi anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan adalah Baik					

Dapat dilihat tabel diatas bahwa kategori pada variabel penerapan anggaran berbasis kinerja ialah 84,7% yang mana terletak pada rentang 81% sampai 90%, dengan demikian yang mana hasil tersebut dihasilkan melalui penyebaran kuesioner maka dapat ditarik kesimpulan

efektivitas realisasi anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan dapat dikatakan sudah baik.

b. Uji Validitas

Uji validitas ini digunakan untuk menguji pernyataan atau pertanyaan pada kuesioner yang mana kuesioner tersebut telah disebar valid atau tidak valid. Dengan perhitungannya membandingkan  $r_{hitung}$  dengan  $r_{tabel}$ . Setelah penulis melakukan uji validitas dengan menggunakan SPSS Versi.22 dan dibandingkan antara  $r_{hitung}$  dengan  $r_{tabel}$  dicari pada tingkat signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi dan  $N=94$ , sehingga didapatkan  $r_{tabel}$  0,2028. hasil uji validitas dari seluruh item penerapan anggaran berbasis kinerja dan efektivitas realisasi anggaran melalui perhitungan SPSS Versi.22 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 6. Hasil Uji Validitas Variabel Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja**

Butir	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	keterangan
1	0,301	0,2028	VALID
2	0,363	0,2028	VALID
3	0,229	0,2028	VALID
4	0,464	0,2028	VALID
5	0,368	0,2028	VALID
6	0,330	0,2028	VALID
7	0,503	0,2028	VALID
8	0,412	0,2028	VALID
9	0,482	0,2028	VALID
10	0,437	0,2028	VALID
11	0,317	0,2028	VALID
12	0,365	0,2028	VALID
13	0,681	0,2028	VALID

**Tabel 7. Hasil Uji Validitas Variabel Efektivitas Realisasi Anggaran**

Butir	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	keterangan
1	0,534	0,2028	VALID
2	0,308	0,2028	VALID
3	0,412	0,2028	VALID
4	0,409	0,2028	VALID
5	0,565	0,2028	VALID
6	0,666	0,2028	VALID
7	0,636	0,2028	VALID
8	0,666	0,2028	VALID

Berdasarkan pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa untuk masing-masing pernyataan variabel penerapan anggaran berbasis kinerja (x) dan variabel efektivitas realisasi anggaran (y) seluruh butir terbukti valid, karena nilai  $r_{hitung}$  lebih besar daripada  $r_{tabel}$ . Dengan nilai  $r_{tabel}$  adalah 0,2028.

c. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengajukan validitas instrumen-instrumen yang valid umumnya reliabel, suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban responden terhadap pernyataan kuesioner konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Kriteria yang digunakan untuk menyatakan kuesioner penelitian ini reliabel atau tidak mengikuti ketentuan yang mana ketentuan tersebut dikemukakan oleh (Wiratna, 2014) bahwa nilai reliabilitas yang dapat diterima menggunakan alpha cronbach > 0,60, sedangkan bila alpha cronbach < 0,60 menunjukkan bahwa data tersebut tidak reliabel. Adapun reliabilitas dari masing-masing variabel hasilnya disajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 8. Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	alpha cronbach's	Batas Reliabilitas	Kriteria
Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (X)	0,617	0,60	Reliabel
Efektivitas Realisasi Anggaran (Y)	0,615	0,60	Reliabel

d. Uji Normalitas

Uji normalitas pada penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Cara yang ditempuh untuk menguji kenormalan data ialah menggunakan uji *One Sample Kolmogorov Smirnov Test*. Uji *One Sample Kolmogorov Smirnov Test* ini dapat dihitung jika nilai signifikansi atau nilai *Asymp.Sig (2-tailed)* lebih besar dari 0,05. dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 9. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov**  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		94
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.98833110
Most Extreme Differences	Absolute	.102
	Positive	.102
	Negative	-.078
Kolmogorov-Smirnov Z		.986
Asymp. Sig. (2-tailed)		.285

a. Test distribution is Normal.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi *Asymp.Sig.(2-tailed)* sebesar 0,285 yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi **normal**.

e. Analisis Korelasi Spearman Rank

Analisis Korelasi Spearman Rank ini biasa digunakan untuk menghitung ataupun mengukur hubungan antara satu variabel independen (anggaran berbasis kinerja) dengan satu variabel dependen (efektivitas realisasi anggaran). Oleh karena itu berdasarkan hasil analisis dengan melalui software SPSS Versi. 22 di perolehlah hasil sebagai berikut :

**Tabel 10. Hasil Uji Analisis Korelasi Spearman Rank**

Correlations				
			ANGGARAN BERBASIS KINERJA	EFEKTIVITAS REALISASI ANGGARAN
Spearman's rho	ANGGARAN BERBASIS KINERJA	Correlation Coefficient	1	.567**
		Sig. (2-tailed)		0
	EFEKTIVITAS REALISASI ANGGARAN	Correlation Coefficient	.567**	1
		Sig. (2-tailed)	0	
	N		94	94

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

**Tabel 11. Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi**

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 - 0,199	Sangat Rendah
0,20 - 0,399	Rendah
0,40 - 0,599	Rendah
0,60 - 0,799	Sedang
0,80 - 1,000	Kuat Sangat Kuat

Sumber : Sugiyono (2019:184)

Dapat dilihat dari tabel 10 hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS Versi. 22, diperoleh hasil nilai korelasi antara anggaran berbasis kinerja dan efektivitas realisasi anggaran sebesar 0,567. yang mana nilai tersebut menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sedang karena nilai koefisien korelasi berada di antara 0,40 - 0,599. Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel independen (anggaran berbasis kinerja) dengan variabel dependen (efektivitas realisasi anggaran) memiliki hubungan yang **sedang**.

f. Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi ini digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh atau hubungan secara linier antara variabel independen dengan variabel dependen. Oleh karena itu berdasarkan hasil dari pengolahan data yang mana dengan menggunakan bantuan SPSS diperoleh hasil sebagai berikut :

**Tabel 12. Hasil Uji regresi linier**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	11.102	3.098		3.583	0.001
ANGGARAN BERBASIS KINERJA	0.428	0.058	0.609	7.365	0

a. Dependent Variable: EFEKTIVITAS REALISASI ANGGARAN

Dapat dilihat dari tabel 9 bahwa nilai konstanta (a) yaitu sebesar 11,102 dan nilai koefisien regresi (b) sebesar 0,428. maka dari itu didapatlah persamaan regresi linier sederhana yaitu :  $Y = 11,102 + 0,428 X$

Berdasarkan persamaan regresi diatas dapat dijelaskan bahwa :

1. Konstanta sebesar 11,102 yang mana nilai tersebut dapat diartikan jika penerapan anggaran berbasis kinerja (X) nilainya 0, maka efektivitas realisasi anggaran (Y) nilainya 11,102.
2. Jika penerapan anggaran berbasis kinerja mengalami kenaikan 1, maka nilai variabel dependen mengalami peningkatan sebesar 0,428.

Maka dapat disimpulkan bahwa jika nilai anggaran berbasis kinerja mengalami peningkatan nilai dari efektivitas realisasi anggaran juga akan mengalami peningkatan. Sebaliknya begitu ketika nilai dari anggaran berbasis kinerja menurun nilai efektivitas realisasi anggaranpun ikut menurun juga.

g. Koefisien Determinasi

Pengujian koefisien determinasi ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan dari variabel independen yang ada menjelaskan variabel dependen. Dari hasil uji analisis regresi linier dapat diperoleh output model summary sebagai berikut :

**Tabel 13. Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.609 <sup>a</sup>	0.371	0.364	1.999

a Predictors: (Constant), ANGGARAN BERBASIS KINERJA

Dapat dilihat dari tabel diatas diperoleh angka R Square sebesar 0,371 atau 37,1%. hal ini dapat menunjukkan bahwa persentase pengaruh variabel independen anggaran berbasis kinerja terhadap variabel dependen efektivitas realisasi anggaran sebesar 37,1%. sedangkan sisanya sebesar 62,9% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai R yaitu 0,609 yang mana dikenal dengan istilah koefisien korelasi.

$$Kd = R^2 \times 100\%$$

$$Kd = (0,609)^2 \times 100\% = 37,1\%$$

**Tabel 14. Hasil Koefisien Determinasi**

0% ≤ KD ≤ 100%	Tingkat Hubungan
81% - 100%	Sangat Tinggi
49% - 80%	Tinggi
17% - 48%	Cukup Tinggi
5% - 16%	Rendah Tapi Pasti
0% - 4%	Lemah Sekali

Berdasarkan tabel diatas jelas terlihat bahwa nilai koefisien determinasi yang telah di hitung sebesar 37,1% masuk dalam kriteria pengaruh cukup tinggi. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang cukup tinggi antara Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektivitas Realisasi Anggaran Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan.

h. Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen dengan variabel dependen. Hipotesis ini diuji dengan uji-t yang mana jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan jika signifikansi  $< 0,05$  (5%) maka artinya terhadap pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Diketahui nilai t tabel sebesar 1,66159 berikut inilah hasil Uji Hipotesis (Uji T) melalui software SPSS Versi.22 :

**Tabel 15. Hasil Pengujian Hipotesis T**

Model	Coefficients				t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	11.102	3.098		3.583	0.001	
ANGGARAN BERBASIS KINERJA	0.428	0.058	0.609	7.365	0	

a. Dependent Variable: EFEKTIVITAS REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan hasil uji diatas diketahui nilai uji  $t_{hitung}$  sebesar 7,365  $>$  1,66159 dan nilai signifikasinya sebesar 0,001  $<$  0,05. Maka hasil penelitian ini dapat menerima hipotesis yaitu “Terdapat pengaruh positif antara variabel Anggaran Berbasis Kinerja (X) Terhadap Variabel Efektivitas Realisasi Anggaran” .

**Pembahasan**

**Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektivitas Realisasi Anggaran**

Berdasarkan dari hasil uji menggunakan software SPSS Versi.22 dapat diketahui dalam uji normalitas bahwa seluruh variabel Anggaran Berbasis Kinerja (X) Terhadap Efektivitas Realisasi Anggaran (Y) berdistribusi normal, dilihat dari hasil uji *One Sample Kolmogorov Smirnov Test* menunjukkan hasil nilai signifikansi

*Asymp.Sig.(2-tailed)* sebesar 0,285 yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05.

Berdasarkan hasil uji Regresi Linier Sederhana, didapatkan bahwa nilai konstanta 11,102 dan nilai koefisien regresi sebesar 0,428. Maka didapatkan persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut : Efektivitas Realisasi Anggaran (Y) = 11,102 + 0,428 X . Perhitungan korelasi spearman rank diperoleh hasil nilai korelasi antara anggaran berbasis kinerja dan efektivitas realisasi anggaran sebesar 0,567. yang mana nilai tersebut menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sedang karena nilai koefisien korelasi berada di antara 0,40 - 0,599. Maka hubungan antara variabel independen (anggaran berbasis kinerja) dengan variabel dependen (efektivitas realisasi anggaran) memiliki hubungan yang sedang.

Penulis melakukan perhitungan rumus koefisien determinasi diperoleh hasil bahwa kemampuan variabel independen yaitu anggaran berbasis kinerja (X) berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu efektivitas realisasi anggaran (Y) sebesar 37,1%. Sedangkan sisanya 62,9% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti. Jadi adanya pengaruh yang cukup tinggi antara variabel independen terhadap variabel dependen. Setelah melakukan pengujian koefisien determinasi, maka penulis melakukan Uji Hipotesis (T) dengan hasil uji  $t_{hitung}$  sebesar  $7,365 > 1,66159$  dan nilai signifikasinya sebesar  $0,001 < 0,05$ . Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji T dapat disimpulkan bahwa hipotesis ( $H_a$ ) diterima atau dengan kata lain Anggaran Berbasis Kinerja (X) Berpengaruh Secara Parsial Terhadap Variabel Efektivitas Realisasi Anggaran (Y).

Tinggi rendahnya anggaran berbasis kinerja sangat berpengaruh terhadap efektivitas realisasi anggaran karena penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan dalam penyusunan anggaran yang didasarkan pada keefektifan yang akan dicapai, dimana anggaran berbasis kinerja sendiri menuntut

adanya *output* atau pengeluaran yang beralokasikan secara optimal. Hal ini sesuai dengan pendapat Bastian (2010) dalam bukunya yang berjudul *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar* yang mengemukakan bahwa anggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada *output* organisasi dan berkaitan erat dengan visi, misi serta rencana strategis organisasi. Dimana anggaran berbasis kinerja sendiri mengalokasikan sumber daya ke program bukan ke unit organisasi semata dan memakai pengukuran output sebagai indikator kinerja organisasi.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Data primer yang penulis peroleh dari penyebaran kuesioner maka dilakukan pengujian validitas untuk menyatakan valid atau tidaknya data yang diperoleh, serta jawaban reliabilitas untuk mengetahui konsistensi jawaban dari responden dari waktu ke waktu. Hasil pengujian validitas dan reliabilitas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan menunjukkan bahwa seluruh item dari pernyataan dinyatakan valid dan reliabel. Berdasarkan penelitian yang telah penulis bahas, maka dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas realisasi anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan ini yang mana dibuktikan dengan besaran  $t_{hitung}$   $7,365 > t_{tabel}$   $1,66159$  dan nilai signifikasinya sebesar  $0,001 < 0,05$ . Adapun penulis menemukan sumbangan pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas realisasi anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan sebesar 37,1%. Sedangkan sisanya 62,9% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti oleh penulis. Maka dari itu terjadilah pengaruh yang mana cukup tinggi penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas realisasi anggaran



pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang cukup tinggi antara penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas realisasi anggaran.

Adapun saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk selanjutnya sebagai masukan bagi pihak-pihak terkait yaitu:

#### 1. Bagi Instansi

Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan penulis mengharapkan penelitian ini menjadi bahan pertimbangan ataupun acuan yang mana sebagai pengevaluasian anggaran berbasis kinerja, yang paling penting dalam output anggaran yang mana belum mencapai 100%. Selain itu penulis berharap bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan lebih memperjelas secara detail atau terperinci mengenai tujuan program maupun strategi pencapaian tujuan program yang mana berkaitan dengan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Penulis mengharapkan juga adanya pengevaluasian anggaran berbasis kinerja dapat meningkatkan efektivitas realisasi anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan.

#### 2. Bagi Penulis Selanjutnya

Penulis berharap penulis selanjutnya dapat meneliti lebih mendalam yang mana guna menghasilkan suatu fenomena baru serta keilmuan mengenai anggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas realisasi anggaran yang mana dapat berguna bagi masyarakat luas.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Akbar, D. S. (2018). Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja. *JAWARA: Jurnal Wawasan Dan Riset Akuntansi*, 6(1), 36–44.
- [2] Anggraeni, F., & Saleh, A. S. (2020). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung )
- [3] Ariwibawa, Y., Rachmina, D., & Falatehan, A. F. (2018). Strategi Peningkatan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Pada Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 10(1).
- [4] Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- [5] Engkus, Hermawan, E., & Dwi Rahmawati, E. (2020). Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung. *Jurnal Papatung*, 3(2), 27–35.
- [6] Febrina Astria Verasvera. (2016). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Manajemen Maranatha*, 15(2), 137–162.
- [7] Halim, A., & Iqbal, M. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- [8] Hasibuan, M. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [9] Kalauw, A. amin. (2018). Pengaruh Kualitas Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Dan Efektivitas Pengendalian Anggaran Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat. *Jurnal Maneksi*, 7(2), 94–99.
- [10] Kurniasari, D., Kurniasari, D., & Marta, S. M. (2017). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran Di Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan

- Dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat. *PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 2, 71–88.
- [11] Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI (Anggota IKAPI).
- [12] Sahri, H., Agusti, R., & A, A. (2016). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 89–103.
- [13] Sofyani, H., & Prayudi, M. A. (2018). Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja di Pemerintah Daerah dengan Akuntabilitas Kinerja “A.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 13(1), 54–64.
- [14] Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [15] Wiratna, S. V. (2014). *SPSS Untuk Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- [16] Wongkar, D. L., Senduk, V., & Tanor, L. (2021). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 2(1), 1–7.
- [17] Yulia, A., & Ningsih, E. S. (2020). Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(1), 50–58.

PERAN PENDIDIKAN KEDOKTERAN  
DALAM PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI KESEHATAN,  
STUDI LITERATUR

Oleh

Reza Yuridian Purwoko

Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia

National Research and Innovation agency, BJ Habibie Building, J

I. M.H. Thamrin No.8, RW.1, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Central Jakarta City, DKI Jakarta

10340, Telp (021) 3169059

E-mail: [reza011@brin.go.id](mailto:reza011@brin.go.id)

**Abstract**

Keberhasilan riset dan inovasi di bidang kesehatan di Indonesia dapat ditingkatkan dengan peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan mahasiswa fakultas kedokteran melalui penambahan pengajaran di bidang penelitian sejak sekolah menengah hingga lulus menjadi seorang dokter yang berpraktek di pusat kesehatan yang terus mengaplikasikan teknologi di bidang riset dan inovasi kesehatan. Peran industri, termasuk fakultas kedokteran swasta maupun perusahaan yang mampu mempekerjakan dokter sebagai peneliti, sangat diperlukan.

**Keywords: Riset, Inovasi, Kesehatan**

**PENDAHULUAN**

Disebutkan oleh Bapak Laksana Tri Handoko, Januari 2021, bahwa produktivitas riset di Indonesia masih rendah, hal tersebut karena Indonesia masih memerlukan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) berkualitas yang lebih. Modal utama riset dan inovasi adalah SDM, bukan anggaran maupun infrastruktur, menurut Beliau. Anggaran pemerintah yang mengalokasikan belanja litbang Nasional sudah mencapai 1% Produk Domestik Bruto (PDB), telah sesuai dengan standar UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*).<sup>(1)</sup>

Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan beberapa organisasi serta asosiasi pendidikan kedokteran lainnya menolak pembukaan fakultas kedokteran baru pada awal tahun 2019. Menurut ketua KKI saat itu, Prof dr Bambang Supriyatno SpA (K) bahwa masih banyak fakultas kedokteran di Indonesia yang belum berkualitas baik dan belum sempat terbina. Dikemukakan bahwa masih ada 36% fakultas

kedokteran berakreditasi C sehingga perlu dilakukan perbaikan dan pembinaan terhadap institusi pendidikan kedokteran agar menghasilkan SDM yang kompeten dan professional termasuk di bidang riset dan inovasi kesehatan.<sup>(2)</sup>

Peningkatan produksi riset Nasional, menurut Pak Laksana Tri Handoko, terhambat pada peran dan kolaborasi pihak industri. Riset dan inovasi industri non pemerintah masih rendah, sedangkan sejak era 1970 – 1990 an, produsen manufaktur banyak beralih menjadi berbasis teknologi hingga ke arah virtual saat ini. Seharusnya industri sudah beralih menjadi industri kreatif yang didasarkan riset serta inovasi kolaborasi merupakan hal penting untuk meminimalisir risiko kegagalan inovasi dalam mencapai produk akhir yang melibatkan berbagai komponen sistem.<sup>(1)</sup>

Di bidang pendidikan kedokteran, produk akhir adalah lulusan dokter yang juga dapat menjadi peneliti maupun dosen penerus di berbagai fakultas kedokteran, tidak hanya sebagai klinisi, namun mampu menghasilkan inovasi baru di bidang kesehatan. Pada Maret

2022, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim menyebutkan bahwa masih diperlukan jumlah dokter yang lebih banyak di Indonesia, dengan distribusi dan kualitras yang terjaga dan baik. Dokter dan Guru/ Dosen mempunyai peran penting dalam menyiapkan masa depan SDM Indonesia yang baik dan berkualitas. Beliau mendukung kemitraan yang menurut Beliau sebaiknya perlu dilibatkan.

Penulis sebagai peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mencoba mengangkat studi literatur pengembangan SDM di bidang riset dan inovasi kedokteran.

### LANDASAN TEORI

Silver menuliskan bahwa keilmuan dapat bergeser dari inovatif menuju ketidak-mustahilan, misalnya di bidang kedokteran yang SDM penelitiannya menuliskan interpretasi eksperimen berdasarkan hipotesis yang dengan mudah sudah terjawab oleh pembaca. Beberapa contoh kasus adalah transfer DNA tanpa *vector*, penyatuan DNA bakteri ke dalam kromosom tanaman bertahun-tahun sebelum penemuan modifikasi tanaman secara genetik. Contoh lain adalah klaim isolasi bakteri baru yang diisolasi dari penggantian gugus fosfor dengan arsenik pada DNA. Hal-hal tersebut menurut Silver terjadi karena factor SDM yang kurang berkualitas.<sup>(3)</sup>

Rodriguez dkk melakukan penelitian terhadap 529 mahasiswa kedokteran dengan pemberian *open and interprofessional inquiry-based learning (IBL) course* untuk mengembangkan skill kreativitas dan riset. Workshop kreativitas diberikan kepada 198 mahasiswa dibandingkan dengan 331 orang yang dijadikan kontrol dan ditemukan bahwa IBL dapat meningkatkan kemampuan kompleks dalam kreativitas serta kemampuan meneliti dibandingkan dengan kelompok yang tidak diberikan.

Mugabo dkk melakukan systematic review terhadap model pelatihan yang dapat meningkatkan kapasitas meneliti, secara non

akademik. Didapatkan 14 paper dari 495 artikel yang memenuhi kriteria, yang dianalisis dengan sejumlah 4136 orang dilatih baik jangka pendek maupun jangka panjang. Berbagai parameter evaluasi dilakukan tes, survei, wawancara, dan matrik pendekatan sistem, didapatkan hasil bahwa kapasitas SDM dalam melakukan penelitian dapat diperkuat tanpa melalui jalur akademi yang akan meningkatkan kualitas riset, dukungan institutional, peningkatan pendanaan hingga dedikasi waktu aktivitas penelitian.<sup>(4)</sup>

Salgado melakukan meta analisis terhadap 3 dekade penelitian untuk memprediksi kemampuan tim melakukan inovasi di lingkungan kerja. Didapatkan hasil bahwa Kerjasama kolaboratif antar tim lebih kuat menghasilkan kreativitas dan inovasi dibandingkan dengan pekerjaan perorangan. Hal tersebut berkaitan dengan kemitraan dalam menghasilkan SDM unggul dalam bidang penelitian.<sup>(5)</sup>

Hawke dkk meneliti dan menciptakan intervensi untuk meningkatkan kapasitas kemampuan remaja dalam melakukan penelitian yang disebut *Innovate Research* pada 57 orang remaja selama 6 bulan. Subyek diberikan workshop project *Innovate Research* yang disusun oleh para peneliti senior dengan pemberian metode teori dan praktek menggunakan buku panduan dan tambahan-tambahan bacaan yang berupa berbagai manuskrip *peer-reviewed*. Selesai workshop peserta diminta bergabung dalam sesi mentoring selama dua bulan untuk meningkatkan dan mempertahankan pengetahuan yang mereka dapatkan.<sup>(6)</sup>

Arely dkk melakukan penelitian pemberian *Participatory Action Research (PAR)* pada guru sekolah untuk meningkatkan kualitas edukasi di bidang penelitian. Hal tersebut dilakukan karena rendahnya kualitas kemampuan penelitian pada mahasiswa di Mexico, terlihat dari jumlah lulusan S3 yang menjadi guru hanya sebesar 4,4%. Kompetensi riset (pengetahuan, skill, kemampuan dan

kualitas) guru, masih rendah. PAR dianggap lebih sesuai dengan lingkungan sekolah yang normal, mempunyai misi utama di bidang Pendidikan, sehingga tidak tercampur dengan kegiatan penelitian. 4 konsep dasar PAR<sup>(7)</sup> adalah :

1. Partisipasi aktif
2. Tujuan objektif yang fleksibel
3. Komitmen yang tinggi
4. Pembelajaran secara aktif

Guru-guru yang berpartisipasi dalam PAR diharapkan :

1. Memulai proses riset.
2. Kontribusi riset dengan pengalaman pribadi
3. Berpartisipasi dalam membuat dan mengadaptasikan materi pembelajaran
4. Mengimplementasikan pendekatan-pendekatan terbaru dalam bidang pendidikan
5. Mengumpulkan data-data evaluasi untuk memperbaiki praktek pengajaran.

Kuo dkk melakukan penelitian pembuatan perencanaan *practice-based research network (PBRN)* yaitu project riset praktek kedokteran yang aman. Melibatkan 32 klinik dengan 313 dokter praktek pribadi yang memiliki sekurang-kurangnya 1 juta pasien pertahun. Hal tersebut disimpulkan bahwa sesuai dengan kondisi klinik-klinik yang padat kesibukan memberikan pelayanan kepada pasien sehingga mampu meningkatkan penggunaan pengobatan dengan baik dan terus meningkatkan keamanan kedokteran di klinik atau praktek masing-masing.<sup>(8)</sup> Perencanaan terdiri atas 10 langkah :

1. Membangun partnership kolaborasi
2. Mengembangkan infrastruktur riset
3. Memformulasikan pertanyaan penelitian
4. Membuat metode desain studi
5. Memperoleh pendanaan pendukung
6. Membangun instrumen penelitian
7. Implementasi penelitian
8. Mengelola dan menganalisis data
9. Mempublikasikan hasil penelitian

10. Mentranslasikan riset ke dalam praktek sehari – hari

## METODE PENELITIAN

Kami melakukan studi literatur menggunakan metode pencarian Pubmed dengan kata kunci *health innovation*. Dari 30 halaman pencarian kami dapatkan 39 paper jurnal yang kemudian dipilih menjadi 6 paper untuk dibahas pada landasan teori.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Jika menilik dari permasalahan yang ada di Indonesia, dihubungkan dengan landasan teori berdasarkan hasil studi literatur yang kami peroleh, maka didapatkan hasil dan pembahasan sebagai berikut

1. Perlunya peran swasta selain pemerintah dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan kedokteran di Indonesia.
2. Dokter tidak hanya menjadi praktisi pelayanan kesehatan masyarakat, namun dapat berperan sebagai tenaga pendidik/dosen maupun peneliti yang menghasilkan inovasi di bidang kesehatan.
3. Mitra industri dapat menjadi kolaborator dalam mempekerjakan lulusan pendidikan fakultas kedokteran untuk menguatkan teknologi berbasis riset sebagai tumpuan pengembangan saat ini.
4. Diperlukan peningkatan kualitas pendidikan kedokteran sebagai dasar menjadi sosok peneliti kesehatan yang tidak mudah melakukan kesalahan, karena riset dan inovasi di bidang kesehatan menyangkut nyawa hidup manusia. Kualitas pendidikan kedokteran di bidang penelitian sudah tercakup pada gambaran akreditasi, namun perlu ditingkatkan dengan kolaborasi industri swasta untuk mencapai minimal seluruh fakultas kedokteran terakreditasi B di Indonesia. Jika diperlukan, peneliti inovasi kesehatan non praktisi maupun dosen pengajar, diambil dari fakultas kedokteran berakreditasi A.

5. Diperlukan berbagai perbaikan maupun peningkatan metode pembelajaran mahasiswa kedokteran dalam pengembangan kreativitas inovasi dan penelitian, misalnya dengan pemberian berkelanjutan di bidang workshop kreativitas, pelatihan-pelatihan tambahan non akademis, pemberian modul panduan yang disusun oleh peneliti-peneliti senior secara intensif kepada mahasiswa kedokteran, yang disertai evaluasi rutin.
6. Pemberian pendidikan sedini mungkin sejak sekolah menengah, dalam peningkatan kualitas kemampuan meneliti para calon mahasiswa kedokteran di Indonesia. Pemberian pendidikan tersebut tidak hanya bagi pelajar, namun juga bagi guru-guru sekolah tanpa menganggunaktivitas utama pendidikan.
7. Diperlukan partisipasi pembelajaran aktif disertai komitmen yang tinggi, berlandaskan tujuan objektif yang dinamis/fleksibel dalam melakukan kegiatan pendidikan penelitian hingga penulisan laporan hasil riset inovasi kesehatan.
8. Terus melakukan penelitian berbasis praktek saat mahasiswa kedokteran lulus menjadi seorang dokter dan bekerja di klinik maupun rumah sakit, dengan terus berkolaboarsi mengembangkan riset dan penelitian di bidang kesehatan, aktif menghimpun pendanaan hingga mempublikasikan secara ilmiah hasil-hasil penelitian inovasinya.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Inovasi di bidang kedokteran sangat bergantung kepada kuantitas dan terutama kualitas SDM di bidang penelitian kedokteran. Kuantitas dan kualitas tersebut tidak luput dari peran swasta dimulai dari tingkat sekolah hingga universitas dalam mengembangkan metode pembelajaran yang meningkatkan kemampuan tenaga dokter dalam melakukan riset penelitian yang melahirkan inovasi-inovasi berkelanjutan. Diperlukan penyusunan

bersama dalam suatu perencanaan yang terus diimplementasikan serta dievaluasi bahkan di luar kegiatan akademis, untuk melahirkan SDM-SDM peneliti unggul di bidang riset dan inovasi kedokteran.

### Saran

Dilakukan penelitian tambahan mengenai berbagai metode peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan kedokteran di bidang riset dan inovasi kesehatan di Indonesia dengan metode lapangan, survei, uji teknik, dan berbagai metode lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Humas LIPI. Masa Depan Riset dan Inovasi di Indonesia [Internet]. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2021. Available from: <http://lipi.go.id/berita/masa-depan-riset-dan-inovasi-di-indonesia/22323>
- [2] KKI kebijakan kesehatan Indonesia. IDI: Cabut Izin 8 Fakultas Kedokteran Baru [Internet]. Available from: <https://kebijakankesehatanindonesia.net/25-berita/berita/2771-di-cabut-izin-8-fakultas-kedokteran-baru>
- [3] Silver S. Beyond the fringe: When science moves from innovative to nonsense. *FEMS Microbiol Lett.* 2014;350(1):2–8.
- [4] Mugabo L, Rouleau D, Odhiambo J, Nisingizwe PM, Amoroso C, Barebwanuwe P, et al. Approaches and impact of non-academic research capacity strengthening training models in sub-Saharan Africa: A systematic review. *Heal Res Policy Syst* [Internet]. 2015;13(1):1–17. Available from: <http://dx.doi.org/10.1186/s12961-015-0017-8>
- [5] Hülshager UR, Anderson N, Salgado JF. Team-Level Predictors of Innovation at Work: A Comprehensive Meta-Analysis Spanning Three Decades of Research. *J Appl Psychol.* 2009;94(5):1128–45.

- 
- [6] Hawke LD, Darnay K, Brown M, Iyer S, Ben-David S, Khaleghi-Moghaddam M, et al. INNOVATE Research: Impact of a workshop to develop researcher capacity to engage youth in research. *Heal Expect*. 2020;23(6):1441–9.
- [7] Paredes-Chi AA, Castillo-Burguete MT. Is Participatory Action Research an innovative pedagogical alternative for training teachers as researchers? The training plan and evaluation for normal schools. *Eval Program Plann* [Internet]. 2018;68:176–84. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2018.03.007>
- [8] Kuo GM, Steinbauer JR, Spann SJ. Conducting medication safety research projects in a primary care physician practice-based research network. *J Am Pharm Assoc* [Internet]. 2008;48(2):163–70. Available from: <http://dx.doi.org/10.1331/JAPhA.2008.07142>

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN



---

**ULAMA DAN DAYAH DALAM NOMEGLATUR MASYRAKAT ACEH**

---

Oleh

**Mursyidin Ar-Rahmany****IAIN Langsa****E-mail: [mursyidin.ar70@gmail.com](mailto:mursyidin.ar70@gmail.com)****Abstract**

Ulama dalam masyarakat Aceh sebagai panutan yang menyatu dalam konteks keislaman. Pembentukan Ulama melalui dayah (pesantren), sehingga terbentuknya menjadi mujtahid dan pemangku pendidikan sekaligus implementator hukum. Ulama dan dayah bagaikan laut dan pantainya tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Sehingga menyatu dalam seluruh ruh kehidupan masyarakat Aceh. Eksistensi ulama sebagai pemimpin umat dan simbol pemersatu. Sebagai pemimpin informal alim ulama menjadi panutan, tempat bertanya dan tempat mengadu berbagai problematika. Masyarakat merasa terlayani dengan petuah darinya yang diberikan, merubah konsep kehidupan yang biasa kepada kehidupan yang Islami melalui pendidikan dayah. Seiring peruhan zaman, Ulamapun melakukan perubahan sesuai dengan perkembangan teknologi yang diemban dalam pendidikan dayah memberantas kejahilan dalam masyarakat. Maka terbentuk ulama yang mengembangkan sayapnya sampai ke seluruh nusantara. Maka ulama Aceh merupahan muballigh ke seluruh pelosok Indonesia dan Asia tenggara, seperti Ke pulau Jawa, Banjar, Makasar, Semenanjung Malaka, Brunai Darusalam bahkan sampai ke Mindanau.

**Keywords: Ulama, Dayah, Aceh****PENDAHULUAN**

Ulama merupakan tokoh sentral dalam kehidupan masyarakat di Aceh, karena mereka menjadi pelopor, pembentuk, pembina, pengayom dalam berbagai aspek kehidupan, baik aspek pendidikan, sosial dan kemasyarakatan, bahkan aspek politik dan ekonomi. Keberadaan ulama bagaikan lampu dalam masyarakat, yang memberikan input, baik menagani ideologi maupun teknologi. Karena itu, ulama mejadi sosok dan elemen terpenting dalam keberhasilan syariat Islam di Aceh.

Masyarakat Aceh sebagai masyarakat yang agamis, khususnya Islam sangat dekat dengan

ulama. Disadari bahwa ulama dalam masyarakat menjadi sosok yang dihormati dan dikagumi, menjadi panutan pembimbing, pemberi petunjuk kepada jalan yang benar bagi segenap warga, sehingga masyarakat atau ummat menjadi orang yang lebih memahami dan terpelihara sikap dan ibadah serta sosial budayanya. Kekaguman masyarakat terhadap ulama terutama karena ulama memiliki pengetahuan agama yang mendalam serta ulama juga sebagai tokoh yang memiliki kharismatik dalam kehidupan masyarakat.

Ulama di Aceh sudah banyak diberi gelar sesuai dengan tingkat keilmuannya yaitu Teungku, Abon, Abu, dan Teungku Chiek.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Gelar teungku yang dijuluki kepada seseorang sebenarnya biasa-biasa saja. Sebutan ini juga sering digelarkan kepada seseorang yang telah dan sedang menempuh pendidikan di dayah (pesantren).Sebutan itu tidak memandang berapa lama seseorang belajar di suatu lembaga pendidikan dayah. Namun kalau ditinjau secara ilmiah, ulama yang dimaksud adalah mereka selain memiliki pengetahuan agama yang dalam dan luas juga

memiliki pengaruh yang besar dalam masyarakat. Seorang ulama beriman, bertaqwa, beramal saleh dan berakhlak mulia, serta selalu mengajak umat manusia untuk melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi semua larangan-Nya. Umumnya mereka adalah pimpinan-pimpinan dayah/pesantren, walaupun ada pula yang tidak memimpin dayah. Keulamaan seseorang

Kepopuleran seorang ulama bukan saja karena kesalahannya dan berilmu tinggi, akan tetapi karena sanggup memimpin masyarakat. Sosok ulama adalah simbol pemersatu umat. Sebagai pemersatu umat, pada diri ulama itu terpancar sifat kharismatik. Kharisma atau kewibawaan yang dimiliki oleh seseorang ulama menjadi satu kekuatan yang mampu menggerakkan dan memotivasi rakyat dalam melakukan berbagai aktivitas positif sehari-hari.

## ULAMA DAN DAYAH

Ulama sangat edentik dengan dayah. Dayah<sup>2</sup> adalah sebuah lembaga pendidikan Islam yang sudah lama berkembang di Aceh.<sup>3</sup> Ulama dan dayah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan kehidupan sehari-hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan.

Secara historis, dayah tidak diketahui kapan sebenarnya Dayah masuk ke Aceh secara pasti. Namun, A. Hasyimi seorang Sejarawan Aceh, berpendapat bahwa Dayah masuk ke Aceh sejak awal berdirinya Kerajaan Islam Peureulak pada Muharram 225 H/840 M.<sup>4</sup> Jika merujuk pada hasil seminar tentang masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara yang

dilaksanakan di Rantau Peureulak pada tanggal 25-30 September 1980,<sup>5</sup> menyatakan bahwa tahun berdirinya Kerajaan Islam Peureulak sebagai Kerajaan Islam tertua, maka Dayah Cot Kala merupakan Dayah pertama di Aceh bahkan di Asia Tenggara. Setelah lahirnya Dayah Cot Kala, maka sesuai dengan tujuan pendirian dayah sendiri, yaitu untuk mencetak kader ulama sebagai petunjuk ummat, Dayah Cot Kala itu telah melahirkan para sarjananya yang dapat menyebarkan Islam ke seluruh Aceh sehingga lahirlah Dayah-dayah baru seperti Dayah Serele di bawah Pimpinan Tengku Syekh Sirajuddin yang didirikan pada tahun 1012 sampai dengan 1059 M, Dayah Blang Priya yang dipimpin oleh Tengku Ja'kob yang didirikan antara tahun 1155-1233 M, Dayah Batu Karang di Kerajaan Tamiang yang dipimpin oleh Tengku Ampon Tuan, Dayah Lam Keuneuen dari Kerajaan Lamuria Islam di bawah pimpinan Tengku Syekh Abdullah Kan'an yang didirikan antara 1196 sampai dengan 1225 M. Dayah Tanoeh Abee antara Tahun 1823-1836 M dan Dayah Tiro di Kecamatan Tiro Kabupaten Pidie antara tahun 1781-1795 M, dan dayah-dayah lainnya yang tersebar di seluruh Aceh di kala itu.

pimpinan dayah itu sering juga digelar dengan sebutan, Abon, Abu, dan Teungku Chiek.

<sup>2</sup>Istilah *dayah* berasal dari kata *zawiyah* yang berarti sudut atau pojok dalam bahasa Arab. Sebagai suatu institusi pendidikan, *zawiyah* yang berubah menjadi *dayah*, memang berasal dari pengajian-pengajian yang diadakan disudut-sudut masjid yang merupakan institusi pendidikan yang sangat awal dalam Islam. Lihat Safwan Idris, "Mengemban Amanah Allah: Reaktualisasi Syariat Islam dan Masa Depan Pendidikan di Aceh", dalam buku Fairus M. Nur Ibr, (ed.), *Syariat di Wilayah Syariat Pernik-pernik Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2002), hal. 12-13.

<sup>3</sup>Lembaga pendidikan yang diistilahkan dayah dari istilah *zawiyah*. Perubahan menjadi Dayah, seperti halnya perubahan istilah Madrasah menjadi Meunasah. Pada era Islam pertama masuk ke Nusantara yaitu masa Kerajaan Peureulak telah dikenal tempat yang yaitu Cut kala, kemudian didirikan sebuah pondok/dayah yang kemudian menjadi Zawiyah Cot Kala, tempat inilah yang

merupakan lembaga Pendidikan Agama pertama di Nusantara di dirikan abat ke 10.

<sup>4</sup>Berdasarkan lembaran-lembaran lepas dari naskah tua *Izdharul Haq Fil MamlakatilPeureulak*, karangan Syeh Ishak Makarani Al-Pasi dan naskah *Tajzirat Thabaqat Jam'u Salatin*, kerajaan Islam Peureulak didirikan pada tahun 225 H (840 M) dengan rajanya yang pertama adalah sultan Alaidin Saiyidi Maulana Abdul Aziz Syah, kemudian Tgk Muhammad Amin Pendiri Dayah Cot Kala juga menjabat sebagai Sultan Peureulak yang keenam yang bergelar *Makdum Alaidin Malik Muhammdah Amin Syah Johan Berdaulat*. Ini menunjukkan bahwa Dayah Cot Kala didirikan setidaknya pada awal abad ke 10 M dengan pimpinan Tengku Muhammad Amin Syah Johan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Pendidikan Daerah Istimewa Aceh*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984), hlm. 15

<sup>5</sup>Lihat A. Hasjmy, *Bunga Rampai Revolusi dari Tanah Aceh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hal. 67.

Perkembangan Dayah juga dilakukan pada masa kemunduran Kerajaan Aceh Darussalam (Abad ke 18 dan ke 19 M). Dayah yang dibangun pada masa tersebut adalah Dayah Tgk Syik Kuta Karang, Dayah Lam Birah, Dayah Lamnyong, Dayah Lambhuk, Dayah Krueng Rumpet, mengenai tahun pendirian dayah tersebut belum didapat data yang pasti.

Sejak abad IX Masehi, Kerajaan Islam Pereulak, Keberadaan Dayah di Aceh telah ada bersamaan dengan masuknya Islam ke Aceh pada akhir masa kekhalifahan Umar bin al-Khattab. Beberapa Dayah yang berkembang saat itu termasuk Dayah Cot Kala, Dayah Kuta Karang, Dar as-syariah Mesjid Raya, namun semua Dayah ini telah diobrak-abrik Belanda. Pada abad 5 Hijriah, Mesir menemukan kapal buatan Aceh yang terdampar di Laut Tengah. Pada masa Iskandar Muda, sebuah kapal Spanyol rusak di perairan Sabang, kemudian diderek ke pantai dengan gajah dan diperbaiki oleh santri-santri dayah Dar as-syariah.

Dayah merupakan sebuah lembaga yang dikenal dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, sehingga dayah merupakan lembaga pendidikan yang menjadi pilihan favorit dalam masyarakat Aceh. Sejak Islam masuk ke Aceh, pendidikan dayah merupakan pendidikan formal, dengan menggunakan bahasa pengantarnya adalah bahasa Aceh dan tulisannya memiliki resam tulisan Arab Jawi.

Institusi pendidikan tinggi Islam yang merupakan lanjutan dari institusi pendidikan *rangkang*. Hampir pada tiap-tiap daerah di Aceh berdiri *dayah*. Kadang-kadang ada *dayah* yang berpusat di masjid bersama dengan institusi pendidikan *Rangkang*, tetapi

kebanyakan *Dayah* berdiri sendiri di luar lingkungan masjid, dengan menyediakan Balai Utama sebagai aula, yang digunakan menjadi tempat belajar dan sembahyang berjama'ah.<sup>6</sup>

Mayoritas alumni dayah menjadi ulama dan tokoh masyarakat ketika mereka kembali ke kampung halamannya. Hal ini menunjukkan bahwa dayah memiliki potensi besar dalam mengembangkan pendidikan dan sosial kemasyarakatan.<sup>7</sup>

Sebelum kedatangan Belanda, dayah sering dikunjungi oleh orang-orang dari luar Aceh. Seperti: Daud al-Fattani dari Pattani<sup>8</sup> yang kemudian dikenal sebagai ulama terkemuka dan penulis yang terkenal serta guru yang dihormati oleh murid-murid muslim Asia Tenggara di Mekkah. Dia pernah mengunjungi Aceh pada tahun 1670-an dan belajar selama dua tahun dengan *Muhammad Zain al-Faqih al-Jalal al-Din al-Ashi*. Muhammad Zain al-Faqih adalah salah seorang pemimpin dayah di Aceh dan penulis dua kitab yang sangat terkenal, yaitu *Kasyf al-Kiram fi Bayan al-Niyat fi Takbirat al-Ihram* dan *Talkhis al-Falah fi Bayan al-Talaq wa al-Nikah*.<sup>9</sup>

Setelah Indonesia Merdeka, dayah tetap menjadi pilihan bagi masyarakat Aceh, namun lambat laun pendidikan dayah sudah menjadi pudar, lebih-lebih pada masa Orde Baru, dimana ulama dan dayah dipandang sebelah mata oleh penguasa/pemerintah, sementara alumni-alumni dayah menjadi pembina dan pendukung program-program pemerintah dalam membina membangun masyarakat seutuhnya. Demikian juga alumni dayah yang menjadi kaki tangan pemerintah, dapat

<sup>6</sup>*Ibid.*,

<sup>7</sup>Misnawati, *Pengaruh Manajemen Pendidikan Dayah Salafiyah di Aceh Timur terhadap Pendidikan Masyarakat*, dalam Dinamika Studi Keislaman: Konseptualisasi dan Aktualisasi Islam dalam Pelataran Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan, (Langsa: STAIN Zawiyah Cot kala Langsa, 2011), Cet.1, hlm. 138.

<sup>8</sup>Pattani adalah suatu wilayah yang terdapat di negara Thailand dan penduduknya mayoritas beragama Islam.

<sup>9</sup>M. Hasbi Amiruddin, *The Response of The 'Ulama' Dayah to The Modernization of Islamic Law in Aceh*, (Disertasi Master: Institute of Islamic Studies McGill University Montreal, 1994), hlm. 54. A. Malik, et. al., *Wacana Pemikiran Santri Dayah*, (Banda Aceh: BRR Nad-Nias, PKPM Aceh dan Wacana Press, 2007) hlm. 203.

terpeliharaan birokrasi ke pemerintahannya dalam wadah kekeliruan dan penyelewengan.

Pada umumnya dayah memiliki potensi besar dalam masyarakat.<sup>10</sup> Dengan demikian alumni dayah memiliki potensi dalam membangun, membina dan mengayomi berbagai lapisan masyarakat. Sehingga semua kalangan dapat merasakan kenyamanan, apalagi dalam masalah pendidikan dan pelatihan pengetahuan Islam.

Dayah merupakan wadah pelatihan mental, fisik dan juga menjadi wadah lahirnya pemimpin masyarakat yang ideal, baik di perkotaan maupun di pelisok perkampungan. Fungsi dayah di tangan masyarakat. Dayah memiliki dua fungsi dalam masyarakat, yaitu sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan, dan sebagai pembinaan sosial kemasyarakatan. Dua fungsi ini, akan membentuk manusia yang dapat mengembangkan ideologi duniawi dan ukhrawi.

Dayah memiliki elemen-elemen terpenting yang menjadi ciri-ciri sebuah dayah, yaitu Ulama (Tengku: pimpinan),<sup>11</sup> santri, pondok/bilik (asrama),<sup>12</sup> mushalla, dan pengajaran kitab-kitab.<sup>13</sup> Dengan demikian, dapat dikatakan sebuah dayah, apabila sudah memiliki dan berkembangnya lima elemen dasar tersebut.

Pada dasarnya, fungsi dayah dalam masyarakat tidak hanya sebagai tempat pengajian, melainkan juga sebagai tempat

pembinaan pendidikan, karena ia sebagai suatu lembaga keagamaan yang mengajar, mengembangkan serta menyebarkan ilmu agama, kaderisasi yang islami. Dayah mampu menghasilkan ulama yang berpengetahuan yang berkopeten dan siap pakai dalam menyelesaikan masalah baik keagamaan maupun masalah sosial kemasyarakatan.

Upaya kaderisasi ulama, dayah membuat komitmen dalam memberi bimbingan dan pelatihan moral dan spiritual pada setiap santri yang belajar di tempat ini. Sehingga ketika kembali dalam masyarakat menjadi panutan dan pedoman masyarakat serta membimbing dan membina umat dimana dia berdomisili.

Ulama yang merupakan alumni dayah, dapat membentuk solidoritas dalam mengembangkan keislamannya, baik berupa Aqidah, Ibadah maupun muamalah, bahkan meliputi politik dan ekonominya. Maka oleh karena itu, peran ulama dalam masyarakat Aceh menjadi pelopor dalam pendidikan dan permbinaan umat ke arah yang sangat positif. Dengan demikian, antara ulama dan dayah tidak dapat dipisahkan, karena antara ulama dan dayah memiliki konsep satu kesatuan dalam pendidikan dan pembinaan umat.

Dayah sebagai lembaga pendidikan formal di Aceh telah memberikan peran yang sangat signifikan dalam masyarakat Aceh. Data sejarah menyatakan bahwa dayah tersebut telah menghasilkan ulama-ulama yang bukan hanya

<sup>10</sup>Misnawati, *Pengaruh Manajemen ...*, hlm. 138-139.

<sup>11</sup>Dalam hal ini, Ulama adalah orang yang mampu memahami dan mentransformasikan ajaran-ajaran Islam ke dalam masyarakat. Karena itu mereka mendapat hak yang istimewa dalam struktur kelompok Islam tradisional. Ulama adalah orang paling bertanggung jawab dalam memelihara dan menafsirkan hukum Islam yang sesuai dengan pemikiran tradisional. Muhamad Iqbal, *Hukum Islam Indonesia Modern: Dinamika Pemikiran Dar Fiqh Klasik ke Fiqh Indonesia*, (Tenggerang : Gaya Media Pratama, 2009), Cet.I, hlm.71.

<sup>12</sup>Pondok merupakan asrama bagi santri untuk tempat tinggal, istirahat dan belajar (mengulang kembali

apa yang telah dipelajari di balai/local). Pentingnya pondok sebagai tempat tinggal dari tempat jauh. Pondok itu terbuat dari barak-barak yang dihuni oleh beberapa orang santri. Setiap pondok diawasi oleh tengku (guru atau santri senior). Pondok itu dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Lihat: Misnawati, *Pengaruh Manajemen ...*, hlm. 143.

<sup>13</sup>Pengajaran Kitab-kitab kuning meliputi keseluruhannya kitab klasik yang diklasifikasikan dalam 10 kelompok, yaitu: hanwu, sharaf, fiqh, usul fiqh, hadis/ilmu hadis, tafsir/ ilmu tafsir, tahuhid, tashawuf serta balaghah dan tarikh. Lihat: Misnawati, *Pengaruh Manajemen ...*, hlm. 143.

berperan sebagai penyebar dakwah Islam tetapi juga turut berperan dalam bidang pemerintahan dan perpolitikan.

Hal ini menunjukkan bahwa institusi pendidikan dayah yang terdapat di daerah Aceh telah berhasil mencetak para ulama yang terkemuka di daerahnya dan sebagian dari mereka juga telah menulis kitab-kitab yang terdiri dari pelbagai macam subjek, seperti tasawuf, ilmu kalam, logika, filsafat, fiqh, hadits, tafsir, akhlak, sejarah, tauhid, astronomi, perubatan dan masalah lingkungan.

Di samping itu dayah telah berhasil menjadi agen pengembangan dalam melahirkan tokoh-tokoh yang mampu menciptakan perubahan dan pembangunan dalam pengembangan masyarakat di Aceh. Secara historis, menunjukkan bahwa dayah merupakan lembaga pendidikan Islam pada masa itu menduduki posisi sentral dalam masyarakat dan negara.<sup>14</sup>Masa itu, dayah telah mampu menghasilkan alumni-alumni yang sangat berperan dalam kebijakan pemerintah dan juga dalam masyarakat. Sebagian dari tokoh-tokoh ini telah menjadi pemimpin-pemimpin dalam masyarakat dan sebagian lagi menjadi pembina komunitas dalam bidang ibadah dan praktek agama.

Dengan kata lain pada masa sebelum datangnya penjajah Belanda, lulusan dayah menempati posisi penting dalam masyarakat Aceh. Mereka dapat menempati posisi sebagai pemimpin formal yang duduk pada kursi pemerintahan dan ada juga yang menjadi pemimpin informal. Sebagai pemimpin informal ulama dayah menjadi panutan, tempat bertanya, tempat mengadu berbagai

permasalahan yang dihadapi masyarakat sehingga mendapat petunjuk darinya. Bahkan sering pula ulama dayah membimbing masyarakat dalam bermunajat (memohon) kepada Allah SWT.<sup>15</sup>

Alumni lembaga pendidikan Islam pada masa itu tidak hanya aktif dalam bidang keagamaan tetapi juga aktif dalam bidang-bidang kehidupan lainnya. Sebagai contoh alumni dayah yang aktif dalam bidang pertanian adalah Teungku Chik di Pasi yang memimpin masyarakat membangun sistem irigasi seperti yang dilakukan oleh Teungku Chik di Bambi dan Teungku Chik di Reubee.<sup>16</sup> Keberhasilan alumni dayah dalam menempati posisi-posisi strategis dalam masyarakat karena dayah merupakan satu-satunya lembaga pendidikan yang dianut oleh masyarakat Aceh pada waktu sebelum datangnya Belanda.

Namun demikian, eksistensi dan peran dayah dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi telah mengalami pasang surut.<sup>17</sup> Keberadaan Dayah pada masa perang melawan Belanda mengalami kemunduran, ini karena seluruh Ulama Dayah dan santrinya itu ikut berjuang melawan penjajah Belanda, sebagian besar para Ulama dan Tengku dayah syahid di medan perang, di antaranya Tengku Chik Haji Ismail anak Tengku Chik Pante Ya'kop (Pendiri Dayah Tgk Chik Pante Gelima), beliau syahid dalam peperangan melawan Belanda dalam mempertahankan Kuta Glee (Kawasan Batee Iliék Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen), bersama dengan Tengku Chik Lueng Kebue dan Tengku Syiek Kuta Glee.

Faktor lain yang menghambat perkembangan Dayah saat itu disebabkan

<sup>14</sup>Inayatillah, Peran Perguruan Tinggi Islam Pasca Penerapan Syariat Islam Di Aceh, dalam *The Role of Islamic Higher Learning Institution in Building Civil Society*, (STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa-Aceh 2010), hlm.43

<sup>15</sup>Shabri, et al., *Kedudukan dan Peran Dayah di Aceh Pada Masa Revolusi Kemerdekaan (1945-1949)*, (Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi NAD, 2005), hlm. 71.

<sup>16</sup>Baihaqi A.K., "Ulama dan Madrasah Aceh", dalam Taufik Abdullah, *Agama dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 117.

<sup>17</sup>Lembaga pendidikan Islam pada masa ini tidak hanya berperan sebagai *transfer of knowledge* tetapi juga berperan sebagai tempat untuk membina pengikut-pengikut dan untuk menghimpun kekuatan menghadapi Belanda. Ibrahim Alfian, *Perang di Jalan Allah: Perang Aceh 1873-1912*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), hlm.151.

karena Belanda melakukan upaya-upaya untuk menghambat pendidikan Agama Islam, serta Belanda menyebarkan pendidikan Barat di Aceh, sehingga menyebabkan Dayah terbengkalai. Selain itu, Belanda melakukan pembakaran terhadap Dayah-dayah dan membunuh seluruh staf pengajarnya serta membunuh seluruh staf perpustakaan yang ada di Dayah, jika ada dayah yang masih bertahan itupun dibangun di daerah terisolir dan jauh dari pantauan Belanda.

Setelah usainya peperangan pada tahun 1904 M, barulah Dayah-dayah yang telah terbengkalai tersebut dibangun dan dibenahi kembali untuk dapat digunakan kembali sebagai lembaga pendidikan, adapun Dayah yang dibangun kembali setelah perang Aceh usai antara lain, di Aceh Besar: Dayah Tanoeh Abee, Dayah Lambirah oleh Tengku Syik Lambirah, sedangkan adiknya Tengku Haji Ja'far (Tengku Syik Lamjabat) membangun Dayah Jeureula, selanjutnya juga dibenahi Dayah Lamnyong, Dayah Lambhuk, Dayah Ulee Susu, Dayah Indrapuri, Dayah Lamsenouen, Dayah Krueng Kale, Dayah Montasik dan masih banyak lagi Dayah-Dayah yang dibangun di Daerah Aceh Besar. Tidak hanya di kawasan Aceh Besar, Pidie, Aceh Urata, Aceh Barat dan beberapa daerah lainnya di Aceh juga ikut membenahi kembali Dayah yang hancur atau ditinggalkan karena perang kala itu.

Keberadaan Dayah pada masa perang melawan Belanda mengalami kemunduran, ini karena seluruh Ulama Dayah dan santrinya itu ikut berjuang melawan penjajah Belanda, sebagian besar para Ulama dan Tengku dayah syahid di medan perang.

Perlu diketahui, saat itu banyak Ulama yang ikut berjuang namun tidak sedikit juga diantara mereka yang mengasingkan diri keluar Aceh, diantaranya ke Negeri Keudah (Malaysia Sekarang). Salah satu tempat penting mereka berkumpul adalah Negeri Yan di Keudah, di sinilah mereka melanjutkan tradisi pendidikan Dayah selama perang Aceh berlangsung,

setelah perang reda, mereka yang tadinya mengasingkan diri segera pulang untuk kembali melanjutkan dan membangun kembali sistem pendidikan Dayah yang telah mengalami kemunduran pada saat perang berkecamuk, di samping tokoh Ulama yang pulang dari negeri Yan, ada juga yang langsung pulang dari Mekkah, seperti Tengku Haji Muhammad Thahir Cot Plieng, bahkan beliau pernah bertemu dengan Snouck Hogrounje saat sama-sama berada di Mekkah.

Setelah perang selesai, Dayah mengalami perkembangan, walaupun perkembangan yang terjadi pada waktu itu tidak begitu berarti, karena pada saat itu para Ulama Dayah disibukkan dengan perlawanan melawan Jepang, serta kebijakan Jepang saat itu menerapkan kerja paksa serta mengabaikan sisi-sisi lain dalam kehidupan masyarakat, termasuk pendidikan di dalamnya. Beberapa hal tersebut membuat Dayah dalam kurun waktu 3,5 Tahun masih jalan di tempat.

Pada masa kemerdekaan mulai tahun 1945 M, perkembangan Dayah sudah menampakkan hasil yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan Dayah Darussalam Labuhan Haji Achah Selatan, Dayah MUDI MESRA Samalanga, Dayah BUDI Lamno, dan dayah-dayah yang lain. Tidak hanya Dayah, Sekolah pun mulai berkembang, sekolah bersifat Negeri dengan dukungan dan bantuan dari pemerintah sedangkan Dayah umumnya bersifat pribadi yang dikelola oleh Pimpinan Dayah sendiri dengan bantuan swadaya masyarakat.

Itulah faktor-faktor penyebab kemunduran peran dayah. Sehingga ditambah lagi dengan kebijakan yang selama ini diterapkan oleh pemerintah telah membuat lembaga ini terpinggirkan. Dampak yang diakibatkan dari kebijakan pemerintah telah membuat perubahan pola pikir masyarakat terhadap peran dayah yang semakin sempit. Sehingga upaya untuk merevitalisasi peran dayah tersebut, perlu dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat secara bersinergi.

## ULAMA DALAM PEMBINAAN UMMAT

### 1. Panutan, Pembimbing, Pelindung Ummat

Eksistensi ulama dalam masyarakat juga berperan sebagai pemimpin umat dan simbol pemersatu. Sebagai pemimpin informal alim ulama menjadi panutan, tempat bertanya dan tempat mengadu berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, sehingga mendapatkan petunjuk dan petunjuk darinya. Tidak jarang pula masyarakat dalam bermunajat (memohon) sesuatu kepada Allah swt melalui bimbingan dan perantara para alim ulama.

Namun, apabila ditelusuri, bahwa posisi ulama dalam mengembangkan lembaga pendidikan Islam/dayah di Aceh mengalami pergeseran seiring dengan kedatangan penjajah Belanda. Dayah pada masa ini tidak hanya berperan sebagai *transfer of knowledge* tetapi juga berperan sebagai tempat untuk membina pengikut-pengikut dan untuk menghimpun kekuatan menghadapi Belanda.<sup>18</sup> Maka, karena itu, lembaga pendidikan pada masa ini digunakan sebagai pusat perlawanan terhadap Belanda maka letak lembaga pendidikan Islam mengalami pergeseran dari awalnya terletak di pusat kota menjadi terletak di pedalaman.

Sementara itu kedatangan Belanda ke Aceh tidak hanya untuk menjajah tetapi juga melakukan *transfer of value* dengan mendirikan pendidikan-pendidikan sekuler di Aceh. Lambat laun pasca kemerdekaan Republik Indonesia keberadaan lembaga pendidikan sekuler (yang diperkenalkan oleh Belanda)<sup>19</sup> ini telah berhasil menduduki posisi sentral dalam pembangunan di Aceh. Dimana banyak alumni-alumni pendidikan sekuler yang mendapat peluang untuk bekerja di berbagai bidang. Mereka tidak hanya dapat bekerja di kantor-kantor pemerintahan tetapi juga dalam bidang

jasa kedokteran, bisnis, perindustrian, dan sebagainya, sedangkan alumni-alumni lembaga pendidikan Islam hanya bekerja dalam bidang dakwah. Oleh karena itu penerapan Syaria'at Islam di Aceh dapat dijadikan momentum untuk mengembalikan kedudukan dan peran lembaga pendidikan Islam yang selama ini berada pada posisi marginal untuk dapat menempati posisi sentral dalam pembangunan di Aceh. Dimana upaya untuk mengembalikan peran dan kedudukan lembaga pendidikan Islam tidak untuk menggeser posisi lembaga pendidikan umum, akan tetapi dengan cara mensinergikan kedua lembaga pendidikan tersebut dalam mengisi pembangunan di Aceh.

Permasalahan utama yang harus dijawab adalah bagaimana sejarah sosial lembaga pendidikan Islam di Aceh sebagai pusat keilmuan dan peradaban Islam dan usaha apa yang perlu dilakukan oleh ulama agar dapat mengembalikan perannya yang utama dalam pembangunan di Aceh. Dimana penerapan Syariat Islam di Aceh dapat dijadikan sebagai peluang dan juga sekaligus tantangan bagi ulama untuk dapat berperan dalam pembangunan di Aceh.

Maka dalam hal ini, untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam tatanan kehidupan masyarakat, perlu melibatkan bukan hanya ulama, namun hendaknya dapat dilibatkan semua unsur yang ada di dalamnya. Demikian jua peran serta masyarakat seharusnya lebih diharapkan karena masyarakat dijadikan objek dalam menumbuhkan kebudayaan yang islami. Maka oleh karena itu, untuk mewujudkan masyarakat yang madani (*civil society*) bukanlah perkara yang mudah, masyarakat memerlukan pemimpin yang ideal yang tidak mengalami krisis kepercayaan terhadap pemimpin. Masyarakat memerlukan

<sup>18</sup>Ibrahim Alfian, *Perang di Jalan Allah: Perang Aceh 1873-1912*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), hlm.151.

<sup>19</sup>Meskipun pemerintah RI mewarisi semua model pendidikan yang diperkenalkan oleh pemerintah Belanda, namun pendidikan yang berlaku pada masa kemerdekaan sampai dengan seterusnya tidak dapat

dikatakan sebagai pendidikan sekuler karena dalam pendidikan ini ada terdapat mata pelajaran agama walaupun mata pelajaran agama hanya diajarkan satu jam dalam seminggu. Oleh karena itu, untuk istilah selanjutnya penulis lebih memilih untuk menggunakan istilah "pendidikan umum" atau "pendidikan nasional".

sosok pemimpin yang betul-betul berpengaruh dalam mengemban pembangunan, baik sarana fisik maupun sarana intelektual. Betapa pentingnya peran ulama dalam upaya memberantas budaya masyarakat tidak menyentu agama Islam dalam yang selalu penuh curiga dalam ketidak beresan terhadap pembinaan moral.

Maka oleh karena itu, untuk membutuhkan peran ulama yang sangat signifikans, itu menumbuhkan upaya dalam menumbuhkan dukungan dan partisipasi serta keikutsertaan pemimpin dan masyarakat dalam membentuk, membina masyarakat, baik moral spiritual maupun intelektual, maka untuk mendeskripsikan peran serta ulama dalam mengatasi masalah tersebut.

Secara historis, ulama, disamping membina umat, mereka juga menjadi pemimpin dalam perjuangan mempertahankan negara dan agama dari agresi/rongrongan penjajah dan juga dalam masa mengusir penjajah yang telah berusaha menduduki tanah air secara paksa, baik di Aceh maupun daerah-daerah lain di Indonesia. Posisi tersebut dipikul bukan karena sebagai penanggungjawab ketika itu, akan tetapi hanya sekedar ingin membebaskan umat dan tanah air dari cengkeraman penjajah. Yang lebih mengagumkan semua pihak adalah hal ini dilakukan malah ketika pemimpin-pemimpin negara tidak sanggup lagi mengajak rakyatnya untuk mempertahankan tanah air ini.<sup>20</sup>

Hal ini semakin membuktikan bahwa besarnya pengaruh ulama dalam masyarakat, menjadi sebuah panutan dalam mengembangkan syariat kepada kaum juhala'. Maka, karena itu, keterlibatan ulama dalam masyarakat untuk memberantas ketidakadilan pemimpin terhadap negara dan agama di Indonesia sangat lebih diharapkan. Pemerintah secara dini seharusnya mendukung peran ulama dengan cara memberi kesempatan yang lebih luas terhadap ulama. Dapat kita lihat sekarang

adalah ulama hanya dilibatkan ketika urusan-urusan pemerintahan dalam keadaan darurat atau sebagai kolaborator kekuasaan. Segelintir orang memanfaatkan kedekatan ulama dan umatnya untuk mempermulus kancahnya di jalur politik.

Keterlibatan ulama sangat diperlukan dalam upaya menumbuhkan dukungan, partisipasi dan keikutsertaan masyarakat dalam mengembangkan syariat Islam. Mayoritas masyarakat dan ulama sebagai pengajar utama nilai-nilai agama menjadikan hubungan keduanya sangat erat. Ulama adalah bagian berharga dari masyarakat, melibatkan ulama berarti melibatkan keseluruhan masyarakat.

Mengajak masyarakat untuk terlibat langsung dalam memberantas budaya korupsi bukanlah hal yang mudah. Berbagai macam pemikiran dan kepentingan menghalanginya. Ada yang begitu bahagia dengan pemberantasan budaya korupsi, ada juga yang bahagia dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk kepentingan segolongan. Ulama selaku pemimpin spiritual masyarakat memiliki andil yang penting dalam menyadarkan masyarakat, tentunya dengan dukungan pemerintah. Karena ulama hanya mampu mendorong masyarakat untuk terlibat. Berbagai ancaman yang akan terjadi hendaknya diantisipasi dengan tanggap oleh pemerintah.

Pengaruh ulama begitu penting di dalam masyarakat. Namun kalau ulama dalam hal ini tidak dilibatkan dalam upaya menegakkan syariat dan membentuk pribadi muslim seutuhnya penting.

Peran ulama telah terbukti semenjak sebelum zaman penjajahan kolonial Belanda. Sampai sekarang, pengaruhnya dalam masyarakat masih tetap eksis dan terjaga. Hal ini, untuk melibatkan ulama secara aktif tidaklah memadai hanya dengan kampanye atau berbagai seruan bahkan ancaman. Kesadaran dari dalam diri sendiri mutlak diperlukan guna

<sup>20</sup>Hasbi Amiruddin, dalam *Biografi Ulama-ulama Aceh Abad XX*, (2003). can be ordered



terwujudnya budaya malu korupsi. Pemerintah, pihak-pihak terkait lainnya dapat saja mengusahakan melibatkan masyarakat, tetapi membutuhkan waktu yang tidak singkat. Jabatan sebagai wakil rakyat atau peran pihak tertentu dalam pemberantasan budaya korupsi ada batas waktunya. Tetapi ulama tetaplah ulama yang menjadi lampu penerang bagi masyarakat. Melibatkan ulama secara lebih jauh dalam upaya menumbuhkan dukungan dan partisipasi serta keikutsertaan masyarakat dalam memberantas korupsi perlu dilakukan dengan sesegera mungkin, demi terciptanya sebuah masyarakat madani yang bebas dari berba-ha kemaksiatan, baik dalam aparatur pemerintah maupun masyarakat itu sendiri.

## 2. Ulama Aceh sebagai muballigh Nusantara

Sebagai muballigh, para ulama dalam menyampaikan risalah agama ke seluruh pelosok nusantara. Para ulama ini umumnya sangat menguasai retorika berdakwah agar disenangi oleh umatnya.<sup>21</sup> Maka, jauh sebelum

kesulthanan Aceh berdiri, ulama dari kesulthanan yang ada di wilayah Aceh sudah mendapatkan tugas dalam dakwahnya ke seluruh nusantara. Pengiriman ulama dari Aceh untuk menyampaikan risalahnya keseluruh Asia Tenggara, oleh sulthan kesulthanan Peureulak mengirim muballigh ke semenanjung Malaka sehingga para ulama yang berdakwah kesana bergabung dengan ulama dari Arab.

Pada masa sulthan Malik al Zahir<sup>22</sup> yang merupakan sulthan kedua dalam kesulthanan Samudera Pasai. Sulthan Malik al Zahir mengirim juga juru dakwah dan ulama ke seluruh Nusantara, diantaranya pengiriman Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Ishak untuk melakukan dakwah ke pulau Jawa. Dalam perkembangan dakwah, Maulana Malik Ibrahim berhasil menjadi dakwah ulung di tanah Jawa.<sup>23</sup> Maulana Malik Ibrahim sanggup melakukan Islamisasi diberbagai daerah di pulau Jawa sehingga Maulana malik Ibrahim dikenal dengan sesupuh wali Songo.<sup>24</sup>

<sup>21</sup>Lihat: Jalaluddin Rakhmat, ... 1994, hlm.2

<sup>22</sup>Sulthan Malik al Zahir merupakan putra dari Sulthan Malik al Shalih (Malikushahlih) perdiri kesulthanan Samudera Pasai sekaligus sebagai sulthan yang pertama. Hasil perkawinan Malik Al Shalih dengan putri dari kesulthanan Peureulak yang terakhir Sulthan Malik Abdul Aziz Syah bernama Putri Ganggang. Sulthan Malik al Shalih dikaruniai seorang anak bernama Al Malik Al Zahir. Pada kesulthanan Samudera Pasai dipengang oleh al Malik Al Zahir, maka kesulthanan Peureulak digabungkan dengan kesulthanan Samudera Pasai. Sulthan Malik Al Zahir memerintahkan pada tahun 1326-1349. Pada masa pemerintahannya, Samudera Pasai memiliki masa keemasan. Sulthan berpegang teguh kepada mazhab Ahli Sunnah, sangat perhatian kepada Islam, gemar mengadakan majelis-majelis ilmu, mendatangi ulama-ulama yang ahli dalam bidang fiqh dan ulama-ulama yang ahli dalam bidang syair dan filsafat. Sulthan Malik seorang pemimpin perang yang agung, dan ia telah memproklamirkan perang bagi penyembah berhala, sehingga penyembah berhala itu tunduk pada pemerintahannya dan membayar *jizyah* (upeti) kepadanya. Lihat: Wan Husein Azmi, *Islam di Aceh Masuk dan Berkembangnya Hingga abad XVI* dalam A. Hasyimi, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, (Bandung: al

Ma`arif, 1993), Cet.3, hlm.205. Lihat juga: Saifuddin Zuhri, *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: Al Ma`arif, 1981), hlm.197. Lihat Juga: Darmawijaya, *Kesultanan Islam di Nusantara*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2010), Cet.1, hlm.36.

<sup>23</sup>Menurut Buya Hamka, bahwa Maulana Malik Ibrahim digelar dengan Fatahillah yang diberi nama oleh sulthan Trenggono, karena keberhasilannya dalam menguasai banten untuk menjadi daerah Islam. Lihat: Munziirin dkk, *Sejarah Peradaban Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pinus, 2006), hlm.89-90. Lihat juga Harun Nasution dkk, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm.213.

<sup>24</sup>Menurut Abdul Qadir Djailani dalam bukunya *Peran Ulama dan Santri Dalam Perjuangan Politik Islam di Indonesia*, Samudera Pasai merupakan pusat pendidikan Islam pertama di Indonesia, dan dari sini berkembang ke berbagai daerah lain di Indonesia, hingga sampai ke Pulau Jawa. Salah seorang santri alumni Samudera Pasai adalah Maulana Malik Ibrahim, yang dituskan ke Jawa, ia datang ke Gresik Jawa Timur pada tahun 1399 dan wafat pada tahun 1419, setelah melakukan dakwah selama dua puluh tahun lamanya, sebelumnya, Maulana Malik Ibrahim bertugas sebagai Muballigh di daerah Campa yang merupakan daerah

Pengiriman juru dakwah juga dilakukan untuk melakukan dakwanya ke Sulawesi. Juru dakwah yang dikirim ke Sulawesi ini merupakan rombongan yang dipimpin oleh Raja Abdul Jalil bin al Qahhar dan dibimbing oleh seorang ulama dari Arab yang bernama Sheikh Ali al Qaisar.<sup>25</sup>

Samudra Pasai sudah banyak mengirimkan mulalighnya daerah-daerah yang perlu dilakukan Islamisasi secara serentak. Demikian juga daerah sekitarnya sampai ke Aceh Darussalam. Aceh Darussalam juga merupakan pusat studi dan pengembangan Islam di Asia Tenggara. Di Aceh Darussalam dibangun mesjid Baiturrahman yang megah, rumah-rumah ibadah dan lembaga-lembaga pengkajian Islam (Dayah/Pesantren), sehingga Aceh Darussalam lahirkan ulama-ulama besar,<sup>26</sup> seperti Hamzah Fansuri,<sup>27</sup> Syamsuddin al Sumatrani,<sup>28</sup> Nuruddin Al Raniry,<sup>29</sup> Abdul Ra'uf al Singkili dan banyak ulama-ulama lainnya.

Syeikh Hamzah Fansuri lahir di kota Barus, bahagian barat Daya Aceh. Beliau hidup pada masa sulthan Ali Riayat Syah (1588-1604) sampai sulthan Iskandar Muda (1607-1636).<sup>30</sup> Amzah Fansuri terkenal tasawufnya dengan

faham *Wahdat al Wujud*, yang menjadikan makhluk bisa bersatu dengan Tuhan. Karya-karyanya adalah *Asrar al Arifin fi Bayani ilmi al Suluki wa al Tauhid*, *Syarb al Asyiqin*, *Al Muhtadi* dan *Rubali Hamzah Fansuri*.<sup>31</sup>

Syaikh Syamsuddin al Sumatrani sebagai murid dari Syeikh Hamzah Fansuri. Ulama-ulama tersebut memiliki kharisma yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat Aceh Darussalam pada dalam menjalankan kesulthanan Aceh, termasuk masa sulthan Iskandar Muda (1607-1636), sehingga hampir semua peran dipegang oleh ulama dalam peran sebagai penasehat sulthan. Setelah wafatnya sulthan Iskandar Muda, Syaikh Syamsuddin al Sumatrani diganti oleh Syaikh Nuruddin Al Raniri.<sup>32</sup>

Syaikh Nuruddin Al Raniri memiliki pengetahuan luas yang meliputi tasawuf, kalam, fikih, hadis, sejarah, dan perbandingan agama. Selama masa hidupnya, ia menulis kurang-lebih 29 kitab, yang paling terkenal adalah "*BustanalSalatin*" (taman Raja-Raja) dan "*Shiratal Mustaqim*" (Jalan yang Lurus).

---

Kesultanan Samudera Pasai, setelah Maulana Malik Ibrahim wafat, Dayah juga diteruskan oleh anak beliau Raden Rahmat (Sunan Ampel).

<sup>25</sup>Lihat: Wan Husein Azmi, *Islam di Aceh Masuk dan Berkembangnya Hingga abad XVI* dalam A. Hasyimi, *Sejarah Masuk ...*, hlm.210. Lihat Juga: Darmawijaya, *Kesultanan ...*, hlm. 39.

<sup>26</sup>Harun Nasution dkk, *Ensiklopedi ...*, hlm.472.

<sup>27</sup>Syeikh Hamzah Fansuri lahir di kota Barus, bahagian barat Daya Aceh. Beliau hidup pada masa sulthan Ali Riayat Syah (1588-1604) sampai sulthan Iskandar Muda (1607-1636). Sri Mulyati, *Tasawuf Nusantara: Rangkaian Mutiara Sufi Terkemuka*, (Jakarta: Pustaka Kencana, 2006), Cet.1, hlm.73. Hamzah Fansuri terkenal tasawufnya dengan faham *Wahdat al Wujud*, yang menjadikan makhluk bisa bersatu dengan Tuhan. Karya-karyanya adalah *Asrar al Arifin fi Bayani ilmi al Suluki wa al Tauhid*, *Syarb al Asyiqin*, *Al Muhtadi* dan *Rubali Hamzah Fansuri*. Darmawijaya, *Kesulthanan ...*, hlm.49.

<sup>28</sup>Syeikh Syamsuddin al Sumaterani adalah ulama yang berpegang sebagai mufti pada masa sulthan

Iskandar Muda. Musyrifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, (Jakarta Rajawali Press, 2005), Cet.1, hlm.139.

<sup>29</sup>Nuruddin Al-Raniri, nama lengkap adalah *Syeikh Nuruddin Muhammad ibnu 'Ali ibnu Hasanji ibnu Muhammad Hamid ar-Raniri al-Quraisyi*. Ia adalah ulama penasehat Kesultanan Aceh pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Tsani (Iskandar II). Syaikh Nuruddin diperkirakan lahir sekitar akhir abad ke-16 di kota Ranir, India, dan wafat pada 21 September 1658. Pada tahun 1637, ia datang ke Aceh, dan kemudian menjadi penasehat kesultanan di sana hingga tahun 1644. [http://id.wikipwdian.org/wiki/Nuruddin Al-Raniri/mw/heed](http://id.wikipwdian.org/wiki/Nuruddin_Al-Raniri/mw/heed).

<sup>30</sup>Sri Mulyati, *Tasawuf Nusantara: Rangkaian Mutiara Sufi Terkemuka*, (Jakarta: Pustaka Kencana, 2006), Cet.1, hlm.73.

<sup>31</sup>Darmawijaya, *Kesulthanan ...*, hlm.49.

<sup>32</sup>Darmawijaya, *Nikmatnya Tashawuf: mengupas Kisah Sukses Ulama Tashawuf dalam Islamisasi Nusantara*, (Makasar: Pustaka Refleksi, 2007), hlm. 38

Al Raniri<sup>33</sup> berperan penting saat berhasil memimpin ulama Aceh menghancurkan ajaran tasawuf falsafinya Hamzah al-Fansuri yang dikhawatirkan dapat merusak akidah umat Islam awam terutama yang baru memeluknya. Tasawuf falsafi berasal dari ajaran Al-Hallaj, Ibn `Arabi, dan Suhrawardi, yang khas dengan doktrin *Wihdatut Wujûd* (Menyatunya Kewujudan) di mana sewaktu dalam keadaan *sukr* ('mabuk' dalam kecintaan kepada Allah Ta'ala) dan *fana' ftAllah* (hilang bersama Allah), seseorang wali itu mungkin mengeluarkan kata-kata yang lahiriahnya sesat atau menyimpang dari syariat Islam.

Maka oleh karena itu, Nuruddin Al Raniri memberikan sebuah fatwa bahwa paham *Wahdat al Wujûd* adalah sesat dan pengikutnya adalah kafi. Memberikan fatwa juga kepada sulthan Iskandar Tsani untuk membakar kitab-kitab yang ditulis oleh Hamzah Fansuri beserta muridnya Syamsuddin al Samatrani. Nuruddin Al Raniri menghimbau kepada penganut faham Wahdat al Wujud, agar mereka bertaubat, dan apabila tidak mahu bertaubat, maka dapat dijatuhkan hukuman mati.<sup>34</sup>

Syekh Abdurrauf al Singkily adalah salah seorang ulama yang dikenal memiliki peran yang sangat signifikan dalam pemerintahan Aceh pada masa itu. Beliau tidak hanya berperan dalam pemerintahan tetapi juga memiliki lembaga pendidikan Islam yang telah menghasilkan ulama-ulama yang berperan penting dalam proses islamisasi di wilayah nusantara dan juga telah mencapai wilayah manca negara. Diantara ulama-ulama yang belajar dengan Syekh Abdurrauf as Singkili adalah Burhanuddin, atau dikenal dengan Tuanku Ulama berasal dari Minangkabau, Abdul Muhyi dari Jawa Barat, Abdul Malik

Abdullah yang dikenal dengan Tok Pulau Manis dari Trengganu dan beberapa ulama lainnya.<sup>35</sup>

Karena pemahamannya faham *wahdat al wujud* dianggap sesat, Syekh Abdurrauf al Singkili mendamaikan dengan faham sunnah sebagaimana yang dibawakan oleh Nuruddin Al Raniri.<sup>36</sup> Syekh Abdurrauf al Singkili melanjutkan tugas Nuruddin Al Raniri sebagai penasehat sulthan ketika Aceh dipimpin oleh Ratu Shafiatuddin, Isteri Sulthan Iskandar Tsani sekaligus anak sulthan Iskandar Muda.<sup>37</sup>

Syeikh Abdul Rauf al Singkili wafat pada tahun 1693 dan dimakamkan dekat kuala Sungai Aceh (Krueng Aceh). Hingga kini, makamnya menjadi tempat ziarah dan wisata bagi berbagai lapisan masyarakat yang datang dari dalam Aceh, maupun dari luar Aceh.<sup>38</sup>

Inilah ulama-ulama besar Aceh yang sangay banyak berkiprah dalam menentukan kesulthanan Aceh Darussalam kegerbang kejayaan.

#### A. ULAMA DALAM PERUBAHAN ZAMAN

Menghadapi problematika perubahan zaman, ulamalah yang menjadi ujung tombak di barisan depan. Hal ini, menjadi sebuah cobaan dan ujian. Melalui ujian ini, maka terlihatnya kualitas keimanan, mampukah ia memanfaatkan waktu untuk kebajikan atau justru sebaliknya. Karena itu, dapatkan ulama melihat, memperhatikan dan mengamati kondisi umat kapan dan di mana ia berada.

Ulama Aceh pada masa dahulu mempunyai martabat dan supremi yang sangat membanggakan ketika melaksanakan nilai-nilai syariat Islam dalam masyarakat.<sup>39</sup> Ulama merupakan suatu *achieved status* yang

<sup>33</sup>Namanya kini diabadikan sebagai nama perguruan tinggi agama (IAIN) di Banda Aceh

<sup>34</sup>Lihat: Darmawijaya, *Nikmatnya Tashawuf*: ..., hlm. 45

<sup>35</sup>Azzumardi Azra, *Jaringan Ulama: Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad XVII dan XVIII : melacak akar-akar pembaruan pemikiran Islam di Indonesia*, (Bandung : Mizan, 1994), hlm. 256-257.

<sup>36</sup>Lihat: Darmawijaya, *Nikmatnya Tashawuf*: ..., hlm. 45-47

<sup>37</sup>Musyrifah Sunanto, *Sejarah Peradaban* ..., hlm.140.

<sup>38</sup>Darmawijaya, *Kesulthanan* ..., hlm.52

<sup>39</sup>Maulidi Qurdi, *Martabat Ulama di Wilayah Syariat*, dalam Syamsul Rizal dkk, *Syariat Islam dan*

diusahakan oleh seseorang melalui proses yang panjang. Status tersebut diperoleh tidak hanya karena penguasaan ilmu-ilmu Agama Islam tetapi juga karena penerapan ajaran-ajaran agama Islam dalam sikap dan perilaku keseharian. Selain itu, bahkan yang terpenting adalah bahwa status ulama itu dilegitimasi oleh pengakuan masyarakat atas penguasaan ilmu-ilmu Agama Islam dan keshalihan religius yang bersangkutan. Dalam perkembangan masyarakat Indonesia, ulama dikategorikan sebagai elit tradisional yang telah dan sedang memainkan peranan penting dengan berbagai strategis.

### 1. Perjuangan dalam Ghazwul Fikri

Umat Islam sebagai umat yang baik dan mulia ternyata tidak lagi nampak kemuliannya ditengah manusia lain, bahkan nampak semakin terik sebagai hasil keadaan jahiliyah yang semakin merajalela saat ini, hal ini mengakibatkan, bahwa keadaan umat Islam sekarang mengalami kehinaan dan berada dibawah kendali musuh-musuh Islam. kondisi seperti ini, disebabkan oleh umat Islam itu sendiri yang memiliki sejumlah kelemahan. Yang paling mendasar adalah *aqidah, tarbiyah, tsaqofah, dakwah, pengorganisasian/tanzim, akhlak*. Keadaan ini berlaku disebagian muslim tersebut nampak tidak mengamalkan ibadah wajib seperti sholat, berpakaian muslimah, zakat dan berpuasa. Keadaan demikian harus diperbaiki dengan menyediakan dakwah harakiyah yang integral dan bersifat *rabbaniyah, minhajiyah, marhaliyah* dan *ulawiyah* serta sesuai dengan reality dan seimbang.

Dalam melakukan pembinaan untuk membentuk pola pikir dan memperjuangkan dalam hal yang terbaik itu adalah dengan melihat beberapa aspek, yaitu aspek kejahilan, moral dan sampai berkembangnya aliran yang sudah jauh menyimpang dengan ajaran Islam itu sendiri.

### - *Kejahilan dan Kesesatan*

Nilai-nilai universal yang Islami yang menjadi ramuan pola pikir para ulama merupakan sebuah keyataan sejarah dalam perkembangan masyarakat Aceh. Hal ini yang harus di jalankan oleh ulama di Aceh, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka eksistensinya telah berintegrasikan dengan kehidupan masyarakat Aceh berdasarkan syariat Islam, baik melalui adat kebiasaan masyarakat yang sudah menjadi suatu kebudayaan dan kebiasaan masyarakat Aceh melalui proses akulturasi yang berjalan dengan periode dan waktu yang panjang, maupun melalui enkulturasi melalui proses pembinaan ilmu pengetahuan.

Proses pembinaan ilmu pengetahuan, terjadi dalam dunia pendidikan, kehadiran dayah/pesantren yang mempunyai sejarah lama, dan merupakan awal pendidikan modern dalam berbentuk madrasah, sekolah, perguruan tinggi Islam atau (PT) yang bercorak keislaman. Perkembangan ini secara integral dan telah memberikan revis terhadap citra sekolah yang bersifat umum yang meniru sistem Barat. Hal yang sama terjadi pula pada pendidikan nonformal, mulai dari bentuk pengajian sampai pada kursus-kursus diniyat yang diselenggarakan di mesjid dan masyarakat Islam hingga latihan-latihan dan bela diri.<sup>40</sup> Demikian juga dapat disangkan peranan penyelenggaraan pendidikan informal yang membentuk keyakinan dan citra masyarakat Aceh ke depan.

Kejahilan mengakibatkan merambak berbagai aliran sesat sebagaimana yang terlihat di seluruh Indonesia sekarang sudah berkembang bagaikan jamur yang tumbuh di musim hujan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya iman dan tingginya tingkat intervensi asing yang merupaka factor utama tersebarnya aliran-aliran sesat tersebut.

*Paradigma Kemanusiaan*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Prov NAD: 2008), hlm.198.

<sup>40</sup>Lihat: Yusuf Amir Faisal, *Reorientasi ...*, hlm. 288.

Dalam skala lokal, Aceh yang di juluki dengan Serambi Mekkah, sekarang juga sedang dihebohkan dengan ajaran sesat yang banyak menyita perhatian publik, seperti Millata Abraham. Aktivis-aktivis aliran tersebut tidak hanya menyeimbangi para masyarakat awam saja, tapi juga kaum terpelajar mahasiswa dan mahasiswi yang kurang pasokan konsep iman. Mereka menggedok para pengikutnya dengan uang tunai sebesar lima belas juta per bulan.<sup>41</sup> Hal ini, tentu merupakan sebuah tamparan keras bagi pemerintah Aceh umumnya dan Dinas syari'at Islam, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) atau (di Indonesia MUI) dan instansi terkait khususnya, seolah-olah mereka telah lalai atau tidak mampu dalam membendung aliran sesat tersebut, padahal itu mutlak menjadi tugas dan tanggungjawab mereka selaku perpanjangan tangan pemerintah.<sup>42</sup>

Menurut ketetapan Pemerintah Aceh, bahwa aliran sesat yang sudah berkembang di Aceh berjumlah 14 aliran, sementara yang diindikasikan oleh POLDA Aceh sebanyak 8 buah aliran. Aliran-aliran sesat lainnya yang sedang dipantau oleh pemerintah, ulama dan masyarakat Aceh berjumlah 27 Aliran.

Upaya pendangkalan aqidah dan penyebaran aliran sesat serta pemurtadan terhadap masyarakat Aceh, yang selama ini dilakukan oleh pihak-pihak tertentu sangat meresahkan masyarakat Aceh.<sup>43</sup> Munculnya berbagai aliran sesat sekarang ini tentu menimbulkan inisiatif yaitu pihak dinas syari'at Islam dan instansi terkait harus bisa berkerja secara maksimal, walaupun tidak ada biaya operasional dalam memberantas aliran sesat ini. Sumber daya yang ada harus mempunyai keberanian dalam mencegah aliran sesat tersebut. Jangan sampai, dengan maraknya aliran sesat yang bermunculan dewasa ini

semakin membuat individu yang khawatir dan rasa takut terhadap akidah generasi bangsa masa depan, karena itu menjadi sebuah celah yang bisa dimasuki oleh siapa saja terlebih orang-orang yang tidak pernah mempelajari agama sama sekali.

Diantara aliran-aliran sesat yang berkembang di Aceh "Millata Abraham" yang muncul di Kabupaten Bireuen. Aliran ilmu Laduni berkembang di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Barat Daya. Demikian juga dengan perkembangan Thariqan Naqsyabandi yang dipelopori oleh Qadirun Yahya. Di antara aliran-aliran yang lain, disinyalir telah menyimpang dari ketentuan agama Islam. Hasil investigasi Laskar Pembela Islam (LPI) menemukan aliran pimpinan Wak Iman ini menganjurkan pengikutnya untuk tidak mendirikan Shalat Fardhu (wajib 5 waktu) dengan alasan bahwa mereka masih tahap ma'rifat (mengenal Allah) belum sampai tahap Fiqh.<sup>44</sup>

Terungkapnya beberapa aliran sesat belum lama ini tentu menjadi sebuah peringatan bagi kita bahwa masih banyak aliran-aliran sesat yang belum terungkap, dan itu menjadi sebuah pekerjaan rumah (PR) bagi kita semua untuk terus mengungkap berbagai aliran-aliran yang selama ini telah meresahkan masyarakat banyak, karena munculnya berbagai aliran sesat tersebut akibat dari lemahnya pengawasan serta tidak ada sanksi tegas dari pihak terkait dalam memberantas aliran sesat.<sup>45</sup>

Dengan kondisi seperti ini, maka dibutuhkan pengawasan yang lebih ketat, baik dari pemerintah, ulama maupun masyarakat itu sendiri. Maka, bagi para pemimpin bangsa dan agama tersebut, baik itu ditingkat yang paling tinggi maupun ditingkat yang paling rendah, mereka dinilai telah gagal dalam menjaga kemurnian agama dari nilai-nilai yang dapat

<sup>41</sup>Ibid.

<sup>42</sup>Zulfikar, acehnationalpost.com/opini/2183/aliran-sesat-dansesat-aliran.

<sup>43</sup>rakyat aceh. Jumat, 21 September 2012

<sup>44</sup>arrahmah.com, MUI akan tindak aliran sesat ASMA, Rabu, 10 Zulqaidah 1433 H / 26 September 2012

<sup>45</sup>Zulfikar, acehnationalpost.com/opini/2183/aliran-sesat ...

merusak dan menghancurkan agama secara pelan-pelan. Kenyataan inilah yang menjadi sebuah potret kelam bagi para pemegang kekuasaan, apakah mereka memang tidak tahu tentang semua itu atau mereka tidak mampu mencegahnya? Secara kritis dapat dilihat bahwa seperti adanya maksud membiarkan saja disaat mereka menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya aliran-aliran yang sesat, apakah itu sengaja dilakukan atau cuma secara kebetulan saja.<sup>46</sup>

Untuk mengantisipasi dan membentengi umat dari upaya pendangkalan aqidah, pemurtadan dan aliran-aliran sesat tersebut, ulama yang tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh melakukan berbagai upaya diantaranya kegiatan pembinaan Aqidah Islam di setiap kabupaten dan kota di propinsi Aceh, Seperti dilakukan oleh MPU Provinsi Aceh hari Kamis tanggal 20 September 2012 lalu di Gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Karang Baru, Aceh Tamiang.

Kegiatan Pembinaan Aqidah Islam diikuti unsur Pemkab Aceh Tamiang tokoh agama, Ormas, tokoh masyarakat dan segenap elemen masyarakat, membahas berbagai hal terkait penyebaran aliran sesat. Ketua Pelaksana Kegiatan, Husnul Maab.S.Pd. M. Pd mengatakan, tujuan digelarnya acara Pembinaan Aqidah Islam antara lain, memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang aqidah benar.<sup>47</sup> Menginformasikan kepada masyarakat tentang pola jejaring aktor intelektual terhadap kegiatan pemurtadan dan aliran sesat.

## 2. Pengembangan sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan

Ulama telah memainkan berbagai peranan politik, social kemasyarakatan, ekonomi, pendidikan maupun kebudayaan, dan tentu saja yang terpenting adalah keagamaan. Pada masa kesultanan, para ulama memainkan peranan penting dan bahkan menentukan dalam

pemerintahan, selain bidang keagamaan. Penguasa baru (sultan) biasanya sangat mengandalkan legitimasi dari ulama yang menobatkan sultan tersebut sebagai penguasa baik dalam bidang pemerintahan maupun dalam bidang keagamaan. Hal ini dapat dilihat dalam sejarah kesulthanan baik di Aceh maupun di luar Aceh dalam kawasa Asia Tenggara ataupun di belahan dunia lainnya.

Memposisikan ulama dalam masyarakat Aceh adalah posisi yang sangat penting dan strategis tidak hanya karena alasan-alasan teologis tetapi juga histories-sosiologis. Secara teologis, sebagaimana tersebut di atas, ulama adalah *ahli ilmu* dan *ahli agama* yang keduanya adalah *waratsah al-ambiya* (pewaris para nabi) yang memiliki kedudukan sebagai penerus tugas dan fungsi nabi dalam risalah kenabian bagi umat manusia. Secara histories sosiologis, '*ulama*' memiliki otoritas dalam bidang keagamaan sehingga menempati kedudukan social yang tinggi dalam masyarakat Muslim. Mereka tidak hanya sekedar dihormati dan disegani tetapi gagasan dan pemikiran keagamaannya dalam berbagai dimensi dipandang sebagai "kebenaran", dipegang dan diikuti secara kuat dan bahkan mengikat.

Apalagi, sekarang pemerintah Indonesia telah menerapkan otonomi daerah dibarengi dengan pelaksanaan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) secara langsung. Maka, struktur social politik dan pemerintahan yang telah berubah dari pemerintahan sentralistik menjadi pemerintahan desentralisasi. Selain itu, masyarakat kita ini masih mengalami krisis multidimensional, krisis politik, ekonomi, social dan budaya. Krisis yang belum mengalami tanda-tanda perbaikan khususnya di bidang finansial ekonomi belum menunjukkan kestabilannya. Sementara pada sisi lain, tuntutan masyarakat akan terbinanya masyarakat yang demokratis, egaliter dan adil sebagai tersimpul dalam konsep *civil society* atau masyarakat *madani* juga semakin

<sup>46</sup>*Ibid.*

<sup>47</sup>[Rakyat Aceh](#), Jumat, 21 September 2012

mendesak. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi 'ulama' dewasa ini semakin berat dan kompleks. Karena itu, penulis ingin berbicara tentang peranan ulama dalam realitas sosio-historis masyarakat Indonesia (*actual roles*) dan peranan yang seharusnya (*ideal expected roles*) dijalankan ulama dalam proses transformasi social budaya menuju masyarakat madani (*civil society*).

Dalam sejarah kesulthanan, ulama ditarik masuk ke dalam sistem administrasi pemerintah dengan tugas dan tanggung jawab mengurus lembaga keagamaan yang dikenal dengan istilah kepenghuluan ataupun kependidikan. Dalam menjalankan tugas-tugas keagamaan dan pendidikan kepada masyarakat, ulama memiliki sikap secara independen. Ulama bebas menggeluti jalur akidah dan tasawuf dalam bentuk *al-da'wah wa al-tarbiyah* yakni dakwah dan pendidikan. Ulama ini tidak ada kaitan dengan pemerintah. Sedangkan ulama yang bergerak pada jalur ilmu fiqh yang manifestasinya berbentuk *al-tasyri' wa al-qadha* yakni tata hukum perundangan dan peradilan.

Dalam membina dan membimbing masyarakat, ulama memiliki tugas utama sebagai guru, pengajar dan *mubaligh* untuk menanamkan pemahaman Islam kepada masyarakat. Mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan Islam di daerah-daerah perkampungan dan pelosok. Lembaga yang terbentuk pendidikan Islam tersebut disebut dayah/Pesantren atau Meunasah.

Pada masa kolonial, fungsi ulama tetap berlangsung. Pemerintah kolonial tetap mempertahankan kedudukan dan fungsi ulama dalam melakukan perubahan-perubahan tertentu, membina, membimbing dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pada masa colonial Belanda ulama indentik dengan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran di dayah-dayah,

ulama ini melakukan perjalanan dakwah ke pelosok-pelosok daerah untuk menyebar dan memperkuat kesatuan Islam bagi masyarakat yang sesuai dengan sistem dan adat.

Ulama ini selalu melakukan pengawasan dan mengontrol setiap aktivitas dan kegiatan masyarakat serta pemahaman keislaman. Pada umumnya mereka memiliki fanatisme agama dan tingkat agresivitas yang tinggi sehingga memiliki rasa taat dan patu kepada ajaran Agama yang dianutnya yaitu Islam. Demikian juga memiliki kebencian dan permusuhan yang mendalam terhadap kaum kafir khususnya penjajah Belanda. Dengan kedudukannya sebagai tokoh dan panutan masyarakat, para ulama tersebut dapat secara mudah memobilisasi masyarakat untuk melakukan pemberontakan terhadap penguasa kolonial.

Pada masa lalu, ulama dikenal pula sebagai kaum intelegensia dan elite ilmu agama Islam. Mereka tidak hanya menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran di lembaga-lembaga pendidikan dan menjalankan dakwah ke daerah-daerah tetapi juga menulis ide dan pemikirannya dalam bentuk buku-buku (kitab). Seperti; Hamzah Fansuri, Nuruddin ar-Raniri, Syamsuddin al-Sumatrani, Abdurrauf al-Sinkili dan banyak ulama-ulama lainnya yang berdomisili di Aceh. Perjuangan masyarakat Aceh dalam menantang penjajahan Belanda ditandai dengan syahidnya ulama dan masyarakat, yang kemudian diatui sebagai pahlawan.

Mengenai dunia ekonomi, bercermin pada persoalan masyarakat yang sangat mengharapkan adanya perbaikan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat,<sup>48</sup> disamping perseorangan maupun kolektif, merupakan bukti sejarah partisipasi ulama dalam bidang produksi dan distribusi, demikian juga partisipasi penting adalah masyarakat sebagai konsumen prodisi yang membuat perjalanan ekonomi berjalan sebagai mana mestinya.

---

<sup>48</sup>Serambi Indonesia, Opini, Kebijakan Ekonomi Berbasis Lokal, oleh: Yudi Wahyudin, M.Si, Kamis, 27 September 2012.

Maka, oleh karena itu, perlu dilakukan rekonstruksi kebijakan ekonomi yang didesain berbasis karakteristik lokal, baik karakteristik ekologi, sosial-budaya, ekonomi maupun pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.<sup>49</sup> Desain kebijakan ekonomi seoptimal mungkin harus dibangun atas dasar menangkap peluang dan memberdayakan sumber daya yang terdapat di Aceh saat ini.

Demikian juga dalam pengembangan seni dan budaya. Hal ini terbukti sebagai khazanah dalam perkembangan seni dan kebudayaan Aceh yang berciri khas keislaman. Perkembangan arsitektur Islam, bukan hanya arsitektur masjid, akan tetapi juga mewarnai arsitektur dalam tata perkampungan, bahkan pasar.

## ORGANISASI DAN PELEMBAGAAN ULAMA ACEH

### 1. PUSA

Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) didirikan pada tanggal 5 Mei 1939.<sup>50</sup> Yang didirikan oleh tiga orang tokoh Aceh yang menjadi sesepuh dalam organisasi ini, yaitu Tgk. Muhammad Daud Beureu'eh, Tgk Haji Chik Djohan Alamsjah (Djohan Alamsjah), Tgk. Muhammad Amin dan Tgk. Ismail Jakub.

Hasil musyawarah para ulama-ulama terpilih lah Tgk. Muhammad Daud Beureu'eh menjadi pimpinan PUSA. Tgk. Muhammad Daud Beureu'eh (seorang pimpinan Islam terkemuka ini dilahirkan tahun 1903) di Beureu'eh,<sup>51</sup> di daerah Keumangan-Beureunuen (dekat Sigli Kab. Pidie).

Sebagai motif berdirinya PUSA, adalah menggerakkan masyarakat Aceh yang telah

lama di jajah oleh kolonel Belanda sehingga menghapuskan sistem kesultamaan di Aceh Darussalam pada tahun 1903, yang telah dipimpin oleh sulthan Muhammad Daud Syah sebagai sulthan yang terakhir.<sup>52</sup> Maka, maksud dan tujuan mendirikan PUSA, menurut Teungku Ismail Ya`kub,<sup>53</sup> antara lain:

1. Untuk menyiarkan, menegakkan dan mempertahankan syiar Islam yang suci di Serambi Mekkah, yang sudah lama terbenam dalam sebuah kejahilan dan kegelapan.
2. Mempersatukan persepsi dan paham ulama-ulama Aceh dalam menerangkan hukum-hukum yang mungkin sudah jauh berbeda.
3. Memperbaiki dan mempersatukan rencana pelajaran sekolah-sekolah Agama di seluruh tanah Aceh.

PUSA adalah satu-satunya gerakan nasionalis yang dangat berarti di Aceh yang Islami, sehingga PUSA menjadi wahana dalam perjuangan Aceh dari belenggu penjajah dan juga menghadapi kaum tradisional (kepala wilayah atau Ulee Balang). Setelah perang dunia ke dua, ulama memberi pukulan yang menentu terhadap lawan-lawan mereka, terutama para pendiri dan anggota-anggota terkemuka PUSA. Mereka sangat berperan penting dalam mengambil alih menjalankan pemerintahan Aceh. Termasuk Tgk. Amir Husin al Mujahid (Amir Husin al Mujahid) dan Tgk Husin Husuf, masing-masing dalam anggora PUSA adalah sebagai ketua dan sekretaris Pemuda PUSA. Selain itu, Tgk. Islamil Yacub, Tgk Muhammad Nur el Ibrahim (menentu Daud Beureu'eh) dan Tgk. Sayid

<sup>49</sup>*Ibid.*

<sup>50</sup>Carnelis van Dijk, *Rebellion Under the Banner of Islam (The Darul Islam in Indonesia)*, terjemahan: *Pemberontakan Darul Islam*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 1995), Cet. IV, hlm.256. Muhammad Rizal, *Persatuan Ulama Seluruh Aceh Pada Masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia tahun 1945-1949*, *Skripsi, Prodi Ilmu Sejarah*, FIB-UI Jakarta 2008).

<sup>51</sup>Carnelis van Dijk, *Rebellion Under ...*, hlm.256.

<sup>52</sup>Nazaruddin Syamsuddin, *Revolusi di Serambi Mekkah: Perjuangan Kemerdekaan dan Pertarungan Politik di Aceh tahun 1945-1949*, (Jakarta: UI Press, 1999), hlm.2. Lihat Juga: Tim Monografi Daerah Istimewa Aceh, *Monografi Daerah Istimewa Aceh*, Proyek Pengembangan Media Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1976, hlm.16.

<sup>53</sup>Ismuha, *Ulama dalam Persepsi Sejarah*, (Jakarta: LEKNAS-LIPI, 1976), hlm.1. Lihat Juga: Muhammad Rizal, *Persatuan Ulama ...*



Abubakar. Ketiganya guru pada perguruan Normal Islam, sekolah pendidikan Guru yang didirikan oleh PUSA.<sup>54</sup> Para Ulee Balang yang ingin menentang Belanda, dianjurkan untuk bergabung dalam organisasi PUSA ini.

Sebuah organisasi dan gerakan anti penjajah yang bersifat modern, PUSA mempertahankan "sifat ke-Acehan Murni", dan kerangka acuan adalah Aceh, bukan Indonesia.<sup>55</sup>

Pada tahun 1942, PUSA melakukan hubungan persekutuan dengan Jepang untuk melawan Belanda melalui perantara orang-orang Aceh yang berdiam di Malaya melakukan hubungan dengan Jepang dalam menyusun program untuk melakukan pemberontakan terhadap Belanda. Hal ini menjelang pendaratan Jepang di Hindia Belanda.

Setelah Indonesia merdeka, PUSA berupaya dalam berbagai hal untuk bergabung dengan DI/TII dalam memperjuangkan sebuah Negara Islam Indonesia yang dipelopori langsung oleh Daud Beureu'eh.

## 2. PERTI

PERTI adalah merupakan sebuah organisasi yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan amal sosial. Organisasi ini didirikan oleh syeikh Sulaiman al Rasuli bersama tokoh-tokoh dan ulama-lama yang beritqad ahlisunnah wal jamaah lainnya di Minangkabau sumatra Barat, pada tanggal 15 Zulqaidah 1346 H betepatan pada tanggal 5 Mei 1928.<sup>56</sup> Lahirnya PARTI didasari oleh semangat kebangsaan dan kesadaran beragama awal-awal abad ke-20, demikian juga menyulus dengan kelahiran berbagai organisasi Islam lainnya seperti Sarikat Dagang Islam (SDI) (1905), Budi Utomo (1908), Sarikat Islam (1911) Muhammadiyah 1912 dan Nahdhatul Ulama (1926).<sup>57</sup>

Datangnya PERTI ke Aceh di bawa oleh Syekh Muda Wali al Khalidi pada tahun 40-an. Kedatangan PERTI di Aceh disambut baik oleh ulama dan masyarakat Aceh khususnya yang beritqad Ahli Sunnah wal Jama'ah. Teungku Syekh Muda Wali al Khalidy tokoh pertama yang memperkenalkan PERTI di Aceh sepulangnya dari menuntut ilmu di Minangkabau. Pertama sekali membentuk PERTI sebagai pusatnya di Aceh adalah di Labuhan Haji Aceh Selatan, sebagai pusat langsung yang berkedudukan di Bukit Tinggi.

Pada tahun 1945 keluar sebuah maklumat Pemerintah RI tanggal 3 November 1945, menganjurkan organisasi masyarakat ini menjadi sebuah organisasi Politik, maka pada tgl. 22 November 1945 resmi menjadi PARPOL. Dengan PERTI dijadikan PARPOL, maka dalam pemilu pertam tahun 1955, PERTI ikut serta dan mendapatkan suara sebanyak 465.359 suara (1,23 %) dari total suara, dan memperoleh 7 kursi dari 260 kursi DPRRI dan 520 anggota Konstituante, ditambah dengan 14 kursi golongan minoritar. Dari 7 kursi tersebut, maka 1 (satu) kursi diberikan jatah untuk PERTI Aceh yang diwakili oleh Tgk.H. Hasan Krueng Kalee.<sup>58</sup>

Di tengah-tengah perdebatan mengenai kemerdekaan RI dan bentuk negara RI sah atau tidak serta legalitas presiden RI Soekarno sebagai uli al amr dan wajib ditaati dalam konstituante. Maka pada tanggal 14 Oktober 1957, presiden Soekarno mengundang sekitar 500 orang ulamadari seluruh pulau Jawa dan sekitarnya, diantaranya 2 (dua) orang dari Aceh yaitu Tgk.H.Hasan Krueng Kalee dan Abuya Muda Wali Al Khalidy ke Cipanas,<sup>59</sup> yang membicarakan satus negara dan legalitas presiden Soekarno. Maka dalam pertemuan terakhir, menyimpulkan sesuai dengan apa yang

<sup>54</sup>Carnelis van Dijk, *Rebellion Under ...*, hlm. 256-257.

<sup>55</sup>*Ibid.*, hlm.257.

<sup>56</sup>Mutiara Fahmi Razali, PERTI dan Syeikh Wahbah Al-Zuhaily, *theatjehpost* [at] gmail. com. Rabu, 30 Mei 2012 08:00 WIB

<sup>57</sup>*Ibid.*

<sup>58</sup>Mutiara Fahmi Razali, *theatjehpost*...

<sup>59</sup>*Ibid.*

dikemukakan oleh ulama Aceh Abuya Muda Wali<sup>60</sup> bahwa. 1). Kemerdekaan Indonesia adalah sah. 2). Presiden RI Soekarno adalah presiden yang sah dalam posisi *uli al amri dharuri bi al syaukah*.<sup>61</sup>

Pada tahun 1973, PERTI beserta tiga partai lainnya (NU, Parmusi, PSII) dileburkan menjadi satu partai yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Maka sejak kembalinya ke khittahnya, PERTI terus berkembang sebagai organisasi masyarakat dalam mengembangkan Tarbiyah Islamiyah di lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti dayah-dayah atau pondok-pondok di seluruh Indonesia. Meskipun demikian, kecenderungan politik PERTI sangat kental, terutama dalam memperjuangkan kepentingan umat Islam sekarang seperti penerapan syariat Islam di Aceh. walaupun perjalanan syariat Islam belum berjalan secara signifikan.<sup>62</sup> Sebagai faktor utama menurut PERTI adalah belum terwujudnya rujukan standar yang baku di Aceh. maka oleh karena itu PERTI telah bermotivasi dalam melakukan terobosan-terobosan yang dapat memacu lahir sebuah rujukan yang baku dalam penerapan syariat Islam di Aceh yang berlandaskan Fiqah Ali Sunnah wal Jamaah dan bermazhab Imam Syafi'i sebagaimana umumnya yang dianut oleh masyarakat Aceh.

### 3. Inshafuddin

Inshafuddin adalah sebuah organisasi yang terbentuk dalam Persatuan Dayah Inshafuddin. Organisasi ini merupakan organisasi ulama secara kemasyarakatan yang keanggotaannya terdiri dari seluruh ulama sekaligus para pimpinan Dayah yang ada di

Provinsi Aceh. Organisasi ini berdiri sejak 4 Februari 1968 di Seulimeum Kabupaten Aceh Besar,<sup>63</sup> dengan tujuan utamanya untuk membina dan mengembangkan dayah sebagai wadah yang menghimpun seluruh potensi umat dan menampung semua aspirasi yang muncul dan berkembang ditengah-tengah kehidupan mereka.

Sebagai suatu organisasi, Inshafuddin mempunyai misi yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Ini ditandai dengan kemampuannya dalam menyatukan persepsi para ulama terutama menyangkut dengan sikap dan derap langkah dalam menghadapi berbagai masalah yang muncul, baik dalam skop kedaerahan maupun berskala nasional. Bahkan Inshafuddin telah mampu memberikan sumbangan pemikiran untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam rangka menciptakan tatanan ketahanan dan keamanan di Aceh.

Sejarah Islam di Aceh telah ditunjukkan kepada kita bahwa ulama-ulama dayah di Aceh telah dipercayakan di berbagai bidang mulai dari sebagai teungku di dayah untuk mengajar dan memimpin dayah, tenaga skill untuk bidang-bidang pertanian dan kelautan, sebagai penasihat raja-raja sampai pada jabatan sultan sendiri dan para militer yang menjaga keamanan negara. Demikian juga pada masa peperangan melawan Belanda, teungku-teungku dayah telah tampil sebagai pemimpin dan panglima perang untuk mempertahankan Negara dari jajahan kaum kafir. Di awal masa kemerdekaan Indonesia dimana Aceh juga bergabung dengan Indonesia, sejumlah ulama masih dipercaya sebagai pemimpin-pemimpin bangsa baik sebagai pemimpin

<sup>60</sup>*Ibid.*

<sup>61</sup>Yang dimaksud dengan *uli al amri dharuri bi al syaukah* adalah pemerintah yang memiliki kekuasaan untuk sementara waktu (masa transisi), hingga terbentuknya pemerintahan yang sah dan benar. Pengakuan posisi Soekarno tersebut, pada hakikatnya sebagai jawaban sebagai wali nikah bagi para wanita yang tidak memiliki wali. Maka dalam

pandangan Islam sulthan atau pemimpin Negara yang diwakili oleh para hakim di mahkamah syaria adalah wali wa'ita yang tidak memiliki wali. Lihat: *Ibid.*

<sup>62</sup>*Ibid.*

<sup>63</sup>[Dayah inshafuddin. files.wolpresd.com/2011/08/sk-pc-acehutama.jpi](https://files.wolpresd.com/2011/08/sk-pc-acehutama.jpi)

kemasyarakatan, teknokrat-teknokrat sampai pada gubernur dan gubernur militer. Demikianlah kita lihat ulama selalu saja tampil dengan berbagai posisi dalam rangka mengayomi masyarakat.

Masa Indonesia merdeka, Aceh juga telah melewati beberapa masa pergolakan, mulai dari pemberontakan tahun 1946, peristiwa DI/TII 1953, pemberontakan PKI 1965, Gerakan Aceh Merdeka 1976-2005, masa reformasi dan masa transisi. Peristiwa itu semua seharusnya telah dapat dijadikan sebagai pondasi oleh para ulama beserta komponen masyarakat lainnya dalam rangka menata ulang kehidupan bangsa di masa mendatang.

#### 4. HUDA (Himpunan Ulama Dayah Aceh)

Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) adalah merupakan sebuah organisasi daam mempersatukan persepsi ulama-ulama dayah. Organisasi ini didirikan pada Tanggal 4 Jumadil Akhir 1420 H, bertepatan dengan Tanggal 14 September 1999 M, di Maqam Syiah Kuala Banda Aceh. daras orhgani sasi ini adalah "al ulama warasatul ambia". Maka dalam dasar al ulama waratsat al anbiya adalah dapat terbentuk dengan konsep din al Islam dalam mengembangkan kependidikan di dayah, ssehingga din al Islam menjadi azas dalam pembinaan adat, budaya dan karakter masyarakat Aceh. maka dengan pembinaan religius berkesinambungan, terbentuklah masyarakat Aceh yang jujur, adil, ikhlas dan berani dalam menegakkan kebenaran dan mengusir penjajahan dan penindasan.

Azasnya adalah Islam<sup>64</sup> dan Aqidah Aqidah Himpunan Ulama Dayah Aceh Menganut I`Tiqad Ahlus Sunnah Waljama`ah /Sunni dan bermazhab dengan Mazhab Syafi`i dan mazhab-mazhab lainnya dengan tidak melakukan talfiq antar mazhab tersebut.<sup>65</sup>

Tujuannya Memperkokoh silaturrahi antar ulama Aceh dalam rangka membina/membentuk ummat manusia yang sesuai dengan ajaran Islam melalui pengembangan kegiatan-kegiatan yang Islami.<sup>66</sup>

HUDA merupakan organisasi yang bersifat Independen dan tidak berafiliasi dengan organisasi sosial politik manapun, akan tetapi hanya berpihak kepada kebenaran,<sup>67</sup> Organisasi HUDA ini hanyalah berbentuk organisasi kemasyarakatan,<sup>68</sup> yang berfungsi sebagai berikut:

- Sebagai wadah silaturrahi dan penyalur aspirasi ulama Aceh.
- Sebagai wadah pengembangan Ulama Aceh dalam mewujudkan tujuannya
- Sebagai sarana media komunikasi Ulama dengan organisasi kemasyarakatan lainnya.<sup>69</sup>

Peran HUDA dalam masyarakat untuk perjuangan menegakkan amar ma`ruf nahi mungkar dan tegaknya syari`at Islam secara kaffah di Aceh,<sup>70</sup> yang beranggotakan menjadi pengususnya adalah dua kategori, yaitu

- Anggota Biasa ialah para Ulama Aceh yang masih aktif dalam Dayah.
- Anggota Luar Biasa ialah para ulama Aceh yang tidak aktif lagi dalam Dayah.
- Pasal Anggota Kehormatan ialah orang-orang berjasa kepada HUDA yang ditetapkan oleh Pengurus HUDA

#### 5 MUNA

Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA) lahir pada bulan Desember 2008. Organisasi ini dijadikan sebagai sebuah lembaga dalam tatanan Permusyawaratan Ulama. MUNA dibentuk dan didirikan para ulama Aceh yang tergabung dalam perjuangan Aceh Merdeka, maka organusasi / Lembaga ini disahkan/dilantik oleh Perdana Menteri Aceh Malik Mahmud, yang diketuai oleh sesepuh

<sup>64</sup>Ibid., Pasal 5

<sup>65</sup>Ibid., Pasal 6

<sup>66</sup>Ibid., Pasal 7

<sup>67</sup>Ibid., Pasal 8

<sup>68</sup>Ibid., Pasal 9

<sup>69</sup>Ibid., Pasal 10

<sup>70</sup>Ibid., Pasal 11

ulama Aceh yaitu Prof.Dr.Muhibuddin Wali.Organisasi ini berpusat di Banda Aceh diberi nama Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA).

Visi MUNA ini dibentuk untuk mempersatukan dan memperkuat Ulama-Ulama dayah/pesantren yang ada di Aceh untuk dapat bekerja sama dengan para Ulama dari luar negeri, sehingga Ulama Partai Agama Islam Semalaya (PAS) telah mengikat hubungan bilateral dengan MUNA ini agar kedudukan dan tercapai tujuannya. Demikian juga MUNA ini telah dikunjungi oleh beberapa Ulama dari negara Asean lainnya seperti Brunai Darussalam dan Thailan (Fatani).

Missi pembentukan MUNA ini untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat bai secara finansial maupun moril. MUNA menginginkan untuk mengembalikan hukum Islam sebagaimana sedia kala dimana hukum Islam ini telah berjalan sesuai dengan adat yang bersumber kepada Alquran dan Hadis. Hal ini diupayakan akan kembalinya kedaulatan secara adil dan makmur di tanah serambi mekkah.

Pada hakikatnya kelahiran MUNA ini, merupakan anjang dalam mengembalikan Kedaulatan Aceh sebagai mana yang telah lampau dulu. Aceh memiliki kekuatan di mata internasional, kini, MUNA telah mengembang sayapnya keseluruh pelosok Aceh sampai ke tingkat desa.

Namun demikian, kelahiran MUNA ini, menurut sebahagian anggota MPU menganggap sebagai lembaga yang menandingi MPU yang telak dibentuk oleh Pemerintah Aceh dalam penegakan syariat Islam. Mereka menyatakan bahwa MUNA ini dibentuk secara diam-diam dengan memperoleh dukungan dari Komite Peralihan Aceh (KPA). Akan tetapi tidak, bahkan MUNA ini telah terlebih dahulu dipublikasikan, baik kepada Pemerintah Aceh maupun masyarakat.

Organisai-organisasi tersebut memiliki penguasaan dan pengawasan oleh sesepuhnya, jangan sampai organisasi-organisasi ini, para ulama khususnya jangan sampai terjebak dalam

perbedaan, minta Wagub Muhammad Nazar dalam pidatonya acara penutupan Mukktamar VII Pengurus Besar Persautuan Dayah Inshafuddin.

Meski berbeda organisasi namun ulama memiliki kekuatan dalam membimbing umat ke arah yang lebih baik. Namun, potensi perbedaan organisasi ulama itu cukup besar, apabila dikelola dengan baik dan dapat maksimal demi menjadi sebuah kontribusi positif bagi pengembangan sistem pendidikan dan pembinaan ummat dalam wadah keislaman bagi masyarakat Aceh.

Disamping itu, Pemerintah Aceh tetap terus berupaya untuk melakukan penguatan terhadap lembaga dan kurikulum dayah (pondok pesantren), sehingga saat ini lembaga pendidikan agama Islam itu di bawah naungan pengawasn Badan Dayah di Aceh.

Organisasi lain yangberperan di Aceh adalah Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama yang merupakan organisasi keulamaan yang berasal bukan dari Aceh. Muamadiyah sudah masuk sebelum PUSA berdiri yang berperan sebagai organisasi politik, dan tidak semata-mata sebagai organisasi keagamaan dan kependidikan. Karena itulah Muammadiyah itu tidak berakar dalam masyarakat Aceh, namunhanya terkenal sebagai organisasi pembaharu yang dalam keputusan-keputusannya tentang agama sering dilakukan dengan jalan Ijtihad ketimbang Taklid.Sikap ini pun nampak tercermin dalam keberagaman warga dan simpatisannya.

Nahdhatul Ulama lahir di Surabaya pada abad 20 (31 Januari 1926) karena gejolak politik timur tengah yang sebuah gerakan revolusi modernisasi. Munculnya tokoh-tokoh yang menganut ajaran Wahabi di nusantara. Bermotifkan hal ini maka para ulama mempersatukan persepsi dengan menganut *Ahli Sunnah wa al Jamaah*. Maka berdirilah sebuah gerakan organasasi untuk memperkuat persepsi

dalam berdimensi edilogis kultural,<sup>71</sup> yang memegang kepada empat mazhab Ahli sunnah wa al jamaah yaitu Mazhab Hanafi, maliki, Syafi'i dan Hambali.

#### PENUTUP

1. Dayah sebagai lembaga pendidikan formal sebagai pendidikan tinggi yang menciptakan kader ulama yang sangat berkompeten dalam pembangunan pola fikir masyarakat
2. Ulama adalah sebagai tokoh sentral dan menjadi panutan dan wajib dipatuhi apa yang telah disyiarkan dalam pemngembangan keilmuan dalm kemasyarakatan
3. Ulama dan dayah tidak dapat dipisahkan yang memiliki satu kesatuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan baik bagi masyarakat Aceh maupun seluruh nusantara.
4. Demikian makalah ini semoga bemeenfaat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Hasjmy, 1978, *Bunga Rampai Revolusi dari Tanah Aceh*, Jakarta: Bulan Bintang.
- [2] -----, 1993, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, Bandung: Al Ma`arif.
- [3] Azzumardi Azra, 1994, *Jaringan Ulama: Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad XVII dan XVIII : melacak akar-akar pembaruan pemikiran Islam di Indonesia*, Bandung : Mizan.
- [4] Badruddin Hsubky, 1995, *Delima Ulama dalam Perubahan Zaman*, Jakarta: Gema Insani Press.
- [5] Baihaqi A.K., 1983., "Ulama dan Madrasah Aceh", dalam Taufik Abdullah, *Agama dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Rajawali.
- [6] Cernelis van Dijk, 1995., *Rebellion Under the Banner of Islam (The Darul Islam in Indonesia)*, terjemahan: *Pemberontakan Darul Islam*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- [7] Darmawijaya, 2007, *Nikmatnya Tashawuf: mengupas Kisah Sukses Ulama Tashawuf dalam Islamisasi Nusantara*, Makasar: Pustaka Refleksi.
- [8] -----, 2010, *Kesultanan Islam di Nusantara*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- [9] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984, *Sejarah Pendidikan Daerah Istimewa Aceh*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- [10] Fairus M. Nur Ibrahim, (ed.), 2002, *Syariat di Wilayah Syariat Pernik-pernik Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD.
- [11] Harun Nasution dkk, 2002, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djembatan.
- [12] Ibrahim Alfian, 1987, *Perang di Jalan Allah: Perang Aceh 1873-1912*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- [13] Inayatillah, 2010, Peran Perguruan Tinggi Islam Pasca Penerapan Syariat Islam Di Aceh, dalam *The Role of Islamic Higher Learning Institution in Building Civil Society*, STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa-Aceh.
- [14] Ismail Abi Fida, t.th, *Tafsir Ibnu Katsir*, Bairut: Dar Al Fikri, t.th.
- [15] Ismuha, 1976, *Ulama dalam Persepsi Sejarah*, Jakarta: LEKNAS-LIPI.
- [16] Laode Ida, 1996, *Anantomi Konfik NU, Elit Islam dan Negara*, Jakarta: Putaka Sunar harapan.
- [17] M. Hasbi Amiruddin, 1994, *The Response of The 'Ulama' Dayah to The Modernization of Islamic Law in Aceh*, *Disertasi Master*: Institute of

<sup>71</sup>Laode Ida, *Anantomi Konfik NU, Elit Islam dan Negara*, (Jakarta: Putaka Sunar harapan, 1996), Cet.1, hlm.1

- Islamic Studies McGill University Montreal.
- [18] Misnawati, 2011, *Pengaruh Manajemen Pendidikan Dayah Salafiyah di Aceh Timur terhadap Pendidikan Masyarakat*, dalam *Dinamika Studi Keislaman: Konseptualisasi dan Aktualisasi Islam dalam Pelataran Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan*, Langsa: STAIN Zawiyah Cot kala Langsa.
- [19] Muhamad Iqbal, 2009, *Hukum Islam Indonesia Modern: Dinamika Pemikiran Dar Fiqh Klasik ke Fiqh Indonesia*, (Tenggerang : Gaya Media Pratama.
- [20] Muhammad Rizal, 2008, *Persatuan Ulama Seluruh Aceh Pada Masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia tahun 1945-1949*, *Skripsi, Prodi Ilmu Sejarah*, FIB-UI Jakarta.
- [21] Munzirin dkk, 2009, *Sejarah Peradaban Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pinus.
- [22] Musyrifah Sunanto, 2005, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, (Jakarta Rajawali Press.
- [23] Mutiara Fahmi Razali, 30 Mei 2012, PERTI dan Syekh Wahbah Al-Zuhaily, *theatjehpost [at] gmail. com*.
- [24] Nazaruddin Syamsuddin, 1999, *Revolusi di Serambi Mekkah: Perjuangan Kemerdekaan dan Pertarungan Politik di Aceh tahun 1945-1949*, Jakarta: UI Press.
- [25] Saifuddin Zuhri, 1981, *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia*, Bandung: Al Ma`arif.
- [26] *Serambi Indonesia*, Kamis, 27 September 2012., *Opini, Kebijakan Ekonomi Berbasis Lokal*, oleh: Yudi Wahyudin, M.Si,
- [27] Shabri, et al., 2005, *Kedudukan dan Peran Dayah di Aceh Pada Masa Revolusi Kemerdekaan (1945-1949)*, Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi NAD, 2005,
- [28] Sri Mulyati, 2006, *Tasawuf Nusantara: Rangkaian Mutiara Sufi Terkemuka*, Jakarta: Pustaka Kencana.
- [29] Syamsul Rizal dkk, 2008, *Syariat Islam dan Paradigma Kemanusiaan*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Prov NAD.
- [30] Tim Monografi Daerah Istimewa Aceh, 1976, *Monografi Daerah Istimewa Aceh*, Proyek Pengembangan Media Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- [31] *Wacana Pemikiran Santri Dayah*, 2007, (Banda Aceh: BRR Nad-Nias, PKPM Aceh dan Wacana Press,

---

**FEASIBILITY STUDY OF TOUR GUIDE MANAGEMENT BUSINESS****Oleh****Ahmad Kurniawan<sup>1</sup>, Debby Rusmiati<sup>2</sup>, Dewi Turgarini<sup>3</sup>, Caria Ningsih<sup>4</sup>****<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Magister Pariwisata Universitas Pendidikan Indonesia****Dr. Setiabudi Street number of 229 Bandung****Email: <sup>1</sup>[ahmadkurniawan015@upi.edu](mailto:ahmadkurniawan015@upi.edu), <sup>2</sup>[debby88@upi.edu](mailto:debby88@upi.edu), <sup>3</sup>[dewiturgarini@upi.edu](mailto:dewiturgarini@upi.edu),  
<sup>4</sup>[caria.ningsih@upi.edu](mailto:caria.ningsih@upi.edu)****Abstract**

The phenomenon in the field is seen by many Indonesian tour guides who are now increasingly showing a decrease in the number of jobs that can be obtained. Not to mention, due to the ongoing pandemic, this has caused a lack of enthusiasm for the tour guides who have long been involved in revitalizing the tourism sector today. Based on the findings, it was found that 80% of tour guides do not have permanent jobs in guiding tours in the field, even though they are licensed and certified tour guides, so there needs to be management that accommodates Indonesian tour guides to be able to get a more definite job. Seeing this phenomenon, it is necessary to have management that accommodates the tour guides, thus providing the ability of researchers to review this research related to the feasibility study of tour guide management business on CV. PGM Organizer. With the aim of knowing how feasible this business is to be run so that it can be known to the maximum and according to the needs of the company. Through descriptive qualitative research methods using purposive sampling through data collection techniques by observation, interviews, and documentation. That way it can be seen that the results in sales made by the management of this tour guide are successful and get good profits. Therefore, to run the wheels of the economy in the world of tour guides, it turns out that there is a need for management that can accommodate it so that the activists of the travel industry can feel the same way.

**Keywords: Business; Appropriateness; Tour Guide Management; Qualitative.****INTRODUCTION**

By looking at the soaring data on cases exposed to the endless COVID-19 pandemic, many tourism industries, including travel agents, have experienced a drastic setback in finding consumers to use their services in travel activities. As a result, many employees at travel agents experience layoffs (termination of employment) unilaterally, one of which is a tour guide or tour guide in it. Many tour guides have joined the Indonesian Tour Guide Association, but their work is not allocated directly to travel agents. Even though they have met many requirements like a professional tour guide who already has competency certification, licenses and so on. Therefore, researchers see an opportunity by forming a tour guide

management that can provide jobs in accordance with their respective guiding fields. Of course this is a motivation for tourism workers to be able to restore the tourism sector even in the midst of the current pandemic. Including writers who were originally freelance tour guide workers at various travel agents. Because many travel agent companies went out of business, the author also felt a sudden loss of work. Therefore, the author thought of making a tour guide management that is intended for all tourists to continue traveling accompanied by a professional tour guide.

The tour guides that we have prepared have a lot of experience in tourist guidance, both in guiding beaches, mountains, lakes, valleys, history, cultural, mystical, geotourism, wellness, honeymoon and so on. Then

consumers can also use the services of a tour guide according to the language skills needed, both Indonesian, Arabic, Korean, Japanese, Spanish and so on. The tour guide services offered can also help overland, planning activities, itineraries, travel concepts.

The management of this tour guide will invite tourists to enjoy the best destinations chosen by tourists. The destinations indicated during the trip will certainly bring tourists traveling according to their needs. Of course, being brought by a professional tour guide who has been certified will make the tour more memorable and meaningful for tourists who follow it.

On the other hand, West Java Province, including the Indonesian island of Java, which is famous for its many destinations that make tourists will be served with activities that produce edutourism, of course. It is the power of story telling that will lift this business to the forefront to answer the challenges of tour guides and help travel agents in finding professional tour guides in the midst of the current pandemic.

## LITERATURE REVIEW

A business feasibility study in a narrow sense is a study of the ability of a business to be run successfully by considering the existence of financial benefits or profits. Whereas in a broader definition, a business feasibility study is a study related to the success of an investment project that is carried out profitably from various aspects, namely employment, utilization of remaining resources, efficiency of foreign exchange, and the opening of new business opportunities (Umar, 2015).

The definition of feasible in the assessment of a business is the possibility that the idea of a business being implemented can provide significant benefits, both in terms of financial benefits and in terms of social benefits (Agus, 2018). In the research of Kasmir and Jakfar (2016) also explained that there are stages that need to be carried out in a feasibility study in

order to facilitate the implementation of a feasibility study and effectiveness in the analysis and assessment process. The following are the stages:

### 1. Information and Data Collection

All necessary data and information must be collected as completely as possible, both qualitative data and quantitative data. The data collected can be primary data and secondary data. Data and information collection can be obtained from various trusted sources, such as authorized institutions (World Bank, Central Statistics Agency, and others).

### 2. Data Processing

After the required data is collected, the next step is to process the data. Data processing must be carried out correctly and accurately and carried out using methods and measures commonly used for business research. This processing needs to be carried out carefully for every aspect that is reviewed. Then at the end of this stage, the data that has been processed is confirmed and re-examined regarding the correctness of the calculations that have been done previously.

### 3. Data Analysis

The next step is to analyze the data to determine the eligibility criteria for all aspects. The feasibility of a business is determined by the criteria that have met the requirements based on the criteria that are eligible to be used.

### 4. Decision Making

After obtaining the results of measurements with these criteria, the next step is making decisions based on these results. The decision whether or not a business is feasible to run is decided according to pre-determined criteria. If the decision is declared ineligible, it should be canceled and the reasons stated.

### 5. Giving Suggestions

The final stage in the business feasibility study is to provide advice to certain parties based on the study report that has been prepared, and recommendations for improvement can be included if necessary.



In previous research, Kasmir and Jakfar (2016) suggested that the creation and assessment of the feasibility of a business should be carried out with predetermined steps and each step is carried out correctly and completely. At each step there are various aspects that must be researched, measured, and assessed in accordance with the provisions that have been set. In determining the feasibility of a business, there are several aspects that need to be investigated, each aspect is not independent, but is interdependent. This means that if one aspect is not met, it is necessary to make improvements or additions so that it affects other aspects.

### RESEARCH METHODS

In this study, the researcher focuses on a descriptive qualitative research approach by using data collection techniques through observation, interviews, and documentation (Pantau, 2017). Observations are used to see how far this business's financial calculations are ranging from financial projections to knowing profits. In the interview approach, it is aimed at customers, both travel agents, event organizers and independent consumers who use this business service, in order to see how appropriate this business is to continue. Next, the documentation study on the tour guide management business is taking place.

### DISCUSS

#### Business Description

Tour guide management business is a management business that invites tour guides who have joined the Indonesian Tour Guides Association and have had various kinds of experience in scouting, both proven from a tour guide license or competency certification that has been issued by BNSP (National Agency for Professional Certification ) Indonesian tourism, so that the guide services offered can really help customers or tourists to be accompanied during the trip to see the beauty of the destination, listen directly to stories telling from

professional tour guides while enjoying the atmosphere of traveling as well as possible. Without a doubt his ability to bring language that is easy to understand and adapted to customer needs, so that tourists who visit directly to the destination. Of course, this service can also save tourists' budgets for traveling in West Java Province, throughout the island of Java, and can also be done overland around Indonesia.

#### Market segmentation

Market segmentation is intended by:

1. All Indonesian travel agents
2. MICE event organizer
3. Individual customers
4. Student majoring in tourism
5. Geography major
6. Students majoring in history
7. Tourism Vocational High School students
8. Prov/District/City Tourism Office
9. Community of travel lovers

#### Marketing strategy

##### 1. Pricing Strategy

The pricing method used in this business is the value pricing method, which means the price is as low as possible but still pays attention to the quality and quantity of the products offered, so that the benefits that tourists get include cheap travel prices, adding insight, tourist knowledge, eliminating boredom at home, accompanied by a professional tour guide who is reliable and of course a memorable happiness.

##### 2. Promotion Strategy

The promotion method used in this business, of course, uses direct selling and sales promotion. We promote this business directly on the list of predetermined target markets. So that consumers are looking for clear and in accordance with the target. Of course, also through social media platforms such as Instagram to attract customers to use this service.

##### 3. Positioning Strategy

The positioning approach method that we use is the function concept method, because tour guide management is very useful for

consumers, especially travel agents, event organizers, individual customers, tourism students, geography, history and tourism lovers can enjoy the panorama of tourism destinations in a renewable concept. in Indonesia.

4. List of Cooperation with Travel Agents and tour guide

**Table. 1** List of Travel Agent and Event Organizer in 2022

Travel Agent Name	Address	PIC	Join Date
AAA	Lolong Belanti	Gemi	27 February
BBB	Prof Hamka Street	Monalisa	19 February
CCC	S Parman Street	Kiki	20 February
DDD	Ulak Karang Street	Liza	20 February
EEE	Komp. Gurun Indah	Tommy	19 February
FFF	Beringin Raya Street Lolong Belanti	Deswira	17 February
GGG	HOS Cokroaminoto Street	David	13 February
HHH	S Parman Street	Afriadi	7 February
III	Street Raya Padang-BKT	Andri	10 February
KKK	Beringin Raya Street	David	7 February
LLL	Veteran Street	Aventus	6 February
OOO	A Yani Street Bukittinggi	Indowisata	3 February
PPP	Jhony Anwar Street	Emmy Said	12 February
QQQ	Jhony Anwar Street	Harry	12 February

**Table. 2** List of Tour Guide Service In the year of 2022

Full Name	Language Proficiency	Area of Ability
Syar Muslim	Bahasa, English	Beach, Mountain
Deden Syarif Hidayat	English, Arabic	Historical
MH. Anang Hidayat	Spanish	Geopark
Mochammad Nurdin	English, Arabic	Pilgrimage tour
Jaenal Arifin S.P	Bahasa, English	Honeymoon
Nanang Zulkarnain	Dutch	Historical
Idang Setiabudi	English	Cultural
Didjih Supardi	Bahasa, English	Wellness
Leli Suniarti	Mandarin	Urban tourism
Anita Indriani	English	Culinary tour
Herman	France	Special Interest Tour
Yeni Rosnawati	Dutch	Natural tourism
Rudi Praja	Bahasa, Arabic	City tour
Dewi Ratih Lusianawati	Bahasa	Museum tour

5. Price List of Daily Tour Guide Services

**Table. 3** Service Price of Category

Category	Service Price
Local Guide	IDR 300.000
City Tour	IDR 500.000
Overland	IDR 750.000

### Company Financial Projections

**Table 4.** Asset Company

Number	Asset	Total
1	Laptop	3.000.000

2	Printer	600.000
3	Table	200.000
4	Chair	200.000
5	Office phone	700.000
<b>Total</b>		<b>4.700.000</b>

**Table 5.** Underlying Asset Annually

Number	Asset	Price	Life-Time	Residual Value	P-S	Annual Depreciation
1	Laptop	3.000.000	5	300.000	2.700.000	540.000
2	Printer	600.000	5	60.000	540.000	108.000
3	Table	200.000	4	20.000	180.000	45.000
4	Chair	200.000	4	20.000	180.000	45.000
5	Office Phone	700.000	5	70.000	630.000	126.000
<b>Average</b>		<b>4.700.000</b>	<b>5</b>	<b>94.000</b>	<b>846.000</b>	<b>172.800</b>

**Table 6.** Monthly Fixed Cost

Number	Monthly Fixed Cost	Quantity	Price
1	Internet Quota	1	150.000
2	HVS Paper	1	50.000
3	Printer Ink	1	100.000
4	Office Rental	1	1.000.000
5	Employee salary	2	2.000.000
6	Electricity	1	200.000
7	Water	1	100.000
8	Tour Guide Insurance Costs	1	100.000
9	Phone Charges	1	200.000
10	Promotion Fee	1	500.000
<b>TOTAL</b>			<b>4.400.000</b>

**Table 7.** Monthly Variable Cost

Number	Monthly Variable Cost	Quantity (Daily)	Total
1	Travel Expense	1	100.000
2	Monitoring	1	100.000
3	Consumption	2	50.000
4	Drink	2	30.000
5	First Aid	1	50.000
<b>OVERALL TOTAL</b>			<b>330.000</b>

**Table 8.** CGS (Cost of Goods Sold)

**Table 9.** Break Even Point

BEP (Break Even Point) = CGS - Variable Cost	Information
22	Local Guide
11	City Tour
7	Overland

**Table 10.** Benefits of One Category of Tour Guide Services

Category	Selling Price	Profit
Local Guide	300.000	100.000
City Tour	500.000	100.000
Overland	750.000	150.000

**Table 11.** Total Overall Gross Profit

Number	Service Sales Results	Date	Category	Selling Price	Amount	Needs (Daily)	Total
1	Tcidaya	27 February	Local Guide	300.000	2	1	600.000
2	Andi Travel	19 February	Overland	750.000	1	2	1.500.000
3	Arabia Tour	20 February	Local Guide	300.000	2	2	1.200.000
4	Aries Jaya Wisata	20 February	Overland	750.000	3	3	6.750.000
5	Ghina Holiday	19 February	Local Guide	300.000	4	2	2.400.000
6	Glorie Tour	17 February	Overland	750.000	2	2	3.000.000
7	Harby Tour	13 February	City Tour	500.000	3	1	1.500.000
8	Indowisata	7 February	City Tour	500.000	1	1	500.000
9	Keumala Holiday	10 February	City Tour	500.000	1	1	500.000
10	Menjelajah Express	7 February	Local Guide	300.000	1	2	600.000
11	Mioang Medina Wisata	6 February	City Tour	500.000	2	2	2.000.000
12	Sajawali Mas Travel	3 February	City Tour	500.000	3	3	4.500.000
13	Sarosa Merapi Indah	12 February	Local Guide	300.000	2	2	1.200.000
14	Sultan Holiday	12 February	Local Guide	300.000	2	1	600.000
<b>TOTAL OVERALL GROSS PROFIT</b>							<b>26.850.000</b>

**Table 12. Net Profit**

Total Gross Profit	Profit	Total Profit
600.000	100.000	200.000
1.500.000	150.000	300.000
1.200.000	100.000	400.000
6.750.000	150.000	1.350.000
2.400.000	100.000	800.000
3.000.000	150.000	600.000
1.500.000	100.000	300.000
500.000	100.000	100.000
500.000	100.000	100.000
600.000	100.000	200.000
2.000.000	100.000	400.000
4.500.000	100.000	900.000
1.200.000	100.000	400.000

600.000	100.000	200.000
<b>26.850.000</b>	<b>Net Profit</b>	<b>6.250.000</b>

**Table 13. Estimated Profit/Loss**

Estimated Profit/Loss		PROFIT (NP-FC)
Net Profit	Fixed Cost	
6.250.000	4.400.000	<b>IDR. 1.850.000</b>

If viewed from the profit and loss table above, it shows that in the prediction in February this business has experienced a profit of IDR. 1.850.000. That way the capital that has been issued has been covered with the resulting profits. It is clear that there have been sixteen travel agents and event organizers who have used the services of this tour guide. The results of interviews conducted said that this tour guide agent has worked optimally to help many customers who make trips, both tourist trips and official visits used by event organizers.

The tour guides who have worked with CV. The PGM Organizer has been equipped with various abilities and expertise, both in the skills of various types of languages and in the field of scouting. This makes it easy for consumers who use our services.

From the last table shows that CV. This PGM Organizer is said to be feasible in the implementation of business to continue to be developed. By updating the management of tour guide services, which prioritizes service to consumers and correcting any slight mistakes that occur, this is the best record for this tour guide service management company.

### CONCLUSION

Establishing a business requires careful preparation and concept. It is hoped that the established business will not only stand at that time but can also grow to be even bigger. We have established this business concept based on tour guide management to answer the challenges of travel agents and event organizers

in reviving tourism activities in the midst of a pandemic and consumers can also get to know more about tourism insights in West Java, throughout the island of Java, Indonesia. This business is certainly expected to have a good impact on various parties, especially the list of target markets that we have determined.

Seen in the table of advantages that CV. This PGM Organizer can make a profit this February, so there is no doubt that using the tour guide services that we offer can help all consumers in any form of travel.

The success of a business cannot be separated from the implementation of the strategies that we have compiled. For that, we need readiness and accuracy in implementing the strategy. Suggestions and inputs for further researchers that a business feasibility study like this can continue to be developed along with the development of the travel agent market and various parties are needed to achieve this business goal.

## REFERENCES

- [1] ASITA. 2017. Prosedur dan Persyaratan Menjadi Anggota ASITA DKI Jakarta. <https://asitajakarta.org/prosedur-persyaratan-keanggotaan/>.
- [2] Badan Pusat Statistik. 2012. Perkembangan APW (Agen Perjalanan Wisata) Berskala Menengah dan Besar Menurut Provinsi. <https://www.bps.go.id/Subjek/view/id>.
- [3] Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. (1990). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990*.
- [4] Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (2017). Persyaratan Pembuatan Izin Gangguan.
- [5] [http://dpmpdsp.bandung.go.id/izin/index.php/syarat\\_prosedur](http://dpmpdsp.bandung.go.id/izin/index.php/syarat_prosedur).
- [6] Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 2017. Persyaratan Pembuatan Izin Usaha Perdagangan.
- [7] [http://dpmpdsp.bandung.go.id/izin/index.php/syarat\\_prosedur](http://dpmpdsp.bandung.go.id/izin/index.php/syarat_prosedur).
- [8] Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 2017. Persyaratan Pembuatan Surat Keterangan Domisili Usaha. [http://dpmpdsp.bandung.go.id/izin/index.php/syarat\\_prosedur](http://dpmpdsp.bandung.go.id/izin/index.php/syarat_prosedur).
- [9] Andrianus. (2017). Studi Kelayakan Bisnis Online Travel Agent. *Journal Bisnis Pariwisata*.
- [10] Indonesia Investments. (2016). *Industri Pariwisata Indonesia*. Bisnis. <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/industri-sektor/pariwisata/item6051>.
- [11] Jati, G. P. (2014). *Tergerusnya Penjualan Tiket via Travel*. CNN Indonesia.
- [12] Kasmir dan Jakfar. 2012. Studi Kelayakan Bisnis. Cetakan ke Delapan. Jakarta: Kencana.
- [13] Kotler, Philip and Keller, Kevin Lane. 2012. *Marketing Management 14th Edition*. New Jersey: Prentice Hall.

.....  
**EFEKTIVITAS HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN  
 TAHUN 2017-2019 DI KOTA BANDUNG**

Oleh

**Muhamad Rafi Firdaus<sup>1)</sup>, Husen Saeful Anwar<sup>2)</sup>, Ibnu Malik<sup>3)</sup>**

<sup>1,2,3</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung

**Jl. A.H. Nasution No.105 Bandung, Jawa Barat Indonesia**

**E-mail: [1muhamadrafifirdaus1@gmail.com](mailto:muhamadrafifirdaus1@gmail.com)**

**Abstract**

This study describes how effective the results of regional wealth management are separated from the city of Bandung. Of the three targets for revenue sources from the management of regional wealth which are separated, there is only one post which is part of the original regional income, namely the share of profit on capital participation. The research method used by the researcher is descriptive qualitative. Data collection techniques were carried out by observation, interviews, document studies and audi visuals. The data analysis technique was carried out by data reduction, data display, and conclusion drawing/verification. The researchers conducted in-depth interviews using a purposeful sampling technique where the researchers conducted interviews with the Head of the Bandung City BPKA and Head of Sub. Bandung City BPKA Revenue Accounting. The results of the study indicate that the effectiveness of the results of regional wealth management which is separated from the city of Bandung has not yet been achieved.

**Keywords: Effectiveness, Results of Separated Regional Wealth Management, Profit of BUMD**

**PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang tersebar dengan berbagai suku dan budaya. Letak wilayah menjadi salah satu penyebab pertumbuhan ekonomi dan pendapatan di masing-masing daerah mengalami perbedaan. Hal ini menjadi tantangan bagi setiap daerah untuk dapat memanfaatkan segala aspek dalam upaya peningkatan terhadap penerimaan daerah (Suharyadi, 2018). Otonomi daerah telah memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal ini berarti pelaksanaan otonomi daerah harus mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, sehingga daerah menjadi lebih mandiri dan lebih sejahtera (Funangi, 2018) Tujuannya antara lain lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di Kota Bandung melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Rosidin, 2010)

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah (Anggoro, 2017). Untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah perlu memperkirakan atau menghitung target/potensi, kemudian membandingkan antara target dan realisasi yang telah dicapai. Apabila ternyata terdapat perbedaan yang

sangat besar maka segera diteliti dari kelemahan yang ada. Beberapa hal yang dianggap menjadi penyebab utama rendahnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah antara lain: (1) Banyak sumber pendapatan di Kabupaten/Kota besar, tetapi digali oleh instansi yang lebih tinggi, misalnya pajak kendaraan bermotor, dan pajak bumi dan bangunan. (2) Badan Usaha Milik Negara (BUMD) belum banyak memberikan keuntungan kepada Pemerintah Daerah. (3) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, retribusi dan pungutan lainnya.

(4) Adanya kebocoran-kebocoran. (5) Biaya pungut yang masih tinggi. (6) Banyak Peraturan Daerah yang perlu disesuaikan dan disempurnakan. (7) Kemampuan masyarakat untuk membayar pajak yang masih rendah.

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Firdausy, 2017). Jika atas pengelolaan tersebut memperoleh laba, laba tersebut dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini mencakup: (1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD. (2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN. (3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Namun, Kota Bandung hanya mendapat dari satu sumber saja yaitu bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.

Dalam hal ini laba perusahaan daerah merupakan salah satu daripada pendapatan daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Maka sewajarnya daerah dapat pula mendirikan perusahaan yang khusus dimaksudkan untuk menambah penghasilan daerah disamping tujuan utama untuk

mempertinggi produksi, yang kesemua kegiatan usahanya dititik beratkan kearah pembangunan ekonomi nasional umumnya serta ketentraman dan kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur (Apriani, 2017). Walaupun perusahaan daerah merupakan salah satu komponen yang diharapkan dapat memberikan kontribusinya bagi pendapatan daerah, tetapi sifat utama dan perusahaan daerah bukan hanya berorientasi pada *profit* (keuntungan), akan tetapi justru dalam memberikan jasa dan kemanfaatan umum. Atau dengan kata lain, perusahaan daerah menjalankan fungsi ganda yang harus tetap terjalin keseimbangannya, yakni fungsi sosial dan fungsi ekonomi. Walaupun demikian hal ini tidak berarti bahwa perusahaan daerah tidak dapat memberikan kontribusi maksimal bagi ketangguhan keuangan daerah. Pemenuhan fungsi sosial oleh perusahaan daerah dapat memberikan sumbangan bagi pendapatan daerah, bukanlah dua pilihan dikotomis yang saling bertolak belakang. Artinya bahwa pemenuhan fungsi sosial perusahaan daerah dapat berjalan seiring dengan pemenuhan fungsi ekonominya sebagai badan ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan, hal ini dapat berjalan apabila profesioanlisme dalam pengelolaannya dapat diwujudkan (Putra, 2018).

- Sangat Efektif : >100%
- Efektif : 100%
- Cukup Efektif : 90%-99%
- Kurang Efektif : 75%-89%
- Tidak Efektif : ≤ 88%

Rumus efektivitas = Efektivitas :  $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

Kota Bandung hanya mendapat penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dari satu sumber, yakni Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mana seharusnya kota Bandung mendapat penerimaan Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Negara dan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik swasta . Realisasinya bahkan ternilai tidak efektif. Dilihat dari presentase penerimaan yang dibuktikan dengan teori (Mahmudi, 2015) di bawah ini:

**Tabel 1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Hasil**  
**Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang**  
**Dipisahkan Kota Bandung Tahun 2017-**  
**2019**

<b>TA H U N</b>	<b>TARGE T</b>	<b>REALIS ASI</b>	<b>EFEKTI VITAS</b>
20 17	RP 20.000.00 0.000,00	RP 11.279.07 2.122,00	56%
20 18	RP 66.902.85 4.788,00	RP 10.771.95 7.542,00	16%
20 19	RP 80.040.00 0.000,00	RP 10.477.35 0.536,00	13%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung

Dilihat dari tabel diatas bisa diketahui bahwa tingkat realisasi dari penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, yakni Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sangat tidak efektif, setiap tahunnya selalu menurun dan tidak ada peningkatan. Sehingga perlu upaya dari Pemerintah Kota Bandung untuk mengambil kebijakan dalam rangka meningkatkan penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang bersumber dari Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat memberikan laba yang sebesar-besarnya dan kontribusi terhadap PAD akan semakin meningkat.

Selama ini BUMD ditengarai sebagai badan usaha yang selalu rugi dan membebani APBD. Alih-alih memberikan kontribusi untuk memperbesar PAD, tetapi yang terjadi justru lebih banyak bantuan atau hibah yang mengalir dari APBD dibandingkan bagian laba atau keuntungan dari BUMD yang disisihkan untuk PAD. (Siswadi, 2012)

Begitu pentingnya efektivitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang bersumber dari Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah Kota Bandung, dan menjadi tanggung jawab yang serius bagi Pemerintah Kota Bandung untuk mengelola dan mengembangkannya sehingga dapat memberikan keuntungan bagi daerah ataupun masyarakat (Lazuardi, 2018).

Dari segi kriteria efektivitas menurut (Makmur, 2015) sebagai berikut :

1. Ketepatan Penentuan Waktu

Sebagaimana kita ketahui bahwasannya waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi. Untuk melaksanakan suatu kegiatan tauu program maka perencanaan dalam penentuan waktu mutlak diperlukan. Demikian pula halnya akan sangat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi, penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Penentuan waktu disini dimaksudkan pada penyetoran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Kota Bandung, dimana lebih ditekankan pada kapan waktu disetorkan serta sistematika pembayarannya dari setiap BUMD Kota Bandung kepada Pemerintah Kota Bandung seperti apa.

2. Ketepatan Perhitungan Biaya

Setiap pelaksanaan suatu kegiatan baik yang melekat pada individu, kegiatan yang melekat kepada organisasi maupun kegiatan yang melekat kepada negara yang bersangkutan. Ketepatan dalam pemanfaatan biaya terhadap suatu kegiatan dalam arti bahwa tidak mengalami kekurangan sampai kegiatan itu dapat diselesaikan.

Perhitungan biaya disini dimaksudkan dalam ketepatan pemanfaatan biaya, dimana BUMD Kota Bandung masih membebani APBD dalam Penyertaan modal, namun tidak diikuti dengan peningkatan kinerja yang ditandai dengan penerimaan atau hasil keuntungan yang sesuai target. Padahal tujuan dari penyertaan modal daerah ini untuk mengembangkan dan meningkatkan kinerja BUMD.

**Tabel 2**  
**Target dan Realisasi Nilai Investasi**  
**(Penyertaan Modal) Daerah**  
**Kota Bandung Tahun 2017-2019**

Tahun	Target	Realisasi	Nilai Investasi
2017	RP 20.000.000,00	RP 11.279.072.122,00	123.623.000.000,00
2018	RP 66.902.854.788,00	RP 10.771.957.542,00	193.554.000.000,00
2019	RP 80.040.000,00	RP 10.477.350.536,00	72.772.760.800,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung

### 3. Ketepatan dalam Pengukuran

Ketepatan ukuran yang digunakan dalam melaksanakan suatu kegiatan atau tugas yang dipercayakan adalah merupakan bagian dari keefektivitasan. Hampir semua kegiatan dimana pelaksanaannya tidak sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan

sebelumnya, dengan ketepatan ketepatan ukuran sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya sebenarnya merupakan gambaran dari pada efektivitas kegiatan yang telah menjadi tanggung jawab dalam sebuah organisasi.

Maksud dalam pengukuran disini dilakukan sebagai ukuran keberhasilan yang ditetapkan sebelumnya. Pengukuran ini berupa target kinerja yang akan dicapai seperti target keberhasilan dari penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Kota Bandung, dan ini terletak pada target penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dimana targetnya selalu tinggi bahkan naik di beberapa tahun. Tetapi hal tersebut tidak pernah terealisasi dengan baik.

### 4. Ketepatan dalam Menentukan Tujuan

Organisasi apapun bentuknya akan selalu berusaha untuk mencapai tujuan yang telah mereka sepakati sebelumnya dan biasanya senantiasa dituangkan dalam sebuah dokumen secara tertulis yang sifatnya lebih strategik, sehingga menjadi pedoman atau rujukan dari pelaksanaan kegiatan sebuah organisasi. Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang.

Maksud dari menentukan tujuan ini ialah tujuan BUMD tercantum dalam UU Nomor 23 tahun 2014 pasal 331 diantaranya memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memperoleh laba atau keuntungan. Pada prakteknya, BUMD di Kota Bandung yang menghasilkan laba dan keuntungan hanya 2 BUMD, dan kontribusinya dalam PAD pun selalu terbilang tidak efektif di setiap tahunnya.

### 5. Ketepatan Sasaran



Yaitu mengetahui sejauh mana ketepatan penentuan sasaran yang mempengaruhi tingkat keberhasilan program. Ketepatan sasaran lebih bersifat pada operasional dengan jangka waktu yang pendek. Apabila suatu organisasi telah menentukan sasaran dan terlaksana dengan tepat, maka hal itu dapat mempengaruhi tingkat suatu keberhasilan program yang telah ditentukan oleh organisasi tersebut. Jika tujuan yang ditetapkan tidak tepat, maka akan menghambat pelaksanaan kegiatan itu sendiri.

Peneliti terdahulu yang penulis gunakan adalah penelitian dari (Funangi, 2018) yang berjudul “Analisis Efektifitas dan Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Papua”, tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar tingkat efektifitas pengelolaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan serta untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar kontribusi hasil efektifitas pengelolaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Yang menjadi keunikan atau perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian lain sebelumnya yaitu peneliti akan lebih dalam meneliti serta melihat dari fenomena dan masalah yang terjadi di lapangan dan penjabaran setiap dimensi, serta topik penelitian ini masih jarang diteliti yang menjadi alasan ketertarikan peneliti memilih topik ini.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, masih belum efektifnya realisasi dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan Kota Bandung tahun 2017-2019. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan supaya hasil pengelolaan kekayaan daerah Kota Bandung bisa meningkat kedepannya.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian kualitatif merupakan proses menyelidiki suatu permasalahan didasarkan pada gambaran menyeluruh disajikan menggunakan kata-kata, pandangan informan, kemudian disusun dalam latar alamiah (Silalahi, 2012). Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, untuk jenis penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan alasan peneliti dapat memberikan gambaran tentang penelitian yang sebenarnya, melalui pencarian sistematis, mengumpulkan data dan menyeleksi kembali untuk melengkapi data yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian untuk mendukung pencarian data, sehingga peneliti dapat menentukan kesimpulan dan jawaban atas pertanyaan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam ini merupakan jenis data kualitatif yang dihasilkan dari proses wawancara, observasi dan studi kepustakaan.

#### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif berupa laporan dan Hasil. Berikut sumber data dalam penelitian ini adalah : (1). Sumber data primer Sumber primer ialah sumber data ketika peristiwa tersebut terjadi. Menurut (Sugiyono, 2013) sumber primer merupakan data yang langsung diberikan untuk peneliti. Sumber primer penelitian ini berasal dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung dan beberapa BUMD Kota Bandung. Data tersebut diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilaksanakan mendalam oleh peneliti dengan menggunakan teknik *sampling purposeful* dimana peneliti melakukan wawancara kepada Ketua Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset dan Kepala Sub. Bidang Akuntansi Pendapatan BPKA Kota Bandung (2). Sumber data sekunder Data sekunder ialah data pendukung penelitian, diantaranya yaitu berbagai komentar, interpretasi, atau materi original. Sumber data sekunder penelitian ini yaitu internet dan literatur ilmiah seperti buku, skripsi, artikel, jurnal, serta undang-undang yang

berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. (Silalahi, 2012)

### Teknik Pengumpulan Data

Adapun penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data menurut (Creswell, 2016) yaitu: (1). Observasi, pada saat observasi peneliti mendapat gambaran mengenai kondisi di lapangan nah ada tahap observasi ini peneliti mengunjungi dan melakukan pengamatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung. (2). Wawancara, wawancara dilaksanakan mendalam oleh peneliti dengan menggunakan teknik *sampling purposeful* dimana peneliti melakukan wawancara kepada 4 orang yang berkompeten di bidangnya yaitu:

**Tabel 4**  
**Daftar Informan**

No.	Nama Informan (Inisial)	Jabatan
1	DS	Ketua BPKA Kota Bandung
2	WD	Kepala Sub. Bidang Akuntansi Pendapatan BPKA Kota Bandung

Keterangan:

1. Informan Kunci : DS
2. Informan Utama : WD

(3). Dokumen Studi, dokumentasi merupakan metode dalam penelitian kualitatif yang mana dengan studi dokumentasi peneliti dapat melihat serta menganalisis berbagai dokumen mengenai suatu subjek. Dalam sebuah dokumen di dalamnya terdapat fakta serta data. Data yang terdapat dalam sebuah dokumen diantaranya berupa surat, catatan, foto, laporan, dan lain-lain. (4). Audio visual, dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan audio-visual berupa perekam yang digunakan pada saat wawancara kepada informan. Hal tersebut bertujuan untuk memahami paparan yang telah dijelaskan oleh informan secara lebih rinci dan memungkinkan

tidak adanya yang terlewat mengenai informasi yang disampaikan oleh informan.

### Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2013) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas. Langkah analisis tersebut antara lain (1) *Data Reduction* (Reduksi Data). Reduksi data yaitu merangkum atau memilih hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga peneliti mudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan dapat dicari bila diperlukan. (2) *Data Display* (Penyajian Data). Penyajian data dapat dilakukan dengan menggunakan paparan singkat, bagan dan yang lainnya. Penyajian data yang digunakan dalam penelitian kualitatif bersifat narasi. (3) *Conclusiun Drawing/verification*. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Ketetapan Penentuan Waktu

Salah satu hal yang paling berpengaruh terhadap efektivitas adalah ketepatan waktu. Untuk melaksanakan suatu kegiatan atau program maka perencanaan dalam penentuan waktu mutlak diperlukan. Waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektivitasan suatu program dalam mencapai tujuan. Satu-satunya pos pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini adalah bagian laba atas penyertaan modal BUMD Kota Bandung. Hasil temuan yang ditemukan oleh peneliti di lapangan mengenai dimensi ketepatan penentuan waktu untuk penyeteroran hasil bagian laba atas penyertaan modal masih ditemukan BUMD yang tidak menyetorkan hasilnya tepat waktu bahkan ada yang tidak menyetorkan

sama sekali. Maka dari itu peneliti merasa ada hal yang harus dibenahi dari masalah tersebut, diantaranya memperbaiki komunikasi antar sektor serta membenahi sistematika dari penyeteroran hasil bagian laba atas penyertaan modal tiap BUMD.

### **Ketepatan Perhitungan Biaya**

Dimensi ketepatan perhitungan biaya dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat efektivitas. Ketepatan perhitungan biaya disini adalah biaya pelaksanaan serta pemanfaatannya. Hasil temuan yang peneliti temukan di lapangan mengenai dimensi ketepatan perhitungan biaya ini Kota Bandung menerima penerimaan pembiayaan dari penyertaan modal BUMD hanya beberapa BUMD saja yang menyeterorkan, serta adanya ketidakseimbangan antara penyertaan modal yang masuk ke BUMD dengan kegiatan operasional, dimana kegiatan operasional BUMD ini nilainya sangat besar sehingga beberapa BUMD belum bisa menyeterorkan laba atau dividennya karena habis untuk kegiatan operasional.

**Tabel 3**  
**Penerimaan Pembiayaan dari Penyertaan**  
**Modal Daerah**  
**Kota Bandung Tahun 2017-2019**

<b>Tahun</b>	<b>BUMD</b>	<b>Target</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>
2017	Bank BJB	8.664.565.950	10.324.000.534
	PD BPR	850.000.000	657.914.588
	KPK B	195.434.050	297.157.000
2018	Bank BJB	11.000.000.000	10.474.800.542
	KPK B	300.000.000	297.157.000
2019	Bank BJB	11.000.000.000	10.370.400.536
	KPK B	300.000.000	106.950.000

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung

Maka dari itu peneliti merasa harus ada upaya yang dilakukan untuk membenahi hal tersebut agar perhitungan biaya disini menjadi efektif seperti menekan biaya operasional dari tiap BUMD Kota Bandung agar kegiatan operasional yang dikeluarkan tidak lebih besar dengan modal yang disertakan oleh Pemerintah Kota Bandung.

### **Ketepatan dalam Pengukuran**

Kriteria selanjutnya yang menentukan efektif atau tidaknya hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini adalah ketepatan dalam pengukuran. Maksud dari ketepatan pengukuran disini ialah pengukuran berupa target kinerja yang akan dicapai seperti target keberhasilan dari penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Kota Bandung. Adanya kemungkinan kurang tepatnya sistem perencanaan dari pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan ini sangat mungkin terjadi. Dimensi ketepatan dalam pengukuran ini bisa diukur dengan melihat sejauh mana kesiapan perencanaan yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam menanggapi suatu fenomena dan ketepatan menentukan realisasi penerimaan yang dapat dijadikan suatu target. (1). Pengukuran Perencanaan. Pengukuran perencanaan yaitu untuk mengetahui sudah tepat atau tidaknya perencanaan dalam penerimaan deviden dari tiap BUMD yang nantinya deviden tersebut akan dikelola sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan yang nantinya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung sebagai pengelola. (2). Pengukuran Realisasi. Pengukuran realisasi yaitu untuk mengetahui dapat dikatakan efektif atau tidaknya pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dengan melihat realisasi dari penerimaan deviden dari tiap BUMD yang menerima pembiayaan dan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Kota Bandung.

### **Ketepatan dalam Menentukan Tujuan**

Tujuan yang tepat atas dilakukannya pengelolaan kekayaan yang dipisahkan ini dapat mendukung tercapainya tujuan Kota

Bandung dalam mengoptimalkan dan mengelola hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan harus dikelola berdasarkan tertib, efisien, transparan, dan akuntabel dan dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Tujuan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah untuk mengoptimalkan perolehan laba atas penyertaan modal daerah. Pada dimensi ketepatan dalam menentukan tujuan ini dinilai sudah cukup baik, karena dari hasil wawancara dilapangan ditemukan tujuan dari diadakannya kekayaan yang dipisahkan ini bertujuan untuk memenuhi target di setiap tahunnya dan mencapai tujuan dari setiap BUMD yakni memberikan manfaat dan perkembangan ekonomi di daerah, ada pun kemanfaatan umum yang dituju ialah memperoleh laba agar dapat berkontribusi terhadap PAD yang ada, namun secara realisasi di lapangan masih dirasa kurang karena masih banyak BUMD yang tidak menyetorkan kewajibannya.

#### **Ketepatan Sasaran**

Ketepatan sasaran merupakan hal penting yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu program atau hal yang ingin dicapai. Program dapat dikatakan efektif apabila sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan aturan yang telah disepakati. Makmur (2011:7) menjelaskan bahwa sasaran yang tepat, baik yang ditetapkan secara individu maupun secara organisasi sangat menentukan suatu keberhasilan. Apabila suatu organisasi telah menentukan sasaran dan terlaksana dengan tepat maka hal itu dapat mempengaruhi tingkat suatu keberhasilan program yang telah ditentukan oleh organisasi tersebut.

Dalam pelaksanaannya penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan penerimaan setiap tahunnya selalu menurun bahkan bisa dibilang tidak efektif jauh dari target yang ditetapkan. Dari tiga sasaran pos sumber penerimaan hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan ini hanya ada satu pos saja yang menjadi bagian atas pendapatan asli daerah yakni bagian laba atas penyertaan modal. Namun bisa dilihat bahwa kegiatan penyertaan modal yang Pemerintah Kota Bandung lakukan ini penerimaan kembalinya atau bagian laba atas penyertaan modalnya belum efektif atau belum tercapai. Bisa dilihat bahwa bagian laba atas penyertaan modal menjadi pos yang menyumbangkan pendapatan terkecil di pendapatan asli daerah Kota Bandung.

Dari hasil wawancara, pengamatan, dan analisis, peneliti menemukan beberapa hambatan mengapa kurang berkembangnya BUMD kota Bandung sehingga kurangnya menghasilkan laba yang nantinya untuk kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung, diantaranya: (1). Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Berdasarkan dengan temuan yang peneliti temukan di lapangan, peneliti menemukan promosi yang dilakukan oleh BUMD di Kota Bandung ini kurang menjangkau masyarakat sehingga membuat kurangnya pengetahuan masyarakat Kota Bandung terhadap perusahaan daerah di Kota Bandung. Ditambah lagi dengan adanya terobosan baru yang lebih mudah diketahui dari pada perusahaan daerah di Kota Bandung ini sendiri. BUMD di Kota Bandung ini tidak memanfaatkan platform yang lebih mudah diketahui masyarakat atau lebih mudah dijangkau, seperti social media. (2). Kurangnya daya minat masyarakat akan produk BUMD. Selaras dengan kurangnya informasi, masyarakat yang tidak tahu akan keberadaan BUMD ini pun menjadi enggan menggunakan jasa bahkan produk yang ditawarkan oleh BUMD, masyarakat juga lebih memilih barang atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan lain. Menimbang dengan perluasan informasi mengenai keunggulan produknya yang lebih meluas dan lebih diketahui masyarakat luas. Kemudian BUMD di Kota Bandung ini juga belum bisa bersaing produk dengan kompetitor di bidangnya. (3). Kurang strategisnya lokasi.

Kurang strategisnya lokasi ini menjadi penghambat juga optimalisasi penyertaan modal daerah. Seperti contohnya KPKB, dimana KPKB sendiri ini memiliki banyak unit usaha, salah satunya minimarket, namun lokasi yang diambil ini kurang strategis dan menjangkau masyarakat banyak, alhasil minimarket milih KPKB ini tidak diketahui banyak orang. Dan kebanyakan masyarakat lebih memilih berbelanja di minimarket terdekat dengan wilayah mereka, bahkan sekarang ada minimarket yang bisa secara online yang justru memudahkan masyarakat, dan minimarket milik KPKB ini belum memiliki hal itu. (4). Kurangnya modernisasi. Perusahaan Daerah di Kota Bandung ini kurang mengikuti perkembangan zaman, seperti belum memanfaatkan platform yang ada secara maksimal. Padahal masyarakat pada dewasa ini lebih memilih melihat informasi atau persebaran berita apapun via online, namun BUMD di Kota Bandung ini belum memaksimalkannya. Juga untuk barang atau jasa yang ditawarkan juga belum mengikuti perkembangan zaman yang terus berkembang ini.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan masih minim kontribusi terhadap pendapatan asli daerah kota bandung, dimana dari tiga sasaran pos sumber penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini hanya ada satu pos saja yang menjadi bagian atas pendapatan asli daerah yakni bagian laba atas penyertaan modal. Pada penyetoran hasil bagian laba atas penyertaan modal masih ditemukan BUMD yang tidak menyetorkan hasilnya tepat waktu bahkan ada yang tidak menyetorkan sama sekali. Kemudian ketepatan perhitungan biaya ditemukan adanya ketidakseimbangan antara penyertaan modal yang masuk ke BUMD dengan kegiatan operasional, dimana kegiatan operasional BUMD ini nilainya sangat besar

sehingga beberapa BUMD belum bisa menyetorkan laba atau dividennya karena habis untuk kegiatan operasional. Serta kurangnya modernisasi BUMD dalam berapdatasi dan berlomba dalam menghasilkan laba yang nantinya disetorkan kembali menjadi PAD Kota Bandung. Sedangkan dalam ketepatan pengukuran dilakukan dua cara yaitu pengukuran perencanaan dan pengukuran realisasi, kedua hal itu dilakukan untuk mengetahui dapat dikatakan efektif atau tidaknya pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dengan melihat perencanaan dan realisasi dari penerimaan deviden dari tiap BUMD yang menerima pembiayaan dan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Kota Bandung. Lalu untuk ketepatan dalam menentukan tujuan ini dilakukan untuk menyelelarkan tujuan dari adanya BUMD itu sendiri yakni memberikan manfaat dan perkembangan ekonomi di daerah serta memberikan laba atau profit kepada Pemerintah Kota Bandung. Dan terakhir dalam ketepatan sasaran dilakukan supaya ketiga sasaran pos penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini aktif kembali tidak hanya bagian laba atas penyertaan modal BUMD saja, supaya bisa memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kota Bandung sebanyak-banyaknya.

### **Rekomendasi**

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah peneliti jabarkan, penulis ingin menyampaikan saran terhadap instansi terkait, yakni diantaranya:

1. Melakukan perbaikan perhitungan biaya serta penggunaan modal, hal ini dengan pertimbangan bahwa beberapa BUMD di Kota Bandung ini mengalami kerugian bahkan penyertaan modal yang habis untuk kegiatan operasional. Dengan begitu, maka akan meningkatkan juga bagian laba atas penyertaan modal.
2. Melakukan modernisasi. Modernisasi ini bisa dilakukan dalam hal pemaksimalan penggunaan teknologi, pembaharuan

pembahasan mengenai prioritas investasi nasional, juga memberikan pelayanan secara online, dengan begitu juga sama saja dengan memberikan lokasi BUMD secara strategis, mengingat dimasa modern seperti sekarang, masyarakat lebih menyukai diberikan pelayanan secara online.

3. Mengupayakan peningkatkan pendapatan asli daerah Kota Bandung untuk meningkatkan kemampuan finansialnya dalam membiayai penyertaan modal di Kota Bandung.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anggara, S. (2015). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: PUSTAKA SETIA.
- [2] Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- [3] Apriani, W. (2017). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Penerimaan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Serta Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Salahtiga Tahun Anggaran 2012-2016. *Jurnal Ekonomi*.
- [4] Creswell. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [5] Firdausy, C. M. (2017). *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- [6] Funangi, U. (2018). Analiss Efektifitas dan Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Papua. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*.
- [7] Kireina, N. Y. (2021). Analisis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016-2019. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 32-37.
- [8] Lazuardi. (2018). Analisis Kontribusi Retribusi Daerah dan Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kalimantan Selatan. *JIEP : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*.
- [9] Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- [10] Makmur. (2015). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Jakart: PT Revika Aditama.
- [11] Putra, W. (2018). *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- [12] Rosidin, U. (2010). *Otonomi Daerah dan Desentralisasi (Dilengkapi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan Perubahan-Perubahannya)*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- [13] Sekaran, U. (2017). *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- [14] Silalahi, U. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- [15] Siswadi, E. (2012). *Reengineering BUMD Mengoptimalkan Kualitas Pelayanan yang Unggul*. Bandung: Mutiara Press.
- [16] Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- [17] Suharyadi, D. (2018). Pengaruh Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan Terhadap PAD Kabupaten Bogor. *Moneter*.

.....  
**DIGITALISASI EKONOMI SYARIAH DI KALANGAN KAUM MILENIAL UNTUK  
 PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH**  
 .....

Oleh

Ratu Surya Atmajaya<sup>1)</sup>, Misbakhul Munir Mubarak<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

E-mail: <sup>1</sup>[rasyajava04@gmail.com](mailto:rasyajava04@gmail.com), <sup>2</sup>[misbahmunirmubarak@gmail.com](mailto:misbahmunirmubarak@gmail.com)

**Abstract**

The millennial generation is a group that is very synonymous with digital technology. Millennials rely a lot on digital communication tools in their daily lives. So that digital technology is no longer just a contemporary style but has become a necessity for various activities. This research was conducted in order to find out the extent of the potential of millennials for sharia economic development. The research method uses a literative qualitative method that explains the behavior of Indonesian millennials in digital technology and the potential potential that can be utilized for the development of the Islamic economy. The analysis technique carried out in this case is by examining various literatures, presenting good data through the results of researchers' observations of the millennial phenomenon, then proceeding with drawing conclusions. The results obtained from this study are first, the life behavior of Indonesian millennials is strongly influenced by digital technology. Second, there is a need for massive breakthroughs in socialization, information, and other efforts to introduce Islamic economics among millennials by using digital technology.

**Keywords: Digitization, Millennial, Development, Economic**

**PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia berada di posisi ke-4 sebagai The State of The Global Islamic Economy Repor (The State of The Global Islamic Economy Report, 2019) dengan potensi tinggi untuk mengembangkan sektor ekonomi syariah. Apalagi Sistem perekonomian syariah dapat menjadi alternatif dari sistem perbankan konvensional karena sistem ini mempunyai daya resistansi yang cukup kuat terhadap krisis keuangan global seperti di masa pandemi covid 19 ini. Bahkan menurut Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2019 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, kinerja ekonomi syariah secara umum lebih tinggi dibandingkan PDB nasional yakni dengan pertumbuhan mencapai 5,72 persen. Tentu saja hal ini berpotensi menjadikan ekonomi syariah sebagai Pelopor Kemajuan Ekonomi nasional bahkan dunia. Dalam rangka lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi syariah salah satu

potensi yang harus di dorong adalah dari generasi milenial yang jumlahnya sangat signifikan, dengan jumlah sebesar 69,38 juta atau 25,87% dari total penduduk indonesia, ditambah lagi dengan generasi Z yang jumlahnya 74,93 juta atau 27,94% dari total penduduk Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2022).

Salah satu penggerak terbesar ekonomi kreatif adalah generasi millennial. Generasi millennial adalah generasi yang lahir dalam kurun waktu akhir tahun 70-an sampai awal tahun 90-an. Populasinya terhitung sangat besar dan sedang ada dalam usia produktif (20–30 tahun). Generasi millennial adalah generasi yang terpapar dengan teknologi informasi dan telekomunikasi. William Deresiewicz menyebut generasi milenial sebagai generation sell (William Deresiewicz, 2022). Sedangkan Steve Jobs atau Mark Zuckenberg, menyebut generasi millennial dengan cultural hero atau generasi entrepreneur, Selain menjual dalam arti sebenarnya (produk atau jasa), generasi ini

juga menjual diri sendiri lewat citra (John Howkins, 2001).

Begitu juga dengan para generasi millennial muslim atau disebut generasi M. Generasi muslim milenial (generasi M) adalah generasi muda muslim yang terikat oleh cara memandang dunia bahwa keimanan dan modernitas bisa berjalan beriringan. Berbicara tentang generasi muslim milenial maka artinya berbicara tentang pionir muslim muda modern saat ini. Generasi M ini memiliki banyak ide yang menjadi pioneer peradapan dunia, baik diantara muslim maupun masyarakat yang lebih luas. Dengan demografis dan jiwa muda muslim, pengaruh ini akan terus tumbuh. Mereka akan membentuk dan mengarahkan masa depan populasi muslim yang lebih luas dan lebih jauh lagi akan memberikan dampak yang signifikan di tataran global. Pengaruh ekonomi secara bertahap beralih kearah dunia islam. Pertumbuhan ini merupakan akibat dari besarnya sumber daya tenaga kerja dan populasi anak muda muslim yang bisa menciptakan perubahan dinamika.

Kelompok milenial ini bisa menjadi economy Key player yang dapat berperan dalam mengakselerasi pertumbuhan keuangan jaringan syariah. Potensi ini didukung oleh pertumbuhan digitalisasi sebagai gaya hidup baru dalam bertransaksi generasi milenial. Kaum milenial Indonesia telah terkoneksi dengan internet dalam hampir semua aktifitas harian mereka. Namun fakta yang ada bahwa kalangan milenial belum banyak mengenal produk produk ekonomi syariah dan berbagai informasi kegiatan tentang ekonomi syariah.

Melihat kenyataan ini, tentu diperlukan terobosan inovasi yang massif melalui digitalisasi ekonomi syariah agar kalangan milenial lebih mengenal produk ekonomi syariah sehingga memiliki pengaruh signifikan dalam pengembangan ekonomi syariah. Ada 171,17 juta pengguna internet Indonesia di tahun 2018. Dari segmen umur, ternyata dari usia 15-19 tahun mempunyai penetrasi paling tinggi mencapai 91%. Usia milenial lainnya

yang menempati posisi teratas soal pengguna internet di Indonesia yaitu usia 20-24 tahun dengan penetrasi 88,5% (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2018). Secara umum kalangan milenial telah memiliki kemampuan keuangan yang cukup.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, oleh karena itu jenis data yang dipakai mengarah pada data-data kualitatif dengan menitik beratkan pada persoalan-persoalan mendalam, meliputi digitalisasi Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan jual beli menggunakan sistem Online.

Untuk memperoleh kebenaran fakta ilmiah, sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sumber data utama: data yang diperoleh peneliti langsung dari hasil pengamatan terhadap transaksi salam menggunakan fasilitas Online serta dokumen-dokumen dari internet. Sumber data sekunder, yaitu penelitian yang berhubungan dengan kepustakaan dan bahan pustaka (buku).

Dalam usaha mencari jawaban terhadap problem yang ada maka dipergunakan metode Metode Deskriptif, untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang ada mengenai sistem jual beli onlen yang ada pada sistem perdagangan online yang ada di pasar dan dalam hukum Islam. Menggunakan model berpikir induktif, sebuah pendekatan yang dimulai dari pernyataan yang spesifik tentang fakta tertentu, pada Digitalisasi Ekonomi Syariah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekonomi syariah adalah sebuah pangsa besar yang mencakup berbagai industri. Di Indonesia saat ini mulai muncul kesadaran masyarakat Muslim untuk ber-Islam secara *kaffah* yang kemudian muncul istilah *halal lifestyle*. Hal ini dibuktikan dengan semakin ramainya kegiatan Muslim, mulai dari produk makanan maupun minuman halal, kajian yang bertebaran di berbagai tempat tidak hanya masjid, fashion Muslim yang semakin diminati



sehingga banyak Muslimah yang mengenakan hijab serta keuangan syariah yang diminati bagi kaum Muslim untuk menghindari unsur riba yang sangat dilarang dalam ajaran Islam. Di bidang keuangan syariah tentu menciptakan prinsip filantropi selain mengejar keuntungan material. Filantropi ini berguna sebagai distribusi kekayaan salah satunya adalah wakaf. Wakaf merupakan sarana penyediaan fasilitas yang dapat dimanfaatkan secara publik (Masyarakat Ekonomi Syariah, 2019). Belum lagi saat ini pariwisata halal juga menjadi destinasi baru dan peluang ekonomi yang sangat besar jika dikelola dengan baik, tentunya dengan SDM yang mumpuni.

Istilah generasi milenial memang saat ini sedang akrab didengar. Istilah tersebut berasal dari *millennials* yang diciptakan oleh dua pakar sejarah dan penulis Amerika, William Strauss dan Neil Howe dalam beberapa bukunya. *Millennial generation* atau generasi Y juga akrab disebut *generation me* atau *echo boomers*. Secara harfiah memang tidak ada demografi khusus dalam menentukan kelompok generasi yang satu ini. Namun, para pakar menggolongkannya berdasarkan tahun awal dan akhir. Penggolongan generasi Y terbentuk bagi mereka yang lahir pada 1980 - 1990, atau pada awal 2000, dan seterusnya (Hutagalung, Fitri, & Ritonga, 2019).

Teori lain tentang generasi milenial dikemukakan oleh Elwood Carlson dalam bukunya berjudul *The Lucky Few: Between the Greatest Generation and the Baby Boom*. Menurutnya, generasi milenial adalah mereka yang lahir dalam rentang tahun 1983 sampai dengan 2001. Jika didasarkan pada Generation Theory yang dicetuskan oleh Karl Mannheim pada tahun 1923, maka generasi milenial adalah generasi yang lahir pada rasio tahun 1980 sampai dengan 2000. Generasi milenial juga disebut sebagai generasi Y. Istilah ini mulai dikenal dan dipakai pada editorial koran besar Amerika Serikat pada Agustus 1993 (Tim Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Dengan Pusat Statistik, 2018).

Untuk konteks Indonesia, gaya hidup anak muda milenial akan memiliki pengaruh yang besar terhadap berbagai aspek kehidupan, baik secara personal maupun publik, baik dari sisi sosial, budaya, hingga ekonomi, politik bahkan hingga agama. Melihat uraian tersebut, anak muda Muslim memiliki posisi yang strategis. Posisi strategis itu tidak hanya untuk konteks nasional, tetapi juga internasional. Muslim milenial dapat mengangkat citra Islam Indonesia agar menjadi rujukan dunia dalam mewujudkan masyarakat yang damai dan berkeadaban (Iswanto, 2018).

Indonesia sendiri diprediksi akan mengalami apa yang disebut dengan bonus demografi di sekitar tahun 2020-2030. Hal ini berdasarkan prediksi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dimana pada tahun-tahun tersebut 70% warga Indonesia berada di usia produktif, yakni antara usia 15 hingga 64 tahun. Hanya sekitar 30% yang berusia tidak produktif, yakni mulai usia 14 tahun ke bawah dan 65 tahun ke atas.

Teknologi juga membuat tangan internet tersebut menggunakan media sosial sebagai tempat makan apa lagi media sosial telah menjadi salah satu mekanisme pelaporan dan sumber berita utama bagi masyarakat kepemilikan perangkat mobile menjadi salah satu faktor paling penting terhadap perilaku belanja online berdasarkan pernyataan tersebut Indonesia memiliki peringkat teratas pada global dalam hal penggunaan ponsel pintar untuk belanja daring sebanyak 1% konsumen pembeli berbelanja menggunakan ponsel pintar dan 30% lainnya memilih tablet atau perangkat mobile ini sementara 58% konsumen lebih memilih menggunakan komputer milenial banyak menggunakan teknologi komunikasi instan seperti email instant messaging dan media sosial seperti Facebook Instagram Twitter.

Kalangan milenial memiliki karakteristik khas yang berbeda dengan kalangan lainnya.

Kalangan milenial sangat akrab dengan penggunaan alat komunikasi, media dan teknologi digital. Menurunnya minat baca mereka karena lebih memilih gadget sebagai sarana membaca. Bahkan keakraban mereka terhadap alat komunikasi digital melebihi keakraban mereka terhadap buku buku. Semua karakteristik ini disebabkan karena mereka lahir di saat teknologi alat komunikasi sedang mengalami peningkatan pesat.

Di era Ekonomi digital saat ini, personal computer (PC) dan internet menjadi teknologi kunci yang digunakan dalam berbagai kebutuhan sehari-hari. Penggunaan teknologi seperti PC dan internet kini menjadi awal dari perkembangan e-commerce atau perdagangan elektronik. Ekonomi digital menyebabkan banyak terjadi perubahan pada transaksi kegiatan ekonomi masyarakat dan bisnis, dari yang awalnya konvensional menjadi serba elektronik. Sehingga semua aktifitas sehari-hari dapat dilakukan dengan cepat dan efisien.

Jauh sebelum adanya ekonomi digital, dibutuhkan waktu dan biaya yang kadang nominalnya tidak sedikit. Namun sekarang, semua tran. Tap sekarang, semua transaksi kegiatan ekonomi dan bisnis sudah banyak dilakukan dengan pangsapasar melalui situs jual beli online Begitu pula halnya dengan proses pembayaran turut mengalami. Jika sebelumnya pembayaran dilakukan dengan cara pembatyanan uang tunai di toko atau pusat penjualan, maka saat ini teknologi digital mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran online, kapan pun dan dimanapun konsumen inginkan.

Perubahan kegiatan ekonomi yang sudah serba online menjadi bukti nyata bahwa ekonomi digital terus mengalami kemajuan. Terlebih Perusahaan startup di Indonesia saat ini sedang menjamur. Menurut Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa di Indonesia telah berdiri 2.100 startup. Trend startup banyak menysasar kalangan millennial, bahkan meluas ke berbagai generasi seperti generasi Z. Keuntungan yang

menggiurkan membuat banyak berdiri perusahaan startup sehingga bisa dikatakan bahwa perusahaan startup mempunyai peran penting dalam menyokong perekonomian nasional.

Teknologi Digital merupakan peralihan dari pengoperasionalannya tidak lagi banyak menggunakan tenaga manusia. tetapi lebih cenderung pada system pengoprasian yang serba otomatis dan canggih dengan system computer, dalam bentuk bilangan biner (nol dan satu) dengan format yang dapat dibaca oleh komputer. Teknologi digital pada dasarnya hanyalah sistem menghitung sangat cepat yang memproses semua bentuk-bentuk informasi sebagai nilai-nilai numeris. Pada teknologi analog, gambar dan suara diubah menjadi gelombang radio, maka teknologi digital menkonversi gambar dan suara menjadi data digital yang terdiri dari angka 1 dan 0. Dengan teknologi digital ini, gambar yang ditampilkan memiliki kualitas warna yang lebih natural dan resolusi yang lebih baik, tidak pecah atau turun kualitasnya jika gambar ditampilkan di layar yang besar.

Pesatnya perkembangan teknologi digital yang ditandai dengan kehadiran sejumlah berbagai alat komunikasi mutakhir, dimana setiap orang dapat mengolah, memproduksi, serta mengirimkan maupun menerima segala bentuk pesan komunikasi, di mana saja dan kapan saja, seolah-olah tanpa mengenal batasan ruang dan waktu, dengan sendirinya telah memacu terjadinya perkembangan di sektor media massa, yang merupakan bagian dari komponen komunikasi. Akibatnya, serbuan informasi yang bersumber dari media massa, baik cetak maupun elektronik mulai terasa. Disadari atau tidak, saat ini kita memang telah berada dalam suatu lingkaran yang sarat akan informasi. Hal ini tentunya akan memberikan dampakdampak tertentu bagi masyarakat, baik positif maupun negatif. Namun pastinya, yang perlu diwaspadai adalah dampak negatif dari pesatnya perkembangan tersebut yang secara tidak langsung mulai mengisi liku-liku

kehidupan masyarakat. Sebagai catatan, dalam beberapa dasawarsa terakhir ini perkembangan media massa dan arus informasi di Indonesia memang terbilang luar biasa.

Siring dengan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia yang meliputi pengembangan industri produk halal, pengembangan industri keuangan syariah, pengembangan dana sosial syariah, serta pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah, tentu kehadiran teknologi digital menjadi sarana utama untuk pengembangan ekonomi syariah. Inovasi berbasis teknologi digital dan perluasan pangsa pasar ekonomi syariah yang terdigitalisasi dengan layanan produk-produk ekonomi syariah. Jika hal ini terealisasi maka akan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat terutama kalangan milenial sehingga mempercepat pengembangan ekonomi syariah.

Ekonomi digital adalah terjadinya fenomena perubahan struktur sosial dan budaya sebagai dampak konsekuensi logis terjadinya perubahan sejumlah paradigma terkait dengan kehidupan sehari-hari. Semakin ringkasnya organisasi akan menyebabkan terjadinya pengangguran dimana-mana, mata pencaharian para mediator (brokers) menjadi hilang, para pekerja menjadi workoholic karena persaingan yang sangat ketat, pengaruh budaya barat sulit untuk dicegah karena dapat diakses bebas oleh siapa saja melalui internet, dan lain sebagainya merupakan contoh fenomena yang terjadi di era ekonomi digital. Ketidaksiapan sebuah organisasi dalam menghadapi segala kemungkinan dampak negatif yang timbul akan berakibat buruk (bumerang) bagi kelangsungan hidup perusahaan.

Digitalisasi ekonomi syariah mutlak dan harus untuk mengimbangi seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang makin merambah dalam genggaman tangan (gadget), dan berbagai fitur aplikasi bisnis yang ditawarkan makin banyak dan mudah digunakan oleh user dan dunia usaha seperti industri, perbankan dan

pendidikan, mau tidak mau suka tidak suka ekonomi tumbuh dan berkembang terutama ekonomi syariah yang sedang naik daun pada era sekarang ini. Produk dari pemegang peran ekonomi syariah seperti perbankan syariah dengan aplikasi mobile bankingnya, asuransi syaria'ah dengan produk layanan onlinenya, maka digitalisasi ekonomi syaria'ah terbentuk dengan sendirinya seiring ebutuhan dan teknologi pendukung yang sudah ada dan terus berkembang.

Digitalisasi merupakan istilah saja dalam merangkum database server yang dapat digunakan untuk transaksi online yang saling terhubung satu sama lain sehingga transaksi dapat dilakukan secara sistem otomatis menggunakan mesin, tinggal aplikasi dan alur prosesnya saja yang menggunakan metode islami dalam alur transaksi yang berasaskan pada kaidah ajaran islam dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Al-qur'anul karim. Dengan demikian hanya alur dan prosesnya saja yang berbeda antara ekonomi konvensional dan ekonomi syaria'ah sedangkan peralatan dan mesinnya yang digunakan adalah sama.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan, Generasi muslim millennial yang hidup pada lingkungan yang serba teknologi informasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi setiap aktivitas generasi M ini. Generasi M ini adalah generasi muslim yang bisa mengkolaborasi antara agama dan teknologi sehingga keberadaan masyarakat digital ini mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat secara luas. Generasi M ini melebur dalam kehidupan modern dan mengambil manfaat bagi kebaikan individu dan masyarakat, sekaligus dalam berjalannya waktu mampu meningkatkan keimanan mereka.

Digitalisasi Ekonomi mampu menjadikan informasi produk-produk ekonomi syariah merambah kalangan milenial, dari yang tadinya kurang banyak mengenal menjadi lebih mengenal

bahkan menambah minat dan keinginan kalangan milenial untuk berkiprah di ekonomi syariah sehingga mampu mempercepat pengembangan ekonomi syariah.

Kemudahan akses yang didapatkan dalam digitalisasi ekonomi syariah secara otomatis membuka peluang bisnis yang lebih luas dan memiliki prospek lebih cerah dalam berbagai bidang. Saatnya bagi kalangan milenial untuk lebih berperan dalam pengembangan dan kemajuan ekonomi syariah.

Bisa dikatakan kalangan milenial kunci utama pengembangan ekonomi syariah dan mampu meningkatkan ekonomi Indonesia di tingkat dunia

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- [2] Asawi, Haris Faulidi. (2004). *Transaksi bisnis E-Commerce Perspektif Islam*. Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- [3] Amalia, E. (2008). *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indoensia*. Jakarta: Rajagrafindo.
- [4] Amalia, E. (2010). *Model Peta Potensi SDM Ekonomi Islam pada PTAI dan PTU Analisi Kurikulum: Pembelajaran dan Hubungannya dengan Kebutuhan SDM pada Industri Keuangan Syariah*. Yogyakarta: IPIEF, Fakultas Ekonomi UMY.
- [5] Antara. (2021). *Kelompok Milenial Dinilai Jadi Pasar Masa Depan Ekonomi Syariah*. Retrieved April 7, 2021, from <https://www.antaranews.com/berita/2082694/kelompok-milenial-dinilai-jadi-pasar-masa-depan-ekonomi-syariah>
- [6] Amir Machmud, 2010. *BANK SYARIAH Teori, Kebijakan, dan Study Empiris di Indonesia*. Erlangga
- [7] D. A. R. Indonesia. 1995 *“Al-Quran dan Terjemahan.”* Edisi Revisi, Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- [8] E. Lukman, “5 model bisnis e-commerce di Indonesia,” 2014. [Online]. Available: <http://id.techinasia.com/5-model->
- [9] H. A. Djazuli. *Kaidah-kaidah Fikih*, Cetakan ke-1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006
- [10] Iswanto, A. (2018). Membaca Kecenderungan Pemikiran Islam Generasi Milenial Indonesia. *Jurnal Multikultural & Multireligius*, 17(1), 177-184.
- [11] Laucereno, S. F. (2018). *Generasi Milenial Harapan Baru Ekonomi Syariah RI*. Retrieved Maret 12, 2021, from <https://finance.detik.com/moneter/d-4240142/generasi-milenial-harapan-baru-ekonomi-syariah-ri>
- [12] Kementerian perdagangan republic Indonesia. *Kemendag Perkuat E-Commerce Dan Ekonomi Kreatif Untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa*. 31 oktober. 2016

---

**STRATEGI DINAS KESEHATAN DALAM MENEKAN LAJU PENDERITA *STUNTING*  
DI KABUPATEN BUTON SELATAN****Oleh****Nur Azizah<sup>1)</sup>, Nastia<sup>2)</sup>, Anwar Sadat<sup>3)</sup>****<sup>1,2,3</sup>Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik****Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau Sulawesi Tenggara 93728, Indonesia****Email: <sup>1</sup>[azizahkasimpa@gmail.com](mailto:azizahkasimpa@gmail.com), <sup>2</sup>[nastiatia567@gmail.com](mailto:nastiatia567@gmail.com),****<sup>3</sup>[anwarsadat685@gmail.com](mailto:anwarsadat685@gmail.com)****Abstract**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi Dinas Kesehatan Dalam Menekan Laju Penderita Stunting Di Kabupaten Buton Selatan. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa strategi Dinas Kesehatan dalam menekan laju penderita stunting yang harapan setiap tahunnya akan ada penurunan. Dengan adanya program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Gerakan Masyarakat Peduli Stunting dan Dinas Kesehatan aktifkan sosialisasi dengan melibatkan puskesmas, lembaga kemasyarakatan, lembaga pendidikan, agar ikut aktif dalam menekan penderita stunting ini karena peluang besar dalam menanggulangi stunting ini ada pada masyarakatnya sendiri untuk mencapai masyarakat yang sehat dan mandiri.

**Keywords: Strategi, Dinas Kesehatan, Menekan Laju Penderita Stunting**

**PENDAHULUAN**

Masalah gizi merupakan masalah yang ada di tiap-tiap negara, baik negara miskin, negara berkembang, maupun negara maju (Yandri Setia Bakti, 2018). Peranan strategis gizi terhadap tumbuh kembang akan berujung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia karena individu dapat mencapai potensinya secara maksimal dengan gizi yang cukup (Probohastuti et al., 2019). Status gizi merupakan salah satu faktor penentu kualitas sumber daya manusia (Saputri, 2019).

Salah satu indikator keberhasilan pencapaian kesehatan dalam SDGs (*Sustainable Development Goals*) adalah status gizi anak balita. Masa anak balita merupakan kelompok yang rentan mengalami kurang gizi, salah satunya adalah *stunting*. *Stunting* merupakan masalah Gizi utama yang akan berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. *stunting* juga dapat terjadi sejak janin dalam kandungan akibat masalah kurang asupan protein pada saat ibu sedang hamil juga dapat berpengaruh dari kondisi lingkungan. Masalah kurang energi protein

(KEP) yaitu salah satu masalah utama gizi yang dapat berpengaruh terhadap proses tumbuh kembang anak. Kekurangan energi dan protein dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan balita (Tampongangoy, 2019).

Masalahan Gizi ialah permasalahan dalam siklus kehidupan yang sangat kompleks dan penting untuk segera ditangani hal ini dapat terjadi mulai dari bayi masih dalam kandungan, balita, remaja, bahkan sampai dengan lanjut usia (Normasia et al., 2020).

Penanganan gizi buruk sangat terkait dengan strategi sebuah bangsa dalam menciptakan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif. Upaya peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dimulai dengan cara penanganan pertumbuhan anak melalui asupan gizi dan perawatan yang baik, dimulai dari lingkungan keluarga. Dengan lingkungan keluarga sehat, maka hadirnya infeksi menular ataupun penyakit masyarakat lainnya dapat dihindari. Ditingkat masyarakat, faktor-faktor seperti lingkungan yang higienis, ketahanan pangan keluarga, pola asuh terhadap

anak, dan pelayanan kesehatan primer sangat menentukan dalam membentuk anak yang tahan gizi buruk. Secara makro, dibutuhkan ketegasan kebijakan, strategi, regulasi, dan koordinasi lintas sektor dari pemerintah dan semua *stakeholders* untuk menjamin terlaksananya poin-poin penting, seperti pemberdayaan masyarakat, pemberantasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pendidikan yang secara tidak langsung akan mengubah budaya buruk dan paradigma di tataran bawah dalam hal perawatan gizi terhadap keluarga termasuk anak.

Stunting atau penyakit kerdil merupakan salah satu masalah gizi yang dialami oleh balita, dimana balita mengalami kondisi gagal tumbuh akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga balita tersebut terlalu pendek untuk ukuran seusianya (Rahmadhita, 2020). Secara garis besar stunting disebabkan karena kurangnya asupan gizi dalam waktu lama serta terjadinya infeksi berulang, dan kedua faktor penyebab ini dipengaruhi oleh pola asuh yang tidak memadai sejak dalam kandungan hingga 1.000 hari pertama kelahiran (Probohastuti et al., 2019).

*Stunting* merupakan sebuah kondisi dimana balita mengalami pertumbuhan yang tidak signifikan (pendek) yang biasa disebut dengan istilah kerdil yang dipicu ketiadaan gizi kronis karena rendahnya kuantitas dan kualitas gizi yang didapatkan dalam *interval* waktu yang lumayan lama (Fauziah, 2021). *Stunting* yang dialami oleh anak merupakan gambaran keadaan tidak suksesnya pertumbuhan pada anak dengan umur dibawah 5 tahun yang dipicu ketiadaan gizi akut, yang mengakibatkan seorang anak dengan kondisi terlalu pendek untuk umurnya pada saat itu. Kondisi ini terjadi dimulai bayi berada di dalam kandungan seorang ibu sampai dengan umur 2 tahun (Saputri, 2019).

Permasalahan *stunting* tidak hanya berdampak pada kesehatan seorang anak tetapi berdampak pada perkembangan trend *produktivitas* sumber daya manusia (SDM) pada sebuah daerah (Nirmalasari, 2020).

Seorang anak yang sehat, cerdas dan produktif merupakan aset penting karena merupakan generasi penerus dalam mendukung keberhasilan pembangunan di Kota. Namun apabila anak-anak lahir dan berkembang dalam kondisi kekurangan gizi akut, maka akan menyebabkan generasi penerus tersebut akan menjadi *stunting* (Indah Budiastutik & Muhammad Zen Rahfiludin, 2019).

Permasalahan Gizi ialah permasalahan dalam siklus kehidupan yang sangat kompleks dan penting untuk segera ditangani hal ini dapat terjadi mulai dari bayi masih dalam kandungan, balita, remaja, bahkan sampai dengan lanjut usia (Yunita, 2017). Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti Kabupaten Buton Selatan, seperti daerah lainnya di Indonesia juga dihadapkan pada permasalahan kekurangan gizi, salah satunya yaitu gizi buruk (*Stunting*). Data terakhir yang didapat dari Dinas Kesehatan terkait perkembangan jumlah penderita stunting di Kabupaten Buton Selatan adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Kasus *Stunting* di Kabupaten Buton Selatan**

Tahun	Jumlah Kasus (orang)
2019	606
2020	1203

Dinas kesehatan Kabupaten Buton Selatan merupakan salah satu institusi pelayanan kesehatan yang memiliki fungsi salah satunya adalah membuat kebijakan teknis dibidang kesehatan sehingga Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan bertanggungjawab dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan memberikan program-program dalam mengatasi permasalahan dibidang kesehatan dalam mengupayakan strategi hal yang yang mendukung penurunan stunting diantaranya adalah strategi organisasi, program yang akan dilaksanakan, serta sumber daya yang digunakan.

## LANDASAN TEORI

### Strategi

Yunus (2012:36) menyatakan strategi merupakan keseluruhan dari lingkup gagasan yang digunakan untuk dimanfaatkan dengan baik dalam mewujudkan tujuan organisasi. Bagi organisasi strategi merupakan instrumen penting di dalam mengelola organisasi untuk mewujudkan tujuannya. Karena itu, strategi selalu bersentuhan dengan kebijakan, target sasaran dan program yang dimiliki organisasi dalam mewujudkan tujuannya.

Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu (Hunger, 2006:15).

Memahami konsep strategi pemerintah seringkali terasa tidak mudah. Strategi digunakan pemerintah sesuai defenisi peruntukannya. Menurut Barry (2009:17) strategi pemerintah adalah kerangka atau rancangan yang mengintegrasikan kebijakan, target sasaran dan program dalam organisasi. Strategi merupakan aktualisasi rancangan tentang apa yang ingin dicapai atau hendak dicapai tentang apa, bagaimana, siapa, kenapa, berapa lama dan manfaat apa yang ingin dicapai dalam suatu arah masa depan bagaimana mewujudkan keadaan yang diinginkan sebagai sebuah rute yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengeluarkan strategi kebijakan, strategi target sasaran dan strategi program.

Strategi merupakan rencana para pemimpin organisasi untuk mencapai hasil yang konsisten dengan tujuan organisasi. Strategi dapat dipandang dari tiga aspek: pemusatan strategi, pelaksanaan yang bertujuan merealisasikan strategi menjadi tindakan, dan pengendalian strategi yang dilakukan untuk merubah strategi agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Strategi merupakan gambaran besar mengenai cara sebuah lembaga atau

perorangan dapat mencapai tujuan. Strategi merupakan kombinasi antara pengambilan keputusan secara alamiah dan proses pemikiran rasional (Eddy Yunus, 2016:19).

David (2005:19) mengemukakan bahwa dalam perencanaan strategi terdapat tiga tahap penting yang harus ada dilakukan di dalam suatu organisasi. Hal tersebut juga dapat ditetapkan di organisasi pemerintah daerah dengan menyesuaikan konteks organisasi, yaitu (1) perumusan strategi (2) Implementasi strategi (3) evaluasi strategi: Tahap Perumusan strategi antara lain yaitu menetapkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi organisasi dari sudut pandang external, menetapkan kelemahan dan keunggulan yang dimiliki organisasi dari sudut pandang internal, menyusun rencana jangka panjang, membuat strategi-strategi alternatif dan memilih strategi tertentu yang akan dicapai.

### Stunting

*Stunting* merupakan masalah Gizi utama yang akan berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. *stunting* juga dapat terjadi sejak janin dalam kandungan akibat masalah kurang asupan protein pada saat ibu sedang Hamil juga dapat berpengaruh dari kondisi lingkungan (Normasia et al., 2020).

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan Gizi Kronis yang di sebabkan oleh multi- faktorial dan bersifat antar generasi, infeksi berulang, dan situmulasi psikososial yang tidak memadai terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) yaitu sejak janin hingga anak berusia 2 tahun (Yandri Setia Bakti, 2018).

Permasalahan Gizi ialah permasalahan dalam siklus kehidupan yang sangat kompleks dan penting untuk segera ditangani hal ini dapat terjadi mulai dari bayi masih dalam kandungan, balita, remaja, bahkan sampai dengan lanjut usia (Normasia et al., 2020).

*Stunting* merupakan masalah yang kerap kali diabaikan karena dianggap tidak akan mempengaruhi masa depan anak. Sebagian

besar masyarakat tidak memperlakukan lambatnya pertumbuhan tinggi badan anaknya saat balita. Sebagian besar beranggapan, selagi anak masih sehat dan lincah, stunting bukanlah masalah yang perlu diatasi.<sup>54</sup> Padahal, hampir 70% pembentukan sel otak anak terjadi sejak janin masih dalam kandungan sampai anak berusia 2 tahun. Jika otak mengalami hambatan pertumbuhan, jumlah sel otak, serabut otak, dan penghubungan sel otak berkurang. Hal ini mengakibatkan penurunan intelegensi (IQ), sehingga prestasi belajar anak rendah dan tidak dapat melanjutkan sekolah. Karena itu menurut Soedjatmiko, anak yang menderita stunting berdampak tidak hanya pada fisik yang lebih pendek saja, tetapi juga pada kecerdasan, produktivitas, dan prestasinya kelak ketika dewasa. Menurut Trihono Stunting merupakan indikator keberhasilan kesejahteraan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat. Dampaknya sangat luas, mulai dari dimensi ekonomi, kecerdasan seseorang, kualitas, dan dimensi bangsa yang berefek pada masa depan anak (Agus Byna. 2020:10).

Dampak jangka panjang antara lain antara lain terganggunya tumbuh kembang anak secara fisik, mental, dan intelektual yang sifatnya permanen, rendahnya imunitas dan produktivitas kerja, beresiko menderita penyakit kronis diabetes mellitus, jantung kronis, hipertensi, kanker, dan stroke (Demasa Simbolon, 2019:260).

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode deskriptif kualitatif. Menurut Maleong (2012:6) penelitian deskriptif kualitatif yakni sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam pendekatan kualitatif, peneliti berusaha mengamati dan mengungkap realitas yang terjadi di lapangan kaitan dengan Strategi Dinas Kesehatan Dalam Menekan Laju Penderita *Stunting* di Kabupaten Buton Selatan. Sampel dalam penelitian ini

menggunakan teknik *purposive sampling* Menurut Sugiyono (2010:85), *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. merupakan pemilihan siapa subjek yang ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Karena itu, menentukan subjek atau orang-orang terpilih harus sesuai dengan ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh sampel itu (Silalahi, 2010:272). Untuk menganalisis Strategi Dinas Kesehatan Dalam Menekan Laju Penderita *Stunting* di Kabupaten Buton Selatan, penulis menggunakan teori yang dikemukakan Kooten Dalam Salusu (2006:104-105) Tipe-tipe strategi meliputi: 1) *Corporate Strategi* (Strategi Organisasi), 2) *Program Strategy* (Strategi Program), 3) *Resouce Support Strategy* (Strategi Pendukung Sumber Daya).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana strategi dinas kesehatan dalam menekan laju penderita stunting di Kabupaten Buton Selatan. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan, maka peneliti mengacu pada 3 aspek yaitu:

### 1. Strategi Organisasi (*Corporate Strategi*)

Robbins (Kusdi, 2009:87) Strategi dalam konteks organisasi yaitu penetapan berbagai tujuan dan sasaran jangka panjang yang bersifat mendasar terhadap suatu organisasi, yang dilanjutkan dengan penetapan rencana aktivitas dan pengalokasian sumber daya yang diperlukan guna mencapai berbagai sasaran tersebut. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan yaitu diketahui bahwa stunting disebabkan oleh dua faktor yaitu Gizi sensitif dan Gizi spesifik dimana diketahui gizi sensitif berupa dipengaruhi oleh faktor kemiskinan sedangkan gizi spesifik yaitu kebutuhan yang berupa tidak tercukupinya imunisasi, pemberian vitamin dan kebersihan lingkungan terutama pada waktu 1000 hari pertama kehidupan pada balita. Kemudian strategi Dinas Kesehatan dalam



menekan stunting ini mengacu pada program yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan yaitu dengan melakukan pendekatan di Lintas sektor dengan melibatkan Seluruh Puskesmas di Kabupaten Buton Selatan, melibatkan lembaga kemasyarakatan, lembaga pendidikan, agar ikut aktif dalam menekan penderita stunting ini karena peluang besar dalam menanggulangi stunting ini ada pada masyarakatnya sendiri untuk mencapai masyarakat yang sehat dan mandiri.

Ditentukan sasaran lokasi yang menjadi lokus penanggulangan stunting di Kabupaten Buton Selatan untuk setiap desanya. Maka Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan mengadakan rapat dengan seluruh Kepala Puskesmas se Kabupaten Buton Selatan terkait dalam penentuan lokasi fokus stunting di Kabupaten Buton Selatan. Penetapan desa lokasi fokus intervensi pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi di Kabupaten Selatan, Sehingga penetapan lokasi kegiatan penanggulangan stunting yang lebih berfokus pada setiap desa di Kabupaten Buton Selatan.

Pengambilan data stunting pada anak balita di Kabupaten Buton Selatan dilakukan sebulan sekali oleh tenaga gizi puskesmas saat dilakukannya kegiatan posyandu. Anak balita yang divonis atau diprediksikan mengalami stunting dilihat dari kesehatan fisiknya. Strategi pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Buton Selatan dilakukan dengan menelusuri terlebih dahulu penyebab terjadinya stunting pada anak balita. Setelah ditelusuri, akan dicarikan pemecahan masalahnya dengan tujuan menurunkan angka stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan.

## 2. Strategi Program (*Program Strategy*)

Strategi tersebut memberi perhatian pada keterlibatan strategi dari program tertentu. Lalu apa dampaknya apabila suatu program tertentu dijalankan atau diperkenalkan (apa dampaknya bagi sasaran organisasi). Dinas kesehatan Kabupaten Buton Selatan terus berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,

berikut adalah program kegiatan yang telah dirumuskan dan kemudian akan di laksanakan:

### a) Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Acara yang diawali dengan senam bersama ini berlangsung setiap hari minggu di lingkungan puskesmas se kabupaten Buton Selatan yang dilakukan oleh pegawai puskesmas dan masyarakat sekitar. Sebenarnya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ini sudah lama ada, namun dibutuhkan power untuk lebih memperkuat gerakan tersebut dengan adanya kegiatan ini setidaknya masyarakat sadar betapa pentingnya menjaga pola hidup sehat agar terhindar dari berbagai macam penyakit, kegiatan ini akan mendorong semua komponen masyarakat dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup, dengan adanya kegiatan-kegiatan dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat melalui puskesmas-puskesmas ini dapat mendorong masyarakat khususnya Kabupaten Buton Selatan betapa pentingnya menjaga pola hidup sehat.

### b) Gerakan Masyarakat Peduli Stunting

Penanggulangan Stunting menjadi tanggung jawab kita Bersama, tidak hanya Pemerintah tetapi juga setiap keluarga di Kabupaten Buton Selatan. Karena stunting dalam jangka panjang berdampak buruk tidak hanya terhadap tumbuh kembang anak tetapi juga terhadap perkembangan emosi yang berakibat pada kerugian ekonomi. Mulai dari pemenuhan gizi yang baik selama 1000 hari pertama kehidupan anak hingga menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat.

Untuk menekan angka stunting Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan akan melakukan berbagai program yang menasar pada ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan serta program intervensi yang mengarah pada ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan. Diharapkan Implementasi kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Gerakan Masyarakat Peduli Stunting yang melibatkan lintas sektor terkait yakni Puskesmas dan organisasi kemasyarakatan, sekolah dan

lembaga pendidikan untuk mendukung dan mendorong agar tercapai masyarakat sehat mandiri.

Percepatan Perbaikan Gizi yang merupakan upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi untuk percepatan perbaikan gizi masyarakat dengan prioritas pada Seribu Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK). Melalui penetapan strategi utama Gerakan Masyarakat Peduli Stunting yaitu: a. Menjadikan perbaikan gizi sebagai arus utama pembangunan sumber daya manusia, sosial budaya, dan perekonomian. b. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di semua sektor baik, pemerintah maupun swasta. c. Peningkatan intervensi berbasis bukti yang efektif pada berbagai tatanan yang ada di masyarakat. d. Peningkatan partisipasi masyarakat untuk penerapan norma-norma sosial yang mendukung perilaku sadar gizi.

Dalam mengatasi permasalahan gizi terdapat dua solusi yang dapat dilakukan, yaitu dengan intervensi spesifik dan sensitif. Intervensi spesifik diarahkan untuk mengatasi penyebab langsung dan tidak langsung masalah gizi, sedangkan intervensi sensitif diarahkan untuk mengatasi akar masalahnya dan sifatnya jangka Panjang.

### 3. Strategi Pendukung Sumber Daya (Resource Support Strategy)

Fokus perhatian strategi sumber daya ini yaitu memaksimalkan sumber daya esensial yang tersedia untuk meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya ini dapat berupa keuangan, tenaga, teknologi dan sebagainya. Khususnya dalam penekanan stunting tersebut, dengan mengacu pada strategi Program yang telah dibuat Dinas Kesehatan sebelumnya.

Faktor yang paling mendukung adalah faktor sumber daya baik itu sumber daya berupa tenaga, materi, dan lain sebagainya. Contohnya disini Dinas Kesehatan Kabupaten Buton

Selatan aktifkan yang namanya sosialisasi kita dibantu kader-kader posyandu untuk mengajak masyarakat bersama-sama mencegah dan mengambil tindakan serius pada penyakit stunting, dengan memulai pola hidup sehat.

Diketahui bahwa dalam menjalankan strategi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan pendukung sumber daya ini adalah hal yang utama penunjang pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan baik itu berupa sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya.

Faktor sumber daya manusia ini dengan melibatkan tokoh masyarakat sangat penting dalam menekan stunting ini berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa dalam rangka pengajian bahkan stunting masih sempat untuk menjadi awal topik pembahasan.

Adapun strategi Dinas Kesehatan dalam mengusahakan penekanan stunting ini Dinas Kesehatan membuat berbagai program yakni Gerakan Masyarakat Sehat dan Gerakan Masyarakat Peduli Stunting yang melibatkan semua stakeholder baik itu lembaga Pemerintahan, Pendidikan, dan Kemasyarakatan. Disamping itu salah yang dilakukan Dinas Kesehatan adalah mereka mengaktifkan sosialisasi dengan dibantu oleh lembaga kemasyarakatan yaitu kader-kader posyandu.

Adapun faktor yang mendukung dari bagaimana strategi Dinas kesehatan dalam menekan laju penderita stunting di Kabupaten Buton Selatan. Faktor pendukung Sumber daya manusia (SDM) juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan suatu pekerjaan dan didalam kasus seperti Penekanan stunting memerlukan banyak peran.

Semua stakeholder yang ada semua organisasi perangkat daerah termasuk masyarakat terlibat semuanya itu semua bertujuan untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Buton Selatan.

Sarana kesehatan, penyediaan sarana merupakan kebutuhan pokok dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan

menjadi salah satu perhatian utama pembangunan dibidang kesehatan yang bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat menikmati pelayanan kesehatan. Untuk sarana kesehatan itu sendiri Kabupaten Buton Selatan terdapat puskesmas yang tersebar di setiap kecamatan dan juga Rumah Sakit terdapat ibu kota kabupaten. Serta ada pula faktor yang menjadi penghambat strategi dinas kesehatan menekan laju penderita stunting di Kabupaten Kabupaten Buton Selatan. Faktor penghambat kadang masih ada masyarakat belum tahu, tidak terlalu mementingkan stunting ini.

Adapun yang telah dilakukan di dinas kesehatan ini dalam pencegahan stunting dari berbagai program yang tersusun salah satunya kita melakukan sosialisai dan seminar untuk mengajak kaum ibu memperhatikan pola hidup sehat. Terutama pada saat hamil. Diketahui bahwa sosialisai yang dilakukan sudah ada dampak positif karna masyarakat yang awalnya tidak tahu apa yang dimaksud dengan stunting kini sudah memiliki kesadaran betapa pentingnnya menjaga kesehatan.

## PENUTUP

### Kesimpulan

- 1) Strategi yang dilakukan Dinas kesehatan Kabupaten Buton Selatan dalam menekan penderita Stunting yaitu mengadakan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Gerakan Masyarakat Peduli Stunting.
- 2) Dinas kesehatan Kabupaten Buton Selatan juga aktifkan sosialisai pada pertemuan-petemuan seperti pada saat kegiatan posyandu dengan dibantu oleh para kader-kader posyandu, dan pada saat kesempatan yang memungkinkan seperti pada saat pengajian. Hal itu dilakukan dengan harapan masyarakat sadar akan pentingnya kesehatan dengan terbebas dari stunting (gagal tumbuh).
- 3) Strategi Program tersebut memberi perhatian pada keterlibatan strategi dari program tertentu. Apa dampaknya apabila suatu program tertentu dijalankan atau

diperkenalkan. Dari beberapa program yang dilakukan Dinas Kesehatan yaitu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Gerakan Masyarakat Peduli Stunting dilakukan juga dengan cara aktifkan sosialisasi dan melibatkan semua stecholder lembaga pemerintahan, lembaga masyarakat, pendidikan dengan harapan agar stunting ini dapat berkurang.

- 4) Strategi sumber daya, yaitu memaksimalkan sumber daya esensial yang tersedia untuk meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya ini dapat berupa keuangan, tenaga, teknologi dan sebagainya. Sumber daya merupakan hal yang mendasar dalam mencapai suatu tujuan baik itu sumber daya manusianya ataupun sumber daya lainnya berupa materi, tenaga dan lain sebagainya. Olehnya itu Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan melibatkan semua *stecholder* untuk membantu mengurangi angka stunting di Kabupaten Buton Selatan.

### Saran

- 1) Bagi Dinas Kesehatan dan organisasi pemerintahan yang dilibatkan dalam penanganan stunting Kabupaten Buton Selatan kiranya agar tetap konsisten dalam melaksanakan Strategi dalam menekan laju penderita stunting. Dan semakin gigi dalam melakukan pekerjaan agar semua tujuan yang ingin dicapai berjalan sesuai dengan yang diinginkan.
- 2) Bagi masyarakat agar kiranya aktif dan berpartisipasi mengenai penekanan stunting ini dengan cara menjaga kebersihan lingkungan untuk terhindar dari berbagai penyakit agar terwujudnya masyarakat yang sehat dan mandiri di Kabupaten Buton Selatan.
- 3) Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi di Desa. Kemudian ditetapkannya Kabupaten Buton Selatan sebagai lokus stunting, maka diperlukan sasaran lokasi yang menjadi lokus

penanggulangan stunting di Kabupaten Buton Selatan untuk setiap desanya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agus Byna. 2020. Analisis Komparatif Machine Learning Untuk Klasifikasi Kejadian Stunting. Jawa Tengah: CV. Pena Persada.
- [2] Barry, Bryan. 2009. Strategic Planning Workbook For Non Profit Organizations. Minneapolis: Amhers H. Wilder Foundation.
- [3] Eddy Yunus. 2016. Manajemen Strategis. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- [4] David, Freed R. 2005. Manajemen Strategis: Konsep. Jakarta: Salemba Empat.
- [5] Demsa Simbolon. 2019. Pencegahan Stunting Melalui Intervensi Gizi Spesifik. Pada Ibu Menyusui Anak Usia 0-24 Bulan. Media Sahabat Cendikia.
- [6] Fauziah, D. N. (2021). *AKSI PENCEGAHAN KASUS STUNTING DI KOTA SAMARINDA MELALUI PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PRO-BEBAYA)*. 3(2), 76–86.
- [7] Hunger, David, 2006. Manajemen strategik. Yogyakarta: Andi.
- [8] Indah Budiastutik, & Muhammad Zen Rahfiludin. (2019). Faktor Risiko Stunting pada anak di Negara Berkembang . *Amerta Nutrition*, 3(3), 122–129.  
<https://doi.org/10.2473/amnt.v3i3.2019.122-129>
- [9] Kusdi. 2009. Teori Organisasi dan Administrasi. Jakarta : Salemba Humanika
- [10] Maleong J. Lexy. 2012. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- [11] Nirmalasari, N. O. (2020). Stunting Pada Anak: Penyebab dan Faktor Risiko Stunting di Indonesia. *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming*, 14(1), 19–28.  
<https://doi.org/10.20414/Qawwam.v14i1.2372>
- [12] Normasia, Mahsyar, & Sudarmi. (2020). Strategi Dinas Kesehatan Dalam Menekan Laju Penderita Stunting Di Kabupaten Enrekan. *Strategi Dinas Kesehatan Dalam Menekan Laju Penderita Stunting Di Kabupaten Enrekan*, 1(3), 12–26.
- [13] Probahastuti, N. F., Rengga, D. A., & Si, M. (2019). Implementasi kebijakan intervensi gizi sensitif penurunan stunting di Kabupaten Blora. *Jurnal Administrasi Publik FISIP UNDIP*, 1–16.
- [14] Rahmadhita, K. (2020). Permasalahan Stunting dan Pencegahannya. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 11(1), 225–229.  
<https://doi.org/10.35816/jiskh.v11i1.253>
- [15] Salusu. 2006. Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Non Profit. Jakarta: Grasindo.
- [16] Saputri, R. A. (2019). Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Stunting Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Jdp (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 2(2), 152–168.  
<https://doi.org/10.36341/jdp.v2i2.947>
- [17] Silalahi, Ulber. 2010. Metode Penelitian Sosial. Bandung : PT. Refika Aditama.
- [18] Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kualitatif R & D, Bandung: Alfabeta.
- [19] Tampongangoy, D. (2019). Pengaruh Kinerja Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Di Puskesmas Kecamatan Lembeh Utara Kota Bitung. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(78).
- [20] Yandri Setia Bakti. (2018). JOM FISIP Vol. 5: Edisi II Juli – Desember 2018 Page 1. *Jom Fisip*, 5(2), 1–15.
- [21] Yunita, J. (2017). *MASALAH KESEHATAN DALAM SIKLUS KEHIDUPAN*. 127–128.
- [22] Yunus, Daman, 2012. Prinsip Perumusan Strategi Dalam Kebijakan Publik. Jakarta: Sinar Grafika.

BERPENGARUHKAN DESENTRALISASI FISKAL DAN KINERJA  
PEMERINTAH DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS PELAPORAN  
KEUANGAN?

Oleh

Elva Dona<sup>1)</sup>, Genta Gautama<sup>2)</sup>, Irwan Muslim<sup>3)</sup>

<sup>1</sup>Akademi Keuangan Dan Perbankan

<sup>2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KBP

<sup>3</sup>Universitas Bung Hatta

E-mail: [1elvadona79@gmail.com](mailto:1elvadona79@gmail.com), [2genthagautama16@gmail.com](mailto:2genthagautama16@gmail.com),  
[3irwanmuslim@gmail.com](mailto:3irwanmuslim@gmail.com)

**Abstract**

Financial reporting accountability is an obligation of the government to provide accountability for regional financial reports. The purpose of this study is to determine the effect of fiscal decentralization and local government performance on financial reporting accountability in 19 districts and cities of West Sumatra Province. The sample in this study were 19 regencies and cities of West Sumatra Province with the sampling technique of total sampling. The analytical method used is binary logistic regression method. Based on the hypothesis, the research results simultaneously show that fiscal decentralization and local government performance have a positive effect on financial reporting accountability. Partially that fiscal decentralization has a positive effect on financial reporting accountability, local government performance has no effect on financial reporting accountability.

**Keywords:** Fiscal Decentralization, Local Government Performance, Financial Reporting Accountability

**PENDAHULUAN**

Upaya pemerintah buat melaksanakan pemerataan dan berbagai pencapaian suatu tujuan pengelolaan keuangan ialah diberikan kebijakan kepada pemerintah daerah buat melaksanakan urusan pemerintah secara efektif agar tercapainya pemerataan di berbagai daerah, sehingga seluruh pelaksanaan pemerintah bisa dipertanggungjawabkan sebagai bentuk menjalankan otonomi daerah dengan landasan prinsip akuntabilitas, Wicaksono, (2015). Revitalisasi yang tengah dicoba oleh pemerintah diharapkan nantinya bisa mengejar ketertinggalan teknologi yang terdapat disaat ini, Muhammad Rivandi, (2022). Akuntabilitas yaitu pertanggung jawaban jika organisasi atau pemerintah daerah bisa memberi penjelasan kepada penduduk tentang kewajiban pemakaian dana. (Oktaviani et al., 2020). Pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dan

pelaporan keuangan pemerintahnya. Idealnya desentralisasi fiskal dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah (Moisiu, 2013). Hasil dikeluarkan audit BPK terhadap berbagai pendapat dari pernyataan para profesional pemeriksa serta pemeriksa laporan keuangan, Afriyanti, (2015). Adanya pendapat yang menyampaikan jika laporan keuangan pemerintah yakni WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Semakin bagus pendapat audit semakin bagus tingkat akuntabilitas pelaporan keuangan, Suryanto, (2017). Namun, jika pendapat audit ini berupa WDP (Wajar Tanpa Pengecualian) berkategori tidak baik, kepercayaan penduduk pada pemerintah sebagai entitas pengelola kekayaan daerah belum 100% yakin dengan kinerjanya selama tahun anggaran berjalan (Muraiya & Nadirsyah, 2018).

Desentralisasi fiskal menambah pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan ini dipengaruhi desentralisasi fiskal perihal memberi kesempatan ke daerah buat membangun kemandirian agar bisa mendapatkan pendapatan. Akuntabilitas pelaporan keuangan daerah, mewujudkan kemandiriannya atas keuangan (fiskal) daerah telah terdesentralisasi, perihal Pemda menggunakan kekuasaan sebagai mengelola keuangan sebagai kepentingan masyarakat daerah (Muraiya & Nadirsyah, 2018). Semakin tinggi tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, maka makin kecil kemungkinan Daerah tersebut memiliki akuntabilitas pelaporan keuangan yang tinggi dalam bentuk opini audit yang baik (Fontanella et al., 2014).

Pencapaian keberhasilan dalam penerapan otonomi daerah didukung oleh kinerja pemerintah yang dijalankan secara tertib dan bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan, Saragih & Siregar, (2020). Kinerja pemerintah daerah mengalami peningkatan atau penurunan surplus/defisit maupun aktiva dalam laporan realisasi anggaran dan neraca. Kinerja pemerintah daerah melakukan berbagai perbaikan pembangunan ataupun kebutuhan lainnya, juga peningkatan atau penurunan pendapatan dari berbagai daerah. Pencapaian keberhasilan dalam penerapan otonomi daerah di dukung oleh kinerja pemerintah dijalankan secara tertib serta bertanggung jawab pada pengelolaan keuangan. Hal ini pada laporan keuangan pemerintah mempunyai akuntabilitas sangat baik (Oktaviani et al., 2020).

## LANDASAN TEORI

### Desentralisasi Fiskal

Menurut Sukirno, (2003) kebijakan fiskal adalah suatu prosedur pemerintah melakukan perubahan sistem pajak ataupun pembelanjaan sebagaimana mengatasi urusan-urusan ekonomi dihadapi. Desentralisasi fiskal merupakan suatu pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah daerah akan fungsi-fungsi publik atau bertujuan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Konsep desentralisasi fiskal dikenal dengan *money follow function* yang berarti bahwa pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah akan diikuti oleh pembagian wewenang dalam aspek penerimaan pendanaan (Zulyanto, 2012).

Menurut Syahrudin, (2006) Desentralisasi fiskal mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Desentralisasi fiskal dapat didefinisikan dalam 3 cara yaitu : (i) Pelepasan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (dekonsentra); (ii) Pendelegasian wewenang; dan (iii) Pelimpahan wewenang (devolusi). Oleh karena itu, desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan wewenang di bidang penerimaan anggaran atau keuangan yang sebelumnya tersentralisasi, baik secara administrasi maupun pemanfaatannya diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat dalam rangka memenuhi asas desentralisasi, pemberian dana yang dilakukan oleh kementerian/lembaga melalui mekanisme dekonsentrasi oleh pembantu, serta memberikan diskresi kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi sesuai dengan kewenangannya. Dalam berbagai konsep tersebut perlu ditekankan satu poin bahwa varian definisi yang tercakup dalam tipe-tipe desentralisasi tersebut tidak semata menyoal pergeseran dan pengalihan kekuasaan atas urusan antar level pemerintah namun juga mencakup otoritas non-negara baik berupa partisipasi warga (desentralisasi demokratik/politik) maupun keterlibatan dan kemitraan dengan swasta (desentralisasi pasar/ekonomi). Tujuan sistem desentralisasi antara lain: 1) Mencegah pemusatan keuangan. 2) Usaha pendemokrasian pemerintah daerah, mengikutsertakan masyarakat buat kewajiban penyelenggaraan pemerintah. 3) Menyusun program sebagai perbaikannya sosial ekonomi buat tingkat lokal. Adapun rumus untuk menghitung desentralisasi fiskal ialah :

$$\text{Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Total Pendapatan	Rata-Rata Total Aset
<b>Kinerja Pemerintah Daerah</b>	<b>Akuntabilitas Pelaporan Keuangan</b>
<p>Menurut Bastian, (2006) kinerja yaitu gambaran pada tingkat tercapainya melaksanakan program buat mewujudkan tujuan, visi serta misi organisasi, terutama buat perumusan gambaran strategis pada organisasi. Kinerja pemerintah daerah memiliki arti penting, tidak sebagai dari masyarakat, selaku pemilik kedaulatan serta memberikan selaku menyumbangkan dana, tapi harus dari pemerintah daerah selaku eksekutif, apalagi bagi DPRD yang fungsional memiliki kewajiban atas melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran serta fungsi pengawasan.</p>	<p>Akuntabilitas yaitu kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak/berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas keuangan yaitu pertanggungjawaban perihal integritas keuangan, pengungkapan serta kepatuhan pada peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban tersebut yakni laporan keuangan serta peraturan perundang-undangan sebagaimana mencakup penerimaan, penyimpanan serta pengeluaran kas dari instansi pemerintah, LAN, (2003). Transparansi dibangun berdasarkan kebebasan diperoleh atas sumber-sumber dibutuhkan pada masyarakat. Artinya informasi terkait dalam keperluan publik secara langsung, diperoleh seorang diperlukan (Mardiasmo, 2002).</p>
<p>Menurut Suropto, (2011) makna kinerja pemerintahan daerah dibagi menjadi enam bagian, yakni: 1) menjadi umpan balik buat Kepala Daerah buat perbaikannya kinerja pemerintah daerah ke masa akan datang. 2) Menemu kembali SKPD untuk diberikan kontribusi besar dan kuranya SKPD untuk diberikan kontribusi sebagai proses tercapainya visi Kepala Daerah serta mengidentifikasi berbagai faktor penyebab keberhasilan dan kurang berhasilnya setiap SKPD. 3) Bangkitnya motivasi kerja serta jajaran agar bekerja lebih produktif. 4) Merumuskan kembali kebijakkan, program atau kegiatan sebagaimana dinilai lebih efektif berikut penganggarannya serta metode/teknik pelaksanaan lebih efisien buat proses pencapaian visi. 5) Melalui laporan kinerja, pemerintah daerah menginformasikan keberhasilan / kegagalan secara jujur serta menjelaskan berbagai faktor kegagalan, baik itu masyarakat, para pemberi penyumbang, DPRD dan pemerintah tingkat di atasnya. 6) Meningkatkan tingkat kepercayaan buat penduduk, jika dana publik diyakinkan kepadanya, telah dipakai dengan baik sebagaimana amanat diberikan. Adapun rumus untuk menghitung kinerja pemerintah daerah ialah :</p>	<p>Akuntabilitas efektif bergantung dalam akses publik pada laporan pertanggungjawaban ataupun laporan temuan bisa dibaca serta dipahami. Pada demokrasi terbuka, akses tersebut diberikan pada media, misalnya surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi serta <i>website</i> (internet) serta forum dalam memberi perhatian langsung atau peranan sebagai pendorong akuntabilitas pemerintah ke penduduk (Shende, Suresh dan Tony, 2004).</p>
<p>Kinerja Pemerintah Daerah = <math>\frac{\text{Surplus (Pendapatan - Belanja)}}{\text{Total Aset}} \times 100\%</math></p>	<p>Adapun rumus untuk menghitung akuntabilitas pelaporan keuangan ialah dengan opini audit yang diberikan oleh BPK memakai kategorik yaitu diberi nilai 1 untuk pemerintah daerah yang mendapat opini WTP (baik) dan diberi nilai 0 untuk pemerintah daerah yang mendapatkan opini WDP (buruk).</p> <p><b>Pengembangan Hipotesis</b></p> <p>Penelitian dari Fontanella et al., (2014) menyampaikan kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap kemungkinan daerah, mempunyai akuntabilitas pelaporan</p>

keuangan tertinggi ke opini audit sebagaimana baik. Sehingga desentralisasi fiskal umumnya mempengaruhi kemungkinan daerah mempunyai pelaporan keuangan tertinggi, khususnya dilihat pada aspek kemandirian daerah. Mudhofar & Tahar, (2016) mengatakan kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap laporan keuangan, hal tersebut kemandirian daerah yang tinggi, sehingga bisa membiayai belanja daerah dengan mandiri, maka daerah bisa memberikan pertanggungjawaban, melaporkan serta mengungkapkan semua aktivitasnya. Penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Purbasari & Bawono, (2017) yang mengatakan desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Pemerintah daerah sebagian besar belum bisa mengembangkan PAD, sehingga masih memiliki ketergantungan dengan pemerintah pusat. Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis ke-1 yakni :

$H_1$  : Desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan

Penelitian dimukakahkan oleh Fontanella et al., (2014) mengatakan jika semakin baik kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, semakin tinggi dimungkinkan daerah mempunyai akuntabilitas pelaporan keuangan tertinggi pada bentuk opini audit sebagaimana baik. Penyelenggaraan kinerja baik mencerminkan adanya orientasi pemda untuk menuju kepada *good government*. Berarti, semakin baik kinerja pemerintah, maka semakin baik kualitas pelaporan keuangan serta akuntabilitas pemda (Mudhofar & Tahar, 2016).

Penelitian sebelumnya mengatakan bahwa kinerja pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan, Berarti dalam pemberian opini BPK tidak melihat pada hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah terhadap laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, tetapi juga berdasarkan LKJP dan LAKIP, jadi kinerja pemerintah daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan (Purbasari & Bawono, 2017). Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian dari (Oktaviani

et al., 2020), mengatakan kinerja pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan, memberikan makna yaitu kinerja pemerintah mempunyai hubungan searah dengan akuntabilitas pelaporan, artinya semakin tinggi kinerja pemerintah maka akuntabilitas pelaporan keuangan semakin meningkat. Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis ke-2 yakni:

$H_2$ : Kinerja pemerintah daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan

Berdasarkan hipotesis-hipotesis sebelumnya di atas, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa desentralisasi fiskal dan kinerja pemerintah daerah berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan.

$H_3$ : Desentralisasi fiskal dan kinerja pemerintah daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan

## METODE

### Data dan Sampel

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif menurut, Sugiyono, (2017) metode kuantitatif adalah penelitian yang bergantung pada filsafat positivisme dilakukan untuk memeriksa sebuah populasi dan sampel pada waktu tertentu. Penelitian menggunakan data panel karena data yang peneliti kumpulkan terdiri atas beberapa objek dalam beberapa periode tertentu, yaitu berupa data laporan keuangan daerah.

Populasi pada penelitian ini adalah Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2020. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik sampling dengan teknik pengambilan sampel yaitu total *Sampling* yang didasarkan mengambil semua populasi dan dijadikan sampel dalam penelitian dengan jumlah populasi sebanyak 19 Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2020.

### Definisi Operasional Variabel

Variabel *dependent* pada penelitian ini adalah akuntabilitas pelaporan keuangan sedangkan variabel *independent*nya yaitu desentralisasi fiskal dan kinerja pemerintah daerah.

Berikut disajikan definisi operasional dalam penelitian ini:

**Tabel 1 Operasional Variabel**



Variabel	Definisi	Pengukuran
Akuntabilitas Pelaporan Keuangan	Akuntabilitas pelaporan keuangan pertanggung-jelasan pemerintah ke publik jika keuangan pemerintah dikelola sebagai tanggung jawab buat tujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk sebagaimana membentaha informasi atau jawaban yang jelas ke publik, perihal aktivitas pemerintah sebagaimana diwujudkan melalui laporan keuangan.	Akuntabilitas pelaporan keuangan diukur dari opini audit termasuk kategori: yaitu diberi nilai 1 untuk pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP (baik) dan diberi nilai 0 untuk pemerintah daerah yang mendapatkan WDP (buruk). (Oktariani et al., 2020)
Desentralisasi Fiskal	Desentralisasi fiskal yakni wewenang serta tanggung jawab ke pemerintah pusat pada pemerintah daerah sebagai fungsi publik atau tujuan dalam peningkatan ter-sejahteranya masyarakat.	Kemandirian Daerah = $\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah} \times 100\%}{\text{Total Pendapatan}}$ (Mulya & Nadiyah, 2018)
Kinerja Pemerintah Daerah	Kinerja pemerintah daerah wajib buat pemerintah daerah, selaku eksekutif, lebih bagi DPRD secara fungsional melaksanakan kewyaban atau terlaksananya fungsi legislasi, fungsi anggaran serta fungsi pemerintahan.	Kinerja Pemerintah = $\frac{\text{Sumbu (Pendapatan - Belanja)} \times 100\%}{\text{Rata-Rata Total Aset}}$ (Oktariani et al., 2020)

**Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis Analisis Statistik Deskriptif**

Data yang diolah dan dikumpulkan dalam penelitian, kemudian dianalisis menggunakan alat statistik yang disebut dengan statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa maksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2017).

**Regresi Logistik**

Analisis regresi logistik adalah analisis regresi yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara sebuah variabel terikat kategorik untuk yang bertipe biner dengan variabel bebas yang bertipe kategorik maupun numerik. Perubahan respon biner tersebut biasanya diklasifikasikan dengan sukses atau gagal dan juga bisa ditulis dengan dua nilai yaitu Y =1 dan Y =0, sebagai contoh sembuh/tidak, hidup/mati, lulus/tidak lulus, baik/buruk dan lain-lain.

Model regresi logistik *binary* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$\ln \frac{Y_{it}}{1-Y_{it}} = \alpha + \beta_1 X_{it} + \beta_2 X_{2it} + \varepsilon$$

Atau bisa juga dengan :

$$\pi_i = E(Y_{it} = 1 | x_{it}) = \frac{1}{1 + e^{-(\alpha + \beta_1 X_{it} + \beta_2 X_{2it})}}$$

Keterangan :

- $\ln \frac{Y_{it}}{1-Y_{it}}$  : Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah i pada waktu t
- $\alpha$  : Konstanta
- $\beta$  : Koefisien regresi
- $X_{it}$  : Kemandirian Daerah i pada waktu t
- $X_{2it}$  : Kinerja Pemerintah Daerah i pada waktu t
- $\varepsilon$  : Variabel pengganggu (*Residual Error*)

**Pengujian Signifikan Model Dengan Simultan**

*Omnibus tests of model coefficients* merupakan uji statistik secara simultan (uji f). Dalam penelitian ini akan menguji apakah variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2018). Adapun tingkat signifikansinya sebesar 5%, sehingga kriteria penagmbilan keputusan sebagai berikut: 1) Jika  $f_{hitung} > f_{tabel}$  dan  $(P-Value) < 0,005$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen. 2) Jika  $f_{hitung} < f_{tabel}$  dan  $(P-Value) > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, artinya variabel independen secara simultan tidak mempengaruhi vaeriabel dependen.

**Pengujian Signifikan Mode Secara Parsial**

Uji-Wald digunakan untuk menguji tiap-tiap parameter. Hipotesis yang diuji adalah :

$$H_0 = \beta_i = 0$$

$$H_1 = \beta_i \neq 0$$

Dengan  $i = 1,2,3,\dots,k$ .

Statistik uji-wald adalah

$$W_i = \left[ \frac{\hat{\beta}_i}{SE(\hat{\beta}_i)} \right]^2$$

Untuk  $i = 0,1,2,\dots,k$ , dimana

Dimana  $\hat{\beta}_i$  merupakan penduga dan  $SE(\hat{\beta}_i)$  merupakan penduga galat baku

dari  $\beta_i$ .  $H_0$  ditolak jika  $W_i > \chi^2_{a,k}$ ; dengan  $a$  tingkat signifikansi yang dipilih.

### Menguji Kelayakan Model Regresi

Analisis ini dinilai menggunakan *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test*. Terdapat sebuah uji yang sering digunakan untuk menilai kesesuaian data dengan model regresi logistik yang terbentuk, yaitu uji *Hosmer Lemeshow*. Hipotesis yang diuji adalah:

$H_0$  : model sesuai dengan data

$H_1$  : model tidak sesuai dengan data

Statistik uji yang digunakan pada pengujian ini didasarkan pada nilai *khi* kuadrat *Pearson*. Statistik uji ini diperoleh dengan terlebih dahulu mengurutkan pengamatan berdasarkan nilai peluang yang diperoleh, kemudian membagi pengamatan yang terurut tersebut ke dalam  $g$  kelompok (biasanya  $g=10$ ). Selanjutnya, statistik uji didefinisikan sebagai :

$$H = \sum_{g=1}^G \frac{(Og - ng\bar{\pi}g)}{ng\bar{\pi}g(1 - \bar{\pi}g)}$$

$H_0$  akan ditolak jika nilai  $H > \chi^2_{g-2}$  atau jika sig <  $a$ .

### Menilai Keseluruhan Model

#### 1. Menilai Model *Fit*

Uji serempak dilakukan dengan menggunakan uji-G atau disebut juga uji rasio kemungkinan (*likelihood ratio test*). Uji ini digunakan untuk menguji peranan peubah penjelas didalam model secara bersama-sama, berdasarkan hipotesis :

$$H_0 = \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_k = 0$$

$H_1$  = paling sedikit ada satu  $\beta_i \neq 0$  dengan  $i = 1, 2, 3, \dots, k$

Statistik uji yang digunakan pada pengujian ini adalah

$$G = -2 \ln \left[ \frac{L_0}{LM} \right] = -2[\ln L_0 - \ln LM]$$

Dimana  $L_0$  adalah likelihood dari model yang hanya mengandung konstanta saja dan  $LM$  adalah likelihood dari model yang mengandung variabel.  $H_0$  ditolak jika  $G > \chi^2_{a,k}$ ;  $a$  adalah tingkat signifikansi, yang berarti bahwa model A signifikan pada tingkat signifikansi  $a$  yang berarti juga bahwa paling tidak satu variabel berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya.

#### 2. Pengujian Koefisien Determinasi

Analisis regresi logistik tidak memiliki ukuran kebaikan model yang setara dengan yang diperoleh pada analisis regresi linier biasa. Namun terdapat beberapa ukuran  $R^2$  yang biasa dinamakan *pseudo R<sup>2</sup>*. Dua di antaranya adalah :

a)  $R^2$  *Cox & Snell* yang dirumuskan sebagai :

$$R^2_{CS} = 1 - \left[ \frac{L_0}{LM} \right]^{2/n}$$

Nilai  $R^2$  ini memiliki kendala utama, dimana nilai ini tidak pernah mencapai nilai 1 sebagaimana nilai  $R^2$  pada analisis regresi biasa.

b)  $R^2$  *Nagelkerke*; ukuran ini digunakan sebagai koreksi atas keterbatasan nilai  $R^2$  *cox & snell*. Koreksi tersebut dilakukan dengan membagi  $R^2_{CS}$  dengan batas atasnya.

Di beberapa pembahasan disebutkan, karena nilai  $R^2$  ini tidak dapat diinterpretasikan sebagaimana nilai  $R^2$  pada analisis regresi biasa, disarankan untuk menginterpretasikan nilai ini dengan sangat hati-hati.

#### 3. Tabel Klasifikasi

Tabel klasifikasi digunakan untuk menghitung nilai estimasi yang benar (*correct*) dan tidak benar (*incorrect*). Pada kolom mempunyai dua nilai prediksi dari variabel dependen yaitu baik diberi 1 dan tidak baik diberi 0. Pada garis menunjukkan nilai observasinya yang sesungguhnya dari variabel dependen yaitu nilai baik 1 dan tidak baik 0.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Deskriptif Statistik

Statistik deskriptif ini bertujuan untuk menyampaikan acuan terhadap data-data di variabel penelitian yang dipakai dalam penelitian. Analisis deskriptif dipakai untuk menjelaskan seputar ringkasan sampel penelitian seperti maksimum, minimum, mean dan standar deviasi. Berdasarkan pengujian statistik yang telah dilaksanakan oleh peneliti, diperoleh pengolahan data secara deskriptif seperti yang terlihat pada tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel Penelitian	N	Minimum	Maksimum	Rata-Rata	Std. Deviasi
Desentralisasi Fiskal	114	3,97	26,22	9,6090	4,253
Kinerja Pemerintah Daerah	114	-6,49	5,10	-0,1656	2,268
Akuntabilitas Pelaporan Keuangan	114	0	1	0,91	0,284

Sumber : Data Sekunder Yang Diolah SPSS 26

Berdasarkan tabel 2, Kabupaten/Kota yang dijadikan sampel adalah 19 Kabupaten/Kota dengan tahun pengamatan yang dijadikan sampel selama 6 tahun yaitu tahun 2015-2020, maka jumlah observasi yang dikumpulkan berjumlah 114 sampel data.

Desentralisasi fiskal yang diukur menunjukkan bahwa nilai minimum pada Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2019 sebesar 3,97%, nilai maksimum pada Kota Padang tahun 2017 sebesar 26,22%, secara keseluruhan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2020 mempunyai nilai rata-rata sebesar 9,61% dengan tingkat standar deviasi Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2020 sebesar 4,25%.

Kinerja pemerintah daerah yang diukur menunjukkan bahwa nilai minimum pada Kota Bukittinggi tahun 2020 sebesar -6,49%, nilai maksimum pada Kabupaten Sijunjung tahun 2017 sebesar 5,10%, secara keseluruhan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2020 mempunyai nilai rata-rata sebesar -0,17% dengan tingkat standar deviasi Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2020 sebesar 2,29%.

Akuntabilitas pelaporan keuangan yang diukur menunjukkan bahwa nilai minimum pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat sebesar 0, nilai maksimum pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat sebesar 1, secara keseluruhan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2020 mempunyai nilai rata-rata sebesar 0,91 dengan tingkat standar deviasi Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2020 sebesar 0,284.

## Menguji Kelayakan Model

Uji *Goodness of Fit* memiliki tujuan untuk mengetahui apakah suatu variabel bisa didekati menggunakan distribusi atau tidak. Dengan menggunakan program SPSS uji *Goodness of Fit* dapat dilakukan dengan cepat dan efektif. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *Goodness of Fit Test* yang dinilai berdasarkan angka *Chi-Square* di kolom *Hosmer and Lemeshow Test* hasil penelitian ini bisa dilihat pada tabel 3 berikut :

Tabel 3 Hasil Uji *Goodness Of Fit Hosmer and Lemeshow Test*

Step	Chi-square	df	Sig.
1	16,566	8	0,035

Sumber : Data Sekunder Yang Diolah SPSS 26

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa hasil uji nilai statistik *Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit Test* sebesar 16,566 dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,035. Karna nilai *probability* signifikan (0,035) < tingkat signifikat (0,05), maka H1 diterima. Artinya model regresi ini tidak layak dipakai dalam analisis selanjutnya.

## Menilai Keseluruhan Model

### 1. Menilai Model *Fit*

Uji keseluruhan model dipakai untuk mengetahui model yang dihipotesiskan sudah fit atau tidak dengan data. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai antara  $-2 \log \text{likelihood}$  pada awal (blok nomor= 0) dengan nilai  $-2 \log \text{likelihood}$  pada akhir (blok nomor = 1). Nilai  $-2 \log \text{likelihood}$  awal pada blok nomor= 1, hasil penelitian bisa dilihat melalui tabel 4 berikut ini:

**Tabel 4 Overall Model Fit Iteration History<sup>a,b,c</sup>**

Iteration	-2 Log likelihood	Coefficients Constant
Step 0	1	73,068
	2	67,980
	3	67,769
	4	67,768
	5	67,768

Sumber : Data Sekunder Yang Diolah SPSS 26

Nilai -2 log *likelihood* akhir pada blok nomor= 1, bisa dilihat pada tabel 5 berikut ini:

**Tabel 5 Overall Model Fit Iteration History<sup>a,b,c,d</sup>**

Iteration	-2 Log likelihood	Coefficients		
		Constant	Desentralisasi Fiskal	Kinerja Pemerintah Daerah
Step 0	1	69,561	1,050	0,061
	2	59,989	0,656	0,169
	3	56,569	-0,397	0,330
	4	55,730	-1,183	0,454
	5	55,676	-1,417	0,493
	6	55,676	-1,434	0,496
	7	55,676	-1,434	0,496

Sumber : Data Sekunder Yang Diolah SPSS 26

**Tabel 6 Omnibus Tests of Model Coefficients**

Step	Chi-square	df	Sig.
Step 1	12,093	2	0,002
Block Model	12,093	2	0,002
	12,093	2	0,002

Sumber : Data Sekunder Yang Diolah SPSS 26

Dari tabel 4.3 diatas, bisa dilihat bahwa -2 log *likelihood* awal pada blok nomor = 0, yaitu model yang memasukkan konstanta yang bisa dilihat pada step 5, memperoleh nilai sebesar 67,768. Kemudian pada tabel 4.4 bisa dilihat nilai -2 log *likelihood* akhir dengan blok nomor= 1, nilai -2 log *likelihood* pada step 5 memperoleh nilai sebesar 55,676. Adanya penurunan nilai antara -2 log *likelihood* awal dengan -2

log *likelihood* akhir, menunjukkan bahwa model yang dihipotesis fit pada sampel. Penurunan nilai -2 log *likelihood* menunjukkan bahwa model penelitian ini dinyatakan fit, artinya penambahan variabel bebas yaitu desentralisasi fiskal dan kinerja pemerintah daerah menunjukkan bahwa model regresi lebih baik atau  $H_0$  diterima.

$$G = -2 \ln L_0 - (2 \ln L_M) = 67,768 - 55,676 = 12,092$$

Dari tabel 4.5 diatas omnibus tests, untuk nilai  $G = 12,092$  dan derajat bebas 2, diperoleh nilai sig tabel tersebut diperoleh nilai sig < 0,05, sehingga disimpulkan bahwa penambahan kedua variabel secara signifikan dapat meningkatkan kemampuan model dalam melakukan pendugaan.

## 2. Pengujian Koefisien Determinasi

Dalam regresi logistik tidak memiliki ukuran kebaikan model yang setara dengan yang diperoleh pada analisis regresi linier biasa. Namun terdapat beberapa ukuran  $R^2$  yang biasa dinamakan *pseudo R<sup>2</sup>*, dua diantaranya yaitu *Cox* dan *Snell's R Square* dan  $R^2$  *Nagelkerke*. Perolehan penelitian bisa diketahui pada tabel 7 berikut:

**Tabel 7 Model Summary**

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	55,676 <sup>a</sup>	0,101	0,225

Sumber : Data Sekunder Yang Diolah SPSS 26

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, diperoleh nilai *pseudo R<sup>2</sup>* dimana, nilai  $R^2$  *Cox* dan *snell's* adalah 0,101 (nilai ini tidak pernah mencapai 1) dan  $R^2$  *Nagelkerke* adalah 0,225 yang bermakna bahwa 22,5% variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Sisa sebesar 77,5% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar penelitian.

### 3. Tabel Klasifikasi

**Tabel 8 Classification Table<sup>a</sup>**

Observed	Predicted	Akuntabilitas Pelaporan Keuangan		Percentage Correct
		Buruk	Baik	
Step 1 Akuntabilitas Pelaporan Keuangan	Buruk	0	10	0,0
	Baik	0	104	100,0
Overall Percentage				91,2

Sumber : Data Sekunder Yang Diolah SPSS 26

Tabel klasifikasi digunakan untuk menghitung nilai estimasi yang benar (*Correct*) dan tidak benar (*incorrect*). Berdasarkan tabel tersebut, tabel klasifikasi menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi untuk prediksi kemungkinan yang menerima opini WTP (Baik) ada 104 sampel, jadi ketetapan model ini adalah 91,2%.

### Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis menggunakan model *logistic regression binary* dengan metode enter pada tingkat signifikan ( $\alpha$ ) 5% *logistic regression binary* dipakai untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal dan kinerja pemerintah daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan.

#### 1. Regresi Logistik

Uji regresi logistik digunakan untuk melihat pengaruh desentralisasi fiskal dan kinerja pemerintah daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pada 19 kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2020. Pengujian dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS 26 sehingga diperoleh hasil pada tabel berikut ini :

**Tabel 9 Variables in the Equation**

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95% C.I. for EXP(B)	
							Lower	Upper
Step <sup>a</sup> Desentralisasi Fiskal	0,496	0,199	6,213	1	0,013	1,642	1,112	2,425
Kinerja Pemerintah Daerah	-0,206	0,162	1,627	1	0,202	0,813	0,592	1,117
Constant	-1,434	1,374	1,089	1	0,297	0,238		

Sumber : Data Sekunder Yang Diolah Dengan SPSS 26

Pada tabel diatas dapat dilihat dalam bentuk persamaan dibawah ini :

$$In (Yit/1-Yit) = -1,434 - 0,496 Dfit - 0,206 KPDit$$

Jika dalam sebuah pengamatan, nilai  $Yit < 0,5$ , maka diduga pengamatan tersebut buruk (wajar dengan pengecualian) terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan dan sebaliknya, jika  $Yit > 0,5$ , maka diduga pengamatan tersebut baik (wajar tanpa pengecualian) terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan.

Nilai odds ratio (OR) dari masing-masing variabel dapat diketahui dari nilai  $\exp(B)$ . Interpretasi terhadap odds ratio yang diperoleh untuk data tersebut antara lain: 1) Untuk variabel Desentralisasi Fiskal diperoleh OR = 1,642 menunjukkan bahwa semakin tinggi peningkatan desentralisasi fiskal maka semakin baik (WTP) akuntabilitas pelaporan keuangan daerah tersebut. 2) Untuk variabel Kinerja Pemerintah Daerah diperoleh OR = 0,813 menunjukkan bahwa semakin bagus kinerja pemerintah daerah maka akan semakin baik (WTP) akuntabilitas pelaporan keuangan daerah.

#### 2. Pengujian Signifikan Model Dengan Simultan

*Omnibus tests of model coefficients* merupakan uji statistik secara simultan (uji f). Dalam penelitian ini akan menguji apakah variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2018).

Hasil penelitian bisa diketahui pada tabel tabel 4.5 diatas sebagai rujukan bahwasanya diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,002. Karena nilai probabilitas ( $0,002 < \text{tingkat probability } 0,05$ ), maka disimpulkan bahwa variabel-variabel independen desentralisasi fiskal (X1) dan kinerja pemerintah daerah (X2) yang digunakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan (Y).

### 3. Pengujian Signifikan Model Dengan Parsial

Pada regresi logistik, uji signifikansi koefisien regresi populasi secara individu bisa diuji dengan uji wald. Uji wald statistik yang diuji adalah statistik *Wald (Wald Statistic)*, apabila nilai probabilitas (Sig) > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa independen tidak mempengaruhi variabel dependen, apabila nilai probabilitas (Sig) < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen mempengaruhi variabel dependen sehingga hipotesis yang dihasilkan pada tabel 4.8 diatas, dapat dilihat bahwa uji *Wald* menunjukkan hasil signifikansi atau pengaruh variabel-variabel X terhadap variabel Y sebagai berikut: 1) Variabel Desentralisasi Fiskal (X1) memiliki nilai probabilitas (Sig) 0,013 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Desentralisasi Fiskal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan (Y) pada 19 Kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Barat. 2) Variabel Kinerja Pemerintah Daerah (X2) memiliki nilai probabilitas (Sig) 0,202 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Kinerja Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan (Y) pada 19 Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat.

## PEMBAHASAN

### Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pada 19 Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2020. Hasil ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten/kota dapat mengembangkan pendapatan asli daerah dengan baik sehingga dapat membiayai pembangunan atau biaya lainnya dari hasil keuangan kemandirian daerah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Fontanella et al., (2014), Mudhofar & Tahar, (2016), Muraiya & Nadirsyah, (2018) yaitu desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan daerah, karena akuntabilitas pelaporan keuangan mempunyai opini audit yang baik. Sehingga desentralisasi fiskal umumnya mempengaruhi kemungkinan daerah mempunyai pelaporan keuangan tertinggi, khususnya dilihat pada aspek kemandirian daerah.

Desentralisasi dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi lokal untuk meningkatkan akuntabilitas dan memperbaiki kemampuan untuk menanggapi kebutuhan dan kondisi lokal. Pemerintah daerah harus memperkuat tanggung jawab atas pengelolaan dan pelaporan keuangan dan pelaporan keuangan pemerintah. Idealnya, desentralisasi fiskal dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah.

### Pengaruh Kinerja Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pada 19 Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2020. Hasil menunjukkan bahwa masih kurangnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam menjalankan tanggung jawab laporan keuangan.

Hasil ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fontanella et al., (2014), Oktaviani et al., (2020) dan Mudhofar & Tahar, (2016) yaitu kinerja pemerintah mempunyai hubungan searah dengan akuntabilitas pelaporan keuangan, artinya semakin tinggi kinerja pemerintah maka akuntabilitas pelaporan keuangan semakin meningkat. Sehingga, kinerja pemerintah

daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan.

Manajemen kinerja yang baik menggambarkan arah SKPD menuju tata kelola yang baik. Artinya semakin baik kinerja pemerintah daerah maka makin baik pula kualitas pelaporan keuangan dan akuntabilitas pemerintah daerah. Selain itu, bisa juga terkait dengan upaya menyampaikan pesan positif mengonfirmasikan kepada pemangku kepentingan bahwa pemerintah daerah berkinerja baik, agar dapat ditampilkan dalam bentuk pertanggung jawaban yang baik.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Hasil dari penelitian pengaruh desentralisasi fiskal dan kinerja pemerintah daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Variabel desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. Akuntabilitas pelaporan keuangan mempunyai opini audit yang baik, sehingga desentralisasi fiskal umumnya mempengaruhi kemungkinan daerah mempunyai pelaporan keuangan tertinggi, khususnya dilihat pada aspek kemandirian daerah. 2) Variabel kinerja pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. Hal ini disebabkan kurangnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam menjalankan tanggung jawab laporan keuangan.

### Saran

Adapun saran yang akan disampaikan berdasarkan hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Untuk peneliti, dalam mencari data penelitian tidak hanya di satu sumber saja, tambahkan sumber lainnya. 2) Untuk penelitian selanjutnya diharapkan melakukan penelitian lanjutan dengan memperluas data penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

[1] Afriyanti, D., H. G. Sabanu, dan F. N. (2015). Penilaian Indeks Akuntabilitas

Instansi Pemerintah. *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*, 1(2), 101–103.

- [2] Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga.
- [3] Fontanella, A., Padang, P. N., & Rossieta, H. (2014). *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*.
- [4] Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [5] LAN, L. A. N. (2003). *Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- [6] Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI.
- [7] Moisiu, A. (2013). *Decentralizations and The Increased autonomy in Local Governments, Procedia-Social and Behavioral Sciences*. pp.459-463.
- [8] Mudhofar, K., & Tahar, A. (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia: Efek Moderasi dari Kinerja. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 17(2), 176–185. <https://doi.org/10.18196/jai.2016.0053.176-185>
- [9] Muhammad Rivandi, F. O. (2022). *Pengaruh Return on Asset Dan Net Profit Margin Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Semen Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2020*. 2(10), 3539–3548.
- [10] Muraiya, & Nadirsyah. (2018). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Efisiensi dan Efektivitas Penyerapan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi

- Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 3(2), 236–253.
- [11] Oktaviani, M. A., Sari, D. P., Akuntansi, P., Katolik, U., & Mandala, W. (2020). *Pengaruh Kemandirian Daerah, Kinerja Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan*. 21(1), 186–193.
- [12] Purbasari, H., & Bawono, A. D. B. (2017). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Sistem Pengendalian Internal Dan Kinerja Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2(2), 102–108. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v2i2.4884>
- [13] Saragih, F., & Siregar, I. A. (2020). Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tebing. *Seminar of Social Sciences Engineering & Humaniora*, 1–14.
- [14] Shende, Suresh dan Tony, B. (2004). *Concept Paper 2: Transparency and Accountability in Public Financial Administration*. UN DESA.
- [15] Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- [16] Sukirno, S. (2003). *Pengantar Teori Mikroekonomi Edisi Ketiga*. Grafindo.
- [17] Suripto, S. C. dan. (2011). *Menilai Kinerja Pemerintah Daerah*. Fokus Media.
- [18] Suryanto. (2017). Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 5(1). <https://doi.org/10.34010/agregasi.v5i1.220>
- [19] Syahrudin. (2006). *Desentralisasi Fiskal : Perlu Penyempurnaan Kebijakan Dan Implementasi Yang Konsisten*. Universitas Andalas.
- [20] Wicaksono, K. W. (2015). Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 19(1), 17. <https://doi.org/10.22146/jkap.7523>
- [21] Zulyanto, A. (2012). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bengkulu. *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(1), 31. <https://doi.org/10.24036/ecosains.346557.00>



---

**GAYA KEPEMIMPINAN INSTRUKSIONAL KEPALA SEKOLAH  
PADA ERA PANDEMI COVID 19****Oleh****Innova Riana Yanti Sinambela<sup>1)</sup>, Sri Ganda Cibro<sup>2)</sup>, M. Joharis Lubis<sup>3)</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Medan****Jln. Willem Iskandar Psr. V, Medan Estate****E-mail: [novaryisinambela@gmail.com](mailto:novaryisinambela@gmail.com), [sricibro@gmail.com](mailto:sricibro@gmail.com), [joharis@unimed.ac.id](mailto:joharis@unimed.ac.id)****Abstract**

This study aims to determine the principal's instructional leadership style during the Covid-19 pandemic. This research was conducted with a qualitative systematic review approach. The meta-synthesis method with a meta-aggregation approach was chosen to answer questions by summarizing various research results related to school leadership in the era of the covid-19 pandemic. The principal's instructional approach is implied by offering the right services to educators in conducting learning, creating new learning ideas that are adapted to the COVID-19 pandemic era, and offering support and a positive impression for all school members.

**Keywords: Instructional Leadership Style, Principal, Leadership, Covid-19 Pandemic.**

**PENDAHULUAN**

Gaya kepemimpinan instruksional dibutuhkan oleh kepala sekolah sebagai pemimpin dalam mendorong dan mengarahkan setiap warga sekolah untuk mengikuti petunjuk yang sesuai, terlebih dimasa pandemi. *Corona Virus Disease 2019* atau sering disebut dengan Covid-19, ditemukan pada akhir Desember tahun 2019. Virus ini sangat cepat berkembang, sehingga pada tahun 2022 pun Covid-19 masih menyebar. Pada tahun 2022 ini, virus tersebut menyebar sehingga menimbulkan virus baru, yaitu Virus Omicron. Sehingga menyebabkan dampak negative terhadap dunia pendidikan.

Pada masa pandemi covid-19, pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat edaran Nomor 3 Tahun 2022, PTM Terbatas pada satuan pendidikan mengikuti ketentuan yang sudah diatur di dalam Keputusan Bersama Empat Menteri. Selain itu di dalam Surat Edaran ini juga dijelaskan bahwa orang tua/wali peserta didik diberikan pilihan untuk mengizinkan anaknya mengikuti PTM Terbatas atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Seperti yang diketahui bahwa tidak semua wilayah memiliki akses internet yang baik. Tidak semua

wali murid mudah memahami perkembangan teknologi yang sekarang ini. Di sini dibutuhkan peranan signifikan seorang kepala sekolah untuk tetap menjalankan kepemimpinannya dengan baik di tengah situasi krisis pandemi covid-19.

Kepala sekolah dituntut untuk dapat mengelola situasi darurat agar proses pembelajaran tetap dapat terlaksana. Kepala sekolah memikul tanggung jawab terhadap kenyamanan dan ketertiban lingkungan sekolah serta warga sekolahnya. Rasa aman dan nyaman ini harus dirasakan oleh guru, siswa, dan orangtua. Termasuk dalam hal keamanan dan kenyamanan di masa tanggap darurat Covid-19 (Firmansyah & Kardina, 2020).

Peran kepala sekolah di masa pandemi covid-19 bukanlah hal yang mudah. Kepala sekolah sebagai leader memegang peranan penting dalam menentukan keputusan. Kualitas sebuah pendidikan bergantung pada bagaimana kepala sekolah mengambil kebijakan. Ancaman atau krisis yang sedang dihadapi saat ini tidak sepenuhnya buruk bagi sekolah. Sebaliknya, justru bisa memotivasi sekolah untuk menjadi lebih baik di masa depan (Lo Moro, et al., 2020; Strielkowski & Wang, 2020).

Kepala sekolah diharapkan mampu mengatasi permasalahan dan mampu mencari solusi terhadap permasalahan yang ada sehingga guru, staf, dan siswa merasa nyaman dan siap melaksanakan pembelajaran selama masa covid-19. Pemimpin yang cerdas<sup>1</sup> dibutuhkan untuk memberikan solusi yang tepat terhadap kendala-kendala yang ada ketika guru mengajar secara daring. Solusi yang tidak tepat adalah seperti tidak dipahami dengan baik, diterapkan secara tidak tepat, belum teruji dan tidak terbukti. Tidak mudah mengatur sumber daya guru misalnya, karena kapasitas teknologi dan informasinya yang beragam sementara pembelajaran harus tetap berlangsung. Kepala sekolah harus bisa memastikan guru-guru memiliki kemampuan mengajar berbasis digital melalui pelatihan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan menyoroti perihal gaya kepemimpinan instruksional kepala sekolah di era pandemi *Covid-19*. Kepemimpinan instruksional kepala sekolah merupakan kepemimpinan yang mengutamakan kegiatan belajar yang dapat memberi dampak, mengeluarkan petunjuk-petunjuk, serta membimbing pendidik selama proses pembelajaran berlangsung agar guru mampu memberikan pengalaman belajar yang baik kepada peserta didik (Kusmintardjo, 2014; Kusumaningrum et al., 2020; Surachmi, 2012).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai keadaan suatu bentuk-bentuk yang ada menggunakan data apa adanya dalam waktu penelitian dilakukan (Arikunto: 2010). Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif ini adalah dilakukan dengan meringkas berbagai hasil penemuan terkait dengan gaya kepemimpinan instruksional kepala sekolah di era pandemi *covid-19* dari beberapa referensi

jurnal. Dalam penelitian ini, data yang ditemukan masih bersifat sementara, dan akan berkembang atau berganti selesainya peneliti berada dilapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kepemimpinan Kepala Sekolah di Era Pandemi *Covid-19*

Kepemimpinan kepala sekolah di era pandemi *Covid-19* menjadikan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pemimpin sangat bervariasi dan harus dilaksanakan untuk mendukung peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah, yakni dapat bertindak sebagai manager, supervisi akademik, melakukan protokol kesehatan, dan mengadakan pelatihan untuk guru.

Pertama, sebagai manager, selama era pandemi *Covid-19*, kepala sekolah sebagai pemimpin teliti mengkordinir pendidik, staf, sarana-pasarana, wali siswa, biaya, dan siswa. Kepala sekolah harus mampu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, terlebih dengan dinas pendidikan, kepala lingkungan, tokoh setempat, dan dinas kesehatan. Kepala sekolah mencari alternatif atas setiap problematika yang dihadapi setiap warga sekolah agar proses pembelajaran dapat dilakukan. Pemimpin yang bijak diperlukan untuk memecahkan masalah yang sesuai atas persoalan yang dihadapi setiap warga sekolah. Alternatif yang tidak sesuai ialah seperti tidak dapat dimengerti secara baik, tidak terbukti, belum teruji, dan dilaksanakan secara tidak tepat (Favero, 2019).

Kedua, sebagai supervisi akademik, kepala sekolah menentukan kurikulum apa yang dipakai oleh guru di era pandemi *covid-19*. Supervisi memastikan setiap pendidik memperoleh umpan balik untuk dibantu mereka dalam meningkatkan pembelajaran dan profesionalisme guru (Ponticell & Zepeda, 2019). Kepala sekolah mengelola pilihan metode, media, dan evaluasi PJJ selama belajar online sehingga kepala sekolah mengetahui kendala dan solusi untuk hal tersebut guna

memperbaiki pembelajaran agar lebih efektif dan menyenangkan.

Ketiga, melakukan protokol kesehatan, kepala sekolah menjadi promotor kesehatan di lingkungan sekolah diikuti oleh pendidik dan staff dengan taat menjalankan himbauan pemerintah tentang pencegahan virus *covid-19*. Kepala sekolah memfasilitasi kesehatan warga sekolah dengan penyediaan cuci tangan, pemberian masker, dan alat ukur suhu. Sebagai pemimpin, kepala sekolah mengedukasi warga sekolah perihal bahaya dan pencegahan *Covid-19*, membuat standar jam kerja sesuai protokol kesehatan yang disahkan oleh pemerintah, dan disiplin menerapkan protokol kesehatan di lingkungan sekolah yang wajib dipatuhi setiap warga sekolah.

Keempat, mengadakan pelatihan guru, selama pembelajaran online di era pandemi *Covid-19*, beberapa kepala sekolah telah melatih guru cara memproses materi, media, metode, dan penilaian daring. Belajar dila

teknologi dan pandemi membuat pemimpin menguasai keterampilan baru terkait teknologi pembelajaran. Selain pelatihan, pendidik pun melakukan belajar mandiri terkait keterampilan ter-update lewat internet berupa *learning management system* (LMS) atau *massive onlyne open course* (MOOC) yang tersedia secara gratis dan berbayar. Untuk itu, kepala sekolah selalu memotivator setiap pendidik untuk belajar pengetahuan dan keterampilan baru.

### **Gaya Kepemimpinan Instruksional Kepala Sekolah di Era Pandemi *Covid-19***

Gaya kepemimpinan mempunyai makna sebagai bentuk tercapainya karakter serta perilaku dari seorang pemimpin terkait kompetensinya dalam memimpin sebuah kelompok maupun organisasi. Tercapainya perilaku tersebut umumnya menciptakan bentuk-bentuk tertentu. Pengertian gaya kepemimpinan yang demikian ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Davis dan Newstrom (1995). Keduanya mengemukakan bahwa bentuk

perilaku pemimpin secara menyeluruh seperti yang dinilai oleh bawahan tersebut dikenal sebagai gaya kepemimpinan. Hersey dan Blanchard (1992) berpendapat bahwa gaya kepemimpinan pada intinya merupakan perwujudan dari tiga bentuk, yaitu pemimpin sebagai atasan, bawahan, serta keadaan di mana proses kepemimpinan tersebut dilaksanakan (Syawal, 2012).

Gaya kepemimpinan adalah salah satu langkah yang digunakan oleh seorang pemimpin dalam memberi dampak kepada perilaku orang lain. Gaya kepemimpinan merupakan etika berperilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut berusaha memberi dampak kepada perilaku orang lain. Masing-masing gaya tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan.

Seorang pemimpin akan memilih serta menggunakan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan kemampuan, kepribadian, dan kebutuhan yang dimintanya. Setiap pemimpin memiliki kemampuan staff pegawai di lingkungannya memiliki bentuk yang berlainan dan bervariasi. Berlainan itu disebabkan oleh gaya kepemimpinan yang berbeda-beda dari setiap pemimpin. Ketepatan antara gaya kepemimpinan, norma-norma dan kultur kelompok dipandang sebagai salah satu prasyarat kunci untuk keberhasilan suatu instansi (Nadira, 2014).

Era pandemi *Covid-19* menuntut kepala sekolah harus bisa memprioritaskan mutu proses pembelajaran melalui kepemimpinan dan fungsi manajerial. Kepala sekolah melaksanakan berbagai inovasi dalam bidang pendidikan selama era pandemi sehingga pelayanan pendidikan dapat berjalan dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan warga sekolah.

Kepala sekolah sebagai pemimpin menjalankan tugasnya dengan memberikan strategi yang harus dilakukan oleh pendidik, staf sekolah, siswa, dan orangtua maupun wali

siswa untuk terselenggaranya kegiatan pembelajaran yang tepat dan baik sesuai kondisi pandemi. Hal tersebut mendatangkan gaya kepemimpinan instruksional kepala sekolah di era pandemi Covid-19 dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai pemimpin sekolah.

Gaya kepemimpinan instruksional menurut Blase & Blase (Kusmintardjo: 2014) adalah sebagai usaha kepala sekolah untuk secara tidak langsung memberi dampak terhadap prestasi siswa dengan menciptakan komunitas pengajaran di sekolah melalui tindakan partisipatif dan dengan membangun iklim dan budaya sekolah. Pada era pandemi Covid-19, kepala sekolah mengarahkan guru untuk membentuk komunitas belajar melalui grup *whatsapp* pada masing-masing mata pelajaran dan sesuai dengan masing-masing kelas siswa sehingga terjadi interaksi saat proses pembelajaran diadakan. Setiap guru dapat membagikan materi pelajaran, latihan soal, pekerjaan rumah, dan *link zoom*. Siswa dapat memberi tanggapan berupa pertanyaan dan pendapat. Melalui komunitas tersebut terdapat umpan balik antara guru dan siswa.

Gaya kepemimpinan instruksional kepala sekolah ditandai dengan tujuan yang disampaikan dengan jelas dan harapan yang tinggi akan prestasi akademik dan perilaku sosial warga sekolah (Hou et al., 2019). Kepemimpinan ini menjadikan kepala sekolah sebagai pengawas yang teliti yang akan mengamati proses pembelajaran dan tindakan-tindakan oleh setiap guru, siswa, dan staff sehingga apabila ada kekurangan akan segera diatasi kepala sekolah dengan memusyawarakannya terlebih dahulu dan menyelesaikan kendala dengan solusi yang jelas dan tepat secara bersama-sama.

Gaya kepemimpinan intruksional ini sangat diperlukan dan dilakukan oleh kepala sekolah di era pandemi *covid-19*. Gaya Kepemimpinan instruksional kepala sekolah era pandemi terpusat pada pembelajaran jarak jauh (PJJ) melalui online atau daring. Menjadi

pemimpin kegiatan pembelajaran dan hasil kinerja sekolah merupakan tanggung jawab kepala sekolah disamping pemimpin administratif (Adams, dkk., 2019). Tanpa gaya kepemimpinan instruksional yang baik maka PJJ akan tidak terorganisir untuk mencapai tujuan pendidikan. Selama PJJ, kepala sekolah berfikir strategis dalam merumuskan ide-ide inovatif untuk menyelesaikan berbagai masalah pelaksanaan pendidikan di sekolah. Termasuk dalam hal menghadapi tantangan pandemic *covid-19* yang tentunya merubah tatanan pembelajaran juga memberi dampak pada orientasi dan praktik-praktik pembelajaran di masa depan.

Gaya kepemimpinan instruksional sangat berpengaruh terhadap kesuksesan belajar siswa. Kepala sekolah yang menerapkan kepemimpinan instruksional secara terorganisir akan mempengaruhi prestasi belajar siswa (Campbell et al., 2019). Gaya kepemimpinan instruksional berdampak terhadap bidang akademik sehingga diperlukan dalam mengembangkan proses belajar di lingkungan sekolah. Pengajaran, pembelajaran dan perilaku guru dalam bekerja dengan siswa merupakan pusat gaya kepemimpinan instruksional (Blasé & Blasé, 2000; Dr. Farah Naz & Surryia Rashid, 2021). Kepala sekolah harus mampu mengarahkan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum nasional untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan oleh pendidik untuk setiap siswa. Kepala sekolah juga harus mampu mendobrak dan memberi kesan yang positif terdapat guru dalam mendidik siswa dengan sungguh-sungguh.

Hasil penelitian menunjukkan untuk menghadapi tantangan era pandemic covid-19 dilakukan dengan tiga praktik kepemimpinan instruksional. *Pertama*, melayani yang menekankan kepada memfasilitasi kebutuhan pendidik, siswa, dan staff sekolah dalam pelaksanaan tantangan pembelajaran selama pandemi covid-19. Kepala sekolah meningkatkan keterlibatan dan kolaborasi

warga sekolah untuk memiliki satu tujuan dan berjuang bersama.

Kepemimpinan instruksional kepala sekolah dapat menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, mengerti perubahan emosi dan psikologi warga sekolah terhadap perubahan dari pelaksanaan tugasnya, dan menggunakan pendekatan yang baik untuk menjaga hubungan dan motivasi setiap warga sekolah. *Kedua*, kepemimpinan instruksional kepala sekolah melakukan pendelegasian dan pembagian tugas dan tanggung jawab. Pendelegasi dan penyebaran tanggung jawab membuat setiap warga sekolah berpartisipasi sehingga dapat meningkatkan tanggung jawab dalam menghadapi krisis. *Ketiga*, kepemimpinan instruksional kepala sekolah dapat berkomunikasi secara baik dengan alat teknologi yang digunakan. Era pandemi media elektronik yang digunakan berbasis online. Pengelolaan dan penggunaan aplikasi organisasi berbasis online untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah dibutuhkan kecakapan kepala sekolah sehingga terjadinya interaksi yang baik antar warga sekolah.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Kepemimpinan dalam pendidikan pada dasarnya adalah kemampuan untuk mengkoordinir, mendorong, mempengaruhi, menggerakkan para guru dan staf untuk membantu menciptakan hasil kinerja yang baik di dalam mendidik. Untuk mencapai sebuah kemajuan dalam pendidikan di masa pandemic Covid-19 ini, kepala sekolah di tuntut untuk bijak dan pandai dalam mengelola sistem pembelajaran yang efektif dan efisien sehingga diperlukan gaya kepemimpinan instruksional kepala sekolah untuk mengatasi perubahan keadaan selama era pandemi.

Kepemimpinan instruksional kepala sekolah dengan pemberian layanan yang tepat kepada pendidik dalam melakukan

pembelajaran, menciptakan ide-ide baru pembelajaran yang disesuaikan dengan era pandemi covid-19, dan pemberian dukungan dan kesan positif bagi semua warga sekolah. Kepala sekolah mampu memberi dampak mengenai perlunya inovasi, mendorong proses perubahan sesuai era pandemi, mengatasi kendala, dan menjalin interaksi pada setiap warga sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Desfianti, dkk. 2021. Kepemimpinan Instruksional kepala Sekolah di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Bahana Manajemen Pendidikan*, 10(2), 06-11. <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/bahana>
- [2] Musfah, Jejen. Kepemimpinan Kepala Sekolah Era Pandemi. Seminar Nasional-Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. 129-133.
- [3] Nadeak, Bernadheta & Citra Puspa. 2020. Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Menjaga Tata Kelola Sekolah Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, 8 (3), 207-216. <https://doi.org/10.29210/149400>
- [4] Nurkhairina & Istiningasih. 2021. Kepemimpinan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pendidikan*, 5(2), 406-413.
- [5] Suratiningsih & Slamet Subagya. 2021. Peran Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al Huda Sleman Yogyakarta di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 8(1), 30-37. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/ikhtibar> <https://doi.org/10.32505/ikhtibar.v8i1.622>.
- [6] Zuryati, dkk. 2015. Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru pada SDN

---

7 Muara Dua Lhoksuemawe. *Jurnal Pendidikan*, 3(2).

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN VAN HIELE BERBASIS LURING PADA  
MATERI SEGIEMPAT DI KELAS VII SMP NEGERI 2 YENDIDORI

Oleh

Suzana A.M.Weyai<sup>1)</sup>, Elizabet Kafiar<sup>2)</sup>, Markus Talu Hurit<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3</sup>Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Biak

E-mail: [1\)boybrabar1708@gmail.com](mailto:boybrabar1708@gmail.com), [2\)Elizabetkafiar@yahoo.com](mailto:Elizabetkafiar@yahoo.com),

[3\)Markushurit@yahoo.com](mailto:Markushurit@yahoo.com)

**Abstract**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan model pembelajaran menurut teori Van Hiele berbasis luring (modul) pada siswa SMP Negeri 2 Yendidori Distrik Yendidori Kabupaten Biak Numfor. Desain pada penelitian ini dengan menggunakan fase belajar Van Hiele. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Subyek penelitian ini adalah siswa-siswi kelas VII SMP Negeri 2 Yendidori. Dalam menentukan sampel penelitian digunakan sampel jenuh. Teknik sampling tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel karena semua anggota populasi yaitu siswa-siswi kelas VII SMP Negeri 2 Yendidori yang digunakan sebagai sampel. Data pada penelitian ini adalah hasil belajar siswa yang dikerjakan pada modul berupa LKS maupun latihan-latihan soal. Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas VII SMP Negeri 2 Yendidori dan orangtua. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan Observasi dan Wawancara. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitudengan menggunakan diagram alur yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan tahap verifikasi. Pengujian keabsahan data dilakukan dengan memenuhi standar konfirmability (Sugiyono, 2016) dengan pendekatan triangulasi. Triangulasi pada penelitian ini dilakukan dengan mengecek data Data Collection Data *Reduction Conclusions drawing /Verification Data Display* kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda dan triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan wawancara dan observasi dalam waktu dan situasi yang berbeda. Berdasarkan hasil penelitian setelah diterapkan model Pembelajaran Van Hiele secara luring terdapat peningkatan hasil belajar pada materi Segiempat siswa-siswi SMP Negeri 2 Yendidori.

**Keywords:** *Van Hiele*, Berbasis luring, Segiempat

**PENDAHULUAN**

Selama proses pembelajaran di sekolah guru sebagai pemberi ilmu berperan sebagai fasilitator yang menyampaikan garis besar dari kegiatan pembelajaran dan siswa yang belajar dan mengkonstruksi sendiri pengetahuannya. Namun pada situasi saat ini, pembelajaran dengan tatap muka sedang dibatasi karena pandemi covid-19, kendala yang harus dihadapi oleh siswa yaitu mata pelajaran matematika yang dianggap sulit serta kurangnya pemahaman konsep terhadap pelajaran tersebut khususnya pada materi segiempat. Kurangnya pemahaman konsep materi segiempat yang

dialami oleh siswa dikarenakan oleh materi yang diberikan oleh guru belum sesuai dengan model pembelajaran dan metode, serta pembelajaran masih berpusat pada guru dengan memberikan banyak latihan soal sebagai upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Salah satu model pembelajaran yang sesuai dengan materi bangun datar khususnya segiempat adalah model pembelajaran *van Hiele*, beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya bahwa penerapan teori belajar *van Hiele* memberikan dampak yang positif dalam pembelajaran geometri. Pembelajaran dengan menerapkan tahap berpikir *van Hiele* dapat membantu siswa

dalam memahami materi bangun datar khususnya segiempat (jajargenjang, persegi panjang, belahketupat, persegi, trapesium, dan layang-layang), sehingga dapat membantu dalam perencanaan pembelajaran dan memberikan hasil yang memuaskan pada hasil belajar siswa maupun penanaman konsep belajarnya. Penerapan model pembelajaran *van Hiele* berbasis luring (modul) diharapkan dapat meningkatkan pemahaman konsep segiempat pada siswa kelas VII SMP Negeri 2 Yendidori, pembelajaran luring (luar jaringan) dapat diartikan sebagai bentuk pembelajaran yang sama sekali tidak dalam kondisi terhubung dengan internet, sistem pembelajaran luring memakai media seperti televisi dan radio namun penelitian ini menggunakan modul berisi materi dan latihan soal yang dibagikan kepada siswa untuk dapat dipelajari dari rumah masing-masing. Pembelajaran dengan luring (modul) tentunya tidak seefektif pembelajaran disekolah hal ini terjadi karena faktor pengurangan jam mengajar disekolah sehingga siswa akan kesulitan memahami materi yang banyak dalam waktu yang relatif singkat khususnya pelajaran matematika materi segiempat. Proses pembelajaran berbasis luring (modul), menuntut guru untuk lebih kreatif dalam pembuatan modul pada materi segiempat dengan menambahkan media belajar seperti potongan-potongan gambar segiempat untuk meningkatkan kreativitas dan pemahaman konsep bangun datar pada sub bab definisi, sifat-sifat, keliling dan luas segiempat tetapi juga peningkatan hasil belajar siswa. Dengan demikian siswa SMP Negeri 2 Yendidori dapat belajar dengan baik dan memperoleh pengalaman belajarnya.

Model pembelajaran adalah suatu pola interaksi antara peserta didik dan guru didalam kelas yang terdiri dari strategi, pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran dikelas. Lebih lanjut didefinisikan bahwa model pembelajaran adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala

aspek sebelum sedang dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Teori belajar *van Hiele* menguraikan tahap-tahap perkembangan mental peserta didik dalam bidang geometri. Menurut *van Hiele*, ada tiga unsur utama dalam pengajaran geometri yaitu waktu, materi pengajaran dan metode pengajaran yang diterapkan. Jadi ketiga hal tadi ditata secara terpadu akan dapat meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik pada tingkatan berpikir lebih tinggi. Tahap berpikir yang lebih tinggi hanya dapat dicapai melalui latihan-latihan yang tepat bukan melalui ceramah semata. Dalam perkembangan berpikir, teori *van Hiele* (Wina, 2019) menjelaskan mengenai tingkatan berpikir geometri yaitu dimana siswa tidak dapat naik ke tingkat yang lebih tinggi tanpa melewati tingkat yang lebih rendah. Peserta didik tidak akan berhasil jika hanya belajar dengan menghafal fakta-fakta, nama-nama atau aturan-aturan, melainkan siswa harus menentukan sendiri hubungan-hubungan saling Keterkaitan antara konsep-konsep geometri daripada proses-proses geometri. *Van Hiele* adalah seorang ilmuan dari belanda yang memberikan pandangan tentang pola pikir anak berdasarkan kemampuan anak dalam mengamati objek-objek geometri. *Van Hiele* dalam bukunya yang berjudul *The Level Theory Geometric of Van Hiele* mengatakan bahwa tahapan pola pikir anak di bagi ke dalam 5 level yaitu level 0 sampai 4. Level 0 Recognition or Visualisation, level 1 analysis, level 2 *ordering or informal deductive*, dan level 4 Rigor. Level-level itu menunjukkan bagaiman seseorang berpikir dan tipe-tipe apa yang dipikirkan, bukan menunjukkan seberapa banyak pengetahuan yang dimiliki siswa.

Level 0 *Recognition* (kemampuan visual) pada level ini anak hanya bisa memahami sebuah objek dari visualnya berdasarkan apa yang dilihat. Level 1 *Analysis* pada level ini bukan



hanya melihat bentuknya akan tetapi sudah dapat menganalisisnya. Level 2 *Ordering or Informal deductive* pada level ini anak sudah bisa membedakan objek-objek yang mirip dan menyimpulkan secara deduktif namun belum bisa memberikan kesimpulan secara rinci. Level 3 *Deduction or formal deductive* pada level ini anak sudah dapat menarik kesimpulan secara deduktif dan menjelaskan alasannya secara rinci. Level 4 Rigor adalah level terakhir perkembangan anak, karena pada tahap ini anak sudah bisa memahami arti pentingnya keakuratan. Level-level berpikir *van Hiele*akan dilalui siswa secara berurutan, dimana siswa harus melewati suatu level dengan matang sebelum menuju level berikutnya dengan lima tahap pembelajaran yaitu, tahap 1 (informasi) pada awal tingkat ini, guru dan siswa menggunakan tanya jawab dan kegiatan tentang objek-objek yang dipelajari, tahap 2 (orientasi terarah) yaitu siswa menggali topik yang dipelajari melalui alat-alat dengan cermat yang telah disiapkan guru, tahap 3 (uraian) berdasarkan pengalaman sebelumnya, siswa menyatakan pandangannya yang muncul mengenai struktur yang diobservasi atau diamati, tahap 4 (orientasi bebas) pada tahap ini siswa sudah mulai memperoleh pengalaman dalam menemukan cara mereka sendiri maupun dalam menyelesaikan tugas-tugas, dan tahap 5 (integrasi) yaitu siswa meninjau kembali dan meringkas apa yang telah dipelajari. Istilah luring adalah kepanjangan dari “luar jaringan” sebagai pengganti kata *offline*. Kata “luring” merupakan lawan kata dari “daring”. Jadi, pembelajaran luring dapat diartikan sebagai bentuk pembelajaran yang sama sekali tidak dalam kondisi terhubung jaringan internet maupun intranet. Sistem pembelajaran luring (luar jaringan) artinya pembelajaran dengan memakai media non-internet. Jika peserta didik menulis artikel atau mengerjakan tugas di Microsoft Word dan tidak menyambungkannya dengan jaringan internet, maka itu adalah contoh aktivitas luring dan

jika siswa melakukan *offline conference* dengan bertemu secara langsung tanpa menggunakan internet, hal itu adalah contoh aktivitas luring. Sedangkan modul merupakan media pembelajaran yang digunakan untuk belajar secara mandiri karena di dalam modul terdapat petunjuk belajar yang memungkinkan siswa dapat belajar sendiri tanpa bantuan pengajar. Segala aspek seperti halnya bahasa, struktur desain dan pola juga diatur sedemikian rupa sehingga membuat siswa merasa lebih mudah dalam belajar.

### METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan model pembelajaran menurut teori van Hiele berbasis luring (modul) pada siswa SMP Negeri 2 Yendidori. Desain pada penelitian ini dengan menggunakan fase belajar van Hiele. Tempat penelitian dilakukan di SMP Negeri 2 Yendidori. Lokasi pada penelitian ini dipilih dengan pertimbangan bahwa SMP Negeri 2 Yendidori menjadi lokasi strategis untuk anak sekolah dari 6 kampung disekitarnya serta terdapat di tengah kampung Sunyar Biak Selatan Distrik Yendidori. Subyek penelitian ini adalah siswa-siswi kelas VII SMP Negeri 2 Yendidori. Dalam menentuka sampel penelitian digunakan sampel jenuh. Teknik sampling tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggotasampel. Karena semua anggota populasi yaitu siswa-siswi kelas VII SMP Negeri 2 Yendidori yang digunakan sebagai sampel. Data pada penelitian ini adalah hasil belajar siswa yang dikerjakan pada modul berupa LKS maupun latihan-latihan soal. Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas VII SMP Negeri 2 Yendidori dan orangtua. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan dua cara sebagai berikut:  
Observasi untuk mengukur tingkah laku individu, atau proses terjadinya suatu kegiatan yang diamati baik dalam situasi sebenarnya

maupun situasi buatan. Dalam penelitian ini observasi Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 600 kata. Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan. Di bagian ini harus juga mengisi tugas masing-masing anggota pengusul sesuai tahapan penelitian yang diusulkan. yang dilakukan adalah mengunjungi SMP Negeri 2 Yendidori dan mengamati jalannya proses kegiatan belajar mengajar di tengah pandemi covid-19 dan menawarkan solusi dengan menggunakan model pembelajaran *van Hiele* pada materi segiempat berbasis luring (modul) kepada siswa-siswi SMP Negeri 2 Yendidori supaya dapat belajar dari rumah meskipun tidak tatap muka karena pengurangan jam belajar mengajar di sekolah. Wawancara adalah kumpulan informasi yang dilakukan melalui tanya jawab lisan dan percakapan sehari-hari. Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan berupa wawancara tidak terstruktur, dimana peneliti mewawancarai salah seorang siswa untuk menanyakan situasi belajar disekolah di masa pandemi covid-19 serta bagaimana cara siswa memperoleh pembelajaran dari sekolah. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitudengan menggunakan diagram alur yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan tahap verifikasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitudengan menggunakan diagram alur yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan tahap verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Pada deskripsi hasil pelaksanaan penelitian ini akan dibahas tentang pelaksanaan penelitian dan pelaksanaan pembelajaran remedial. Penelitian ini dirancang untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran Van Hiele pada masa pandemi covid-19 topik segiempat.

#### 1. Pelaksanaan Penelitian

Pada pertemuan awal siswa-siswi kelas VII SMP Negeri 2 Yendidori diterapkan model pembelajaran Van Hiele berbasis luring, artinya peneliti menerapkan model pembelajaran Van Hiele pada saat siswa ke sekolah untuk mengambil modul yang berisi materi segiempat beserta latihan soal. Peneliti mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan tentang mengidentifikasi bangun data segiempat berdasarkan fase belajar Van Hiele yang terdiri dari 5 fase yaitu (1)informasi yaitu peneliti menjelaskan mengenai model pembelajaran Van Hiele yang diterapkan dalam proses pembelajaran dengan bantuan potongan-potongan segiempat agar siswa lebih mudah memahami bangun datar. Guru dan siswa menggunakan tanya jawab tentang objek-objek yang dipelajari dalam hal ini potongan-potongan segiempat yang terdiri dari persegi, persegi panjang, jajar genjang, layang-layang, trapesium, dan belah ketupat. (2) orientasi terarah yaitu siswa di bimbing oleh guru untuk menggali topik yang dipelajari dalam hal ini siswa mengidentifikasi bangun segiempat. (3)uraian, berdasarkan pengalaman sebelumnya, siswa menyatakan pandangannya mengenai struktur yang diamati, pada bagian ini siswa mulai menyebutkan nama bangun datar tersebut dan menyebutkan definisi bangun datar dengan bantuan bimbingan guru. (4)orientasi bebas, pada tahap ini siswa sudah mulai memperoleh pengalaman dalam menemukan cara mereka sendiri dalam menyelesaikan tugas, artinya siswa mulai menyebutkan definisi dan sifat-sifat pada bangun datar segiempat. (5)integrasi yaitu

siswa meninjau kembali dan meringkas apa yang telah dipelajari artinya bahwa peneliti mengajak siswa-siswi untuk dapat meringkas atau merangkum kembali tentang definisi dan sifat-sifat segiempat yang telah dipelajari agar setelah mengakhiri pembelajaran siswa mampu mengerjakan soal yang diberikan oleh peneliti untuk melihat hasil belajar dan ketuntasan belajar para siswa.

Setelah melakukan proses pembelajaran peneliti memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan di rumah, dan akan dikumpulkan setelah waktu yang ditetapkan oleh peneliti. Setelah selesai melaksanakan pembelajaran peneliti berdiskusi (refleksi) dengan guru mata pelajaran dan teman peneliti mengenai pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan untuk memperoleh informasi dan perbaikan persiapan pertemuan selanjutnya. Ketuntasan belajar secara individu yaitu 75 dengan ketuntasan klasikal 80 % (Ratumanan, 2011: 162). Dari hasil pertemuan pertama diperoleh 13 siswa yang mengikuti tes dan semua siswa tuntas belajarnya sehingga presentase banyaknya siswa yang tuntas belajar dengan materi mengidentifikasi bangun datar segiempat sebagai berikut:

$$\text{persentase} = \frac{13}{13} = 100\%$$

Dari hasil persentase ini menunjukkan bahwa ketuntasan belajar yang dilakukan secara klasikal terlaksana dengan baik dan termasuk kategori tinggi (100 %). Sebagian besar kegiatan belajar mengajar sesuai yang direncanakan. Namun masih terdapat kekurangan dalam hal ini siswa belum dapat menyampaikan jawabannya pada saat presentasi. Kemudian, berdasarkan hasil pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa pada materi mengidentifikasi bangun datar segiempat diperoleh:

$$\text{persentase} = \frac{16}{20} = 80\%$$

Berdasarkan hasil presentase menunjukkan bahwa kegiatan belajar yang dilakukan dan diamati pada masing-masing siswa secara

individu, terlaksana dengan baik dan termasuk kategori tinggi (80 %).

Pada pertemuan kedua pada materi keliling dan luas daerah segiempat, pembelajaran sesuai dengan fase-fase belajar Van Hiele. Fase (1) informasi, peneliti menunjukkan kembali bangun-bangun segiempat dan membimbing siswa untuk mengingat kembali tentang sisi dan luas daerah pada bangun datar tersebut. Peneliti memberikan sebuah pertanyaan kepada siswa "Mengapa sisi dan luas daerah pada suatu bangun datar perlu diketahui?", dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan dari peneliti maka peneliti membimbing siswa sampai pada jawaban bahwa sisi dan luas daerah perlu diketahui supaya siswa mudah memahami cara menghitung keliling dan luas daerah bangun datar. (2) orientasi terarah, aktivitas pada fase ini adalah peneliti mengarahkan siswa untuk duduk dalam kelompok yang terdiri dari 2-3 orang, kelompok yang terbentuk terdiri dari 6 kelompok. Selanjutnya peneliti memberikan soal yang ada pada LKK dan menjelaskan aturan pengerjaan dalam LKK, peneliti memantau seluruh siswa pada kelompok masing-masing serta menjadi fasilitator bagi siswa yang mengalami kesulitan dalam kelompok belajarnya, kemudian peneliti mempersilahkan siswa-siswi untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya. (3)uraian, pada fase ini peneliti membantu siswa-siswi untuk mengingat dan mengoreksi kembali hasil presentase yang telah disampaikan oleh masing-masing kelompok, tetapi juga membimbing siswa untuk mendapatkan hasil pemahaman yang sesuai dengan topik yang diajarkan.(4)Orientasi bebas, pada tahap ini peneliti memberi tugas tentang keliling dan luas segiempat dan dikerjakan secara individu di rumah masing-masing. (5)Integrasi, peneliti bersama siswa membuat kesimpulan tentang materi keliling dan luas segiempat.

Selanjutnya, hasil pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa pada materi Keliling dan Luas Segiempat sebagai berikut:

$$\text{persentase} = \frac{17}{20} \times 100 \% = 85 \%$$

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa (individu) memenuhi kriteria dan kategori tinggi (85 %)

Berikut ini adalah hasil pengamatan terhadap ketuntasan belajar siswa secara klasikal:

$$\text{persentase} = \frac{10}{13} = 76,92 \%$$

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa secara klasikal yaitu 76,92%. Menurut aturan ketuntasan klasikal pada materi keliling dan luas daerah segiempat belum tuntas oleh karena itu peneliti akan melakukan remedial bagi siswa yang belum tuntas.

2. Pelaksanaan Pembelajaran Remedial Pada Materi Keliling dan Luas Segiempat

Berdasarkan evaluasi hasil belajar peserta didik secara klasikal dan individu melalui penerapan model pembelajaran Van Hiele khususnya topik keliling dan luas segiempat diperoleh sebagian siswa sudah mencapai ketuntasan belajarnya. Namun masih terdapat tiga orang siswa yang belum mencapai nilai 75 (KKM). Oleh karena itu dilaksanakan program remedial dengan sebelumnya membuat kesepakatan dengan siswa terutama siswa yang akan melakukan remedial. Proses pembelajaran remedial dilaksanakan selama jam pelajaran matematika dan di akhiri dengan hasil:

Tabel 1. Data Hasil evaluasi Remedial Siswa Pada Materi Keliling dan Luas Segiempat

N O	Nama Siswa	Nilai Evaluasi	Bentuk pembelajaran	N o. soal	Nilai Remedial	Ket
1	Krusi Sarewo	70	Pembelajaran langsung	4, 5, 6	75	Tuntas

2	Elisa Fannauw	72	dengan bantuan teman sejawat	3, 6	77	Tuntas
3	Weyi Inarkombu	74		5	79	Tuntas

**Pembahasan Hasil Penelitian**

Penelitian ini dilakukan melalui dua pertemuan dengan menerapkan model pembelajaran Van Hiele dengan fase-fase belajarnya untuk meningkatkan hasil belajar siswa tetapi juga meningkatkan kemampuan berpikir geometri khususnya bangun-bangun datar segiempat. Materi yang diajarkan pada penelitian ini adalah Mengidentifikasi Bangun Datar Segiempat serta Keliling dan Luas Segiempat. Siswa diberikan kesempatan mengeksplor kemampuannya melalui media pembelajaran yang disiapkan oleh peneliti tetapi juga mengamati benda-benda berbentuk segiempat disekitarnya. Dari pengalaman tersebut dapat membantu siswa dalam meningkatkan kemampuannya tentang bentuk bangun segiempat sehingga definisi dan sifat-sifat, sampai dengan menentukan rumus keliling dan luas segiempat.

Pembelajaran Van Hiele khusus membahas tentang tingkat berpikir geometri. Untuk memperoleh hasil yang diharapkan maka Van Hiele menawarkan langkah-langkah belajar menurut fase belajar Van Hiele yaitu fase informasi, fase orientasi terarah, fase uraian, fase orientasi bebas, dan fase integrasi. Diharapkan tahap berpikir siswa akan meningkat setelah melewati fase-fase belajar Van Hiele. Dalam teori Van Hiele juga terdapat 5 tahap belajar dalam geometri yaitu, kemampuan visual, analisis, deduksi informal, deduksi formal, dan rigor. Berdasarkan kemampuan tahap berpikirnya bahwa siswa tidak dapat mencapai tahap berpikirnya tanpa melalui tahap sebelumnya.

Dari data yang diperoleh proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Van Hiele dilaksanakan dalam

dua pertemuan yaitu pertemuan pertama materi mengidentifikasi bangun datar segiempat dan pertemuan kedua pada materi keliling dan luas bangun segiempat dengan melakukan pengamatan aktivitas siswa, penilaian evaluasi, sehingga diperoleh:

1. Data hasil belajar siswa

Evaluasi hasil belajar siswa dilakukan untuk menunjukkan seberapa besar kemampuan siswa dalam memahami dan menyerap materi yang diikutinya melalui aktivitas-aktivitas belajar yang dilalui. Seperti yang telah di paparkan dalam hasil pelaksanaan penelitian bahwa data pada materi mengidentifikasi bangun datar segiempat pada pertemuan pertama mendapatkan hasil yang baik namun pada pertemuan kedua mengalami penurunan pada materi keliling dan luas segiempat.

Tabel 2. Rekapitulasi Data Persentase ketuntasan Hasil Belajar Siswa

NO	Data	Materi I	Materi II
1	Jumlah siswa tuntas	13	13
2	Jumlah siswa tidak tuntas	-	3
3	Ketuntasan belajar klasikal	100	77
4	Nilai rata-rata kelas	82, 38	79, 46

Dari data tersebut terlihat bahwa ketuntasan belajar secara klasikal mengalami penurunan dari 13 orang (100 %) menjadi 10 orang (77 %) karena terdapat 3 orang yang belum tuntas dalam belajarnya. secara rinci, rekapitulasi hasil evaluasi belajar siswa berdasarkan tabel nilai sebagai berikut:

Tabel 3. Rekapitulasi data hasil belajar siswa pada materi I dan materi II

NO	Data	Materi I	Materi II
1	Jumlah Nilai	1071	1033
2	Nilai rata-rata kelas	82, 38	79, 46
3	Nilai terendah	75	70
4	Nilai tertinggi	95	92
5	Jumlah siswa tuntas	13	10
6	Jumlah siswa tidak tuntas	-	3
7	Ketuntasan belajar klasikal	100	77
8	Jumlah seluruh siswa	13	13

Pada tabel diatas setelah melakukan pembelajaran Van Hiele diperoleh nilai terendah pada materi pertama yaitu 75 dan nilai tertinggi 95 terdapat selisih antara keduanya yaitu 20 dengan nilai rata-rata 82, 38. Dapat dilihat bahwa pada materi mengidentifikasi bangun datar segiempat semua siswa tuntas dalam belajarnya dengan memperoleh nilai 75. Selanjutnya, kegiatan belajar pada pertemuan kedua memperoleh hasil belajar dengan mengalami penurunan yaitu ada sebanyak tiga siswa yang belum tuntas dalam belajarnya dengan nilai terendah 70 dan nilai tertinggi 92 dengan selisih nilai keduanya yaitu 22 nilai rata-rata yang diperoleh 79,46. Kemudian dilaksanakan pembelajaran remedial dan evaluasi terhadap empat orang siswa yang belum tuntas, maka diperoleh data keempat peserta didik tersebut telah tuntas.

2. Data aktivitas belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran Van Hiele

Aktivitas kegiatan visualisasi melibatkan model fisik yang digunakan oleh siswa dan melibatkan siswa dalam kegiatan memilih gambar dan potongan-potongan bangun segiempat yang ada pada lingkungan sekitarnya. Kemudian aktivitas analisis siswa diharapkan dapat mengungkapkan sifat-sifat bangun geometri dalam hal ini segiempat, tahap

belajar selanjutnya tahap belajar yang dilalui oleh siswa dalam aktivitas belajarnya adalah membuat definsi bangun datar segiempat, menyebutkan sifat-sifat segiempat serta menyelesaikan soal yang berkaitan dengan keliling dan luas segiempat.

Sehingga diperoleh hasil bahwa penerapan model pembelajaran Van Hiele berbasis luring melalui fase belajar Van Hiele serta aktivitas belajar siswa melalui tahap belajar Van Hiele dapat meningkatkan hasil belajar siswa meskipun latihan soal dikerjakan di rumah serta dapat menambah kemampuan berpikir peserta didik dalam geometri khususnya materi segiempat.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Setelah dilakukan penelitian kualitatif dan berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, serta Penerapan model pembelajaran Van Hiele yang dilakukan secara baik dapat meningkatkan hasil belajar siswa, hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Hasil belajar pada materi segiempat menunjukkan peningkatan cukup baik meskipun pada pertemuan kedua harus dilakukan pembelajaran remedial
2. Aktivitas belajar siswa baik secara klasikal tetapi juga secara individu mengalami peningkatan yang baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Ude, dkk. 2016. Penerapan Model Pembelajaran Van Hiele Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Materi Kubus dan Balok Di Kelas VIII MTs Alkhairaat Pusat Palu. Jurnal Pendidikan Matematika. Vol. 5, No. 3. hal 1-12
- [2] Weyai, Suzana. 2018. Upaya Meningkatkan Hasil belajar Peserta Didik Dengan menggunakan Model Pembelajaran Van Hiele pada Topik Segiempat Di Kelas XI RPL (Rekayasa

Perangkat Lunak) SMK Negeri 9 Jayapura Tahun Ajaran 2017/2018.

---

**PERANCANGAN POROS PADA MESIN PENGURAI LIMBAHKELAPA MUDA****Oleh****Juni Mashita<sup>1)</sup>, Elbi Wiseno<sup>2)</sup>****<sup>1,2</sup>Fakultas Teknologi Industri, Jurusan Teknik Mesin, Universitas Gunadarma****E-mail: <sup>2</sup>[elbi\\_wiseno@staff.gunadarma.ac.id](mailto:elbi_wiseno@staff.gunadarma.ac.id)****Abstract**

Poros adalah bagian mesin yang digunakan untuk mentransmisikan daya, sebagai bagian stasioner yang berputar, poros terbagi menjadi beberapa jenis yaitu poros transmisi, poros spindle, poros gandar. Poros transmisi lebih dikenal dengan sebutan shaft. Shaft akan mengalami beban puntir berulang, beban lentur berganti ataupun kedua – duanya. Pada shaft, daya dapat ditransmisikan melalui gear, belt -pulley, rantai – sprocket, dll. Terdapat beberapa hal penting yang harus diketahui dalam perancangan suatu poros seperti ukuran diameter yang aman digunakan sertategangan yang terjadi pada poros tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh dengandaya motor 4,847 kW dan kecepatan putaran pisau 3600 RPM serta menggunakan material AISI 1045 didapat nilai diameter yang aman digunakan sebesar 18 mm dantegangan geser sebesar 2,06 Kg/mm<sup>2</sup>. Dari hasil perhitungan tersebut selanjutnya hasil perancangan dibuat dalam bentuk gambar teknik dengan menggunakan bantuan perangkat lunak solidworks.

**Keywords: Poros, Diameter Poros, Tegangan, Perancangan.****PENDAHULUAN**

Di zaman milenial seperti ini perkembangan di dunia ekonomi industri di Indonesia sudah sangat pesat. Beberapa sektor sudah di budidayakan secara baik dan optimal salah satunya adalah kelapa (coconut). Pohon yang menjulang tinggi serta memiliki buah yang besar-besar serta merupakan jenis pohon yang terkenal manfaat limbah kelapa mudanya, buahnya, dan daun – daunnya. Sering kita jumpai limbah kelapa muda yaitu serabutnya, terutama di sepanjang jalan dimana biasanya terdapat di penjual es kelapa muda. Namun di berbagai daerah di Indonesia limbah kelapa muda masihmasih belum banyak masyarakat yangmemanfaatkannya. Terdapat salah satu mesin yang dapat mengurai limbahkelapa muda, alat ini adalahMesin Pengurai Limbah Kelapa muda (Mesin Cocopeat). Mesin ini membantu mengurai limbah kelapa muda sehingga akan lebih mudah untuk di proses untuk dimanfaatkan.

Salah satu bagian yang pentingdari mesin pengurai limbah kelapa muda adalah

bagian yang berfungsi untuk memindahkan tenaga dan meneruskan putaran, bagian itu disebut poros. Didalam sistem pemindah tenaga (transmisi) terdapat beberapa komponen yang saling berkaitan satu sama lain. Dan ketika satu komponen rusak akan mempengaruhi kerja dari mesintersebut.

Didalam sistem pemindah tenaga pada sebuah mesin terdapat beberapa pengaruh akibat gerakan dari luar maka dari itu kemungkinan terjadinya beberapa kerusakan. Dan tidak dipungkiri bahwa kerusakan pada poros dapat terjadi karena pemakaian yang teru menerus serta pengaruh beban yang dialami seperti momenpuntir.

Dari latar belakang tersebut penulis tertarik dalam perancangan sebuah poros pada mesin pengurai limbah kelapa muda, agar kinerja mesin tersebut dapat berjalan optimal. Dan dapat dijadikan referensi untuk bidang yang bersangkutan serta dapatmeningkatkan ilmu dibidang tersebut.

**Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan penulisan inimeliputi:

1. Mengetahui material yang cocok

digunakan dalam perancangan poros mesin pengurai limbah kelapa muda.

- Mengetahui nilai diameter serta tegangan yang aman dan sesuai digunakan pada poros.
- Mengetahui nilai panjang serta tegangan yang aman dan sesuai digunakan pada pasak.

### Metode Pengumpulan Data

Untuk penyusunan laporan dan perancangan mesin yang direncanakan ini penulis membutuhkan data - data sebagai acuan untuk memperoleh hasil yang maksimal pada penulisan ini, untuk itu penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut :

#### 1. Studi Pustaka

Yaitu studi atau mencari informasi atau mengambil materi dari buku literature yang berhubungan dengan perencanaan alat baik dari perpustakaan, internet, maupun buku.

#### 2. Metode Observasi

Yaitu mengumpulkan data dengan pengamatan langsung ke lapangan yang berhubungan dengan perencanaan serta perancangan pada sebuah poros.

#### 3. Metode Konsultasi

Yaitu penulis mendapat bimbingan dari pembimbing berdasarkan penerapan teori yang diperoleh di perkuliahan, juga masukan dari teman-teman sehingga penulis akan lebih sempurna dan terarah untuk menyelesaikan laporan ini.

## LANDASAN TEORI

### Pengertian Poros

Poros adalah suatu bagian stasioner yang berputar, biasanya berpenampang bulat dimana terpasang komponen-komponen seperti *pulley*, *skrew* pendorong, pisau pengurai. Didalam sebuah mesin poros berfungsi untuk meneruskan tenaga bersama-sama dengan putaran motor penggerak. Pada umumnya poros meneruskan daya melalui sabuk *V- belt*, roda gigi dan rantai dengan demikian poros menerima beban puntir dan lentur [11].

### Material Poros

Berikut merupakan jenis material yang umum digunakan dalam perancangan poros yaitu :

#### Baja Karbon

Baja karbon merupakan salahsatu jenis baja paduan yang terdiri atas unsur besi (Fe) dan karbon (C). Dimana besi merupakan unsur dasar dan karbon sebagai unsur paduan utamanya. Dalam proses pembuatan baja akan ditemukan pula penambahan kandungan unsur kimia lain seperti *sulfur* (S), *fosfor* (P), *silikon* (Si), *mangan* (Mn) dan unsur kimia lainnya sesuai dengan sifat baja yang diinginkan. Baja karbon memiliki kandungan unsur karbon dalam besi sebesar 0,2% hingga 2,14%, dimana kandungan karbon tersebut berfungsi sebagai unsur penguat dalam struktur baja [9]. **Tabel 2.1** Tabel Presentase Kandungan Karbon Untuk Baja

Tipe Baja	Kandungan Karbon (%)
Mild Steel (Baja lunak)	0,3
Baja Karbon Rendah	0,23 hingga 0,35
Baja Karbon Medium	0,35 hingga 0,5
Baja Karbon Tinggi	0,5 hingga 0,8
Baja Perkakas (Baja Tool)	0,7 hingga 1,4

#### Baja Paduan

Baja paduan (*alloy*) adalah baja yang memiliki sedikit kandungan dari satu atau lebih elemen paduan (selain karbon) seperti *manganese*, *silicon*, *nikel*, *titanium*, *copper*, *chromium* serta *aluminium*. Pencampuran tersebut menghasilkan sifat yang tidak dimiliki oleh baja karbon reguler. Baja paduan sering sekali digunakan di industri karena biayanya yang ekonomis, mudah ditemukan, mudah diproses dan memiliki sifat mekanik yang baik. Baja paduan lebih *responsive* terhadap



perlakuan panas dan perlakuan mekanik dibandingkan dengan baja karbon [9].

**Tegangan (Stress)**

Stress adalah ukuran dari kekuatan - kekuatan internal. Secara kuantitatif, itu adalah ukuran dari kekuatan rata - rata per-satuan luas permukaan dalam objek. Kekuatan - kekuatan internal yang muncul sebagai reaksi terhadap kekuatan eksternal diterapkan untuk objek. Karena objek mampu berdeformasi diasumsikan berperilaku sebagai sebuah kontinu, kekuatan - kekuatan internal didistribusikan terus menerus dalam volume objek material, dan mengakibatkan deformasi bentuk objek. Melampaui batas kekuatan material, hal ini dapat menyebabkan perubahan bentuk permanen atau kegagalan struktural [12].

**Faktor keamanan**

*Factor of safety* sebenarnya berasal dari kekuatan rentang mutlak material yang dibagi untuk mendapatkan nilai *working stress* atau design stress. Secara teoritis *Factor of safety* ini akan menjadi sebagai bahan dasar untuk membuat sebuah rancangan baru tentang sebuah konstruksi. Selain itu, *Factor of safety* akan menjadi tolak ukur efisiensi dalam penggunaan bahan yang digunakan. *Factor of safety* 1,25 - 1,5 dalam kondisi terkontrol dan tegangan yang bekerja dapat ditentukan dengan pasti. Misalnya saja sebuah konstruksi setelah modelnya dilakukan pengujian *strenght wizard* didapat angka sampai 20, berarti secara efisien bahan yang digunakan berlebihan. Dewasa ini praktek mesin modern juga mendasarkan *Factor of safety* pada kekuatan bahan secara signifikan, tidak hanya berdasarkan kekuatan tarik. Kekuatan sebenarnya dari suatu struktur haruslah melebihi kekuatan yang dibutuhkan. Faktor keamanan atau *Factor of safety* haruslah lebih besar dari 1,0. Untuk perhitungan paling umum digunakan persamaan berikut ini [12].

$$SF = \frac{\sigma_{max}}{\sigma}$$

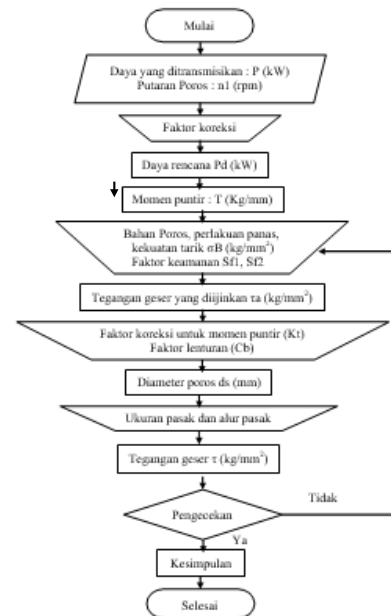
Dimana :

SF : Faktor keamanan

$\sigma_{max}$  : Tegangan maksimum sifat material (N/mm<sup>2</sup>)  
 $\sigma$  : Tegangan kerja yang diizinkan (N/mm<sup>2</sup>)

**METODOLOGI PENELITIAN**

**Diagram Alir Penelitian**



**Gambar 1. Diagram Alir Penelitian**

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Perhitungan Perancangan Poros**

Berikut data dan perhitungan perencanaan poros.

Spesifikasi :

Daya Motor (P): 4,847 kW

Putaran Pisau (n1) : 3600 RPM

Material: AISI 1045

Maka untuk meneruskan daya dan putaran ini, terlebih dahulu dihitung daya perencanaan (Pd). Untuk perancangan poros ini diambil faktor koreksi sebesar  $f_c = 1,8$ . Harga ini diambil dengan pertimbangan berdasarkan kebutuhan motor dengan beban terus menerus dan terjadi beban kejut, sehingga poros yang akan direncanakan semakin aman terhadap kegagalan akibat momen puntir yang terlalu besar.

$$Pd = F_c \times P$$

$$= 1,8 \times 4,847 \text{ kW}$$

$$= 8,72 \text{ kW}$$

#### a. Momen Puntir Poros

Momen puntir atau torsi ialah sebuah ukuran dari besar kecenderungan untuk dapat berotasi yang telah ditentukan keadaan benda ataupun partikel penyusunnya. Untuk perhitungan momen puntir menggunakan persamaan 2.3 sebagaiberikut.

$$T = 9,74 \times 10^5 \times \frac{Pa}{n1}$$

$$= \frac{8,72}{3600}$$

$$T = 2359,24 \text{ Kg. mm}$$

#### b. Tegangan Geser Yang Diiijinkan Besarnya tegangan geser yang

diiijinkan ( $\tau_a$ ) dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 2.4. Poros yang digunakan adalah poros dengan material AISI 1045 dengan kekuatan tarik  $\sigma_b$  adalah sebesar 58  $\text{Kg/mm}^2$ . Untuk bahan AISI 1045 ini setara dengan jenis material S45C. Dengan nilai  $Sf1$  yang digunakan adalah 6,0 untuk bahan SC dengan pengaruh massa, dan baja paduan dan  $Sf2$  nilainya sebesar 1,3 – 3,0. Maka tegangan geser adalah

$$\tau_a = \frac{\sigma_b}{(Sf1 \times Sf2)}$$

$$= \frac{58 \text{ Kg/mm}^2}{(6,0 \times 1,3)}$$

$$\tau_a = 7,43 \text{ Kg/mm}^2$$

#### Diameter Poros

Perhitungan selanjutnya adalah menentukan diameter yang sesuai untuk poros. Dengan  $K_t$  = faktor koreksi untuk kemungkinan terjadinya tumbukan, faktor ini dipilih sebesar. Dalam hal ini harga  $K_t$  diambil sebesar 1,5 untuk menjamin keamanan dari poros.  $C_b$  = faktor koreksi untuk kemungkinan terjadinya beban lentur, dimana untuk perkiraan sementara ditetapkan bahwa beban hanya terjadi karena momen puntir saja, dan diperkirakan tidak akan terjadi

pembebanan lentur, sehingga harga  $C_b$  ini diambil sebesar 2,3. Untuk perhitungan diameter poros menggunakan persamaan 2.5 sebagai berikut.

$$ds = \left[ \frac{5,1}{7,43 \text{ Kg/mm}^2} 1,5 \times 2,3 \times 2359,24 \text{ Kg. mm} \right]^{1/3}$$

$$ds = 17,7 \text{ mm} = 18 \text{ mm}$$

#### d. Tegangan Geser Poros

Hasil diameter poros yang dirancang harus diuji kekuatannya. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan memeriksa tegangan geser yang terjadi akibat tegangan puntir yang dialami poros. Jika tegangan geser lebih besar dari tegangan geser izin dari bahan tersebut, maka perancangan akan dikatakan gagal.

Besar tegangan geser dihitung menggunakan persamaan 2.6 sebagaiberikut.

$$r = \frac{16 \times T}{\pi \times ds^3}$$

$$r = \frac{16 \times 2359,24 \text{ Kg. mm}}{\pi \times 18^3 \text{ mm}}$$

$$r = 2,06 \text{ Kg/mm}^2$$

Terlihat bahwa tegangan geser yang terjadi adalah lebih kecil dari pada tegangan geser yang diizinkan  $\tau < \tau_a$  ( $2,06 \text{ Kg/mm}^2 < 7,43 \text{ Kg/mm}^2$ ) Artinya poros aman digunakan.

## 4.2 Perhitungan Perancangan

### Pasak

Berdasarkan perhitungan poros yang telah dilakukan maka dapat dipilih dimensi pasak adalah sebagaiberikut :

1. Lebar pasak (b) : 6 mm
2. Tinggi pasak (h) : 6 mm
3. Kedalaman alur pasak pada poros ( $t_1$ ) : 3,5 mm
4. Kedalaman alur pasak ( $t_2$ ) : 2,8 mm
5. Material pasak : S45C

#### a. Gaya Tangensial Poros

Gaya tangensial yang terjadi padaporos dihitung menggunakan persamaan 2.7 sebagai berikut.

$$t = \frac{T}{ds/2}$$

$$t = \frac{2359,24 \text{ Kg. mm}}{18 \text{ mm} / 2}$$

$$F = 262,13 \text{ Kg}$$

#### b. Tegangan Geser Izin Pasak

Jika material pasak S45C dicelup dingin dan dilunakan maka tegangantariknya adalah  $70 \text{ Kg/mm}^2$ , dengan faktor keamanan diambil  $Sfk1 = 6,0$  dan  $Sfk2 = 2$ . Tegangan Geser Izin Pasak menggunakan persamaan 2.8 sebagai berikut.

$$rka = \frac{\sigma b}{(Sfk1 \times Sfk2)}$$

$$rka = \frac{70 \text{ Kg/mm}^2}{(6 \times 3)}$$

$$rka = 3,9 \text{ Kg/mm}^2$$

#### c. Panjang Pasak

Panjang Pasak dihitung menggunakan persamaan 2.9 dan 2.10 sebagai berikut.

$$rka = \frac{F}{b \times l1}$$

$$l1 = \frac{F}{b \times rka}$$

$$l1 = \frac{262,13 \text{ Kg}}{6 \text{ mm} \times 3,9 \text{ Kg/mm}}$$

$$l1 = 11,20 \text{ Kg/mm}^2$$

Untuk pasak tekanan permukaan yang diizinkan adalah  $Pa = 8 \text{ Kg/mm}^2$ .

$$Pa = \frac{F}{t2 \times l2}$$

$$l2 = \frac{F}{t2 \times Pa}$$

$$l2 = \frac{262,13 \text{ Kg}}{2,8 \text{ mm} \times 8 \text{ Kg/mm}^2}$$

$$l2 = 11,70 \text{ Kg/mm}^2$$

Dari perhitungan diatas diperoleh panjang pasak terbesar yaitu  $l = 11,70 \text{ mm}$ . Berdasarkan buku sularno diambil panjang pasak  $lk = 23 \text{ mm}$ .

Dari hasil perhitungan yang dilakukan diperoleh bahwa lebar pasak adalah  $6 \text{ mm}$ , tinggi pasak =  $6 \text{ mm}$ , panjang pasak =  $23 \text{ mm}$  dan diameter poros adalah =  $18 \text{ mm}$ . Lebar pasak sebaiknya antara  $25 - 35$

% dari diameter poros, dan panjang poros jangan terlalu panjang dari diameter poros (antara  $0,75 - 1,5 \text{ ds}$ ).

$$b / ds = 6 / 18 = 0,333$$

Diperoleh perbandingan antara lebar pasak dengan diameter poros adalah  $0,333$ . Artinya lebar pasak  $33,3\%$  dari diameter poros hal inidinyatakan aman digunakan.

$$lk / ds = 23 / 18 = 1,27$$

Diperoleh perbandingan antara panjang pasak dengan diameter poros adalah  $1,27$ . Artinya panjang pasak  $12,7\%$  dari diameter poros dan juga berarti aman digunakan.

#### d. Tegangan Geser Pasak

Tegangan geser yang terjadi pada pasak dihitung menggunakan persamaan 2.11 sebagai berikut.

$$rk = \frac{F}{b \times l}$$

$$rk = \frac{262,13 \text{ Kg}}{6 \text{ mm} \times 23 \text{ mm}}$$

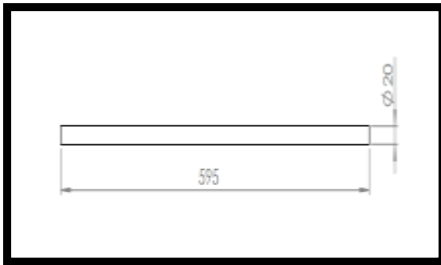
$$rk = 1,89 \text{ Kg/mm}^2$$

Didapat tegangan geser yang terjadi sebesar  $1,89 \text{ Kg/mm}^2 <$  dari tegangan geser yang diizinkan sebesar  $3,9 \text{ Kg/mm}^2$ . Maka pasak cukup baik untuk menahan mmen puntir yang terjadi.

#### Desain Poros

Pada desain perancangan poros ini penulis menggunakan *software solidworks* dalam membuat gambarkerja poros. Berikut

merupakan gambar desain poros dapat dilihat pada gambar 4.1 dibawah.



**Gambar 4.1** Tampak Depan Desain Poros



**Gambar 4.2** Tampak 3D (*Isometric*) Desain Poros

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang telah didapat maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Material yang digunakan dalam perancangan poros adalah AISI 1045 yang merupakan baja karbon yang mempunyai kandungan karbon sekitar 0,43 - 0,50 %. Baja AISI 1045 dipilih sebagai bahan pembuatan poros karena strukturnya kuat dan keras oleh karena itu cocok digunakan untuk poros yang memerlukan kekuatan dan ketangguhan yang tinggi. Baja ini pun memiliki kekuatan uji tarik sampai dengan 610 N/mm<sup>2</sup>.

2. Pada perancangan poros ini dengan daya motor (P) 4,847 kW dan kecepatan putar pisau (n1) 3600 RPM. Didapat ukuran diameter poros (ds) yang sesuai digunakan sebesar 18 mm. Serta tegangan geser ( $\tau$ ) yang terjadi sebesar 2,06 Kg/mm<sup>2</sup>, hal ini terbilang aman digunakan karena nilainya dibawah (lebih kecil) dibanding nilai tegangan geser yang diizinkan ( $\tau_a$ ) sebesar 7,43 Kg/mm<sup>2</sup>.

3. Pasak yang digunakan dalam perancangan poros dengan diameter 18 mm memiliki lebar pasak (b) 6 mm dan tinggi pasak (h) 6 mm. Didapat ukuran panjang pasak yang aman digunakan sebesar 23 mm, serta tegangan geser yang aman sebesar 1,89 Kg/mm<sup>2</sup> lebih kecil dari tegangan geser yang diijinkannya sebesar 3,9 Kg/mm<sup>2</sup>.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Sularso. (2004). *Dasar Perencanaan dan Pemilihan Elemen Mesin*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- [2] Agus Edy Pramono, S. (2018). *Buku Ajar Elemen Mesin 1*. Depok: Politeknik Negeri Jakarta.
- [3] Dahlan, D. (2011). *Elemen Mesin*. Jakarta: Citra Harta Prima.
- [4] Zainun, Achmad. 2006. *Elemen Mesin 1*. Surabaya: PT Refika Aditama.
- [5] Suhariyanto, Syamsul Hadi. 2004. *Elemen Mesin 1*. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh November.
- [6] Nuriyadi, Yohanes. (2017). *PERANCANGAN MESIN PENGURAI SABUT KELAPA BERBASIS KUALITY FUNCTION DEPLOYMENT (QFD)*. Pekanbaru: Universitas Bina Widya.
- [7] Moot Robert L. 2004. *Elemen Elemen Mesin Dalam Perancangan Mekanis*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- [8] Sato G. T. Dan Sugiarto Hartanto. 2005. *Menggambar Mesin Menurut Standar ISO*. Jakarta.
- [9] Surdia, Tata M.s. 2000. *Pengetahuan Bahan Teknik*. Jakarta: Pradnya Pratama.
- [10] Callister, Jr. W.D. 1994. *Material Science and Engineering*. New York: John Willey and Sons, Inc
- [11] Vermilion. 2015. *Pengertian Poros Beserta Jenis – Jenisnya Pada Elemen Mesin*. (Online), tersedia: [vinzichi.blogspot.com](http://vinzichi.blogspot.com). diunduh 21

.....  
januari 2018.

- [12] Hariandja, B. 1997. Mekanika Bahan dan Pengantar teori Elastisitas. Jakarta: Erlangga.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

ASIMILASI BAGI NARAPIDANA DALAM RANGKA PELAKSANAAN INTEGRASI  
UNTUK PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN *COVID-19* PADA  
BALAI PEMASYARAKATAN KLAS I PADANG

Oleh

Hendrizaral Fira

Pembimbing Kemasyarakatan Muda Balai Pemasyarakatan Klas I Padang

E-mail: [hendrizaralfira@gmail.com](mailto:hendrizaralfira@gmail.com)

**Abstract**

*The purpose of this research in giving of assimilation to prisoners, obstacles faced and efforts by Balai Pemasyarakatan Klas I Padang to solve the obstacles in the giving of assimilation to prisoners in the integration to avoid spreading of covid-19. This research is descriptive research. The approach used is juridical normative and empirical juridic. The data used is secondary and primary. Data collection techniques are library and field. Data analyzed qualitative and served in the descriptive form. The results of this research: the giving of assimilation to prisoners in the in the integration to avoid spreading of covid-19 by through information system of socialiation by website from Directory of General Ministry of Law and Human Right Indonesian Republic by regulation prisoners who 2/3 punishment time until 31<sup>st</sup> December 2020, child who 1/2 punishment time until 31<sup>st</sup> December 2020. Obstacles faced in the giving of assimilation are internal obstacles consist of client limitation in the using of technology information, lack of human resources of socialiation guides and online system that has weakness. Also, external obstacles come from society environment that never receive the prisoners.*

**Keywords:** *Assimilation, Prisoners, Integration, Covid-19*

**PENDAHULUAN**

Dalam sistem hukum Indonesia dikenal yang namanya hukum pidana, yakni bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan serta menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut (Poernomo, 1985: 22).

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari

seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut (Priyatno, 2006:71).

Tujuan pidana penjara ialah pemasyarakatan, maka penjatuhan pidana itu bertujuan disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana juga kehilangan kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertaubat, mendidik supaya ia menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna (Sahardjo, 1981:3).

Pada tanggal 10 Februari 2020 *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dinyatakan

oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) sebagai pandemic karena virus ini sudah menyebar hampir ke seluruh negara di dunia. Pemerintah Indonesia menetapkan wabah penyebaran virus mematikan *Covid-19* ini sebagai Bencana Nasional pada tanggal 14 Maret 2020 dan menetapkan *Covid-19* sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020. Penetapan tersebut didasarkan pada penyebaran Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) yang bersifat luar biasa dengan ditandai jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Hal ini sangat berdampak juga dengan kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang *over* kapasitas.

Kepadatan narapidana menimbulkan lembaga pemasyarakatan menjadi tempat yang sangat rentan terjadinya penularan virus *Covid-19* secara masif dan cepat, jika salah satu dari penghuni lapas terkena virus tersebut. Mengingat para petugas pemasyarakatan tidak tinggal di dalam lapas, melainkan di luar kompleks lapas yang sudah barang tentu berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya. Ditambah lagi pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menerapkan *physical distancing* (Harefa, 2020:294). Atas dasar itu maka sangat urgent untuk mengambil tindakan untuk mencegah dan menghalau penyebaran *Covid-19* di dalam lembaga pemasyarakatan.

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM dalam melakukan upaya pencegahan dan penyebaran *Covid-19* di Lembaga Pemasyarakatan telah mengeluarkan "Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI

No.19.PK.01.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*". Peraturan tersebut mendapatkan tanggapan pro maupun kontra di tengah-tengah masyarakat. Tetapi diluar daripada itu peraturan ini ditetapkan dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penyebaran *COVID-19* di tengah kondisi sejumlah penjara yang menampung tahanan dan narapidana melebihi kapasitas yang ada.

Kebijakan pembebasan narapidana dan memasukkannya ke program asimilasi dan integrasi tidak hanya dilakukan oleh Indonesia. Beberapa negara, seperti Amerika Serikat dan Italia, melakukan hal serupa atas rekomendasi BB. Menkumham Yasonna Laoly mengatakan salah satu alasan memberikan asimilasi dan integrasi pada warga binaan di lapas adalah untuk menyelamatkan mereka dari ancaman menyebarnya *Covid-19*. Pasalnya, kondisi di dalam lapas dan rutan sudah kelebiha kapasitas sehingga sulit menerapkan protokol pencegahan *Covid-19*. Ini karena kemanusiaan. Tidak ada yang bisa menjamin *Covid-19* tidak masuk ke dalam lapas atau rutan, karena ada petugas yang punya aktivitas di luar dan kita tidak pernah tahu jika dia membawa virus itu ke dalam lapas. Selain itu, kebijakan memberikan asimilasi dan integrasi pada warga binaan di lapas serta rutan *over* kapasitas juga dilakukan atas rekomendasi PBB untuk seluruh dunia (KABAR24).

Selain Indonesia, negara-negara lain juga membebaskan napi untuk mencegah penyebaran *Covid-19* di dalam lapas. Salah satu negara tersebut adalah Amerika Serikat. Ia mengatakan, negara bagian California telah membebaskan 3.500 napi sejak pandemi ini terjadi. Pembebasan juga terjadi di New York City yang membebaskan 900 napi, Harris County 1.000 napi, Los Angeles 600 napi, serta Federal 2.000 napi. Langkah tersebut juga diikuti beberapa negara lain. Italia membebaskan 3.000 napi, Inggris & Wales



membebaskan 4.000 napi, Iran membebaskan 85.000 napi dan 10.000 tahanan politik, Bahrain membebaskan 1.500 napi, Israel 500 napi, Yunani 15.000 napi, Polandia 10.000 napi, Brazil 34.000 napi, Afganistan 10.000 napi, Tunisia 1.420 napi, Kanada 1.000 napi, dan Perancis membebaskan lebih dari 5.000 napi.

Untuk melakukan upaya penyelamatan terhadap narapidana dan anak yang berada di Lembaga Pemasarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara, perlu dilakukan pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi dan integrasi untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19* di bawah pengawasan Balai Pemasarakatan, khususnya pada Balai Pemasarakatan Klas I Padang.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang asimilasi bagi narapidana dalam rangka pelaksanaan integrasi untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19* pada Balai Pemasarakatan Klas I Padang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif* yang didukung oleh pendekatan *yuridis empiris*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan yaitu pada Balai Pemasarakatan Klas I Padang sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan perpustakaan atau data yang pada prinsipnya sudah tersedia atau siap saji yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Untuk memperoleh data digunakan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Teknik pengumpuln data primer, dilakukan dengan

melakukan penelitian lapangan. Teknik yang digunakan dalam penelitian lapangan mencakup: Pengamatan atau observasi, dan wawancara. Dalam menganalisis hasil penelitian dilakukan secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana dalam Rangka Pelaksanaan Integrasi untuk Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Pandemi *Covid-19* (*Corona Virus Desease 2019*) ini membuat warna Pemasarakatan di Indonesia berubah. Kebijakan pemerintah menekan lajunya penyebaran wabah *Covid-19* ini sampai ke proses akhir pemidanaan ini. Lembaga Pemasarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara merupakan sebuah institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi, sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan *Covid-19*. Untuk melakukan upaya penyelamatan terhadap narapidana dan anak yang berada di Lembaga Pemasarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara, Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM RI mengeluarkan sebuah Produ Hukum yakni Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*.

Dengan dikeluarkannya Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* dan juga Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan Anak melalui asimilasi dan intergrasi, maka di

titik ini program pembimbingan diharapkan dapat dijalankan oleh Narapidana yang mendapatkan program asimilasi dan reintegrasi setelah melalui prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Mekanisme pengawasan pun dilakukan secara intensif oleh Pembimbing Masyarakat dengan menggunakan cara-cara pengawasan yang kekinian melalui *online* (daring).

Program pembinaan dan pembimbingan tidak akan berjalan dengan optimal tanpa dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat. Pemerintah daerah dapat turut mengawasi dari pejabat yang paling dekat dengan masyarakat yaitu RT dan mendorong agar Narapidana yang sedang menjalani program asimilasi dan klien Masyarakat yang menjalani reintegrasi dapat berkontribusi dalam memajukan pembangunan daerah. Masyarakat pun diharapkan dapat memberikan kepercayaan serta dukungan moral agar mereka dapat kembali bermasyarakat.

Pada tanggal 18 Desember 2020, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menetapkan aturan terbaru yakni Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* yang kemudian direvisi dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* dan terakhir direvisi dengan dikeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*.

Proses pemberian asimilasi, dilaksanakan melalui sistem informasi masyarakat yang merupakan sebuah website dari Direktorat Jenderal Masyarakat Kementerian Hukum dan HAM RI. Adapun nama website tersebut adalah Sistem Database Masyarakat (<http://sdp.ditjenpas.go.id>) Sistem Database Masyarakat (SDP) adalah Mekanisme Pelaporan dan Konsolidasi Pengelolaan Data Narapidana, yang berfungsi sebagai alat bantu kerja sesuai kebutuhan Unit Pelaksana Teknis Masyarakat, Divisi Masyarakat dan Direktorat Jenderal Masyarakat. Sistem Database Masyarakat merupakan solusi Teknologi Informasi komprehensif yang mencakup seluruh bisnis proses Masyarakat.

Sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018, salah satu syarat untuk mendapatkan asimilasi adalah berkelakuan baik dan aktif dalam program pembinaan di dalam Lembaga Masyarakat. Baik itu program kemandirian maupun kepribadian yang diterapkan di dalam Lembaga Masyarakat. Pemerintah memberi peringatan keras kepada para narapidana yang mendapatkan asimilasi. Apabila selama asimilasi melakukan tindak pidana baru, mereka bakal berhadapan dengan dua konsekuensi hukum. Pertama, sesuai perbuatan tindak pidana yang mereka perbuat. Kedua, mendapat tambahan hukuman karena menjalani masa asimilasi. Ancaman penjara berupa *strait cell* pun siap diterapkan kepada

narapidana asimilasi dan intergrasi yang melakukan kembali tindak pidana.

Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui asimilasi dan integrasi adalah upaya pencegahan dan penyelamatan narapidana dan Anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara dari penyebaran *Covid-19*. Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* yang terdiri dari:

1. Pengeluaran bagi Narapidana dan Anak melalui asimilasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Narapidana yang 2/3 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
  - b. Anak yang 1/2 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
  - c. Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidaer dan bukan warga negara asing;
  - d. Asimilasi dilaksanakan di Rumah;
  - e. Surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lapas, Kepala LPKA, dan Kepala Rutan.
2. Pembebasan bagi Narapidana dan Anak melalui integrasi (Pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cutimenjelang bebas), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana.
  - b. Anak yang telah menjalani 1/2 masa pidana.
  - c. Narapidana dan Anak yang tidak terkait dengan PP nomor 99 tahun 2012, yang

tidak sedang menjalani subsidaer dan bukan warga negara asing.

- d. Usulan dilakukan melalui system database pemasyarakatan.
- e. Surat keputusan integrasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Mekanisme pembimbingan dan pengawasan Narapidana yang memperoleh asimilasi dan integrasi sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Kementerian Hukum dan HAM Nomor: PAS-516.PK.01.04.06 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Sebagai Wujud Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. Melakukan penerimaan narapidana dan anak yang memperoleh asimilasi dan integrasi secara daring. Namun di Bapas Kelas I Padang pada saat penerimaan narapidana masih ada dilakukan secara langsung kepada Lapas yang berada di Kota Padang serta sekaligus berkas nya dan bertemu secara tatap muka namun masih memperhatikan physical distancing. Petugas mencatat nomor telepon keluarga/ penjamin yang bisa dihubungi, guna pengawasan dan pembimbingan via daring dapat berjalan dengan lancar.
2. Melakukan registrasi dan pencatatan identitas narapidana dan anak yang menjalani asimilasi dengan menggunakan Buku Register Pembimbingan Asimilasi Narapidana (Buku Reg IX. B) dan Buku Register Pembimbingan Asimilasi Anak (Buku Reg IV.I).
3. Melakukan pencetakan surat keputusan integrasi di Bapas yang akan melaksanakan pembimbingan dan pengawasan integrasi, serta memindahkan status registrasi narapidana dan anak yang telah selesai menjalani asimilasi dan akan menjalani integrasi ke dalam register integrasi.
4. Melaporkan pelaksanaan penerimaan narapidana dan anak yang memperoleh

- asimilasi dan integrasi kepada Kantor Wilayah Hukum dan HAM Sumatera Barat, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kepala Kepolisian Resor Setempat, dan Kejaksaan Negeri setempat.
5. Menunjuk pembimbing masyarakat untuk melaksanakan pembimbingan dan pengawasan secara daring dengan tahapan :
    - a. Menyusun jadwal pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan, paling sedikit 1 (satu) minggu sekali untuk asimilasi, dan 1 (satu) bulan sekali untuk integrasi.
    - b. Menghubungi klien menggunakan media telepon/sms/whatsapp/ *video call* sesuai jadwal untuk menyampaikan materi bimbingan sekaligus melakukan pengawasan.
    - c. Mengisi catatan hasil bimbingan klien, daftar hadir bimbingan klien dan laporan pengawasan klien.
  6. Menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan oleh petugas registrasi Bapas kepada Kantor Wilayah Hukum dan HAM, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kepala Lapas/Rutan, Kepala Kepolisian Resor Setempat, dan Kejaksaan Negeri setempat.
  7. Melimpahkan pembimbingan dan pengawasan, dalam hal narapidana dan anak yang akan menjalani asimilasi dan integrasi di luar wilayah kerja Bapas setempat, maksimal 2 (dua) hari kerja setelah dilaksanakan serah terima dari Lapas/Rutan.
  8. Dalam hal narapidana dan anak melakukan pelanggaran, maka:
    - a. Terhadap pelanggaran syarat umum dan/ syarat khusus asimilasi, Kepala Bapas melakukan pencabutan sementara asimilasi, untuk selanjutnya mengusulkan kepada Kepala Lapas/Rutan untuk melakukan pencabutan definitive terhadap asimilasi yang diberikan.
    - b. Bagi narapidana dan anak yang telah dicabut asimilasinya, masa selama asimilasi tidak dihitung sebagai menjalani pidana dan proses usulan integrasinya dibatalkan.
    - c. Syarat umum dan syarat khusus asimilasi mengacu kepada syarat umum dan khusus integrasi.
  9. Pengawasan terhadap narapidana dan anak yang menjalankan asimilasi dan integrasi, dilaksanakan oleh Bapas dengan kerja sama Kejaksaan Negeri Setempat. Bapas melaksanakan pembimbingan dan pengawasan dengan petugas pengawas yang disebut dengan Pembimbing Masyarakat (PK). Pengawasan tersebut dilaksanakan dengan cara mengamati dan menilai terhadap pelaksanaan program layanan, pembinaan dan pembimbingan Narapidana yang dilakukan secara virtual (dalam Jaringan). Pengawasan ini sebagai sarana pencegahan dan penanggulangan virus *Covid-19*, serta agar mereka tidak melakukan pelanggaran hukum kembali. Pengawasan oleh Pembimbing Masyarakat dilaksanakan secara virtual melalui sarana telekomunikasi Telepon, *Video Call* ataupun *Video Convergence*.
  10. Pelaksanaan laporan klien harian mengenai pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan secara virtual di perbarui setiap hari guna dikirimkan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan data mengenai jumlah narapidana dan anak yang mendapatkan asimilasi *Covid-19* setiap harinya seperti jumlah penerimaan asimilasi, pengakhiran asimilasi, pembimbingan dan pengawasan asimilasi, dicatat dalam *e-bispa.com* (Elektronik Bimbingan Masyarakat dan Pengawasan Anak).  
 Secara rinci, pembimbingan dan pengawasan yang dilakukan Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang adalah:

1. Kegiatan pengawasan yang pertama kali dilakukan adalah membuat Perencanaan. Perencanaan pengawasan ini meliputi :
    - a. Mempelajari rencana bimbingan yang ditelaah disetujui oleh Tim Pengamat Masyarakat (TPM) Bapas. Sehingga para PK hendaknya memastikan bahwa masing-masing klien asimilasi telah dibuatkan rencana bimbingannya.
    - b. Membuat program pengawasan yang disesuaikan dengan program bimbingan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini PK menyusun programnya, sehingga pengawasan yang dilakukan menjadi terarah.
    - c. Menetapkan strategi dan metode yang tepat dalam melaksanakan pengawasan, diantaranya adalah observasi langsung keadaan klien dan lingkungan sekitarnya, termasuk pihak-pihak yang terlibat secara daring, kemudian wawancara kepada klien dan pihak-pihak yang terlibat dengan menyampaikan beberapa pertanyaan yang terkait pembimbingan dan informasi perkembangan bimbingannya secara daring, kemudian melakukan koordinasi untuk memastikan pihak-pihak yang terkait melakukan peran sesuai dengan program pembimbingan secara daring.
    - d. Membuat perencanaan waktu pengawasan, dalam hal ini sebagaimana Edaran Direktur Jenderal Nomor PAS-516. PK.01.04.06 Tahun 2020 menyebutkan bahwa “Menunjuk pembimbing masyarakat untuk melaksanakan pembimbingan dan pengawasan secara daring dengan tahapan: a) Menyusun jadwal pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan, paling sedikit 1 (satu) minggu sekali untuk asimilasi dan 1 (satu) bulan sekali untuk integrasi”. Perencanaan waktu ini yang kemudian dijadikan dasar bagi PK untuk melaksanakan tugas pengawasan secara daring.
  - e. Menentukan pihak-pihak yang terlibat dalam program pengawasan klien yang disesuaikan dengan rencana bimbingan secara daring, diantaranya keluarga klien, petugas Lapas/Rutan, kelompok masyarakat sekitar tempat tinggal klien, pamong setempat, pemerintah daerah setempat, dan Aparat Penegak Hukum Terkait.
  - f. Menetapkan target pengawasan. Target pengawasan ini ditetapkan berhubungan dengan dasar dilakukan pengeluaran narapidana dan anak dalam asimilasi dan integrasi ini, yaitu agar mereka. Tetap berada di rumah, menjaga kesehatan sesuai dengan standar kesehatan dari pemerintah, tidak melanggar hukum (memenuhi ketentuan syarat umum asimilasi dan integrasi), mematuhi ketentuan syarat khusus asimilasi dan integrasi dan membantu pemerintah dalam penanggulangan Covid-19.
2. Kegiatan kedua adalah melakukan pengawasan terhadap klien secara daring, meliputi:
    - a. Melaksanakan pengawasan terhadap klien secara daring selama masa kedaruratan terhadap penanggulangan Covid-19. Pengawasan yang dilakukan secara daring dilakukan dengan mengoptimalkan sarana berbasis teknologi informasi dengan cara menghubungi klien menggunakan media telpon/sms/whatsapp/video call sesuai jadwal untuk menyampaikan materi bimbingan sekaligus melakukan pengawasan;
    - b. Bentuk pengawasan secara daring adalah memastikan keberadaan klien dirumah masing-masing,

- memastikan aktivitas sehari-hari/program bimbingan klien dilaksanakan, memastikan hubungan dengan keluarga dan lingkungan dalam keadaan baik, serta klien dalam keadaan sehat.
- c. PK melakukan koordinasi dengan pihak terkait disesuaikan dengan perencanaan yang telah dibuat.
  - d. PK memberikan laporan pengawasan yang disampaikan kepada Kepala Bapas, dengan cara mengisi catatan hasil bimbingan klien, daftar hadir bimbingan klien dan laporan pengawasan klien.
3. Apabila terjadi pelanggaran dalam asimilasi dan integrasi maka narapidana dan anak dapat dicabut keputusan asimilasi dan integrasinya. Pelanggaran yang dapat menyebabkan dicabutnya program ini adalah:
    - a. Klien melakukan pelanggaran syarat umum, yaitu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh klien asimilasi dan integrasi yang ditetapkan sebagai tersangka/terpidana.
    - b. Klien melakukan pelanggaran syarat khusus, yaitu telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat, tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada Bapas yang membimbing paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut, tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Bapas yang membimbing; tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh Bapas (tidak berada di dalam rumah).
  4. Setelah terjadinya pelanggaran, maka akan dilakukan penindakan. Penindakan dilakukan berupa peningkatan program bimbingan, pencabutan program asimilasi sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS- 19 516.PK.01.04.06 Tahun 2020, dengan mekanisme :
    - a. Kepala Bapas melakukan pencabutan sementara pelaksanaan asimilasi berdasarkan rekomendasi sidang TPP terhadap laporan hasil pengawasan;
    - b. Kepala Bapas melaporkan dan mengusulkan penetapan pencabutan asimilasi ke Kalapas dengan melampirkan data dukung pelanggaran dan surat keputusan pencabutan sementara;
    - c. Kepala Lapas menetapkan surat keputusan pencabutan asimilasi;
    - d. Kepala Bapas melakukan koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan setempat dalam hal pengembalian Klien ke Lapas/Rutan.
  5. Pencabutan program integrasi dilakukan dengan mekanisme sesuai Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Permenkumham No 3 tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, CMK, PB, CMB, dan CB.
  6. Pemberian sanksi terhadap klien asimilasi dan integrasi dilakukan dengan cara mengembalikan ke Lapas/LPKA/Rutan terdekat, dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian, menjalani hukuman tutupan sunyi (*strafsel*), kecuali untuk Anak, Menempatkan Narapidana dan Anak tersebut pada sel khusus untuk menghindari penyebaran *Covid-19* dari luar sesuai dengan Pedoman Penanganan

*Covid-19*, masa menjalani asimilasi atau integrasi tidak dihitung sebagai menjalani masa pidana kecuali Anak, melakukan pembatasan pemberian hak-hak remisi, asimilasi dan integrasi.

Walaupun usaha telah maksimal dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan dalam pembimbingan Klien yang mendapatkan Asimilasi dan Integrasi *Covid-19* ini, ada juga beberapa klien yang gagal dibimbing dan kembali lagi melakukan pelanggaran hukum sebagaimana data berikut:

Tabel 1

Data Jumlah Klien yang Gagal Dibimbing pada Balai Pemasyarakatan Klas I Padang

No	Nama Klien	Tindak Pidana	Asal UPT
1	Yogi Agustian	Pencurian	Lapas Padang
2	Andry Saputra	Pemeriksaan	Lapas Padang
3	Firdaus Pgl. Ucok	Pencurian	Lapas Padang
4	Putra Donal	Pencurian	Lapas Padang
5	Mardinata	Pencurian	Rutan Sawahlunto
6	Tri Angga Nugraha	Pencurian	Lapas Padang
7	Rahmat Fauzi	Pencurian	Lapas Padang
8	Irsadilah	pencurian	Lapas Padang
9	Randi Gercia	Penganiayaan	Rutan Sawahlunto
10	Muhammad Ridwan	Narkotika	Lapas Padang
11	Tri Nandito Fandrya	Narkotika	Lapas Padang
12	Sepri	Pencurian	Lapas Dharmasraya
13	Ediwan	Pencurian	Rutan

			Sawahlunto
14	Rezky Nofriadi	Narkotika	Lapas Pariaman
15	Ardhy Satria	Pemerasan	Lapas Padang

Sumber data: Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang Tahun 2021.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, ada beberapa faktor Narapidana yang mendapatkan asimilasi dan integrasi dimasa *Covid-19* kembali melakukan tindak pidana lagi, yaitu sebagai berikut:

### 1. Tidak ada efek jera

Hukuman pada dasarnya dipakai untuk membuat pelanggar hukum mengalami pengucilan, akan tetapi Lembaga Pemasyarakatan tidaklah begitu. Di Lapas narapidana dibina dan dibimbing. Kenyataannya Hukuman seperti itu pada beberapa orang narapidana tidak membuatnya jera. Karena bisa jadi hukuman itu ternyata tidak menyulitkan mereka. Ketika narapidana berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan ada yang bisa bergaul dengan baik, mendapat makan secara rutin, dan hal-hal lain yang justru memudahkan hidupnya. Sehingga narapidana betah di Lembaga Pemasyarakatan dan tidak merasa jera.

### 2. Kurangnya Persiapan

Biasanya sebelum para narapidana dibebaskan, ada proses untuk menyiapkan dia beradaptasi dengan dunia atau masyarakat, sehingga harus mengikuti norma-norma yang ada di masyarakat. Proses tersebut dimediasi oleh Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebenarnya punya fungsi untuk melatih orang, tidak sekadar mengucilkan, tidak sekadar represif tapi juga melatih untuk

narapidana ketika keluar dia siap untuk beradaptasi dengan baik dilingkungannya. Ada persiapan dari segi hukum, budaya, ekonomi, mental, dan spiritual. Ketika para narapidana keluar dengan persiapan yang belum tuntas, akibatnya di luar mereka tidak mengalami kepatuhan. Para narapidana dikeluarkan karena aspek kemanusiaan, supaya para narapidana tidak tertular Covid-19. Sehingga kemungkinan mediasinya di Lembaga Pemasyarakatan belum selesai dan tuntas.

### 3. Tidak Punya Pekerjaan dan Modal Hidup

Pada saat warga binaan berinteraksi dan kembali ke tengah-tengah masyarakat, ada yang kesulitan ekonomi dan tidak punya tabungan, ada juga yang tabungannya sudah habis apalagi pekerjaan. Terkecuali bagi warga binaan yang sangat kaya. Sebagaimana para narapidana tidak akan diterima dengan mudah di masyarakat saat keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, disini ada proses stigmatisasi yang kemudian membuat eks narapidana kemudian terpepet melakukan kejahatan-kejahatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan mendapatkan pengakuan.

### 4. Bawaan atau Sifat yang Telah Melekat

Selain faktor-faktor tersebut, bisa jadi seorang narapidana tidak jera karena memang sudah sifat atau bawaan yang dimiliki secara sosial dan individu. Secara individu maksudnya sifat-sifat itu telah melekat pada dirinya. Sementara itu secara sosial artinya eks narapidana terpengaruh teman-teman dekatnya

untuk melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana, sehingga narapidana mencari peluang-peluang saat bebas.

## B. Kendala yang Dihadapi Balai Pemasyarakatan Klas I Padang dalam Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Dalam Rangka Pelaksanaan Integrasi Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Dalam perjalanan waktu yang cukup singkat terkait pelaksanaan pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi Narapidana ini dimasa Pandemi ini tidaklah selalu mulus berjalan. Ini sangat dirasakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Pada Balai Pemasyarakatan Klas I Padang. Berbagai hambatan menghiasi setiap langkah pekerjaan Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas ini. Adapun kendala yang dihadapi Balai Pemasyarakatan Klas I Padang dalam pelaksanaan pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 adalah sebagai berikut

### 1. Hambatan Internal

#### a. Klien

Data klien yang dikeluarkan dari Lapas/Rutan melalui program asimilasi di Bapas Kelas I Padang pada dari Bulan Mei 2020 berjumlah 1.646 orang narapidana. Jumlah klien akan mempengaruhi pengawasan yang dilakukan. Dengan sistem yang dibangun secara digital melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), jumlah klien yang cukup banyak ini bisa cepat diproses secara online.

Akan tetapi kemampuan klien dalam memanfaatkan teknologi informasi juga sangat



mempengaruhi keberhasilan bimbingan dan pengawasan secara daring. Disisi lain faktor ekonomi mempengaruhi kemampuan klien dalam kepemilikan gadget atau handphone, minimnya pihak-pihak yang terkait yang dapat mendukung daring adalah hal-hal yang dapat menjadi faktor penghambat dalam pengawasan daring.

**b. SDM Pembimbing Kemasyarakatan (PK)**

Tabel 2

Data Jumlah Sumber daya Manusia (SDM) Balai Pemasarakatan Klas I Padang

No	Status Pegawai	Jumlah
1	Struktural	13
2	Fungsional Umum (Staf)	20
3	Fungsional Tertentu (PK)	45
<b>Jumlah</b>		<b>78</b>

Sumber Data: Balai Pemasarakatan Kelas I Padang Tahun 2021

Pada tabel di atas dapat dilihat jumlah Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sebanyak 45 orang. Pada tahun 2020, masing-masing PK rata-rata mendapatkan klien 30 orang untuk dibimbing melalui program asimilasi rumah. Over Kapasitas kerja terjadi disini yang membuat kewalahan Pembimbing Kemasyarakatan.

**c. Sistem Pelaksanaan**

Pada tahun 2020 menggunakan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberiaan Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka

Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, pengeluaran Narapidana tidak didasarkan atas penelitian kemasyarakatan dan asesmen resiko residivis (RRI) dan Faktor Kriminogenik. Hal ini menjadikan bimbingan dan pengawasan yang dilakukan PK minim data, kurang terjalin kedekatan dengan klien, yang berakibat pada proses bimbingan tidak berjalan dengan baik. Selain itu pengelolaan administrasi seperti penyerahan klien dilakukan secara daring dan berkas pendukung data klien terbatas menyebabkan klien tidak registrasi secara akurat.

**2. Hambatan Eksternal**

Faktor kebudayaan masyarakat Sumatera Barat yang didominasi oleh masyarakat suku Minang cenderung memiliki stigma negatif terhadap narapidana dan memilih untuk memberikan hukuman sosial dengan menjauhi narapidana karena mereka berbahaya.

Peranan masyarakat dalam proses asimilasi dibagi menjadi dua yaitu peran masyarakat saat proses pemberian izin Asimilasi dan saat pelaksanaan Asimilasi. Peran masyarakat ketika proses pemberian izin Asimilasi berkaitan erat dengan adanya peran keluarga yang bersedia memberikan surat jaminan untuk narapidana sebagai bagian dari syarat administratif. Keluarga adalah wujud dari masyarakat terkecil dan terdekat dengan narapidana. Dengan bersedia memberikan surat jaminan untuk

narapidana, keluarga telah memberikan dukungan kepada narapidana untuk berbaur kepada masyarakat di sekitar LAPAS, sehingga menumbuhkan kepercayaan diri narapidana untuk bersosialisasi dengan masyarakat umum. Selain itu di dalam surat jaminan tersebut terdapat tanda tangan Lurah dan Camat. Hal ini menandakan bahwa masyarakat daerah asal narapidana yang diwakili oleh pejabat kelurahan juga memberikan dukungan kepada narapidana tersebut.

Peran masyarakat ketika pelaksanaan Asimilasi dilihat dari tinggi rendahnya antusiasme dan partisipasi masyarakat sekitar ntuk bersosialisasi dengan narapidana selama mengikuti program Asimilasi di rumah. Asimilasi ini berjalan efektif dengan ditandai bahwa narapidana setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan dapat diterima oleh masyarakat, yaitu narapidana tersebut kini hidup normal ditengah-tengah masyarakat.

Keadaan tersebut apabila dikaitkan dengan Teori tentang Bekerjanya Hukum dalam masyarakat menurut Robert B. Seidman, bekerjanya hukum dalam hal ini hukum untuk mencapai tujuan pemasyarakatan dipengaruhi oleh komponen-komponen yaitu lembaga pembuat peraturan, lembaga penerapan peraturan dan pemegang peranan (Rahardjo, 1980:28).

Sebaik apapun tujuan dari lembaga pembuat peraturan membuat suatu peraturan dan sebaik apapun lembaga penerapan peraturan (lembaga pemasyarakatan) menerapkan

peraturan, tidak akan tercapai tujuan pemasyarakatan apabila tidak mendapat dukungan dari pemegang peranan, dalam hal ini masyarakat dan instansi terkait lainnya. Sebaik apapun perilaku narapidana itu di dalam lembaga pemasyarakatan, apabila masyarakat tidak terbuka untuk menerima maka sia-sia usaha dari lembaga pemasyarakatan melaksanakan perintah perundang-undangan.

Hal ini didukung pula dengan teori tentang sistem hukum menurut Lawrance M. Friedman bahwa tidak berfungsinya komponen masyarakat dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat (Friedman. 2009: 5-6).

Dalam pelaksanaan hak-hak narapidana sangat penting demi terwujudnya pelaksanaan hak tersebut. Masyarakat menjadi salah satu wadah untuk mengembalikan narapidana dalam kehidupan bermasyarakat melalui proses asimilasi. Namun kadang kala tidak sesuai harapan karena masyarakat takut dan khawatir dengan kehadiran narapidana ke lingkungan masyarakat. Kekhawatiran tersebut apabila narapidana melakukan tindak pidana lagi atau membuat kekacauan ditengah masyarakat. Hal tersebut juga berdampak secara psikologis terhadap narapidana karena merasa tertekan oleh pandangan masyarakat terhadap mereka ketika mencoba untuk bermasyarakat, sehingga beberapa narapidana tidak ingin ber Asimilasi.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis, maka dapat disimpulkan hak-hal sebagai berikut:

1. Pemberian asimilasi bagi narapidana dalam rangka pelaksanaan integrasi untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 dilakukan melalui sistem informasi masyarakat yang merupakan sebuah website dari Direktorat Jenderal Masyarakat Kementerian Hukum dan HAM RI dengan ketentuan narapidana yang 2/3 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, anak yang 1/2 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, narapidana yang tidak terkait dengan PP 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidi dan bukan warga negara asing. Asimilasi ini dilaksanakan di rumah dan surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh KaLapas, Ka.LPKA, dan Karutan. Mekanisme pembimbingan dan pengawasan adalah Melakukan penerimaan narapidana secara daring, melakukan registrasi dan pencatatan identitas dengan menggunakan Buku Register Pembimbingan Asimilasi Narapidana (Buku Reg IX. B) dan Buku Register Pembimbingan Asimilasi Anak (Buku Reg IV.I), melakukan pencetakan surat keputusan integrasi serta memindahkan status registrasi narapidana ke dalam register integrasi, melaporkan pelaksanaan penerimaan narapidana kepada Kanwil dengan tembusan kepada dirjen PAS, Polres, dan Kajari setempat, menunjuk PK untuk melaksanakan pembimbingan dan pengawasan secara daring, menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan oleh petugas registrasi Bapas kepada Kanwil dengan tembusan Dirjen PAS, Polres dan

Kajari setempat, melimpahkan pembimbingan dan pengawasan, dalam hal narapidana di luar wilayah kerja Bapas setempat dan Pengawasan oleh Bapas selama Pembinaan.

2. Kendala yang dihadapi Balai Masyarakat Kelas I Padang dalam Pemberian asimilasi bagi narapidana dalam rangka pelaksanaan integrasi untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 adalah hambatan internal yang meliputi keterbatasan klien dalam penggunaan teknologi informasi, kurangnya SDM Pembimbing Masyarakat serta sistem pelaksanaan daring yang terdapat kelemahan. Selain itu juga terdapat hambatan eksternal yang berasal dari lingkungan masyarakat yang kurang bisa menerima narapidana tersebut.

#### **Saran**

Adapun rekomendasi yang penulis sampaikan adalah: (a) diharapkan dengan dilaksanakannya asimilasi bagi narapidana dapat menekan laju pertumbuhan Covid-19 dan Lapas/Rutan dapat terhindar dari efek buruk Virus tersebut sehingga proses Masyarakat berjalan dengan lancar; (b) Agar pelaksanaan asimilasi bagi narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 yang dilakukan oleh Balai Masyarakat Kelas I Padang mendapat dukungan dari masyarakat dan pemerintah daerah setempat; (c) Agar pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan Pembimbing Masyarakat mendapat dukungan Materil dan Moril dari Pimpinan Instansi yang melaksanakan tugas; (d) Agar Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Masyarakat membuat suatu aplikasi agar mempermudah dalam pelaporan dan bimbingan Klien Masyarakat Balai Masyarakat sehingga aplikasi tersebut dapat terintegrasi

dengan Sistem Database Pemasarakatan (SDP).

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ekaputra, Mohammad. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana, Edisi 2*. Medan: USU Press.
- [2] Friedman, Lawrence M. (2009). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial, Penerjemah: M. Khosim, diterjemahkan dari buku Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective (New York: Russel Sage Foundation, 1975)*. Bandung: Nusa Media.
- [3] Poernomo, Bambang. (1985). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- [4] Priyatno, Dwidja. (2006). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- [5] Sahardjo. (1981). *Seluk Beluk Pemasarakatan*. Jakarta: Sinar Harapan.
- [6] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- [7] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- [8] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- [9] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- [10] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- [11] Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- [12] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- [13] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- [14] Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
- [15] Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
- [16] Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
- [17] Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 02.PK.07.03 Tahun 1997 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemasarakatan.
- [18] Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.19.PK.01.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

- 
- [19] Harefa, Safaruddin. *Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Yuridis, Volume 5, No. 2, 2020.
- [20] KABAR24, Menkumham: Pembebasan Napi Ditengah Pandemi Covid-19 Dilakukan Banyak Negara, <https://kabar24.bisnis.com/read/20200416/16/1227884/menkumham-pembebasan-napi-ditengahpandemi-covid-19-dilakukan-banyak-negara>[10/11/2020].

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

---

**ANALISIS PENGGUNAAN APLIKASI SIPBOS DALAM PENGELOLAAN DANA BOS  
DI KECAMATAN BINTAN TIMUR****Oleh****Nurfitri Zulaika<sup>1)</sup>, Ulfa Oktavani Nasution<sup>2)</sup> Ika Rani Kusuma Dewi<sup>3)</sup> Muhammad Isa  
Alamsyahbana<sup>4)</sup> Ranti Utami<sup>5)</sup>**<sup>1,2,3,4,5</sup>**Jurusan Akuntansi, STIE Pembangunan****Jalan Raja Haji Fisabilillah No. 34 Tanjungpinang, telpon: (0771) 7330838****Email: [nurfitrizulaika@gmail.com](mailto:nurfitrizulaika@gmail.com), [ulfaoktavani4289@gmail.com](mailto:ulfaoktavani4289@gmail.com), [ikarani569@gmail.com](mailto:ikarani569@gmail.com),  
[albanapengusahamuda@gmail.com](mailto:albanapengusahamuda@gmail.com), [ranti@stie-pembangunan.ac.id](mailto:ranti@stie-pembangunan.ac.id)****Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan Aplikasi SIPBOS dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) pada sekolah dasar di Kecamatan Bintan Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi. Pengolahan data dilakukan dengan teknik triangulasi, dengan melihat hasil wawancara lalu dikaitkan dengan observasi di lapangan mengenai ketersediaan sarana prasarana, sumber daya manusia yang menjalankan aplikasi, cara kerja aplikasi, dan ketersediaan dokumen pengelolaan dana BOS hasil output dari aplikasi SIPBOS sehingga diperoleh hasil yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah ketersediaan jaringan internet yang kurang memadai pada beberapa sekolah di Kecamatan Bintan Timur dan keterbatasan operator aplikasi yang juga masih dirangkap oleh bendahara menjadi kendala dalam pengelolaan dana BOS. Sehingga ketersediaan dokumen pengelolaan dana BOS yang lengkap dari hasil pengolahan data dengan aplikasi SIPBOS tidak berimbas pada ketepatan waktu pengiriman laporan penggunaan dana BOS ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan. Dapat disimpulkan penggunaan Aplikasi SIPBOS dalam pengelolaan dana BOS harus didukung oleh sarana prasarana dan sumber daya manusia yang memadai, agar penggunaan aplikasi ini semakin efektif dalam pengelolaan dana BOS baik untuk ketersediaan dokumen pengelolaan maupun ketepatan waktu pengiriman laporan.

**Kata Kunci: Aplikasi SIPBOS, Pengelolaan Dana BOS, Sekolah Dasar****PENDAHULUAN**

Dana Bantuan Operasional Sekolah atau yang lebih dikenal dengan sebutan Dana BOS telah diberikan kepada seluruh Sekolah Dasar di wilayah Indonesia sejak Juli 2005 sampai dengan sekarang. Dengan tujuan untuk meningkatkan Angka bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah.

Berdasarkan (Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, 2018) tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Kabupaten / Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka pengelola Dana BOS mempunyai

tanggungjawab atau kewajiban dalam mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah dimulai dari proses penganggaran dan Partisipasi Kasar (APK) peserta didik Wajib Belajar 9 tahun.

Dengan adanya dana Bantuan Operasional Sekolah ini tentunya memaksa pihak pengelola sekolah baik itu sekolah negeri maupun swasta untuk dapat mengelola dengan baik perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban.

Kendala yang dihadapi sekolah – sekolah dasar dalam mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah adalah minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami dengan baik tentang pengelolaan keuangan bantuan ini.

Mengenai *progres* pengiriman laporan keuangan BOS, memasuki dua tahun penggunaan Aplikasi SIPBOS di Kabupaten Bintan ini, Kecamatan Bintan Timur masih mengalami keterlambatan penyampaian laporan keuangan BOS. Tahun 2018 mencapai 73 % dan tahun 2019 menurun 67 %. Jika dibandingkan dengan kecamatan – kecamatan yang lain pada Kabupaten Bintan, maka Kecamatan Bintan Timur merupakan kecamatan yang paling rendah persentase *progress* pengiriman laporan keuangan BOS ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi SIPBOS dalam pengelolaan dana BOS pada Sekolah – sekolah Dasar (SD) yang ada di Kecamatan Bintan Timur dengan rumusan masalah adalah bagaimana penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (SIPBOS) dalam pengelolaan dana BOS pada Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Bintan Timur, yang dilihat dari sisi ketersediaan sarana prasarana, sumber daya manusia, cara kerja aplikasi dan ketersediaan dokumen pengelolaan dana BOS.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi SIPBOS dalam pengelolaan dana BOS pada Sekolah – sekolah Dasar (SD) yang ada di Kecamatan Bintan Timur dengan judul “Analisis penggunaan aplikasi sipbos dalam pengelolaan dana bos di kecamatan bintan timur”.

## LANDASAN TEORI

### Pengertian Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi personalia dan non personalia bagi sekolah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik. (Juknis, 2015)<sup>1</sup>

### Tujuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Tujuan umum dari pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah :

1. Membantu pendanaan biaya operasi dan non personalia sekolah
2. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik yang diselenggarakan oleh masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah

### Sasaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Sasaran penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat penyelenggara pendidikan yang telah terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan sekolah yang diselenggarakan masyarakat yang telah memiliki izin operasional.

### Alokasi dan Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Menurut (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8, 2020)<sup>2</sup> tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah mengenai alokasi dana BOS Regular yang diberikan kepada sekolah penerima dihitung berdasarkan satuan biaya dikalikan jumlah peserta didik. Satuan biaya dana BOS Regular tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Rp 900.000,- ( sembilan ratus ribu rupiah ) per 1 ( satu ) orang peserta didik SD setiap 1 ( satu ) tahun;
- b. Rp 1.100.000,- ( satu juta seratus ribu rupiah ) per 1 ( satu ) orang peserta didik SMP setiap 1 ( satu ) tahun;
- c. Rp 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) per 1 ( satu ) orang peserta didik SMA setiap 1 ( satu ) tahun;
- d. Rp 1.600.000,- ( satu juta enam ratus ribu rupiah ) per 1 ( satu ) orang peserta didik SMK setiap 1 ( satu ) tahun;
- e. Rp 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) per 1 ( satu ) orang peserta didik SDLB, SMPLB, SMALB dan SLB setiap 1 ( satu ) tahun;



Berdasarkan (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3, 2019) tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Regular, waktu penyaluran dana BOS dilakukan tiap triwulan. Sedangkan bagi sekolah di daerah dengan geografis yang sulit dijangkau dilakukan tiap semester.

### **Pengertian Pengelolaan Dana BOS**

Pengelolaan Dana BOS menurut (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24, 2020)<sup>3</sup> tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan dan penganggaran Dana BOS, pelaksanaan Dana BOS, penatausahaan Dana BOS, pelaporan Dana BOS, pertanggungjawaban Dana BOS, dan pengawasan Dana BOS.

### **Aplikasi Sistem Pengelolaan Dana BOS (SIPBOS)**

Aplikasi SIPBOS merupakan sebuah program sistem informasi yang dirancang oleh sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan jasa teknologi informasi bernama CV RIQCOM BATAM, untuk mengelola perencanaan dan belanja sekolah dalam penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diawasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota setempat, yang akan membantu penyajian laporan keuangan yang tepat dan akurat.(www.riqcom.co.id, n.d.)<sup>6</sup>

Hal ini tentunya sejalan dengan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri Nomor 24, 2020)<sup>3</sup> tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah pada Bab VI mengenai Sistem Informasi Pengelolaan Dana BOS, yang mana dinyatakan dalam pasal 59 ayat 1 bahwa Pemerintah Daerah menerapkan Pengelolaan Dana BOS berbasis elektronik dalam rangka penyediaan informasi keuangan daerah, dan pada ayat 2 dinyatakan pengelolaan Dana BOS berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang – undangan.

Bagian – bagian yang terdapat dalam Aplikasi SIPBOS adalah sebagai berikut :

1. Master  
Pada fitur master terdapat menu instansi, organisasi, kecamatan, sekolah, program kegiatan, pegawai, dan rekanan. Fitur ini berfungsi untuk membuat *database* utama dari pembuatan laporan keuangan BOS.
2. Transaksi  
Berisi fitur mengenai pembuatan RKAS ( Rencana Kerja Anggaran Sekolah ), Anggaran Kas, Transaksi Bank, Kwitansi, SSP (Surat Setoran Pajak), SPTJ (Surat Pernyataan Tanggung Jawab), pengendalian Pertanggungjawaban, Surat Pengesahan Permintaan Belanja (SP2B), Aset.
3. Laporan  
Merupakan fitur yang berisi hasil ( *output* ) dari pengelolaan sistem informasi ini yang terdiri dari Laporan BOS dan Laporan Aset.
4. *Utility*  
Merupakan fitur tambahan untuk hak akses grup, *user* manajemen, *password* dan pengaturan.

### **Konsep Dasar Sistem Informasi**

Sebuah sistem informasi merupakan kumpulan dari perangkat keras dan perangkat lunak serta perangkat manusia yang akan mengolah dan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak tersebut. Selain itu data juga memegang peranan penting dalam sistem informasi. Data yang dimasukkan dalam sebuah sistem dapat berupa formulir, prosedur, dan bentuk data lainnya. (Kristanto, 2008)<sup>7</sup>

Selain itu sistem informasi juga dapat didefinisikan sebagai berikut :

1. Suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen – komponen dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan yaitu menyajikan informasi.
2. Sekumpulan prosedur organisasi yang pada saat dilaksanakan akan memberi informasi bagi pengambil keputusan

dan/atau untuk mengendalikan organisasi.

3. Suatu sistem di dalam organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi, mendukung operasi, bersifat manajerial, kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan – laporan yang diperlukan.

### **Komponen Sistem Informasi**

Untuk mendukung lancarnya suatu sistem informasi dibutuhkan beberapa komponen yang sifatnya sangat vital dalam sistem informasi. Komponen tersebut terdiri dari input, proses, output, teknologi, basis data dan kendali.

Secara rinci komponen – komponen sistem informasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Input

Input adalah semua data yang dimasukkan ke dalam sistem informasi. Dalam hal ini yang termasuk dalam input adalah dokumen – dokumen, formulir – formulir dan file – file. Dokumen dikumpulkan dan dikonfirmasi ke suatu bentuk sehingga dapat diterima oleh pengolah yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pengujian, dan pengkodean.

#### 2. Proses

Proses merupakan kumpulan prosedur yang akan memanipulasi input kemudian akan disimpan dalam basis data dan seterusnya akan diolah menjadi output yang akan digunakan oleh penerima. Komponen proses terdiri dari :

##### a. Manusia

Merupakan pemakai dari sistem informasi komputer sehingga harus mengerti bagaimana menggunakan komputer tersebut untuk memenuhi kebutuhan mereka.

##### b. Metode dan prosedur

Metode adalah teknik pengolahan data yang diterapkan pada sistem informasi, sedangkan prosedur adalah menggambarkan bagaimana

manusia sebagai pemakai sistem membuat keputusan.

##### c. Peralatan komputer

Komponen pendukung sistem informasi yang termasuk dalam peralatan komputer adalah monitor, printer, dan program komputer. Dalam program komputer terdapat sejumlah instruksi yang mengatur kerja dari perangkat keras dan memenuhi fungsi dari sistem informasi komputer.

##### d. Penyimpanan data

Berfungsi untuk penyimpanan data atau pencarian kembali file di masa yang akan datang.

#### 3. Output

Merupakan semua keluaran yang sudah diolah menjadi informasi yang berguna dan dapat dipergunakan oleh penerima. Komponen ini akan berhubungan langsung dengan pemakai sistem informasi dan merupakan tujuan akhir dari pembuatan sistem informasi. Komponen ini dapat berupa laporan – laporan yang dibutuhkan oleh pemakai sistem untuk memantau keberhasilan suatu organisasi.

#### 4. Teknologi

Merupakan bagian yang berfungsi untuk memasukkan input, mengolah input dan menghasilkan keluaran. Ada 3 bagian dalam komponen teknologi ini, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, dan perangkat manusia.

#### 5. Basis data

Merupakan kumpulan data – data yang saling berkumpul satu dengan yang lain disimpan dalam satu perangkat keras komputer dan akan diolah menggunakan perangkat lunak.

#### 6. Kendali

Merupakan tindakan yang diambil untuk menjaga sistem informasi tersebut agar bisa berjalan lancar dan tidak mengalami gangguan

### **Manfaat Sistem Informasi**

Manfaat dari sistem informasi adalah :

1. Organisasi menggunakan sistem informasi untuk mengolah transaksi – transaksi, mengurangi biaya, dan menghasilkan pendapatan sebagai salah satu produk atau pelayanan mereka.
  2. Bank menggunakan sistem informasi untuk mengolah cek – cek nasabah dan membuat berbagai rekening koran dan transaksi yang terjadi.
- Perusahaan menggunakan sistem informasi untuk mempertahankan persediaan pada tingkat paling rendah agar konsisten dengan jenis barang yang tersedia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang – orang yang diamati dalam suatu konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik. (Hamzah, 2019)<sup>4</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara terhadap pengelola dana BOS di sekolah dasar (Kepala Sekolah, Bendahara dan Operator SIPBOS ), observasi mengenai ketersediaan sarana prasarana, sumber daya manusia ( SDM ), cara kerja Aplikasi SIPBOS dan ketersediaan dokumen pengelolaan dana BOS hasil dari Aplikasi SIPBOS pada objek penelitian, serta dokumentasi resmi mengenai pengelolaan dana BOS dari hasil *output* Aplikasi SIPBOS

di Kecamatan Bintan Timur, situasi sosial yang menjadi objek penelitian adalah seluruh sekolah dasar (SD) yang terdapat di Kecamatan Bintan Timur berjumlah 15 (lima belas) sekolah dasar.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017)<sup>5</sup>. Maka sampel yang akan diambil oleh peneliti adalah pengelola BOS di seluruh sekolah dasar di Kecamatan Bintan

Timur. Yang terdiri dari Kepala Sekolah, Bendahara Dana BOS, dan Operator Aplikasi SIPBOS. Sehingga jumlah sampel pada penelitian ini berjumlah 45 orang (15 sekolah x 3 orang pengelola BOS ).

Teknik pengolahan data yang penulis lakukan terdiri dari reduksi data, penyajian data serta pengambilan kesimpulan.

Analisa data pada penelitian ini dilakukan penulis setelah mendapatkan data hasil wawancara dengan kepala sekolah, bendahara Dana BOS dan operator Aplikasi SIPBOS pada sekolah – sekolah dasar yang menjadi informan dalam penelitian ini. Penulis menggunakan teknik *triangulasi* dalam menganalisa data yang telah diperoleh dengan cara membandingkan hasil pengamatan pada saat berada di objek penelitian (sekolah dasar) dengan data hasil wawancara terkait penggunaan Aplikasi SIPBOS dalam pengelolaan laporan keuangan BOS; membandingkan hasil wawancara antara Kepala Sekolah, Bendahara Dana BOS dan Operator Aplikasi SIPBOS secara umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi atau terpisah; dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang terkait dengan hasil akhir pengelolaan dana BOS.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan sebuah aplikasi sistem informasi harus didukung dengan adanya sarana prasarana yang memadai agar dapat menunjang pelaksanaan penginputan data, pengolahan data hingga pencetakan data. Peralatan yang dibutuhkan dalam penggunaan aplikasi SIPBOS ini diantaranya laptop / komputer, printer dan jaringan internet dikarenakan aplikasi ini dijalankan secara online berbasis website.

Pada 15 sekolah dasar ( SD ) yang ada di Kecamatan Bintan Timur, sudah terpenuhi semua peralatan laptop maupun printer. Hanya ada 2 sekolah dasar yang masih mengalami kendala di jaringan internet pada sekolah. Dikarenakan letak geografis sekolah yang jauh dari jaringan telekomunikasi, yaitu SD Negeri 014 Bintan Timur yang berada di Wacopek dan SD Negeri 018 Bintan Timur yang berada di Batu Licin.

### **Sumber Daya Manusia (SDM ) yang Menjalankan Aplikasi**

Selain sarana prasarana yang berupa peralatan dan jaringan internet yang diperlukan dalam penggunaan aplikasi, keberadaan sumber daya manusia (SDM) yang menjalankan aplikasi SIPBOS ini juga menjadi hal penting. Ketersediaan operator aplikasi pada sekolah dasar sangat diperlukan untuk menjalankan sistem informasi ini hingga pada tahap penyelesaian laporan.

Di Kecamatan Bintang Timur seluruh sekolah memiliki operator Aplikasi SIPBOS. 2 sekolah dasar yang bendahara dana BOS juga menjabat sebagai operator aplikasi yaitu SD Negeri 009 Bintang Timur dan SD Negeri 018 Bintang Timur. Untuk 4 sekolah dasar, operator aplikasi SIPBOS merupakan guru kelas dan guru bidang studi yang diperbantukan sebagai operator, yaitu SD Negeri 002 Bintang Timur, SD Negeri 010 Bintang Timur, SD Negeri 012 Bintang Timur, dan SD Negeri 014 Bintang Timur. Sementara 9 sekolah dasar lainnya, operator aplikasi SIPBOS adalah dari tenaga administrasi honor sekolah, yaitu SD Negeri 003 Bintang Timur, SD Negeri 006 Bintang Timur, SD Negeri 007 Bintang Timur, SD Negeri 008 Bintang Timur, SD Negeri 011 Bintang Timur, SD Negeri 013 Bintang Timur, SD Negeri 015 Bintang Timur, SD Negeri 016 Bintang Timur dan SD Negeri 017 Bintang Timur.

Dari 15 operator aplikasi SIPBOS, yang bertugas dari tahun 2018 sejak awal diberlakukannya penggunaan Aplikasi SIPBOS sebanyak 13 operator, sementara 2 operator lainnya bertugas menjadi operator aplikasi SIPBOS yang baru di sekolah pada tahun 2019 yaitu operator SD Negeri 017 Bintang Timur, dan bertugas sebagai operator di tahun 2020 yaitu operator SD Negeri 018 Bintang Timur.

Untuk operator yang juga menjabat sebagai bendahara dana BOS tentunya mempunyai tantangan tersendiri dalam mengelola dana BOS, karena selain memiliki tugas utama sebagai guru

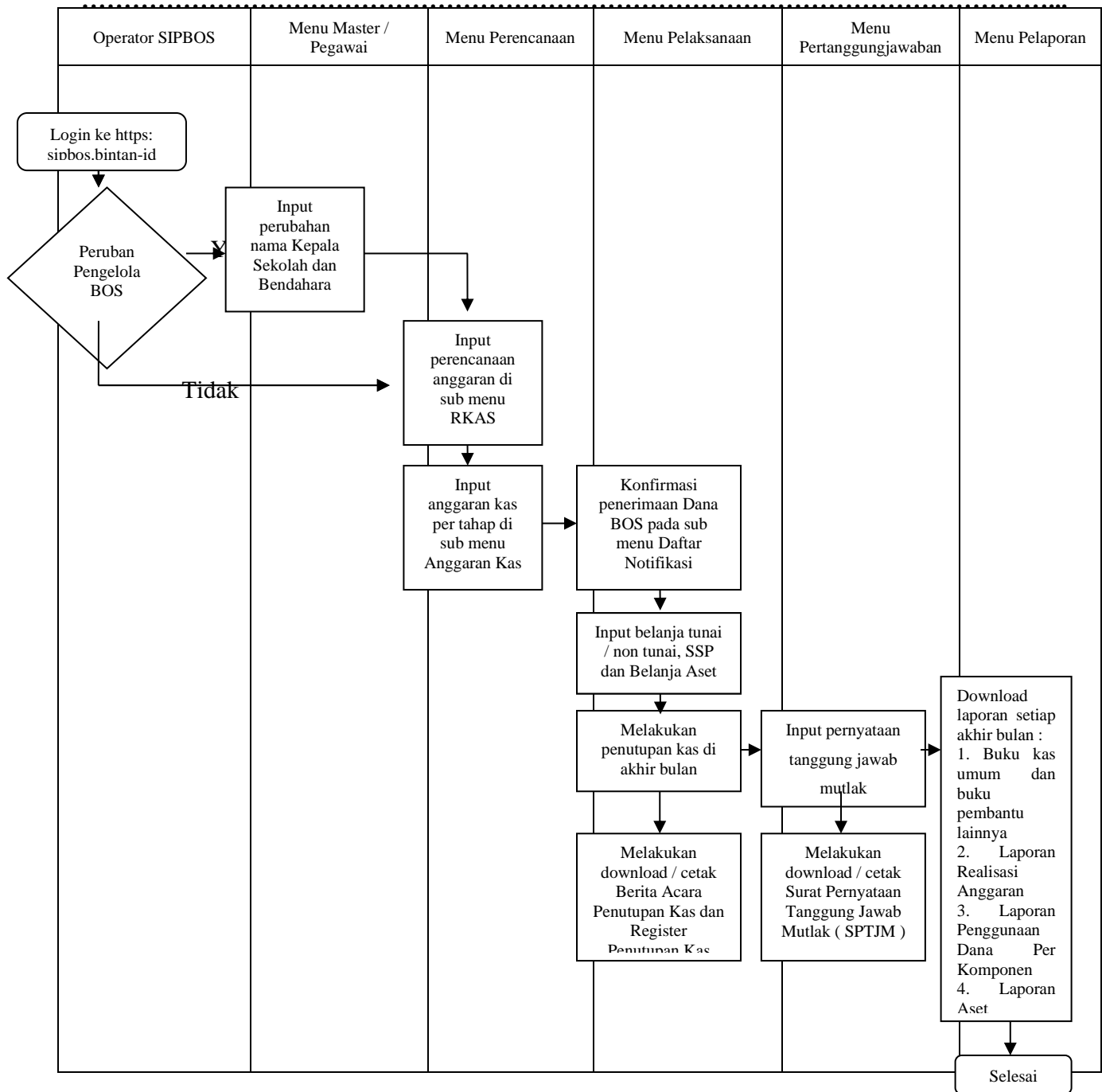
kelas / bidang studi juga mempunyai tugas tambahan sebagai bendahara dana BOS. Ditambah lagi pengerjaan input aplikasi yang juga harus dikerjakan tepat pada waktunya. Tentu dengan beban yang overload seperti ini, memberikan kendala bagi bendahara yang juga merangkap sebagai operator aplikasi SIPBOS, terutama dalam hal penyiapan dan pengiriman laporan. Karena harus membagi waktu antara pekerjaan sebagai guru kelas, sebagai bendahara dana BOS dan juga sebagai operator aplikasi SIPBOS.

Sementara untuk operator aplikasi SIPBOS yang ditugaskan tidak dari awal peluncuran aplikasi di tahun 2018 yaitu dari tahun 2019 – 2020, memiliki kendala dalam hal pengoperasian aplikasi SIPBOS. Karena operator yang baru bertugas harus menerima bimbingan dari operator yang lama atau belajar dari operator sekolah lainnya. Hal ini terjadi karena di sekolah tidak memiliki alur atau prosedur secara tertulis mengenai cara mengoperasikan Aplikasi SIPBOS yang bisa dipelajari oleh operator yang baru.

Tentunya dengan kendala yang ada dalam sumber daya manusia (SDM) yang menjalankan aplikasi SIPBOS ini juga akan mempengaruhi tingkat penyelesaian laporan pengelolaan dana BOS di sekolah.

### **Cara Kerja Aplikasi SIPBOS dalam Pengelolaan Dana BOS**

Cara kerja aplikasi SIPBOS disesuaikan dengan Pengelolaan Dana BOS berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana BOS pada Pemerintah Daerah yang meliputi kegiatan perencanaan dan penganggaran Dana BOS, pelaksanaan dan penatausahaan Dana BOS, pelaporan Dana BOS, pertanggungjawaban Dana BOS dan pengawasan Dana BOS. Dan fitur yang digunakan dalam aplikasi telah sesuai dengan alur pengelolaan dana BOS. Dan penulis paparkan alur kerja Aplikasi SIPBOS seperti pada tabel.1 berikut.



**PENUTUP**  
**Kesimpulan**

1. Penggunaan aplikasi SIPBOS dalam pengelolaan dana BOS pada sekolah dasar di Kecamatan Bintan Timur harus didukung dengan ketersediaan sarana prasarana yang baik, terutama ketersediaan jaringan internet di sekolah dan sumber daya manusia yang

mengerjakan aplikasi SIPBOS agar dapat dikhususkan pada tugasnya.;

2. Cara kerja aplikasi SIPBOS telah sesuai dengan sistem pengelolaan dana BOS yang tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 mengenai Pengelolaan Dana BOS pada Pemerintah Daerah

**Saran**

1. Terkait dengan sarana prasarana yang ada dalam menunjang penggunaan aplikasi SIPBOS dalam pengelolaan dana BOS yang dilakukan secara online, diharapkan pihak sekolah agar lebih meningkatkan kualitas jaringan internet menjadi lebih baik.
2. Sedangkan untuk ketersediaan sumber daya manusia yang menjalankan aplikasi SIPBOS diharapkan agar pihak sekolah meminimalisir adanya rangkap tugas.;
3. Untuk memudahkan operator dan bendahara dalam melakukan proses pengiriman laporan penggunaan dana BOS ke laman website *bos.kemdikbud.go.id*, diharapkan penyedia aplikasi dapat menyediakan fitur tersendiri untuk lapor online ke website tersebut di atas dalam menu aplikasi SIPBOS;
4. Untuk penelitian selanjutnya penulis merekomendasikan agar penelitian ini dapat dilanjutkan dengan metode penelitian yang berbeda, serta objek penelitian lain yang juga menggunakan aplikasi yang sama dalam pengelolaan dana BOS ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Petunjuk Teknis. (2015). Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar .
- [2] Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3. (2019). *Permendikbud no.3 Th.2019 Tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler*. PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH REGULER
- [3] Negeri, P. M. D. (2020). *PMDN NO 24 TAHUN 2020*
- [4] Hamzah, A. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Literasi Nusantara Abadi.
- [5] Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. ALFABETA.
- [6] [www.riqcom.co.id](http://www.riqcom.co.id). (n.d.). *Sistem Pengelolaan BOS ( SIPBOS )*. Diakses Pada Tanggal 23 April 2022, Pukul 17.30
- [7] Kristanto, A. (2008). *Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya*. Gava Media.

**RESPON PERTUMBUHAN TANAMAN KANGKUNG DARAT (*Ipomoea reptans* Poir) TERHADAP PEMBERIAN PUPUK ORGANIK DI LAHAN SAWAAH DESA KELONDONOM**

Oleh

Agus Burhan

Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian, Universitas Madako Tolitoli

Email: [agusprdtolis@yahoo.co.id](mailto:agusprdtolis@yahoo.co.id)

**Abstract**

The aim of this research is to Know the Growth Response of Kale Kale (*Ipomoea Reptans Poir*) Towards Organic Fertilizer Giving in Kelondom Village Rice Field. This research was conducted in Kelondom Village, Galang District, Tolitoli Regency. The time to carry out this research for three months from February to April 2020. This research was compiled using a Randomized Block Design (RBD) consisting of 5 levels, namely: A0 = No fertilizer (control), A1 = Dose of fertilizer 2 ml / liter , A2 = Dose of Fertilizer 3 ml / liter, A3 = Dose of Fertilizer 4 ml / liter, A4 = Dose of Fertilizer 5 ml / liter. Each treatment was repeated three times so that there were 15 study plots. If the results of analysis of variance show a real effect, then a further test will be conducted using the Honestly Significant Difference test (BNJ) at the 5% level. The results showed that the application of liquid organic fertilizer 5 ml / liter significantly affected plant height aged 1, 2, 3 and 4 weeks after planting, the number of leaves aged 1 and 2 weeks after planting, the length of leaves aged 1.2 and 4 weeks after planting , while at the age of 3 weeks after planting has a very significant effect on the number of leaves of kale. The application of liquid organic fertilizer 5 ml / liter significantly affects root volume, root length and plant wet weight.

**Keywords:** *Ground Kale, Liquid Organic Fertilizer, Fertilization*

**PENDAHULUAN**

Kangkung (*Ipomoea spp.*) merupakan salah satu sayuran daun yang paling populer di Asia Tenggara. Kangkung dikenal juga dengan '*swamp cabbage*', '*water convolvulus*', dan '*water spinach*'. Tanaman kangkung berbunga dengan warna yang beragam dari putih sampai merah muda, dan batangnya dari warna hijau sampai ungu. Daunnya merupakan sumber protein, vitamin A, besi dan kalsium. Panduan penanaman yang disajikan adalah berdasarkan kondisi dataran rendah di Taiwan. Beberapa penyesuaian diperlukan disesuaikan dengan kondisi iklim, tanah, musim, hama dan penyakit. Kangkung beradaptasi terhadap kondisi iklim dan tanah yang cukup beragam, akan tetapi memerlukan kelembaban tanah yang relatif tinggi untuk pertumbuhan yang optimum. Tanah dengan kandungan bahan organik tinggi lebih disukai.

Kangkung dapat memberikan hasil yang optimum pada kondisi dataran rendah Tropika dengan temperatur tinggi dan penyinaran yang pendek. Temperatur yang ideal berkisar 25 – 30°C, sedangkan dibawah 10 oC tanaman akan rusak. Ada dua jenis kangkung, yaitu kangkung darat (*Ipomoea reptans Poir*), berdaun sempit dan beradaptasi pada tanah yang lembab, serta dipanen hanya satu kali; dan kangkung air (*Ipomoea aquatica*) yang berdaun lebih lebar dan berbentuk panah. Jenis ini beradaptasi pada kondisi tergenang dan dipanen beberapa kali. Kangkung darat adalah salah satu tanaman hortikultura yang memiliki potensi pasar yang cukup besar. Upaya peningkatan produksi dan mutu yang tinggi umumnya petani masih mengandalkan pestisida sintetik yang berlebihan sehingga menyebabkan adanya residu yang membahayakan baik pada produsen,

konsumen maupun lingkungan selain itu menyebabkan biaya produksi menjadi tinggi. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan untuk menurunkan biaya produksi dan menekan serendah mungkin kandungan residu pestisida sintetik adalah dengan cara menerapkan budidaya sistem organik. Saat ini kangkung darat lebih banyak beredar di pasar-pasar komersial dibanding kangkung air karena budidaya kangkung air semakin sulit dengan banyaknya sungai yang tercemar selain itu jika memakai kolam membutuhkan biaya yang besar. Budidaya kangkung darat sangat mudah, karena sayuran ini bersiklus panen cepat dan relatif tahan hama. Karena itulah, harga kangkung dipasar relatif murah dibanding jenis sayuran lain. Untuk meningkatkan nilai tambah, kita bisa melakukan budidaya kangkung darat secara organik. Harga kangkung darat organik relatif lebih tinggi

#### LANDASAN TEORI

Kangkung darat (*Ipomoea reptans* Poir) adalah tanaman semusim atau tahunan yang merupakan sayuran daun yang penting di kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan. Sayuran kangkung mudah dibudidayakan, berumur pendek dan harga relatif murah. Karena itu, kangkung merupakan sumber gizi yang baik bagi masyarakat secara umum. Konsumsi kangkung mulai digemari oleh masyarakat terbukti dengan sadarnya masyarakat peduli dengan gizi yang terkandung disayuran kangkung. Kandungan gizi kangkung cukup tinggi terutama vitamin A, vitamin C, zat besi, kalsium, potasium, dan fosfor (Sofiari, 2009).

Daya tarik budidaya tanaman kangkung darat terletak pada teknik budidayanya beserta cara pengelolaannya. Salah satu faktor budidaya yang perlu diperhatikan adalah pemberian unsur hara atau pemupukan untuk menyuburkan tanaman, misalnya dengan penggunaan pupuk kandang dan pupuk cair (Haryoto, 2009)

Kangkung dapat tumbuh dan berproduksi baik di dataran rendah sampai dataran tinggi (pegunungan). Tanaman kangkung cocok ditanam pada tanah bertekstur liat berpasir dengan struktur tanah yang agak remah. Selain itu, tanaman kangkung membutuhkan tanah datar bagi pertumbuhannya, sebab tanah yang memiliki kelerengan tinggi tidak dapat mempertahankan kandungan air secara baik (Azizah, 2012).

Pupuk merupakan bahan yang mengandung sejumlah nutrisi yang diperlukan bagi tanaman. Pemupukan adalah upaya pemberian nutrisi kepada tanaman guna menunjang kelangsungan hidupnya. Pupuk dapat dibuat dari bahan organik ataupun anorganik. Pemberian pupuk perlu memperhatikan kebutuhan tumbuhan, agar tumbuhan tidak mendapat terlalu banyak zat makanan atau terlalu sedikit karena dapat membahayakan tumbuhan. Pupuk dapat diberikan lewat tanah ataupun disemprotkan ke daun. Sejak zaman purba sampai saat ini pupuk organik diketahui banyak dimanfaatkan sebagai pupuk dalam sistem usahatani (Sutejo, 2002).

Menurut Sutiyoso (2003) pupuk cair adalah pupuk yang berbentuk cairan, dibuat dengan cara melarutkan kotoran ternak, daun jenis kacang-kacang dan rumput jenis tertentu ke dalam air.

Pupuk organik cair adalah jenis pupuk berbentuk cair tidak padat mudah sekali larut pada tanah dan membawa unsur-unsur penting untuk pertumbuhan tanaman. Pupuk organik cair mempunyai banyak kelebihan diantaranya, pupuk tersebut mengandung zat tertentu seperti mikroorganisme jarang terdapat dalam pupuk organik padat dalam bentuk kering. Pupuk organik cair apabila dicampur dengan pupuk organik padat, dapat mengaktifkan unsur hara dalam pupuk organik padat (Syefani dkk, 2003)

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini di laksanakan di Desa Kelondom, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli. Adapun waktu pelaksanaan penelitian



ini selama tiga bulan mulai dari bulan Februari sampai April 2019. Penelitian ini disusun dengan menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) yang terdiri dari 5 taraf perlakuan yaitu :A0 = Tanpa pupuk (kontrol), A1 = Dosis pupuk 2 ml/liter, A2 = Dosis Pupuk 3 ml/liter, A3 = Dosis Pupuk 4 ml/liter, A4 = Dosis Pupuk 5 ml/liter. Masing-masing perlakuan di ulang sebanyak 3 kali sehingga terdapat 15 petak penelitian. Apabila hasil analisis sidik ragam menunjukkan pengaruh nyata, maka akan dilakukan uji lanjut dengan menggunakan uji Beda Nyata Jujur (BNJ) pada taraf 5%.

Peubah yang diamati dalam penelitian ini adalah:

1. Tinggi Tanaman. Tinggi tanaman diukur 2 minggu setelah pindah tanam, dilakukan dari leher akar sampai titik tumbuh tanaman dengan menggunakan mistar.
2. Jumlah Daun. Jumlah Daun diukur 2 minggu setelah pindah tanam pada setiap sampel dari tiap plot, pengukuran dilakukan pada pangkal batang sampai ujung daun. Interval pengukuran 1 minggu.
3. Panjang daun. Panjang daun diukur 2 minggu setelah tanam pengukuran dilakukan pada pangkal batang sampai ujung daun. Interval pengukuran 1 minggu.
4. Volume Akar, pengukuran dilakukan pada akhir penelitian dengan menggunakan gelas ukur.
5. Berat segar tanaman, pengukuran dilakukan pada akhir penelitian dengan menimbang keseluruhan sampel tanaman.
6. Berat kering tanaman. Berat kering dihitung dengan menimbang masing-masing sampel tanaman setelah dilakukan pengovenan selama 24 jam dengan suhu 60 0c.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### Tinggi Tanaman

Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan pupuk organik cair berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman kangkung pada umur 1, 2 dan 3 minggu setelah tanam, sedangkan pada umur 4 minggu setelah tanam berpengaruh sangat nyata terhadap tinggi tanaman. Rata-rata pertumbuhan tinggi tanaman di sajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Tinggi tanaman Kangkung umur 1-4 MST**

Perlakuan	Umur Tanaman (MST)			
	1	2	3	4
A0	7,17 ab	11,17 a	19,00 a	37,00 a
A1	5,83 a	11,83 a	21,33 ab	35,00 a
A2	7,67 ab	13,50 ab	23,67 ab	34,33 a
A3	6,33 ab	13,17 ab	24,67 ab	41,00 ab
A4	8,17 b	14,00 b	25,00 b	41,33 b
BNJ 5%	0,93	1,04	2,14	2,43

Ket :Angka yang ditandai oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata pada taraf uji BNJ 5%

Hasil penelitian menunjukan bahwa perlakuan dosis pupuk Organik cair 5 ml/liter memperlihatkan tinggi tanman kangkung paling tinggi pada umur 1 MST yaitu (A4) 8,17 cm berbeda nyata dengan perlakuan (A1) yaitu 5,83cm, berbeda tidak nyata dengan perlakuan lainnya. Begitu pula pada umur 2 MST perlakuan pupuk organik cair 5 ml/liter memperlihatkan tinggi tanaman paling tinggi yaitu (A2) 14,00 cm berbeda nyata dengan tanpa perlakuan (A0) dan (A1) berbeda tidak nyata dengan perlakuan (A2) dan (A3). Demikian pula pada umur 3 MST perlakuan pupuk organik cair 5 ml/liter memperlihatkan tinggi tanaman paling tinggi yaitu (A4) 25,00 cm berbeda nyata dengan tanpa perlakuan (kontrol) berbeda tidak nyata dengan perlakuan (A1), (A2) dan (A3). Sedangkan pada umur 4 MST perlakuan pupuk organik cair 5 ml/liter juga memperlihatkan tinggi tanaman paling tinggi yaitu (A4) 41,33 cm berbeda nyata dengan perlakuan (A0), (A1) dan (A2) berbeda tidak nyata dengan perlakuan (A3).

**Jumlah Daun**

Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan pupuk organik cair berpengaruh nyata terhadap jumlah daun tanaman kangkung pada umur 1 dan 2 minggu setelah tanam. sedangkan pada umur 3 dan 4 minggu setelah tanaman tidak berpengaruh terhadap jumlah daun tanaman kangkung. Rata-rata jumlah daun tanaman kangkung pada berbagai perlakuan pupuk organik cair umur 1 dan 2 MST di sajikan pada Tabel 2.

**Tabel 2. Jumlah daun tanaman Kangkung umur 1-2 MST**

Perlakuan	Umur Tanaman (MST)	
	1	2
A0	7,67 a	21,67 a
A1	7,67a	22,33 ab
A2	8,00 ab	24,33 ab
A3	8,67 ab	24,33 ab
A4	9,33 b	24,67 b
BNJ 5%	0,17	1,38

Ket : Angka yang ditandai oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata pada taraf uji BNJ 5%

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan dosis pupuk Organik cair 5 ml/liter memperlihatkan jumlah daun tanman kangkung paling banyak pada umur 1 MST yaitu (A2) 9,00 helai, berbeda nyata dengan perlakuan (A0) dan (A1). berbeda tidak nyata dengan perlakuan (A2) dan (A3). Begitu pula pada umur 2 MST perlakuan pupuk organik cair 5 ml/liter memperlihatkan jumlah daun tanaman paling banyak yaitu (A4) 24,67 helai berbeda nyata dengan perlakuan (A0) tetapi berbeda tidak nyata dengan perlakuan (A1), (A2) dan (A3).

**Panjang Daun**

Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan pupuk organik cair berpengaruh nyata terhadap panjang daun tanaman kangkung pada umur 1,2 dan 4 MST. sedangkan pada umur 3 MST berpengaruh sangat nyata terhadap panjang daun tanman kangkung. Rata-rata panjang daun tanaman

kangkung pada berbagai perlakuan pupuk organik cair di sajikan pada Tabel 3.

**Tabel 3. Rata-rata Panjang Daun umur 1 sampai 4 MST**

Perlakuan	Umur Tanaman (MST)			
	1	2	3	4
A0	3,67 a	7,83 a	9,77 a	12,83 ab
A1	3,83 a	5,83 a	10,17 ab	12,17 ab
A2	4,27 ab	5,83 a	8,60 a	10,50 a
A3	4,43 ab	8,17 ab	10,50 ab	13,17 ab
A4	5,17 b	8,50 b	11,83 b	13,83 b
BNJ 5%	0,60	1,14	0,82	1,25

Ket : Angka yang ditandai oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata pada taraf uji BNJ 5%

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan dosis pupuk Organik cair 5 ml/liter memperlihatkan panjang daun tanman kangkung pada umur 1 MST daun terpanjang yaitu (A4) 5,17 cm berbeda nyata dengan perlakuan (A0) dan (A1) tetapi berbeda tidak nyata dengan perlakuan (A2) dan (A3). Begitu pula pada umur 2 MST perlakuan pupuk organik cair 5 ml/liter memperlihatkan panjang daun tanaman terpanjang yaitu (A4) 8,50 cm berbeda nyata dengan perlakuan (A2) tetapi berbeda tidak nyata dengan perlakuan (A0), (A1) dan (A3). Begitu pula pada umur 3 MST perlakuan pupuk organik cair 5 ml/liter memperlihatkan panjang tanaman terpanjang yaitu (A4) 11,83 cm berbeda nyata dengan perlakuan (A0) dan (A3) tetapi berbeda tidak nyata dengan perlakuan (A1) dan (A2). Demikian pula pada umur 4 MST perlakuan pupuk organik cair 5 ml/liter juga memperlihatkan panjang tanaman terpanjang yaitu (A4) 13,83 cm berbeda nyata dengan tanpa perlakuan (kontrol) tetapi berbeda tidak nyata dengan perlakuan lainnya.

**Volume Akar**

Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan pupuk organik cair berpengaruh sangat nyata terhadap volume akar tanaman kangkung. Rata-rata volume akar tanaman kangkung di sajikan pada Tabel 4.

**Tabel 4. Rata-rata Jumlah Volume Akar (ml)**

Perlakuan	Umur Tanaman
A0	116,67 ab
A1	82,67 a
A2	101,67 ab
A3	66,67 a
A4	121,67 b
BNJ 5%	25,56

Ket : Angka yang ditandai oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata pada taraf uji BNJ 5%

Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa pemberian pupuk organik 5 ml/liter memberikan pengaruh yang nyata terhadap pengamatan volume akar tanaman kangkung. Dimana perlakuan yang menghasilkan volume akar tertinggi adalah (A4) yaitu 121,67 ml, berbeda nyata dengan perlakuan (A3) dan (A1) tetapi berbeda tidak nyata pada perlakuan (A0) dan (A2).

#### Panjang Akar

Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan pupuk organik cair berpengaruh sangat nyata terhadap panjang akar tanaman kangkung. Rata-rata Panjangakar tanaman kangkung di sajikan pada Tabel 5.

**Tabel 5. Rata-rata Jumlah Panjang Akar (cm)**

Perlakuan	Umur Tanaman
A0	22,33 ab
A1	22,67 ab
A2	20,00 a
A3	20,67 a
A4	23,00 b
BNJ 5%	1,34

Ket : Angka yang ditandai oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata pada taraf uji BNJ 5%

Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa pemberian pupuk organik 5 ml/liter memberikan pengaruh yang nyata terhadap pengamatan panjang akar tanaman kangkung. Dimana perlakuan yang menghasilkan panjang akar tertinggi adalah (A4) yaitu 23,00 cm,

berbeda nyata dengan perlakuan (A3) dan (A2) tetapi berbeda tidak nyata pada perlakuan (A0) dan (A1).

#### Berat Segar

Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan pupuk organik cair berpengaruh sangat nyata terhadap berat segar tanaman kangkung. Rata-rata berat segar tanaman di sajikan pada Tabel 6.

**Tabel 6. Rata-rata berat segar (g)**

Perlakuan	Umur Tanaman
A0	106,69 a
A1	107,25 a
A2	113,27 ab
A3	118,60 ab
A4	119,38 b
BNJ 5%	

Ket : Angka yang ditandai oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata pada taraf uji BNJ 5%

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan pupuk Organik cair 5 ml/liter memberikan pengaruh yang nyata terhadap pengamatan berat segar tanaman. Dimana perlakuan yang menghasilkan berat segar tanaman terberat adalah terdapat pada perlakuan (A2) yaitu 119,38 g, berbeda nyata dengan perlakuan (A0) dan (A1) tetapi berbeda tidak nyata dengan perlakuan (A2) dan (A3).

#### Pembahasan

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa perlakuan pupuk organik berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman umur 1, 2 dan 3 minggu setelah tanam (MST) dan berpengaruh sangat nyata pada umur 4 minggu setelah tanam (MST). Hal ini diduga bahwa ketersediaan hara melalui pemberian pupuk organik cair mampu menunjang pertumbuhan vegetatif tanaman secara optimal. Ketersediaan unsur hara merupakan salah satu faktor lingkungan yang sangat menentukan laju pertumbuhan tanaman (Gardner et al, 1985). Sehingga dibutuhkan lebih banyak unsur hara esensial yang tersedia yang dapat diperoleh melalui peningkatan dosis pupuk cair. Selanjutnya

Purwowododo (1992) unsur hara nitrogen, fosfor dan kalium serta unsur mikro yang terkandung dalam pupuk organik cair akan meningkatkan aktivitas fotosintesis tumbuhan sehingga meningkatkan karbohidrat yang dihasilkan sebagai cadangan makanan.

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa perlakuan pupuk organik cair 5 ml/liter berpengaruh nyata terhadap jumlah daun tanaman kangkung pada umur 1 dan 2 minggu setelah tanam (MST). Hal ini diduga karena ketersediaan unsur hara merupakan salah satu faktor penting sebagai penunjang pertumbuhan dan perkembangan suatu tanaman. Pupuk organik cair memiliki banyak peran dan fungsinya. Pemberian pupuk organik cair harus memperhatikan konsentrasi atau dosis yang diaplikasikan terhadap tanaman. Berdasarkan beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian pupuk organik cair melalui daun memberikan pertumbuhan dan hasil tanaman yang lebih baik dari pada pemberian melalui tanah. Semakin tinggi dosis pupuk yang diberikan maka kandungan unsur hara yang diterima oleh tanaman akan semakin tinggi, begitu pula dengan semakin seringnya frekuensi aplikasi pupuk daun yang dilakukan pada tanaman, maka kandungan unsur hara juga semakin tinggi. Namun pemberian dengan dosis yang berlebihan justru akan mengakibatkan timbulnya gejala kelayuan pada tanaman oleh karena itu, pemilihan dosis yang tepat perlu diketahui oleh para peneliti maupun petani dan hal ini dapat diperoleh melalui pengujian-pengujian di lapangan (Abdul Rahmi 2007).

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa perlakuan pupuk organik cair 5 ml/liter berpengaruh nyata terhadap panjang daun tanaman kangkung pada umur 1, 2, 3 dan 4 minggu setelah tanam (MST).

Peningkatan tinggi tanaman, jumlah daun, panjang daun merupakan proses pertumbuhan vegetatif akibat bertambahnya ukuran dan jumlah sel. Meningkatnya ukuran dan jumlah sel tersebut dapat terjadi karena

proses fotosintesis berlangsung secara optimal sehingga dapat menghasilkan cadangan makanan sebagai energi dalam pembentukan sel-sel baru. Terjadinya proses ini juga dipengaruhi oleh penyerapan akar terhadap air dan unsur hara, dimana air sangat diperlukan tanaman terutama dalam proses transformasi bahan hasil fotosintesis ke bagian tanaman yang membutuhkan terutama titik tumbuh. Jika seluruh proses tersebut berlangsung dengan baik, maka pertumbuhan vegetatif seperti tinggi tanaman, jumlah daun, panjang daun akan semakin meningkat. Sejalan dengan pendapat, Ambarwati *dkk* (2007) pemberian pupuk organik berperan efektif terhadap pertumbuhan tanaman, selain itu pupuk organik juga dapat mendorong dan meningkatkan pembentukan klorofil daun dan pembentukan bintil akar pada tanaman leguminosae sehingga meningkatkan kemampuan fotosintesis tanaman dan penyerapan nitrogen dari udara.

Perlakuan pupuk organik cair 5 ml/liter berpengaruh nyata terhadap panjang akar, volume akar, dan berat segar tanaman. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi dosis pupuk yang diberikan pada tanaman maka pertumbuhan tanaman akan lebih baik. Hal ini sesuai dengan pendapat Rizqiani *dkk* (2007) semakin tinggi dosis yang diberikan pada tanaman maka kandungan unsur hara yang diterima oleh tanaman akan semakin tinggi, begitupula semakin seringnya frekuensi aplikasi pupuk yang dilakukan pada tanaman maka kandungan unsur hara juga semakin tinggi. Buckman *dkk* (1969) menambahkan bahwa perbedaan kemampuan tanaman dalam menyerap unsur hara antara lain ditentukan oleh perbedaan dalam sistem perakaran karena keuntungan dari perkembangan akar yang baik antara lain unsur hara yang diberikan cepat diserap oleh tanaman sebelum mengalami proses pencucian ataupun terfiksasi oleh tanah. Pupuk organik merupakan pupuk yang berasal dari sisa tanaman, hewan, atau manusia, seperti pupuk kandang, pupuk hijau, dan kompos yang berbentuk cair maupun padat. Pupuk organik bersifat bulky

dengan kandungan hara makro dan mikro rendah sehingga diperlukan dalam jumlah banyak. Keuntungan utama menggunakan pupuk organik adalah dapat memperbaiki kesuburan kimia, fisik, dan biologis tanah, selain sebagai sumber hara bagi tanaman. (Suriyadikarta, 2005)

Harjadi (1991) menambahkan ketersediaan unsur hara bagi tanaman merupakan salah satu faktor penting untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan tanaman karena unsur hara ini mempunyai peranan penting sebagai sumber energi dan penyusun struktural tanaman sehingga tingkat kecukupan hara berperan dalam mempengaruhi berat biomassa dari suatu tanaman. Tanpa tambahan suplai unsur hara dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman terganggu sehingga berat biomassa menjadi lebih rendah.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan tentang respon pertumbuhan tanaman kangkung darat (*Ipomoea reptans* Poir) terhadap pemberian pupuk organik dapat disimpulkan bahwa :

1. Pemberian pupuk organik cair 5 ml/liter berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman umur 1, 2, 3 dan 4 minggu setelah tanam, jumlah daun umur 1 dan 2 minggu setelah tanam, panjang daun umur 1,2 dan 4 minggu setelah tanam, sedangkan pada umur 3 minggu setelah tanam memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap jumlah daun tanaman kangkung.
2. Pemberian pupuk organik cair 5 ml/liter berpengaruh nyata terhadap volume akar, panjang akar dan berat basah tanaman

### Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan untuk penelitian selanjutnya Perlu diteliti lebih lanjut tentang pemberian dosis pupuk organik yang lebih bervariasi, sehingga akan diperoleh dosis yang optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ambarwati, E. dan Yuwono, N.W. 2007. Pengaruh dosis dan Frekuensi Pemberian Pupuk Organik Cair Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Buncis (*Phaseolus vulgaris* L.). Jurnal Ilmu Tanah dan Lingkungan.
- [2] Azizah, A. 2012. Produksi tanaman kangkung. <http://anisaulazizah.blogspot.com/2012/12/produksi-tanaman-kangkung>
- [3] Buckman, H.O. dan Brady, N.O. 1969. Ilmu Tanah. Terjemahan Sugiman. Baharta Karya Aksara. Jakarta.
- [4] Harjadi, S. (1991). Dasar-dasar Hortikultura. Jurusan Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor. 500 hal.
- [5] Haryoto. 2009. Bertanam Seledri secara Hidroponik. Yogyakarta: Kanisius.
- [6] Rizqiani, N.F.. 2007. Pengaruh dosis dan Frekuensi Pemberian Pupuk Organik Cair Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Buncis (*Phaseolus vulgaris* L.) Dataran Rendah. Jurnal Ilmu Tanah dan Lingkungan. melalui <http://blog.ac.id/puspit/files/2012/12/pupuk-cair.pdf>. (17/01/2013).
- [7] Suriyadikarta, (2005). Pupuk dan Pemupukan. CV. Simplek. Jakarta.
- [8] Sutejo, M.M. 2002. Pupuk dan Cara Pemupukan. Jakarta : Rineka Cipta.
- [9] Sofiari, E. 2009. Karakterisasi Kangkung (*Ipomoea reptans*) Varietas Sutera. Berdasarkan Panduan Pengujian Individual. Buletin Plasma Nutrafah
- [10] Syefani dan A. Lilia. 2003. Pelatihan Pertanian Organik. Malang : Fakultas Pertanian Unibraw. terhadap pertumbuhan dan produksi jagung manis. Skripsi fakultas pertanian UIR, pekanbaru.
- [11] Rukmana, R 1987. Budidaya Mentimun. Kanisius, Yogyakarta.
- [12] Samadi, 2002. Teknik Budidaya Mentimun. Deptan. Jakarta.

- 
- [13] Sukiam. 2012. Pengaruh bokhasi sekam padi dan pupuk NPK mutiara (15:15:15) terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman mentimun (cucumis sativus L) Skripsi fakultas pertanian UIR. Pekanbaru
- [14] Sumpena, 2001. Kiat Bercocok Tanam Sayuran Organic. Lembaga Sehat Dompot Dhuapa Republika, Jakarta.